Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

DINAS PERHUBUNGAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Renja ini, yang secara formal merupakan rujukan utama bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, mengangkat Visi dan Misi Kabupaten Mamuju Tengah . Dengan Visi dan Misi ini diharapkan dukungan sarana prasarana transportasi dan layanan transportasi yang nyaman dan berkelanjutan dapat diwujudkan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah.

Untuk mewujudkan tersebut, beberapa program kerja ditetapkan dalam Renja ini, dengan beberapa program diharapkan masyarakat dapat mengakses transportasi dengan nyaman, dalam arti selamat, aman, lancar, tertib dan teratur.

Demikian dokumen Renja ini kami sampaikan semoga dapat diterima, dilaksanakan dan mendapat tanggapan yang positif dari semua pihak.

Tobadak, Agustus 2023

Kepala Dinas Perhubungan

Drs.SIGIT DWI HASTONO
Pangkat : Pembina Utama Muda / Ivc
NIP. 19660913 199103 1 000

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang. 3

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 15

1.4. Sistematika Penulisan 15

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 17

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 17

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 32

2.4..... Revie w terhadap Rencana Kerja RKPD 34

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 48

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 48

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 49

3.3. Program dan Kegiatan 51

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 65

4.1 Program dan Kegiatan 65

BAB V. PENUTUP 75

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Prangkat Daerah s/d Tahun 2024 23

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah 31

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2024 36

Tabel T-C.33 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perhubungan 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir dan;
6. Penetapan.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas Dinas Perhubungan menyusun Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

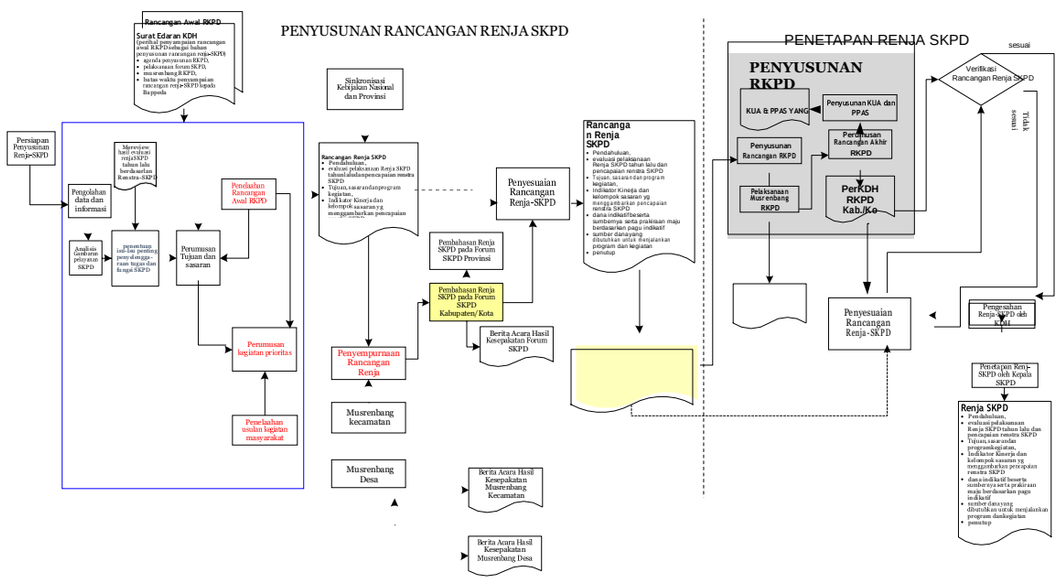
Rencana Kerja PD Tahun 2024 sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan :

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Penyusunan Renja dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rencana Kerja PD



Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2021 – 2026 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 -2024 dan RPJMN Tahun 2020 -2024, di mana RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2021 -2026 sebagai pedoman didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja)Perangkat Daerah.

Pada lingkup pemerintahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Gambaran tentang hubungan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2

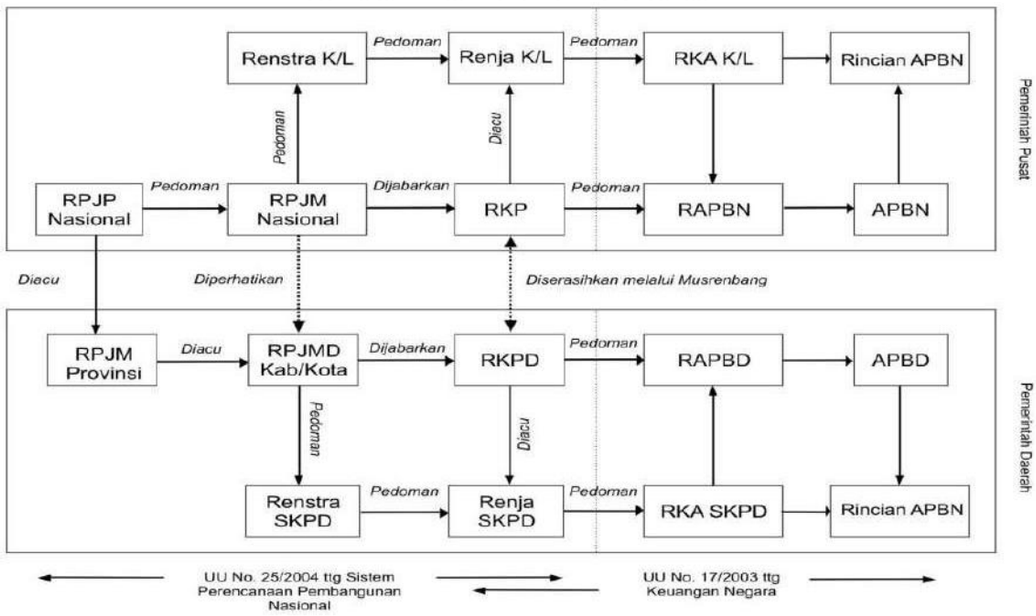
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2021 – 2026 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 -2024 dan RPJMN Tahun 2020 -2024, di mana RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2021 -2026 sebagai pedoman didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja)Perangkat Daerah.

Pada lingkup pemerintahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Gambaran tentang hubungan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 dan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-undang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023-2026

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah meliputi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berikut akan disampaikan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan :

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah/kabupaten.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah/kabupaten;
d. pelaksanaan administrasi dinas perhubungan kabupaten; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :

a. Sekretariat Dinas Perhubungan
   - Tugas : melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif

kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas perhubungan.

- Fungsi :
  1) penyusunan koordinasi rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelporan dinas perhubungan;
  2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
  3) penataan organisasi dan tata laksana;
  4) penyusunan koordinasi peraturan perundangundangan;
  5) pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
  6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretariat Dinas Perhubungan terdiri atas :
  1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksana urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah, evaluasi dan pelaporan dinas perhubungan.
  2) Subbagian Kepegawaian dan Umum, melaksanakan tugas melakukan urusan kepegawaian dan umum.

b. Bidang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan.
- Fungsi :
  1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
  2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
  3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
  4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Bidang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas :
  1) seksi Lalu Lintas, melaksanakan tugas membantu kepala bidang lalu lintas dan angkutan untuk melakukan urusan pembinaan, kelancaran, keamanan keselamatan lalu lintas dan pemakai jalan.
  2) seksi Angkutan, melaksanakan tugas melakukan penyiapanbahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/barang dalam Daerah Kabupaten/Kota, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan

perkotaan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

3) kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Prasarana dan Keselamatan.

- Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi.
- Fungsi :
  1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
  2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi.
  3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
  4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri atas :
  1) seksi Prasarana, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan terminal penumpang tipe c, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
  2) seksi Keselamatan, melaksanakan tugas malakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporandi bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, baik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan dijalan provinsi, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitas kelayakan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
  3) kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2 Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, Dinas Perhubungan berpedoman pada regulasi-regulasi terkait perencanaan pembangunan daerah, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

1.2.3 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan upaya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kota dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun);
2. Menyelaraskan Rencana Strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang.
- 1.6. Landasan Hukum.
- 1.7. Maksud dan Tujuan.
- 1.8. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.6. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.7. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.8. Review terhadap Rencana Kerja RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.4. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.5. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.6. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023. Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 2.406.368.376 (Dua Milyar Empat Ratus Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 2.339.737.270 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau sebesar 97,23% Secara detail pelaksanaan untuk program-program Dinas Perhubungan Tahun 2022 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka menunjang urusan pemerintah Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah dengan Indikator Kinerja presentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target program sebesar 100% dengan Realisasi Program sebesar 99%. Program ini terdiri atas 7 (Tujuh) Kegiatan 9 (sembilan) Sub Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung urusan internal Dinas Perhubungan yang bersifat rutin. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 16 (Enam belas) Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 144.290.823, terealisasi sebesar Rp. 141.941.538,- (98%). Anggaran yang tersedia ini untuk kebutuhan 7 (Tujuh) Kegiatan 23 (Duapuluh Tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 7 (Tujuh) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan perencanaan yang bersifat rutin sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini di capai dengan indicator output Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dibutuhkan dengan capaian indikator kinarja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 28.721.295,- terserap sebesar Rp. 25.245.275,- atau sebesar 94%. Permasalahan yang dihadapi untuk semetara ini belum ada yang mendasar hanya perubahan harga di alat tulis dengan solusi efisien penggunaan anggaran.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator output Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 5.475.904,-terserap sebesar Rp. 5.475.904,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi masi kurangnya dana solusinya penambahan dana.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian indikator kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp.5.666.640,- terserap sebesar Rp. 5.666.640,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi masi kurangnya dana solusinya penambahan dana.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan capaian indicator kinerja 100 % dengan anggaran Rp. 23.209.240,- terserap sebesar Rp. 20.209.240,- atau sebesar 94%. Permasalahan yang dihadapi untuk semetara ini belum ada yang mendasar hanya perubahan harga di alat tulis dengan solusi efisien penggunaan anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian indicator kinerja 100 % dengan anggaran Rp. 5.842.240,- terserap sebesar Rp. 5.842.240,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi untuk semetara ini belum ada yang mendasar hanya perubahan harga di alat tulis dengan solusi efisien penggunaan anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dengan capaian kinerja 100% dengan anggaran Rp. 28.564.440,- terserap sebesar Rp. 27.443.890,- atau sebesar 94%. Permasalahan untuk sementara ini masih kuranya Bimbingan Teknis terkait dokumen pelaporan solusinya untuk mengefektifkan kegiatan ini yaitu penambahan anggaran.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 100% dengan anggaran Rp. 37.842.627,- terserap sebesar Rp. 36.942.627,- atau sebesar 98%. Permasalahan yang

dihadapi untuk semetara ini masih terbatasnya data untuk mengefektifkan kegiatan ini yaitu penambahan anggaran.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan berfungsi untuk mendukung kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah diantaranya sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja 100% dengan anggaran Rp. 756.400.201,- terserap sebesar Rp. 731.746.154,- atau sebesar 96%.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian kinerja 100% dengan anggaran Rp. 38.282.050,- terserap sebesar Rp. 33.482.050,- atau sebesar 96%. Peremasalahan yang dihadapi untuk sementara ini belum ada sangat mendasar, hanya perubahan harga barang solusinya efisien pengguna anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan dengan capaian indicator sebesar 100% dengan anggaran Rp. 46.946.825,- terserap sebesar Rp. 46.466.725,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi untuk sementara ini belum ada.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1(satu) sub kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan administrasi kepegawaaian perangkat daerah diantaranya sebagai berikut:

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian indicator sebesar 100% dengan anggaran Rp. 136.239.238,- terserap sebesar Rp. 126.117.293,- atau sebesar 97%. Permasalahan yang dihadapi adanya pandemic covid sehingga kegiatan ini belum bisa efektif dan adanya perubahan harga barang solusi efisien pengguna anggaran.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang bersifat rutin diantaranya sebagai berikut:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan capaian indikator sebesar 100%

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.246.500,- terserap sebesar Rp. 21.246.500,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi adanya perubahan harga barang solusi efisien pengguna anggaran.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan capaian indicator sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 25.850.600,- terserap sebesar Rp. 25.772.470,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi adanya perubahan harga barang dengan solusi efisien pengguna anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan capaian indicator sebesar 100% dengan pagu anggaran sebasar Rp. 3.000.000,- serapan sebesar Rp3.000.000,- atau sebesar 100%. Permasalahan perubahan harga dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian indicator 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 162.186.460,- terserap sebesar Rp. 161.999.647,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi kekurangan dana solusi untuk mengefektifkan kegiatan perlunya penambahan anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang bersifat rutin diantaranya sebagai berikut:

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan dengan capaian indicator 100% dengan pagu sebesar Rp. 85.800.000,- serapan sebesar Rp. 85.800.000,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi untuk sementara tidak ada.
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan dengan capaian indicator 100% dengan pagu sebesar Rp. 111.980.000,- serapan sebasar Rp. 111.980.000,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi untuk sementara tidak ada.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 2(dua) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat rutin diantaranya sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Sub

kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan capaian indikator sebesar 100% dengan pagu anggaran sebasar Rp. 17.483.491,- serapan sebesar Rp. 17.277.500,- atau sebesar 100%. Permasalahan perubahan harga dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah orang yang terbayarkan dengan capaian kinerja 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 69.600.000,- serapan sebesar Rp. Rp. 69.600.000,- atau 100%. Permasalah yang dihadapi untuk sementara tidak ada.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 2(dua) sub kegiatan yang mendukung kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat rutin diantaranya sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Sub kegiatan ini dicapi dengan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya indicator capaian kinerja 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.49.396.490,- serapan sebesar Rp. 42.123.200,- atau sebesar 98%. Permasalahan perubahan harga dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya kegiatan ini dicapai dengan jenis peralatan kerja yang diperbaiki.dan dibayarkan pajaknya indicator capaian kinerja 100 % dengan pagu anggaran Rp. 7.700.000dengan serapan sebesar Rp. 7.700.000., atau sebesar 100% Permasalahan perubahan harga dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan dengan Indikator Kinerja Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota dengan target program sebesar 100% dengan Realisasi Program sebesar 99%. Program ini terdiri atas 2 (dua) Kegiatan 2 (dua) Sub Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung urusan urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 686.413., terealisasi sebesar Rp. 698,295,223,- (99%). Anggaran yang tersedia ini untuk

kebutuhan 2 (dua) Kegiatan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   - Pengawasan dan pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan kabupaten/kota. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Operasi Pengawasan dan pengendalian Efektifitas Pelaksanaan kebijakan Jalan Kabupaten/Kota dengan capaian indikator 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.509.026.022, serapan sebesar Rp. 502.061.522,- atau sebesar 99%. Permasalahan yang dihadapi untuk saat ini belum ada.
   - Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/kota. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Pemasangan Prasarana jalan dan di jalan kabupaten / kota yang Tersedia dengan capaian indicator sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp. 8.822.500, serapan sebesar Rp.8.822.500,- atau sebesar 99%. Permasalah yang dihadapi untuk sementara tidak ada .

Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di Dinas Perhubungan masih banyak kekuarangan dikarenakan kurangnya anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 99% dapat dikatakan dalam kategori sebagian berhasil.

Tabel T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ranwal Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Prangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Kinerja Program dan kegiatan (outcome)	Indikator Program Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3			4			5	6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan wajib bukan Pelayanan dasar																
2,15	**BIDANG PERHUBUNGAN**																
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**	4	Persen	13.238.569.808	**15**	**833.489.000**	**0,55**	**1.201.537.808**	**34**	**830.824.207**	**69%**	**0,60**	**1.160.000.000**	**2.824.313.207**	21%
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**		**Peresentase Pelaksanaan Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**			330.000.000							**0%**	25%	150.000.000	**150.000.000**	45%
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	dokumen	150.000.000	-	- - -			-	**-**	**0%**	1	150.000.000	**150.000.000**	100%
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3	laporan	180.000.000	-	-	-	-	-	**-**	**0%**			-	0%

2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	100	Persen	7.629.100.680	-	-	**20**	**865.100.680**	**22**	**328.763.207**	**38%**	20			**328.763.207**	4%
2.15.02.2.02.01	**Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun**	15	**unit**	3.814.550.340	-	-	**3**	**432.550.340**	**2**	168.169.000	**39%**	**3**	**1.392.000.000**		**1.560.169.000**	41%
	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan		Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	340	meter	600.000.000			60	150.000.000			**0%**	60	1.122.000.000		**1.122.000.000**	187%
	Pengadaan LPJU (Lampu penerang jalan umum)		Jumlah LPJU (Lampu penerang jalan umum) yang terpasang	124	unit	2.622.000.000			10	230.000.000	7	130.900.000	**57%**	60	150.000.000		**280.900.000**	11%
	pengadaan Rambu-rambu		Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	240	unit	592.550.340			15	52.550.340	13	29.694.207	**57%**	50	120.000.000		**149.694.207**	25%
2.15.02.2.02.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**13**	**Paket**	**764.000.000**	**0**	-	**1**	**64.000.000**	**0**	-	**0%**	**3**	**175.000.000**		-	0%
	Pengadaan Zoss (Zona Selamat Sekolah)		Jumlah Zoss yang terpasang	9	Paket	564.000.000	**0**	-	1	64.000.000	**0**	-	**0%**	2	125.000.000		-	0%
	Pengadaan Rass		Jumlah Rass yang terpasang	4	Paket	200.000.000	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0%**	1	50.000.000		-	0%
	Pemeliharaan rambu-rambu lalulintas darat																	0%
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		**Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	100	persen	5.500.000.000								33	Persen		-	0%
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	4	dokumen	500.000.000								2	250.000.000		**250.000.000**	50%
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2	unit	5.000.000.000											-	0%
2. 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**PersentaseKeterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	100	Persen	200.000.000	**0**	-	**0**	-				25	Persen		-	0%
2.15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	orang	200.000.000	**0**	-	**0**	-				2	50.000.000		**50.000.000**	25%

																	-	#DIV/0!
2.15.02.2,06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	100	Persen	1.149.469.128	6	186.137.000	**19**	**186.437.128**	**12**	**502.061.000**	**269%**	19			**688.198.000**	60%
2.15.02..2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	75	Laporan	120.000.000								15	30.000.000			0%
2.15.02..2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	66	Laporan	1.149.469.128	6	186.137.000	12	186.437.128	12	502.061.000	**269%**	12	240.758.000		**928.956.000**	81%
2.15.02.2,09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Presentase Keterpenuhaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	100	persen	4.310.000.000	1	512.158.000	-	-	-	-	-	25 Persen	1.160.000.000		**1.672.158.000**	39%
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	8	unit	4.310.000.000	1	512.158.000	0	-	0	-	**0%**	3	1.160.000.000		**1.672.158.000**	39%
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		ersentase Pelakasanaan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	persen	150.000.000	0	-	**100**	**150.000.000**	**0**	-	**0%**				-	0%

	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dok	150.000.000	0	-	2	150.000.000	0	-	**0%**				**#VALUE!**	#VALUE!
2 .15. 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**Rasio konektvitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten/Kota**	100	Persen	2.154.950.000	**3**	**461.215.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0%**	20 Persen			**461.215.000**	21%
2 .15. 03. 2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**		**Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	100	persen	2.154.950.000	3	461.215.000	-	-	-	-	-	19 Persen	690.900.000		**1.152.115.000**	53%
2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	16	unit	2.154.950.000	3	461.215.000	0	-	-	-	**0%**	3	690.900.000		**1.152.115.000**	53%
2,15,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	100	persen	11.388.777.759	**329**	**1.833.189.000**	**42**	**1.896.031.365**	**668**	**1.660.678.000**	**88%**	**44**			**3.493.867.000**	31%
2,15,01,2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100	persen	777.931.906	**10**	**141.939.000**	**15**	**138.626.400**	**9**	**126.825.000**	**91%**	**15%**			**268.764.000**	35%
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dok	166.690.156	3	38.927.000	2	27.300.000	2	25.246.000	**92%**	2	28.838.000		**93.011.000**	56%
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	23.481.350	1	3.963.000	1	5.095.000	1	5.476.000	**107%**	1	4.162.000		**13.601.000**	58%
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	dok	25.913.400	1	4.163.000	1	5.371.400	1	5.666.000	**105%**	1	4.590.000		**14.419.000**	56%

2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPDumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	123.426.000	1	19.271.000	1	22.337.000	1	20.209.000	**90%**	1	23.454.000		**62.934.000**	51%
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	25.653.000	1	4.248.000	1	5.461.000	1	5.842.000	**107%**	1	4.685.000		**14.775.000**	58%
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	166.314.000	2	28.545.000	2	30.099.000	2	27.443.000	**91%**	2	31.603.000		**87.591.000**	53%
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	246.454.000	1	42.822.000	1	42.963.000	1	36.943.000	**86%**	1	47.212.000		**126.977.000**	52%
2.15.01.2.05	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	persen	5.588.084.518	**19**	**1.131.170.000**	**16,7**	**1.014.327.518**	**14**	**811.694.000**	**80%**	**16,7**			**1.942.864.000**	35%
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	Orang	5.138.820.833	12	1.048.688.000	11	926.004.833	11	731.746.000	**79%**	11	1.053.204.000		**2.833.638.000**	55%
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	dok	199.698.000	1	35.118.000	1	40.808.000	1	33.482.000	**82%**	1	37.808.000		**106.408.000**	53%

2,15,01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10	dok	249.565.685	6	47.364.000	2	47.514.685	2	46.466.000	**98%**	2	49.889.000		**143.719.000**	58%
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**1.385.295.727**	**5**	**130.296.000**	**17**	**204.325.727**	**96**	**175.662.000**	**86%**	**17**			**305.958.000**	22%
2.15.01..2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jersedianya Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	190	psng	95.000.000	0	-	95	47.500.000	90	45.045.000	**95%**	-	-		**#VALUE!**	#VALUE!
2.15. 01..2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Orang	268.190.000	0	-	2	10.000.000	1	4.500.000	**45%**	3	50.534.000		**#VALUE!**	#VALUE!
2.15.01..2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	725	Orang	765.305.727	5	130.296.000	145	146.825.727	5	126.117.000	**86%**	145	150.849.000		**407.262.000**	53%
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	107	org	256.800.000	0	-			0	-	**0%**	25	60.000.000		**#VALUE!**	#VALUE!
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**1.246.807.421**	**189**	**109.963.000**	**16,7**	**158.935.720**	**434**	**212.017.000**	**133%**	16,7			**321.980.000**	26%
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	27.078.000	4	4.987.000	4	5.204.000			**0%**	4	5.204.000		**10.191.000**	38%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	84.500.000	1	1.500.000	2	15.500.000	2	21.246.000	**137%**	3	25.500.000		**48.246.000**	57%

2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35	Paket	126.498.701	4	16.480.000	6	19.788.000	6	25.772.000	**130%**	7	26.027.000		**68.279.000**	54%
2.15.01.2.06.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	17.500.000	110	2.950.000	12	3.000.000	120	3.000.000	**100%**	12	3.500.000		**9.450.000**	54%
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1892	Laporan	991.230.720	70	84.046.000	306	115.443.720	306	161.999.000	**140%**	306	135.787.000		**381.832.000**	39%
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**persen**	**1.265.000.000**	**2**	**183.260.000**	**18**	**216.000.000**	**2**	**197.780.000**	**92%**	18			**381.040.000**	30%
2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	unit	480.000.000	1	63.360.000	1	96.000.000	1	85.800.000	**89%**	1	96.000.000		**245.160.000**	51%
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	unit	785.000.000	1	119.900.000	1	120.000.000	1	111.980.000	**93%**	1	150.000.000		**381.880.000**	49%
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**500.434.065**	**87**	**82.599.000**	**17**	**97.187.000**	**87**	**86.877.000**	**89%**	17			**169.476.000**	34%
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180	Laporan	152.434.065	3	12.999.000	36	27.587.000	3	17.277.000	**63%**	36	28.966.000		**59.242.000**	39%

2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	420	Laporan	348.000.000	84	69.600.000	84	69.600.000	84	69.600.000	**100%**	84	69.600.000		**208.800.000**	60%
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**625.224.122**	**17**	**53.962.000**	**17**	**66.629.000**	**26**	**49.823.000**	**75%**	17			**103.785.000**	17%
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50	unit	585.349.122	9	47.262.000	10	58.654.000	10	42.123.000	**72%**	10	125.329.000		**214.714.000**	37%
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	unit	39.875.000	8	6.700.000	16	7.975.000	16	7.700.000	**97%**	16	7.975.000		**22.375.000**	56%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan baik dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat kita gambarkan kinerjanya adalah terkait Indikator Kinerja Kunci Urusan pemerintah bidang perhubungan, sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan pemerintah bidang perhubungan belum memiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Sedangkan Layanan Urusan Wajib Non Dasar salah satu di dalamnya Urusan Perhubungan terkait Indikator Kinerja Kunci Urusan pemerintah Dalam hal ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Indikator Kinerja OPD Sesuai Permendagri No.18 tahun 2020

IKK Outcome		Target						Capaian	
		2021	2022	2024	2024	2025	2026	2021	2022
Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota									
1	IK1 (angkutan jalan) = jumlah trayek yang dilayni (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)	28,82%	32,94%	32,94%	32,94%	32,94%	32,94%	28,82%	25,09%
2	IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)	8,25%	8,25%	9,75 %	9,75 %	11,25%	11,25%	8,25%	12,00%
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota									
V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota		0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,50	0,50

No.	IKK Output	Target						Capaian	
		2021	2022	2024	2024	2025	2026	2021	2022
Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota									
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	33%	33%	34%	35%	37%	37%	33%	33%
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala								
3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	5%	19%	19%	19%	19%	19%	5%	12%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Pelayanan Dinas Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Dinas Perhubungan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi diatas, kinerja pelayanan Dinas difokuskan pada pelayanan teknis di bidang Perhubungan, yaitu pelayanan Parkir, Penyediaan Alat dan Perlengkapan jalan dan Keselamatan Jalan, yang dapat meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah mempunyai wewenang :

1. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
2. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
3. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam Kab. Mamuju Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
4. Pembinaan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
5. Pengawasan dan pengendalian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
6. Penelitian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
7. Melakukan kegiatan lain dalam Bidang Perhubungan sesuai dengan petunjuk Bupati.

2.3.2 Permasalahan terkait Isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Mamuju tengah adalah :

1. Pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Dasar guna mendukung peningkatan kemandirian ekonomi daerah

2. Masih banyaknya muatan yang overload dan Over Dimensi
3. Mendorong terciptanya keselamatan lalu lintas jalan

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, dengan visi yaitu “Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai La’la Tassisara” Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi, yaitu:

Misi I : Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar

Mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibu kota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Tercakup juga upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dl mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.

Tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah mendukung pencapaian Misi I tersebut. Dimana Program-program yang dilaksanakan menyasar kepada pemenuhan akan Infrastruktur Dasar tersebut.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

- **Kekuatan (Strenghs)**
  1. Tersedianya pegawai
  2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
  3. Adanya kerjasama antar staf yang baik
  4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
  5. Adanya komitmen pimpinan
  6. Tersedianya dana penunjang
- **Kelemahan (weaknesses)**
  1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
  2. Rendahnya kemampuan professional aparatur di bidang perhubungan
  3. Tidak adanya Regulasi Tentang Tunjangn Lauk Pauk Petugas LLAJ
  4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian
  5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi
  6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut :

- **Peluang (Opportunity)**
  1. Letak geografis yang strategis
  2. Adanya dukungan dari Bupati dan wakil Bupati terpilih
  3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan
  4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan *stake holder* lainnya.
- **Tantangan (threat)**
  1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi
  2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik
  3. Belum Jelasnya ketetapan Peraturan RTRW yang terbaru
  4. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kelancar lalu lintas
  5. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas
  6. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimalTabel Tc-31 Review terhadap Rencana Kerja RKPD

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
2. Penyediaan gedung pengujian
3. Penyediaan Sarpras pengaman dan pengendali lalu lintas
4. Optimalisasi manajemen Rekayasa lalu lintas

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan daerah.

Adapun proses yang dilakuan terhadap review rencana awal dengan

renja (rencana kerja) yaitu proses perubahan terdapat perubahan target indikator program dikarenakan terdapat perubahan IKU pada dinas perhubungan hasil dari choacing bersama kemenpan pada bulan februari 2023.

Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumusan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Kinerja Program dan kegiatan (outcome)	Indikator Program Kegiatan (output)	2024			PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Kinerja Program dan kegiatan (outcome)	Indikator Program Kegiatan (output)	2024			Catatan Penting
					Target		Rp.					Target		Rp.	
	Urusan wajib bukan Pelayanan dasar							**Urusan wajib bukan Pelayanan dasar**							
2,15	**BIDANG PERHUBUNGAN**							**BIDANG PERHUBUNGAN**							
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**	**0,65**	**persen**	**2.397.758.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**	**18**	**persen**	**2.397.758.000**	
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**			**Peresentase Pelaksanaan Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	25	persen	60.000.000	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**			**Peresentase Pelaksanaan Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	25	persen	60.000.000	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				

2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	mateng	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Laporan	60.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	mateng	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Laporan	60.000.000	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	20	persen	457.000.000	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	20	persen	319.000.000	
					30	persen						0			
2.15.02.2.02.01	**Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun**	**3**	**unit**	**282.000.000**	**Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun**	**3**	**unit**	**144.000.000**	
	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kab. Mamuju Tengah		Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	60	meter	150.000.000	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kab. Mamuju Tengah		Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	60	meter	150.000.000	
	Pengadaan LPJU (Lampu penerang jalan umum)	Kec. Budong-Budong Kec. Pangale Kec. Tobadak		Jumlah LPJU (Lampu penerang jalan umum) yang terpasang	25	unit	-	Pengadaan LPJU (Lampu penerang jalan umum)	Kec. Budong-Budong Kec. Pangale Kec. Tobadak		Jumlah LPJU (Lampu penerang jalan umum) yang terpasang	30	unit	-	
	pengadaan Rambu-rambu	Kec. Topoyo, Kec. Tobadak, Kec. Budong-budong dan Kec. Pangale		Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	55	unit	132.000.000	pengadaan Rambu-rambu	Kec. Topoyo, Kec. Tobadak, Kec. Budong-budong dan Kec. Pangale		Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	60	unit	144.000.000	
2.15.02.2.02.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**3**	**Paket**	**175.000.000**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**3**	**Paket**	**175.000.000**	
	Pengadaan Zoss (Zona Selamat Sekolah)	Kec. Topoyo		Jumlah Zoss yang terpasang	2	Paket	125.000.000	Pengadaan Zoss (Zona Selamat Sekolah)	Kec. Topoyo		Jumlah Zoss yang terpasang	2	Paket	125.000.000	
	Pengadaan Rass	Kec. Topoyo		Jumlah Rass yang terpasang	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Rass	Kec. Topoyo		Jumlah Rass yang terpasang	1	Paket	50.000.000	

2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**			**Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	33	persen	250.000.000	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**			**Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	17	persen	2.000.000.000	
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Mamuju Tengah	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	2	dok	250.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Mamuju Tengah	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-	-	-	
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Mamuju Tengah	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	-	-	-	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Mamuju Tengah	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1	Unit	2.000.000.000	
2. 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**PersentaseKeterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	25	persen	50.000.000	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**PersentaseKeterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	25	persen	50.000.000	
2.15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Peningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Peningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	50.000.000	
2.15.02.2,06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	19	persen	270.758.000	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	19	persen	270.758.000	
2.15.02..2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15	Laporan	30.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15	Laporan	30.000.000	

2.15.02..2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	240.758.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	240.758.000	
2.15.02.2,09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**25**	**persen**	**1.260.000.000**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**13**	**persen**	**630.000.000**	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Budong-Budong Kec. Pangale	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	unit	1.260.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Budong-Budong Kec. Pangale	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	unit	630.000.000	
2 15 02 2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelakasanaan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**persen**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelakasanaan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**persen**		
2 15 02 2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				

2 15 02 2.16	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**33**	**persen**	**50.000.000**	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**33**	**persen**	**50.000.000**	
2 15 02 2.16 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	50.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	50.000.000	
2 .15. 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**Rasio konektvitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten/Kota**	**20**	**persen**	**901.350.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**Rasio konektvitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten/Kota**	**22**	**persen**	**121.350.000**	
2 .15. 03. 2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**			**Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**19**	**persen**	**901.350.000**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**			**Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**25**	**persen**	**121.350.000**	
2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Mamuju Tengah	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	3	unit	901.350.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Mamuju Tengah	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	4	unit	121.350.000	

2,15,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**44**	**persen**	**2.268.825.250**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**46**	**persen**	**2.364.276.956**	
2,15,01,2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**151.772.500**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17**	**Persen**	**167.183.156**	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dok	30.280.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dok	39.157.156	
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	4.370.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	4.807.000	
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dok	4.819.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dok	5.301.000	
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPDumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dok	24.627.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPDumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dok	25.858.000	

2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	4.919.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	5.165.000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	33184000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	34843000	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	49.573.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	52.052.000	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16,7**	**persen**	**1.142.792.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16,7**	**persen**	**1.142.792.000**	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	Orang	1.053.204.000	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	Orang	1.053.204.000	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	39.699.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	39.699.000	

2,15,01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	dok	49.889.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	dok	49.889.000	
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**291.183.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**339.152.000**	
2.15.01..2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Jersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Jersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95	psng	47.500.000	
2.15. 01..2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	75.534.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	66.061.000	
2.15.01..2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	145	Orang	150.849.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	145	Orang	158.391.000	
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27	org	64.800.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28	org	67.200.000	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	16,7	persen	283.493.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	16,7	persen	304.044.350	

2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	5.466.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	5.466.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	17.500.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	26.027.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	27.328.350	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	3.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	3.750.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420	Laporan	240.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430	Laporan	250.000.000	
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	18	persen	160.000.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	18	persen	170.000.000	
2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	96.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	96.000.000	
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	160.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	170.000.000	

2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17,00	persen	100.014.300	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17,00	persen	101.535.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	30.414.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	31.935.000	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84	Laporan	69.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84	Laporan	69.600.000	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17	persen	139.570.450	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17	persen	139.570.450	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	131.595.450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	unit	131.595.450	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	unit	7.975.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	unit	7.975.000	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil review usulan dalam rancangan Renja Program,kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah terdapat perubahan target indikator program dikarenakan terdapat perubahan iku pada dinas perhubungan namun tidak ada perubahan Anggaran maupun pendaaandengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan menjadi usulan rancangan Renja dan sesuai dengan kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Mamuju Tengah sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasiasosiasi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan musrembang Desa, Musrenbang kecamatan, dan Forum OPD dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2024 serta kewenangan dan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten, Kegiatan yang diUsulan atau yang diminta oleh masyarakat dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ringkasan kegiatan usulan Masyarakat maupun dari Forum Perangkat Daerah sebagai berikut: Permintaan Pengadaan LPJU, Zoss (Zona Selamat Sekolah) Rass, Rambu-Rambu, Tambatan Perahu dan Pengadaan Pincara. Adapun usulan yang tidak dapat di akomodir oleh Dinas Perhungan di karenakan tidak sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah melainkan Kewenangan Dinas Perhubungan Propinsi.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perhubungan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	catatan
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tobadak 3 Topoyo desa waeputeh dusun bajiminasa-desa pontanakayyang barakkang batu parigi/tobadak mahahe-batu parigi kec. Topoyo salugatta desa bojo pontanakayyang desa tinali Desa mahahe -desa parigi Desa Barakkang babana ke desa kire desa tinali desa kire desa bojo desa lemba hada desa pasapa jalan desa kire Topoyo, dusun tumbu Desa Salugatta Desa tumbu dusun jaya mandiri, dusun rawa mangun kec. Topoyo dusun suka damai, dusun suka makmur Desa kayu calla dusun salibiro dan dusun bendungan Desa Barakkang	**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**183 Unit**	

		tobadak 3, palongaan desa lara Bina makmur-dusun sipodeceng, tobadak dusun mario, polo pangale desa kuo ke desa sejati Polo pangale, kombiling, sartanamaju kec pangale Desa Salupangkang IV			
2	**Program Pelayaran /Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**		**Rasio konektvitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten/Kota /Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**5 Unit**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional di Bidang Perhubungan, Pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal guna untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar peneyelenggaraan kinerja Pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional, Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011.

Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan Arah Kebijakan :
   - Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
   - Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
   - Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
   - Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
   - Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
   - Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
   - Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.
2. Prioritas Nasional 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan Arah kebijakan :
   - Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;

- Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
- Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

1. Tujuan

Tujuan Strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan Strategi ini maka Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah adalah :

NO.	T U J U A N
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah dan professional
2	Meningkatkan infrastruktur Perhubungan
3	Mewujudkan keselamatan, keamanan dankenyamanan berlalu lintas dalam Kab. Mamuju Tengah
4	Mewujudkan kapasitas dan jaringan pelayanan angkutan Kab. Mamuju Tengah
5	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pada Dinas Perhubungan

2. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO.	S A S A R A N
1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik
2	Peningkatan Infrastruktur Sarana Prasarana Perhubungan
3	Peningkatan ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota Kabupaten Mamuju Tengah
4	Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kab. Mamuju Tengah
5	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026.

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan Sub kegiatan mengacu pada :

- Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 maka tema visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Mamuju Tengah

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Visi :" Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai La'la Tassisara	**Misi I : Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar** *Mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan*	Meningkatkan infrastruktur Perhubungan	Terpenuhinya Infrastruktur Sarana Prasarana Perhubungan	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota Persentase Sarana Prasarana dan Kelengkapan Jalan Terpenuhi

	kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Tercakup juga upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dl mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.			
	Misi 4 : Menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Tata Kelola Pada Dinas Perhubungan	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan	Nilai Sakip Presentase Temuan material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /

Triwulan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.3.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

1.3.5 Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.1.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.1.2 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.3.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.3.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

2.3.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam

2.4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.4.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.5.1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.5.2 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

2.6 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.6.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.7 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.7.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah

Berdasarkan Rencana Kerja SKPD, Program/kegiatan/Sub kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah mempunyai 3 rumusan program 16 kegiatan dan 38 sub kegiatan, dan telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD. Namun terdapat perbedaan Pagu Indikatif yang disebabkan oleh penyesuaian keungan daerah dan rasionalisasi Pagu tiap-tiap usulan pada Renja 2024, dengan berdasar pada kondisi terkini daerah/lokasi pembangunan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan Sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah.

Berikut Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
	Urusan wajib bukan Pelayanan dasar				**6.738.933.250**	**APBD**			**7.301.384.956**
2,15	**BIDANG PERHUBUNGAN**				**6.738.933.250**	**APBD**			**7.301.384.956**
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**		**18 persen**	**2.972.758.000**	**APBD**	**Terdapat perubahan IKU setelah choacing bersama Kemenpan pada bulan Februari 2023**	**16 persen**	**4.219.758.000**
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Peresentase Pelaksanaan Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	25 persen	60.000.000	**APBD**		25 persen	60.000.000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	20 persen	1.032.000.000	**APBD**		20 persen	1.159.000.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		33 persen	250.000.000	**APBD**		17 persen	2.000.000.000
2. 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PersentaseKeterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Mamuju Tengah	25 persen	50.000.000	**APBD**		25 persen	50.000.000
2.15.02.2,06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	19 persen	270.758.000	**APBD**		19 persen	270.758.000

2.15.02.2,09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Keterpenuhaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Budong-Budong Kec. Pangale	25 persen	1.260.000.000	**APBD**		13 persen	630.000.000
2 15 02 2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	33 persen	50.000.000	**APBD**		33 persen	50.000.000
2 .15. 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Rasio konektvitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten/Kota**		**24 persen**	**1.401.350.000**	**APBD**		**22 persen**	**621.350.000**
2 .15. 03. 2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Mamuju Tengah	24 persen	1.401.350.000	**APBD**		22 persen	621.350.000
2,15,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100 persen**	**2.364.825.250**	**APBD**		**100 persen**	**2.460.276.956**
2,15,01,2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tobadak	17 persen	151.772.500	**APBD**		19 Persen	167.183.156
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tobadak	16,7 persen	1.142.792.000	**APBD**		16,7 persen	1.142.792.000

2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tobadak	17 persen	291.183.000	**APBD**		17 persen	339.152.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tobadak	16,7 persen	283.493.000	**APBD**		16,7 persen	304.044.350
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tobadak	18 persen	256.000.000	**APBD**		18 persen	266.000.000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tobadak	17,00 persen	100.014.300	**APBD**		17,00 persen	101.535.000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tobadak	17 persen	139.570.450	**APBD**		17 persen	139.570.450

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026.

Berdasarkan Rencana Kerja SKPD, Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah mempunyai 3 rumusan program 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program dan Sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**7.324.349.650**					
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					**7.324.349.650**					
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (%)**			**100**	**3.225.741.650**				**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					480.572.500					
			Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)			17		(Kantor Dinas Perhubungan, Tobadak)				
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					359.080.000					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Dokumen)			2	30.280.000	(Kantor Dinas Perhubungan, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Orang)			83	328.800.000	(dishub, KAB. MAMUJU TENGAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tenaga Administrasi dishub
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					4.370.000					Tenaga Administrasi dishub
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Tenaga Administrasi dishub
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Dokumen)			1	4.370.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					4.819.500					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Dokumen)			1	4.819.500	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					24.627.000					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Dokumen)			1	24.627.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah

	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					4.919.000					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Dokumen)			1	4.919.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					33.184.000					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Laporan / Dokumen)			2	33.184.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					49.573.000					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Laporan)			1	49.573.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.914.908.400					

			Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)			16.7		(Kantor Dinas Perhubungan, Tobadak)				
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.825.320.400					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	154	182	182		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Orang / Bulan)			182	1.825.320.400	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					39.699.000					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Laporan / Dokumen)			1	39.699.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					49.889.000					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	6	18		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Laporan / Dokumen)			18	49.889.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					191.183.000					

			Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)			17		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)				
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					25.534.000					
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	6		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Orang)			2	25.534.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					100.849.000					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	80	0	145		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Orang)			145	100.849.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					64.800.000					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	27		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Orang)			27	64.800.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					243.493.000					

			Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)			16.7		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)				
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.466.000					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Paket)			4	5.466.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8.500.000					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Paket)			1	8.500.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					26.027.000					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7	7		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Paket)			7	26.027.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah

	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.500.000					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Laporan)			12	3.500.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tamu Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200.000.000					Tamu Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	286	306	420		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Tamu Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Laporan)			420	200.000.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					216.000.000					
			Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)			18		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)				
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					96.000.000					
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	1		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Unit)			1	96.000.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju

								Tobadak)	Umum			Tengah
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					120.000.000					Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Unit)			1	120.000.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.014.300					
			Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			17		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)				
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					20.414.300					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	36		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Laporan)			24	20.414.300	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					69.600.000					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	84	12	84		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah

			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Laporan)			84	69.600.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					89.570.450					
			Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			17		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)				
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					81.595.450					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	10	10		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Unit)			10	81.595.450	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.975.000					Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	16	16		(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak, Kec. Tobadak)				Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
			Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah (Unit)			16	7.975.000	(Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Kinerja lalu lintas kabupaten kota (%)**			**18**	**3.597.258.000**				**Memantapkan Infrastruktur Dasar**	**Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah**

	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					3.306.500.000					
			Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (%)			20		(KAB. MAMUJU TENGAH)				
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					3.306.500.000			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Infrastruktur Dasar	
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	7.00	13.00	113.10		(mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)				
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			11	198.000.000	(Jalan desa Kire, Kire, Kec. Budong-Budong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			11	198.000.000	(kilo 10, Salogatta, Kec. Budong-Budong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			9	162.000.000	(jalan di desa Babana menuju desa Kire, Babana, Kec. Budong-Budong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			9	162.000.000	(desa barakkang, Barakkang, Kec. Budong-Budong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			9	162.000.000	(desa tinali, Tinali, Kec. Budong-Budong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			9	162.000.000	(jalan desa waeputeh, Waeputeh, Kec. Topoyo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			9	162.000.000	(wilayah kecamatan topoyo, Topoyo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat

			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			11	198.000.000	(lereng gunung, Pasapa, Kec. Budong-Budong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			9	162.000.000	(dusun Bajiminasa desa Pontanakayyang, Pontanakayang, Kec. Budong-Budong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			9	162.000.000	(desa babana ke desa kire, Babana, Kec. Budong-Budong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			9	162.000.000	(Desa Bojo, Bojo, Kec. Budong-Budong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			11	198.000.000	(semua dusun di pontanakayyang, Pontanakayang, Kec. Budong-Budong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			9	162.000.000	(jalan desa lemba hada, Lembah Hada, Kec. Budong-Budong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			10	180.000.000	(jalan poros tumbu, desa tumbu, Topoyo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			29	522.000.000	(Jalan Penghubung Desa Mahahe ke Desa Batu Parigi, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyrakat umum
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan) (Unit)			9	162.000.000	(desa tinali dan sekitarnya, Tinali, Kec. Budong-Budong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
			Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) (Unit)			10	180.000.000	(bina makmur (jalan poros polsek tobadak) dusun sipodeceng, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat

			Pengadaan Rambu-rambu LaluLintas (Unit)			5	12.500.000,00	(desa topoyo, Topoyo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat topoyo
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					50.000.000,00					
			PersentaseKeterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (%)			25		(mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)				
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					50.000.000					
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	1	2		(kantor dinas perhubungan, Tobadak)				
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Orang)			2	50.000.000	(tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			dishub
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					240.758.000					
			Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (%)			19		(KAB. MAMUJU TENGAH)				
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					240.758.000					
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	12		(mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)				
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)			12	240.758.000	(mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			dishub
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**					**501.350.000**				**Memantapkan Infrastruktur Dasar**	
			Rasio angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (%)			**24**						**dishub**

	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau					501.350.000					
			Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (%)			19		(mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)				
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau					501.350.000					
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	0	0	5		(mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)				
			Pengadaan Perahu Penyeberangan (Pincara) (Unit)			2	200.000.000	(Desa Batu Parigi, Batu Parigi, Kec. Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Umum
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau (Unit)			1	301.350.000	(mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat
	J U M L A H						**7.324.349.650**					

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja)Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Kabupaten Mamuju Tengah, Agustus 2023

Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SIGIT DWI HASTONO
Pangkat : Pembina Utama Muda / Ivc
NIP. 19660913 199103 1 000

RENCANA KERJA
(RENJA)

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

DINAS PERIKANAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Jl. Tammauni Pue Ballung, Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah dimaksudkan untuk memenuhi Rencana Kerja Kabupaten Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Perikanan Tahun Anggaran 2024 ini, oleh sebab itu mohon kritik dan saran dari berbagai pihak yang terkait.

Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini.

Tobadak, Januari 2023

Kepala Dinas



Ir. H. AMRULLAH, MMPub
Pangkat: Pembina Utama Muda IV.c
NIP.19670312 200003 1 007

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR 2

BAB I. PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 7

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 11

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 29

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 29

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 30

3.3 Program dan Kegiatan 31

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 377

BAB V. PENUTUP 444

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah. Melalui perencanaan yang baik, diharapkan tujuan pembangunan yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Perikanan (DISKAN) Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Rancangan Renja OPD dibahas pada forum OPD, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Proses penyusunan Rancangan awal RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi

yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun emerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra OPD Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah kabupaten Mamuju Tengah dibidang urusan Kelautan dan Perikanan.

Rencana Kerja Dinas Perikanan tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2025. Rencana Kerja Dina Perikanan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan sisi lain, dalam era globalisasi, DISKAN dituntut untuk siap dan sanggup membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat khususnya Masyarakat yang bergerak di bidang Kelautan dan Perikanan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kab. Mamuju Tengah Periode 2024 diarahkan sebagai perwujudan visi misi pemerintah daerah periode 2021-2025 yang telah memasuki tahun ketiga dalam menghadapi era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara optimal terarah dan berkelanjutan.

Subtansi dan muatan Renja OPD, meliputi : (1). Program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, (2). Lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/Kel. atau kecamatan, (3). Indikator Kinerja yang terdiri dari kinerja Program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang akan dicapai dari program dan indicator kinerja Kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. (4). Kelompok Sasaran yang memuat penjelasan terhadap karateristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok masyarakat yang rentan termarginalkan (5). Pagu Indikatif dan Perkiraan Maju, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Rencana Kerja OPD disusun melalui tahapan sebagai berikut ; (1) Persiapan penyusunan Renja OPD, (2) Penyusunan rancangan Renja OPD, (3) Pelaksanaan forum OPD dan (4). Pentapan Renja OPD. Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2021 - 2025 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, Renstra Dinas Perikanan agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Perikanan Kabupaten Mamuju memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang budidaya perikanan, perikanan tangkap, peningkatan daya saing produk perikanan;
2. Pengembangan prasarana pada sektor Kelautan dan Perikanan;
3. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit ikan;
4. Pengawasan penggunaan sarana kelautan dan perikanan;
5. Pembinaan produksi di bidang perikanan.
6. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ikan
7. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
8. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis disektor kelautan dan perikanan
9. Pemantauan dan evaluasi di bidang kelautan dan perikanan
10. Pelaksanaan administrasi Perikanan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor. 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019.
14. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan tahun 2024 adalah untuk menjabarkan RKPD 2024 dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2025 terutama yang terkait dengan urusan penunjang, yakni perencanaan kebijakan pembangunan yang secara umum. Untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kab. Mamuju Tengah, sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Tengah dalam rangka mendukung Rencana Strategis Dinas Perikanan Kab. Mamuju Tengah, sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kab. Mamuju Tengah tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD 2024 dan sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan untuk jangka waktu satu tahun kedepan. Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kab. Mamuju Tengah tahun 2024 adalah (1) tersedianya dokumen perencanaan Perikanan Kab. Mamuju Tengah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, (2) sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Tengah yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan, (3) untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2023. Program dan kegiatan sebagai tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Tengah dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perikanan kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penyusunan.

Bab II merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan tahun lalu yang berisi tentang: Evaluasi Pelaksnaan Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III merupakan penjelasan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, yang terdiri dari: Telaahan terhadap kebijakan nasional, Telaahan terhadap kebijakan provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan.

Bab IV merupakan Bab Penutup, yang terdiri dari Penjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan- kebijakan dalam pelaksanaanya serta organisasi pelaksananya

Penyusunan Renja Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 juga memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah -masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah sampai dengan tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Mamuju Tengah

OPD: Dinas Perikanan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	14	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12		13		14	
1.	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan yang terlaksana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	*15,627,500,000*	100.0%	*2,025,147,073*	100.0%	*1,889,170,068*	100%	*1,996,023,003*	100.0%	3,803,606,086	*100.00%*	*24.34 %*
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	1,430,000,000	100%	295,527,200	100%	295,527,200	100.00%	295,155,785	100%	391,283,854	100.00%	27,36
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10	250,000,000	2	14,092,950	2	14,092,950	2	14,070,000	2	23,110,215	40	9
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-Perangkat Daerah	5	175,000,000	1	28,055,275	1	28,055,275	1	27,990,275	1	49,382,075	40	28
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	5	150,000,000	1	16,310,235	1	16,310,235	1	16,305,000	1	30,937,105	40	21
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	5	100,000,000	1	6,498,495	1	6,498,495	1	6,496,700	1	11,886,735	40	12
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	5	100,000,000	1	5,498,545	1	5,498,545	1	5,490,012	1	9,028,117	40	9

		DPA-SKPD													
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	15	655,000,000	3	225,071,700	3	225,071,700	3	224,803,798	3	266,939,607	40	41
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**8,475,000,000**	**100%**	**1,358,407,472**	**100%**	**1,358,407,472**	**100.00%**	**1,329,137,567**	**100%**	**2,650,989,114**	**100%**	**16**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113	7,900,000,000	21	1,301,854,567	21	1,301,854,567	21	1,273,577,282	21	2,517,190,464	37.17	32
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	250,000,000	1	9,494,540	1	9,494,540	1	9,492,355	1	19,237,385	40	8
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	325,000,000	4	47,058,365	4	47,058,365	4	46,067,930	4	114,561,265	40	35
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100%**	**150,000,000**	**100%**	**9,627,950**	**100%**	**9,627,950**	**100%**	**9,621,000**	**100%**	**14,723,905**	**100%**	**5**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD-PD	5	150,000,000	1	9,627,950	1	9,627,950	1	9,621,000	1	14,723,905	40	9.82
		Administrasi Kepegawaian Perangkat	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**345,000,000**	**100%**	**29,744,970**	**100%**	**29,744,970**	**100%**	**29,722,130**	**100%**	**53,115,115**	**100%**	**8**

		Daerah													
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	125,000,000	4	10,454,970	4	10,454,970	4	10,454,000	1	18,701,985	500	14.96
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	8	220,000,000	4	19,290,000	4	19,290,000	4	19,268,130	1	34,413,130	63	15.64
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**675,000,000**	**100%**	**53,710,137**	**100%**	**53,710,137**	**100%**	**48,705,000**	**100%**	**133,963,300**	**100%**	**20**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	425,000,000	2	27,995,137	2	27,995,137	2	27,990,000	8	92,983,600	166.67	21.88
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan (lembar)	90	75,000,000	20	13,910,000	20000	13,910,000	20,000	13,910,000	10000	24,464,700	33.33	32.62
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500	175,000,000	336	11,805,000	336	11,805,000	336	11,805,000	133	16,515,000	93.80	9.44
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**4,150,000,000**	**100%**	**228,073,800**	**100%**	**228,073,800**	**100.00%**	**228,070,000**	**100%**	**464,085,000**	**100%**	**11**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	23	1,650,000,000	1	95,964,000	1	95,964,000	1	95,964,000	2	213,179,000	13	12.92
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	75	500,000,000	12	12,209,800	12	12,209,800	12	12,206,000	0	12,206,000	16	2.44
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5	2,000,000,000	1	119,900,000	1	119,900,000	1	119,900,000	1	238,700,000	40	11.94
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**337,500,000**	**100%**	**49,240,544**	**100%**	**49,240,544**	**100%**	**49,199,921**	**100%**	**79,334,198**	**100%**	**24**
		Penyediaan Jasa Surat	Jumlah jasa surat	25	37,500,000	25	1,500,000	25	1,500,000	25	1,500,000	30	2,520,000	220	6.72

		Menyurat	menyurat												
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	5 Laporan	150,000,000	3	26,140,544	3	26,140,544	3	26,099,921	3	49,214,198	120	32.81
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5	150,000,000	2	21,600,000	2	21,600,000	2	21,600,000	1	27,600,000	60	18.40
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**65,000,000**	**100%**	**815,000**	**100%**	**815,000**	**100%**	**511,600**	**100%**	**16,111,600**	**100%**	**25**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	20	65,000,000	4	815,000	4	815,000	4	511,600	1	16,111,600	25	25
2.	**Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**100.0%**	***4,735,000,000***	**100.0%**	**358,160,983**	**100.0%**	**358,160,983**	**103.38%**	***358,005,393***	**86.00%**	**3,919,395,461**	***94.7%***	***82.77 %***
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya**	**100%**	**11,244,619,997**	**100%**	**187,076,750**	**100%**	**187,076,750**	**57.14%**	**186,922,000**	**100%**	**3,576,800,975**	**78.57%**	**31.81**
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	62	4,566,784,892	2	72,760,000	2	72,760,000	1	72,760,000	3	562,814,675	6	12.32
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	158	6,677,835,105	5	114,316,750	5	114,316,750	3	114,162,000	39	3,013,986,300	27	45.13

		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan**	**100%**	**1,595,000,000**	**100%**	**171,084,233**	**100%**	**171,084,233**	**100%**	**171,083,393**	**100%**	**266,701,793**	**100%**	**17**
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	250	1,595,000,000	50	171,084,233	50	171,084,233	50	171,083,393	37	266,701,793	35	16.72
3	**Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**100.0%**	**10,337,500,000**	**100.0%**	**3,692,302,647**	**100.0%**	**3,692,302,647**	**31.09%**	***3,690,197,070***	**37.00%**	**7,272,651,698**	***34%***	***89.02%***
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Persentase peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**100%**	**8,170,000,000**	**100%**	**3,692,302,647**	**100%**	**3,692,302,647**	**161%**	**3,690,197,070**	**100%**	**7,272,651,698**	**131%**	**89**
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	45,000,000	1	14,737,750	1	14,737,750	1	14,693,450		14,693,450	100	32.65
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	15	3,800,000,000	25	1,688,319,523	25	1,688,319,523	17	1,687,256,000	14	2,936,110,013	207	77.27
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	27	3,900,000,000	25	1,560,421,874	25	1,560,421,874	28	1,559,910,700	38	3,792,282,615	244	97.24
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (kelompok)	10	425,000,000	15	428,823,500	15	428,823,500	17	428,336,920	9	529,565,620	260	124.60
4	**Meningkatkan Produksi Hasil Olahan dan Pemasaran Produk Perikanan**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Volume Produksi Hasil Olahan dan Pemasaran Produk Perikanan (Ton)**	**100%**	**3,545,000,000**	**36%**	**798,552,410**	**36%**	**798,552,410**	***120.00%***	***794,642,710***	**36%**	**794,642,710**	***78%***	***7%***

		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Persentase peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan**	**100%**	**1,604,809,000**	**100%**	**93,320,000**	**100%**	**93,320,000**	**200%**	**92,800,300**	**100%**	**161,608,300**	**150%**	**10**
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	11	1,604,809,000	4	93,320,000	4	93,320,000	7	92,800,300	7	161,608,300	127	10.07
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan tersalurkan**	**100%**	**9,792,002,361**	**100%**	**705,232,410**	**100%**	**705,232,410**	**100%**	**701,842,410**	**100%**	**989,091,771**	**100%**	**10**
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	2700	6,000,000,000	900	27,685,260	900	27,685,260	1,080	27,395,260		27,395,260	40	0.46
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	23	3,792,002,361	5	677,547,150	5	677,547,150	9	674,447,150	1	961,696,511	43	25.36

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Tidak terdapat Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja sampai saat ini belum ada program/kegiatan yang telah melebihi target yang telah ditentukan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Adapun implikasi yang timbul dari program kerja Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah berupa adanya peningkatan dedikasi sumber daya aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perikanan Kab. Mamuju Tengah.
4. Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah:
    - Mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud;
    - Memberikan argumentasi/presentasi atas program/kegiatan sehingga nantinya akan mengarah pada terwujudnya Pembangunan Masyarakat Pembudidaya, Tangkap, dan Pesisir yang berdaya saing dan Berkepribadian.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perikanan dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perikanan, seperti kebutuhan bibit ikan, kebutuhan ikan konsumsi, kebutuhan ikan hasil olahan, serta menjaga kualitas benih, kualitas ikan konsumsi segar, serta kualitas ikan olahan. Disamping itu, kinerja pelayanan juga diprioritaskan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan dengan memfasilitasi pengurusan asuransi nelayan. Hal-hal tersebut akan diwujudkan dengan upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar atau tugas pokok fungsi (tupoksi) secara efektif dan efisiensi yang diamanatkan kepada Dinas Perikanan Kota Semarang dengan menggunakan prinsip-prinsip tata Pemerintah yang baik.

Tabel 2.2. berikut merupakan analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Perikanan

Kabupaten Mamuju Tengah

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	-	0	20	20	25	25	30	37	26	25	25	
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	-	0	0	0	0	100	100	-	-	0	100	
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	-	-	4	6	8	10	12	-	8	8	10	
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	-	51	55	60	65	70	75	70	62	65	70	
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi (Ekor)	-	-	200.000	300.000	350.000	400.000	500.000	235.000	500.000	350.000	400.000	

Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah.

Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi:

a. Koordinasi yang masih parsial, sehingga menghambat dalam proses pelayan publik
b. Koordinasi dengan SKPD lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan belum optimal
c. Tingkat pemahaman aparatur pelaksana pelayanan terhadap tugas dan fungsinya belum maksimal
d. Kurangnya Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas yang diberikan
e. Kepedulian dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas belum terwujud dengan baik
f. Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perikanan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas, capaian terhadap visi dan misi Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, capaian program nasional maka tugas dan fungsi Dinas Perikanan yaitu merumuskan kebijakan teknis mengenai Kelautan dan Perikanan menghadapi beberapa kendala diantaranya:

1. Terbatasnya kewenangan daerah dalam urusan pengelolaan ruang laut terkait penangkapan ikan dan pengawasan untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir
2. Terbatasnya penyuluhan, pembinaan dan pengawasan perikanan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah
3. Belum adanya master plan dan zonasi pembangunan perikanan
4. Belum terkelolanya secara maksimal pemanfaatan dan Pelaku usaha perikanan perairan Darat
5. Kenaikan harga pakan ikan dan pupuk mengakibatkan biaya operasional usaha budidaya ikan semakin tinggi dan mengurangi keuntungan usaha karena ketergantungan terhadap pakan jadi masih cukup tinggi;
6. Terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul;
7. Terbatasnya akses dalam pelayanan izin usaha perikanan
8. Belum adanya tempat pelelangan ikan dan pelabuhan perikanan
9. Rendahnya pengetahuan Masyarakat tentang olahan hasil Perikanan untuk konsumsi;
10. Terbatasnya sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang sesuai standar kompetensi kelautan dan perikanan;
11. Belum terlaksananya standar kelayakan mutu Pengolahan perikanan;
12. Belum adanya Kerjasama akses permodalan dari Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar;
13. Rendahnya fasilitasi pemasaran ikan yang mendukung stabilitas harga ikan.
14. Ketersediaan Ikan Konsumsi yang masih terbatas
15. Belum adanya Penjaminan Mutu dan Keamanan ikan konsumsi yang masuk ke wilayah Mamuju Tengah
16. Belum adanya peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ikan Non Konsumsi (Ikan Hias dan Kerajinan Tangan.

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, yaitu:

a. Perlunya kajian pengelolaan lingkungan pendukung sumber daya perikanan
b. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui pemberdayaan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review/telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cacatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Belanja Langsung					Belanja Langsung					
A	Kegiatan Rutin	DISKAN Mateng				Kegiatan Rutin	DISKAN Mateng				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**1.998.592.393**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**1.998.592.393**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**225.461.927**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**225.461.927**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKAN Mateng	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	14.432.950	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKAN Mateng	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	14.432.950	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen RKA-Perangkat Daerah	1	30.623.775	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen RKA-Perangkat Daerah	1	30.623.775	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1	16.690.235	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1	16.690.235	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen DPA-PD	1	6.503.872	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen DPA-PD	1	6.503.872	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1	6.253.545	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1	6.253.545	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	3	150.957.550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	3	150.957.550	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100**	1.441.660.908	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100**	1.441.660.908	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKAN Mateng	Jumlah ASN	21	1.353.886.760	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKAN Mateng	Jumlah ASN	21	1.353.886.760	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1	9.494.540	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1	9.494.540	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3	46.438.365	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3	46.438.365	
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100 %**	**9.627.950**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100 %**	**9.627.950**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan	1		Rekonsiliasi dan Penyusunan	DISKAN	Jumlah Dokumen	1		

	Barang Milik Daerah pada SKPD		BMD-PD		9.627.950	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mateng	Laporan BMD-PD		9.627.950	
1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100 %**	**34.265.370**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100 %**	**34.265.370**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	9.265.370	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	9.265.370	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISKAN Mateng	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi	1 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**DISKAN Mateng**	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi	1 Orang	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DISKAN Mateng	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan (Orang)	4 Orang	25.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DISKAN Mateng	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan (Orang)	4 Orang	25.000.000	
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**38.635.137**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**38.635.137**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKAN Mateng	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	22.995.137	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKAN Mateng	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	22.995.137	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISKAN Mateng	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	20.000 lbr	8.800.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISKAN Mateng	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	20.000 lbr	8.800.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISKAN Mateng	Jumlah tamu yang difasilitasi	150 Tamu	6.840.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISKAN Mateng	Jumlah tamu yang difasilitasi	150 Tamu	6.840.000	
1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100 %**	**228.073.800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100 %**	**228.073.800**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	4 Unit	95.964.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	4 Unit	95.964.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	15 Unit	12.209.800	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	15 Unit	12.209.800	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	119.900.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	119.900.000	
1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	100%	**51.893.544**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	100%	**51.893.544**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jasa surat menyurat	25 Dok	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jasa surat menyurat	25 Dok	1.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	20 mbps 640 m3 12000 kwh	28.793.544	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	20 mbps 640 m3 12000 kwh	28.793.544	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Orang	21.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Orang	21.600.000	
1.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	100%	**815.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	100%	**815.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	815.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	815.000	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN**		**Persentase Peningkatan**	**0.5%**	**355.760.983**	**PROGRAM PENGELOLAAN**		**Persentase Peningkatan**	**0.5%**	**355.760.983**	

	PERIKANAN TANGKAP		**Produksi Perikanan tangkap**			**PERIKANAN TANGKAP**		**Produksi Perikanan tangkap**			
2.1	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya**		**187.076.750**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya**		**187.076.750**	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	10 unit	72.760.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	10 unit	72.760.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	20 unit	114.316.750	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	20 unit	114.316.750	
2.2	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan**		**168.684.233**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan**		**168.684.233**	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	10 Kelompok	168.684.233	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	10 Kelompok	168.684.233	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	10 klp	0	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	10 klp	0	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya**		**2.049.030.391**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya**		**2.049.030.391**	
3.1	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**2.049.030.391**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**2.049.030.391**	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan yang tersedia	1 Dokumen	9.270.450	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan yang tersedia	1 Dokumen	9.270.450	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 klp	1.184.870.267	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 klp	1.184.870.267	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 KLP	742.666.174	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 KLP	742.666.174	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	15 KLP	112.223.500	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	15 KLP	112.223.500	
4	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Peningkatan Produksi Olahan**		**939.178.910**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan**		**939.178.910**	

			Perikanan								
4.1	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan**		**109.516.000**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan**		**109.516.000**	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	2 klp	109.516.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	2 klp	109.516.000	
4.2	**Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Kab. Mamuju Tengah	**Persentase Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan tersalurkan**		**829.662.910**	**Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Kab. Mamuju Tengah	**Persentase Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan tersalurkan**		**829.662.910**	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan (Ton)	5 klp	34.395.260				5 klp	34.395.260	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 klp	795.267.650	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 klp	795.267.650	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan, Perikanan senantiasa membuka diri terhadap saran dan masukan dari para stakholder terkait pembangunan sektor perikanan, hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk memperoleh program dan kegiatan yang berkualitas serta tepat sasaran.

Dalam merealisasikan hal tersebut tentunya Perikanan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku, dalam aturan yang ada terdapat beberapa mekanisme penyerapan Usulan dan masukan program/kegiatan diantaranya yaitu usulan langsung oleh masyarakat dengan cara berjenjang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat terendah sampai tertinggi, Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD) maupun usulan Button Up lainnya seperti permohonan dan Proposal Langsung oleh kelompok Binaan.

Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan acara forum OPD untuk menghimpun dan mensinergikan usulan-usulan kegiatan, baik yang berasal dari Bottom up maupun Top down. Setelah dilakukan analisis kesesuaian usulan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah semuanya memiliki kesamaan, sehingga dimungkinkan dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Proses selanjutnya, usulan-usulan tersebut kemudian di skala prioritaskan berdasarkan tingkat ketergesaan pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan masyarakat

Selain itu Perikanan juga secara aktif melakukan koordinasi kepada instansi lain terkait pembangunan sektor kelautan dan perikanan untuk memperoleh informasi aktual yang relevan terhadap pembangunan perikanan Kabupaten Mamuju Tengah.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel T-C.32 untuk usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan Tahun 2024 berikut ini.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Perikanan

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
	Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar	Mamuju Tengah			
	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Mamuju Tengah			
	Pengadaan Bibit Ikan Bandeng	Kec. Pangale, Kec. Karossa			
	Pengadaan Bibit Udang	Kec. Pangale, Kec. Karossa			
	Pengadaan Bibit Ikan Gurame	Kec. Tobadak, Kec. Topoyo			
	Pengadaan Pakan Ikan	Mamuju Tengah			
2	**Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
	Pengadaan Kolam Bioflok	Mamuju Tengah			
	Pembuatan Kolam Air Tawar	Mamuju Tengah			
	Normalisasi Saluran Tambak	Mamuju Tengah			
	Normalisasi Tambak	Mamuju Tengah			
3	**Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap**		**Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)**		
	Bantuan Alat Penangkap Ikan di Perairan Umum	Mamuju Tengah			
	Bantuan Mesin katinting	Mamuju Tengah			

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran. Kebijakan Perikanan yang diterapkan, selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi dan pusat, antara lain

Visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024 sebagaimana ditegaskan dalam RPJMN adalah :

1. Peningkatan PNBP dari sumberdaya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan local
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan
4. Pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait
5. Penguatan SDM dan kebijakan kelautan dan perikanan.

Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai unsur pelaksana kebijakan bidang kelautan dan perikanan di daerah mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya pada misi ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional pada arah kebijakan ke-2 yaitu Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan

kelautan. Peningkatan produksi perikanan yang menjadi salah satu indikator kinerja Dinas Perikanan mendukung terwujudnya produk perikanan yang berdaya saing.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

a. Membantu Meningkatkan Produksi Perikanan
b. Menyediakan Produk Olahan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi
c. Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan
d. Menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang ditetapkan
e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

1) Sasaran Renja

a. Meningkatnya produksi perikanan
b. Meningkatnya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
c. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan
d. Meningkatnya hasil Produksi dan prmanfaatan sumberdaya perikanan
e. Meningkatkan sumberdaya manusia aparatur perencana maupun masyarakat
f. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pembangunan sumber daya perikanan
g. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
h. Memperkokoh identitas dan jati diri dalam mengembangkan sektor Kelautan dan Perikanan

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Kebijakan Prioritas Kabupeten Mamuju Tengah yang telah diselaraskan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi yang sebagaimana telah terakomodir dalam Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perikanan, Pada Tahun 2024 Perikanan merencanakan untuk dapat melaksanakan 5 (Lima) Program dan 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan Prioritas dengan sebaran Lokasi wilayah Pesisir dan wilayah-wilayah yang memiliki potensi perikanan yang layak untuk dikembangkan.

Program dan Kegiatan Perioritas tersebut diatas tentunya harus dapat terukur melalui indikator-indikator capaian kinerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan tersebut guna menunjukan seberapa berhasil Program dan kegiatan prioritas tersebut dalam mencapai target yang ditentukan, Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta Indikator capaian Kinerja dan Pendanaan Perikanan di Tahun 2024 serta Perkiran Maju Rencana dinas Perikanan Tahun 2025 tergambar dalam Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap**		**80.0%**	**550,000,000**		**0.5%**	**2,095,000,000**
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya**		**60%**	**150,000,000**		**100%**	**1,330,000,000**
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia(Dokumen)		1 Dokumen	20,000,000		1 Dokumen	30,000,000
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)		2Unit	80,000,000		18 Unit	700,000,000
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)		6 Unit	50,000,000		50 Unit	600,000,000
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan**		**70%**	**160,000,000**		**100%**	**550,000,000**
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		35 orang	100,000,000		30 orang	350,000,000
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)		10 Kelompok	30,000,000		5 Kelompok	100,000,000

3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan , Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)		2 Unit Usaha	30,000,000		5 Unit Usaha	100,000,000
3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang beroperasi**		**60%**	**200,000,000**		**100%**	**200,000,000**
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)		2 Layanan	200,000,000		1 Layanan	200,000,000
3.25.03.2.04	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tanda Daftar kapal perikanan yang diterbitkan**		**80%**	**20,000,000**		**100%**	**15,000,000**
3.25.03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomndasi)		5 Rekomendasi	20,000,000		1 Rekomendasi	15,000,000
3.25.03.2.05	**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Tanda Daftar kapal perikanan yang diterbitkan**		**80%**	**20,000,000**		**100%**	**15,000,000**
3.25.03.2.05.02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomndasi)		1 Rekomendasi	20,000,000		1 Rekomendasi	15,000,000
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya**		**80.0%**	**4,254,879,000**		**1.5%**	**6,180,000,000**
3.25.04.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kelompok PemBudidaya Ikan Yang Memiliki izin Usaha Perikanan		60%	20,000,000		65%	15,000,000
3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, sert	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (Rekomendasi)		10 Rekomendasi	20,000,000		1 Rekomendasi	15,000,000
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Persentase kelompok pembudidaya ikan kecil yang dibina atau diberdayakan		45%	100,000,000		100%	650,000,000
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)		10 Kelompok	50,000,000		20 Kelompok	200,000,000
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)		-	-		5 Kelompok	150,000,000

3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan , Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)		-	-		5 Kelompok	150,000,000
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)		10 kelompok	50,000,000		15 kelompok	150,000,000
3.25.04.2.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)**		45%	30,000,000		100%	35,000,000
3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)		5 Rekomendasi	30,000,000		16 Rekomendasi	35,000,000
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Persentase peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		45%	4,104,879,000		100%	5,480,000,000
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1 Dokumen	20,000,000		1 Dokumen	30,000,000
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		6 Unit	2,861,779,000		30 Unit	2,500,000,000
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		6 Unit	1,103,100,000		30 Unit	2,500,000,000
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)		1 Dokumen	20,000,000		5 Dokumen	150,000,000
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)		50 Orang	50,000,000		100 Orang	300,000,000
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi (Ha)		1,2 Ha	50,000,000		1,2 Ha	50,000,000
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**persentase penguatan sumber daya kelautan dan perikanan**		**85%**	**60,000,000**		**100%**	**100,000,000**
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Persentse Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang ditindaklanjuti**		**60%**	**60,000,000**		**100%**	**100,000,000**
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)		1 Dokumen	30,000,000		2 Dokumen	50,000,000

3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)		1 Dokumen	30,000,000		2 Dokumen	50,000,000
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan**		**80%**	**502,068,489**		**1%**	**630,000,000**
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha yang diterbitkan**		**45%**	**40,000,000**		**100%**	**30,000,000**
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang tersedia (Dokumen)		1 Dokumen	40,000,000		1 Dokumen	30,000,000
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan**		**65%**	**62,068,489**		**100%**	**100,000,000**
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)		2 Unit Usaha	62,068,489		3 Unit Usaha	100,000,000
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan tersalurkan**		**65%**	**400,000,000**		**100%**	**500,000,000**
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)		1000 Ton	150,000,000		900 Ton	200,000,000
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)		2 Pelaku Usaha	250,000,000		5 Pelaku Usaha	300,000,000
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**		**100%**	**2,900,000,000**		**100%**	**3,216,500,000**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**		**100%**	**235,000,000**		**100%**	**255,000,000**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	20,000,000		2 Dokumen	20,000,000
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-Perangkat Daerah		1 Dokumen	20,000,000		1 Dokumen	35,000,000
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD		1 Dokumen	25,000,000		1 Dokumen	30,000,000
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD		1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	10,000,000
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD		1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	10,000,000

1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD		3 Dokumen	150,000,000		3 Dokumen	150,000,000
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**		**100%**	**1,770,000,000**		**100%**	**1,940,000,000**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN		21 orang	1,700,000,000		21 orang	1,850,000,000
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD		1 Dokumen	20,000,000		1 Dokumen	25,000,000
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		4 Dokumen	50,000,000		4 Dokumen	65,000,000
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**		**100%**	**25,000,000**		**100%**	**30,000,000**
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD		1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	15,000,000
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD-PD		1 Dokumen	15,000,000		1 Dokumen	15,000,000
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**		**100%**	**105,000,000**		**100%**	**160,000,000**
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	25,000,000		1 Dokumen	25,000,000
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi		3 Orang	40,000,000		3 Orang	85,000,000
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan		8 Orang	40,000,000		8 Orang	50,000,000
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**		**100%**	**120,000,000**		**100%**	**165,000,000**
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		15 Paket	50,000,000		15 Paket	85,000,000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		10 Paket	10,000,000		10 Paket	15,000,000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		30 Paket	15,000,000		35 Paket	15,000,000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		8 Dokumen	10,000,000		8 Dokumen	15,000,000
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		4 Laporan	15,000,000		4 Laporan	25,000,000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1 Laporan	20,000,000		1 Laporan	10,000,000
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**		**100%**	**450,000,000**		**100%**	**520,000,000**
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		2 unit	150,000,000		5 unit	200,000,000

1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		15 Unit	50,000,000		15 Unit	50,000,000
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1 Unit	50,000,000		1 Unit	20,000,000
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1 Unit	200,000,000		1 Unit	250,000,000
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**		**100%**	**155,000,000**		**100%**	**79,500,000**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		25 Laporan	10,000,000		25 Laporan	7,500,000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		3 Laporan	30,000,000		1 Laporan	30,000,000
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		1 Laporan	15,000,000		1 Laporan	12,000,000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1 Laporan	100,000,000		1 Laporan	30,000,000
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**		**100%**	**40,000,000**		**100%**	**67,000,000**
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		4 Unit	10,000,000		4 Unit	12,000,000
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		5 Unit	5,000,000		10 Unit	10,000,000
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2 Unit	5,000,000		2 Unit	5,000,000
1.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2 Unit	10,000,000		2 Unit	20,000,000
1.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)		2 Unit	10,000,000		2 Unit	20,000,000
	Total				**8,266,947,489**			**12,221,500,000**

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja sangat terkait dengan sebuah penganggaran, karena Rencana Kerja yang berisikan program dan kegiatan pembangunan akan dapat dilaksanakan dan menjadi manfaat apabila didukung oleh pendanaan yang telah direncanakan pula. Berikut adalah rencana program dan kegiatan pada tahun 2024 dan prakiraan maju pada tahun 2025 :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap**		**80.0%**	**550,000,000**	**0.5%**	**2,095,000,000**
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya**		**60%**	**150,000,000**	**100%**	**1,330,000,000**
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia(Dokumen)		1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	30,000,000
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)		2Unit	80,000,000	18 Unit	700,000,000
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)		6 Unit	50,000,000	50 Unit	600,000,000
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan**		**70%**	**160,000,000**	**100%**	**550,000,000**
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		35 orang	100,000,000	30 orang	350,000,000
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)		10 Kelompok	30,000,000	5 Kelompok	100,000,000
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan , Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)		2 Unit Usaha	30,000,000	5 Unit Usaha	100,000,000

3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang beroperasi**		**60%**	**200,000,000**	**100%**	**200,000,000**
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)		2 Layanan	200,000,000	1 Layanan	200,000,000
3.25.03.2.04	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tanda Daftar kapal perikanan yang diterbitkan**		**80%**	**20,000,000**	**100%**	**15,000,000**
3.25.03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomndasi)		5 Rekomendasi	20,000,000	1 Rekomendasi	15,000,000
3.25.03.2.05	**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Tanda Daftar kapal perikanan yang diterbitkan**		**80%**	**20,000,000**	**100%**	**15,000,000**
3.25.03.2.05.02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomndasi)		1 Rekomendasi	20,000,000	1 Rekomendasi	15,000,000
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya**		**80.0%**	**4,254,879,000**	**1.5%**	**6,180,000,000**
3.25.04.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kelompok PemBudidaya Ikan Yang Memiliki izin Usaha Perikanan		60%	20,000,000	65%	15,000,000
3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, sert	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (Rekomendasi)		10 Rekomendasi	20,000,000	1 Rekomendasi	15,000,000
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Persentase kelompok pembudidaya ikan kecil yang dibina atau diberdayakan		45%	100,000,000	100%	650,000,000
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)		10 Kelompok	50,000,000	20 Kelompok	200,000,000
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)		-	-	5 Kelompok	150,000,000

3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan , Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)		-	-	5 Kelompok	150,000,000
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)		10 kelompok	50,000,000	15 kelompok	150,000,000
3.25.04.2.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)**		45%	30,000,000	100%	35,000,000
3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)		5 Rekomendasi	30,000,000	16 Rekomendasi	35,000,000
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Persentase peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		45%	4,104,879,000	100%	5,480,000,000
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	30,000,000
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		6 Unit	2,861,779,000	30 Unit	2,500,000,000
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		6 Unit	1,103,100,000	30 Unit	2,500,000,000
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)		1 Dokumen	20,000,000	5 Dokumen	150,000,000
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)		50 Orang	50,000,000	100 Orang	300,000,000
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi (Ha)		1,2 Ha	50,000,000	1,2 Ha	50,000,000
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**persentase penguatan sumber daya kelautan dan perikanan**		**85%**	**60,000,000**	**100%**	**100,000,000**
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Persentse Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang ditindaklanjuti**		**60%**	**60,000,000**	**100%**	**100,000,000**
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)		1 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	50,000,000

3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)		1 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	50,000,000
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan**		**80%**	**502,068,489**	**1%**	**630,000,000**
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha yang diterbitkan**		**45%**	**40,000,000**	**100%**	**30,000,000**
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang tersedia (Dokumen)		1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	30,000,000
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan**		**65%**	**62,068,489**	**100%**	**100,000,000**
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)		2 Unit Usaha	62,068,489	3 Unit Usaha	100,000,000
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan tersalurkan**		**65%**	**400,000,000**	**100%**	**500,000,000**
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)		1000 Ton	150,000,000	900 Ton	200,000,000
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)		2 Pelaku Usaha	250,000,000	5 Pelaku Usaha	300,000,000
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**		**100%**	**2,900,000,000**	**100%**	**3,216,500,000**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**		**100%**	**235,000,000**	**100%**	**255,000,000**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-Perangkat Daerah		1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	35,000,000
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD		1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000

1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD		3 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	150,000,000
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**		**100%**	**1,770,000,000**	**100%**	**1,940,000,000**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN		21 orang	1,700,000,000	21 orang	1,850,000,000
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD		1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		4 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	65,000,000
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**		**100%**	**25,000,000**	**100%**	**30,000,000**
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD-PD		1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**		**100%**	**105,000,000**	**100%**	**160,000,000**
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi		3 Orang	40,000,000	3 Orang	85,000,000
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan		8 Orang	40,000,000	8 Orang	50,000,000
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**		**100%**	**120,000,000**	**100%**	**165,000,000**
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		15 Paket	50,000,000	15 Paket	85,000,000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		10 Paket	10,000,000	10 Paket	15,000,000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		30 Paket	15,000,000	35 Paket	15,000,000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		8 Dokumen	10,000,000	8 Dokumen	15,000,000
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	25,000,000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	10,000,000
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**		**100%**	**450,000,000**	**100%**	**520,000,000**

1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		2 unit	150,000,000	5 unit	200,000,000
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		15 Unit	50,000,000	15 Unit	50,000,000
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1 Unit	50,000,000	1 Unit	20,000,000
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1 Unit	200,000,000	1 Unit	250,000,000
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**		**100%**	**155,000,000**	**100%**	**79,500,000**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		25 Laporan	10,000,000	25 Laporan	7,500,000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		3 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	12,000,000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	30,000,000
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**		**100%**	**40,000,000**	**100%**	**67,000,000**
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		4 Unit	10,000,000	4 Unit	12,000,000
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		5 Unit	5,000,000	10 Unit	10,000,000
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000
1.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2 Unit	10,000,000	2 Unit	20,000,000
1.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)		2 Unit	10,000,000	2 Unit	20,000,000
	Total				**8,266,947,489**		**12,221,500,000**

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perikanan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Perencanaan Sektor Perikanan serta sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah adalah Program Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah serta Visi, Misi Pembangunan nasional dan pemerintah daerah kabupaten Mamuju Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perikanan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Perikanan kabupaten Mamuju Tengah. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Perikanan kabupaten Mamuju Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penuangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2024 mendatang.

Mamuju Tengah, Januari 2023

Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan

Ir. H. AMRULLAH, MMPub
Nip. 19670312 200003 1 007

RENCANA KERJA 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN

MAMUJU TENGAH

TAHUN ANGGARAN

2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah *subhanawata'ala* atas limpahan rahmatNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan. Penyusunan dokumen Renja OPD merupakan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengamati pelaksanaan program dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2023, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Dalam penyusunan dokumen Renja ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan sehingga kami berharap adanya saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penyusunan tahun berikutnya.

Semoga dokumen Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Topoyo, JUNI 2023

KEPALA DINAS,

PAISAL ANWAR, S.S.,M.A.P
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/IV.b
NIP: 19810822 200901 1 007

RENCANA KERJA i

PEMERINTAH KABUPATEN i

KATA PENGANTAR ii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II 8

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Mamuju Tengah 25

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Mamuju Tengah 26

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 53

BAB III 59

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 59

BAB IV 79

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 79

BAB V 101

PENUTUP 101

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 dimana pedoman pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/program strategis nasional serta RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten/Kota. RKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan tahun 2024 merupakan penjabaran tahun keempat dari dokumen pembangunan jangka menengah daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026. Pada tahun ini Kabupaten Mamuju Tengah mengusung Tema RKPD yaitu “Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Didukung dengan Ketentraman dan Ketertiban”. Tema pembangunan tahun 2024 berpedoman pada RPJMD dimana arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 yaitu “Pemantapan Infrastruktur Dasar untuk Penguatan

Perekonomian Rakyat Berbasis Agribisnis-Agropolitan Didukung Pemeliharaan Ketertiban dan Ketenteraman". Melihat dari evaluasi pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya maka didapatkan beberapa permasalahan dan isu strategis pembangunan di Mamuju Tengah yang meliputi: meningkatkanya angka kemiskinan dan stunting, meningkatkanya inflasi, belum optimalnya ketersediaan infrastruktur, masih kurangnya SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas, masih rendanya penilaian pelayanan publik, pelaksanaan pemilihan umum, rencana pemindahan Ibu Kota Negara, pelaksanaan Pekan Olahrga Provinsi, serta pengelolaan lingkungan dan bencana alam. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis tersebut maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Mamuju Tengah untuk tahun 2024 meliputi: 1) Mendorong Daya Saing SDM dan Perekonomian Daerah, 2) Memantapakan Infrastruktur Dasar, 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 4) Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, 5) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif. Serangkaian tahapan telah dilakukan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Mamuju Tengah dimulai dari tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan mustawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir RKPD dan sampai pada tahapan penetapan RKPD. Penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah menjadi sangat strategis dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah di Mamuju Tengah tahun 2024 yang selanjutnya akan menjadi bahan pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 serta APBD tahun 2024.Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 disusun dan disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan baik

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah diantaranya sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;
7) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Implementasinya;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabuparen;
10) Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
17) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang penetapan hasil pemetaan dan pedoman organisasi perangkap daerah bidang pertanahan;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
22) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.
23) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
24) Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Bupati Mamuju Tengah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah:

1) Mengukur dan merumuskan kebutuhan anggaran atau dana untuk memenuhi pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah selama satu tahun;

2) Sebagai arahan sekaligus tolok ukur kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun tujuannya adalah:

1) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah;
2) Menciptakan kepastian dalam perencanaan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah;
3) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan sumber dana.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024, yang mengimplementasikan pembangunan dan penganggaran tahunan disusun dalam sitematika sebagai berikut:

Bab – I : Pendahuluan

Bab ini memuat : Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab – II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab – III : Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Bab ini memuat :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah;

3.3. Program dan Kegiatan.

Bab – IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab – V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;**

Bantuan rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dari target kami 535 unit rumah yang terealisasi hanya 82,24 % atau sebanyak 441 unit rumah, faktor yang mempengaruhi sehingga capaiannya tidak mencapai sesuai target adalah :

a. Ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan masih di pengaruhi pandemic covid-19 sehingga terjadi pengurangan alokasi anggaran yang tentunya berpengaruh terhadap kuota jumlah desa yang dapat menerima bantuan.
b. Beratnya readnes criteria pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan terkhusus persyaratan penyediaan dana sharing dari APBD, sementara APBD sangatlah terbatas.
c. Rujukan data sering berubah-ubah dari E-RTLH, TNP2K, BDT, PKH, dan Data BKKBN, sehingga perlu penetapan kebijakan satu Data yang tidak berubah-ubah.
d. Factor lainnya adalah adanya pengalihan kegiatan BSPS untuk penanganan bencana gempa bumi di mamuju sehingga butuh penangan rumah korban bencana di mamuju dan majene.

Persentase luasan permukiman yang tertangani masih pada 87,04 % atau belum tercapai sesuai target yang diharapkan dikarenakan berbagai factor, antara lain :

a. Kabupaten Mamuju Tengah merupakan Daerah Otonomi Baru, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya belum menyeluruh termasuk dalam urusan perumahan dan pemukiman. Sehingga kebijakan kurang menyentuh pada urusan Perumahan dan kawasan permukiman.
b. Adanya keterbatasan anggaran Pemda Mamuju Tengah khususnya pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
c. Belum adanya sinergitas data antara stakeholder khususnya pihak BPN, DPM-PTSP, Dinas PU dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
d. Belum semua daerah kawasan kumuh tersentuh oleh pembangunan terutama penyediaan rumah layak huni

Ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana dapat tercapai sesuai dengan target yang telah dibuat, ini dikarenakan daerah memperioritaskan program pemenuhan SPM sebelum melaksanakan program kegiatan pilihan melalui Program Membara (Membangun Rumah Rakyat) dan berkat kerja sama stakrholder, baznas, badan usaha daerah dan Pengembang Perumahan serta Pengusaha Bahan Bangunan yang ada di daerah Kabupaten Mamuju Tengah atas yang di koordinir langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, target capaian program kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah masih sangat rendah.

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
		JUMLAH ANGGARAN		100%	38.333.500.000	32%	1.590.068.860	172%	18.717.965.806	172%	49%	
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				32%	27%	172%	49%	3	6	
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)				Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.
   a. Peningkatan perencanaan pengelolaan perumahan dan permukiman.
   b. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum.
   c. Mengarahkan program dan kegiatan dari hasil musrenbang, forum OPD dan pokok-pokok fikiran DPRD untuk dapat mendukung pencapaian kinerja.

Evaluasi Renja tahun 2023 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah s/d Tahun 2022

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	***100 %***	***11.447.500.000***	***47 %***	***6.673.541.462***	***100%***	***2.009.652.425***	***100 %***	***1.986.541.107***	***147 %***	***8.660.082.569***	***147 %***	***89%***	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100 %**	**Rp 360.000.000**	**44 %**	**Rp 88.612.362**	**100%**	**Rp 110.595.720**	**100 %**	**Rp 110.595.720**	144 %	**199.208.082**	144%	**55%**	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	**6**	125.000.000	8	49.163.242	**1**	**74.689.950**	1	74.689.950	9	123.853.192	150%	**99%**	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan tersedia	25	135.000.000			2	19.825.520	2	19.825.520	2	19.825.520	8%	**15%**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja tersedia	5	100.000.000	8	39.449.120	1	16.080.250	1	16.080.250	9	55.529.370	180%	**56%**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	**100 %**	**Rp 6.240.000.000**	**15 %**	**Rp 2.288.383.947**	**100%**	**Rp 979.272.777**	**100 %**	**Rp 957.078.433**	115 %	**3.245.462.380**	115%	52%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	310	6.100.000.000	34	2.235.739.077	14	950.834.337	14	928.640.243	48	3.164.379.320	10	52%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN	310	25.000.000	54		54	9.240.050	54	9.239.800	108	9.239.800	22	37%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	**80**	115.000.000	14	52.644.870	**94**	**19.198.390**	94	19.198.390	108	71.843.260	22	62%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	**100 %**	**Rp 50.000.000**	**13 %**	**Rp 56.064.285**	**100%**	**Rp 13.091.675**	**100 %**	**Rp 13.091.675**	113 %	**69.155.960**	113%	138%	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
	Daerah														
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD-PD	**15**	50.000.000	2	56.064.285	3	13.091.675	3	13.091.675	5	69.155.960	1	138%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	**100 %**	**Rp 475.000.000**	**0%**	**Rp -**	**100%**	**Rp 20.801.675**	**100 %**	**Rp 20.801.675**	100 %	**20.801.675**	100%	4%	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai PD	310	75.000.000			63	7.301.675	63	7.301.675	63	7.301.675	0	0,10	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	**40**	400.000.000			3	**13.500.000**	3	13.500.000	3	13.500.000	0	0,03	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	**100 %**	**Rp 1.037.500.000**	**67 %**	**Rp 2.551.629.760**	**100%**	**Rp 452.790.071**	**100 %**	**Rp 452.614.333**	167 %	**3.004.244.093**	167%	290%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	25	150.000.000	15	58.827.115	4	3.451.233	4	3.451.233	19	62.278.348	76%	42%	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	750	112.500.000	164	123.006.600	150	54.180.610	150	54.180.610	314	177.187.210	42%	157%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	5000	75.000.000	2252	757.250.000	11	56.125.000	11	56.058.000	2.263	813.308.000	45%	1084%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	**310**	500.000.000	1627	1.352.929.924	**63**	289.520.140	63	289.411.916	1.690	1.642.341.840	545%	328%	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis PD	100	200.000.000	66	259.616.121	20	49.513.088	20	49.512.574	86	309.128.695	86%	155%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	**100 %**	**Rp 1.400.000.000**	**39 %**	**Rp 498.072.000**	**100%**	**Rp 220.264.000**	**100 %**	**Rp 220.264.000**	139 %	**718.336.000**	139%	51%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	60	750.000.000	12	370.252.000	12	95.964.000	12	95.964.000	24	466.216.000	40%	62%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah komponen	6	50.000.000			3	4.400.000	3	4.400.000	3	4.400.000	50%	9%	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	**5**	600.000.000	16	127.820.000	12	119.900.000	12	119.900.000	28	247.720.000	560%	41%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100 %**	**Rp 1.560.000.000**	**100%**	**Rp 1.091.317.808**	**100%**	**Rp 177.841.907**	**100 %**	**Rp 177.105.071**	200 %	**1.268.422.879**	200%	81%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	1.612.905 KWH,2160 MPBS, 21.450 M3	160.000.000	60	91.037.808	12	91.041.907	12	90.305.071	72	181.342.879	#VALUE!	113%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	50.000.000	44	40.350.000	12	6.400.000	12	6.400.000	56	46.750.000	93%	94%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	**225**	1.350.000.000	127	959.930.000	45	80.400.000	45	80.400.000	172	1.040.330.000	76%	77%	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100 %**	**Rp 325.000.000**	**100%**	**Rp 99.461.300**	**100%**	**Rp 34.994.600**	**100 %**	**Rp 34.990.200**	200 %	**134.451.500**	200%	41%	
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	55	325.000.000	55	99.461.300	12	34.994.600	12	34.990.200	67	134.451.500	122%	41%	
2.	Program Pengembangan Perumahan	Presentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah daerah	***100 %***	***Rp 856.000.000***	***189%***	***Rp 2.440.754.293***	***10 0%***	***Rp 445.741.370***	***100 %***	***Rp 445.319.080***	***289 %***	***2.886.073.373***	***289 %***	***436%***	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	**100 %**	**Rp 266.000.000**	**0%**	**Rp -**	**100%**	**Rp 66.534.930**	**100 %**	**Rp 66.351.250**	100 %	**66.351.250**	100%	25%	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
	Kabupaten/Kota	Relokasi Program Kabupaten/Kota													
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50	266.000.000			**10**	66.534.930	10	66.351.250	10	66.351.250	2	##########	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**100 %**	**Rp 40.000.000**	**20 %**	**Rp 329.944.293**	**100%**	**Rp 28.084.875**	**100 %**	**Rp 28.083.750**	120 %	**358.028.043**	120%	895%	
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	150	40.000.000	30	329.944.293	30	28.084.875	30	28.083.750	60	358.028.043	40%	895%	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**100 %**	**Rp 220.000.000**	**927%**	**Rp 2.110.810.000**	**100%**	**Rp 250.244.150**	**100 %**	**Rp 250.239.150**	1027%	**2.361.049.150**	1027 %	1073 %	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	11	220.000.000	102	2.110.810.000	**2**	250.244.150	**2**	250.239.150	104	2.361.049.150	21	1073 %	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**100 %**	30.000.000	**0%**	-	**100%**	51.570.305	**100 %**	51.416.580	100 %	51.416.580	100%	171%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50	30.000.000			10	51.570.305	10	51.416.580	10	51.416.580	2	171%	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB		**100 %**	300.000.000	**0%**	-	**100%**	49.307.110	**100 %**	49.228.350	100 %	49.228.350	100%	16%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	50	300.000.000	0	-	10	49.307.110	10	49228350	10	49.228.350	20%	16%	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase kawasan permukiman layak huni	***100 %***	***3.100.000.000***	***12 %***	***449.461.871***	***100%***	***726.353.643***	***100 %***	***726.276.467***	***112 %***	***1.175.738.338***	***112 %***	***38%***	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	presentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**100 %**	1.600.000.000	**18 %**	278.275.251	**100%**	103.107.495	**100 %**	10307600200%	118 %	381.351.253	118%	24%	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2	200.000.000	1	178.277.649	1	38.632.000	1	38.607.000	2	216.884.649	1	108%	
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	20	1.400.000.000	3	99.997.602	3	64.475.495	3	64.469.002	6	164.466.604	0,3	12%	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**presentase Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**100 %**	1.500.000.000	**7%**	171.186.620	**100%**	623.246.148	**100 %**	623.200.465	107 %	794.387.085	107%	53%	
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	25	500.000.000	2	171.186.620	3	544.520.183	3	544.502.665	5	715.689.285	1	##########	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
		Beserta PSU													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5	1.000.000.000			1	78.725.965	1	78.697.800	1	78.697.800	0	##########	
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Presentase PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	***100 %***	***50.150.000.000***	***0%***	-	***100%***	***1.322.635.000***	***100 %***	***1.322.635.000***	***100 %***	***1.322.635.000***	1	3%	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**100 %**	50.150.000.000	**0%**	-	**100%**	1.322.635.000	**100 %**	1.322.635.000	100 %	1.322.635.000	100%	3%	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2.500	50.150.000.000			**63**	**1.322.635.000**	63	1.322.635.000	63	1.322.635.000	13	3%	
7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	***100 %***	***25.050.000.000***	***67 %***	***3.834.987.520***	***100%***	***1.624.010.869***	***100 %***	***1.533.567.720***	***100 %***	***5.368.555.240***	100%	21%	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	presentase Luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanag untuk pembangunan oleg pemerintah daerah	**100 %**	25.050.000.000	**67 %**	3.834.987.520	**100%**	1.624.010.869	**100 %**	1.533.567.720	**100 %**	5.368.555.240	100%	21%	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
		kabupaten													
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat penerima santunan tanah	5	50.000.000			3	24.136.375	3	24.136.375	3	24.136.375	60%	48%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan pemerintah	4	25.000.000.000	6	3.834.987.520	4	1.599.874.494	4	1.509.431.345	10	5.344.418.865	250%	21%	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**100 %**	**90.603.500.000**				**6.128.393.307**	**100 %**	**6.014.339.374**	**150 %**	**19.413.084.520**	150%	**21%**	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								**100 %**	**98%**	150 %	**0**	**2**	**3**	
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Mamuju Tengah

Analisis kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam NSPK, SPM dan IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jenis indikator yang dikaji berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah antara lain terkait dengan persentase ketersediaan rumah layak huni, persentase permukiman layak huni, Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas), Rata-rata capaian SPM Perumahan , penurunan rumah tidak layak huni rumah tangga miskin, Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum dan Persentase penyelesaian sengketah tanah garapan dalam daerah kab/kota yang secara rinci disajikan pda table, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah

NO	Indikator	Target IKK	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisaasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase rumah layak huni			79,79 %	81,41%	82,76%	84,12%	79,79%		82,76 %	84,12 %	
2	persentase permukiman layak huni			98,95 %	98,99%	99,03%	99,07%	98,95%		99,03 %	99,07 %	
3	Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)			51%	53%	56%	59%	51%		56%	9%	
4	Rata-rata capaian SPM Perumahan			100%	100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	
5	penurunan rumah tidak layak huni rumah tangga miskin			20,21 %	18,85%	17,49%	16,13%	20,21%		17,49 %	16,13 %	
6	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum			25,00 %	29,17%	33,33%	37,50%	25,00%		3,33 %	37,50 %	

7	Nilai Akuntabebilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			C	C	CC	CC	C		CC	CC	
8	Presentase Peningkatan disiplin ASN			100%	100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Mamuju Tengah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan, solusi yang dilakukan harus disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Isu strategis menjadi titik prioritas penanganan permasalahan yang ada. Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran.

2.3.1 Isu Strategis Bidang Perumahan

a. Adanya kesenjangan antara kebutuhan rumah layak huni dengan jumlah rumah layak huni yang tersedia (*backlog*).
b. Tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
c. Belum tersedianya database perumahan yang berbasis spasial.
d. Belum tersedianya prasarana dan sarana utilitas yang memadai pada perumahan.

e. Minimnya kuota alokasi program melalui APBN.

2.3.2 Isu Strategis Bidang Kawasan Permukiman

a. Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh tiap tahunnya .
b. Belum adanya legalitas dokumen perencanaan untuk pengembangan kawasan permukiman berdasarkan tata ruang wilayah.
c. Belum tersedianya prasarana dan sarana utilitas yang memadai pada Kawasan Permukiman, terutama di permukiman Kumuh.
d. Minimnya dukungan anggaran melalui APBD.

2.3.3 Isu Strategis Bidang Pertanahan

a. Adanya kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur pemerintah daerah.
b. Besarnya jumlah aset daerah dalam bentuk tanah yang belum memiliki legalitas.
c. Adanya konflik pertanahan terutama tapal batas antar Desa

2.3.4 Isu Strategis Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten.

   Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam ditentukan setelah terjadinya bencana dan ditargetkan sesuai dengan rencana aksi akan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun anggaran dengan dua tahap pelaksanaan yaitu persiapan (Pembentukan Satuan tugas penanganan rumah korban bencana, Penetapan fasilitator dan pendamping masyarakat, Pembentukan kelompok masyarakat, Terdatanya kebutuhan rumah yang rumah layak huni bagi korban bencana, Tersusunnya rencana aksi

penyediaan rumah bagi korban bencana) dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana.

b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten.

   Tingkat keberhasilan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten ditentukan dari presentase (%) jumlah rumah yang telah tersedia/terbangun dan dimanfaatkan terhadap rumah keseluruhan yang seharusnya disediakan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang terkena program pemerintah.

2.3.5 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan PelayananPerangkat Daerah

Tantangan

Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta Pertanahan adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Disisi lain, terdapat Tantangan penyediaan perumahan, yaitu:

1. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai;
2. Kordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal;
3. Peran kontrol pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal;
4. Efisiensi proses dan mahalnya biaya perizinan untuk pembangunan perumahan kurang maksimal;
5. Terbatasnya dan mahalnya harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan;

6. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal;
7. Belum terintegrasinya infrastruktur perumahan; dan
8. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu di kembangkan.
9. Telah tersedianya database Rumah Tidak Layak Huni namun masih perlu dimutakhirkan.
10. Belum tersedianya regulasi berupa peraturan daerah tentang RP3KP, RP2KPKP dan PSU.
11. Kabupaten mamuju tengah belum masuk dalam daftar program KOTAKU.
12. Masyarakat dalam kategori miskin tidak dapat menjadi target pembiayaan APBN dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Peluang:

Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tiga urusan wajib (Urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan) adalah:

1. Urusan perumahan mengemban amanah untuk mendukung KDH dalam mewujudkan misi pembangunan sesuai dengan RPJMD 2021-2026, terkhusus dalam misi (1), misi (2) dan misi (3).
2. Dukungan Pemerintah Daerah, DPRD dan *stakeholder* terkait di Kabupaten Mamuju Tengah yang besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
3. Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur Perumahan di Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Potensi sumber daya alam Kabupaten Mamuju Tengah yang sangat strategis;

5. Perkembangan permukiman yang masih sejalan dengan pertambahan penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah;

2.3.6 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi penyusunan ranperda tentang PSU, RP3KP, RP2KPKP dan ranperda tentang Membara (Membangun Rumah Rakyat)
2. Optimalisasi penyusunan ranperda tentang Penyerahan PSU
3. Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
4. Perwujudan Kondisi Lingkungan Yang Sehat, Aman, Harmonis Dan Berkelanjutan Untuk Pembangunan Permukiman Baru.
5. Strategi Pengembangan Berbagai Jenis Dan Mekanisme Subsidi Perumahan.
6. Strategi Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
7. Strategi Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
8. Strategi Pengembangan Tatacara Pengawasan Dan Pengendalian.
9. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh.
10. Strategi Perbaikan Sarana, Prasarana, Dan Utilitas Umum Pada Kawasan Permukiman Yang Telah Terbangun.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan daerah.

Adapun proses yang dilakuan terhadap review rencana awal dengan renja (rencana kerja) yaitu proses perubahan terdapat perubahan nomenklatur subkegiatan dengan adanya Kemendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Kemendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Interventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program/kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Mamuju Tengah perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumusan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja.

Untuk melihat review rancangan awal RKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Mamuju Tengah

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				**73.454.500.000**			**14.770.000.000**
1	**04**				**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				**70.764.500.000**			**10.130.000.000**
1	04	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.689.400.000			2.584.700.000
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mateng	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		92.000.000	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		127.000.000
1	04	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Mateng	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok	25.000.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok	60.000.000
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mateng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	5.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	5.000.000
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mateng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	5.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	5.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mateng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.000.000
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mateng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	5.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	5.000.000
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mateng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	27.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	27.000.000
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mateng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	20.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	20.000.000
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mateng	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100	1.315.000.000	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100	1.315.000.000
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mateng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	1.220.000.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	1.220.000.000
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mateng	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 orang	5.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 orang	5.000.000
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mateng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 dokumen	15.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 dokumen	15.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	04	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mateng	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72 Dokumen	15.000.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72 Dokumen	15.000.000
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mateng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	5.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	5.000.000
1	04	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Mateng	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	5.000.000
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Mateng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 laporan	23.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 laporan	23.000.000
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mateng	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 laporan	27.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 laporan	27.000.000
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mateng	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	25.000.000	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	35.000.000
1	04	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mateng	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 laporan	5.000.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	5.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	04	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mateng	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	10.000.000
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mateng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	20.000.000
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mateng	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	221.200.000	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	157.200.000
1	04	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mateng	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	62 orang	18.600.000	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	62 orang	18.600.000
1	04	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Mateng	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 pasang	18.600.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 pasang	18.600.000
1	04	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Mateng	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	62 orang	15.000.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	62 orang	15.000.000
1	04	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mateng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	63 orang	10.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	63 orang	10.000.000
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mateng	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	79.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	45.000.000
1	04	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Mateng	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang	80.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang	50.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mateng	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	317.500.000	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	396.000.000
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mateng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 komponen	10.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 komponen	10.000.000
1	04	01	2.06	02	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Mateng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 unit	50.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 unit	50.000.000
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mateng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 unit	30.000.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 unit	30.000.000
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mateng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 rim	22.500.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 rim	50.000.000
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mateng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 orang	15.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 orang	56.000.000
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mateng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 orang	150.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 orang	160.000.000
1	04	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mateng	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 jenis	40.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 jenis	40.000.000
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mateng	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	295.000.000	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	295.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mateng	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	150.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	150.000.000
1	04	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Mateng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 komponen	25.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 komponen	25.000.000
1	04	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mateng	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	120.000.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	120.000.000
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mateng	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	336.500.000	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	182.500.000
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mateng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMe nyurat	62 orang	6.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMe nyurat	62 orang	2.500.000
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mateng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	322581 KWH, 432 MPBS, 4290 m3	50.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	322581 KWH, 432 MPBS, 4290 m3	70.000.000
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mateng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 jenis	10.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 jenis	10.000.000
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mateng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 orang	270.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 orang	100.000.000
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	mateng	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	87.200.000	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	77.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
					Pemerintah Daerah							
1	04	01	2.09	01	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Mateng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan	65.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan	65.000.000
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mateng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	22.200.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	12.000.000
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Mateng	**Presentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah daerah**	**100%**	**1.914.000.000**	**Presentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah daerah**	**100%**	**777.800.000**
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mateng	jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana	3 unit	133.200.000	jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana	3 unit	107.000.000
1	04	02	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mateng	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	53.200.000	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000
1	04	02	2.01	2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Mateng	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3 Dokumen	20.000.000	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3 Dokumen	10.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	04	02	2.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Mateng	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	3 Dokumen	45.000.000	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	3 Dokumen	45.000.000
1	04	02	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Mateng	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	3 Dokumen	6.000.000	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	3 Dokumen	6.000.000
1	04	02	2.01	5	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mateng	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	3 Dokumen	6.000.000	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	3 Dokumen	6.000.000
1	04	02	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Mateng	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	50 dokumen	42.000.000	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	50 dokumen	20.000.000
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mateng	Jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	85 orang	127.800.000	Jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	85 orang	74.800.000
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Mateng	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 orang	105.000.000	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 orang	30.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	04	02	2.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Mateng	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	60 orang	10.000.000	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	60 orang	10.000.000
1	04	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Mateng	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	30 orang	30.000.000	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	30 orang	30.000.000
1	04	02	2.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Mateng	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 dokumen	4.800.000	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 dokumen	4.800.000
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mateng	jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4 unit	1.555.000.000	jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4 unit	528.000.000
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Mateng	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5	100.000.000	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5	100.000.000
1	04	02	2.03	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah/Kota	Mateng	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	5.000.000			
1	04	02	2.03	3	Pengadaan lahan untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban bencana	Mateng	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha)	1	500.000.000			

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Mateng	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3	150.000.000	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 unit	250.000.000
1	04	02	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	mateng	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan		800.000.000	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan		78.000.000
1	04	02	2.03	5	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	mateng	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)		100.000.000
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	mateng	Jumlah unit rumah bagi korban bencana atau relokasi yang terdistribusi	3 unit	12.000.000	Jumlah unit rumah bagi korban bencana atau relokasi yang terdistribusi	3 unit	12.000.000
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	mateng	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 dokumen	6.000.000	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 dokumen	6.000.000
1	04	02	2.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	mateng	*Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)*	5 laporan	6.000.000	*Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)*	5 laporan	6.000.000
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah	mateng	Jumlah rumah susun umum dan/atau khusus yang dibina	48 unit	20.000.000	Jumlah rumah susun umum dan/atau khusus yang dibina	48 unit	10.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
					Khusus							
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	mateng	Jumlah dokumen penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	20 DOKUMEN	20.000.000	Jumlah dokumen penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	20 DOKUMEN	10.000.000
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	mateng	Jumlah izin pembangunan dan pengembangan yang diterbitkan	10 laporan	6.000.000	Jumlah izin pembangunan dan pengembangan yang diterbitkan	10 laporan	6.000.000
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	mateng	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 laporan	6.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 laporan	6.000.000
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	mateng	Jumlah rekomendasi untuk penerbitan SKBG	10 laporan	60.000.000	Jumlah rekomendasi untuk penerbitan SKBG	10 laporan	40.000.000
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	mateng	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	10 laporan	60.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	10 laporan	40.000.000
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	mateng	**Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**	**100%**	**53.271.100.000**	**Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**	**100%**	**4.531.500.000**
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	mateng	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1 kawasan	450.000.000	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1 kawasan	96.500.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	04	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	mateng	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik		100.000.000	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik		76.500.000
1	04	03	2.01	2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	mateng	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi (Dokumen)	1 laporan	300.000.000			
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	mateng	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman(Laporan)	1 laporan	50.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman(Laporan)	1 laporan	20.000.000
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	mateng	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	100%	840.000.000	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	100%	630.000.000
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	mateng	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0		Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0	30.000.000
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat	mateng	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman	4 KSM	300.000.000	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman	4 KSM	40.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
					di Permukiman Kumuh		Kumuh			Kumuh		
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	mateng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 kegiatan	100.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 kegiatan	40.000.000
1	04	03	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	mateng	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1	200.000.000			
1	04	03	2.02	6	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	mateng	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	5	170.000.000			
1	04	03	2.02	7	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	mateng	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1 Dokumen	20.000.000			
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	mateng	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Te*review* /Terlegalisasi	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Te*review* /Terlegalisasi	1 Dokumen	500.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	04	03	2.02	09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	mateng	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	24 keluarga	50.000.000	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	24 keluarga	20.000.000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	mateng	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	8 unit	51.981.100.000	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	8 unit	3.805.000.000
1	04	03	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	mateng	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (Dokumen)	1	50.000.000			
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	mateng	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	108	12.620.000.000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	108	80.000.000
						mateng	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	316	6.310.000.000	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	2	40.000.000
						mateng	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	316	6.310.000.000	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	2	40.000.000
1	04	03	2.03	3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	mateng	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	5	100.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	30.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	mateng	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	1.000.000.000			
1	04	03	2.03	5	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	mateng	*Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh (Dokumen)*	5	50.000.000			
1	04	03	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	mateng	*Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar (Ha)*	5	15.451.100.000			
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	mateng	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1	60.000.000	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 DOKUMEN	50.000.000
1	04	03	2.03	8	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	mateng	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun (Unit)*	20	22.650.000.000			
1	04	03	2.03	11	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	mateng	*Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha)*			*Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha)*		50.000.000
1	04	03	2.03	12	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	mateng	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)*	*0*		*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)*	*0*	900.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
						mateng	*Pembangunan Rumah Baru Layak Huni(Jenis dan Unit (PSU))*			*Pembangunan Rumah Baru Layak Huni(Jenis dan Unit (PSU))*		*100.000.000*
						mateng	*Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Jenis dan Unit (PSU))*			*Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Jenis dan Unit (PSU))*		*400.000.000*
						mateng	*Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Jenis dan Unit (PSU))*			*Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Jenis dan Unit (PSU))*		*100.000.000*
						mateng	*Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Jenis dan Unit (PSU))*			*Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Jenis dan Unit (PSU))*		*200.000.000*
						mateng	*Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Jenis dan Unit (PSU))*			*Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Jenis dan Unit (PSU))*		*100.000.000*
1	04	03	2.03	13	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	mateng	*Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)*			*Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)*		2.695.000.000
						mateng	*Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan kumuh (Meter Lari)*			*Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan kumuh (Meter Lari)*		*990.000.000*
						mateng	*Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan kumuh (Jenis dan Unit (PSU))*			*Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan kumuh (Jenis dan Unit (PSU))*		*300.000.000*
						mateng	*Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan kumuh (Meter Lari)*			*Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan kumuh (Meter Lari)*		*990.000.000*
						mateng	*Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan*			*Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan*		*165.000.000*

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
							kumuh (Meter Lari)			*kumuh (Meter Lari)*		
						mateng	*Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan kumuh (Meter)*			*Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan kumuh (Meter)*		*250.000.000*
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	mateng	**Presentase rumah tidak layak huni yang tertangani**	**100%**	**12.450.000.000**	**Presentase rumah tidak layak huni yang tertangani**	**100%**	**2.100.000.000**
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	mateng	Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani	10 UNIT	12.450.000.000	Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani	10 UNIT	2.100.000.000
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	mateng	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	500	12.200.000.000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100	2.080.000.000
						mateng				Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	50	*40.000.000*
						mateng				Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	2	*200.000.000*
						mateng				Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	10	*40.000.000*

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
						mateng				Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	40	*1.000.000.000*
						mateng				Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	2	*800.000.000*
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	mateng	*Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen)*	20 DOKUMEN	200.000.000	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang)*	20 DOKUMEN	20.000.000
1	04	04	2.01	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	mateng	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang)*			*Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang)*	20 DOKUMEN	20.000.000
1	04	04	2.01	3	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	mateng	*Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen)*	5	50.000.000	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang)*	20 DOKUMEN	20.000.000
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	mateng	**Jumlah permukiman yang tefasilitasi PSU**	**61**	**440.000.000**	**Jumlah permukiman yang tefasilitasi PSU**	**61**	**136.000.000**

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	mateng	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	440.000.000	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	136.000.000
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	mateng	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSUPerumahan	1 dokumen	6.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSUPerumahan	1 dokumen	6.000.000
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	mateng	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 LOKASI	364.000.000	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 LOKASI	100.000.000
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	mateng	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 laporan	40.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 laporan	30.000.000
1	04	05	2.01	03	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	mateng	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1 laporan	30.000.000			
2					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	mateng			**2.690.000.000**			**4.640.000.000**
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	mateng			**2.690.000.000**			**4.640.000.000**
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	mateng	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan		40.000.000	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan		40.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
						lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	mateng	Jumlah Kasus yang diselesaikan	1 kasus	40.000.000	Jumlah Kasus yang diselesaikan	1 kasus	40.000.000
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	mateng	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 DOKUMEN	10.000.000	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 DOKUMEN	10.000.000
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	mateng	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 BERITA ACARA	30.000.000	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 BERITA ACARA	30.000.000
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	mateng	**Persentase Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan**		**2.650.000.000**	**Persentase Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan**		**4.600.000.000**
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	mateng	Persentase luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten	100%	2.650.000.000	Persentase luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten	100%	4.600.000.000
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	mateng	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	9 dokumen	150.000.000	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	9 dokumen	100.000.000

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023			Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Tahun 2024		
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024	
								Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	mateng	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9 HA	2.500.000.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9 HA	4.500.000.000
TOTAL PAGU									73.454.500.000			14.770.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain isu-isu penting yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang

selama ini dilaksanakan oleh Dinas Perkimtan, program dan kegiatan di tahun 2024 nantinya juga berasal dari usulan masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi (Musrenbang) Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Tematik, Musrenbang Kabupaten sampai menjadi RKPD Kabupaten atau terdapat usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat yang bersumber dari hasil reses DPRD, hasil Musrenbang Kecamatan dan hasil sinkronisasi bersama DPRD Ditambah dengan masukan-masukan dari Perangkat Daerah lain yang disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat atau Perangkat Daerah terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang kemudian dianalisis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun beberapa usulan dari Perangkat Daerah lain atau kelompok masyarakat tercantum dalam Ranwal Renja Dinas Perkimtan Tahun 2024 tabel usulan program dan kegiatan dari Pemangku kepentingan pada sebagai berikut:

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Mamuju Tengah

No	Program	Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator kinerja	Volume	Ket.
1	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	(Dusun Tanah Merah dan Dusun Benteng Situru, Desa Bojo,)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50	RTLH Bojo

No	Program	Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator kinerja	Volume	Ket.
2	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(Desa pasapa, kecamatan budong-budong, Pasapa, Kec. Budong-Budong)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	225	RTLH Pasapa
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas RTLH dan Penyediaan PSU	(Desa Tinali, Tinali, Kec. Budong-Budong)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	60	Masyarakat Miskin
4	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	(Dusun Beringin Indah dan Dusun Uwai Solong,Desa Lembah Hada	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30	Masyarakat Miskin
5	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Salumanurung	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50	Masyarakat Miskin
6	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(DESA SALOGATTA, Salogatta, Kec. Budong-Budong)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8	Rumah Tidak Layak Huni
7	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	(Desa Lumu, Lumu, Kec. Budong-Budong)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50	RTLH Lumu
8	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	(desa salubiro kec karossa kab mamuju tengah, Salubiro, Kec. Karossa)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50	RTLH
9	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	(Desa Suka Maju, Suka Maju, Kec. Karossa)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	152	Masyarakat Miskin
10	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	(DESA BENGGAULU, Benggaulu, Kec. Karossa)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100	Masyarakat Miskin

No	Program	Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator kinerja	Volume	Ket.
11	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	(Desa Lembah Hopo, Kec. Karossa)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	125	Masyarakat Miskin
12	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(Desa Lara, Lara, Kec. Karossa)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	160	Masyarakat Miskin
13	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(DUSUN ARGOMULYO, DUSUN PURWODADI, DUSUN WANASARI,DUSUN TRI TUNGGAL, DUSUN BUANA SAKTI, Polo Lereng, Kec. Pangale)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100	
14	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(DESA KOMBILING, Kombiling, Kec. Pangale)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50	
15	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(Dusun Mekarsari, Dusun Beringin, Dusun Mario, Polo Pangale, Kec. Pangale)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	30	
16	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas RTLH dan Penyediaan PSU	(Dusun Beringin, Dusun Mekarsari, Dusun Mario, Dusun Sidomulyo, Polo Pangale, Kec. Pangale)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	60	
17	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas RTLH dan Penyediaan PSU	(Dusun Lemo-Lemo, Puncak Jaya, Along-Along, & Bajo, Lemo-Lemo, Kec. Pangale)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50	

No	Program	Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator kinerja	Volume	Ket.
18	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(DESA PANGALE KECAMATAN PANGALE, Pangale, Kec. Pangale)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50	Desa Pangale
19	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(Desa Batu Parigi, Batu Parigi, Kec. Tobadak)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	150	Masyarakat Miskin
20	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	pembangunan jalan, pembangunan drainase	(Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Mahahe, Mahahe, Kec. Tobadak)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	250	Masyarakat Miskin
21	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(Desa Palongaan, Palongaan, Kec. Tobadak)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100	Masyarakat Miskin
22	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(desa saloadak, Saloadak, Kec. Tobadak)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100	Masyarakat Miskin
23	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	(Desa Salumanurung, Kec. Budong-Budong)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50	Masyarakat Miskin
24	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(DESA SALOGATTA, Salogatta, Kec. Budong-Budong)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8	Rumah Tidak Layak Huni
25	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	(Desa Lumu, Lumu, Kec. Budong-Budong)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50	RTLH Lumu
26	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	(Tabolang, Kec. Topoyo)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	200	

No	Program	Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator kinerja	Volume	Ket.
27	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	(desa tumbu, Kec. Topoyo)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10	
28	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(Desa Salulekbo, Kec. Topoyo)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50	
29	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	(Desa Paraili, Kec. Topoyo)	50	50	
30	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(Desa Kabubu, Kec. Topoyo)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50	
31	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	(Desa Salupangkang IV, Kec. Topoyo)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	80	
32	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pembangunan Infrastruktur di Perumahan	(Desa Topoyo Kec. Topoyo)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100	
33	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(Desa Sinabatta, Kec. Topoyo)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100	
34	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(Desa Pangalloang, Kec. Topoyo)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	40	
35	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	pembangunan jalan, pembangunan drainase	Dusun Mora Utama Desa Karossa Kecamatan Karossa	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	170	H. HASANUDDIN SAILON

No	Program	Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator kinerja	Volume	Ket.
36	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Bojo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100	ALAMSYAH ARIFIN, A.MD.KEP
37	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	(Betonisasi jalan)	desa lara	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2000	ARMAN
38	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	(rabat Beton)	Desa Salupangkang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2000	Hj. NURLAENI TAMMAUNI
39	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Wilayah pangale dan budong-budong	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10	YULIUS S, SE Fraksi : Gerindra
40	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(DESA SALOGATTA, Salogatta, Kec. Budong-Budong)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8	RUKMAN
41	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	(Pembangunan jalan)	DesaTopoyo	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1500	SYAHRIL R
42	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	(Pembangunan jalan)	kecamatan karossa	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2000	RUKMAN
43	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kambunong	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	40	RUKMAN

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan perumahan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraannya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka arah kebijakan Perumahan Nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Penciptaan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan ditingkat pusat dan daerah dalam rangka pemenuhan hak dasar rakyat atas rumah.
b) Peningkatan pemenuhan rumah sejahtera yang didukung dengan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta kepastian bermukim bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan perkotaan dan pedesaan.
c) Kelembagaan sistem pendanaan dan pembiayaan perumahan dan permukiman.
d) Peningkatan pendayagunaan sumber daya pembangunan permukiman, pemanfaatan hasil-hasil IPTEK yang mengacu tata ruang dan kearifan lokal.
e) Peningkatan sinergi antara pusat, daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Mamuju Tengah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026, yaitu:

Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kepuasaan masyarakata atas layanan perumahan 2. Meningkkan kualitas layanan pertanahan 3. Meningkatnya tata kelola pada Dinas Perumahan Rakyat dan	1. Terpenuhinya rumah layak huni MBR 2. Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan SPM Perumahan 3. Terselenggaranya layanan pertanahan 4. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1. Pembangunan rumah/ Peningkatan kualitas rumah bagi MBR 2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 4. Pembangunan rumah bagi masyarakat Korban Bencana 5. Pembangunan rumah bagi masyarakat	1. Terwujudnya rumah layak huni bagi MBR 2. Terwujudnya Permukiman layak huni 3. Terwujudnya perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) 4. Terwujudnya rumah hunian bagi masyarakat Korban Gempa 5. Terwujudnya rumah hunian bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah

Kawasan Permukiman serta Pertanahan		terkena relokasi program pemerintah, fasilitasi dan pendampingan 6. Penyediaan rumah layak huni bagi Rumah Tangga miskin	6. Terwujudnya peningkatan kualitas rumah hunian bagi masyarakat Rumah Tangga Miskin

3.3 Program dan Kegiatan

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2025 yaitu “Mamuju Tengah yang sejahtera mandiri dan berwawasan lingkungan tahun 2025”. Selain itu, faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dan yang merupakan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Adapun rumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Kemendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Interventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Mamuju Tengah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
2.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Presentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah daerah		100	887.800.000	100	1.317.800.000
1.04.02.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			88.000.000		68.000.000
1.04.02.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1	20.000.000	1	20.000.000
1.04.02.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		3	20.000.000		
1.04.02.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Mamuju Tengah	3	6.000.000	3	6.000.000
1.04.02.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Mamuju Tengah	3	6.000.000	3	6.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
1.04.02.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Mamuju Tengah	3	6.000.000	3	6.000.000
1.04.02.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		50	30.000.000	50	30.000.000
1.04.02.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			72.800.000		72.800.000
2.04.02.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		100	50.000.000	100	50.000.000
2.04.02.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		60	10.000.000	60	10.000.000
2.04.02.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		30	8.000.000	30	8.000.000
2.04.02.02.05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		5	4.800.000	5	4.800.000
2.04.02.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota			655.000.000		1.005.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
2.04.02.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		5	100.000.000	5	100.000.000
2.04.02.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail EngineeringDesign (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail *Engineering Design* (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		2	5.000.000	1	5.000.000
2.04.02.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		5	250.000.000	5	250.000.000
2.04.02.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan		5	200.000.000	5	200.000.000
2.04.02.03.07	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		-	-	5	100.000.000
2.04.02.03.08	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		-	-	5	100.000.000
2.04.02.03.09	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		1	100.000.000	5	250.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
2.04.02.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			6.000.000		6.000.000
2.04.02.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		5	6.000.000	5	6.000.000
2.04.02.04.02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		5	6.000.000	5	6.000.000
2.04.02.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				20.000.000		20.000.000
2.04.02.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	jumlah Dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus		20	20.000.000	20	20.000.000
2.04.02.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		10	6.000.000	11	106.000.000
2.04.02.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1	100.000.000
2.04.02.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan danPengembangan Perumahan		10	6.000.000	10	6.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
2.04.02.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB				40.000.000		40.000.000
2.04.02.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		10	40.000.000	10	40.000.000
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1	50000000	1	50000000
1.04.05.201	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil			1	50000000	1	50000000
1.04.06.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	50.000.000	1	50.000.000
2.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase kawasan permukiman layak huni		100	5.650.000.000	100	6.080.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
2.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				400.000.000		500.000.000
2.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan IzinPembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Majuteng ah			1 dokumen	100.000.000
2.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Te*review* serta Terlegalisasi	Majuteng ah	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000
2.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Majuteng ah	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000
2.04.03.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah kawasan kumuh tertangani infrastruktur dasarnya			740.000.000		920.000.000
2.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Majuteng ah			1 dokumen	100.000.000
2.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Majuteng ah	3 laporan	50.000.000	3 laporan	50.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
2.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Mamuju tengah	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000
2.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Mamuju tengah	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000
2.04.03.2.02.06	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Mamuju tengah	5 laporan	50.000.000	5 laporan	50.000.000
2.04.03.2.02.07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Mamuju tengah	5 kk	20.000.000	5 kk	20.000.000
2.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T*ereview* /Terlegalisasi	Mamuju tengah	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah		50	20.000.000	50	100.000.000
2.04.03.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	presentase Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			4.510.000.000		4.660.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
2.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Mamuju tengah			1 dokumen	100.000.000
2.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Mamuju tengah	108	2.160.000.000	108	2.160.000.000
2.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Mamuju tengah	5 dokumen	100.000.000	5 dokumen	100.000.000
2.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Mamuju tengah	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000
2.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Mamuju tengah	71	1.000.000.000	71	1.000.000.000
2.04.03.2.03.06	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Mamuju tengah	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000
2.04.03.2.03.07	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun		18	1.000.000.000	20	1.000.000.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			2.150.000.000		2.150.000.000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosiliasi pencegahan muncul dan perkembangnya permukiman kumuh yang berada diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Mamuju tengah		2.150.000.000		2.150.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
		Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Mamuju tengah	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Mamuju tengah	5	100.000.000	5	100.000.000
1.04.04.2.01.03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh (sepuluh) Hadengan Luas di Bawah 10	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Mamuju tengah	5 kk	50.000.000	5 kk	50.000.000
1.04.05.2.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				696.000.000		696.000.000
1.04.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Presentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			696.000.000		696.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
1.04.05.2.01.01	Perencanaan penyediaan PSU perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		1	6.000.000	1	6.000.000
1.04.05.2.01.02	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		50	350.000.000	50	350.000.000
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		10	40.000.000	10	40.000.000
1.04.05.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang		1	150.000.000	1	150.000.000
1.04.05.2.01.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		1	150.000.000	1	150.000.000
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				40.000.000		40.000.000
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang diselesaikan		2	40.000.000	2	40.000.000
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	10.000.000	1	10.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	30.000.000	1	30.000.000
02:10:05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				2.650.000.000		2.650.000.000
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	presentase Luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanag untuk pembangunan oleg pemerintah daerah kabupaten			2.650.000.000		2.650.000.000
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah		33 dokumen	150.000.000	33 dokumen	150.000.000
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		33 dokumen	2.500.000.000	33 dokumen	2.500.000.000
02:10:06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Bidang Calon Penerima Sertifikat Redistribusi					

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		500 BIDANG		500 BIDANG	
1.04.06.201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		1	2.656.400.000	1	2.621.400.000
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		1	92.000.000	1	92.000.000
01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	5 laporan	27.000.000	5 laporan	27.000.000
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu		100	1.315.000.000	100	1.315.000.000
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		62 orang	1.220.000.000	62 orang	1.220.000.000
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		62 orang	5.000.000	62 orang	5.000.000
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		48 dokumen	15.000.000	48 dokumen	15.000.000
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		72 Dokumen	15.000.000	72 Dokumen	15.000.000
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		16 laporan	23.000.000	16 laporan	23.000.000
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		4 laporan	27.000.000	4 laporan	27.000.000
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100	25.000.000	100	25.000.000
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		3 laporan	10.000.000	3 laporan	10.000.000
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani		100	221.200.000	100	221.200.000
01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		62 unit	18.600.000	62 unit	18.600.000
01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		62 paket	18.600.000	62 paket	18.600.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		62 dokumen	15.000.000	62 dokumen	15.000.000
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		62 dokumen	10.000.000	62 dokumen	10.000.000
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 orang	79.000.000	3 orang	79.000.000
01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		8 orang	80.000.000	8 orang	80.000.000
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar		100	267.500.000	100	267.500.000
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 paket	10.000.000	12 paket	10.000.000
01.2.06.02	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan		4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 paket	30.000.000	5 paket	30.000.000
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		150 paket	22.500.000	150 paket	22.500.000
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1000 laporan	15.000.000	1000 laporan	15.000.000
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		62 laporan	100.000.000	62 laporan	100.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		20 dokumen	40.000.000	20 dokumen	40.000.000
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi			330.000.000		295.000.000
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 unit	150.000.000	3 unit	150.000.000
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 komponen	25.000.000
01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 unit	60.000.000		
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	120.000.000	1 unit	120.000.000
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100	318.500.000	100	318.500.000
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		62 laporan	6.500.000	62 laporan	6.500.000
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 laporan	32.000.000	3 laporan	32.000.000
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		45 laporan	270.000.000	45 laporan	270.000.000
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100	87.200.000	100	87.200.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Rp	Target	Rp
01.2.09.01	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11 unit	65.000.000	11 unit	65.000.000
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 unit	22.200.000	12 unit	22.200.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD). Adapun rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah tertuang dalam table berikut :

Tabel 4.1. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				**14.770.000.000**		
1	**04**				**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				**10.130.000.000**		
1	04	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.584.700.000		
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu			127.000.000		
1	04	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Mamuju Tengah	1 dok	60.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 dok	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 dok	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.0	04	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kab. Mamuju	1 dok	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
			1		DPA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tengah				
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 dok	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah	2 dokumen	27.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	1 dok	20.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu		100	1.315.000.000		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah	18 orang	1.220.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mamuju Tengah	18 orang	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Kab. Mamuju Tengah	48 dokumen	15.000.000	DAU	Kegiatan Rutin

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
					rifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
1	04	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Mamuju Tengah	72 Dokumen	15.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 dokumen	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Mamuju Tengah	2 dokumen	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah	16 laporan	23.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	Kab. Mamuju Tengah	4 laporan	27.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100%	35.000.000		
1	04	01	2.0	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan	Kab. Mamuju	1 laporan	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
			3		Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD	Tengah				
1	04	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	2 laporan	10.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	3 laporan	20.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	-	100%	157.200.000	-	-
1	04	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Mamuju Tengah	62 orang	18.600.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mamuju Tengah	62 pasang	18.600.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Mamuju Tengah	62 orang	15.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Mamuju Tengah	63 orang	10.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Mamuju Tengah	3 orang	45.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.0	11	Bimbingan teknis implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti	Kab. Mamuju	8 orang	50.000.000	DAU	Kegiatan Rutin

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
			5		peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tengah				
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar		100%	396.000.000		
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	12 komponen	10.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.06	02	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	4 unit	50.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	5 unit	30.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	150 rim	50.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah	1000 orang	56.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah	62 orang	160.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	20 jenis	40.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase BMD-PD penunjang yang		100%	295.000.000		

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
					Urusan Pemerintah Daerah	terpenuhi					
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	3 unit	150.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	3 komponen	25.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	Kab. Mamuju Tengah	0	-	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	1 unit	120.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100%	182.500.000		
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Kab. Mamuju Tengah	62 orang	2.500.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	322581 KWH, 432 MPBS, 4290 m3	70.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	12 jenis	10.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju Tengah	45 orang	100.000.000	DAU	Kegiatan Rutin

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
						yang Disediakan					
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100%	77.000.000		
1	04	01	2.09	01	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Mamuju Tengah	12 bulan	65.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mamuju Tengah	12 unit	12.000.000	DAU	Kegiatan Rutin
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Presentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah daerah**		**100%**	**777.800.000**		
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana		3 unit	107.000.000		
1	04	02	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	20.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	04	02	2.01	2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Mamuju Tengah	3 Dokumen	10.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Mamuju Tengah	3 Dokumen	45.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab. Mamuju Tengah	3 Dokumen	6.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.01	5	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)		3 Dokumen	6.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Kab. Mamuju Tengah	50 dokumen	20.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/K	Jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		85 orang	74.800.000		

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
					ota	Kabupaten/Kota					
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	100 orang	30.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan MekanismeAkses Perumahan KPR-FLPP	Kab. Mamuju Tengah	60 orang	10.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Kab. Mamuju Tengah	30 orang	30.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	5 dokumen	4.800.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	4 unit	528.000.000		

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Mamuju Tengah	5	100.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Mamuju Tengah	5 unit	250.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Kab. Mamuju Tengah		78.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.03	5	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)			100.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah bagi korban bencana atau relokasi yang terdistribusi	Kab. Mamuju Tengah	3 unit	12.000.000		
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	5 dokumen	6.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	04	02	2.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)*		5 laporan	6.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rumah susun umum dan/atau khusus yang dibina	Kab. Mamuju Tengah	48 unit	10.000.000		
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Kab. Mamuju Tengah	20 DOKUMEN	10.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin pembangunan dan pengembangan yang diterbitkan		10 laporan	6.000.000		
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Mamuju Tengah	10 laporan	6.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah rekomendasi untuk penerbitan SKBG		10 laporan	40.000.000		
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Kab. Mamuju Tengah	10 laporan	40.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN**	**Presentase kawasan**		**100%**	**4.531.500.0**		

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
					PERMUKIMAN	**permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**			**00**		
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman		1 kawasan	96.500.000		
1	04	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanTerintegrasi Secara Elektronik	Kab. Mamuju Tengah		76.500.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)		1 laporan	20.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		100%	630.000.000		
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	1 kegiatan	40.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	04	03	2.0	08	Penyusunan/ Review /Legalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan	Kab. Mamuju	1 Dokumen	500.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
			2		Kebijakan Bidang PKP	Bidang PKP yang Tersusun/Te*r eview* /Terlegalisasi	Tengah				Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	04	03	2.02	03	Pembentukan /Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	4 KSM	40.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	0	30.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	04	03	2.02	09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	24 keluarga	20.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		8 unit	3.805.000.000		
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Mamuju Tengah	108	80.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
						Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	(lumu, Lumu, Kec. Budong - Budong)	2	40.000.000		

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
						Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	(dusun beringin indah, dusun uwai sokong, Pangale, Kec. Pangale)	2	40.000.000		
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	1 laporan	30.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kab. Mamuju Tengah	1 DOKUMEN	50.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	04	03	2.03	11	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	*Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha)*	*(5 kecamatan (kawasan kumuh), KAB. MAMUJU TENGAH)*		50.000.000		
1	04	03	2.03	12	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)*		*0*	900.000.000		
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni(Jenis dan Unit (PSU))	*(Desa Sinabatta Kecamatan Topoyo,*		*100.000.000*		

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
						Sinabatta, Kec. Topoyo)					
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Jenis dan Unit (PSU))	*(Desa Salogatta Kecamatan Budong - Budong, Salogatta, Kec. Budong - Budong)*		*400.000.000*		
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Jenis dan Unit (PSU))	*(Desa Pasapa Kecamatan Budong - Budong, Pasapa, Kec. Budong - Budong)*		*100.000.000*		
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Jenis dan Unit (PSU))	*(Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo, Salulekbo, Kec. Topoyo)*		*200.000.000*		
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Jenis dan Unit (PSU))	*(Desa Kombiling, Pangale, Kombiling, Kec. Pangale)*		*100.000.000*		
1	04	03	2.03	13	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	*Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)*	*(5 kecamatan (Kawasan kumuh), KAB. MAMUJU TENGAH)*		2.695.000.000		

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
						Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan kumuh (Meter Lari)			*990.000.000*		
						Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan kumuh (Jenis dan Unit (PSU))			*300.000.000*		
						Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan kumuh (Meter Lari)			*990.000.000*		
						Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan kumuh (Meter Lari)			*165.000.000*		
						Pembangunan jalan, pembangunan drainase, pengadaan PJU kawasan kumuh (Meter)			*250.000.000*		
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Presentase rumah tidak layak huni yang tertangani**		**100%**	**2.100.000.000**		
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani		10 UNIT	2.100.000.000		

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Mamuju Tengah	100	2.080.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
						Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	*(semua dusun di salu pangkang IV, Salupangkang IV, Kec. Topoyo)*	50	*40.000.000*		
						Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	*(Kec. Pangale dan Kec. Budong-budong, KAB. MAMUJU TENGAH)*	2	*200.000.000*		
						Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	*(semua dusun di desa tabolang, Tabolang, Kec. Topoyo)*	10	*40.000.000*		
						Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	*(Desa Bojo, Bojo, Kec. Budong-Budong)*	40	*1.000.000.000*		
						Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	*(Desa Kambunong, KAB. MAMUJU*	2	*800.000.000*		

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
							TENGAH)				
1	04	04	2.01	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang)*		20 DOKUMEN	20.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah permukiman yang tefasilitasi PSU**		**61**	**136.000.000**		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		100%	136.000.000	DAU	
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSUPerumahan	Kab. Mamuju Tengah	1 dokumen	6.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Mamuju Tengah	1 LOKASI	100.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Mamuju Tengah	1 laporan	30.000.000	DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	04	06	2.01	4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen		DAU	Kegiatan Mendukung Pemenuhan Kegiatan Perioritas
2					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				**6.140.000.000**		
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**4.640.000.000**		
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan			40.000.000		
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang diselesaikan		1 kasus	40.000.000		
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	1 DOKUMEN	10.000.000	DAU	Mendukung kegiatan Pilihan
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	1 BERITA ACARA	30.000.000	DAU	Mendukung kegiatan Pilihan
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN**	**Persentase Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk**			**4.600.000.000**		

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
					SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**pembangunan**					
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten		100%	4.600.000.000		
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Kab. Mamuju Tengah	9 dokumen	100.000.000	DAU	Mendukung kegiatan Pilihan
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	9 HA	4.500.000.000	DAU	Mendukung kegiatan Pilihan
					Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan					
					Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan					

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
					Kabupaten/Kota						
TOTAL PAGU									14.770.000.000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan perioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indicator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian – penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1 Kaidah – kaidah pelaksanaan

Rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai inplementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh Staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta

Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:

a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

1.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan ***Rencana Kerja (Renja)*** Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang diuraikan secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah ini secara umum belum mampuh memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran Rencana Kerja Tahun 2024. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini.

Tobadak, Juli 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mamuju Tengah

Drs. SALMAN ALI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640312 1997051 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 18

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 21

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 23

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 23

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 23

3.3. Program dan Kegiatan 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 31

BAB V PENUTUP 32

Lampiran-Lampiran

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 3.1. Substansi Kegiatan Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 050/13402/SJ

Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan kegiatan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015, telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang menjadi dasar untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Rencana Kerja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan rencana kerja.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Rencana Kerja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;

26. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah untuk satu tahun kedepan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah :

1. Memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan untuk tahun rencana secara komprehensif dan integralistik.
2. Sebagai dokumen resmi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mamuju Tengah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematikan penulisan rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Terdiri dari :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dan Capaian Renstra Perangat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja **Pelayanan Perangat Daerah**.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangat Daerah.

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang uraian program, kegaiatan dan pendanaan yang direncanakan.

BAB V PENUTUP.

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra DPM-PTSP Tahun 2021-2026. Rencana Kerja juga merupakan alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mamuju Tengah terkait dengan evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahun 2022.

Total nilai realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.304.257.736,- (96,40%) dari alokasi dana sebesar Rp. 3.427.300.630,- sedangkan realisasi Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.875.296.249,- (96,22%) dari alokasi dana sebesar Rp. 2.988.324.243,-. Terdapat kenaikan dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar 87%.

Realisasi Anggaran pada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau dibawah 90% (sembilan puluh persen) terdapat pada Kegiatan "*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota"* Serta Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu 88,86%.

Secara umum didalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada DPM-PTSP telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan namun belum mencapai 100% (seratus persen). Dari kondisi tersebut harus dilakukan perbaikan guna mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu

perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan untuk mengetahui penyebab kekurangan tersebut sebagai umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 disajikan pada **Tabel 2.1.**

Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah Karena ada beberapa program/kegiatan yang tidak tercapai target kinerjanya pada tahun 2022, maka secara otomatis akan mengurangi capaian target Renstra. Dan untuk mengatasi hal tersebut maka akan dilakukan upaya untuk penambahan terget kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

1. Lebih teliti dalam pelaksanaan perencanaan suatu kegiatan.
2. Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun berikutnya denganacuan serapan pada tahun sebelumnya

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya program atau kegiatan. Pengukuran dilaksanakan berdasarkan kinerja yang telah dilakukan. Ranwal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 dan perkiraan target Tahun 2023.

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi DPM-PTSP serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) disajikan pada **Tabel 2.2.**

Sedangkan Analisa Realisasi Anggaran pada Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 melaksanakan 3 (tiga) program yang tercantum dalam penetapan kinerjayang terdiri dari :

a. 4 (Empat) program yang menjadi urusan wajib Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (DPM-PTSP).

b. 1 (satu) program yang bersifat penunjang terhadap program utama. Terhadap masing-masing program utama tersebut telah dianalisa terhadappelaksanaannya sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran sebesar Rp. 19.576.460,- dan realisasi anggaran Rp. 19.576.460,- sehingga didapatkan realisasi anggaran sebesar 100%. Indikator programnya adalah persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro dengan target 10% didapatkan realisasinya 7%. Sehingga tingkat capaian kinerja didapatkan 70%.

Capaian Indikator Program ini ditunjang kegiatan. Kegiatan dimaksud berikut besaran output (indikator kegiatan) yang diperoleh berdasarkan target kinerja berbanding realisasi kinerja berikut :

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi para Pemangku Kepentingan, pada Sub Kegiatan;

- *Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro*, dengan output jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan rektrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 1.100 Unit Usaha dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 1.095 Unit Usaha, maka persentase realisasi kinerja sebesar 99,5%.

Adapun ***kendalanya*** :

Banyak pelaku usaha yang menutup diri dan tidak mau terbuka kepada petugas pendataan dalam memberikan data-data yang diperlukan dilapangan yang diakibatkan kurangnya pemahaman tentang pendataan usaha.

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

- Melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya kelengkapan data/dokumen sebuah usaha
- Perencanaan tahun berikutnya memperhatikan realisasi anggaran tahun sebelumya dan disesuaikan dengan skala prioritas.

➢ *Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro*, dengan output Jumlah unit usaha yang telah melakukan kemitraan usaha, dengan target kinerja 25 unit usaha dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 25 unit usaha, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

Adapun ***kendalanya*** :

Target kinerja telah tercapai.

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

2. Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 775.875.950,- dan realisasi anggaran Rp. 651.527.950,- sehingga didapatkan realisasi anggaran sebesar 83,97%. Indikator programnya adalah persentase jumlah usaha kecil dan menengah dari total UMKM dengan target 100% didapatkan realisasinya 83.97%. Sehingga tingkat capaian kinerja didapatkan 83,97%.

Capaian Indikator Program ini ditunjang kegiatan. Kegiatan dimaksud berikut besaran output (indikator kegiatan) yang diperoleh berdasarkan target kinerja berbanding realisasi kinerja berikut:

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi

Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, pada Sub Kegiatan;

- *Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Tekhnologi*, dengan output jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi, dengan target kinerja 27 Unit Usaha dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 26 Unit Usaha, maka persentase realisasi kinerja sebesar 96,30%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  - Persyaratan yang telah ditetapkan dalam pemberian fasilitas hibah barang penunjang pengembangan usaha, sering terlambat dipenuhi oleh kelompok/usaha penerima bantuan hibah
  - Terdapat salah satu kelompok yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hibah dalam bentuk barang, sehingga anggarannya dikembalikan/tidak di proses.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Dalam perencanaan selanjutnya agar memastikan kelompok/unit usaha yang terdaftar sebagai calon penerima Hibah, benar-benar layak dan memenuhi persyaratan.

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 299.999.600,- dan realisasi anggaran Rp. 176.798.200,- sehingga didapatkan realisasi anggaran sebesar 58.93%. Indikator programnya adalah pertumbuhan investasi berskala nasional dengan target 58.93% didapatkan realisasinya 58.93%. Sehingga tingkat capaian kinerja didapatkan 100%.

Capaian Indikator Program ini ditunjang kegiatan. Kegiatan dimaksud berikut besaran output (indikator kegiatan) yang diperoleh berdasarkan target kinerja berbanding realisasi kinerja berikut:

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, pada Sub Kegiatan;

- *Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota*, dengan output jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota, dengan target kinerja 80 buku dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 80 buku, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Belum tersedianya dokumen pemetaan potensi investasi di masing-masing sektor.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Mamuju Tengah belum dikenal secara luas dengan sumberdaya/potensi investasi yang dimilikinya, sehingga diperlukan sarana/media informasi seperti buku profil investasi dan leaflet.

4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 28.464.850,- dan realisasi anggaran Rp. 28.464.850,- sehingga didapatkan realisasi anggaran sebesar 100%. Indikator programnya adalah jumlah Koperasi Sehat serta Koperasi Aktif dengan target 100% Koperasi Sehat serta Koperasi Aktif. Sehingga tingkat capaian kinerja didapatkan 100%.

Capaian Indikator Program ini ditunjang kegiatan. Kegiatan dimaksud berikut besaran output (indikator kegiatan) yang diperoleh berdasarkan target kinerja berbanding realisasi kinerja berikut:

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannyadalam Daerah Kabupaten/Kota, pada Sub Kegiatan;

- *Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan Kabupaten/Kota*, dengan output jumlah Presentase hasil kegiatan Pemeriksaan dan

Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannyadalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 100% dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 100%, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

Adapun ***kendalanya*** :

- Promosi penanaman modal daerah kurang dimaksimalkan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- Kurangnya minat investor untuk melakukan investasi di Mamuju Tengah
- Belum tersedianya kebijakan daerah tentang kepastian hukum (Perda tentang RUPM dan Perda pemberian Fasilitas/Insentif dan kendali penanaman modal)

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

Penyediaan dokumen kebijakan penanaman modal/jaminan kepastian hukum

5. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 290.673.655,- dan realisasi anggaran Rp. 290.059.535,- sehingga didapatkan realisasi anggaran sebesar 99.79%. Indikator programnya adalah rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan dengan target 5 hari didapatkan realisasasinya 5 hari. Sehingga tingkat capaian kinerja didapatkan 100%.

Capaian Indikator Program ini ditunjang kegiatan. Kegiatan dimaksud berikut besaran output (indikator kegiatan) yang diperoleh berdasarkan target kinerja berbanding realisasi kinerja berikut:

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, pada Sub Kegiatan;

- *Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non*

Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Eletronik, dengan output jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dengan target kinerja 1.396 pelaku usaha, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 1.392 pelaku usaha, maka persentase realisasi kinerja sebesar 99,71%.

Adapun ***kendalanya*** :

- Masih banyak pelaku usaha yang tidak memahami aplikasi perizinan.
- Kurangnya SDM pelaku usaha serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

Perlunya peningkatan SDM pelaku usaha melalui sosialisasi terkait penggunaan aplikasi dan manfaatnya bagi keberlangsungan usahanya.

- *Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal*, dengan output jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal, dengan target kinerja 24 kegiatan usaha, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 29 kegiatan usaha, maka persentase realisasi kinerja sebesar 120,83%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  - Target kinerja telah tercapai bahkan melampaui dari yang ditetapkan sebelumnya.
  - Juga masih terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 412.714.000,- dan realisasi anggaran Rp. 408.603.000,- sehingga didapatkan realisasi anggaran sebesar 99.00%. Indikator programnya adalah persentase kegiatan investasi yang patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan target 100% didapatkan realisasinya 100% Sehingga tingkat capaian kinerja didapatkan 100%.

Capaian Indikator Program ini ditunjang kegiatan. Kegiatan dimaksud berikut besaran output (indikator kegiatan) yang diperoleh berdasarkan target kinerja berbanding realisasi kinerja berikut:

Kegiatan Pengendalian Pelaksaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, pada Sub Kegiatan;

- *Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal*, dengan output jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, dengan target kinerja 36 kegiatan usaha, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 35 kegiatan usaha, maka persentase realisasi kinerja sebesar 97,22%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Masih kurangnya informasi terkait pelaksanaan dan kewajiban terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  - Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.
  - Perlunya dilaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap Pelaku Usaha

- *Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal*, dengan output jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman

modal, dengan target kinerja 182 pelaku usaha, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 182 pelaku usaha, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

Adapun ***kendalanya*** :

Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengikuti Pembinaan Pelaksanaaan Penanaman Modal.

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

- Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.
- Perlunya dibuatkan peraturan2 di daearh terkait Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal

➢ *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*, dengan output jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan, dengan target kinerja 36 kegiatan usaha, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 144 kegiatan usaha, maka persentase realisasi kinerja sebesar 400%.

Adapun ***kendalanya*** :

- Target kinerja telah tercapai bahkan melampaui dari yang ditetapkan sebelumnya.
- Juga masih Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terhadap kewajibannya dalam pelaksanaan Penanaman Modal

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

- Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.
- perlunya pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap Pelaku usaha

7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.599.996.115,- dan realisasi anggaran Rp. 1.559.089.877,- sehingga didapatkan realisasi anggaran sebesar 97,44%. Indikator programnya adalah

persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target 100% didapatkan realisasinya 100% Sehingga tingkat capaian kinerja didapatkan 100%.

Capaian Indikator Program ini ditunjang kegiatan. Kegiatan dimaksud berikut besaran output (indikator kegiatan) yang diperoleh berdasarkan target kinerja berbanding realisasi kinerja berikut:

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan;

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*, dengan output jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan target kinerja 2 dokumen, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 2 dokumen, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan;

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,* dengan output jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, dengan target kinerja 15 orang, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 15 orang, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

- *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujia/Verifikasi Keuangan SKPD,* dengan output jumlah dokumen

penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SIPD, dengan target kinerja 10 Dokumen, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 10 Dokumen, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

Adapun ***kendalanya*** :

Target kinerja telah tercapai.

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan;

- *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,* dengan output jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dengan target kinerja 10 dokumen, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 10 dokumen, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

- *Fasilitasi Kunjungan Tamu,* dengan output jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, dengan target kinerja 11 laporan, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 11 laporan, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*

SKPD, dengan output jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan target kinerja 22 laporan, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 55 laporan, maka persentase realisasi kinerja sebesar 250%.

Adapun ***kendala/alasannya*** :

Capaian kinerja sangat tinggi karena satuan OPD memaksimalkan terselenggaranya rapat koordinasi dengan anggaran yang terbatas.

Upaya mengatasi kendala/alasannya yakni :

Perencanaan tahun berikutnya perlu menyinkronkan penetapan target kinerja dan anggaran yang tersedia

D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada Sub Kegiatan;

- *Pengadaan Mebel,* dengan output jumlah paket mebel yang disediakan, dengan target kinerja 14 unit, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 14 unit, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi priorotas.

- *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,* dengan output jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan, dengan target kinerja 7 unit, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 7 unit, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi

priorotas.

E. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada Sub Kegiatan;

- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik,* dengan output jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dengan target kinerja 3 laporan, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 3 laporan, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi priorotas.

- *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,* dengan output jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, dengan target kinerja 1 laporan, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 1 laporan, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi priorotas.

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada Sub Kegiatan;

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan,* dengan output jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihhara dan dibayarkan pajaknya, dengan target kinerja 8 unit, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 8

unit, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

Adapun ***kendalanya*** :

Target kinerja telah tercapai.

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi priorotas.

- *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,* dengan output jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dengan target kinerja 20 unit, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 18 unit, maka persentase realisasi kinerja sebesar 90%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Adnya beberapa peralatan dan mesin lainnya yang sudah tidak layak untuk dipelihara, namun belum diusulkan untuk dimusnakan.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Menginventarisasi keadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi priorotas.

- *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya,* dengan output jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, dengan target kinerja 1 unit, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 1 unit, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi priorotas.

2.3. ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Permasalahan yang terjadi selama tahun 2022 pada Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya informasi terkait pelaksanaan dan kewajiban terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya
2. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengikuti Pembinaan Pelaksanaaan Penanaman Modal
3. Kurangnya minat investor untuk melakukan investasi di Mamuju Tengah
4. Promosi penanaman modal daerah kurang dimaksimalkan serta sarana dan prasarananya yang kurang memadai.
5. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memahami aplikasi serta prosedur penerbitan perizinan.
6. Banyaknya pelaku usaha yang menutup diri dan tidak mau terbuka kepada petugas di lapangan dalam memberikan data-data yang diperlukan, yang diakibatkan kurangnya pemahaman tentang pendataan usaha.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan di dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan, serta pembinaan terhadap pelaku usah dan koperasi adalah sebagai berikut:

1. kurangnya sosialisasi terhadap Pelaku Usaha;
2. kurangnya kepedulian dari pelaku usaha terhadap kewajiban terkait pelaksanaan penanaman modal sesuai perizinannya
3. belum tersedianya kebijakan daerah tentang kepastian hukum (Perda tentang RUPM dan Perda pemberian fasilitas/insentif dan kendali penanaman modal);
4. Belum tersedianya dokumen pemetaan potensi investasi di masing-masing sektor.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha serta kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha khususnya penggunaan aplikasi perizinan

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelayanan DPMPTSP-KUKM antara lain:

a. Adanya Standar Pelayanan (SP) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah.
b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah.
c. Adanya prinsip transparansi dalam pelayanan dengan tidak menetapkan retribusi untuk seluruh izin yang dilayani DPMPTSP-KUKM Kabupaten Mamuju Tengah.
d. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Online.
e. Sistem Online Single Submission (OSS).

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah yaitu dengan Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan global dan tranparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau e-Government. Pelaksanaan e-Goverment yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugasnya :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi perizinan, mempermudah dan mempercepat proses/ arus pelayanan perizinan serta terpublikasinya informasi perizinan dengan diterbitkannya Standar Operasional Prosedur (SOP), Standart Pelayanan (SP), Profil Perangkat Daerah dan Brosur perizinan.
2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi perizinan.
3. Terlaksananya penyusunan informasi perizinan dalam rangka pengembangan dan penertiban perizinan di Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu online kepada masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan visi dan misi Bupati terkait program prioritasprogram/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat pada Tabel 2.5.program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD yang direncanakan merupakan rancangan yang sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Mamuju Tengah dan telah dikondisikan dengan laporan evaluasi dan monitoring tahun sebelumnya atau n-1 atau tahun

2023 yaitu terdiri dari 5 (Lima) Program dengan 12 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.233.608.216 (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupia)

Review terhadap Rancangan RKPD, membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Review terhadap Rancangan RKPD disajikan pada **Tabel 2.4.**

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Proses usulan program dan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat di harapakan pada saat menyampaikan ususlan harus sesuai pada fungsi dan tugas pokok OPD, hal ini akan di peroleh pada saat pelaksanaan forum OPD dan serta musrenbang kabupaten. Pelaksanaan musrenbang merupakan wadah bersama antar pelaku (stakhoder) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui musrenbang kecamatan, usulan OPD serta unsur stakholder yang lain dalam rangka upaya menyusun penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja (Renja) OPD tahun anggaran 2024, Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakholder dengan berpedoman kepada matriks renstra 2021 – 2026 yang telah disusun, tema dan prioritas pembangunan 2024 serta didasari review capaian kinerja OPD berdasarkan amanat target kinerja OPD serta berdasarkan target Tenstra 2021- 2026.

Dalam pelaksanaan musrenbang tingkat desa/ kelurahan sampai tingkat kecamatan tidak ada usulan yang menunjang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.

(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun2024 Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : **DPMPTSP-KUKM Kabupaten Mamuju Tengah**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal dan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 050/13402/SJ tanggal 2 Desember 2019 tentang Fokus Kerja Presiden Tahun 2019-2024 maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut yang disajikan pada **Tabel 3.1.**

TABEL 3.1.
SUBSTANSI KEGIATAN SESUAI SURAT EDARAN MENDAGRI NO.050/13402/SJ

No.	Substansi Kegiatan Sesuai Surat Edaran No. 050/13402/SJ	Diakomodir dalam RKPD 2024
1	*Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur*	√

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dalam hal ini Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 Kabupaten Mamuju Tengah. Serta kaitannya dengan Perubahan-RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Berdasarkan visi, misi dan prioritas pembangunan daerah bahwa untuk pelaksanaan dan arah pembangunan DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tengah didasarkan pada Misi ke 3 (tiga) Kabupaten Mamuju Tengah yaitu “Mendorong daya saing perekonomian daerah” dan Misi ke 4 (empat) yaitu “Memantapkan tata kelolah pemerintahan yang baik”.

Berdasarkan Visi dan Misi pemerintah daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka DPMPTSP mempunyai program yang terdapat didalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021 – 2026 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pelayanan Penanaman Modal;

Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah "Meningkatnya Nilai Investasi pada Kabupaten Mamuju Tengah" melalui Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkesinambungan.

Sasaran :

Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas layanan dan realisasi Investasi;
b. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PM-PTSP;

TABEL 3.2.

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DPM-PTSP KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas	a. Pertumbuhan investasi daerah

	layanan dan realisasi Investasi	b. IKM Layanan Perizinan
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PM-PTSP	a. Nilai SAKIP Dinas PM-PTSP
		b. Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas PM-PTSP

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi Bupati Mamuju Tengah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah mewujudkannya dalam bentuk program dan kegiatan antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

<u>Sub Kegiatan :</u>

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pengadaan Aset Tak Berwujud
e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Mebel
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan :

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

   Sub Kegiatan :

   a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Kegiatan :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

e. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Kegiatan :

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
   b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
   c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Adanya perbedaan antara Rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan disebabkan dilakukannya kembali rasionalisasi, kegiatan/subkegiatan, target dan pagu, yang disesuaikan dengan

kondisi daerah terkini dan kebutuhan OPD.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPMPTSP) perlu melaksanakan program dan kegiatan yang disajikan pada **Tabel 3.3**.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan usulan Program Kegiatan Tahun 2024 ada pada Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) disajikan pada **Tabel 4.**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoala perencanan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis kepada kepentingan masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan paradigma baru, mempromosikan potensi dan peluang investasi didaerah dan memberikan kemudahan perizinan berusaha, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaaan yang dampaknya merembes kebawah (*trackle down effecct)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta sasaran program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kenerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Tabel 2.1
(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : **DPMPTSP-KUKM Kabupaten Mamuju Tengah**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022))	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
2	**17**	**03**			**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Koperasi sehat dari total koperasi aktif**	**500**		**-**	**-**	**-**	**100**	**100**	**20**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi**	**500**		**-**	**-**	**-**	**100**	**100**	**20**
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	333 Unit Usaha		-	-	-	-	-	-
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	333 Unit Usaha		-	-	-	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	18,02
2	**17**	**04**			**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase KSP/USP Sehat**	**500**		**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase KSP/USP yang mendapatkan Penilaian**	**500**		**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	715 Unit Usaha		-	-	-	-	-	-
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	8 Unit Usaha		-	-	-	-	-	-
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Persentase pengelolah Koperasi yang berkompeten dalam manajemen perkoperasian**	**400**		**-**	**-**	**-**	**-**	-	-

2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan**	**400**		**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang		-	-	-	-	-	-
2	**17**	**06**			**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Persentase Koperasi yang Produktifitasnya meningkat**	**500**		**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Koperasi yang diberdayakan**	**500**		**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM dan Kewirausahaan	50 Orang		-	-	-	-	-	-
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**	**232**		**10**	**7**	**70**	**21**	**28**	**12,07**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan**	**232%**		**10**	**7**	**70**	**21**	**28**	**12,07**
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8.435 Unit Usaha		1.100 Unit Usaha	1.095 Unit Usaha	99,55	-	1.095 Unit Usaha	12,98
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	170 Unit Usaha		25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	100	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	29,41
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1.540 Unit Usaha		-	-	-	-	-	-
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	125 Orang		-	-	-	-	-	-
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha**	**600**		**100**	**96**	**96**	**100**	**196**	**32,72**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usaha**	**600**		**100**	**96**	**96**	**100**	**196**	**32,72**

2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	202 Unit Usaha		27 Unit Usaha	267 Unit Usaha	96,30	50 Unit Usaha	76 Unit Usaha	37,62
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
2	**18**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	50
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen		-			1 Dokumen	1 Dokumen	16,67
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan		-	-	0%	-	-	-
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		-			1 Dokumen	1 Dokumen	16,67
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan DPMPTSP-KUKM Tepat Waktu**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang		12 Orang	12 Orang	100	15 Orang	27 Orang	28,13
2	18	01	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	20 Dokumen	33,33
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan		-			-	-	-

2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	90 Laporan		-	-	-	-	-	-
2	**18**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**600**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai DPMPTSP-KUKM yang dilayani**	**600**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	18	01	2.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	175 Paket		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	190 Dokumen		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 Orang		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	190 Orang		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		-		-	9 Orang	9 Orang	13,85
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum DPMPTSP-KUKM berjalan sesuai standar**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38.500 Paket		-	-	-	-	-	-

2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	180.000 Paket		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100	-	10 Dokumen	16,67
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	66 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	100	11 Laporan	21 Laporan	33,33
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126 Laporan		21 Laporan	55 Laporan	261,90	21 Laporan	76 Laporan	60,32
2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD DPMPTSP-KUKM penunjang yang terpenuhi**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	59 Unit		16 Unit	14 Unit	87,50	-	14 Unit	23,73
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit		7 Unit	7 Unit	100	5 Unit	12 Unit	37,50
2	18	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Website		-	-	-	1 Website	1 Website	20
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4		-	-	-	-	-	-
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	6 Laporan	33,33

2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	33,33
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit		8 Unit	8 Unit	100	8 Unit	16 Unit	33,33
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit		20 Unit	20 Unit	100	25 Unit	45 Unit	31,03
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	100	-	1 Unit	16,67
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3		-	-	-	-	-	-
2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Pertumbuhan Investasi berskala Nasional**	**52,83**		**27,83**	**27,83**	**100**	**5,00**	**32,83**	**62,14**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**52,83**		**27,83**	**27,83**	**100**	**5,00**	**32,83**	**62,14**
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1		-	-	-	-	-	-
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	5		-	-	-	-	-	-
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**300**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**66,67**
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	81		80	80	100	-	80	98,77

2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah Investor Berskala Nasional**	**11**		**1**	**1**	**100**	**-**	1	9,09
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Peningkatan peminat investasi Daerah**	**600**		**100**	**100**	**100**	**-**	**100**	**16,67**
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1		-	-	-	-	-	-
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	1 Dokumen	16,67
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan**	**26 Hari**		**5 Hari**	**5 Hari**	**100**	**5 Hari**	**10 Hari**	**38,46**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase penanaman modal yang berjalan sesuai dengan kewenangan Daerah**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sietem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8.976 Pelaku Usaha		1.396 Pelaku Usaha	1.392 Pelaku Usaha	99,71	1.396 Pelaku Usaha	2.788 Pelaku Usaha	31,06
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	144 Kegiatan Usaha		24 Kegiatan Usaha	29 Kegiatan Usaha	120,83	24 Kegiatan Usaha	53 Kegiatan Usaha	36,81
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	250 Orang		-	-	-	50 Orang	50 Orang	20
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Kegiatan Investasi yang patuh terhadap perundangan yang berlaku**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200%**	**33,33**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN**	**600%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200%**	**33,33**
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	336 Kegiatan Usaha		36 Kegiatan Usaha	35	97,22	60 Kegiatan Usaha	95 Kegiatan Usaha	28,27
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1120 Pelaku Usaha		182 Pelaku Usaha	182	100	182 Pelaku Usaha	364 Pelaku Usaha	32,50
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	336 Kegiatan Usaha		36 Kegiatan Usaha	144	400	60 Kegiatan Usaha	204 Kegiatan Usaha	60,71

Tabel 2.2
(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Mamuju Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) 2021	Tahun (n-1) 2022	Tahun (n) 2023	Tahun (n+1) 2024	Tahun (n-2) 2021	Tahun (n-1) 2022	Tahun (n) 2023	Tahun (n+1) 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan Investasi Daerah			27,83%	5,00%	5,00%	5,00%	3,5%	-	5,00%	5,00%	
2	IKM Layanan Perizinan			Kurang Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-	Baik	Baik	
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi dan UMKM			1,5%	2%			1,5%	-			

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : **DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tengah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**4.358.030.593**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**4.358.030.593**	
06.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	340.600.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	340.600.000	
06.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPM-PTSP	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	65.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP-KUKM	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	65.600.000	
06.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
06.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
06.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
06.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	20.000.000	

			DPA-SKPD					DPA-SKPD			
06.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	65.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	65.000.000	
06.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	130.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	130.000.000	
07.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan DPMPTSP-KUKM Tepat Waktu	100%	**1.972.508.618**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan DPMPTSP-KUKM Tepat Waktu	100%	**1.972.508.618**	
07.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPM-PTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	1.736.246.862	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	1.736.246.862	
07.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	92.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	92.800.000	
07.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.500.000	
07.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	130.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	130.000.000	
07.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	206.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	206.000.000	

07.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	65.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	65.000.000	
07.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	65.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	65.000.000	
07.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	76.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	76.000.000	
07.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai DPMPTSP-KUKM yang dilayani	100%	503.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai DPMPTSP-KUKM yang dilayani	100%	503.000.000	
07.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPM-PTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	18.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	18.000.000	
07.04.02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	340Dokumen	40.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40 Dokumen	40.000.000	
07.04.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPM-PTSP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	285.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	285.000.000	
07.04.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPM-PTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	60.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	60.000.000	
07.04.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	100.000.000	
07.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum DPMPTSP-KUKM berjalan sesuai standar	100%	593.611.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum DPMPTSP-KUKM berjalan sesuai standar	100%	593.611.000	
07.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	

07.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	100.000.000	
07.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPM-PTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	7.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	7.000.000	
07.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.700 Paket	155.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.700 Paket	155.000.000	
07.05.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPM-PTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30.000 Paket	10.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30.000 Paket	10.200.000	
07.05.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	100.000.000	
07.05.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	20.000.000	
07.05.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	112.411.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	112.411.000	
07.05.09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
07.05.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	59.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	59.000.000	
07.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM-PTSP	Persentase BMD DPMPTSP-KUKM penunjang yang terpenuhi	100%	**418.510.000**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD DPMPTSP-KUKM penunjang yang terpenuhi	100%	**418.510.000**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPM-PTSP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1Unit	20.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1Unit	20.000.000	
07.06.01	Pengadaan Mebel	DPM-PTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6Unit	9..460.000	Pengadaan Mebel	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	9..460.000	

07.06.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	39.050.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP -KUKM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	39.050.000	
07.06.03	Pengadaan Aset Tak Berwujud	DPM-PTSP	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Website	50.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	DPMPTSP -KUKM	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Website	50.000.000	
07.06.04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP -KUKM	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	
07.06.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP -KUKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	
07.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPM-PTSP	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	90.650.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	90.650.000	
07.07.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP -KUKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	
07.07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	23.954.505	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP -KUKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	23.954.505	
07.07.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP -KUKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.000.000	
07.07.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP -KUKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60.000.000	
07.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	**138.446.470**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	**138.446.470**	

07.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPM-PTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	41.846.470	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	41.846.470	
07.08.02	Pemeliharaan Mebel	DPM-PTSP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	
07.08.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	11.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	11.600.000	
07.08.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP-KUKM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
8	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**		**Pertumbuhan Investasi berskala Nasional**	**5%**	**80.000.000**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**		**Pertumbuhan Investasi berskala Nasional**	**5%**	**80.000.000**	
08.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	30.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	30.000.000	
08.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal	1 Dokumen	30.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal	1 Dokumen	30.00	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	**Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	80 Buku	50.000.000	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	80 Buku	50.000.000	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peta potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peta potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	1 Dokumen	50.000.000	

9	**Program Promosi Penanaman Modal**		**Jumlah Investor Berskala Nasional**	**2**	**385.000.000**	**Program Promosi Penanaman Modal**		**Jumlah Investor Berskala Nasional**	**2**	**320.000.000**	
09.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Peningkatan peminat investasi Daerah	100%	385.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Peningkatan peminat investasi Daerah	100%	320.000.000	
09.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Luar/dalam Wilayah Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	1 Dokumen	135.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Luar/dalam Wilayah Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	1 Dokumen	135.000.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	250.000.000	
10	**Program Pelayanan Penanaman Modal**		**Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan**	**4 Hari**	**217.954.709**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**		**Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan**	**4 Hari**	**217.954.709**	
10.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		persentase penanaman modal yang berjalan sesuai dengan kewenangan Daerah	100%	**217.954.709**	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		persentase penanaman modal yang berjalan sesuai dengan kewenangan Daerah	100%	**217.954.709**	
10.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sietem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.539 Pelaku Usaha	120.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sietem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.539 Pelaku Usaha	120.000.000	
10.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	24 Kegiatan Usaha	62.910.547	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	24 Kegiatan Usaha	62.910.547	
10.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan	Kab. Mamuju	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan	50 Orang	35.044.162	Penyediaan Layanan Konsultasi dan	Kab. Mamuju	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan	50 Orang	35.044.162	

	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Tengah	Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Tengah	Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan			
11	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**		**Persentase Kegiatan Investasi yang patuh terhadap perundangan yang berlaku**	**100%**	**422.305.400**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**		**Persentase Kegiatan Investasi yang patuh terhadap perundangan yang berlaku**	**100%**	**422.305.400**	
11.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN	100%	422.305.400	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN	100%	422.305.400	
11.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan penanaman modal	60 Kegiatan Usaha	117.635.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan penanaman modal	60 Kegiatan Usaha	117.635.100	
11.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	196 Pelaku Usaha	204.350.300	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	196 Pelaku Usaha	204.350.300	
11.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	60 Kegiatan Usaha	100.320.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	60 Kegiatan Usaha	100.320.000	
Jumlah					**2.601.260.109**	***Jumlah***				**2.601.260.109**	

Tabel 3.3
(Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : **DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tengah**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								
2	**18**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**		**100%**	**3.745.184.000**	**APBD**		**100%**	**3.745.184.000**
2	**18**	**01**	**2,01**		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100%	340.000.000	APBD		100%	340.000.000
2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	DPM-PTSP	1 Dokumen	65.000.000	APBD		1 Dokumen	65.000.000
2	18	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPM-PTSP	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000
2	18	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPM-PTSP	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000
2	18	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPM-PTSP	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000
2	18	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	DPM-PTSP	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000

						SKPD							
2	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPM-PTSP	4 Laporan	65.000.000	APBD		4 Laporan	65.000.000
2	18	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPM-PTSP	1 Laporan	130.000.000	APBD		1 Laporan	130.000.000
2	**18**	**01**	**2,02**		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan DPMPTSP-KUKM Tepat Waktu		100%	1.972.508.618	APBD		100%	1.972.508.618
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPM-PTSP	18 Orang	1.736.246.862	APBD		18 Orang	1.736.246.862
2	18	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPM-PTSP	10 Dokumen	92.761.756	APBD		10 Dokumen	92.761.756
2	18	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 Laporan	13.500.000	APBD		1 Laporan	13.500.000
2	18	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah	18 Laporan	130.000.000	APBD		18 Laporan	130.000.000
2	**18**	**01**	**2,03**		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100%	206.000.000	APBD		100%	206.000.000
2	18	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPM-PTSP	1 Dokumen	65.000.000	APBD		1 Dokumen	65.000.000
2	18	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPM-PTSP	1 Laporan	65.000.000	APBD		1 Laporan	65.000.000

2	18	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 Laporan	76.000.000	APBD		1 Laporan	76.000.000
2	**18**	**01**	**2,05**		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai DPMPTSP-KUKM yang dilayani		100%	503.000.000	APBD		100%	503.000.000
2	18	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPM-PTSP	35 Paket	18.000.000	APBD		35 Paket	18.000.000
2	18	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPM-PTSP	40 Dokumen	40.000.000	APBD		40 Dokumen	40.000.000
2	18	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPM-PTSP	8 Orang	285.000.000	APBD		8 Orang	285.000.000
2	18	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPM-PTSP	40 Orang	60.000.000	APBD		40 Orang	60.000.000
2	18	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah	9 Orang	100.000.000	APBD		9 Orang	100.000.000
2	**18**	**01**	**2,06**		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum DPMPTSP-KUKM berjalan sesuai standar		100%	688.611.000	APBD		100%	688.611.000
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPM-PTSP	5 Paket	10.000.000	APBD		5 Paket	10.000.000
2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPM-PTSP	10 Paket	150.000.000	APBD		10 Paket	150.000.000
2	18	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPM-PTSP	16 Paket	7.000.000	APBD		16 Paket	7.000.000
2	18	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPM-PTSP	7.700 Paket	155.000.000	APBD		7.700 Paket	155.000.000
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPM-PTSP	30.000 Paket	10.200.000	APBD		30.000 Paket	10.200.000

2	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPM-PTSP	10 Dokumen	100.000.000	APBD		10 Dokumen	100.000.000
2	18	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPM-PTSP	11 Laporan	20.000.000	APBD		11 Laporan	20.000.000
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM-PTSP	21 Laporan	112.411.000	APBD		21 Laporan	112.411.000
2	18	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPM-PTSP	1 Dokumen	65.000.000	APBD		1 Dokumen	65.000.000
2	18	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPM-PTSP	1 Dokumen	59.000.000	APBD		1 Dokumen	59.000.000
2	**18**	**01**	**2,07**		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD DPMPTSP-KUKM penunjang yang terpenuhi		100%	398.510.000	APBD		100%	398.510.000
2	18	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPM-PTSP	6 Unit	9.460.000	APBD		6 Unit	9.460.000
2	18	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPM-PTSP	5 Unit	39.050.000	APBD		5 Unit	39.050.000
2	18	01	2,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	DPM-PTSP	1 Website	50.000.000	APBD		1 Website	50.000.000
2	18	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPM-PTSP	1 Unit	150.000.000	APBD		1 Unit	150.000.000
2	18	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPM-PTSP	1 Unit	150.000.000	APBD		1 Unit	150.000.000
2	**18**	**01**	**2,08**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100%	90.954.505	APBD		100%	90.954.505
2	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM-PTSP	1 Laporan	1.000.000	APBD		1 Laporan	1.000.000
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	DPM-PTSP	3 Laporan	23.954.505	APBD		3 Laporan	23.954.505

						Disediakan							
2	18	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPM-PTSP	1 Laporan	6.000.000	APBD		1 Laporan	6.000.000
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPM-PTSP	1 Laporan	60.000.000	APBD		1 Laporan	60.000.000
2	**18**	**01**	**2,09**		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100%	113.446.470	APBD		100%	113.446.470
2	18	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPM-PTSP	8 Unit	41.846.470	APBD		8 Unit	41.846.470
2	18	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	DPM-PTSP	20 Unit	10.000.000	APBD		20 Unit	10.000.000
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPM-PTSP	25 Unit	11.600.000	APBD		25 Unit	11.600.000
2	18	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPM-PTSP	1 Unit	50.000.000	APBD		1 Unit	50.000.000
2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Pertumbuhan Investasi berskala Nasional**		**0%**	**-**	**APBD**		**0%**	**-**
2	**18**	**02**	**2,02**		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		0%	-	APBD		0%	-
2	18	02	2,02	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal	Kab. Mamuju Tengah	0	-	APBD		0	-
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah Investor Berskala Nasional**		**2**	**135.000.000**	**APBD**		**2**	**135.000.000**

2	**18**	**03**	**2,01**		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan peminat investasi Daerah		100%	135.000.000	APBD		100%	135.000.000
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	Luar/dalam Wilayah Mamuju Tengah	1 Dokumen	135.000.000	APBD		1 Dokumen	135.000.000
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan**		**4 Hari**	217.954.709	**APBD**		**4 Hari**	217.954.709
2	**18**	**04**	**2,01**		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase penanaman modal yang berjalan sesuai dengan kewenangan Daerah		100%	217.954.709	APBD		100%	217.954.709
2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sietem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Mamuju Tengah	1.539 Pelaku Usaha	120.000.000	APBD		1.539 Pelaku Usaha	120.000.000
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	24 Kegiatan Usaha	62.910.547	APBD		24 Kegiatan Usaha	62.910.547
2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan	Kab. Mamuju Tengah	50 Orang	35.044.162	APBD		50 Orang	35.044.162
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Kegiatan Investasi yang patuh terhadap perundangan yang berlaku**		**100%**	**422.305.400**	**APBD/DAK**		**100%**	**422.305.400**

2	**18**	**05**	**2,01**		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN		100%	422.305.400	APBD/DAK		100%	422.305.400
2	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan penanaman modal	Kab. Mamuju Tengah	60 Kegiatan Usaha	117.635.100	APBD/DAK		60 Kegiatan Usaha	117.635.100
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Mamuju Tengah	196 Pelaku Usaha	204.350.300	APBD/DAK		196 Pelaku Usaha	204.350.300
2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Mamuju Tengah	60 Kegiatan Usaha	100.320.000	APBD/DAK		60 Kegiatan Usaha	100.320.000
Jumlah													

Tabel 4

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
								NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.577.695.248,00**					
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**3.577.695.248,00**					
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)***	***100***	**2.648.430.593,00**					
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			155.000.000,00					

		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (Persentase)	*100*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20.000.000,00					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	*1*	*20.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			15.000.000,00					Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
		Penyusunan dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	*1*	*15.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			15.000.000,00					Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
			Penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD (Dokumen)	*1*	*15.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			15.000.000,00				Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
			Penyusunan dokumen DPA SKPD (Dokumen)	*1*	*15.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			15.000.000,00				Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD(Dokumen)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*

			Penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD (Dokumen)	*1*	*15.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			25.000.000,00					Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	*4*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
			Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD (Laporan)	*4*	*25.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000,00					Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
			Penyusunan dokumen evaluasi kinerja PD (Laporan)	*1*	*50.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP/Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.582.508.618,00					

		Persentase administrasi keuangan DPM-PTSP tepat waktu (Persentase)	*100*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.436.246.862,00					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	*18*		*(Dinas penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
		Pemberian gaji dan tunjangan ASN (Orang)	*18*	*1.436.246.862,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			72.761.756,00					ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	*10*						*ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
		Pengendalian/penyusunan dokumen penatausahaan keuangan SKPD (Dokumen)	*10*	*72.761.756,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			13.500.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	*1*	*13.500.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*

							Umum			
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			60.000.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	*18*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
			Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran (Laporan)	*18*	*60.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30.000.000,00					
			Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar (Persentase)	*100*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			15.000.000,00					
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
			Pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD SKPD (Laporan)	*1*	*15.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*

	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			15.000.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
			Penyusunan laporan penatausahaan BMD-SKPD (Laporan)	*1*	*15.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			200.000.000,00					
			Persentase pegawai DPM-PTSP yang dilayani (Persentase)	*100*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			150.000.000,00					
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	*8*		*(Luar Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Luar Wilayah)*				
			Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya (Orang)	*8*	*150.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			50.000.000,00					Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	*9*		*(Luar Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Luar Wilayah)*				*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP*

			Pelaksanaan bimtek implementasi perundang-undangan (Orang)	*9*	*50.000.000,00*	*(Luar Mamuju Tengah, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			289.611.000,00					
			Persentase administrasi umum DPM-PTSP berjalan sesuai standar (Persentase)	*100*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	*10*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)	*10*	*40.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.000.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	*16*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
			Pengadaan peralatan rumah tangga (Paket)	*16*	*7.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			30.000.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	*7700*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
		Pengadaan bahan logistik kantor (Paket)	*7.700*	*30.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.200.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	*30*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
		Pengadaan barang cetakan dan penggandaan (Paket)	*30.000*	*10.200.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			30.000.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	*10*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Dokumen)	*10*	*30.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta masyarakat Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			20.000.000,00					Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta masyarakat Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	*11*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta masyarakat Pemerintah Kab. Mamuju Tengah*
			Penyediaan sarana prasaranan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)	*11*	*20.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			112.411.000,00				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	*21*		*(Luar dan Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Luar Wilayah)*			*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	*21*	*112.411.000,00*	*(Luar dan Dalam Mamuju Tengah, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			40.000.000,00				Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
			Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	*1*	*40.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			228.510.000,00				

		Persentase BMD DPM-PTSP penunjang yang terpenuhi (Persentase)	*100*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			9.460.000,00					
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	*6*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
		Pengadaan Mebel (Unit)	*6*	*9.460.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			39.050.000,00					Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	*5*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	*5*	*39.050.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
2.18.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud			30.000.000,00					Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
		Pemeliharaan website (Unit)	*1*	*30.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*

	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000.000,00				Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
			Penyediaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	*1*	*150.000.000,00*	*(dinas penanaman modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.954.505,00				
			Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (Persentase)	*100*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*			
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000,00				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*			
			Penyediaan laporan pelaksanaan jasa surat menyurat (Laporan)	*1*	*1.000.000,00*	*(Dalam Kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			23.954.505,00				Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	*3.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*

			Penyediaan laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Laporan)	*3*	*23.954.505,00*	*(Dalam Kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.000.000,00					Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Laporan)	*1*	*6.000.000,00*	*(Dalam Kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			50.000.000,00					Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (Laporan)	*1*	*50.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok/Orang*
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			81.846.470,00					
			Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (Persentase)	*100*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				

2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			41.846.470,00					
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	*8*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
		Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan (Unit)	*8*	*41.846.470,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kendaraan Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000,00					Kendaraan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	*25*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Kendaraan Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Unit)	*25*	*10.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.000.000,00					Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Unit)	*1*	*30.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP*

2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**150.000.000,00**					
			Pertumbuhan Investasi Berskala Nasional (%)	***5***						***Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP***
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000,00					
			Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)	*100*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Topoyo)*				
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			150.000.000,00					
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	*1.00*		*(Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
			Perda Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	*1*	*150.000.000,00*	*(Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Investor/Pelaku Usaha*
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**120.000.000,00**					
			persentase pelaksanaan promosi penanaman modal (%)	***100***						***Investor/Pelaku Usaha***

	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			120.000.000,00					
			Peningkatan peminat investasi Daerah (Persentase)	*100*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			120.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal (Kegiatan)	*1*	*120.000.000,00*	*(Luar Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha/ Investor*
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**177.954.709,00**					
			Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan (Hari)	***4***						***Pelaku Usaha/ Investor***
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			177.954.709,00				Mendorong Daya Saing SDM dan Perekonomian Daerah	
			Persentase penanaman modal yang berjalan sesuai dengan kewenangan daerah (%)	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			90.000.000,00					

			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	*1539*		*(Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
			Penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (Badan Usaha)	*1.539*	*90.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha*
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			35.044.162,00					Pelaku Usaha
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik(Pelaku Usaha)	*50*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Pelaku Usaha*
			Pelaksanaan layanan konsultasi serta pengaduan Masyarakat (Orang)	*50*	*35.044.162,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Orang*
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			52.910.547,00					Orang
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	*24*		*(Dalam Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Orang*
			Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan terhadap pelaku usaha (Kegiatan)	*24*	*52.910.547,00*	*(Kecamatan Karossa,Topoyo,Tobadak,Budong-Budong dan Kecamatan Pangale, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha*
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**481.309.946,00**					

			Persentase kegiatan investasi yang patuh terhadap purundangan yang berlaku (Persentase)	***100***						***Pelaku Usaha***
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			481.309.946,00					
			Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN (Persentase)	*100*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			116.135.100,00					
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	*60*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
			Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal(Kegiatan)	*60*	*116.135.100,00*	*(Dalam Kabupaten MamujuTengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal*			*Pelaku Usaha*
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			260.429.473,00					Pelaku Usaha
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	*196*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Pelaku Usaha*

			Pembinaan pelaksanaan penanaman modal (Kelompok)	*196*	*260.429.473,00*	*(Dalam dan Luar Kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal*			*Pelaku Usaha*
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			104.745.373,00					Pelaku Usaha
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	*60*		*(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Pelaku Usaha*
			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap kegiatan usaha (Kegiatan)	*60*	*104.745.373,00*	*(Dalam dan Luar Kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal*			*Pelaku Usaha*
	J U M L A H				**3.577.695.248,00**					

RENJA (Rencana Kerja)

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam rencana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah ini kami membahas “Rencana dan Tindakan Strategi yang memuat visi, misi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan kewajiban dan akan dijadikan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal ini juga memiliki konsekuensi terhadap Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah yang harus dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA), Program dan Kegiatan setiap tahun dengan parameter yang terukur serta dapat dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan kemampuan anggaran yang dilaksanakan sesuai rencana strategis yang telah disusun sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan kemampuan sumber daya pengetahuan yang sangat terbatas, sehingga masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian Rencana Kerja (RENJA) ini telah bertitik tolak pada Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2023

Tobadak, Agustus 2023

Kepala Dinas,

Drs. BAMBANG SUPARNI, M.Pd
Pangkat : Pembina TK.I/IV.b
Nip : 19670705 199504 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1.. Latar Belakang. 1

1.2.. Landasan Hukum 2

1.3.. Maksud dan Tujuan 4

1.4.. Sistematika Penulisan 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1.. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2.. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

2.3.. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .. 29

2.4. Review terhadap Rencana Kerja RKPD 31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 36

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 39

3.1.. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 39

3.2.. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 40

3.3.. Program dan Kegiatan 41

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 54

BAB V. PENUTUP 74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Keuangan Tahun 2022……..... 7
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023……12
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah ……26
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2024 ……32
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024…… 37
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025…..……43
Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2024……..……55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

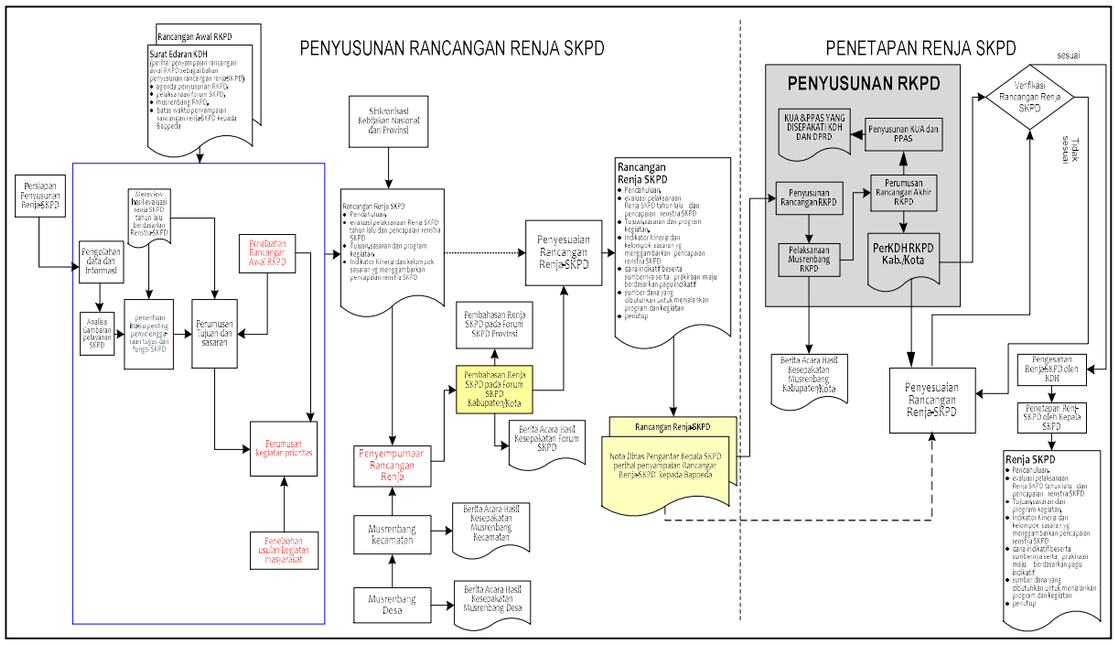
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, salah satunya ruang lingkup perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Kerja OPD yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif sesuai dengan program prioritas pada rancangan dokumen OPD.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan renja dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, menganalis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran dihasilkan melalui review atas evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta penalaahan dari rancangan awal Perangkat Daerah. Lebih lanjut, perumusan program dan kegiatan didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan musrenbang Kecamatan, Forum OPD Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah, dan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama. Tahapan pertama yaitu persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Tahapan yang kedua yaitu penyusunan rancangan awal dan penyusunan rancangan akhir renja Perangkat Daerah. Tahapan Terakhir adalah penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi RKPD melalui Keputusan Bupati Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan seperti Renstra Perangkat Daerah, RKPD, RPJMD dan RPJPD serta Renja Perangkat Dinas Provinsi. Maka, dalam proses penyusunannya Renja Perangkat Daerah dilakukan secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Disamping itu, Renja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) serta dasar dalam mengusulkan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Propinsi dan APBN.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul dalam satu tahun anggaran. Renja juga mempunyai arti yang strategis karena merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan/Dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah dan menjadi alat ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah yaitu :

1. Sebagai rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan perangkat daerah untuk Tahun 2024;
2. sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024;
3. sebagai dokumen pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan turunan dari RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematikan penulisan rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Terdiri dari :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dan Capaian Renstra Perangat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangat Daerah.

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang uraian program, kegaiatan dan pendanaan yang direncanakan.

BAB V PENUTUP.

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi referensi dalam melakukan lagkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022.

Lebih lanjut, jika dilihat dari aspek serapan (realisasi) keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022 berdasarkan program, maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Keuangan Tahun 2022

KODE	JENIS BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA	TINGKAT REALISASI
5	BELANJA DAERAH	3.220.899.745	3.205.150.878	15.748.867	99,51%
5,1	BELANJA OPERASI	3.140.899.745	3.125.150.878	15.748.867	99,50%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.467.594.592	2.466.785.674	808.918	99,97%
5.1.01	Belanja Pegawai	673.305.153	658.365.204	14.939.949	97,78%
5,2	BELANJA MODAL	80.000.000	80.000.000	-	100,00%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.000.000	80.000.000	-	100,00%
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.651.984.150	1.636.919.283	15.064.867	99,09%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.123.730	192.123.730	-	100,00%
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.833.740	39.833.740	-	100,00%
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.584.270	20.584.270	-	100,00%
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22.746.700	22.746.700	-	100,00%
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	60.851.470	60.851.470	-	100,00%
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	43.107.610	43.107.610	-	100,00%
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.940	4.999.940	-	100,00%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	680.161.333	665.221.384	14.939.949	97,80%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	673.305.153	658.365.204	14.939.949	97,78%
2.16.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.499.860	3.499.860	-	100,00%
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.356.320	3.356.320	-	100,00%
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.520.220	21.520.220	-	100,00%
2.16.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	21.520.220	21.520.220	-	100,00%
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.726.170	55.726.170	-	100,00%
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan				100,00%

	Administrasi Kepegawaian	55.726.170	55.726.170	-	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	78.206.500	78.206.500	-	100,00%
2.16.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	7.800.000	7.800.000	-	100,00%
2.16.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	70.406.500	70.406.500	-	100,00%
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	612.339.197	612.214.279	124.918	99,98%
2.16.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	8.397.979	8.277.279	120.700	98,56%
2.16.01.2.08.02	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	94.341.218	94.337.000	4.218	100,00%
2.16.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	206.000.000	206.000.000	-	100,00%
2.16.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	303.600.000	303.600.000	-	100,00%
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	11.907.000	11.907.000	-	100,00%
2.16.01.2.09.01	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	11.907.000	11.907.000	-	100,00%
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	1.242.464.405	1.241.784.405	680.000	99,95%
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	1.242.464.405	1.241.784.405	680.000	99,95%
2.16.02.2.01.01	**Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**	10.258.350	10.258.350	-	100,00%
2.16.02.2.01.06	**Pelayanan Informasi Publik**	40.235.045	40.235.045	-	100,00%
2.16.02.2.01.07	**Layanan Hubungan Media**	1.170.810.100	1.170.810.100	-	100,00%
2.16.02.2.01.12	**Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas**	21.160.910	20.480.910	680.000	96,79%
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	259.128.420	259.124.420	4.000	100,00%
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	98.000.000	98.000.000	-	100,00%
2.16.03.2.01.02	**Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	98.000.000	98.000.000	-	100,00%
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	161.128.420	161.124.420	4.000	100,00%
2.16.03.2.02.01	**Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	26.128.910	26.128.910	-	100,00%
2.16.03.2.02.06	**Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik**	9.999.510	9.995.510	4.000	99,96%
2.16.03.2.02.10	**Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**	125.000.000	125.000.000	-	100,00%
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	11.611.360	11.611.360	-	100,00%
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	11.611.360	11.611.360	-	100,00%
2.20.02.2.01.01	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**	11.611.360	11.611.360	-	100,00%
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	55.711.410	55.711.410	-	100,00%
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	40.819.010	40.819.010	-	100,00%
2.21.02.2.01.01	**Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	40.819.010	40.819.010	-	100,00%
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	14.892.400	14.892.400	-	100,00%
2.21.02.2.02.01	**Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	14.892.400	14.892.400	-	100,00%
JUMLAH		**3.220.899.745**	**3.205.150.878**	**15.748.867**	99,51%

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2024 Telah Melaksanakan Urusan yaitu Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Terhadap urusan tersebut telah dievaluasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang Bersangkutan. Dijabarkan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
    a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Dengan Item Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tidak memenuhi target sesuai yang direncanakan.
    b. Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Dengan Item Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,Tidak Memenuhi Target sesuai yang direncanakan.
    c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan item kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, tidak memenuhi target sesuai dengan yang direncanakan dan kebutuhan pemerintah daerah.
    d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan item kegiatan, Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tidak sesuai dengan target dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebagai berikut :
    a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
        1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
            - Keluaran : 1 Dokumen
            - Hasil : Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
        2) Pelayanan Informasi Publik
            - Keluaran : 1 Radio dan 5 Akun Media Sosial
            - Hasil : Tersedianya Pelayanan Informasi Publik
        3) Layanan Hubungan Media
            - Keluaran : 30 Media
            - Hasil : Tersedianya Layanan Hubungan Media
        4) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.
            - Keluaran : 6 KIM (Kolompok Informasi Masyarakat)
            - Hasil : Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan

b. Program Aplikasi Informatika
    1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
        - Keluaran : 20 OPD
        - Hasil : Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
    2) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
        - Keluaran : 1 Website Kabupaten
        - Hasil : Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
    3) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
        - Keluaran : 45 %
        - Hasil : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi.
    4) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
        - Keluaran : 25 %
        - Hasil : Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
    1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
        - Keluaran : 33 OPD
        - Hasil : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
    1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
        - Keluaran : 10 Alat Komunikasi
        - Hasil : Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
    2) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
        - Keluaran : 1 Kegiatan
        - Hasil : Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu :
    a. Belum ada tenaga Admin Khususu yang menangani Lapor SP4N.
    b. Belum adanya Perda yang Mengatur Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mamuju Tengah.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten

Mamuju Tengah, yang mana secara khusu jg berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat;

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut, diantaranya :
   a. Diadakannya Bimtekkhusus Admin yang menangani Lapor SP4N.
   b. Terbitnya Perda Nomor 12 Tahun 2017 yang Mengatur Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mamuju Tengah.

Untuk lebih jelas dalam evaluasi pelaksanaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 dibawah ini :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	2	3	3	100%	3	8	53%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	0	2	40%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	0	2	40%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	0	2	40%

X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	3	4	4	100%	4	4	80%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	0	0	0	0%	1	1	33%
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	8	8	8	100%	10	10	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	0	0	0	0%	1	1	25%
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	0	1	1	100%	0	1	25%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	2	3	3	100%	3	8	57%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									

X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20	2	4	4	100%	4	10	50%
X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	52	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	0	1	1	100%	1	2	50%
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	0	0	0	0%	0	0	0%

X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	2	4	4	100%	4	4	100%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	1	0	0	0%	0	1	25%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	30	100	100	100%	100	100	100%
X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6	0	0	0	0%	3	3	50%
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	0	2	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	0	1	1	100%	1	2	40%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	3	60%

X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	1	2	2	100%	0	2	100%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	1	2	2	100%	2	2	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	0	0	0	0%	0	0	0%
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7	0	0	0	0%	0	0	0%
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**									
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	4	0	0	0	0%	0	0	0%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	60	60	60	60	100%	60	60	100%
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5	0	0	0	0%	0	0	0%

2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	5	0	0	0	0%	0	0	0%
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	5	0	0	0	0%	0	0	0%
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	10	0	0	0	0%	0	0	0%
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4	1	1	1	100%	1	3	75%
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**									
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	20	0	0	0	0%	5	5	25%
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	0	1	1	100%	0	1	25%
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4	0	0	0	0%	0	0	0%
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang	1	0	0	0	0%	0	0	0%

		Dikelola								
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	34	1	5	5	100%	5	11	32%
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	20	0	0	0	0%	6	6	30%
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	35	0	0	0	0%	0	0	0%
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	3	0	0	0	0%	0	0	0%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5	4	1	1	100%	0	5	100%
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	0	0	0	0%	0	0	0%
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4	0	0	0	0%	1	1	25%
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**									
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**									
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	2	0	0	0	0%	0	0	0%

2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	3	0	0	0	0%	1	1	33%
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	2	0	0	0	0%	0	0	0%
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	4	0	0	0	0%	0	0	0%
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**									
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4	0	1	1	100%	1	2	50%
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	0	0	0%
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4	0	0	0	0	0	0	0%
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	6	0	0	0	0	1	1	17%
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**									
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6	0	1	1	100%	1	2	33%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ditetapkan tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu sebagai berikut :

- **Tugas**, yaitu membantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.
- **Fungsi**, yaitu sebagai berikut :
    1. Perumusan kebijakan teknis pembangunan Daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
    2. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian dalam mendukung pengembangan dan pembangunan Daerah;
    3. pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
    4. pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait masalah komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- **Susunan Organisasi**, terdiri atas :
    1. Bagian Sekretariat
        - Tugas : Melaksanakan kegiatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian dalam lingkup dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah pada dinas.
        - Fungsi :
            a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
            b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
            c. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan informasi, keuangan dan aset, serta kepegawaian dan umum;
            d. penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat;
            e. pengaturan dan pengelolaan serta pengembangan sistem informasi persandian, komunikasi dan informatika dan statistik tingkat kabupaten/kota.
        - Terdiri atas :
            a. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian, melaksanakan tugas melakukan pengelolaan anggaran, urusan

kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan dinas serta pengelolaan administrasi aset dinas berdasarkan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

b. kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Persandian
   - Tugas : merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas di lingkup bidang yang meliputi tata kelola persandian, operasional persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   - Fungsi :
     a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
     b. perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
     c. pengelolaan informasi berklasifikasi;
     d. pengelolaan sumber daya persandian;
     e. pengawasan dan evaluasi pelaksanan tata kelola persandian;
     f. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
     g. perumusan dan peraturan teknis oprasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
     h. pelaksanaan oprasional pengelolaan komunikasi sandi;
     i. pelaksanaan oprasional pengamanan komunikasi sandi;
     j. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan oprasional pengamanan persandian;
     k. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
     l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.
   - Terdiri atas :
     a. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Komunikasi
   - Tugas : merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan menyelengarakan tugas di bidang pengelolaan informasi opini dan aspirasi publik, penyedian konten dan media komunikasi publik, pelayanan informasi.
   - Fungsi :
     a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini, aspirasi publik, pengelolaan informasi, pengelolaan media, komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyedian akses informasi di lingkup kabupaten/ kota;
     b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini, aspirasi publik, pengelolaan informasi, pengelolaan media, komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media penguatan kapasitas sumber daya komunikasi

publik dan penyedian akses informasi di lingkup kabupaten/ kota;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyedian konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyedian akses informasi di kabupaten/kota;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Daerah, penyedian konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media penguatan kapasitas sumber daya komunikaqsi publik dan penyedian akses informasi di kabupaten/kota;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyedian konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyedian akses informasi di kabupaten/kota;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

- Terdiri atas :
  a. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Informatika
   - Tugas : Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, evaluasi, dan pelaporan dibidang infrastruktur dasar data center, layanan manajemen data/informasi dan statistik Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   - Fungsi :
     a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan manajemen data/informasi dan statistik Pemerintah Kabupaten/Kota;
     b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, infrastruktur dasar data center, layanan manajemen data/informasi dan statistik Pemerintah Kabupaten/Kota;
     c. penyiapan bahan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar data center, layanan manajemen data/informasi dan statistik;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar data center, layanan manajemen data dan statistik;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, layanan manajemen data/informasi dan statistik;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

- Terdiri atas :
  a. Sub Bidang Statistik, melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan/evaluasi dan pelaporan terkait fungsi statistik.
  b. Kelompok Jabatan Fungsional

Analisis kinerja dimulai dengan pengukuran pencapaian keluaran dan hasil kinerja yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa keluaran dan hasil. Setiap kegiatan dinilai tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerjanya seperti disajikan pada tabel T-C.30. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja ini selanjutnya dipergunakan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan. Berikut uraian realisasi pencapaian Program, kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022 :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

   Dalam program ini dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) Sub kegiatan dengan masukan input dana dan keluaran atau hasil yang dikeluarkan oleh kegiatan, yaitu :

   1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi 4 (empat) sub Kegiatan yaitu :
      a. Sub Kegiatan Perumusan KebijakanTeknis Bidang Informatika dan Komunikasi Publik. Untuk melaksanakan Sub kegiatan ini digunakan input dana sebesar Rp. 10.258.350 dan terealisasi Rp. 10.258.350 (100%). Menghasilkan output 1 (satu) Dokumen.
      b. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Untuk melaksanakan Sub kegiatan ini digunakan input dana sebesar Rp. 40.235.045 dan terealisasi Rp. 40.235.045 (100%). Menghasilkan output 1 (satu) Unit Radio dan 5 (lima) Akun Media Sosial.
      c. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media. Untuk melaksanakan Sub kegiatan ini digunakan input dana sebesar Rp. 1.170.810.100 dan terealisasi Rp. 1.170.810.100 (100%). Menghasilkan output 60 (enam puluh) Media.
      d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas. Untuk Melaksanakan Sub kegiatan ini digunakan input dana sebesar Rp. 21.160.910 dan terealisasi Rp. 20.480.910 (96,79%). Menghasilkan output 6 (enam) Kolompok Informasi Masyarakat (KIM).

2. Program Aplikasi Informatika

Dalam program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub Kegiatan dengan masukan input dana dan keluaran atau hasil yang dikeluarkan oleh kegiatan, yaitu :

1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan Sub kegiatan ini digunakan input dana sebesar Rp. 98.000.000 dan terealisasi Rp. 98.000.000 (100%). Menghasilkan output 18 (delapan belas) Domain OPD.
2) Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan Sub kegiatan ini digunakan input dana sebesar Rp. 26.128.910 dan terealisasi Rp. 26.128.910 (100%). Menghasilkan output 18 (delapan belas) sistem e-government OPD.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik. Untuk melaksanakan Sub kegiatan ini digunakan input dana sebesar Rp. 9.999.510 dan terealisasi Rp. 9.995.510 (99,96%). Menghasilkan output 1 (Satu) Dokumen.
   c. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan Sub kegiatan ini digunakan input dana sebesar Rp. 125.000.000 dan terealisasi Rp. 125.000.000 (100%) menghasilkan output 1 (Satu) Dokumen.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dalam Program ini dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan masukan input dana dan keluaran atau hasil yang dikeluarkan oleh kegiatan, yaitu :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Untuk melaksanakan Sub kegiatan ini digunakan input dana sebesar Rp. 11.611.360 dan terealisasi Rp. 11.611.360 (100%). Menghasilkan output 1 (Satu) dokumen dan 3 (tiga) jenis Buku.

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Dalam Program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan masukan input dana dan keluaran atau hasil yang dikeluarkan oleh kegiatan, yaitu :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan Sub kegiatan ini digunakan input dana sebesar Rp. 40.819.010 dan terealisasi Rp. 40.819.010 (100%). Menghasilkan output 1 (Satu) dokumen.

2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

b. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan Sub kegiatan ini digunakan input dana sebesar Rp. 14.892.400 dan terealisasi Rp. 14.892.400 (100%). Menghasilkan output 1 (Satu) dokumen.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju Tengah

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	jumlah dokumen kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik yang dihasilkan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	jumlah jenis layanan informasi publik yang diberikan)			1 radio	1 radio 1 akun kab. 5 akun Medsos	1 radio 1 akun kab. 5 akun Medsos	1 radio 1 akun kab. 5 akun Medsos	1 radio 1 akun kab. 5 akun Medsos	1 radio 1 akun kab. 5 akun Medsos	1 radio 1 akun kab. 5 akun Medsos	1 radio 1 akun kab. 5 akun Medsos	1 radio 1 akun kab. 5 akun Medsos	1 radio 1 akun kab. 5 akun Medsos
3	jumlah media yang bekerjasama dengan pemda			40 media	60 media	60 media	60 media	60 media	60 media	60 media	60 media	60 media	60 media
4	jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan kemitraan komunikasi			6 KIM	6 KIM	6 KIM	6 KIM	6 KIM	6 KIM	6 KIM	6 KIM	6 KIM	6 KIM

	informasi masyarakat (KIM)												
5	Jumlah OPD yang memakai Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			15 OPD	18 OPD	20 OPD	25 OPD	30 OPD	35 OP	18 OPD	25 OPD	30 OPD	35 OPD
6	jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan e-government			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
7	persentase layanan warganegara yang diselenggarakan secara online			40%	45%	50%	60%	80%	45%	50%	60%	80%	80%
8	Persentase ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah daerah yang mengikuti pelatihan dan pembinaan			6%	30%	36%	42%	48%	52%	54%	30%	42%	46%
9	Jumlah Dokumen dan Jenis Buku			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

	yang disusun dan dicetak			3 Jenis Buku	3 Jenis Buku	3 Jenis Buku	3 Jenis Buku	3 Jenis Buku	3 Jenis Buku	3 Jenis Buku	3 Jenis Buku	3 Jenis Buku	3 Jenis Buku
10	jumlah Laporan Dokumen Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
11	Jumlah Dokumen Laporan Jaring Komunikasi Sandi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan Penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance, salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah perlu menjamin bahwa TIK mampu menopang kebutuhan organisasi khususnya dalam pelaksanaan proses bisnisnya, baik secara internal pada unsur back office maupun unsur front office sebagai ujung tombak pelayanan publik. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah juga berperan bagi pembentukan citra positif Pemerintah Kabupaten serta diseminasi informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, media internet/cyber, media luar ruang, serta melalui pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Dari aspek data dan statistik daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah berperan dalam mengkoordinasikan tersusunnya data statistik dalam rangka bahan pedoman perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

Dari aspek persandian, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah berperan dalam mewujudkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi serta bagaimana teknis pengamanan informasi beserta jaringan yang terlibat di dalamnya. Pengamanan informasi berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu siapa saja yang mempunyai hak akses (confidentiality), akurasi dan konsistensi (integrity), dan ketersediaan informasi bila dibutuhkan (availability).

Topografi Kabupaten Mamuju Tengah yang sangat variatif dari pesisir sampai dengan pegunungan berdampak pada perbedaan kualitas akses komunikasi, khususnya akses internet karena terdapat beberapa titik blank spot. Disisi lain, semakin luasnya cakupan instansi yang harus terlayani koneksi internet yang keberadaannya menyebar di berbagai titik lokasi menuntut kesiapan infrastruktur TIK guna optimalisasi pelayanan publik dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pada aspek sistem informasi, berbagai aplikasi yang digunakan oleh OPD mayoritas dibangun oleh pihak ke tiga dan ada beberapa yang merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat maupun instansi vertikal. Secara teknis, aplikasi tersebut telah mampu menjalankan proses bisnis organisasi namun belum dapat terintegrasi satu sama lain. Komitmen terhadap Kebijakan Satu Data Daerah mendorong Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah menyiapkan infrastruktur khusus, meliputi server dan aplikasi. Selain itu, ketersediaan SDM khusus sebagai operator Satu data Daerah juga menjadi perhatian penting.

Dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan aspek kebijakan skala nasional maupun regional, dapat diketahui isu-isu strategis yang berpengaruh. Analis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar dalam hubungannya dengan urusan komunikasi dan informatika. Berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa isu strategis urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang ditangani oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Keterbatasan infrastruktur TIK;
3. Belum tersedianya Grand Design (Master Plan) TIK sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan Infrastruktur TIK;
4. Integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
5. Diseminasi informasi yang belum optimal;
6. Penerapan Standar Keamananan Informasi sesuai SNMKI;
7. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir / blank spot sehingga belum mendapatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi terutama pada sentra-sentra perekonomian yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah;
8. Belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan, dan belum adanya aplikasi perencanaan berdasarkan penilaian berkala.

Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya pelaksanaan dan hasil dari produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan/isu-isu strategis diatas, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah menyusun rencana strategis sebagai berikut :

1. Melaksanakan keterbukaan informasi publik bagi semua Badan Publik di lingkup Pemda Kabupaten Mamuju Tengah sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang akuntabel;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Mamuju Tengah yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel;
3. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data terpadu dan terintegrasi sebagai suatu wujud kesatuan data pembangunan untuk mewujudkan visi daerah dan mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat;
4. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif, transparan dan akuntabel serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal yang positif;
5. Melaksanakan literasi informasi kepada masyarakat melalui berbagai media informasi guna mencegah terjadinya penyebarluasan informasi yang tidak benar (hoax) yang dapat meresahkan dan memecah kesatuan bangsa Indonesia;
6. Melakukan peningkatan SDM melalui pelatihan/Bimbingan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian kepada pegawai dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Menyusun regulasi terkait informasi dan komunikasi;

8. Menyusun Grand Design (Master Plan) TIK.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Review dilakukan untuk memberikan informasi dan gambaran ketepatan dokumen perencanaan yang telah disusun, merasionalkan kebutuhan akan program dan penganggaran, serta meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penyusunan dokumen rencana kerja yang mungkin akan berdampak kepada pelanggaran terhadap regulasi-regulasi yang ada.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pagu usulan tidak sesuai dengan pagu rancangan awal RKPD, adanya kegiatan yang tidak diusulkan pada renja karena tidak menjadi prioritas OPD, dan adanya penambahan Sub Kegiatan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah daerah yang memusatkan pengelolaan jaringan internet seluruh instansi pemerintah daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sehinhgga hal tersebut menjadi kebutuhan prioritas OPD.

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD pada tabel T-C.31. berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
A	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Kab. Mamuju Tengah**	**persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**30%**	**1.813.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Kab. Mamuju Tengah**	**persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**30%**	**720.000**	
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Informasi dan Komunikasi daerah yang dapat di akses masyarakat	50%	1.813.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Informasi dan Komunikasi daerah yang dapat di akses masyarakat	50%	720.000	
B	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Kab. Mamuju Tengah**	**persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo**	**31%**	**1.425.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Kab. Mamuju Tengah**	**persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo**	**31%**	**1.680.000**	
1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Domain dan sub Domain yang dikelola Pemerintah	60%	200.000	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Domain dan sub Domain yang dikelola	60%	910.000	Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah bahwa Pengelolaan

	Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Daerah			Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pemerintah Daerah			Jaringan Internet yang dipusatkan ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Dokumen Pengembangan dan Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Dokumen	1.225.000	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Dokumen Pengembangan dan Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Dokumen	770.000	
C	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Organiasasi perangkat daerah (OPD)yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembagunan daerah**	**60%**	**430.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Organiasasi perangkat daerah (OPD)yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembagunan daerah**	**60%**	**210.000**	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah	60%	430.000	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah	60%	210.000	
D	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Kab. Mamuju Tengah**	**persentase kegiatan strategis yang telah diamankan**	**30%**	**500.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah**	**30%**	**170.000**	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Prosedur Pengamanan	36%	250.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Prosedur	36%	130.000	

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Informasi			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengamanan Informasi			
2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	persentase perangkat daerah yang terhubung dalam pola hubungan komunikasi sandi	31%	250.000	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	persentase perangkat daerah yang terhubung dalam pola hubungan komunikasi sandi	31%	40.000	
E	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**75%**	**6.082.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**75%**	**1.667.000**	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	75%	320.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	75%	85.000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	75%	1.430.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	75%	1.115.000	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70%	50.000						
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	75%	440.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	75%	70.000	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	75%	727.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	73%	140.000	
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	75%	2.580.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	75%	187.000	

7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	75%	300.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	75%	60.000	
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	75%	235.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	75%	10.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat diharapkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok OPD. Hal ini akan diperoleh pada saat dilaksanakannya Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wadah bersama antar para pelaku (stakeholder) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan OPD serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) OPD untuk tahun anggaran 2024. Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik Renstra 2021-2026 yang telah disusun, tema dan prioritas pembangunan 2024 serta didasari review capaian kinerja OPD berdasarkan amanat target kinerja pada Renstra.

Dari proses regulasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2024 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik Renstra, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah. Proses pelaksanaan forum Gabungan OPD urusan pengelolaan persandian, pengembangan e-Gove, pengembangan komunikasi media massa dan Data/Informasi/Statistik, memang masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan yang harus dibahas serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun Usulan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah yaitu sebagaimana pada tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Kab. Mamuju Tengah**	**persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**30,00%**	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Informasi dan Komunikasi daerah yang dapat di akses masyarakat	50,00%	
B	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Kab. Mamuju Tengah**	**persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo**	**31,00%**	
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Domain dan sub Domain yang dikelola Pemerintah Daerah	60,00%	
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Dokumen Pengembangan dan Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Dokumen	
C	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Organiasasi perangkat daerah (OPD)yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembagunan daerah**	**60,00%**	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah	60,00%	
D	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah**	**30,00%**	
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Prosedur Pengamanan Informasi	36,00%	

2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	persentase perangkat daerah yang terhubung dalam pola hubungan komunikasi sandi	31,00%	
E	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**75,00%**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	75,00%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	75,00%	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	75,00%	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	73,00%	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	75,00%	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	75,00%	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	75,00%	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
3. terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
4. terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah. Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah yang tiap tahunnya dievaluasi oleh oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 tahun 2020 bahwa lingkup pelaksanaan SPBE ada pada 4 domain. Domain tersebut antara lain domain kebijakan (aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan pelayanan), domain tata kelola (aspek kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan dan aspek TIK) dan domain layanan (aspek administrasi pemerintah dan aspek pelayanan publik). Pemanfaatan TIK dalam Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi dan keamanan informasi. Untuk meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan keterpaduan antar stakeholder dalam mewujudkan sebuah tata kelola yang efektif.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah membangun interaksi Pemda dengan masyarakat untuk penyerapan aspirasi publik melalui email, telepon, media sosial, dan aplikasi. Untuk menunjang kelancaran dalam penerapan teknologi Informasi di Kabupaten Mamuju Tengah perlu dilakukannya peningkatan infrastruktur dibidang komunikasi. Dalam penyebaran informasi di Daerah, Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai tantangan tersendiri. Belum semua desa terjangkau sarana informasi yang memadai. Melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam membangun akses komunikasi dan informasi ke desa-desa dilakukan dengan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial yang diantaranya melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Selain itu penyebaran informasi dapat melalui media sosial dan website dikarenakan masyarakat akan lebih mudah menerima dan menyerap informasi yang disampaikan.

Pada Urusan Keamanan dan persandian dilingkungan Pemda Kabupaten Mamuju Tengah sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah adalah meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini sesuai dengan Misi Daerah pada Misi ke-4 yaitu "***Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik***". Hal ini juga sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Mamuju tengah tahun 2024 yaitu "***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik***". Prioritas ini bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan good governance melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk itu arah program dan kegiatan dilakukan untuk menunjang perbaikan kualitas kelembagaan berdasar pada vision driven organization. Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Mamuju Tengah yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun, kemudian diturunkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Terwujudnya Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel melalui Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seluruh pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah harus memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi agar mampu memberikan pelayan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Pemerintah

Kabupaten Mamuju Tengah melalui Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) mengevaluasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan layanan publik. Tujuan SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026.

a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan Sub kegiatan mengacu pada :
   - Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang memuat tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah
   - Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Mamuju Tengah. Yang sesuai dengan misi ke-4 yaitu Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program/ kegiatan/siub kegiatan

   Secara garis besar, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah yaitu sebagai berikut :

   1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
      a) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
      a) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      b) Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
      a) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
      a) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      b) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
   5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
      a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33, berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah

Kode					Program,Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebuthan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebuthan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	16				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2	16	02			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**Kab. Mamuju Tengah**	**30%**	**1.813.000.000**	**APBD**		**45%**	**1.885.000.000**
2	16	02	2,01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Informasi dan Komunikasi daerah yang dapat di akses masyarakat**	**Kab. Mamuju Tengah**	**50%**	**1.813.000.000**	**APBD**		**55%**	**1.885.000.000**
2	16	02	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	jumlah dokumen kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik yang dihasilkan	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Dokumen	90.000.000
2	16	02	2,01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen monitoring informasi dan agenda prioritas komunikasi pemda yang ditetapkan	Kab. Mamuju Tengah	1 Kegiatan	70.000.000	APBD		1 Kegiatan	80.000.000

2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	jumlah jenis layanan informasi publik yang diberikan	Kab. Mamuju Tengah	1 Radio 1 Website Kab 5 Akun Medsos	150.000.000	APBD		1 Radio 1 Website Kab 5 Akun Medsos	150.000.000
2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	jumlah media yang bekerjasama dengan pemda	Kab. Mamuju Tengah	60 Media	1.200.000.000	APBD		60 Media	1.200.000.000
2	16	02	2,01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah Laporan Dokumen kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	43.000.000	APBD		1 Dokumen	45.000.000
2	16	02	2,01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Laporan Dokumen komunikasi krisis yang dikelola/disampaikan	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000
2	16	02	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah SDM sarpras pendukung informasi dan komunikasi publik pemda yang terpenuhi	Kab. Mamuju Tengah	4 SDM dan 4 Jenis Sarpras	150.000.000	APBD		5 SDM dan 5 Jenis Sarpras	150.000.000
2	16	02	2,01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	jumlah KIP dan PPID yang terbentuk dan dikelola dengan baik	Kab. Mamuju Tengah	1 Komisi Informasi Kabupaten dan 1 PPID Kabupaten	50.000.000	APBD		1 Komisi Informasi Kabupaten dan 1 PPID Kabupaten	100.000.000
2	16	02	2,01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan kemitraan komunikasi informasi masyarakat (KIM)	Kab. Mamuju Tengah	6 KIM	50.000.000	APBD		6 KIM	50.000.000
2	16	03			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo**	**Kab. Mamuju Tengah**	**31%**	**1.425.000.000**	**APBD**		**38%**	**1.250.000.000**

2	**16**	**03**	**2,01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Domain dan sub Domain yang dikelola Pemerintah Daerah**	**Kab. Mamuju Tengah**	**100%**	**200.000.000**	**APBD**		**100%**	**200.000.000**
								60%		**APBD**		**71%**	
2	16	03	2,01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memakai Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	25 OPD	200.000.000	APBD		30 OPD	200.000.000
2	**16**	**03**	**2,02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Dokumen Pengembangan dan Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**Kab. Mamuju Tengah**	**1 Dokumen**	**1.225.000.000**	**APBD**		**1 Dokumen**	**1.050.000.000**
2	16	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan e-government	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	APBD		0	0
2	16	03	2,02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah Dokumen Laporan Sikronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Bebasis Elektronik	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	75.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
2	16	03	2,02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC, ruang server) dan/atau pusat data pemerintah pusat (pusat data nasional sementara)	Kab. Mamuju Tengah	30%	300.000.000	APBD		50%	200.000.000

2	16	03	2,02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Kab. Mamuju Tengah	31%	100.000.000	APBD		38%	100.000.000
2	16	03	2,02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	persentase layanan warganegara yang diselenggarakan secara online	Kab. Mamuju Tengah	60%	50.000.000	APBD		80%	50.000.000
2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Penggunaan Aplikasi di Pemerintahan Kabupaten	Kab. Mamuju Tengah	71%	50.000.000	APBD		83%	50.000.000
2	16	03	2,02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan KOMINFO	Kab. Mamuju Tengah	43%	300.000.000	APBD		48%	300.000.000
2	16	03	2,02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah Dokukumen fasilitasi literasi digital	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah daerah yang mengikuti pelatihan dan pembinaan	Kab. Mamuju Tengah	42%	100.000.000	APBD		48%	100.000.000
2	16	03	2,02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	jumlah ASN yang bersertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Mamuju Tengah	0	0	APBD			
2	16	03	2,02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan SPBE	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
2	20				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					APBD			

2	20	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organiasasi perangkat daerah (OPD)yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembagunan daerah**	**Kab. Mamuju Tengah**	**60%**	**430.000.000**	**APBD**		**71%**	**400.000.000**
2	20	02	2,01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah**	**Kab. Mamuju Tengah**	**60%**	**430.000.000**	**APBD**		**71%**	**400.000.000**
2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen dan Jenis Buku yang disusun dan dicetak	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen 3 Jenis Buku	200.000.000	APBD		1 Dokumen 3 Jenis Buku	200.000.000
2	20	02	2,01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	Kab. Mamuju Tengah	3	30.000.000	APBD		5	50.000.000
2	20	02	2,01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Laporan Metadata Statistik Sektoral	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
2	20	02	2,01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Laporan Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		0 Dokumen	0
2	20	02	2,01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	jumlah Laporan Dokumen fasilitiasi penguatan otorisasi statistik sektoral di daerah	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2	21				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					APBD			

2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**persentase kegiatan strategis yang telah diamankan**	**Kab. Mamuju Tengah**	**30%**	**500.000.000**	**APBD**		**40%**	**550.000.000**
2	**21**	**02**	**2,01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Prosedur Pengamanan Informasi**	**Kab. Mamuju Tengah**	**36%**	**250.000.000**	**APBD**		**48%**	**250.000.000**
2	21	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Laporan Dokumen Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2	21	02	2,01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Kab. Mamuju Tengah	0	0	APBD		0	0
2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Jenis Keamanan Informasi	Kab. Mamuju Tengah	4 Jenis	200.000.000	APBD		4 Jenis	200.000.000
2	21	02	2,01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Kab. Mamuju Tengah	0	0	APBD		0	0
2	**21**	**02**	**2,02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase perangkat daerah yang terhubung dalam pola hubungan komunikasi sandi**	**Kab. Mamuju Tengah**	**31%**	**250.000.000**	**APBD**		**36%**	**300.000.000**
2	21	02	2,02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Jaring Komunikasi Sandi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000

X	XX	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**Kab. Mamuju Tengah**	**75%**	**6.082.000.000**	**APBD**		**80%**	**3.620.000.000**
X	XX	01	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**Kab. Mamuju Tengah**	**75%**	**320.000.000**	**APBD**		**80%**	**320.000.000**
X	XX	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Kab. Mamuju Tengah	3 Dokumen	50.000.000	APBD		3 Dokumen	50.000.000
X	XX	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
X	XX	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
X	XX	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
X	XX	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
X	XX	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Kab. Mamuju Tengah	4 dokumen	50.000.000	APBD		4 dokumen	50.000.000
X	XX	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000

X	**XX**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**Kab. Mamuju Tengah**	**75%**	**1.430.000.000**	**APBD**		**80%**	**1.430.000.000**
X	XX	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Kab. Mamuju Tengah	10 ASN	1.000.000.000	APBD		10 ASN	1.000.000.000
X	XX	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN	Kab. Mamuju Tengah	10 ASN	250.000.000	APBD		10 ASN	250.000.000
X	XX	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
X	XX	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
X	XX	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kab. Mamuju Tengah	3 Dokumen	50.000.000	APBD		3 Dokumen	50.000.000
X	XX	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	30.000.000	APBD		1 Dokumen	30.000.000
X	**XX**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Mamuju Tengah**	**70%**	**50.000.000**	**APBD**		**80%**	**50.000.000**
X	XX	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Aset OPD yang tersedia	Kab. Mamuju Tengah	4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 Dokumen	50.000.000
X	**XX**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**Kab. Mamuju Tengah**	**75%**	**440.000.000**	**APBD**		**80%**	**440.000.000**
X	XX	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Khusus pegawai PD	Kab. Mamuju Tengah	8 ASN	30.000.000	APBD		8 ASN	30.000.000
X	XX	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya ASN dan Non ASN	Kab. Mamuju Tengah	52 Orang	100.000.000	APBD		52 Orang	100.000.000
X	XX	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai PD	Kab. Mamuju Tengah	8 ASN	30.000.000	APBD		8 ASN	30.000.000
X	XX	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
X	XX	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mamuju Tengah	2 Dokumen	30.000.000	APBD		2 Dokumen	30.000.000

X	XX	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mamuju Tengah	0	0	APBD		0	0
X	XX	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	Kab. Mamuju Tengah	7 ASN	200.000.000	APBD		8 ASN	200.000.000
X	**XX**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**Kab. Mamuju Tengah**	**75%**	**727.000.000**	**APBD**		**80%**	**730.000.000**
X	XX	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	Kab. Mamuju Tengah	7 Jenis	20.000.000	APBD		8 Jenis	20.000.000
X	XX	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Mamuju Tengah	9 Jenis	200.000.000	APBD		10 Jenis	200.000.000
X	XX	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	Kab. Mamuju Tengah	9 Jenis	20.000.000	APBD		10 Jenis	20.000.000
X	XX	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Kab. Mamuju Tengah	33 Jenis	30.000.000	APBD		35 Jenis	30.000.000
X	XX	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Mamuju Tengah	4 Jenis	30.000.000	APBD		4 Jenis	30.000.000
X	XX	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terlaksana	Kab. Mamuju Tengah	24 Media	97.000.000	APBD		25 Media	100.000.000
X	XX	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kab. Mamuju Tengah	14 Orang	30.000.000	APBD		15 Orang	30.000.000
X	XX	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	Kab. Mamuju Tengah	100 Kali	300.000.000	APBD		100 Kali	300.000.000
X	**XX**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**Kab. Mamuju Tengah**	**75%**	**2.580.000.000**	**APBD**		**80%**	**340.000.000**
X	XX	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	Kab. Mamuju Tengah	2 Unit	80.000.000	APBD		1 Unit	40.000.000

X	XX	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Kab. Mamuju Tengah	0 Unit	0	APBD		0 Unit	0
X	XX	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Mamuju Tengah	0	0	APBD		3 jenis	100.000.000
X	XX	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Mamuju Tengah	0	0	APBD		1 jenis	200.000.000
X	XX	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Mamuju Tengah	1 gedung	1.500.000.000	APBD		0 gedung	0
X	XX	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Mamuju Tengah	1 paket	1.000.000.000	APBD		0 paket	0
X	**XX**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**Kab. Mamuju Tengah**	**75%**	**300.000.000**	**APBD**		**80%**	**300.000.000**
X	XX	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Kab. Mamuju Tengah	3 jenis	20.000.000	APBD		3 jenis	20.000.000
X	XX	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Kab. Mamuju Tengah	3 jenis	80.000.000	APBD		3 jenis	80.000.000
X	XX	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Mamuju Tengah	0	0	APBD		0	0
X	XX	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Mamuju Tengah	15 orang	200.000.000	APBD		15 orang	200.000.000
X	**XX**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**Kab. Mamuju Tengah**	**75%**	**235.000.000**	**APBD**		**80%**	**10.000.000**
X	XX	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Mamuju Tengah	2 Unit	150.000.000	APBD		1 Unit	10.000.000
X	XX	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Mamuju Tengah	0 Unit	10.000.000	APBD		0 Unit	0

X	XX	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Kab. Mamuju Tengah	3 Jenis	15.000.000	APBD		0 jenis	0
X	XX	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kab. Mamuju Tengah	2 Jenis	10.000.000	APBD		0 jenis	0
X	XX	01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	Kab. Mamuju Tengah	7 jenis	50.000.000	APBD		0 jenis	0

c. Rumusan program

Adanya perbedaan antara Rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan disebabkan dilakukannya kembali rasionalisasi, kegiatan/subkegiatan, target dan pagu, yang disesuaikan dengan kondisi daerah terkini dan kebutuhan OPD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana Program Prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja. Program/Kegiatan yang diusulkan dalan rencana kerja 2024 diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, perencanaan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendali dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan usulan Program Kegiatan Tahun 2024 yang ada pada Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) disajikan pada Tabel beikut :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
								NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.447.000.000,00**					
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**4.067.000.000,00**					
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.667.000.000,00**					
			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	***75***						
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			85.000.000,00					
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	*75*		*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			30.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*3*		*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*				

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*3*	*30.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			15.000.000,00					Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	*1*		*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD (Dokumen)	*1*	*15.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			10.000.000,00					Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	*1*		*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	*1*	*10.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.000.000,00					Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	*4*		*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	*4*	*15.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000.000,00					Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	*1*		*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	*1*	*15.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.115.000.000,00					
			Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)	*75*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.000.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	*9*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	*10*	*1.000.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			50.000.000,00					ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	*1*	*50.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			15.000.000,00					ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	*1*	*15.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
2.16.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			20.000.000,00					Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)	*1*	*20.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			15.000.000,00					Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	*3*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	*3*	*15.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			15.000.000,00					Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	*1*	*15.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*

	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			70.000.000,00					
			Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	*75*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			10.000.000,00					
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	*2*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	*2*	*10.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai dan ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			10.000.000,00					Pegawai dan ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Pegawai dan ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	*1*	*10.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			50.000.000,00					Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	*8*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	*6*	*50.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai dan ASN*

	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			140.000.000,00					
			Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	*73*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.000.000,00					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	*33*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)	*33*	*15.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.000.000,00					Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	*4*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)	*4*	*10.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.000.000,00					Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)	*1*	*10.000.000,00*	*(Seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			5.000.000,00					Masyarakat

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	*3*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Masyarakat*
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	*3*	*5.000.000,00*	*(Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	*100*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Masyarakat*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	*100*	*100.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			187.000.000,00					
			Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	*75*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			15.000.000,00					
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	*3*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				
			Pengadaan Mebel (Unit)	*3*	*15.000.000,00*	*(Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.000.000,00					Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	*2*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	*2*	*22.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000.000,00					Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	*1*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	*1*	*150.000.000,00*	*(Kecamatan Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.000.000,00					
			Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)	*75*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	*1*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	*1*	*10.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Perangkat Daerah Se-Kabupaten Mamuju Tengah dan Stakeholder lainnya*
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			50.000.000,00					Masyarakat, Perangkat Daerah Se-Kabupaten Mamuju Tengah dan Stakeholder lainnya
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Masyarakat, Perangkat Daerah Se-Kabupaten Mamuju Tengah dan Stakeholder lainnya*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	*1*	*50.000.000,00*	*(Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Tobadak)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian*

	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.000.000,00					
			Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)	*75*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			10.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	*2*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	*2*	*10.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai dan ASN*
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**720.000.000,00**					
			persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	***30***						***Pegawai dan ASN***
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			720.000.000,00					
			Persentase Informasi dan Komunikasi daerah yang dapat di akses masyarakat (%)	*50*		*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			30.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				

			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Dokumen)	*1*	*30.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik			100.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Masyarakat*
			Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	*1*	*100.000.000,00*	*(Kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media			500.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	*60*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Masyarakat*
			Layanan Hubungan Media (Layanan)	*60*	*500.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*
	2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis			10.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Masyarakat*
			Manajemen Komunikasi Krisis (Dokumen)	*1*	*10.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			20.000.000,00					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	*5*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik (Orang)	*4*	*20.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*
	2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			20.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (Dokumen)	*2*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Masyarakat*
			PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH (Dokumen)	*2*	*20.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT*
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			40.000.000,00					MASYARAKAT
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*MASYARAKAT*
			PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS (Dokumen)	*1*	*40.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT*
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (%)***	***31***	**1.680.000.000,00**					***MASYARAKAT***
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			910.000.000,00					

			Persentase Domain dan sub Domain yang dikelola Pemerintah Daerah (%)	*60*		*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*			
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			110.000.000,00				
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*			
			PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dokumen)	*1*	*110.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*MASYARAKAT*
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			800.000.000,00				MASYARAKAT
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*MASYARAKAT*
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	*1*	*800.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*OPD SE KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			770.000.000,00				
			Jumlah Laporan Dokumen Pengembangan dan Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Dokumen)	*1*		*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*			
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00				

		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
		PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dokumen)	*1*	*30.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			20.000.000,00					KABUPATEN MAMUJU TENGAH
		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
		SINKRONISASI PENGELOLAAN RENCANA INDUK DAN ANGGARAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (Dokumen)	*1*	*20.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			50.000.000,00					KABUPATEN MAMUJU TENGAH
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
		PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH (Unit)	*1*	*50.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			40.000.000,00					KABUPATEN MAMUJU TENGAH
		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik (Perangkat Daerah)	*10*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*

			KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK (Perangkat Daerah)	*5*	*40.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD KAB. MAMUJU TENGAH*
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				100.000.000,00					OPD KAB. MAMUJU TENGAH
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)	*35*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*OPD KAB. MAMUJU TENGAH*
			PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (Unit)	*35*	*100.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT*
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				300.000.000,00					MASYARAKAT
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan)	*35*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*MASYARAKAT*
			PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (Layanan)	*35*	*300.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT*
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas				10.000.000,00					MASYARAKAT
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*MASYARAKAT*
			PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS (Dokumen)	*1*	*10.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*

	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			20.000.000,00					KABUPATEN MAMUJU TENGAH
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)	*2*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
			PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH (Dokumen)	*2*	*20.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			200.000.000,00					KABUPATEN MAMUJU TENGAH
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
			MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM SPBE (Dokumen)	*1*	*200.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**210.000.000,00**					
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase Organiasasi perangkat daerah (OPD)yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembagunan daerah (%)***	***60***	**210.000.000,00**					***KABUPATEN MAMUJU TENGAH***
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			210.000.000,00					

		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah (%)	*60*		*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			30.000.000,00					
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL (Dokumen)	*1*	*30.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			30.000.000,00					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Orang)	*3*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
		PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI (Orang)	*1*	*30.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral			100.000.000,00					KABUPATEN MAMUJU TENGAH
		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
		MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL (Dokumen)	*1*	*100.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*

	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			20.000.000,00					KABUPATEN MAMUJU TENGAH
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS (Orang)	*3*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
			PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL (Orang)	*3*	*20.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD KAB. MAMUJU TENGAH*
	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			30.000.000,00					OPD KAB. MAMUJU TENGAH
			Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*OPD KAB. MAMUJU TENGAH*
			PENYELENGGARAAN OTORITAS STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH (Dokumen)	*1*	*30.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**170.000.000,00**					
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**170.000.000,00**					
			Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah (%)	***30***						***KABUPATEN MAMUJU TENGAH***
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			130.000.000,00					
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Prosedur Pengamanan Informasi (%)	*36*		*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*				

	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00					
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
			PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dokumen)	*1*	*30.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			100.000.000,00					PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	*1*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
			PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK (Laporan)	*1*	*100.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000,00					
			persentase perangkat daerah yang terhubung dalam pola hubungan komunikasi sandi (%)	*31*		*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*				
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000,00					
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	*1.00*		*(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, KAB. MAMUJU TENGAH)*				

			OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (Perangkat Daerah)	*1*	*40.000.000,00*	*(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH*
	J U M L A H				**4.447.000.000,00**					

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksananaan kegiatan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan yang diemban. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program dan kegiatan kedepannya.

Semoga Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapainya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Tobadak, Agustus 2023

Kepala Dinas,

Drs. BAMBANG SUPARNI, M.Pd
Pangkat : Pembina TK.I/IV.b
Nip : 19670705 199504 1 001

RENCANA KERJA (RENJA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2023

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan. mengamati pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan Pada tahun 2022, meskipun Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Daerah Otonomi Baru yang mana program dan kegiatan yang telah berjalan dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun akan tetapi lebih awal sudah dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Topoyo, Juli 2023

DAFTAR ISI

S A M P U L ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU **5**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD 5
2.2 Analisis kinerja SKPD 8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 13
2.4 Riviuw terhadap rancangan awal RKPD 13
2.5 Penelahan usulan program dan kegiatan Masyarakat 21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD **22**

3.1.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional 22
3.1.2 Tujuan dan Sasaran 22
3.1.3 Program dan Kegiatan 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD **25**

BAB IV PENUTUP **29**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja adalah merupakan satu komponen dari rangkaian akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan yang matang(strategik) dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan dari masyarakat melalui Pemerintah Desa maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah menyusun Rencana Kerja tahun 2022 dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah maupun dukungan terhadap suksesnya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui Program Pendampingan Desa.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah sebagai eksen plan tahun 2022, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah akan dapat lebih memfokuskan sasaran yang tertuang dalam isu strategis disertai dengan strategi pencapaiannya. Rencana Kerja tersebut akan ditindaklanjuti oleh BAPPEDA Kabupaten Mamuju Tengah untuk diverifikasi sebagai bahan informasi pada pelaksanaan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena Rencana Kerja adalah merupakan dokumen perencanaan yang bermuara pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun 2022 secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah didasari oleh Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422)
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
10. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah disusun dengan maksud sebagai acuan bagi seluruh perangkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3.2.Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah agar lebih fokus dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan yang strategik, juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah disusun dengan sistematika seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada Bab ini menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu (2022), isu-isu strategik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah 2022.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Pada Bab ini menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran Rencana Kerja.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Penyusunan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023) Sudah Berjalan Sesuai dengan harapan yang dituangkan melalui Renja dan dilaksanakan Melalui Program dan Kegiatan Pada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

Kode Rekening	Uraian	PAGU RENJA	PAGU DPA
1	*2*		*3*
5	**BELANJA DAERAH**	**1.469.700.000**	**2.615.387.849**
5,1	**BELANJA OPERASI**	**1.469.700.000**	**2.615.387.849**
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.727.656.589
5.1.01	Belanja Pegawai		887.731.260
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**1.469.700.000**
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**939.700.000**	**1.608.997.128**
2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.000.000**	**87.904.030**
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	23.444.550
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	10.000.000	18.897.000
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	20.133.430
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	15.438.530
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.990.520

2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**167.600.000**	**1.018.453.810**
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	887.731.260
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	147.600.000	96.000.000
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	17.412.500
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	17.310.050
2.13.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**31.125.000**
2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	31.125.000
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**448.000.000**	**248.530.653**
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	14.046.651
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	12.964.100
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	4.421.900
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	33.810.000
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	169.796.662
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	13.491.340
2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**120.000.000**	**119.900.000**
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	119.900.000
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44.100.000**	**34.080.719**
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	10.918.390
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.100.000	23.162.329
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.000.000**	**69.002.916**
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	61.526.724
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	7.476.192

2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**470.000.000**	**695.634.186**
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**470.000.000**	**695.634.186**
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	60.000.000	455.099.685
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60.000.000	103.493.094
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	120.000.000	60.217.730
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	100.000.000	26.660.460
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	60.000.000	25.163.062
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	70.000.000	25.000.155
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**60.000.000**	**310.756.535**
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**60.000.000**	**310.756.535**
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60.000.000	310.756.535
J U M L A H		**1.469.700.000**	**2.615.387.849**

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran Renja tidak selaras dengan anggaran di DPA untuk pelaksanaan program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamuju Tengah.

2.2 Analisis Capaian Kinerja DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Tujuan meningkatkan stasus Desa setingkat lebih tinggi dari status sebelumnya, Meningkatkan peran kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, Memenuhi dukungan administrasi,sarana/prasarana dan SDM aparatur dalam penyelenggaraan urusan disertai pelaporan kinerja dan keuangannya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melalui Program Kegiatan Pada tabel diatas setiap sasaran Programnya indikator kinerjanya yakni sebagai berikut:

Sasaran strategis I ini dicapai melalui target kinerja yang ditetapkan dengan berdasarkan Indikator Kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Tersusunnya perencanaan dan fasilitasi perencanaan desa yang berkwalitas baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

   Indikator ini direalisasikan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur desa dengan operasional kegiatan melalui kegiatan Bintek, sosialisasi Perundang-undangan penguatan kelembagaan Desa, jumlah target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 100 %.

2. Sasaran strategis II ini dicapai melalui target kinerja yang ditetapkan dengan berdasarkan Indikator Kinerja antara lain sebagai berikut : Meningkatnya perekonomian Pedesaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna serta Pendirian BUMDesa.

   Indikator ini direalisasikan melalui Program Peningkatan perekonomian Pedesaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna serta Pendirian BUMDesa dengan operasional kegiatan melalui kegiatan BUMDes,TTG dan Pelatihan aparat desa tentang kawasan perdesaan, jumlah target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 100 %.

3. Sasaran strategis III ini dicapai melalui target kinerja yang ditetapkan dengan berdasarkan Indikator Kinerja antara lain sebagai berikut :

   Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Mamuju Tengah.

   Indikator ini direalisasikan melalui Program Peningkatan pelaksanaan poljanal posyandu, Pendataan Asset Desa, Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan PAUD serta memfasilitasi sumber daya air, jumlah target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 100%.

4. Meningkatnya dukungan administrasi, sarana/prasarana dan SDM aparatur dalam penyelenggaraan urusan disertai pelaporan kinerja dan keuangannya, Jumlah target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 100 %

TABEL 2.2

PENCAPAIAN INDKATOR KINERJA KUNCI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	FUNGSI PENUNJANG	IKK	TARGET				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	5	10	15	20	13			
2		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	5	7	7	9	6			
3		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1	2	3	4	0			

NO	FUNGSI PENUNJANG	IKK	TARGET				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	1	2	3	4	0			

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah dihadapkan dengan percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), serta persiapan pemekaran wilayah Kecamatan, desa menjadi kelurahan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah diharapkan juga menyesuaikan dengan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah selain itu juga isu-isu penting tentang **Pengembangan Sistem Perekonomian dan Sistem Sosial Tangguh Untuk Kesejahteraan Masyarakat.** menjadi catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan kegiatan prioritas bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023.

Selain isu-isu starategi daerah dianggap perlu juga mengamati isu-isu Nasional yang bertujuan mensinergikan isu pemerintah kabupaten,provinsi dan Nasional guna terwujudnya sinergi program prioritas Nasional yang di intervensi ke daerah.

2.4 Riview terhadap Rancangan Awal SKPD

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Review rencana kerja dan target penganggaran skpd tahun 2021 terhadap rencana kerja di tahun 2022 sebagai berikut pada tabel dibawah ini.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Jumlah pelayanan administrasi Perkantoran yang tersedia**		**Rp 2.457.990.582**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Jumlah pelayanan administrasi Perkantoran yang tersedia**		**Rp 2.457.990.582**	
01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				*Rp 142.300.000*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				*Rp 142.300.000*	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 38.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 38.000.000	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 20.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 20.500.000	
	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 35.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 35.500.000	
	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 Dokumen	Rp 29.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 Dokumen	Rp 29.000.000	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)* DPA-SKPD	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)* DPA-SKPD	*(5)*	*(6)*	*(6)*
	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 15.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 15.500.000	
	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 3.800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 3.800.000	
	1	*202*		*Administrasi Keuangan Perangkat*		*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat*		*Rp 1.374.240.582*	*Administrasi Keuangan Perangkat*		*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat*		*Rp 1.374.240.582*	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
				Daerah		*Daerah yang tersedia*			*Daerah*		*Daerah yang tersedia*			
	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Rp 1.251.490.582	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Rp 1.251.490.582	
	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Rp 51.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Rp 51.000.000	
	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju Tengah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Rp 9.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju Tengah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Rp 9.100.000	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju Tengah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp 62.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju Tengah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp 62.650.000	
	1	*205*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia*		*Rp 165.000.000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia*		*Rp 165.000.000*	
	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju Tengah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Rp 30.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju Tengah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Rp 30.000.000	
	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju Tengah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	2 orang	Rp 50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju Tengah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	2 orang	Rp 50.000.000	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)* dan Fungsi	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)* dan Fungsi	*(5)*	*(6)*	*(6)*
	1	20 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang	Rp 60.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang	Rp 60.000.000	
	1	20 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	Rp 25.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	Rp 25.000.000	
	1	*20 6*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				*Rp 326.950.000*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				*Rp 326.950.000*	
	1	20 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju Tengah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	Rp 3.750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju Tengah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	Rp 3.750.000	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
	1	20 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju Tengah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	Rp 50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju Tengah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	Rp 50.000.000	
	1	20 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju Tengah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	Rp 7.950.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju Tengah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	Rp 7.950.000	
	1	20 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju Tengah	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	Rp 27.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju Tengah	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	Rp 27.500.000	
	1	20 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju Tengah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	Rp 22.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju Tengah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	Rp 22.000.000	
	1	20 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 36.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 36.000.000	
	1	20 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	Rp 165.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	Rp 165.500.000	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
				Konsultasi SKPD		Konsultasi SKPD			Konsultasi SKPD		Konsultasi SKPD			
	1	20 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp 14.250.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp 14.250.000	
	1	*20 7*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				*Rp 349.000.000*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				*Rp 349.000.000*	
	1	20 7	5	Pengadaan Mebel	Mamuju Tengah	Tersedianya Mebel	12 Unit	Rp 75.500.000	Pengadaan Mebel	Mamuju Tengah	Tersedianya Mebel	12 Unit	Rp 75.500.000	
		20 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju Tengah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp 75.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju Tengah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp 75.000.000	
	1	20 7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Mamuju Tengah	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	12 Unit	Rp 78.500.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Mamuju Tengah	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	12 Unit	Rp 78.500.000	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju Tengah	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit	Rp 120.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju Tengah	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit	Rp 120.000.000	
	01	*208*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				*Rp 29.500.000*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				*Rp 29.500.000*	
	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 11.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 11.000.000	
	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju Tengah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Rp 18.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju Tengah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Rp 18.500.000	
	01	*209*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				*Rp 71.000.000*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				*Rp 71.000.000*	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
	1	20 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	Rp 68.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	Rp 68.500.000	
	1	20 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mamuju Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Unit	Rp 2.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mamuju Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Unit	Rp 2.500.000	
13	4			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**				**Rp 1.956.650.000**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**				**Rp 1.956.650.000**	
13	*4*	*201*		*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi*				*Rp 1.956.650.000*	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi*				*Rp 1.956.650.000*	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
				Pemerintahan Desa					*Pemerintahan Desa*					
1 3	4	20 1	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	54 Dokumen	Rp 1.010.500.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	54 Dokumen	Rp 1.010.500.000	
1 3	4	20 1	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	150.000.000	
1 3	4	20 1	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	54 Dokumen	Rp 46.150.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	54 Dokumen	Rp 46.150.000	
		20 1	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	54 Dokumen	Rp 243.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	54 Dokumen	Rp 243.000.000	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
1 3	4	20 1	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	40 Orang	Rp 195.500.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	40 Orang	Rp 195.500.000	
1 3	4	20 1	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	54 Dokumen	Rp 110.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	54 Dokumen	Rp 110.000.000	
		20 1	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Mamuju Tengah	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	Rp -	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Mamuju Tengah	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	Rp -	
1 3	4	20 1	1 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	54 Dokumen	Rp 62.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	54 Dokumen	Rp 62.500.000	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
1 3	4	20 1	1 7	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	110.000.000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	110.000.000	
1 3	4	20 1	1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	Rp 29.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	Rp 29.000.000	
1 3	5			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**				**Rp 716.200.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**				**Rp 716.200.000**	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
1 3 0 5 20 1	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*				*Rp 716.200.000*	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*				*Rp 716.200.000*	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
1	5	20 1	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Rp 73.500.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Mamuju Tengah	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Rp 73.500.000	
1	5	20 1	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Mamuju Tengah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	54 Lembaga	Rp 76.200.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Mamuju Tengah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	54 Lembaga	Rp 76.200.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
20 1 4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	5 Unit	Rp 85.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	5 Unit	Rp 85.000.000	

KODE				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)				*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
						Adat					Adat			
1 3	5	20 1	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	Rp 75.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	Rp 75.000.000	
1 3	5	20 1	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Rp 75.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Rp 75.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*
1 3 . 5 . 20 1 . 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Dokumen	Rp 165.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Dokumen	Rp 165.000.000	
1 3 . 5 . 20 1 . 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Desa	Rp 166.500.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Mamuju Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Desa	Rp 166.500.000	
JUMLAH					**Rp 5.130.840.582**					**Rp 5.130.840.582**	

2.5 Penelahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Musrenbang yang diadakan dikecamatan diikuti oleh semua OPD termasuk Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun usulan program dan kegiatan Masyarakat tidak ada yang bersentuhan dengan Dinas bahkan Usulan Program yang akan dilaksanakan oleh DPMD yang menjadi usulan bersama untuk tahun berkenan.

Usulan Kegiatan dari pemangku kepentingan

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	besaran/Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Desa Barakkang	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7 Orang (BPD Desa Barakkang)	Usulan Desa Barakkang
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Desa Bambamanurung	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	20 Orang (1 BUMDes)	Usulan Desa Bambamanurung

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1 Telahan Terhadap kebijakan Nasional

Sejalan dengan Nawa Cita Jilid II Pemerintahan Jokowidodo dan KH.Mar'ruf Khusunya pada point ke tiga yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Dan Point Ke Tujuh yaitu Mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengemban Program Prioritas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2022 pada Poin **Keempat Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.** Untuk mewujudkan Program Prioritas Daerah tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung program Prioritas Pemerintah Daerah melalui Program kegiatan masing-masing bidang guna Terciptanya Penataan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang strategik dengan strategi pencapaian sesuai degan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

a. Terlaksanaya berbagai program dan kegiatan yang strategis dengan hasil yang baik, berkualitas, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.
b. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah .
c. Terlatihnya aparat pemerintahan desa yang mandiri dalam penyusunan administrasi desa dan pelaksanaan tupoksinya, serta menjalankan amanah nawacita presiden RI yakni Pada Point Ke Tiga Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan dan Ke Tujuh Mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
d. Terlatihnya aparat pemerintah desa dalam penyusunan RPJM Desa dan RKPdes Desa.
e. Terlaksanaya Pelayanan Sosial Dasar dipedesaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
f. Tercapainya Tujuan untuk meningkatkan desa Sangat Tertinggal Menjadi Tertinggal menuju ke desa Sejahtera dan Mandiri.

3.3 Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapainnya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renja ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan ebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Review rencana kerja merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review renja menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya.

Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2024 terbagi pada Sembilan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2024 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melaksanakan 3 program, 9 kegiatan, dan 47 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut :

RENCANA DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA APBD I		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah pelayanan administrasi Perkantoran yang tersedia**			**Rp 2.457.990.582**				**Rp 2.485.150.000**
	01	*201*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				*Rp 142.300.000*				*Rp 147.350.000*
	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	3 Dokumen	Rp 38.000.000			3 Dokumen	Rp 38.500.000
	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	2 Dokumen	Rp 20.500.000			2 Dokumen	Rp 21.500.000
	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Mamuju Tengah	2 Dokumen	Rp 35.500.000			2 Dokumen	Rp 36.500.000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA APBD I		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	2 Dokumen	Rp 29.000.000			2 Dokumen	Rp 31.500.000
	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	2 Laporan	Rp 15.500.000			2 Laporan	Rp 15.500.000
	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	1 Laporan	Rp 3.800.000			1 Laporan	Rp 3.850.000
	1	*202*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia*			*Rp 1.374.240.582*	*c d*			*Rp 1.389.700.000*
	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju Tengah	24 Dokumen	Rp 1.251.490.582			24 Dokumen	Rp 1.265.000.000
	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju Tengah	24 Dokumen	Rp 51.000.000			24 Dokumen	Rp 52.000.000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA APBD I		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju Tengah	4 Laporan	Rp 9.100.000			4 Laporan	Rp 9.150.000
	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju Tengah	4 Laporan	Rp 62.650.000			4 Laporan	Rp 63.550.000
	1	*205*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia*			*Rp 165.000.000*				*Rp 175.300.000*
	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mamuju Tengah	40 Paket	Rp 30.000.000			40 Paket	Rp 31.450.000
	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju Tengah	2 orang	Rp 50.000.000			2 orang	Rp 51.550.000
	1	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	12 orang	Rp 60.000.000			12 orang	Rp 62.300.000
	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Mamuju Tengah	5 orang	Rp 25.000.000			5 orang	Rp 30.000.000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA APBD I		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
					Perundang-Undangan							
	1	*206*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				*Rp 326.950.000*				*Rp 349.000.000*
	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju Tengah	12 Paket	Rp 3.750.000			12 Paket	Rp 4.000.000
	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju Tengah	12 Paket	Rp 50.000.000			12 Paket	Rp 53.000.000
	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Mamuju Tengah	12 Paket	Rp 7.950.000			12 Paket	Rp 8.500.000
	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju Tengah	12 Paket	Rp 27.500.000			12 Paket	Rp 28.000.000
	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju Tengah	12 Dokumen	Rp 22.000.000			12 Dokumen	Rp 26.500.000
	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	12 Laporan	Rp 36.000.000			12 Laporan	Rp 37.500.000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA APBD I		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	12 Laporan	Rp 165.500.000			12 Laporan	Rp 175.000.000
	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju Tengah	12 Dokumen	Rp 14.250.000			12 Dokumen	Rp 16.500.000
	1	*207*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				*Rp 349.000.000*				*Rp 306.800.000*
	1	207	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Mamuju Tengah	12 Unit	Rp 75.500.000			12 Unit	Rp 40.000.000
		207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju Tengah		Rp 75.000.000			2 Unit	Rp 76.800.000
	1	207	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Mamuju Tengah	12 Unit	Rp 78.500.000			12 Unit	Rp 50.000.000
	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju Tengah	12 Unit	Rp 120.000.000			1 Unit	Rp 140.000.000
	01	*208*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				*Rp 29.500.000*				*Rp 32.000.000*
	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju Tengah	12 Laporan	Rp 11.000.000			12 Laporan	Rp 12.000.000
	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju Tengah	12 Laporan	Rp 18.500.000			12 Laporan	Rp 20.000.000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA APBD I		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	01	*209*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				*Rp 71.000.000*				*Rp 85.000.000*
	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	12 Unit	Rp 68.500.000			12 Unit	Rp 70.000.000
	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mamuju Tengah	12 Unit	Rp 2.500.000			12 Unit	Rp 15.000.000
13	4			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**				**Rp 1.956.650.000**				**Rp 2.529.266.944**
13	*4*	*201*		*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				*Rp 1.956.650.000*				*Rp 2.529.266.944*
13	4	201	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Mamuju Tengah	54 Dokumen	Rp 1.010.500.000			54 Dokumen	Rp 1.040.500.000
13	4	201	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Mamuju Tengah	5 Dokumen	150.000.000			2 Dokumen	Rp 120.000.000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA APBD I		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
13	4	201	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Mamuju Tengah	54 Dokumen	Rp 46.150.000			54 Dokumen	Rp 44.866.944
		201	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Mamuju Tengah	54 Dokumen	Rp 243.000.000			54 Dokumen	Rp 255.000.000
13	4	201	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Mamuju Tengah	40 Orang	Rp 195.500.000			40 Orang	Rp 204.500.000
13	4	201	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Mamuju Tengah	54 Dokumen	Rp 110.000.000			54 Dokumen	Rp 110.500.000
		201	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Mamuju Tengah	0 Laporan	Rp -			14 Laporan	Rp 550.000.000
13	4	201	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Mamuju Tengah	54 Dokumen	Rp 62.500.000			54 Dokumen	Rp 63.200.000
13	4	201	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Mamuju Tengah	1 Dokumen	110.000.000			1 Dokumen	Rp 110.000.000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA APBD I		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
13	4	201	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Mamuju Tengah	2 Dokumen	Rp 29.000.000			2 Dokumen	Rp 30.700.000
13	5			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**				**Rp 716.200.000**				**Rp 741.200.000**
13	*05*	*201*		*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*				*Rp 716.200.000*				*Rp 741.200.000*
13	5	201	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Mamuju Tengah	1 Dokumen	Rp 73.500.000			1 Dokumen	Rp 74.500.000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA APBD I		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
				Hukum Adat	Hukum Adat							
13	5	201	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Mamuju Tengah	54 Lembaga	Rp 76.200.000			54 Lembaga	Rp 77.800.000
		201	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Mamuju Tengah	5 Unit	Rp 85.000.000			5 Unit	Rp 95.000.000

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA APBD I		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
13	5	201	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Mamuju Tengah	1 Dokumen	Rp 75.000.000			1 Dokumen	Rp 77.500.000
13	5	201	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Mamuju Tengah	1 Laporan	Rp 75.000.000			1 Laporan	Rp 76.400.000
13	5	201	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Mamuju Tengah	1 Dokumen	Rp 165.000.000			1 Dokumen	Rp 170.000.000
13	5	201	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Mamuju Tengah	1 Desa	Rp 166.500.000			1 Desa	Rp 170.000.000
JUMLAH								**Rp 5.130.840.582**				**Rp 5.755.616.944**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengemban Program Prioritas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 pada Poin Empat yakni Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan Program Prioritas Daerah tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung program Prioritas Pemerintah Daerah melalui Program kegiatan masing-masing bidang guna Terciptanya Penataan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Rencana Kerja untuk tahun 2022 berdasarkan dengan prioritas Daerah dengan target meningkatkan satatus Desa dari Desa Sangat tertinggal menjadi Tertinggal menuju desa berkembang/mandiri menuju Desa swasembada.

Sedangkan Pendanaan SKPD dengan mengacu kepada pagu tahun sebelumnya yakni Tahun 2023 dengan harapan melalui program dan kegiatan di tahun 2024 diharapkan dapat mengentaskan Program prioritas Daerah yakni **Pengembangan Sistem Perekonomian Dan Sistem Sosial Tangguh Untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Pada prinsipnya program dan kegiatan yang ada di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan kebijakan dan program serta kegiatan di tingkat kabupaten, yaitu sesuai RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD yang pada akhirnya dituangkan di DPA sebagai acuan/pedoman program dan kegiatan pada satu tahun berjalan.

Untuk rencana kegiatan dan pendanaan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024	
			TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah pelayanan administrasi Perkantoran yang tersedia**		**Rp 2.457.990.582**
	Perencanaan, Penganggaran, dan			*Rp 142.300.000*

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 38.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 20.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 35.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 29.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 15.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 3.800.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia*		*Rp 1.374.240.582*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Rp 1.251.490.582
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Rp 51.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Laporan	Rp 9.100.000

		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp 62.650.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia*		*Rp 165.000.000*
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Rp 30.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang	Rp 50.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang	Rp 60.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	Rp 25.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			*Rp 326.950.000*
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	Rp 3.750.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	Rp 50.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	Rp 7.950.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	Rp 27.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	Rp 22.000.000

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 36.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 165.500.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp 14.250.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			*Rp 349.000.000*
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	12 Unit	Rp 75.500.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp 75.000.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	12 Unit	Rp 78.500.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit	Rp 120.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			*Rp 29.500.000*
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 11.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Rp 18.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			*Rp 71.000.000*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	Rp 68.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Unit	Rp 2.500.000
13	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**Rp 1.956.650.000**
13	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi*			*Rp 1.956.650.000*

	Pemerintahan Desa			
13	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	54 Dokumen	Rp 1.010.500.000
13	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	150.000.000
13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	54 Dokumen	Rp 46.150.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	54 Dokumen	Rp 243.000.000
13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	40 Orang	Rp 195.500.000
13	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	54 Dokumen	Rp 110.000.000
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	Rp -
13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	54 Dokumen	Rp 62.500.000
13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	110.000.000
13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	Rp 29.000.000
13	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**Rp 716.200.000**

13	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*			*Rp 716.200.000*
13	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Rp 73.500.000
13	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	54 Lembaga	Rp 76.200.000
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	Rp 85.000.000

13	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	Rp 75.000.000
13	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Rp 75.000.000
13	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Dokumen	Rp 165.000.000
13	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Desa	Rp 166.500.000
JUMLAH				**Rp 5.130.840.582**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 bagi aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah, juga merupakan salah satu pendukung tercapainya target pembangunan daerah.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja ini merupakan hal penting yang perlu diupayakan dan yang sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun anggaran 2022 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehinggan diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kepala Dinas PMD

H. DZULKIFLI, S.Ip.,M.Si.,MM
Nip. 19810707 200112 1 005

RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi Keuangan terhadap publik, maka Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah menyusun Renja Tahun 2024 dengan mengacu kepada Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renja Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah, dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Renja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Tobadak, 01 Agustus 2023

KEPALA DINAS



COLLENG SULAIMAN, S.Sos

NIP. 19651231 198703 1 227

DAFTAR ISI

SAMPUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 9
1.3 Maksud dan Tujuan 11
1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 15

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 71

BAB V PENUTUP 87

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah dibentuk Sesuai dengan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nonor 39 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupataen Mamuju Tengah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis dinas koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Tahun Anggaran 2024 merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis Tahun 2021–2026 yang diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 yang telah tersusun dengan baik secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Manfaat pembangunan , koperasi usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan secara langsung bagi daerah adalah peningkatan jumlah tenaga kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan secara tidak langsung yaitu pemanfaatan potensi pasar domestik dan ekspor, peningkatan kemampuan pertumbuhan industri daerah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi usaha kecil dan menengah,

perindustrian dan perdagangan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
3. Pengkordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; dan
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skal yang lebih spesifik.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, Rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka

waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah telah dijelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat yang dimulai dengan menentukan sasaran, strategi kebijakan dan rencana detail untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah sendiri diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (Stakeholder) memerlukan perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah maupun pendek agar dapat berjalan pada jalur yang khusus yang cepat dan tepat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah ,Perindustrian, Perdagangan Tahun 2024 antara lain :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh stakeholders, oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengac pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, berlandaskan :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
26. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud danTujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang menjabarkan Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah . Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangantahun 2021-2026 dijadikan dasar patokan dalam penyusunan Renja tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan program/kegiatan tahun 2024, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di tahun 2024, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Terdiri dari :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dan Capaian Renstra Perangat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangat Daerah.

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang uraian program, kegaiatan dan pendanaan yang direncanakan

BAB V PENUTUP.

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya

Pembangunan Koperasi UKM , perindustrian dan perdagangan, sebagai penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor koperasi UKM, perindusrian dan perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk itu peran industri dalam perekonomian dan pengembangan industri kecil termasuk industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor pertanian haruslah menjadi prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Serta peran serta dari pasar yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dapat digunakan sebagai pengukur indikator pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Semakin banyak orang yang bertransaksi di suatu pasar,maka perekonomian derah tersebut akan menjadi meningkat, hal ini di pengaruhi juga oleh kondisi fisik pasar itu sendiri, terutama pasar tradisional yang semakin lama kondisi fisiknya semakin memprihatinkan. Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan resntra samapai dengan Tahun 2023.

Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan s/d Tahun 2023 Kabupaten Mamuju Tengah

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat DaerahTahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Urusan Wajib									
1					Bidang Urusan Koperasi UKM									
1	1				**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat dari Total Koperasi Aktif**	**100 %**	0 %	**46 %**	**46 %**	100,00 **%**	100 **%**	77,42 **%**	77,42 **%**
1	1	1			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasn Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Uniy Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	100 %	0 %	46 **%**	46 %	100,00 %	100 %	50 %	50 %
1	2				**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase KSP/USP Sehat**	**100 %**	0 %	0 **%**	0 %	%	100 %	21,24 %	21,2389 %

1	2	1			Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang mendapatkan Penilaian	100 %	0 %	0 %	0 %	%	100 %	100 %	100 %
1	3				**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**	**100** %	100 %	**18** %	**100** %	555,56 %	33 %	0 %	0 %
1	3	1			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendapataan, kemitraan, kemudian Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang diberdayakan	61 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	33 %	0 %	0 %
1	4				**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Jumlah usaha kecil dan Menengah dari total UMKM**	**100** %	96 %	**10** %	**10** %	100,00 %	100 %	30 %	30 %
1	4	1			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	100 %	96 %	10 %	10 %	100,00 %	100 %	30 %	30 %
					Urusan Pilihan									
2					Bidang Urusan Perindustrian									
2	1				**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pertumbuhan industri kecil menengah di kabupaten**	**2,91 %**	1,91 %	**2,19 %**	-19,88 %	-907,76 %	2,45 %	-47,788 %	-1950,51 %

2	1	1			Penyusunan dan Evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Persentase terselesaikanya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkanya menjadi perda	100 %	0 %	0 **%**	- %	%	50 %	0 %	0 %
2	2				**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**6,00 Dokumen**	6 dokumen	**6,00 dokumen**	**6 dokumen**	100,00 **%**	6 **dokumen**	4 **dokumen**	66,6667 **dokumen**
2	2	1			Penyedian informasi industr untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase dan perusahaan induustri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahan indutri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	67,15 %	48,41 %	65,75 %	42,86 %	65,19 %	65,75 %	15,78 %	24 %
					Urusan Pilihan									
3					Bidang Urusan Perdagangan									
3	1				**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**PERTSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN**	**100** %	0 %	**25 %**	**85,71** %	342,84 %	50 %	85,71 %	171,429 %
3	1	1			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	100 %	0 %	25 %	85,71 %	342,84 %	50 %	25 %	50 %

3	2				**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya**	**39,5**	**%**	37,76	%	**38,2**	**%**	**38,20**	%	100,00	%	38,63	%	42,31	%	109,53	%
3	2	1			Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang tersedia	569	unit	549	unit	550	unit	550	unit	100,00	unit	597	unit	597	unit	100	unit
3	2	2			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35	orang	30	orang	32	orang	32	orang	100,00	orang	32	orang	15	orang	46,875	orang
3	3				**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok**	**5,61**	**%**	5,61	%	**6,26**	**%**	**6,05**	**%**	96,65	**%**	6,01	**%**	0	**%**	0	**%**
3	3	1			Pengedalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang Penting di tingkat pasar kabupaten/kota	10	Dokumen	10	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	dokumen	10	dokumen	4	dokumen	40	dokumen
3	4				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih**	**35,33**	**%**	32,51	%	0	%	0	%		%	33,60	%	0	%	0	%
3	4	1			Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan misi dagang bagi produksi ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kaupaten/kota	Jumlah Pameran dan Misi dagang yang diikuti dan diselenggarakan	3	kali	1	kali	0	kali	0	kali		kali	1	kali	0	kali	0	kali

3	5				**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**95**	%	95	%	**95**	**%**	**99,59**	%	104,83	%	95	%	47,5	%	50	%
3	5	1			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ullang dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang diter/tera Ulang Dlaam tahun berjalan	95	%	95	%	95	%	99,59	%	104,83	%	95	%	47,5	%	50	%
3	6				**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODK DALAM NEGERI**	**Jumlah Promosi pemasaran yang dilaksanakan**	**1**	**kali**	1	kali	**1**	**kali**	**0**	**kali**	0,00	**kali**	1	**kali**	0	**kali**	0	**kali**
3	6	1			pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Negeri	Jumlah Produk yang lokal yang dipromosikan	1	unit	0	unit	1	unit	0	unit	0,00	unit	1	unit	0	unit	0	unit

Berdasarkan Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 sampai dengan triwulan ke II diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

a. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2023 melaksanakan sebanyak 4 program, dan 4 kegiatan. Adapun target dan realisasi setiap program dan kegiatan kami jabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, indikator dari program ini yaitu Persentase Koperasi Sehat dari Total Koperasi Aktif dengan target sebesar 100% , dan terealisasi sebesar 77,42% dengan rincian sebanyak 31 unit koperasi aktif dan ada 24 unit koperasi yang dinyatakan sehat. Untuk mencapai target kinerja program ini ada satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
   a) Pemeriksaan dan Pengawasn Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Uniy Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam daerah. Indikator kinerja kegiatan yaitu Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, dengan target 100% dan sudah terealisasi 50%. Di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat 113 unit koperasi dan sudah dilakukan pemeriksaaan dan pengawasan sebesar 56 unit koperasi.
2. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi. Adapun indikator kinerja program ini yaitu Persentase KSP/USP Sehat, dengan target 100% dan terealisasi sebesar 21,24%. Dimana terdapat 24 unit koperasi sehat dan total koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 113 unit. Untuk mendukung program ini , terdapat satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
   a) Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan ini yaitu persentase ksp/usp yang mendapatkan penilaian dengan target 100% dengan realisai 100% dimana terdapat 24 unit koperasi sehat yang sudah dilakukan penilaian.
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), adapun indikator kinerja program ini yaitu Persentase Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro dengan target 33% dan belum ada ada

realisasi kinerja atau 0%. Untuk mendukung program terssebut bidang koperasi ukm melaksanakan satu kegiatan yaitu :

a) Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendapataan, kemitraan, kemudian Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan dengan indikator kinerja Persentase Usaha Mikro Yang diberdayakan dan menargetkan 33% dan belum terealisasi atau 0%.

4. Program Pengembangan Umkm dengan indikator kinerja Persentase Jumlah usaha kecil dan Menengah dari total UMKM. Adapun target yang ditetapkan sebesar 100% dan sudah terealisasi sebesar 30%. Untuk mendukung program tersebut bidang koperasi UKM melaksanakan satu kegiatan yaitu:

   a) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan indikator kinerja Persentase Usaha Mikro yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha. Adapun target yang ditetapkan yaitu 100% dan sudah terealisasi sebesar 30%.

b. Perindustrian

Urusan perindustrian pada tahun 2023 melaksanakan 2 program dan 2 kegiatan, adapun program, kegiatan, indikator kinerja beserta target dan realisasi sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan indikator kinerja Persentase pertumbuhan industri kecil menengah di kabupaten, adapun target nya yaitu 2,45 % dan terealisasi sebesar -47,79%, dengan rincian per triwulan ke II jumlah IKM yang terdata sebanyak 118 sedangkan tahun 2022 per desember jumlah industri sebanya 226 unit usaha. Penurunan jumlah IKM ini disebabkan banyaknya IKM yang beralih menjadi UKM, karena langkanya bahan baku dan mahalnya biaya produksi, akan tetapi pada akhir tahun di targetkan dapat meningkatkan jumlah IKM dengan adanya bantuan peralatan produksi. Untuk mendukung program tersebut bidang perindustrian melaksanakan satu kegiatan yaitu :

   a) Penyusunan dan Evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota, dengan indikator kinerja Persentase terselesaikanya dokumen RPIK sampai

dengan ditetapkanya menjadi perda dengan target 50% akan tetapi tidak ada realisasi kinerja ini dikarenakan belum adanya kawasan industri di Kabupaten Mamuju Tengah sehingga dokumen RPIK belum dapat disusun.

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, indikator kinerja program ini yaitu Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini. Terget kinerja sebesar 6 dokumen yang memuat semua informasi mengenai IKM mulai dari nama, alamat, nilai produksi, investasi, jumlah tenaga kerja dan sudah terealisasi 4 dokumen. Untuk mendukung program ini terdapat satu kegiatan yaitu :

    a) Penyedian informasi industr untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase dan perusahaan induustri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahan indutri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota. Target yang di tetapkan pada tahun 2024 yaitu 65,75% dan terealisasi sebesar 15,78%.

c. Perdagangan

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan. Indikator Program yaitu Pertsentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Seusai Dengan Ketentuan Dengan target 50% dan terealisasi sebesar 85,71%. Realisasi ini masih sama dengan tahun lalu dimana terdapat 7 minimarket dan 6 diantaranya sudah memiliki izin usaha. Pada program ini terdapat satu kegiatan yaitu :

    a) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, dengan indikator Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan, dengan target 50% dan terealisasi sebesar 85%.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Indikator Program ini yaitu Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya. Adapun target yang di tetapkan pada tahun 2023 yaitu 38,63% dan terealisasi sebesar 36,78% atau terdapat 597 unit sarana distribusi perdagangan yang dipergunakan sesuai fungsinya dan terdapat 1.411 unit

sarana distribusi perdagangan di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada program ini terdapat dua kegiatan pendukung yaitu :

a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang tersedia, adapun target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 597 unit dan terealisasi 597 unit tetap sama dengan tahun lalu, karena belum ada pembangunan sarana distribusi perdagangan.
b) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan indikator Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan target 32 orang dan sudah terealisasi sebanyak 15 orang.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan Indikator Program Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok, dengan target 6,01% dengan realisasi 0%. Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan pendukung yaitu:
   a) Pengedalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang Penting di tingkat pasar kabupaten/kota dengan target 4 dokumen dan sudah terealisai 2 dokumen.
4. Program Pengembangan Ekspor, indikator kinerjanya yaitu Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih dengan target 33,60 % dan terealisasi 0%. Belum adanya realisasi ini disebabkan perhitungan ekspor bersih dilakukan pada akhir tahun. Pada program ini erdapat satu kegiatan pendukung yaitu:
   a) Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan misi dagang bagi produksi ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kaupaten/kota. Adapun target yang ditetapkan yaitu 1 kali mengikuti pameran dan terealisasi 0 kali, hal ini dikarenakan pameran yang diikuti bertepatan pada ulang tahun Kabupaten Mamuju Tengah yang jatuh pada bulan desember.
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Indikator Program yaitu Persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku dengan target 95% dan

terealisasi sebesar 47,5%. Pada program ini terdapat satu kegiatan pendukung yaitu:

a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan indikator kinerja Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang diter/tera Ulang Dalam tahun berjalan dengan target 95% dan sudah terealisasi sebesar 47,5%.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Indikator Program Jumlah Promosi pemasaran yang dilaksanakan dengan target 1 kali dan terealisai 0 kali, hal ini disebabkan pelaksanaan promosi produk lokal dilaksanakan pada saat seremoni ulang tahun Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga dilaksanakan pada bulan desember. Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:

a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan indikator Jumlah Produk yang lokal yang dipromosikan dan terget yang ditetapkan 1 unit produk.

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam evaluasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dinas dituntut untuk selalu berkembang dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Pengolahan data dalam jumlah banyak, serta adanya perubahan yang bersifat rutin dan berulang–ulang, sering menimbulkan kesulitan dalam penyediaan informasi.

1.2.1 Bidang Koperasi UKM

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Banyaknya koperasi yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah tentunya diperlukan suatu data yang akurat dan bisa menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan. Pendataan koperasi dilakukan untuk mengetahui

keberadaan jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Jumlah Koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022 tercatat sebanyak 163 Koperasi.

Dari seluruh Koperasi tersebut, terdapat koperasi aktif sebanyak 163 dan koperasi yang tidak aktif sebanyak 17 koperasi. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Koperasi juga terbagi ke dalam beberapa jenis, dimana jenis koperasi tersebut dibedakan berdasarkan beberapa faktor. Diantaranya faktor jenis usaha,

tingkatan, status anggota dan fungsinya.

Adapun jumlah UKM di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022 sebanyak 1.336, dari seluruh UKM yang telah memiliki NIB yaitu 127 UKM.

1.2.2 Bidang Industri

Industri kecil dan menegah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 266 ikm,dari jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingan pada tahun 2021 yaitu sebesar 19,88% hal ini disebabkan oleh banyaknya IKM yang menghentikan produksinya dan beralih menjadi usaha perdagangan.

1.2.3 Bidang Perdagangan

Salah satu tugas yang diamanatkan pada Bidang Perdagangan adalah melaksanakan monitoring harga dan ketersedian Barang pokok di pasar rakyat dan toko modern, pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah serta Sidak Pasar dalam Satgas Pangan dengan tujuan utama adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan penting di Kabbupaten Mamuju Tengah dengan melakukan tindakan preventif maupun antisipatif apabila terjadi gejolak harga barang kebutuhan pokok dan penting.

Stabilitas harga dapat diketahui per komoditas pangan berdasarkan perhitungan harga pangan yang terdapat di Kabuapten Mamuju Tengah. Harga bahan pangan di Kabuapten Mamuju Tengah dapat diamati perhari, perbulan dan pertahun. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan kurang dari 5%. Gejolak harga dilihat dari besarnya koefisien variasi (CV) dari komoditas pangan.

Adapun Koefisien Varian Harga di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2022 sebesar 6,05% masi di atas dari angaka 5%.

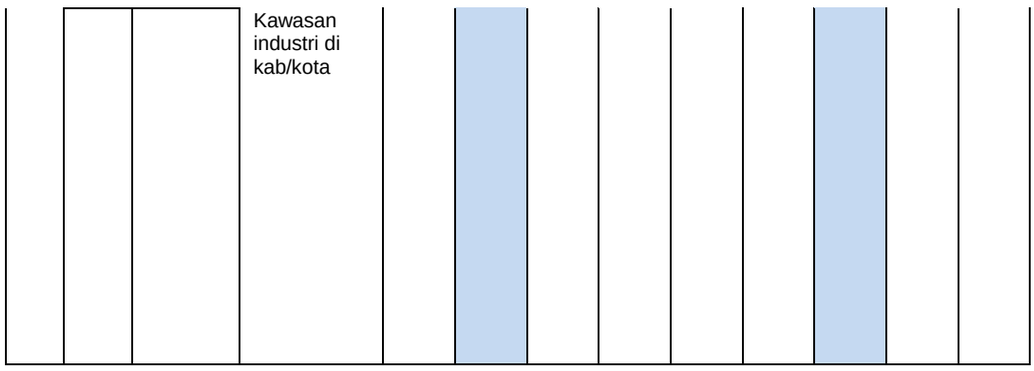
Dalam rangka upaya pengamanan perdagangan terutama untuk upaya perlindungan konsumen, melalui Metrologi Legal menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Kegiatan Metrologi Legal mempunyai sasaran untuk memberikan jaminan ketepatan pengukuran, penakaran, dan penimbangan produk yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, adapun kegiatan UTTP cukup tinggi pencapainnya yaitu sebesar 99,59%. Berikut kami sajikan Tabel Target dan realisasi Pencapaaian Kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022.

Tabel 2.2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sampai dengan Tahun 2023

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
1			Persentase Koperasi Sehat dari Total Koperasi Aktif	100	100	100	33,33	38,89	0	46	13	33,33
2			Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	100	100	25,71	26,47	27,69	0	46	50	26,47
3			Persentase KSP/USP Sehat			100	72,73	72,73	0	0	50	72,73
4			Persentase KSP/USP yang mendapatkan Penilaian			100	37,5	43,75	0	0	50	37,5
5			Persentase pengelolah Koperasi yang berkompeten dalam manajemen perkoperasian			0	29,41	20,51	0	0	0	29,41
6			Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan			0	83,33	74,07	0	0	0	83,33
7			Persentase Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	100	18	33	14,29	16,67	100	100	0	14,29
8			Persentase Usaha Mikro Yang diberdayakan	100	100	33	8,93	10	100	100	0	8,93

9			Persentase Jumlah usaha kecil dan Menengah dari total UMKM	100	10	100	3,21	3,23	96	10	30	3,21
10			Persentase Usaha Mikro yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	100	10	100	2,21	2,67	96	10	0	2,21
11			Persentase Pelaku Usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	0	85,7	50	87,50	88,89	0	85,71	25	87,50
12			Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko Swalayan	0	25	50	87,50	88,89	0	85,71	25	87,50
13			Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	549	573	597	39,1	39,5	549	926	597	39,1
14			Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia	549	573	597	559	569	549	926	597	559
15			Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30	32	32	33	35	30	32	15	33
16			Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	6,46	6,26	6,01	5,81	5,61	6,46	6,05	3	5,81
17			Jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dan terdistribusi	10	10	10	10	10	10	10	4	10
18			Jumlah dokumen harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

19			Jumlah pupuk dan pestisida yang disalurkan	0	0,000636	0,000638	0,000650	0,000652	0,00006	0,1500	0	0,000650
20			Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih	32,51	33,60	0	34,79	35,33	32,51	0	0	34,79
21			Jumlah pameran dan misi dagang yang diikuti dan diselenggarakan	0	1	2	2	3	0	0	0	2
22			Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perelngkapannya (UTTP) yang ditera/teraualang dalam tahun berjalan	95	95	95	95	95	95	99,59	47,5	95
23			Jumlah promosi, pemasaran yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	0	0	1
24			Jumlah Produk yang lokal yang dipromosikan	1	1	1	2	4	1	0	0	2
25			Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten	1,91	2,19	2,45	2,69	2,91	1,91	-19,88	0,61	2,69
26			Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	0	0	50	70	100	0	0	0	70
27			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	6	6	6	6	6	6	6	4	6
28			Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan	48,41	64,06	65,75	65,97	67,15	48,41	36,84	15,78	65,97



1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas pada tahun 2022 dapat diambil kesimpulan kinerja Perangkat Daerah sangat baik. Perumusan kegiatan dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal yang perlu di perhatikan dan sifatnya penting antara lain aktivitas pengendalian atau monitoring yang termasuk dalam tahapan proses penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output kegiatan serta ketepatan jenis output yang dihasilkan.

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi,kinerja pelayanan Dinas serta tantangan ekternal baik dari lokal yang bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional. Isu strategis merupakan kondisi keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Adapun permasalahan dan hambatan yang dijumpai adalah :

1. Ketatnya persaingan dunia usaha baik mikro, kecil dan menengah yang menuntut jiwa kewirausahaan yang inovatif dan berdaya saing
2. Fasilitasi akses sumber daya produktif bagi koperasi dan pelaku usaha mikro belum optimal
3. Kurangnya informasi terkait produsen komoditas untuk pemenuhan bahan pokok
4. Fluktuasi harga pangan yang tidak dapat diprediksi
5. Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya
6. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah.

1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Apakah sudah sesuai antara RKPD dengan kebutuhan yang ada. Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3. dibawah ini

Tabel 2.3 (T-C.31) Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tobadak	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**2.750.114.777**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tobadak	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**2.289.265.992**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Tobadak	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**138.344.365**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Tobadak	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**108.071.603**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	34.380.753	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.844.365	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	26.457.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.834.258	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.065.096	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	21.334.096	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**100%**	**1.943.850.252**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tobadak	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	**100%**	**1.905.650.252**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tobadak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	1.905.650.252	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tobadak	Jumlah ASN	21	1.905.650.252	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.200.000						

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000						
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Laporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD	1 Lapoaran	30.000.000						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**91.000.000**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**13.960.000**	
	MonitoringEvaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dikondisikan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	5.000.000						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	60.000.000						
	Sosialisai Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	10.000.000						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	16.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	13.960.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100%**	**215.100.000**	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100%**	**128.122.649**	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	900.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	889.333	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.349.316	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	1 paket	5.000.000						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan	700 paket	7.000.000						
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	700 Paket	2.100.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	700 Paket	1.992.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180 Laporan	9.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180 Laporan	8.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181 Laporan	181.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181 Laporan	115.892.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis PD	1 Dokumen	3.100.000						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**225.000.000**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**19.159.674**	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	5.000.000						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	19.159.674	

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000.000						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**84.820.160**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**73.269.814**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90	900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jasa surat menyurat	90	900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8120	11.920.160	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	8120	11.874.794	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	72.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6	60.495.020	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**52.000.000**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**41.032.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	44.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	33.032.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 unit	8.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	8.000.000	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi sehat dari total koperasi aktif	100%	110.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi sehat dari total koperasi aktif	100%	18.557.729	

	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi	100%	110.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi	100%	18.557.729	
	Pengawasan Kekuatan KesehatanKemandirianKetangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Unit Usaha	50.000.000						
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	65 Unit usaha	60.000.000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	65 Unit usaha	18.557.729	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase KSP/USP sehat	100%	125.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase KSP/USP sehat	100%	19.494.056	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase KSP/USP yang mendapatkan Penilaian	100%	125.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase KSP/USP yang mendapatkan Penilaian	100%	19.494.056	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	143 Unit Usaha	75.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	143 Unit Usaha	19.494.056	
	Penghargaan Kesehatan KSP/USPKoperasi KewenangaKabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan Kesehatan	2 Unit Usaha	50.000.000						

	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	33%	257.800.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	33%	120.000.025	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	33%	257.800.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	33%	120.000.025	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	132.500.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	120.000.025	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	63.900.000						
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5 Orang	61.400.000						
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase jumlah usaha kecil dan menenga dari total UMKM	100%	759.610.192	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase jumlah usaha kecil dan menenga dari total UMKM	100%	759.610.192	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usah	100%	759.610.192	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usah	100%	759.610.192	

	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	20 Unit Usaha	759.610.192	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	20 Unit Usaha	759.610.192	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERTSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SEUSAI DENGAN KETENTUAN	**50%**	**15.000.000**	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERTSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SEUSAI DENGAN KETENTUAN	**50%**	**14.968.684**	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**50%**	15.000.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**50%**	14.968.684	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 dokumen	15.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 dokumen	14.968.684	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**597%**	**3.776.000.000**	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**597%**	**397.436.903**	

	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		**Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia**	597 unit	**3.515.000.000**	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		**Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia**	597 unit	**205.472.208**	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		jumlah Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	597 unit	3.500.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		jumlah Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	549 unit	205.472.208	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	15.000.000						
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	32 orang	**261.000.000**	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	**32**	**191.964.695**	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	131.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	106.632.469	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	130.000.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	85.332.226	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		**Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan poko**	**6,01%**	**1.064.440.327**	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	**6,26**	**50.185.327**	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dan terdistribusi**	**10 Jenis**	**140.000.000**					**-**	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	**12 Laporan**	70.000.000						
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	**12 Laporan**	70.000.000						
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota**	1 dokumen	**887.440.327**	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	**1**	**50.185.327**	
	Pemantauan Harga dan barang stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dan pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kota/kabupaten		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	80.000.000						
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	50.185.327	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	50.185.327	

	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	757.255.000						
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pupuk dan pestisida yang disalurkan	0,00064	37.000.000					-	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Kecamatan	37.000.000						
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih	35,51%	223.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih	35,51%	150.011.533	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pameran dan misi dagang yang diikuti dan diselenggarakan	2 Kali	223.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pameran dan misi dagang yang diikuti dan diselenggarakan	2 Kali	150.011.533	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	3 Pelaku Usaha	75.000.000						
	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	100.000.000						
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspo		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2 Pelaku Usaha	48.000.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspo		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2 Pelaku Usaha	150.011.533	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	**95%**	95.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	95%	77.711.003	

	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perelngkapannya (UTTP) yang ditera/tera ualang dalam tahun berjalan**	**95%**	95.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase UTTP yang ditera dalam tahun berjalan	95%	77.711.003	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	95 unit	45.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	95%	35.339.394	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3 orang	50.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3	42.371.609	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Jumlah promosi, pemasaran yang dilaksanakan	1 Kali	118.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Jumlah promosi, pemasaran yang dilaksanakan	1	58.331.445	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Produk yang lokal yang dipromosikan	2 buah	118.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Produk yang lokal yang dipromosikan	0	58.331.445	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kali	50.000.000						
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	68.000.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	58.331.445	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten	2.45 %	**5.819.964.035**	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten**	2,19	**170.962.760**	

	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	50%	5.819.964.035	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	0	170.962.760	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	4.400.000.000					-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	694.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	45.557.525	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	600.058.800						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	125.405.235	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	125.405.235	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	6 jenis	**290.000.000**	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**6,00**	**76.724.427**	

	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	65.75 %	290.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	64,06%	76.724.427	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional		umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	1 dokumen	60.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	49.414.519	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	120.000.000						

	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	110.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	27.309.908	

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi, maupun dari hasil kajian kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah. Berikut Kami sajikan Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.

Tabel 2.4 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		**Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia**		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dusun Sentral Desa Pangale	Jumlah Sarana yang tersedia	1 los Pasar	
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten**		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dusun Pioked, Desa Sanjango. Dusun Tomemba, Desa Tasokko. Desa Karossa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya ada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UMKM diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya, yaitu: “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk mendukun Presiden mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.”. Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024, maka misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari pokok visi tersebut di atas, yaitu:

b. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.

c. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
2. Modernisasi Koperasi;
3. Melahirkan Wirausaha Baru *(New Enterpreuner)*.
4. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
5. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains (GVC)*;
6. UMKM Naik Kelas *(Scalling Up)*;
7. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
8. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran strategis pembangunan industri adalah :

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas;
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri;
4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri;
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
6. Meningkatnya Persebaran Industri;
7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif;
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian;
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas;
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan
13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.

Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatkan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yang terkait lansung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan. Mengacu pada Misi

Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (***good governance***) di Sektor Perdagangan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Skpd

Tujuan dan sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target yang ditentukan untuk dicapai tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Koperasi UMKM, Perindustrain Dan Perdagngan	Kontribusi PDRB Sktor Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagnagn Terhadap Total PDRB	8,32	8,42	8,53	8,63	8,73
	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Koperasi UMKM	Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi UMKM	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50
	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	6,28	7,57	8,00	8,50	9,00

	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perdagngan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagngan	1,50	6,12	6,50	7,00	7,50
2	Meningkatnya Tata Kelola Pada Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Indeks RB Dinas Perdagangan dan Perindustrian	CC	B	BB	A	AA
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Temuan Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0	0	0	0	0

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 telah menetapkan rencana program dan kegiatan sebanyak 13 (empat belas) program dengan 22 (dua puluh satu) Kegiatan dan 49 (empat puluh satu) sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu waktu 1 (satu) tahun dan telah disetujui dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah.

3.3.1 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain Meliputi:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Pengadaan Mebel

1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

2.1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

2.1.1 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

2.1.2 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

3. **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**

3.1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

4.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5. **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

5.1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

5.1.1 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

5.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

5.1.3 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

6. **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**

6.1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

6.1.1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

7. **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

7.1 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

7.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

8. **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

8.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

8.1.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

8.1.2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

8.2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

8.2.1 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

9. **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**

9.1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

9.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

9.1.2 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

9.2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

9.2.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

9.2.2 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

9.2.3 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

9.3 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9.3.1 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

10. **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**

10.1 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

10.1.1 Pameran Dagang Nasional

10.1.2 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

11. **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

11.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

11.1.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

11.1.2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

12. **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

12.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

12.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

12.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

12.1.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

13. **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**

13.1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

13.1.1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

13.1.2 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

3.3.2 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan Sub kegiatan mengacu pada :

a. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Yang mana menjelaskan terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.

b. Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 maka tema visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Mamuju Tengah

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Visi “Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai La’la Tassisara”	Misi -3 Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Tujuan 1 - Meningkatkan Kontribusi Sektor Koperasi UMKM, Perindustrain Dan Perdagngan	Sasaran 1 – Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Koperasi UMKM	Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi UMKM
			Sasaran 2 – Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

			Perindustrian	
			Sasaran 3 – Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
	Misi 4 : Menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Tata Kelola Pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Sakip Presentase Temuan material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Rencana Kerja SKPD, Program/kegiatan/Sub kegiatan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mamuju Tengah mempunyai 13 rumusan program 22 kegiatan dan 49 sub kegiatan, dan telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD. Namun terdapat perbedaan Pagu Indikatif yang disebabkan oleh penyesuaian keungan daerah dan rasionalisasi Pagu tiap-tiap usulan pada Renja 2024, dengan berdasar pada kondisi terkini daerah/lokasi pembangunan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan Sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mamuju Tengah. Berikut Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 :

Tabel 3.2 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
								NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**895.000.000,00**					
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**895.000.000,00**					
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi sehat dari total koperasi aktif (%)***	***66,67***	**80.000.000,00**					**Koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah**
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi (%)*	*30*	80.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah

	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)*	*25.00*	40.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)*	*60.00*	40.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah
2.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase KSP/USP sehat (%)***	***83,33***	**40.000.000,00**					**Koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah**
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase KSP/USP yang mendapatkan Penilaian (%)*	*83.33*	40.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)*	*16.00*	40.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase pengelolah Koperasi yang berkompeten dalam manajemen perkoperasian (%)***	***20***	**100.000.000,00**					**Koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah**
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan (%)*	*66.67*	100.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)*	*15.00*	100.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah

4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (%)***	***46***	**175.000.000,00**					**Masyarakat umum**
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan (%)*	*46*	175.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Masyarakat umum
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)*	*2.00*	15.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	*Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)*	*20.00*	65.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)*	*1464*	95.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase jumlah usaha kecil dan menenga dari total UMKM (%)***	***10***	**500.000.000,00**					**Masyarakat umum**
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha (%)*	*10*	500.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Masyarakat umum
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)*	*25*	500.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum

	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**4.400.908.157,00**					
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**3.755.908.157,00**					
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)***	***100***	**2.194.908.157,00**					**Aparatur Dinas Koperindag**
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)*	*100*	131.844.365,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*1.00*	35.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*1.00*	30.844.365,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*	*1.00*	6.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	*1.00*	30.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*1.00*	30.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag

	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)*	*100*	1.450.356.432,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*21.00*	1.430.356.432,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	*4.00*	20.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian PD Tepat Waktu (%)*	*100*	47.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*	*1*	15.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*	*2.00*	32.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)*	*100*	200.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*10*	900.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag

	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1*	7.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*700*	2.100.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	*180*	9.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	*181*	181.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)*	*100*	210.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*	*5*	20.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*	*5*	40.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*	*2*	150.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag

	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)*	*100*	103.707.360,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*120*	1.200.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*852*	12.507.360,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*9*	90.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah penunjang urusan yang terpelihara (%)*	*100*	52.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*11*	44.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*8*	8.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Aparatur Dinas Koperindag
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)***	***50***	**15.000.000,00**					**Masyarakat umum**

	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan (%)*	*50*	15.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Masyarakat umum
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)*	*2*	15.000.000,00	*(Kecamatan Karossa, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Budong-budong, Kecamatan Pangale, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (%)***	***38,50***	**895.000.000,00**					**Masyarakat umum**
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia (Unit)*	*597*	815.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Masyarakat umum
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)*	*926*	800.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan*			Masyarakat umum
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)*	*2.00*	15.000.000,00	*(-, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Orang)*	*33*	80.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Masyarakat umum

	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)*	*1*	80.000.000,00	*(Pasar di 5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok (%)***	***5,81***	**461.000.000,00**					**Masyarakat umum**
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dan terdistribusi (Buah)*	*10*	66.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Masyarakat umum
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)*	*12*	28.000.000,00		*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*			Masyarakat umum
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)*	*12*	38.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota (Dokumen)*	*1*	358.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Masyarakat umum

	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)*	*12*	30.000.000,00	*(Pasar di 5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)*	*12.00*	48.000.000,00	*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)*	*2*	280.000.000,00	*(2 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pupuk dan pestisida yang disalurkan (%)*	*0.000650*	37.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Masyarakat umum
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)*	*5*	37.000.000,00	*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih (%)***	***34,79***	**105.000.000,00**					**Masyarakat umum**

	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pameran dan misi dagang yang diikuti dan diselenggarakan (Kali)*	*2*	105.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Masyarakat umum
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)*	*1*	55.000.000,00	*(Sesuai undangan expo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)*	*4*	50.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)***	***95***	**85.000.000,00**					**Masyarakat umum**
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase alat-alat ukur takar timbang dan perelngkapannya (UTTP) yang ditera/tera ualang dalam tahun berjalan (%)*	*95*	85.000.000,00	*(5 kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Masyarakat umum
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)*	*33420*	45.000.000,00	*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)*	*3*	40.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**645.000.000,00**					**Masyarakat umum**

1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten (%)***	***2.69***	**555.000.000,00**					**Masyarakat umum**
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda (%)*	*70*	555.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Masyarakat umum
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)*	*1*	350.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Masyarakat umum
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)*	*1*	150.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)*	*1*	55.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Dokumen)***	***6***	**90.000.000,00**					**Masyarakat umum**

	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota (%)*	*65.97*	90.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				Masyarakat umum
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)*	*1*	40.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)*	*1*	50.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Masyarakat umum
	J U M L A H				**5.295.908.157,00**					

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pada dasarnya kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai "pengarah" setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Secara lebih lengkap mengenai Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dapat dilihat dalam table 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**895.000.000,00**					**1.681.162.520,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**895.000.000,00**					**1.681.162.520,00**	

1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi sehat dari total koperasi aktif (%)***	***66,67***	**80.000.000,00**					**115.000.000,00**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi (%)*	*30*	80.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*32*	115.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)*	*25.00*	40.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Koperasi di Mamuju Tengah*	*32.00*	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)*	*60.00*	40.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Koperasi di Mamuju Tengah*	*70.00*	65.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase KSP/USP sehat (%)***	***83,33***	**40.000.000,00**					**75.000.000,00**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*PersentaseKSP/USP yangmendapatkanPenilaian(%)*	*83.33*	40.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*84.21*	75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)*	*16.00*	40.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Koperasi di Mamuju Tengah*	*19.00*	75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase pengelolah Koperasi yang berkompeten dalam manajemen perkoperasian (%)***	***20***	**100.000.000,00**					**200.000.000,00**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan (%)*	*66.67*	100.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*43.01*	200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)*	*15.00*	100.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Koperasi di Mamuju Tengah*	*20.00*	200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (%)***	***46***	**175.000.000,00**					**281.162.520,00**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan (%)*	*46*	175.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*50*	281.162.520,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)*	*2.00*	15.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Pelaku Usaha Mikro*	*3.00*	32.162.520,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	*Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)*	*20.00*	65.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Pelaku Usaha Mikro*	*25.00*	112.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)*	*1464*	95.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Pelaku usaha Mikro*	*1610*	136.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase jumlah usaha kecil dan menenga dari total UMKM (%)***	***10***	**500.000.000,00**					**1.010.000.000,00**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha (%)*	*10*	500.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*10*	1.010.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)*	*25*	500.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Pelaku UKM, Pelaku UMKM*	*25*	1.010.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**4.400.908.157,00**					**9.244.573.749,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**3.755.908.157,00**					**7.475.014.949,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)***	***100***	**2.194.908.157,00**					**2.306.559.949,00**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)*	*100*	131.844.365,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*100*	131.844.365,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*1.00*	35.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*1.00*	35.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*1.00*	30.844.365,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*1.00*	30.844.365,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*	*1.00*	6.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*1.00*	6.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan)*	*1.00*	30.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*1.00*	30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*1.00*	30.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*1.00*	30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)*	*100*	1.450.356.432,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*100*	1.539.421.024,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*21.00*	1.430.356.432,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*22.00*	1.519.421.024,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	*4.00*	20.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*1.00*	20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian PD Tepat Waktu (%)*	*100*	47.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*100*	21.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*	*1*	15.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*1*	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*	*2.00*	32.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*2.00*	16.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)*	*100*	200.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*100*	200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*10*	900.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*10*	900.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)*	*1*	7.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*1*	7.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*700*	2.100.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*700*	2.100.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	*180*	9.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*180*	9.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	*181*	181.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*181*	181.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)*	*100*	210.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*100*	240.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*	*5*	20.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*2*	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*	*5*	40.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*3*	30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*	*2*	150.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*2*	200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)*	*100*	103.707.360,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*100*	122.294.560,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*120*	1.200.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*120*	1.200.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)*	*852*	12.507.360,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*892*	13.094.560,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*9*	90.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*9*	108.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah penunjang urusan yang terpelihara (%)*	*100*	52.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*100*	52.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*11*	44.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*11*	44.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*8*	8.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*DINAS KOPERASI UMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH*	*8*	8.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)***	***50***	**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan (%)*	*50*	15.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*55*	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)*	*2*	15.000.000,00	*(Kecamatan Karossa, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Budong-budong, Kecamatan Pangale, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Pelaku Usaha*	*2*	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (%)***	***38,50***	**895.000.000,00**					**3.645.000.000,00**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia(Unit)*	*597*	815.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*600*	3.515.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)*	*926*	800.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Fisik-Bidang Perdagangan -Penugasan*	*masyarakat kab. mamuju tengah*	*930*	3.500.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)*	*2.00*	15.000.000,00	*(-, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Masyarakat Mamuju Tengah*	*2.00*	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Orang)*	*33*	80.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*35*	130.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)*	*1*	80.000.000,00	*(Pasar di 5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Masyarakata Mamuju tengah*	*1*	130.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok (%)***	***5,81***	**461.000.000,00**					**1.123.455.000,00**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dan terdistribusi (Buah)*	*10*	66.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*10*	120.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)*	*12*	28.000.000,00		*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Masyarakat Mamuju Tengah*	*12*	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)*	*12*	38.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Masyarakat Mamuju Tengah*	*0.00*	-	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota(Dokumen)*	*1*	358.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*1*	962.455.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)*	*12*	30.000.000,00	*(Pasar di 5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Masyarakat Mamuju Tengah*	*12*	104.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)*	*12.00*	48.000.000,00	*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Masyarakat Mamuju Tengah*	*12.00*	100.700.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)*	*2*	280.000.000,00	*(2 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Masyarakat Mamuju Tengah*	*2*	757.255.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pupuk dan pestisida yang disalurkan (%)*	*0.000650*	37.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*0.06*	41.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)*	*5*	37.000.000,00	*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Pelaku Usaha*	*5*	41.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih (%)***	***34,79***	**105.000.000,00**					**220.000.000,00**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pameran dan misi dagang yang diikuti dan diselenggarakan (Kali)*	*2*	105.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*3*	220.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang(Pelaku Usaha)*	*1*	55.000.000,00	*(Sesuai undangan expo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Pelaku Usaha*	*2.00*	*100.000.000,00*	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)*	*4*	50.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Pelaku Usaha*	*5*	120.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)***	***95***	**85.000.000,00**					**165.000.000,00**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase alat-alat ukur takar timbang dan perelngkapannya (UTTP) yang ditera/tera ualang dalam tahun berjalan (%)*	*95*	85.000.000,00	*(5 kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*100*	165.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)*	*33420*	45.000.000,00	*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Masyarakat*	*33470*	45.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)*	*3*	40.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Pelaku Usaha*	*3*	120.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**645.000.000,00**					**1.769.558.800,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten (%)***	***2.69***	**555.000.000,00**					**1.519.558.800,00**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIA**

											N DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda (%)*	*70*	555.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*100*	1.519.558.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)*	*1*	350.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Pelaku Usaha*	*1*	844.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri(Dokumen)*	*1*	150.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Pelaku Usaha*	*1*	600.058.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)*	*1*	55.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Pelaku Usaha*	*1*	75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Dokumen)***	***6***	**90.000.000,00**					**250.000.000,00**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota (%)*	*65.97*	90.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*67.15*	250.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)*	*1*	40.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Masyarakat Mamuju tengah*	*1*	60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)*	*1*	50.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	*Masyarakat Mamuju Tengah*	*1*	190.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H				**5.295.908.157,00**					10.925.736.269,00	

BAB V
PENUTUP

Renja atau Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan Tahun 2021-2026 berdasarkan acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk mengkoordinasikan dan memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang berisi tentang rencana pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri, perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan tujuannya penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ,Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 mengacu pada usulan dari Desa/Kecamatan, pokok-pokok pikiran, prioritas kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, dan pagu indikatif. Secara keseluruhan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2024 akan dibiayai dengan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 5.295.908.157 ,- (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tuju Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan 13 (empat belas) program yang dijabarkan kedalam 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 49 (empat puluh dua) sub kegiatan.

Keberhasilan pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, industri, perdagangan maupun pembangunan ekonomi secara keseluruhan khususnya ekonomi kerakyatan merupakan prioritas yang sangat vital dalam mempercepat pembangunan daerah dan memperkuat ketahanan ekonomi di Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2024.

KEPALA DINAS



COLLENG SULAIMAN, S.Sos

NIP. 19651231 198703 1 227

RENCANA KERJA 2024

KECAMATAN PANGALE

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusun dapat merampungkan penyusunan **"RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PANGALE KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024".**

Salah satu aspek penting dalam merenacanakan kinerja SKPD adalah penyusunan program dan kegiatan yang akan direalisasikan. Tentunya pembuatan rencana kerja ini nantinya akan menjadi tolak ukur dan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Begitu juga halnya Kecamatan Pangale, yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah wajib menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Tentunya ini juga akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan kebijakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya di Kecamatan Pangale, yang tetap mengacu kepada aturan yang berlaku dan Visi Misi Bupati terpilih.

Proses penyusunan Renja ini melibatkan beberapa pihak, oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan Pembuatan RENJA Kecamatan Pangale tahun 2024. Semoga dengan terlaksananya penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2024 kantor Kecamatan Pangale, dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan, dan menjadi referensi tambahan untuk mendukung pembuatan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah.

Semoga bermanfaat ....

Billahi Taufik Walhidayah
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pangal, Januari 2023
Penyusun

Kasubag Perencaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL IV

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sestematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PANGALE 4

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022, dan Capaian Renstra Kecamatan Pangale 4

2.2 Analisis Kinerja pelayanan Kecamatan Pangale 14

2.3 Isu – Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kec. Pangale 16

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5 penelaah Usaha program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pangale 33

3.3 Program dan Kegiatan 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMAATAN PANGALE 40

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel T - C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Restra Perangkat Daerah S/d Tahun 2024 Kantor Kecamatan Pangale	8
Tabel T - C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah Kecamatan Pangale	14
Tabel T - C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah	18
Tabel T - C.32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2024 **Terlampir**	
Tabel T - C.33	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025	34
Tabel 4.1	Program Dan Kegiatan Kantor Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah TA. 2024	40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah diundangkannya Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mamuju Tengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan telah terjadi perubahan Komposisi Perangkat Daerah khususnya pada Kecamatan, maka dari itu Kecamatan Pangale segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum, ditegaskan bahwa Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun sangat diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran merupakan bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2024. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda pemerintahan daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangale tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi dan Visi Bupati Mamuju Tengah, yang merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pangale.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Pangale Tahun 2024, Peraturan Perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mamuju Tengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangale Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Pangale dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kecamatan Pangale Tahun 2024 dan berpedoman pada Draft Rencana Startegis (RENSTRA) Kecamatan Pangale Tahun 2021-2025. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangale Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Pangale dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangale Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pangale selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024 sesuai penjabaran Renstra Kecamatan pangale Tahun 2021-2025;

3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Pangale Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Pangale Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pangale Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Perangkat Daerah Kecamatan Pangale Tahun 2024, disusun berdasarkan tata aturan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi RENJA Kecamatan Pangale Tahun lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Pangale Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Kecamatan Pangale
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangale
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangale
- 2.4 Revieew terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

- 3.1 Penelahaan Terhadap Kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Kecamatan Pangale
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

- 5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaannya
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PANGALE TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Pangale Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Kecamatan Pangale Tahun 2021-2025

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangale merupakan dokumen perencanaan Organisas Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) Tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pangale. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi dan Visi Bupati Kabupaten Mamuju Tengah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangale ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pangale selama Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta perkiraan target Anggaran Tahun 2024.

Sejalan dengan waktu, pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Pangale Tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam RENJA Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pangale dalam pelaksanaan RENJA 2022 terdapat 4 (empat) Sub. kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, tapi masih dalam batas sewajarnya, karena sudah tidak mencukupi untuk dibelanjakan, antara lain:

   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      a. Gaji Pokok uang Persentasi realisasi Keuangan **97,90 %** dengan pagu anggaran tahun 2022 **Rp. 672.069.620,-** terealisasi **Rp. 657.929.000,-**, jadi selisih **Rp. 14.140.620.-**
      b. Tunjangan keluarga persentase realisasi keuangan **97,89 %** dengan pagu anggaran **Rp. 77.857.088.-** terealisasi **Rp. 76.212.996,-** jadi selisih **Rp. 1.644.092,-**

c. Tunjanga jabatan persentase realisasi keuangan 97,88 % dengan pagu anggaran Rp 75.954.000,- terealisasi Rp. 74.340.000,- jadi selisih Rp. 1.614.000,-

d. Tunjangan fungsional persentase realisasi keuangan **97,95 %** dengan pagu anggaran **Rp. 15.947.000.-** terealisasi **Rp. 15.620.000,-** jadi selisih **Rp. 327.000,-**

e. Tunjangan beras persentase realisasi keuangan 97,90**%** dengan pagu anggaran **Rp. 48.673.482,-** terealisasi **Rp.47.652.360,-** jadi selisih **Rp. 1.021.122,-**

f. Tujangan PPh persentase realisasi keuangan 97,60**%** dengan pagu anggaran **Rp.175.030,-** terealisasi **Rp.170.822,-** jadi selisih **Rp. 4.208,-**

g. Pembulatan gaji persentase realisasi keuangan 17,86**%** dengan pagu anggaran **Rp.40.000,-** terealisasi **Rp.7.144,-** jadi selisih **Rp.32.856,-**

h. Iuran jaminan kesehatan persentase realisasi keuangan 97.55**%** dengan pagu anggaran **Rp.28.990.504,-** terealisasi **Rp.28.281.476,-** jadi selisih **Rp. 709.028,-**

i. Iuran jaminan kemaian persentase realisasi keuangan 97.56**%** dengan pagu anggaran **Rp. 4.167.165,-** terealisasi **Rp.4.065.352,-** jadi selisih **Rp. 101.813,-**

2. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD,

a. Belanja perjalanan dinas biasa persentase realisasi keuangan 80,63**%** dengan pagu anggaran **Rp 6.350.000,-** terealisasi **Rp. 5.120.000,-** jadi selisih **Rp. 1.230.000,-**

b. Belanja perjalanan dinas dalam kota persentase realisasi keuangan 99,7**%** dengan pagu anggaran **Rp 43.400.000,-** terealisasi **Rp. 43.270.000,-** jadi selisih **Rp. 130.000,-**

3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

a. Belanja tagihan listrik persentase realisasi keuangan **82,98%** dengan pagu anggaran **Rp 5.070.920,-** terealisasi **Rp. 4.207.841,-** jadi selisih **Rp. 863.079,-**

b. Belanja kawat/faksimill/internet/TV berlangganan persentase realisasi keuangan **99%** dengan pagu anggaran **Rp 5.225.000 ,-** terealisasi **Rp.5.178.900 ,-** jadi selisih **Rp. 46.100,-**

4. **Penyediaan jasa pelayanan umum;**

a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor persentase realisasi keuangan **99,95%** dengan pagu anggaran **Rp 10.785.020 ,-** terealisasi **Rp.10.779.806 ,-** jadi selisih **Rp. 5.214,-**

5. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operational atau Lapangan.

a. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas persentase realisasi keuangan 98,78% dengan pagu anggaran **Rp. 16.948.000 ,-** terealisasi **Rp. 16.741.000,-** jadi selisih **Rp. 207.000,-**

b. Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan persentase realisasi keuangan **53,89 %** dengan pagu anggaran **Rp. 1.130.000 ,-** terealisasi **Rp.609.000 ,-** jadi selisih **Rp. 521.000,-**

6. **Fasilitas Kunjungan Tamu**

a. Belanja makan dan minum jamuan tamu persentase realisasi keuangan **99,84 %** dengan pagu anggaran **Rp. 15.276.000,-** terealisasi **Rp. 15.251.000 ,-** jadi selisih **Rp. 25.000,-**

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pangale dalam pelaksanaan RENJA 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat ***SPJ GU NIHIL*** *Pada Lampiran.*

1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD persentase realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 3.180.400,-**

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD persentase realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 3.180.400,-**

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD persentase realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 3.180.400,-**

d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD persentase realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 3.180.400,-**

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD persentase realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 32.106.760,-**

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN persentase realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 8.208.150,-**

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD persentase realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 52.942.400,-**

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD persentase realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 4.937.000,-**

3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan persentase realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 12.500.000,-**

4). Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor persentase realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 29.191.150,-**

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan persentase realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 6.000.000,-**

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan persentase realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 3.000.000,-**

5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 32.100.000,-**

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 4.500.000,-**

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 7.247.130,-**

7). Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 9.950.000,-**

8.) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 16.080.400,-**

9). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 22.908.200,-**

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 11.605.600,-**

10). Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan

a. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat realisasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 26.372.200,-**

11) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Realisaasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 3.000.000,-**

12) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Realisaasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 15.975.200,-**

13) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Realisaasi **100%** dengan jumlah pagu **Rp. 30.285.600,-**

3. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam RENJA 2022 Kecmatan Pangale tidak diketemukan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
   a. Minimnya anggaran yang diberikan, sehingga banyak program atau kegiatan yang tidak memiliki pos anggaran
   b. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti baik di Kecamatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Kecamatan Pangale;

   Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program RENSTRA OPD Kecamatan Pangale adalah sebagai berikut :

   a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai RENSTRA OPD Kecamatan Pangale Tahun 2022 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Pangale pada umumnya
   b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai RENSTRA OPD Kecamatan Pangale Tahun 2022 berdampak pada laporan laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Pangale.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut
   a. Perlu adanya rincian anggaran yang konkrit pada setiap program/kegiatan, agar tidak terdapat selisih,
   b. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya pegawai yang lebih,
   c. Perlu adanya koordinasi instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa. Terdapat pada Tabel T-C.29

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Mamuju Tengah

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kelurahan Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perengkat Daerah tahun) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra Perangkat Daerah S/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Pengrangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan s/d tahun barjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
①					②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧=⑦/⑥	⑨	⑩=⑤+⑦+⑨	⑪=⑩/④
7	**1**				**KECAMATAN**		**100**	**99,86**	**100**	**99,86**	**98,45%**			
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100**	**99,28**	**100**	**99,28**	**98,30%**			
7	**1**	**1**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**			
7	1	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	1	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	100	100	100	100%	100	-	%
7	1	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	100	100	100	100%	100	100	100%

7	1	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	100	100	100	100%	100	-	%
7	1	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	100	100	100%	100	36	36%
7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**99,5**	**100**	**99,5**	**98,02%**	**100**		
7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	98	100	98	97,88%	100	-	%
7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	100	100	100%	100	15	15%
7	1	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	100	100	100%	100	42	42%
7	1	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100	100	100	100	100%	100	28	28%
7	**1**	**1**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**		
7	1	1	205	11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100%	100	-	%
7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**99,4**	**100**	**99,4**	**99,66%**	**100**		

7	1	1	206	2	penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	100%	0	0	0%
7	1	1	206	5	Penyediaan Bahan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	100	100	100	100	100%	0	0	0%
7	1	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	100	100	100	100%	100	0	0%
7	1	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	100	100	100	99,84%	100	24	24%
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	100	100	100	97	97,27%	100	19	19%
7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**97**	**100**	**97**	**98,83%**	**100**	-	
7	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100	100	100%	100	30	30%
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	91	100	91	91,17%	100	15	15%
7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	100	100	100	100%	100	24	24%
7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**99,76**	**100**	**99,76**	**99,26%**	**100**	-	%
7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	99	100	99	99,17%	100	29	29%

7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	100	100	100	100%	100	45	45%
7	1	1	209	11	Pemeliharaan /Rehabailitas Saran dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabailitas Saran dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya	100	100	100	100	100%	0	0	0%
7	**1**	**1**	**13**		**Penata Organisasi**							100		
7	1	1	13	4	monitoring, Efektifitas dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah laporan monitoring, Efektifitas dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	0	0	0	0	0%	100	33	33%
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**		%
7	**1**	**2**	**201**		**Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerntahan di tingkat Kecamatan**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**		
7	1	2	201	2	peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	100	100	100	100%	100	-	%
7	**1**	**2**	**202**		**Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**		
7	1	2	202	2	Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilaya Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilaya Kecamatan	100	100	100	100	100%	0	0	0%
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100**	100	100	100	**100%**	100		
7	**1**	**3**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**		

7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	100	100	100	100%	100	81	81%
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	23	23%
7	**1**	**3**	**203**		**Pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa Di tingkat Kecamatan**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	0		
7	1	3	203	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100	100	100	100	100%	0		0%
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**100**	100	**100**	**100**	**100%**	100		
7	**1**	**4**	**201**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**		
7	1	4	201	1	sinergitas dengan kepolisian negara repoblik indonesia, tentara nasional ndonesia dan Instansi vertikal di wilayah Masyarakat	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara repoblik indonesia, tentara nasional ndonesia dan Instansi vertikal di wilayah Masyarakat	0	0	0	0	0%	100	55	55%
7	1	4	201	2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah Laporan Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	100	100	100	100%	0	0	0%
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**100**	100	**100**	100	**100%**	100		
7	**1**	**5**	**201**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**		
7	1	5	201	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100	100	100%	100	37	37%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangale

Pengukuran kinerja kegiata dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator–indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atau hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan Analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Pangale sebagai salah satu OPD yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masayarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karena capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

Berikut sajian table Analisis pencapaian kinerja pelayanan kecamatan pangale pada Tabel TC.30 Berikut.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangale

Kabupaten Mamuju Tengah

No.	Indikator	SPM/ Sandar Nasional	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
1	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DI KOORDINASIKAN				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	PERSENTASE KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG BERHASIL DI SELESAIKAN				100%	100%	100%	100%	80%	95%	100%	100%	
5	RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PER 1.000 PENDUDUK				100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	
	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangale

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya OPD Kecamatan Pangale berpedoman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kecamatan. Adapun Tugas Pokok Camat yang diatur dalam pasal 10 berbunyi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintah umum.

b. MengKoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
   2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   3. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, dan
   4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati/Walikota.

c. Mengkoodinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan upaya ketertiban umum, meliputi:
   1. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
   2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;dan
   3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati/Walikota;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, meliputi:
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan Kepada bupati/walikota;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati/wali kota;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan, meliputi;
   1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintah di tingkat Kecamatan; dan
   3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Wali kota
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
   1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2. Fasilitas percepatan pencapain standar pelayanan minimal di wilayahnya;
   3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
   4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris daerah; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. RENJA disusun dengan berpedoman kepada Rencana Stategis (RENSTRA) Kecamatan Pangale. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Angaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kecamatan Pangale disusun melalui tahapan-tahapan proses pembangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah, Perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga/Organisasi Perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja OPD (Proses Button-Up dan Top-Down).

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran Tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Pangale sebesar **Rp. 1.465.454.786**,- dengan realisasi anggaran **Rp. 1.462.427.392**,- persentase realisasi anggaran sebesar **99,79 %.**

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelakasnaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan,

a. Perbandingan rencana awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 20223 Kecamatan Pangale mengusulkan 6 **Program dengan 13 Kegiatan**, dan pada tahun 2024 OPD Kecamatan Pangale melaksnakan **6 Program dan 15 kegiatan**.
b. Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengacu pada Visi-Misi Bupati Mamuju Tengah pada RKPD 2023 Kecamatan Pangale tidak terpenuhi karena minimnya anggaran, sehingga terdapat pada RENJA 2023 dan RKPD 2023 tetapi tidak memiliki Dana.
c. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Keacmatan Pangale mengacu pada Visi-Misi BUPATI Mamuju Tengah.

Untuk melihat Kondisi diatas, kita bisa melihat pada *Tabel T-C.31* Pada Lembaran berikutnya

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Mamuju Tengah Kec. Pangale

Kode					Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(2)		(3)	(4)	(5)
7	1				KECAMATAN			-	6,390,513,000	KECAMATAN				1,750,975,532
7	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR	-	4,483,861,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR		1,603,692,216
7	1	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	102,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	56,000,000
7	1	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok.	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok.	-
7	1	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok.	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dok.	4,000,000
7	1	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok.	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dok.	4,000,000
7	1	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok.	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dok.	4,000,000
7	1	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok.	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dok.	4,000,000
7	1	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap.	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	40,000,000

7	1	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	19,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	-
7	**1**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**1,961,643,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**1,251,776,216**
7	1	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 PNS	1,800,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14 org/ bln	1,167,260,875
7	1	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dok.	16,500,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dok.	16,158,023
7	1	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaandan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok.	15,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaandan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok.	-
7	1	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dok.	40,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dok.	-
7	1	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhi Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapora Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	59,093,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	44,142,934
7	1	01	202	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok.	10,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok.	-
7	1	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Lap	18,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap.	24,214,384
7	1	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok.	3,050,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok.	-
7	**1**	**01**	**203**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	**50,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daera**	**100 %**	-
7	1	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok.	8,500,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok.	-
7	1	01	203	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok.	7,800,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok.	-

7	1	01	203	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap.	6,600,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap.	-
7	1	01	203	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap.	7,600,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap.	-
7	1	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap.	7,200,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap.	-
7	0	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap.	7,300,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Lap.	-
7	1	01	203	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok.	5,000,000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok.	-
7	**1**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**396,150,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**35,360,000**
7	1	01	205	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	11,050,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	-
7	1	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	40,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	10,000,000
7	1	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok.	10,230,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok.	-
7	1	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok.	13,770,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok.	-
7	1	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dannPenilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dok.	16,000,000	Monitoring, Evaluasi, dannPenilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dok.	-
7	1	01	205	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Org	34,000,000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Org	-
7	1	01	205	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Lap.	35,600,000	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Lap.	-

7	1	01	205	08	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	2 Org	15,500,000	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	2 Org	-
7	1	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Org	75,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 org	-
7	1	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Org	45,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Org	-
7	1	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Org	100,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.org	25,360,000
7	**1**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Prangkat Umum Daerah**	-	**396,263,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Prangkat Umum Daerah**	-	**66,616,000**
7	1	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	-
7	1	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	99,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	9 Paket	-
7	1	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	20,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	-
7	1	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	-
7	1	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	-
7	1	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dok.	9,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dok.	3,000,000
7	1	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	10 Paket	62,500,000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	-
7	1	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap.	50,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Paket	20,020,000
7	1	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274 Lap.	99,763,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274 Lap	43,596,000

7	1	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok.	5,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok.	-
7	1	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dok.	25,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dok.	-
7	**1**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**-**	**898,600,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**9 unit**	**-**
7	1	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	19,800,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-
7	1	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	19,800,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-
7	1	01	207	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	250,000,000	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	-
7	1	01	207	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	100,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	-
7	1	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	95,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	-
7	1	01	207	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	114,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-
7	1	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-
7	1	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	93 Unit	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	93 Unit	-
7	1	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	87 Unit	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	87 Unit	-
7	**1**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**pesentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**272,100,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**78,380,000**

7	1	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap.	97,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap.	33,500,000
7	1	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap.	20,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3 Lap.	12,580,000
7	1	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Lap.	55,100,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Lap.	-
7	1	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap.	100,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12 Lap.	32,300,000
7	**1**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn**	-	**257,100,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 %**	**93,200,000**
7	1	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	18,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	-
7	1	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	52,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8 Unit	85,000,000
7	1	01	209	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	53 Unit	23,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	53 Unit	-
7	1	01	209	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	53 Unit	21,500,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	53 Unit	-
7	1	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	33,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8,200,000
7	1	01	209	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	22,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	-
7	1	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	29,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	10 Unit	-
7	1	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	25,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	-

7	1	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	33,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	-
7	**1**	**01**	**213**		**Penataan Organisasi**		**Persentase Penataan Oganisasi yg Terlaksana**	-	**150,000,000**	**Penataan Organisasi**		**Persentase Penataan Organisasi Yang Terlaksanan(%)**	**100**	**22,360,000**
7	1	01	213	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dok.	10,000,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dok.	-
7	1	01	213	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Lap.	50,000,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Lap	-
7	1	01	213	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dok.	15,000,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dok.	-
7	1	01	213	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Dok.	55,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	10 Lap	22,360,000
7	1	01	213	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dok.	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dok.	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN**	-	**862,800,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN**	**Baik**	**6,500,000**
7	**01**	**02**	**201**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Di Koordinasikan**	-	**200,000,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase Kegiatan Pemerintah Yang Di Koordinasikan**	**100**	**6,500,000**
7	01	02	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Lap.	100,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Lap.	-
7	01	02	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dok.	100,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.00 Dok.	6,500,000
7	**01**	**02**	**202**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**		**Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit**	-	**265,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**		**Persentase Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja**	**100**	-

					Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan**		
7	01	02	202	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dok.	100,000,000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dok.	-
7	01	02	202	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10 Lap.	65,000,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10 Lap.	-
7	01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Lap.	100,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Lap.	-
7	**01**	**02**	**203**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Persentase Pemeliharaan Sarana Dan prasarana Pelayanan Umum**	-	**222,500,000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Persentase Pemeliharaan Sarana Dan prasarana Pelayanan Umum**	-	-
7	01	02	203	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Dok.	160,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Dok.	-
7	01	02	203	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	15 Unit	62,500,000	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	15 Unit	-
7	**01**	**02**	**204**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintaha yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Pesentase Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Di Limpahkan**	-	**175,300,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintaha yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Pesentase Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Di Limpahkan**	-	-
7	01	02	204	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dok.	35,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dok.	-
7	01	02	204	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Lap.	30,300,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Lap.	-
7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Lap.	110,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Lap.	-

7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang Dikoordinasikan**	-	**226,822,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DI KOORDINASIKAN**	**100 %**	**45,783,316**
7	**01**	**03**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Di Kordinasikan**	-	**226,822,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Di Koordinasikan**	**3 Keg.**	**45,783,316**
7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lem. Kem.	100,822,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	9 LK	33,220,000
7	01	03	201	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yan Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10 Dok.	61,000,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10 Dok.	-
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Lap.	65,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3 Lap.	12,563,316
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang Berhasil Diselesaikan**	-	**170,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**PERSENTASE KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG BERHASIL DI SELESAIKAN**	**100 %**	**28,500,000**
7	**01**	**04**	**201**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah Kasus Yang di Sediakan**	-	**115,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah Kasus yang Di Sediakan (Kasus)**	**6 Kasus**	**28,500,000**
7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Lap.	40,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3 Lap.	28,500,000
7	01	04	201	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Lap.	75,000,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Lap.	-
7	**01**	**04**	**202**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Persentase Perda Dan Perkada yang Di tgakkan**	-	**55,000,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Persentase Perda Dan Perkada yang Di tgakkan**	-	-

7	01	04	202	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Lap.	55,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Lap.	-
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PENDUDUK**	-	**260,430,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PER 1.000 PENDUDUK (%)**	**80%**	**22,500,000**
7	**01**	**05**	**201**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah Kasus Intoleransi SARA yang diSediakan Di Tingkat Kecamatan**	-	**260,430,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah kasus Internasional SARA yang Disediakan di Tingkat kecamatan	5 Kasus	**22,500,000**
7	01	05	201	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	57 Org	35,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	57 Org	-
7	01	05	201	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	57 Org	25,000,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	57 Org	-
7	01	05	201	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	57 Org	35,000,000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	57 Org	-
7	01	05	201	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	57 Org	65,000,000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	57 Org	-

7	01	05	201	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9 Lap.	25,430,000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	9 Lap.	19,500,000
7	01	05	201	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	57 LM	15,000,000	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	57 LM	-
7	01	05	201	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10 Dok.	35,000,000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10 Dok.	-
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9 Dok.	25,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9 Dok.	3,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU**	-	**386,600,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU (%)**	**100 %**	**44,000,000**
7	**01**	**06**	**201**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Fasilittas dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Diklasanakan**	-	**386,600,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha**	**100 %**	**44,000,000**
7	01	06	201	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 Dok.	22,000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 Dok.	-
7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dok.	20,500,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dok.	3,000,000
7	01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dok.	20,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dok.	5,000,000
7	01	06	201	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	9 Lap.	20,000,000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	9 Lap.	-

7	01	06	201	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dok.	20,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	9 Dok.	4,500,000
7	01	06	201	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 Dok.	25,100,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 Dok.	9,000,000
7	01	06	201	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	9 Dok.	20,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	9 Dok.	4,500,000
7	01	06	201	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9 Dok.	9,000,000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9 Dok.	-
7	01	06	201	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Dok.	40,000,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Dok.	9,000,000
7	01	06	201	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	9 Dok.	20,000,000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	9 Dok.	-
7	01	06	201	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Dok.	20,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Dok.	-
7	01	06	201	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dok.	22,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dok.	-
7	01	06	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9 Dok.	20,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9 Dok.	-
7	01	06	201	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	9 Dok.	20,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	9 Dok.	-
7	01	06	201	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	9 Dok.	20,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	9 Dok.	4,500,000

7	01	06	201	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9 Dok.	25,000,000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	9	4,500,000
7	01	06	201	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Lap.	20,000,000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Lap.	-
7	01	06	201	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	9 Lap.	23,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	9 Lap.	-

Polo Pangale, Januari 2023

Camat

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
CAMAT PANGALE

AKBAR ASAD, S.Pd.I

NIP. 19730630 200212 1 003

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dan Program dan Kegiatan Masyarakat lahir melalui Musyawarah Dusun, dimana skala prioritas kebutuhan dusun masing-masing Desa disusun yang kemudian disusulkan melalui Musyawarah Desa. Pada tingkat selanjutnya, dilakukan Musyawarah Desa (MUSDES), membahas skala prioritas kebutuhan Desa berdasarkan usulan masing-masing Dusun. Selanjutnya dari hasil penyusunan Skala Prioritas Desa di usulkan pada tingkat berikutnya yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Hasil Musrenbangcam kemudian diselaraskan dengan hasil Reses atau Pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya akan diserahakan ke masing-Masing OPD sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD terkait.

Penelaahan atau kajian/proses usulan program kegiatan kemasyarakatan pada OPD Kecamatan Pangale yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun Anggaran 2023, seperti pada *Tabel T-C.2.4 berikut.*

Tabel T-C.2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun Anggaran 2023

OPD : Kantor Kecamatan Pangale

Terlampir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J U M L A H					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Pangale Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional khususnya yang terget-targetnya ditetapkan melalui SPM. Kebijakan Nasional diampu oleh Kecamatan pangale lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui peyusunan RKPD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Kecamatan Pangale

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pangale Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Pangale;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pangale dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Pangale.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Pangale Tahun 2024 ini adalah dalam rangka :

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan pangale Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka melaksanakan kegiatan khususnya pelayanan publik di tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan supervisi atas pelaksanaan program dan kegiatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2025. Program dan kegiatan Kecamatan Pangale Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Pangale Tahun

2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024. Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam renja Kecamatan Pangale Tahun 2024 dengan Rancangan Awal tahun 2025 dapat disajikan dalam bentuk tabel Tabel T-C.33 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dengan perkiraan maju 2024 (*pada lampiran berikut)*

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah atahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Mamuju Tengah Kecamatan Pangale

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja TA. 2024				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Smber Dana		Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	**1**				**KECAMATAN**				**1,750,975,532**				**3,379,851,000**
7	**1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**Kec. Pangale**		**1,603,692,216**	**DAU**			**2,997,101,000**
7	**1**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		-	**56,000,000**				**68,000,000**
7	1	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok.	4,000,000			1	7,000,000
7	1	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1 Dok.	4,000,000			1	7,000,000
7	1	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dok.	4,000,000			1	7,000,000
7	1	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1 Dok.	4,000,000			1	7,000,000
7	1	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Lap	40,000,000			5	40,000,000

7	**1**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**1,251,776,216**				**1,900,593,000**
7	1	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)		14 org/bln	1,167,260,875			20	1,800,000,000
7	1	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		60 Dok.	16,158,023			60	16,500,000
7	1	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Lap.	44,142,934			1	59,093,000
7	1	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		18 Lap.	24,214,384			18	25,000,000
7	**1**	**01**	**203**		**Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah**	**persentase Laporan barang milik daerah pada SKPD**							**7,300,000**
7	1	01	203	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD						1	7,300,000
7	**1**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**		**100**	**35,360,000**				**215,000,000**
7	1	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		42 Paket	10,000,000			42	40,000,000
7	1	01	205	09	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsimengikuti pelatihan			-			3	75,000,000
7	1	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4.org	25,360,000			6	100,000,000
7	**1**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Prangkat Umum Daerah**		-	**66,616,000**				**219,768,000**
7	1	01	206	2	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan			-			9	99,000,000

7	1	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		36 Dok.	3,000,000			36	9,000,000
7	1	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		11 Paket	20,020,000			11	12,000,000
7	1	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		274 Lap	43,596,000			274	99,768,000
7	**1**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah**							**119,800,000**
7	1	01	207	02	pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan			-			1	19,800,000
7	1	01	207	05	pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang di sediakan			-			2	100,000,000
7	**1**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**78,380,000**				**217,000,000**
7	1	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Lap.	33,500,000			12	97,000,000
7	1	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Lap.	12,580,000			3	20,000,000
7	1	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Lap.	32,300,000			12	100,000,000
7	**1**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (%)**		**100%**	**93,200,000**				**144,640,000**
7	1	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		8 Unit	85,000,000			9	101,640,000
7	1	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	8,200,000			10	23,000,000
7	1	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang rahabilitasi			-				20,000,000

7	**1**	**01**	**213**		**Penataan Organisasi**	**Persentase Penataan Organisasi Yang Terlaksanan**		**100**	**22,360,000**				**105,000,000**
7	1	01	213	2	Fasilitas Pelayanan Publik tata laksana	jumlah laporan hasil Fasilitas Pelayanan Publik tata laksana			-			10	50,000,000
7	1	01	213	3	peningkatan kinerja dan reformasi dan birokrasi	jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi dan birokrasi							-
7	1	01	213	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)		10 Lap	22,360,000			10	55,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN (*)**		**Baik**	**6,500,000**				**30,000,000**
7	**01**	**02**	**201**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Kegiatan Pemerintah Yang Di Koordinasikan (%)**		**100**	**6,500,000**				**30,000,000**
7	01	02	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12.00 Dok.	6,500,000			12	30,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DI KOORDINASIKAN**		**100%**	**45,783,316**				**63,220,000**
7	**01**	**03**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Di Koordinasikan**		**3 Keg.**	**45,783,316**				**63,220,000**
7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		9 LK	33,220,000			30	33,220,000
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		3 Lap.	12,563,316			3 Lap	30,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG BERHASIL DI SELESAIKAN(%)**		**100%**	**28,500,000**				**40,000,000**

7	**01**	**04**	**201**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Kasus yang Di Sediakan (Kasus)**		**6 Kasus**	**28,500,000**				**40,000,000**
7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		3 Lap.	28,500,000			3	40,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PER 1.000 PENDUDUK (%)**		**80%**	**22,500,000**				**50,430,000**
7	**01**	**05**	**201**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah kasus Internasional SARA yang Disediakan di Tingkat Kecamatan (Kasus)		5 Kasus	**22,500,000**				**50,430,000**
7	01	05	201	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)		9 Lap.	19,500,000			9	25,430,000
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		9 Dok.	3,000,000			9	25,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU**		**100%**	**44,000,000**				**199,100,000**
7	**01**	**06**	**201**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan (%)**		**100%**	**44,000,000**				**199,100,000**
7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		9 Dok.	3,000,000			9	20,500,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, Perangkat Daerah Kecamatan pangale menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Tema Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 yaitu "Penguatan Konektivitas Kawasan Strategis sebagai Pendorong Tumbuhnya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Berdampak Pada Pengentasan Kemiskinan"; 2. Rancangan Awal (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025 dan berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu serta hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. 3. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 wajib mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), SDG's, Visi, Misi, dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Tahun 2021-2026. Dari beberapa poin kebijakan tersebut, penyusunan Renja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah dilakukan melalui aplikasi Kemendagri pada http://sipd.go.id sebagaimana lampiran dokumen Ranwal Renja Kecamatan Pangale Tahun 2024.

Tabel 4.1
Rincian Program / Kegiatan Kecamatan Pangale
Tahun Anggaaran 2024

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	**1**				**KECAMATAN**				**1,750,975,532**
7	**1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**Kec. Pangale**		**1,603,692,216**
7	**1**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		-	**56,000,000**
7	1	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok.	4,000,000
7	1	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok.	4,000,000
7	1	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dok.	4,000,000
7	1	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok.	4,000,000
7	1	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Lap	40,000,000
7	**1**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**1,251,776,216**
7	1	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		14 org/bln	1,167,260,875
7	1	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		60 Dok.	16,158,023
7	1	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Lap.	44,142,934
7	1	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Lap.	24,214,384
7	**1**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100**	**35,360,000**
7	1	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)		42 Paket	10,000,000

7	1	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4.org	25,360,000
7	**1**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Prangkat Umum Daerah**		-	**66,616,000**
7	1	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		36 Dok.	3,000,000
7	1	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		11 Paket	20,020,000
7	1	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		274 Lap	43,596,000
7	**1**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**		**100%**	**78,380,000**
7	1	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Lap.	33,500,000
7	1	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Lap.	12,580,000
7	1	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Lap.	32,300,000
7	**1**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (%)**		**100%**	**93,200,000**
7	1	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		8 Unit	85,000,000
7	1	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	8,200,000
7	**1**	**01**	**213**		**Penataan Organisasi**	**Persentase Penataan Organisasi Yang Terlaksanan**		**100%**	**22,360,000**
7	1	01	213	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)		10 Lap	22,360,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN (*)**		**Baik**	**6,500,000**
7	**01**	**02**	**201**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Kegiatan Pemerintah Yang Di Koordinasikan (%)**		**100%**	**6,500,000**
7	01	02	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan(Dokumen)		12.00 Dok.	6,500,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DI KOORDINASIKAN**		**100%**	**45,783,316**
7	**01**	**03**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Di Koordinasikan**		**3 Keg.**	**45,783,316**

7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		9 LK	33,220,000
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		3 Lap.	12,563,316
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG BERHASIL DI SELESAIKAN (%)**		**100%**	**28,500,000**
7	**01**	**04**	**201**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Kasus yang Di Sediakan (Kasus)**		**6 Kasus**	**28,500,000**
7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		3 Lap.	28,500,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PER 1.000 PENDUDUK (%)**		**80%**	**22,500,000**
7	**01**	**05**	**201**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah kasus Internasional SARA yang Disediakan di Tingkat Kecamatan (Kasus)		5 Kasus	**22,500,000**
7	01	05	201	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)		9 Lap.	19,500,000
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		9 Dok.	3,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU**		**100%**	**44,000,000**
7	**01**	**06**	**201**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan (%)**		**100%**	**44,000,000**
7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)		9 Dok.	3,000,000
7	01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		9 Dok.	5,000,000
7	01	06	201	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		9 Dok.	4,500,000

7	01	06	201	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		9 Dok.	9,000,000
7	01	06	201	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		9 Dok.	4,500,000
7	01	06	201	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)		9 Dok.	9,000,000
7	01	06	201	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		9 Dok.	4,500,000
7	01	06	201	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)		9 Dok.	4,500,000

BAB V
PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Pangale untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Awal Kecamatan Pangale Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Pangale itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Pangale dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja Awal Kecamatan Pangale Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Mamuju Tengah sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran berkenaan. Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Awal Kecamatan Pangale Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Polo Pangale, Januari 2023

Camat



AKBAR ABAD, S.Pd.I

NIP. 19730630 200212 1 003

LAMPIRAN

USULAN KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN PANGALE
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024
USULAN YANG DILANJUTKAN

LOKASI USULAN : KEC. PANGALE

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Pagar SD	(DUSUN ARGOMULYO, DUSUN WANASARI, Pangale)	200 M2	387.464.200,00	
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penimbunan Lapangan Sekolah SD	(SD Inpres Kuo, Dusun Mamuji, Desa Kuo, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah, Pangale)	30 M3	9.970.800,00	
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Meubelair SD	(1.DUSUN ARGOMULYO 2.DUSUN WANASARI, Pangale)	2 Paket	60.000.000,00	
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	(SMPN 2 PANGALE, Pangale)	5 Ruang	800.000.000,00	
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung PAUD	(Dusun Beringin, Pangale)	1 Unit	513.784.250,00	
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD	(1. Dusun Argomulyo 2. Dusun Wanasari, Pangale)	2 Ruang	172.540.000,00	
7	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Double Gardan	(Desa Polo Camba, Pangale)	1 Unit	750.000.000,00	
8	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Double Gardan	(Desa Polo Camba, Pangale)	1 Unit	750.000.000,00	
9	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sedang Pustu/ Poskesdes	(dusun tunas baru, Pangale)	1 Paket	250.000.000,00	
10	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Double Gardan	(Puskesmas PKM Pangale, Pangale)	1 Unit	750.000.000,00	
11	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Meubelair Pustu	(Dusun Argomulyo Desa Polo Lereng, Pangale)	2 Paket	50.000.000,00	
12	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pagar Pustu/Poskesdes	(PUSTU KOMBILING, Pangale)	1 Paket	100.000.000,00	
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	(DUSUN SIKENDENG, DUSUN SIKENDENG TUA DESA PANGALE KECAMATAN PANGALE KAB. MAMUJU TENGAH, Pangale)	2.000 Meter	4.370.046.000,00	

Activate Windows
Go to Settings to activate

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	(Tanggul Sungai Barakkang Berlokasi di Dusun Rawa Pandang, Desa Kuo, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah, Pangale)	1.000 Meter	2.185.023.000,00	
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	(POLO UTARA, Pangale)	2.000 Meter	4.370.046.000,00	
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Batu Gajah	(PANTAI DESA KOMBILING, Pangale)	5 Meter	60.000.000,00	
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Batu Gajah	(Dusun tunas baru desa sartanamaju, Pangale)	200 Meter	2.400.000.000,00	
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan/Perdesaan	(Dusun Sidomulyo, Dusun Mario, Dusun Mekarsari, Pangale)	5.000 Meter	6.000.000.000,00	
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase	(Desa Polo Camba, Pangale)	5.000 Meter	4.500.000.000,00	
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Drainase Lingkungan Perkotaan/Perdesaan	(DESA PANGALE KEC. PANGALE, Pangale)	3.000 Meter	3.600.000.000,00	
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Drainase Lingkungan Perkotaan/Perdesaan	(Dusun ALong-Along, Pangale)	500 Meter	600.000.000,00	
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rehab Gedung Kantor	(jalan Poros Desa Polo Pangale Kecamatan Pangale, Pangale)	2.500 M2	11.250.000.000,00	
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung	(Dusun Sukamaju, Desa Polo Camba, Pangale)	250 M2	1.500.000.000,00	
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rehab Gedung Kantor	(dusun rinjani, Pangale)	108 M2	486.000.000,00	
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan yang menjadi Kewenangan Kabupaten (struktur)	(DESA POLO CAMBA, Pangale)	5.000 Meter	22.207.325.000,00	

Printed By SIPD Kemendagri

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan yang menjadi Kewenangan Kabupaten (struktur)	(jalan penghubung Desa Polo Pangale dengan Desa Kuo, Pangale)	7.000 Meter	31.090.255.000,00	
27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Talud Jalan	(DESA KOMBILING, Pangale)	4 Meter	13.030.584,00	
28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Talud Jalan	(DESA PANGALE, Pangale)	5.000 Meter	16.288.230.000,00	
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan yang menjadi Kewenangan Kabupaten (struktur)	(Jalan Poros Desa Polo Camba, Desa Lamba lamba, Pangale)	5.000 Meter	22.207.325.000,00	
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Talud Jalan	(Dusun Sukamaju, Desa Polo Camba, Pangale)	1.000 Meter	3.257.646.000,00	
31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Talud Jalan	(Jl. Poros Desa Kuo, Kec. Pangale, Kab Mamuju Tengah, Pangale)	3.000 Meter	9.772.938.000,00	
32	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan yang menjadi Kewenangan Kabupaten (struktur)	(POLO PANTAI, Pangale)	3.000 Meter	13.324.395.000,00	
33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan yang menjadi Kewenangan Kabupaten (struktur)	(DUSUN REMMEANG, DUSUN PALAPI, Pangale)	4.000 Meter	17.765.860.000,00	
34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Talud Jalan	(DUSUN POLO, Pangale)	2.000 Meter	6.515.292.000,00	
35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Talud Jalan	(DESA KOMBILING, Pangale)	4 Meter	13.030.584,00	
36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Talud Jalan	(Dusun Sidomulyo, Dusun Beringin, Pangale)	5.000 Meter	16.288.230.000,00	
37	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan yang menjadi Kewenangan Kabupaten (struktur)	(Dusun Sidomulyo, Dusun Beringin, Pangale)	7.000 Meter	31.090.255.000,00	
38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan yang menjadi Kewenangan Kabupaten	(Jl. Poros Desa Kuo, Kec. Pangale, Kab Mamuju Tengah, Pangale)	3.000 Meter	525.972.000,00	
39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan yang menjadi Kewenangan Kabupaten	(Desa Sartanamaju, Pangale)	6.000 Meter	1.051.944.000,00	
40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	(Pangale)	5 Meter	750.000.000,00	
41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	(Dusun Sukamaju, Desa Polo Camba, Pangale)	10 Meter	1.500.000.000,00	
42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	(DUSUN PALAPI, Pangale)	25 Meter	3.750.000.000,00	
43	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	(Dusun Mekarsari, Pangale)	4 Meter	600.000.000,00	
44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	(dusun sarre, tamalaka, Pangale)	7 Meter	1.050.000.000,00	
45	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jembatan	(Jl. Poros Desa Kuo, Dusun Kampung baru, Kec. Pangale, Kab. Mamuju tengah, Pangale)	1 Meter	125.000.000,00	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
46	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(DESA PANGALE KECAMATAN PANGALE, Pangale)	50 Jenis dan Unit (PSU)	2.500.000.000.00	
47	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(DESA KOMBILING, Pangale)	50 Jenis dan Unit (PSU)	2.500.000.000.00	
48	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	pembangunan jalan, pembangunan drainase pengadaan PJU daerah kawasan kumuh	(jalan Penghubung desa Polo Camba dengan Desa Polo Lereng, Pangale)	1.500 Jenis dan Unit (PSU)	10.500.000.000.00	
49	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(DUSUN ARGOMULYO,DUSUN PURWODADI,DUSUN WANASARI,DUSUN TRI TUNGGAL DUSUN BUANA SAKTI, Pangale)	100 Jenis dan Unit (PSU)	5.000.000.000.00	
50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(DESA KOMBILING, Pangale)	50 Jenis dan Unit (PSU)	2.500.000.000.00	
51	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	(Dusun Mekarsari, Dusun Beringin, Dusun Mario, Pangale)	30 Jenis dan Unit (PSU)	1.500.000.000.00	
52	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas RTLH dan Penyediaan PSU	(Dusun Lemo-Lemo, Puncak Jaya, Along-Along, & Bajo, Pangale)	50 Jenis dan Unit (PSU)	350.000.000.00	
53	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas RTLH dan Penyediaan PSU	(Dusun Beringin, Dusun Mekarsari, Dusun Mario, Dusun Sidomulyo, Pangale)	60 Jenis dan Unit (PSU)	420.000.000.00	
54	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rehabilitasi Tanggul Abrasi Pantai	(DUSUN KARAMA, DUSUN PANGALE DESA PANGALE KECAMATAN PANGALE KAB. MAMUJU TENGAH, Pangale)	2.000 Meter	7.000.000.000.00	
55	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rehabilitasi Tanggul Abrasi Pantai	(DUSUN LAMBA-LAMBA, Pangale)	3.000 Meter	10.500.000.000.00	
56	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengadaan Bibit Tanaman Pangan (Jagung)	(Dusun Lemo-Lemo, Puncak Jaya, Along-Along, dan Bajo, Pangale)	18.000 Kg	2.160.000.000.00	
57	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Combine Harvester Besar)	(Dusun Kampung Baru, Desa Kuo, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah, Pangale)	1 Unit	650.000.000.00	

Aktivasi Windows
Go to Settings to activate

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
58	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengadaan Bibit Perkebunan (Bibit Kelapa Sawit)	(DUSUN REMMEANG, Pangale)	8.000 Pokok Pohon	348.000.000,00	
59	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Combine Harvester Besar)	(Dusun camba Tunggal, desa polo camba, Pangale)	1 Unit	650.000.000,00	
60	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan dan Pengadaan Pupuk (Pupuk NPK Non Subsidi)	(REMMEANG, Pangale)	5.000 Kg	80.000.000,00	
61	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan dan Pengadaan Pupuk (Urea Non Subsidi)	(DESA KOMBILING, Pangale)	1.000.000 Kg	12.000.000.000,00	
62	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Hand Traktor R2)	(Dusun Along-Along & Dusun Lemo-Lemo, Pangale)	2 Unit	76.000.000,00	
63	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Ternak/Unggas (Bibit Sapi Betina)	(Desa Kuo Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah, Pangale)	50 Ekor	375.000.000,00	
64	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Ternak/Unggas (Bibit Ayam Petelur)	(Dusun Along-Along, Pangale)	3.000 Ekor	285.000.000,00	
65	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jaringan Irigasi Tersier	(Pangale)	300 Meter	30.000.000.000,00	
66	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan Jalan Usaha Tani pada Lokasi Lahan Sawah LP2B	(DESA PANGALE KEC. PANGALE KAB. MAMUJU TENGAH, Pangale)	200 Ha	800.000.000,00	
67	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan Jalan Usaha Tani pada Lokasi Lahan Sawah LP2B	(Desa Kuo, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah, Pangale)	200 Ha	800.000.000,00	
68	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan Jalan Usaha Tani pada Lokasi Lahan Sawah LP2B	(Dusun tunas baru desa sartanamaju, Pangale)	300 Meter	30.000.000.000,00	
69	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan)	(Dusun Mario, Pangale)	20 Unit	360.000.000,00	
70	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan)	(DESA PANGALE KEC. PANGALE, Pangale)	200 Unit	3.600.000.000,00	
71	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan)	(Desa Kuo, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah, Pangale)	150 Unit	2.700.000.000,00	

Activate Windows
Go to Settings to activate

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan)	(DESA KOMBILING, Pangale)	10 Unit	180.000.000.00	
73	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan)	(desa sartanamaju, Pangale)	500 Unit	9.000.000.000.00	
74	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	-	-	Jaringan Internet	(Dusun ALong-Along, Pangale)	1 Paket	5.500.000.00	
75	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan Internet	(Dusun Mekarsari, Pangale)	1 Paket	5.500.000.00	
76	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan Internet	(Kantor Camat Pangale, Pangale)	3 Paket	16.500.000.00	
77	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan Internet	(Kantor Desa Polo Camba, Pangale)	2 Paket	11.000.000.00	
78	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	menara BTS	(DESA SARTANAMAJU, Pangale)	2 Paket	2.400.000.000.00	
79	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	(DESA KOMBILING, Pangale)	5 Paket	250.000.000.00	
80	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Penimbunan Lapangan	(Dusun ARGOMULYO, Pangale)	400 Meter kubik	132.944.000.00	
81	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Penimbunan Lapangan	(Dusun Tamalaka, Pangale)	8.000 Meter kubik	500.000.000.00	
82	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Kapal (kapal Viber 4 GT)	(DUSUN POLO, Pangale)	4 Unit	680.000.000.00	
83	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembuatan/Normalisasi Saluran Tambak	(DUSUN PALAPI, Pangale)	2.000 Meter kubik	77.062.000.00	
84	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembuatan/Normalisasi Saluran Tambak	(DUSUN PANGALE, DUSUN KARAMA DESA PANGALE KECAMATAN PANGALE KAB. MAMUJU TENGAH, Pangale)	100.000 Meter kubik	3.853.100.000.00	
85	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembuatan Kolam Bioflok (Diameter 4)	(Dusun Puncak Jaya, Pangale)	10 Unit	45.000.000.00	
86	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Bantuan Bibit Ikan Nila (4-6 cm)	(DESA POLO LERENG, Pangale)	50.000 Ekor	60.000.000.00	

Activate Windows
Go to Settings

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
87	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Bantuan Bibit Udang (pl 15)	(DESA PANGALE KEC. PANGALE, Pangale)	1.000.000 Ekor	175.000.000.00	
88	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Bantuan Motor Gandeng Ikan bagi Pemasar	(Desa Polo Camba, Pangale)	5 Unit	120.000.000.00	
89	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Bantuan Peralatan UMKM	(DESA PANGALE KEC. PANGALE, Pangale)	10 Kelompok	250.000.000.00	
90	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Rehab Berat Pembangunan Asrama/ pesantren/rumah ibadah	(DUSUN BUANA SAKTI, Pangale)	1 Unit	100.000.000.00	
91	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Rehab Berat Pembangunan Asrama/ pesantren/rumah ibadah	(Ponpes Miftahul Mardiyah Jl. Poros Kuo - Polojajar, Desa Kuo, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah, Pangale)	1 Unit	100.000.000.00	
92	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Rumah Ibadah	(Dusun Lemo-Lemo, Pangale)	70.000.000 Rp	-	
93	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Rehab Sedang Pembangunan Asrama/ pesantren/rumah ibadah	(Dusun Beringin, Dusun Mekarsari, Dusun Mario, Pangale)	3 Unit	150.000.000.00	
	JUMLAH						390.867.208.418,00	

Activate Windows
Go to Settings to activate

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

MAMUJU TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Rumah sakit merupakan instansi pelayanan kesehatan yang sangat kompleks, yaitu kompleks dalam sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta jenis pelayanan yang diberikan. Kompleksitas rumah sakit ini perlu didukung oleh berbagai pihak terkait serta manajemen yang kuat agar dapat berjalan sesuai standar pelayanan. Agar Rumah Sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, Rumah Sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan.

Rencana Kerja RSUD Mamuju Tengah Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang hendak dicapai pada tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya Renja RSUD Mamuju Tengah akan menjadi landasan dalam menyusun Anggaran (P-RKA) PD tahun 2026. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Besar harapan kami perencanaan ini dapat terwujud dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat yang kami layani.

Demikian Rencana Kerja RSUD KabupatenMamuju Tengah Tahun 2024 ini kami buat, mudah-mudahan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah bilamana diperlukan.

Mamuju Tengah, 2 Agustus 2023
Direktur RSUD Mamuju Tengah



dr. NUR FITRIANA, Sp.GK.
NIP. 19861234 201412 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Mamuju tengah merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021–2026 yang telah di-review.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja (Renja) RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026. Rencana kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja) RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD). Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) RSUD Kabupaten Mamuju Tengah akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun.

Rencana kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubulanik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rebubulanik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguanan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 659/MENKES/PER/VII/2009 Tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia;
17. Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan RSUD Kabupaten Tengah terhadap suatu dokumen rencana tahunan di tahun 2024 yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu berjalan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD Kabupaten Mamuju tengah ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2024;
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Menilai daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024;
4. Diperolehnya program/kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan pasien di RSUD Kabupaten Mamuju Tengah di tahun 2024 guna mewujudkan target dari visi dan misi RSUD Kabupaten Mamuju Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja RSUD Mamuju Tengah tahun 2022 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tenga Tahun 2021–2026 dan Renstra RSUD Mamuju Tengah Tahun 2021–2026

Evaluasi hasil capaian Program Renja Tahun 2022 terhadap Renstra RSUD Mamuju Tengah sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2022), adalah sebagai berikut:

1) Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Indikator progam: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
   Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 65% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 93%
   Pada program ini terdapat 6 Kegiatan yaitu :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, predikat kinerja “Sangat Rendah”
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, predikat kinerja “Rendah”
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, predikat kinerja “Sedang”
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, predikat kinerja “Sangat Rendah”
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
2) Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   Indikator Progam: Persentase SPM RSUD yang Tercapai
   Evaluasi Hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 99% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 92.36%
   Pada program ini terdapat 2 kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, predikat kinerja “SangatTinggi”
   b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

Untuk memantapkan perencanaan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023. Pada

tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program

2.1.1 Realisasi Program/Kegitan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Terdapat 1 Sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan Umtuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengn sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan realisasi 0%.

2.1.2 Realisasi Program/Kegitan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan yang memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Program penunjang urusan pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan ini dengan capaian kinerja sebesar (96,85%)

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

   Program pemenuhan upaya kesehatan perorangana dan upaya kesehatan masyarakat terdapat 2 (dua) kegiatan denga capaian kinerja sebesar (96,89%)

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak terdapat program atau sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program kegiatan.

Adanya pergantian Direktur Rumah sakit (PA) dan adanya penggantian aplikasi dari SIMDA ke SIPD sehingga memperlambat proses pencairan

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dampak yang timbul sekaitan dengan target capaian program renstra perangkat daerah yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan

2.1.6 Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yaitu memperbaiki manajemen dan memperbaiki kinerja Sumber Daya Manusia.

Keseluruhan capaian Indikator Kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata hampir mencpai 100% dapat dikatakan dalam kategori berhasil. Oleh karenanya pencapaian kinerja output akan tetap dipertahankan, Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2022 pada Renstra Tahun 2021-2025 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel T-C.29 berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : RSUD Mamuju Tengah

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase SPM RSUD yang Tercapai**								
1	**02**	**02**	**2**	**01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar**								
1	02	02	2	01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan	0		1	1	100%	0	1	0
1	02	02	2	01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun	2		2	2	100%	0	2	100.00%

1	02	02	2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan jenis alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan lainnya	5		5	-	0	5	-	0.00%
1	02	02	2	01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat	100%		100%	74%	74%	100%	174%	174.00%
1	02	02	2	01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Jenis BMHP	100%		100%	98%	98%	100%	198%	197.78%
1	02	02	2	01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara	25		25	24	96%	25	49	196.00%
1	02	02	2	01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara	4		4	4	100%	4	8	200.00%
1	02	02	2	01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara	1		1	1	100%	1	2	200.00%
														-	
1	**02**	**02**	**2**	**02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Layanan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar**								
1	02	02	2	02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase layanan Rumah Sakit	100%		12	12	100%	75%	13	1275.00%
1	02	02	2	02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan akreditasi yang terlaksana	100%		12	12	100%	100%	13	1300.00%
														-	

1	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**								
1	**02**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**								
1	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	1		2	2	100%	1	3	300.00%
1	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	1		1	1	100%	1	2	200.00%
1	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1		1	1	100%	1	2	200.00%
1	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	1		1	1	100%	1	2	200.00%
1	02	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1		1	1	100%	1	2	200.00%
1	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	1		1	1	100%	1	2	200.00%
														-	
1	**02**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**								
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	134		54	54	100%	74	128	95.52%
1	02	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1		1	1	100%	1	2	200.00%

1	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	18		18	18	100%	18	36	200.00%
														-	
1	**02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**								
1	02	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi	30		30	29	97%	30	59	196.67%
1	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	30		30	10	33%	30	40	133.33%
														-	
1	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**								
1	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	10		10	10	100%	10	20	200.00%
1	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10		10	10	100%	10	20	200.00%
1	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	12,000		12,000	12,010	100%	12,000	24,010	200.08%
1	02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1000		30	30		1000	1,030	103.00%
1	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	50		50	40	80%	50	90	180.00%

														-	
														-	
1	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**								
1	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	100		100	99	99%	100	199	199.00%
1	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	12		12	12	100%	12	24	200.00%
1	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	30		30	30	100%	30	60	200.00%
														-	
1	**02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**								
1	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	8		9	9	100%	9	404,663,873	5058298412.50%
1	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	133		133	133	100%	133	266	200.00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

Tabel T-C.30

Tabel kajian terhadap capaian kinerja PD berdasarkan Indikator kinerja yang ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK

No	**Pencapaian Kinerja Pelayanan Peangkat daerah / Indikator Kinerja**	**Target SPM**	**Target IKK**	**Target NSPK**	**Target Renstra**	**Realisasi Capaian**	**Rasio Capaian**
					2022	2022	2022
	GAWAT DARURAT			-	100%		
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	-	-	100%	100%	
2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	-	-	24 jam	24 jam	
3	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	-	-	100%	100%	
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	-	-	Satu jam	Satu jam	
5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit	-	-	≤ 5 menit	≤ 5 menit	
6	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %	-	-	≥ 70 %	≥ 70 %	
7	Kematian pasien< 24 Jam	≤ 2%	-	-	≤ 2%	≤ 2%	
8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	-	-	100%	100%	

	RAWAT JALAN						
1	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100%	-	-	100%	100%	
2	Ketersediaan Pelayanan : Klini Anak, Klinik penyakit dalam, Klinik kebidanan, Klinik bedah	100%	-	-	100%	100%	
3	Ketersediaan Pelayanan di RS Jiwa : Anaka Remaja, NAPZA, Gangguan psikotik, Gangguan neuromotorik, Mental retardasi, Mental organik, Usia lanjut	100%	-	-	100%	100%	
4	Jam buka pelayanan (08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali jum'at 08.00-11.00)	100%	-	-	100%	100%	
5	Waktu tunggu di rawat jalan	60 menit	-	-	60 menit	60 menit	
6	Kepuasan Pelanggan	90%	-	-	90%	90%	
7	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	60%	-	-	60%	60%	
	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	60%	-	-	60%	60%	
	RAWAT INAP						
1	Pemberi pelayanan di Rawat Inap Dr. Spesialis & Perawat minimal pendidikan D3	100%	-	-	100%	100%	
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	-	-	100%	100%	

3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap : anak, penyakit dalam, kebidanan, bedah	100%	-	-	100%	100%	
4	Jam vesite dokter spesialis (08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja)	100%	-	-	100%	100%	
5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	-	-	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	
6	Kejadian infeksi nasokomial	≤ 1,5 %	-	-	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%	-	-	100%	100%	
8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	-	-	≤ 0.24 %	≤ 0.24 %	
9	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	-	-	≤ 5 %	≤ 5 %	
10	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	-	-	≥ 90 %	≥ 90 %	
11	Rawat inap TB penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	-	-	≥ 60 %	≥ 60 %	
	Terlaksana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60 %	-	-	≥ 60 %	≥ 60 %	
	BEDAH SENTRAL						
1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	-	-	≤ 2 hari	≤ 2 hari	
2	Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %	-	-	≤ 1 %	≤ 1 %	
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	-	-	100%	100%	
4	Tidak adanya kejadian opersi salah orang	100%	-	-	100%	100%	

5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	-	-	100%	100%	
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	-	-	100%	100%	
7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %	-	-	≤ 6 %	≤ 6 %	
	PERSALINAN & PERINATOLOGI						
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan		-	-			
	pendarahan	≤ 1 %	-	-	≤ 1 %	≤ 1 %	
	Pre-eklamsia	≤ 30 %	-	-	≤ 30 %	≤ 30 %	
2	Sepsis	≤ 0,2 %	-	-	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	
3	Pemberi pelayanan persalinan normal : Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A, Dokter Sp.An	100%	-	-	100%	100%	
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit : Tim PONEK yang terlatih	100%	-	-	100%	100%	
5	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi : Dokter SP.OG, Doter Sp.A, Dokter SP.An	100%	-	-	100%	100%	
6	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	-	-	100%	100%	
7	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	-	-	≤ 20 %	≤ 20 %	
8	Keluarga Berencana :	100%	-	-	100%	100%	

	Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih						
9	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	-	-	1≥ 80 %	1≥ 80 %	
	INTENSIF						
1	Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	-	-	≤ 3 %	≤ 3 %	
2	Pemberi pelayanan Unit Intensif : Dokter Spesialis anestesi dan dokter spesialis dengan kasusu yang ditangani, 100% Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara (D4)	100%	-	-	100%	100%	
	RADIOLOGI						
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	-	-	≤ 3 jam	≤ 3 jam	
2	pelaksana ekspertisi Dokter Spesialis radiologi	100%	-	-	100%	100%	
3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen : kerusakan Foto	≤ 2 %	-	-	≤ 2 %	≤ 2 %	
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	-	-	≥ 80 %	≥ 80 %	
	LABORATORIUM						
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium : kimia darah & darah rutin	≤ 140 menit	-	-	≤ 140 menit	≤ 140 menit	

2	Pelaksana ekspertisi Dokter Sp.PK	100%	-	-	100%	100%	
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%	-	-	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	-	-	≥ 80 %	≥ 80 %	
	REHABILITASI MEDIK						
1	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan	≤ 50 %	-	-	≤ 50 %	≤ 50 %	
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	-	-	100%	100%	
3	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	-	-	≥ 80 %	≥ 80 %	
	FARMASI						
1	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	-	-	≤ 30 menit	≤ 30 menit	
	Waktu tunggu pelayanan racikan	≤ 60 menit	-	-	≤ 60 menit	≤ 60 menit	
2	Tidak adanya Kejadian kesalahan pernberian obat	100%	-	-	100%	100%	
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	-	-	≥ 80 %	≥ 80 %	
4	Penulisan resep sesuai formularium	100%	-	-	100%	100%	
	GIZI						
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	-	-	≥ 90 %	≥ 90 %	
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	-	-	≤ 20 %	≤ 20 %	
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	-	-	100%	100%	
	TRANSFUSI DARAH						

1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	-	-	100%	100%	
2	Kejadian Reaksi transfusi	≤ 0,01 %	-	-	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	
	PELAYAN GAKIN						
1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	-	-	100%	100%	
	REKAM MEDIK	-	-	-	100%	100%	
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	-	-	100%	100%	
2	Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	-	-	100%	100%	
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	-	-	≤ 10 menit	≤ 10 menit	
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	-	-	≤ 15 menit	≤ 15 menit	
	PENGELOLAAN LIMBAH						
1	Baku mutu limbah cair						
	BOD	< 30 mg/l	-	-	< 30 mg/l	< 30 mg/l	
	COD	< 30 mg/	-	-	< 30 mg/	< 30 mg/	
	TSS	< 80 mg/l	-	-	< 80 mg/l	< 80 mg/l	
	PH	6-9	-	✓	6-9	6-9	
2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	-	-	100%	100%	
	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN						

1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	-	-	100%	100%	
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	-	-			
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	-	-	0%	0%	
4	Ketepan Waktu pengurusan gaji berkala	100%	-	-	100%	100%	
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	-	-	≥ 60 %	≥ 60 %	
6	Cost recovery	≥ 40 %	-	-	≥ 40 %	≥ 40 %	
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	-	-	100%	100%	
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	-	-	≤ 2 jam	≤ 2 jam	
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	-	-	100%	100%	
	AMBULANCE & MOBIL JENAZAH						
1	Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah	24 jam	-	-	24 jam	24 jam	
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit	≤ 230 menit	-	-	≤ 230 menit	≤ 230 menit	
3	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	sesuai ketentuan daerah	-	-	sesuai ketentuan daerah	sesuai ketentuan daerah	
	PEMULASARAN JENAZAH						

1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam	-	-	≤ 2 Jam	≤ 2 Jam	
	IPSRS						
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80 %	-	-	≤ 80 %	≤ 80 %	
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	-	-	100%	100%	
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	-	-	100%	100%	
	PELAYANAN LAUNDRY						
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	-	-	100%	100%	
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	-	-	100%	100%	
	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)						
1	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	75%	-	-	75%	75%	
2	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%	-	-	60%	60%	
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%	-	-	75%	75%	

Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2022 sudah memenuhi target pelayanaan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Mamuju Tengah yang tercantum dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah (PD), dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pelayanan kesehatan. Sehingga isu-isu strategis yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang akan digulirkan dalam rencana kerja tahun yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan di RSUD Kabupaten Mamuju Tengah antara lain:

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia di beberapa instalasi/ unit/ termasuk dokter umum, dokter spesialis dan dokter sub spesialis
2. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik tempat maupun peralatan masih memerlukan penyempurnaan
3. Belum semua data/ informasi terintegrasi
4. Ketersediaan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan/kedokteran rumah sakit belum terpenuhi sesuai standar Rumah Sakit Type D
5. RSUD Kabupaten Mamuju Tengah saat ini masih dalam klasifikasi sebagai Rumah Sakit Type D dan sedang berproses menjadi Rumah Sakit Type C agar pelayanan lebih meningkat lagi.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, RSUD Mamuju Tengah menyadari bahwa lingkungan rumah sakit telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Sehingga untuk mencapai visi tersebut rumah sakit harus melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian visi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Analisa SWOT yang dilakukan merupakan upaya merepresentasikan berbagai faktor eksternal yang dinilai sebagian tidak sepenuhnya bisa dikendalikan dan bahkan sebagian sisa lainnya di luar kendali RSUD Mamuju Tengah dan berbagai faktor internal yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh RSUD Mamuju Tengah dalam rangka mewujudkan visi organisasinya. Faktor eksternal direpresentasikan dalam analisa SWOT melalui

Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats), sedangkan Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) merepresentasikan faktor internal RSUD Mamuju Tengah

Analisa SWOT RSUD Mamuju Tengah dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength)
   a. RSUD Mamuju Tengah telah terakreditasi
   b. SDM rumah sakit cukup banyak

2. Kelemahan (Weakness)
   a. Tenaga Dokter Specialis masih berstatus kontrak kerjasama dengan Universitas.
   b. Pengembangan SDM kualitasnya masih perlu ditingkatkan
   c. Beberapa tenaga profesional belum memenuhi standar dari segi kuantitas
   d. Belum berstatus BLUD dan merupakan Rumah Sakit kelas D
   e. Sarana dan prasaranan serta alat kesehatan belum memenuhi standar
   f. BOR (persentase penggunaan tempat tidur) belum memenuhi standar
   g. SIMRS belum maksimal

3. Peluang (Opportunity)
   a. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah maupun pusat
   b. Lokasi rumah sakit yang strategis memudahkan akses pelayanan
   c. Satu-satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah
   d. Hubungan kerjasama yang baik antara rumah sakit dengan perguruan tinggi, memberikan peluang untuk kerja sama layanan kesehatan dan pengembangan SDM rumah sakit.

4. Ancaman (Threat).
   a. Tuntutan masyarakat yang tinggi tentang mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien
   b. Klaim BPJS yang tidak tepat waktu/ tidak lancar
   c. Perubahan kebijakan di level nasional seperti Aturan review RS yang bisa mengakibatkan penurunan kelas RS
   d. Letak Geografis RSUD Mamuju Tengah berada di daerah rawan bencana khususnya gempa bumi dan banjir.

Berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa isu strategis RSUD Kabupaten Mamuju Tengah antara lain adalah :

1. Tersedianya kuantitas & kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan standar RS
2. Tersediaanya sarana dan prasarana yang sesuai standar kebutuhan
3. Meningkatnya sistem informasi dan manajemen RS (SIMRS) yang akuntabel dan terintegrasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan tahun ke empat pelaksanaan Renstra 2021-2026, juga sekaligus merupakan langkah lanjut untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rumah sakit kedepannya. Rencana kerja ini akan menjadi bahan masukan untuk finalisasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Telaahan terhadap rancangan awal SKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dipakai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Berdasarkan hasil perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan terlihat bahwa pagu indikatif yang diberikan sudah bisa mengakomodir semua program di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah pada tahun 2024 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten serta Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Rencana Kerja Tahun 2024 Page 25 Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam tabel T-C.31 berikut ini

TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 RSUD Kabupaten Mamuju Tengah

RANCANGAN AWAL RKPD					**HASIL ANALISA KEBUTUHAN**					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase SPM RSUD yang Tercapai**	Mamuju Tengah			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase SPM RSUD yang Tercapai**				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar**	Mamuju Tengah			**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar**				
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Unit gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Mamuju Tengah	2 unit	200,780,000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Unit gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Mamuju Tengah	2 unit	200,780,000	

	yang dibangun					yang dibangun				
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Mamuju Tengah	2 unit	100,000,000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Mamuju Tengah	2 unit	100,000,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Mamuju Tengah	37 unit	200,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Mamuju Tengah	37 unit	200,000,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mamuju Tengah	4 unit	192,074,862	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mamuju Tengah	4 unit	192,074,862	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Mamuju Tengah	4 unit	100,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Mamuju Tengah	4 unit	100,000,000	

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Mamuju Tengah	5 unit	1,000,000,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Mamuju Tengah	5 unit	1,000,000,000	
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Mamuju Tengah	1 unit	2,000,000,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Mamuju Tengah	1 unit	2,000,000,000	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Mamuju Tengah	1 unit	224,845,000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Mamuju Tengah	1 unit	224,845,000	

Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Mamuju Tengah	1 unit	123,162,910	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Mamuju Tengah	1 unit	123,162,910	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Mamuju Tengah	100 paket	3,000,000,000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Mamuju Tengah	100 paket	3,000,000,000	

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terpenuhiny a Layanan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar**	Mamuju Tengah			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhiny a Layanan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar**	Mamuju Tengah			
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase layanan Rumah Sakit	Mamuju Tengah	85 dokumen	13,181,362,360	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase layanan Rumah Sakit	Mamuju Tengah	85 dokumen	13,181,362,360	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	Mamuju Tengah			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	Mamuju Tengah			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggara n & evaluasi tepat waktu**	Mamuju Tengah			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggara n & evaluasi tepat waktu**	Mamuju Tengah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	17,859,463	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	17,859,463	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	12,301,593	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	12,301,593	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	7,632,254.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	7,632,254.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	5,732,254	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	5,732,254	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan	Mamuju Tengah	1 dokumen	6,114,276	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan	Mamuju Tengah	1 dokumen	6,114,276	

	DPA-PD					DPA-PD				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	5,745,816	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	5,745,816	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	50,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	50,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	Mamuju Tengah			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	Mamuju Tengah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Mamuju Tengah	210 orang/bulan	7,155,139,889	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Mamuju Tengah	210 orang/bulan	7,155,139,889	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Mamuju Tengah	1 laporan	5,071,148	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Mamuju Tengah	1 laporan	5,071,148	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Mamuju Tengah	18 laporan	12,508,460	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Mamuju Tengah	18 laporan	12,508,460	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	Mamuju Tengah			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	Mamuju Tengah			

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	3,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	3,000,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD-PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	3,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD-PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	3,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD-PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	15,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD-PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	15,000,000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD**	Mamuju Tengah			**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD**	Mamuju Tengah			
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen data retribusi daerah PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	5,000,000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen data retribusi daerah PD	Mamuju Tengah	1 dokumen	5,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	Mamuju Tengah			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	Mamuju Tengah			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Mamuju Tengah	259 paket	143,350,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Mamuju Tengah	259 paket	143,350,000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju Tengah	1 dokumen	10,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju Tengah	1 dokumen	10,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi	Mamuju Tengah	30 orang	62,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi	Mamuju Tengah	30 orang	62,000,000	

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundangan	Mamuju Tengah	59 orang	10,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundangan	Mamuju Tengah	59 orang	10,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	Mamuju Tengah	30 orang	51,569,580	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	Mamuju Tengah	30 orang	51,569,580	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	Mamuju Tengah			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	Mamuju Tengah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	Mamuju Tengah	10 paket	59,636,063	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	Mamuju Tengah	10 paket	59,636,063	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	10 paket	100,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	10 paket	100,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	Mamuju Tengah	200 paket	100,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	Mamuju Tengah	200 paket	100,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Mamuju Tengah	12000 paket	70,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Mamuju Tengah	12000 paket	70,000,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Mamuju Tengah	1000 laporan	20,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Mamuju Tengah	1000 laporan	20,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Mamuju Tengah	50 laporan	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Mamuju Tengah	50 laporan	100,000,000	

	PD yang terselenggara					PD yang terselenggara				
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah SPBE yang terlaksana dengan baik di PD	Mamuju Tengah	1 paket	30,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah SPBE yang terlaksana dengan baik di PD	Mamuju Tengah	1 paket	30,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	Mamuju Tengah			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	Mamuju Tengah			
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Mamuju Tengah	20 unit	50,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Mamuju Tengah	20 unit	50,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	2 unit	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	2 unit	50,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	Mamuju Tengah			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	Mamuju Tengah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Mamuju Tengah	100 laporan	8,577,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Mamuju Tengah	100 laporan	8,577,500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Mamuju Tengah	38 laporan	793,572,917	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Mamuju Tengah	38 laporan	793,572,917	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	1 laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	1 laporan	10,000,000	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	4 laporan	364,438,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	4 laporan	364,438,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	Mamuju Tengah			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	Mamuju Tengah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Mamuju Tengah	1 unit	70,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Mamuju Tengah	1 unit	70,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Mamuju Tengah	8 unit	302,625,924	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Mamuju Tengah	8 unit	302,625,924	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Mamuju Tengah	10 unit	20,000,000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Mamuju Tengah	10 unit	20,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Mamuju Tengah	133 unit	140,237,200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Mamuju Tengah	133 unit	140,237,200	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud terpelihara	Mamuju Tengah	1 unit	10,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud terpelihara	Mamuju Tengah	1 unit	10,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Mamuju Tengah	1 unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Mamuju Tengah	1 unit	100,000,000	

Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase layanan BLUD yang berjalan baik**	Mamuju Tengah			**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase layanan BLUD yang berjalan baik**	Mamuju Tengah			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan dan penunjang layanan BLUD	Mamuju Tengah	1 unit	100,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan dan penunjang layanan BLUD	Mamuju Tengah	1 unit	100,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

a. menambah jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit;
b. memberikan pelayanan kesehatan prima pada masyarakat;
c. melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit;
d. melaksanakan home visite untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada RS. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana kesehatan lainnya. Untuk tahun 2024 ada usulan pokok pikiran DPRD untuk RS, sedangkan untuk mekanisme Musrenbang tidak ada usulan oleh masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Prioritas Pembangunan Kesehatan Nasional pada tahun 2020-2025 difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan masalah gizi ganda
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
5. Peningkatan System Kesehatan Nasional

Issu strategis pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Angka Kematian ibu dan Angka Kematian Bayi
2. Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Kesehatan
3. Gizi Stunting pada Balita
4. Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular
5. Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS)
6. Jaminan Kesehatan Masih Kurang
7. Akses Terhadap Sanitasi Yang Layak
8. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, disadari bahwa pengalaman empiris dan penelitian para ahli menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan adalah esensial untuk peningkatan IPM. Penduduk yang sehat akan menjadi produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

3.2 **Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugasnya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah harus mampu menerjemahkan kebijakan politik Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra sebagai pijakan bagi perencanaan strategis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Berikut akan diuraikan tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai penjabaran visidan misi Bupati Mamuju Tengah.

Tujuan dan sasaran yang disusun oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Mamuju Tengah. Adapun tujuan dan sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Tujuan renja merupakan pernyataan tentang sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan ini menggambarkan arah strategis yang digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas pada pencapaian misi.

Adapun tujuan yang ingin di capai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pemantapan fungsi-fungsi manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan yang baik harus didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

b. Sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusannya mengacu pada tugas dan fungsi rumah sakit

sebagai perangkat daerah.

Agar pembangunan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna dan berdaya-guna, maka sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar" (Misi 2) dan Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar Dalam Mendukung Kualitas Hidup Yang Layak" (Tujuan 2). Untuk bisa menjadi berdaya saing maka Bupati Mamuju Tengah menetapkan sasaran yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya Kualiats SDM dan Kelayakan Hidup Manusia" (Sasaran 2) dan "Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten" (Sasaran 3)

Berdasarkan sasaran diatas maka Dinas Kesehatan telah merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah antara lain :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA PD	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
		2021	2022	2023	2024	2025
meningkatkan mutu pelayanan Rumah sakit daerah	Status akreditasi Rumah Sakit	DASAR	MADYA	MADYA	MADYA	UTAMA
Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) RSUD	C	C	C	B	B
	Persentase Pokja Akreditasi yang Dilulusi	26,6%	53,3%	53,3%	53,2%	80%
Meningkatnya Tata Kelola Pada Rumah Sakit	Indeks RB Rumah Sakit	C	C	C	CC	CC
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Rumah Sakit	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	C	C	C	CC	CC
	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Rumah Sakit	0%	0%	0%	0%	0%

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, fokus diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran berikutnya yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, sasaran yang menjadi fokus dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah adalah Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dalam Mendukung Kualitas Hidup Yang Layak dengan Strategi :

1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana kesehatan yang ada dan penerapan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
5. Memanfaatkan kemajuan teknologi telekomunikasi dan sistem informasi kesehatan untuk mendeteksi penularan penyakit akibat mobilisasi penduduk yang tinggi.
6. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan air bersih di masyarakat
7. Mengoptimalkan upaya kesehatan dan pembinaan serta pengkoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan

Sedangkan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku
2. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan
3. Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM)
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
5. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran RSUD Kabupaten Mamuju Tengah pada Rencana Kerja Tahun 2024 terdapat 5 Program, 24 Kegiatan dan 116 Sub Kegiatan pendukung.

Pada tahun 2024, RSUD Mamuju Tengah akan melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan dari program ini meliputi :

   - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

     Kegiatan ini diarahkan untuk koordinasi dan penyusunan dokumen serta evaluasi kinerja

- Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah

  Kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi gaji dan Tunjangan ASN

- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan jaminan bagi kendaraan dinas berupa premi asuransi kendaraan.
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  Kegiatan ini diarakan untuk pengelolaan data retribusi.
- Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  Kegiatan ini diarahkan untuk pendidikan dan pelatihan pegawai serta bimbingan teknis.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Kegiatan ini diarahkan untuk pemenuhan biaya perjalanan dinas luar derah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit di luar daerah serta pemenuhan jasa operator aplikasi pada rumah sakit.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah

  Kegiatan ini diarahkan untuk pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
  Kegiatan ini diarahkan untuk pemenuhan jasa komunikasi dan listrik dalam setahun. Kegiatan ini diarahkan pula untuk pemenuhan insentif dokter dan honor tenaga sukarela serta honor pelaksana kegiatan lainnya.
- Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintan Daerah

  Kegiatan ini diarahkan untuk jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan.
- Peningkatan Pelayanan BLUD
  Kegiatan dari program ini yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   Kegiatan dari program ini meliputi :

- Peyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

  Kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan gedung rumah sakit dan pembangunan fasilitas lainnya. Kegiatan ini pula bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah sakit. Pengadaan alat kesehatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan standar peralatan serta mengikuti perkembangan teknologi kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan bahan habis pakai dan obat di rumah sakit.

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

  Kegiatan dari program ini yaitu Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diarahkan untuk operasional pelayanan rumah sakit.

TABEL T-C 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Program dan Kerangka Pendanaan				UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target	Rp.	Target	Rp.		
1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase SPM RSUD yang Tercapai**	**58%**	**46,995,000,000**	**60%**	**41,539,500,000**	RSUD	Mamuju Tengah
1	**02**	**02**	**2**	**01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar**	**77%**	**31,395,000,000**	**90%**	**25,139,500,000**	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Unit gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang dibangun	0	0	0	0	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	2 Unit	800,000,000	0	0	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan	1 kali	6,000,000,000	0	0	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang direhabilitasi dan dipelihara	2 unit	6,000,000,000	2 unit	6,000,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi dan dipelihara	0	0	0	0	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun	2 unit	600,000,000	2 unit	600,000,000	RSUD	Mamuju Tengah

1	02	02	2	01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan lainnya	2 unit	2,000,000,000	2 unit	2,000,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan jenis alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan lainnya	5 paket	9,000,000,000	5 paket	9,000,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat yang dikalibrasi	1 paket	300,000,000	1 paket	300,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat	100%	1,815,000,000	100%	1,996,500,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Jenis BMHP	100%	3,630,000,000	100%	3,993,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara	25 unit	600,000,000	25 unit	600,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara	4 unit	400,000,000	4 unit	400,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara	1 paket	250,000,000	1 paket	250,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	**02**	**02**	**2**	**02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Layanan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar**	**58%**	**15,600,000,000**	**60%**	**16,400,000,000**	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase layanan Rumah Sakit	85%	14,800,000,000	95%	15,600,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya	5 Fasilitas	300,000,000	5 Fasilitas	300,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan akreditasi yang terlaksana	100%	400,000,000	100%	400,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	02	2	02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah kasus gawat darurat yang ditangani	100%	100,000,000	100%	100,000,000	RSUD	Mamuju Tengah

1	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**11,944,012,832**	**100%**	**15,649,843,549**	**RSUD**	Mamuju Tengah
1	**02**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**350,000,000**	**100%**	**350,000,000**	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	RSUD	Mamuju Tengah

1	**02**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**4,787,112,832**	**100%**	**5,792,943,549**	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	94 org	4,677,112,832	114 org	5,682,943,549	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	18 dok	50,000,000	18 dok	50,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD	8 dok	30,000,000	8 dok	30,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	**02**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100%**	**60,000,000**	**100%**	**60,000,000**	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD-PD	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD-PD	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	**02**	**01**	**2**	**04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD**	**100%**	**300,000,000**	**100%**	**300,000,000**	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen data retribusi daerah PD	1 dok	300,000,000	1 dok	300,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	**02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**1,030,000,000**	**100%**	**1,030,000,000**	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	259 org	260,000,000	259 org	260,000,000	RSUD	Mamuju Tengah

1	02	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai PD	59 org	30,000,000	59 org	30,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi	30 org	300,000,000	30 org	300,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundangan	59 org	20,000,000	59 org	20,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	30 org	360,000,000	30 org	360,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**1,796,900,000**	**100%**	**1,796,900,000**	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	10 jenis	268,000,000	10 jenis	268,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 unit	100,000,000	10 unit	100,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	30 buah	200,000,000	30 buah	200,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 jenis	100,000,000	4 jenis	100,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	12000 buah	920,400,000	12000 buah	920,400,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	8 exp	20,000,000	8 exp	20,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1000 tamu	50,000,000	1000 tamu	50,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	50 org	108,500,000	50 org	108,500,000	RSUD	Mamuju Tengah

1	02	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah SPBE yang terlaksana dengan baik di PD	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	**02**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**850,000,000**	**100%**	**3,450,000,000**	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 unit	500,000,000	0	-	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	20 unit	100,000,000	20 unit	100,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	-	1 unit	3,000,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	-	1 unit	100,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**1,520,000,000**	**100%**	**1,620,000,000**	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	100 dok	10,000,000	100 dok	10,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	20 mbps 42829 m3 209.952 kwh	900,000,000	20 mbps 42829 m3 209.952 kwh	1,000,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	RSUD	Mamuju Tengah

1	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	30 org	600,000,000	30 org	600,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	**02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**1,250,000,000**	**100%**	**1,250,000,000**	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	70,000,000	1 unit	70,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	8 unit	800,000,000	8 unit	800,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	10 unit	20,000,000	10 unit	20,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	133 unit	350,000,000	133 unit	350,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud terpelihara	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	0	-	0	-	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	0	-	0	-	RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	0	-	0	-	RSUD	Mamuju Tengah
1	**02**	**01**	**2**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase layanan BLUD yang berjalan baik**	**0%**		**0%**		RSUD	Mamuju Tengah
1	02	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan dan penunjang layanan BLUD	0	-	0	-	RSUD	Mamuju Tengah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi kepala daerah. Hal ini ditujukan kedalam akumulasi pencapaian indikator outcome dan indikator output setiap tahun atau indikator capaian secara mandiri pertahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun Renstra RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dapat tercapai. Program dan kegiatan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terdiri dari 2 program, 12 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.574.167.142.

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2024 RSUD Kabupaten Mamuju Tengah harus konsisten dan selaras dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dan Renstra RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026. Daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 di RSUD Kabupaten Mamuju Tengah secara lengkap ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2024

STATUS TERVERIFIKASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**24,574,167,142.00**							**401,000,000.00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**24,574,167,142.00**							**401,000,000.00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)***				***100***	**6,051,942,010.00**							**101,000,000.00**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja						60.385.656,00							1.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

		Perangkat Daerah													
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						17.859.463,00							1.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(RSUD Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*0.00*		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Uang Operator , Lembur, ATK, Makan minum) (Dokumen)				*1*	*17.859.463,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*			
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						12.301.593,00					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*0.00*		

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Uang operator, lembur, ATK, Makan minum Rapat) (Dokumen)				*1*	*12.301.593,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*			
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						7.632.254,00					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*0.00*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Lembur, ATK, Makan minum) (Dokumen)				*1*	*7.632.254,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*			
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.732.254,00					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*0.00*		

		(Dokumen)							*Umum*					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Lembur, ATK, Makan minum) (Dokumen)				*1*	*5.732.254,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*		
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						6.114.276,00					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*0.00*	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Uang lembur, ATK, Makan minum) (Dokumen)				*1*	*6.114.276,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*		
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.745.816,00					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi*	*0.00*	

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)									*Kinerja SKPD*			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Uang LEMBUR, ATK, Makan minum)(Laporan)				*1*	*5.745.816,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*			
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*0.00*		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*5.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.189.549.170,00				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

		Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*100*		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.171.969.562,00					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*53*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*0.00*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*53*	*3.171.969.562,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*			
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.071.148,00					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*0.00*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				*1*	*5.071.148,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB.*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*			

			SKPD (Uang operator, Lembur, ATK, Makan minum) (Laporan)						*MAMUJU TENGAH)*	*Umum*			*SKPD*			
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						12.508.460,00					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*18*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*0.00*		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Uang Lembur, ATK, Makan minum) (Laporan)				*18*	*12.508.460,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*			
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						21.000.000,00					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*100*		
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						3.000.000,00					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*0.00*		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (ATK) (Dokumen)				*1*	*3.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*			
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.000.000,00					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*0.00*		

			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*3.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*			
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						15.000.000,00					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*0.00*		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*15.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*			
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						5.000.000,00					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*100*		
	1.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah						5.000.000,00					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

												SKPD			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengolahan Data Retribusi Daerah*	*0.00*		
			Pengolahan Data Retribusi Daerah (Laporan)				*1*	*5.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengolahan Data Retribusi Daerah*			
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						276.919.580,00					Pengolahan Data Retribusi Daerah		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Pengolahan Data Retribusi Daerah*	*100*		
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						143.350.000,00					Pengolahan Data Retribusi Daerah		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*259*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*0.00*		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)				*259*	*143.350.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*			

								TENGAH)						
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						10.000.000,00					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*0.00*	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*10.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*		
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						62.000.000,00					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*30*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*0.00*	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Belanja bimbingan teknis, Belanja perjalanan dinas biasa)				*30*	*62.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*		

		(Orang)													
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						10.000.000,00					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*59*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*0.00*		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				*59*	*10.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*			
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						51.569.580,00					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*30*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanga*	*0.00*		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(Belanja bahan cetak, makan				*30*	*51.569.580,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanga*			

			minum rapat, Belanja pejalanan dinas biasa, Belanja perjalanan dina paket luar kota, Belanja bimbingan teknis) (Orang)												
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						479.636.063,00					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanga		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanga*	*100*	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						59.636.063,00					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanga		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)		*0.00*	*0.00*	*10*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*0.00*	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				*10*	*59.636.063,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan*		

		(Paket)						*TENGAH)*	*Umum*			*Kantor*			
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*10*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*0.00*		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja peralatan dan perlengkapan kantor) (Paket)				*10*	*100.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*			
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						100.000.000,00					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*200*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*0.00*		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)				*200*	*100.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*			

1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						70.000.000,00					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*0.00*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Belanja ATK, Belanja jasa tenaga administrasi) (Paket)				*12.000*	*70.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*			
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1000*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*0.00*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu (Belanja makan minum tamu, sewa hotel, belanja perjalan dinas biasa) (Laporan)				*1.000*	*20.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Fasilitasi Kunjungan Tamu*			
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00					Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*50*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*0.00*		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (belanja perjalanan dinas biasa (luar kota), belanja perjalanan dinas dalam kota) (Laporan)				*50*	*100.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						30.000.000,00					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*0.00*		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)				*1*	*30.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*			
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah						100.000.000,00					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

		Daerah										Elektronik pada SKPD			
			Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*100*		
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Pengadaan Mebel*	*0.00*		
			Pengadaan Mebel (Unit)				*20*	*50.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Pengadaan Mebel*			
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00				Pengadaan Mebel		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*0.00*		

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya(Unit)				*2*	*50.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*			
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.176.588.417,00					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*100*		
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.577.500,00					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*100*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*0.00*		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Belanja bahan/alat kegiatan kantor, belanja paket/pengiriman) (Laporan)				*100*	*8.577.500,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*			
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						793.572.917,00					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*36*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*0.00*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (belanja tagihan air, tagihan listrik, internet) (Laporan)				*36*	*793.572.917,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*			
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*0.00*		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*			
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						364.438.000,00					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*0.00*		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Belanja bahan lainnya, Belanja ATK, belanja jasa tenaga kebersihan) (Laporan)				*4*	*364.438.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*			
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						642.863.124,00					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*100*		
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						70.000.000,00					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan*	*0.00*		

												Dinas Jabatan			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*1*	*70.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*			
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						302.625.924,00					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*8*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*0.00*		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Belanja bahan bakar, belanja pembayaran pajak, belanja pemeliharaan alat angkutan darat) (Unit)				*8*	*302.625.924,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*			
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						20.000.000,00					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan Mebel*	*0.00*		
		Pemeliharaan Mebel (Unit)				*10*	*20.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan Mebel*			
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						140.237.200,00					Pemeliharaan Mebel		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*133*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*0.00*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (belanja jasa kalibrasi, belanja internet , belanja pemeliharaan alat kantor) (Unit)				*133*	*140.237.200,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*			
1.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						10.000.000,00					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*	*0.00*		
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*			
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		*0.00*	*0.00*	*1*			*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*0.00*		

			(Unit)												
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*100.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100.000.000,00					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Persentase layanan BLUD yang berjalan baik (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*0*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						100.000.000,00					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*			*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	*0.00*		
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Unit Kerja)				*1*	*100.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*			

								TENGAH)							
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase SPM RSUD yang tercapai (%)***				***58***	**18,522,225,132.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Mendorong Daya Saing SDM dan Perekonomian Daerah**	***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD***		**300,000,000.00**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar (%)*				*77*	5.340.862.772,00	*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD *Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	*90*	300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						200.780.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Infrastruktur Dasar	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)		*2*	*0.00*	*2*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*2*		
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Unit)				*2*	*200.780.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan*			
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						100.000.000,00					Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*2*		

		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus)(Unit)				*2*	*100.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan*			
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						200.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Infrastruktur Dasar	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)		*0.00*	*2*	*2*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit , Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*2*		
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem				*35*	*100.000.000,00*	*(RSUD KAB MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan*			

		PengelolaanPersampahan) (Unit)													
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja) (Unit)				*2*	*100.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit*			
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						192.074.862,00					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*0.00*		
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, belanja alat/bahan kegiatan kantor,belanja pemeliharaan alat kantor) (Unit)				*4*	*192.074.862,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan*			

1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						100.000.000,00					Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan*	*0.00*		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Unit)				*4*	*100.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan*			
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.000.000.000,00				Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*5.00*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*5.00*		

		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Belanja alat kegiatan kantor lainnya, belanja alat kedokteran umum, belanja alat kedokteran gigi, belanja alat kesehatan umum lainnya) (Unit)				*5*	*1.000.000.000,00*	*(RSUAD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*			
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						200.000.000,00					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi*	*0.00*		
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi (Unit)				*1*	*200.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi*			

1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						224.845.000,00					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*1.00*		
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Unit)				*1*	*224.845.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*			
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						123.162.910,00				Memantapkan Infrastruktur Dasar	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal		*1.00*	*0.00*	*1*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengembangan Rumah Sakit*	*0.00*		

			1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)													
			Pengembangan Rumah Sakit (Unit)				*1*	*123.162.910,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengembangan Rumah Sakit*			
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						3.000.000.000,00				Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Pengembangan Rumah Sakit		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*100*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengadaan Obat, Vaksin dan Habis Pakai*	*0.00*		
			Pengadaan Obat, Vaksin (Belanja obat-obatan), Pengadaan Bahan Medis				*100*	*3.000.000.000,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Pengadaan Obat, Vaksin dan Habis Pakai*			

			habis pakai(Belanja BMHP) (Paket)						*TENGAH)*	*Umum*					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						13.181.362.360,00				Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Pengadaan Obat, Vaksin dan Habis Pakai		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Terpenuhinya Layanan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar (%)				*58*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Pengadaan Obat, Vaksin dan Habis Pakai*	*60*		
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						13.181.362.360,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Pengadaan Obat, Vaksin dan Habis Pakai		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		*0.00*	*13238595000.00*	*85*			*Dana Transfer Umum-Dana*			*Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	*0.00*		

			(Dokumen)							*Alokasi Umum*						
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Belanja makan minum, Belanja jasa tenaga kesehatan, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga lainnya, sewa rumah dokter) (Dokumen)				*85*	*13.181.362.360,00*	*(RSUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Operasional Pelayanan Rumah Sakit*			
	J U M L A H							**24.574.167.142,00**							401.000.000,00	

BAB V
PENUTUP

1. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini merupakan penjabaran sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian dan sasaran maupun tujuan organisasi. Melalui Rencana Kerja ini, akan diukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di RSUD Kabupaten Mamuju Tengah, dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Mamuju Tengah.

   Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja ini merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pembangunan yang diemban oleh RSUD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Kaidah Pelaksanaan

   Rencana Kerja RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun keempat dari Renstra RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026. Kaidah Pelaksanaan Renja sebagai berikut :

   1. Rencana Kerja RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah;
   2. Rencana Kerja RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit tahun anggaran 2024.

3. Rencana Tindak Lanjut

   Rencana Kerja SKPD RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun stakeholder yang berkepentingan. Semoga Rencana Kerja SKPD ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja RSUD Kabupaten Mamuju Tengah.

Mamuju Tengah, 2 Agustus 2023

Direktur RSUD Mamuju Tengah

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. NUR FITRIANA, Sp.GK.
NIP. 19861234 201412 2 001

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
MAMUJU TENGAH TAHUN

Alamat : Jln. Poros Mamuju-Palu (Samping Toko Bangunan Fajar Harapan), Dusun Tallungallo, Desa Tobadak, Mamuju Tengah, Kode Pos 91563

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026.

Rencana kerja BPBD Kabupaten Mamuju Tengah disusun sebagai salah satu dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD sesuai visi, misi, tujuan strategis, kebijakan dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan terutama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Mamuju Tengah. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan target pada Renstra, RKPD, RPJM Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dilingkungan di BPBD Kab Mamuju Tengah yang telah menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Harapan kami dokumen ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik untuk menghadapi dan mencari solusi atas permasalahan kebencanaan di Mamuju Tengah sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Mamuju Tengah.

Topoyo, 1 Agustus 2023

Kepala Pelaksana,

SACHTIAR, S.Kep
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19680915 198803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 18

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 23

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 32

2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 46

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 46

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) 47

3.2 Program dan Kegiatan 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 60

BAB V PENUTUP 65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Pengertian RENJA

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mamuju Tengah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

b. Proses Penyusunan Renja

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam

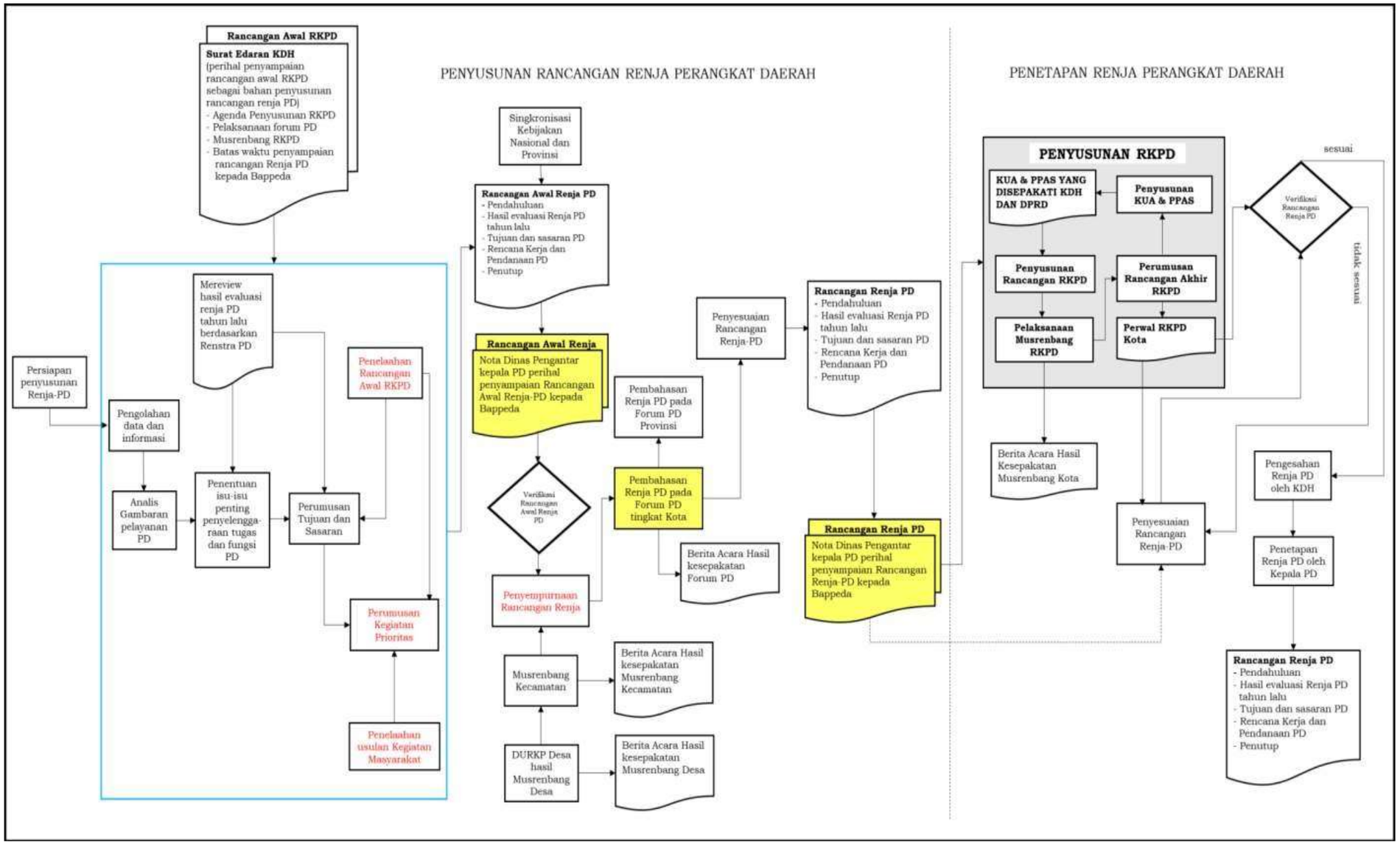
Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategik nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah ini :


PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja PD)
- Agenda Penyusunan RKPD
- Pelaksanaan forum PD
- Musrenbang RKPD
- Batas waktu penyampaian rancangan Renja PD kepada Bappeda
Persiapan penyusunan Renja-PD
Pengolahan data dan informasi
Analis Gambaran pelayanan PD
Mereview hasil evaluasi renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Perumusan Tujuan dan Sasaran
Perumusan Kegiatan Prioritas
Penelaahan usulan Kegiatan Masyarakat
Singkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Awal Renja PD
- Pendahuluan
- Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu
- Tujuan dan sasaran PD
- Rencana Kerja dan Pendanaan PD
- Penutup
Rancangan Awal Renja
Nota Dinas Pengantar kepala PD perihal penyampaian Rancangan Awal Renja-PD kepada Bappeda
Verifikasi Rancangan Awal Renja PD
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan
DURKP Desa hasil Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil kesepakatan Musrenbang Desa
Pembahasan Renja PD pada Forum PD Provinsi
Pembahasan Renja PD pada Forum PD tingkat Kota
Berita Acara Hasil kesepakatan Forum PD
Penyesuaian Rancangan Renja-PD
Rancangan Renja PD
- Pendahuluan
- Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu
- Tujuan dan sasaran PD
- Rencana Kerja dan Pendanaan PD
- Penutup
Rancangan Renja PD
Nota Dinas Pengantar kepala PD perihal penyampaian Rancangan Renja-PD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
Penyusunan KUA & PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Perwal RKPD Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kota
Verifikasi Rancangan Renja PD
sesuai
tidak sesuai
Penyesuaian Rancangan Renja-PD
Pengesahan Renja PD oleh KDH
Penetapan Renja PD oleh Kepala PD
Rancangan Renja PD
- Pendahuluan
- Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu
- Tujuan dan sasaran PD
- Rencana Kerja dan Pendanaan PD
- Penutup

c. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Keterkaitan Renja OPD dengan Renja Provinsi dilakukan secara integrative dengan dokumen - dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota Banjar.

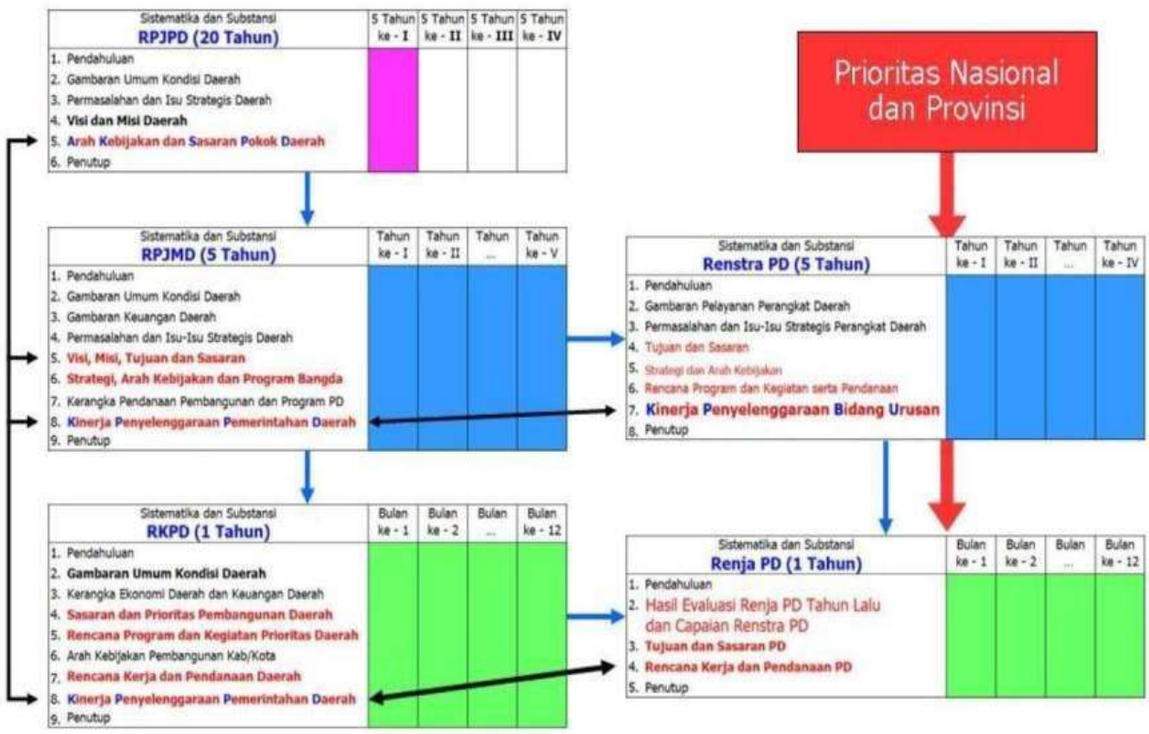
Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan

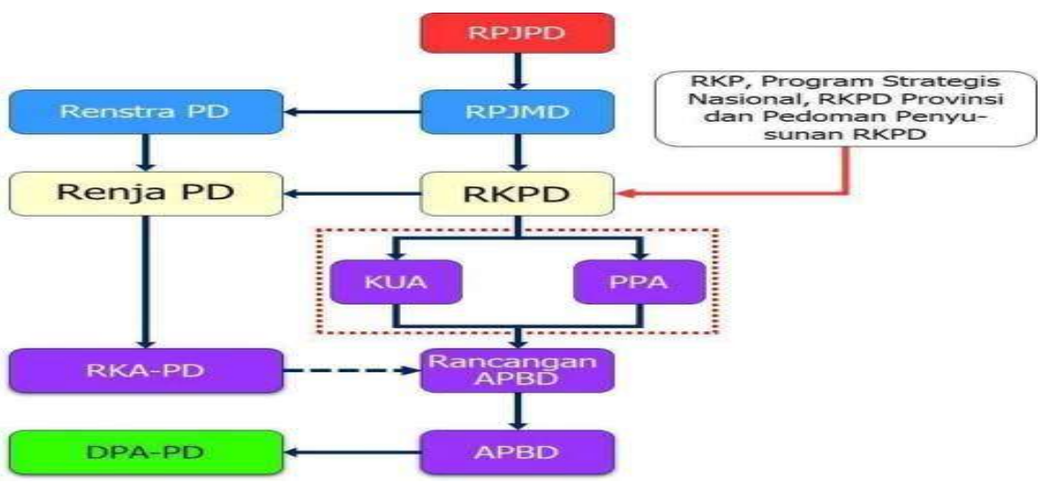
utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA PPAS, dan RAPBD.

Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian Lembaga dan Renja Kota, sebagaimana tergambar sebagai berikut :



d. Tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD

Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan proses penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut :



1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju Tengah yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
37. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah.

38. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
39. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja 2024 BPBD Kab Mamuju Tengah adalah :

1. Pedoman bagi BPBD Kab Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Mamuju Tengah dalam RPJMD 2021 – 2026;
2. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring, dan evaluasi di BPBD Kab Mamuju Tengah.

Adapun tujuan dari penuyusunan Renja BPBD Kab Mamuju Tengah adalah :

1. Sebagai landasan operasional BPBD Kab Mamuju Tengah untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Sebagai pedoman untuk melakukan monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Mamuju Tengah, adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Bab ini memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional, menjelaskan Inovasi yang sudah dimiliki dan yang akan dilaksanakan serta tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Bab ini memuat uraian tentang tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian visi misi kota, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan serta formulasi isu strategis

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini memuat tentang tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta penjelasan tabel

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan. Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan Daerah, paling sedikit mencakup urusan/ program/ kegiatan, lokasi, indikator kinerja, penerima manfaat, pagu indikatif, pagu prakiraan maju, sumber anggaran baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Rencana kerja dan pendanaan Daerah.

Bab V : Penutup

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja mutlak dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah . Terkait dengan hal tersebut maka Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 meliputi 3 hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Pelaksanaan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam proses penyusunan program dan kegiatan pada tahun mendatang, hal ini dimaksud untuk menilai dan mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dari program dan kegiatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Mamuju Tengah.

Tahapan evaluasi ini adalah merupakan tindak lanjut dari manajemen pembangunan dalam menilai atau melihat pelaksanaan program/kegiatan pembangunan selama 1 tahun anggaran sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing bidang dan sekretariat lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BPBD Mamuju Tengah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai Permendagri No.101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar SPM yaitu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Mamuju Tengah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	**Persentase urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**42,73%**	**42,73%**
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**42,55%**	**42,55%**
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,00	3,00	2,00	2,00	100%	2,00	7,00	53,85%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	1,00	25,00%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	1,00	25,00%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3,00	50,00%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	1,00	25,00%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	2,00	2,00	2,00	100%	2,00	6,00	50,00%
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	1,00	25,00%
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan PD yang tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50,00%**	**50,00%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66,00	11,00	11,00	11,00	100%	11,00	33,00	50,00%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3,00	50,00%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36,00	6,00	6,00	6,00	100%	6,00	18,00	50,00%
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Persentase administrasi barang milik daerah pada PD yang tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50,00%**	**50,00%**
				Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3,00	50,00%
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase jumlah pegawai yang terlayani**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**20,00%**	**20,00%**
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang telah lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi	5,00	0,00	1,00	1,00	100%	0,00	1,00	20,00%
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD yang tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**42,68%**	**42,68%**
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3,00	50,00%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	6,00	1,00	1,00	1,00	100%	0,00	2,00	33,33%
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3,00	50,00%
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16,00	1,00	3,00	3,00	100%	3,00	7,00	43,75%
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130,00	10,00	20,00	20,00	100%	25,00	55,00	42,31%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan PD yang diadakan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**36,84%**	**36,84%**
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	1,00	25,00%
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15,00	2,00	2,00	2,00	100%	2,00	6,00	40,00%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan PD yang disediakan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**52,17%**	**52,17%**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3,00	50,00%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11,00	2,00	2,00	2,00	100%	2,00	6,00	54,55%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3,00	50,00%
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan PD yang dipelihara sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**47,62%**	**47,62%**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3,00	50,00%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33,00	5,00	5,00	5,00	100%	5,00	15,00	45,45%
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24,00	4,00	4,00	4,00	100%	4,00	12,00	50,00%
				Program Penanggulangan Bencana	**Persentase bencana yang dapat Ditanggulangi**	**100,00%**	**76,70%**	**96,80%**	**96,80%**	**96,80%**	**100,00%**	**43,30%**	**43,30%**
				Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100,00%**	**68,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**50,00%**	**50,00%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	600,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	300,00	50,00%
				Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**23,53%**	**23,53%**
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)	1,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	1,00	100,00%
				Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	5,00	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	2,00	40,00%
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%
				Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4,00	0,00	1,00	1,00	100%	0,00	1,00	25,00%
				Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	6,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3,00	50,00%
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50,00	10,00	0,00	0,00	0%	10,00	20,00	40,00%
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	1,00	33,33%
				Kegiatan Pelayanan Penyelamanatan dan Evakuasi Korban	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**50,79%**	**50,79%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3,00	50,00%
				Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	305,00	30,00	75,00	75,00	100%	50,00	155,00	50,82%
				Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	6,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3,00	50,00%
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase daerah rawan bencana yang Dibina**	**79,46%**	**25,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50%**	**0,00%**	**40,00%**	**40,00%**
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1,00	0,00	1,00	1,00	100%	0,00	1,00	100,00%
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sinstem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	4,00	0,00	1,00	1,00	100%	0,00	1,00	25,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Mamuju Tengah

Evaluasi kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan periode selanjutnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Capaian kinerja pelayanan BPBD Kab. Mamuju Tengah sebagaimana tertuang dalam rencana strategis telah sesuai dengan target. Pencapaian tersebut diperoleh atas usaha dan kerjasama para pemangku kepentingan. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih belum ada karena BPBD Kabupaten Mamuju Tengah baru Menyusun PERDA tentang Penanggulangan Bencana pada tahun 2022, sedangkan aturan tersebut belum disahkan oleh DPR. Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Malang sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Malang terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

1. Jumlah Warga yang memperoleh layanan informasi berupa :
   a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

- Lamba - lamba	=	24	Orang
- Lara	=	24	Orang
- Salubiro	=	24	Orang
- Kambunong	=	24	Orang
- Bambadaru	=	24	Orang
Total		**120**	**Orang**

   b. Pemasangan Papan Peringatan Dini

- Pangalloang	=	1.862	Orang

- Tabolang = 3.553 Orang
- Salupangkang IV = 403 Orang
- Budong - budong = 2.314 Orang
- Salule'bo = 3.211 Orang
- Karossa = 7.306 Orang
- Kambunong = 3.073 Orang
- Lara = 2.279 Orang
- Salubiro = 1.486 Orang
- Sejati = 1.111 Orang
- Batu Parigi = 6.030 Orang
- Lumu = 2.764 Orang
- Kire = 3.226 Orang
- Babana = 7.438 Orang
- Pangale = 2.100 Orang
- Lamba - lamba = 1.180 Orang
- Kombiling = 1.770 Orang

Total **51.106 Orang**

2. Seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah masuk dalam kawasan rawan bencana gempa bumi jumlah warga yang masuk dalam kawasan sebanyak **138.970** orang.

3. Target pembuatan dokumen KRB tahun 2022 berupa : 1 Dokumen (sudah dibuat pada tahun 2018)

4. Target pembuatan dokumen RPB tahun 2022 : 1 dokumen (Masih berupa dokumen dan belum disahkan)

5. Target pembuatan dokumen Rencana kontijensi tahun 2022 : tidak ada.

6. Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut dalam pelatihan di tahun 2022 : tidak ada dikarenakan tidak adanya anggaran pelatihan.

7. Layanan **PUSDALOPS** di Kabupaten Mamuju Tengah belum ada, yang ada hanya layanan **PUSDATIN** dimana pelayanannya dilakukan memalui Media Online dan Media Cetak (Buletin/Brosur Edukasi Gempa, Prakiraan Cuaca dan laporan update kejadian bencana) yang penyebarannya mencakup di 5 kecamatan Kabupaten Mamuju Tengah (Jumlah warga **138.970** orang).

8. Pada tahun 2022 dilakukan pembagian peralatan perlindungan berupa :

- Tenda Korban Bencana Angin Putting Beliung di Desa Tumbu = 4 Unit Tenda Jumbo

9. Pada tahun 2022 terdapat bencana dengan **status Darurat Bencana,** Dokumentasi terlampir.

10. Jumlah Petugas di BPBD pada tahun 2022 yang aktif dalam penanganan darurat bencana sebanyak **92** orang terdiri dari :

- PNS = 13 orang
- Tenaga Kontrak = 79 orang

Total **= 92 orang**

Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi pada kejadian bencana tahun 2022 : 78 Orang

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada table di bawah :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mamuju Tengah

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dokumen KRB sudah dibuat pada tahun 2018
			Persentase jumlah penduduk dikawasanan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	26,00%	36,86%	100,00 %	100,00 %	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana dan Pemasangan Papan peringatan dini
			Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/illegal	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	100,00 %	Dikarenakan minimnya anggaran pada tahun 2021 dan 2022 maka Dokumen RPB akan disusun tahun 2023
			Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	100,00 %	Dikarenakan minimnya anggaran pada tahun 2021 dan 2022 maka Dokumen Renkon akan disusun tahun 2023

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah aparatur dan warga negara dikawasan rawan bencana yang ikut pelatihan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	0,00%	100,00 %	100,00 %	Pelatihan dilaksanakan pada tahun 2021 dan Tidak dilakukan pelatihan pada tahun 2022
			Persentase Jumlah warga negara dikawasan rawan bencana yang ikut pelatihan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	100,00 %	Tidak dilakukan gladi pada tahun 2021 dan 2022
			Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Layanan PUSDALOPS di Kabupaten Mamuju Tengah belum ada, yang ada hanya layanan PUSDATIN dimana pelayanannya dilakukan memalui Media Online dan Media Cetak
			Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	18,00%	0,00%	100,00 %	100,00 %	Pada tahun 2021 terdapat pembagian peralatan perlindungan untuk COVID-19
			Persentase Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	100,00 %	Tidak ada status KLB pada tahun 2022

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Pada Tahun 2021 dan 2022 BUPATI mengeluarkan STATUS DARURAT BENCANA
			Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	ASN dan TRC BPBD selalu aktif dalam penanganan darurat bencana
			Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dokumen Rekap Data Bencana Tahun 2022

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Mamuju Tengah

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2016, BPBD Kabupaten Mamuju Tengah pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Mamuju Tengah maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Mamuju Tengah harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik pra, tanggap darurat maupun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana;
2. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Mamuju Tengah;
3. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Sulawesi Barat dan BPBD kabupaten/Kota;
4. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan pemerintah pusat untuk tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan;

5. Masih terbatasnya sarana prasarana PB seperti peralatan penanggulangan bencana, logitsik, material kebencanaan yang lainnya;
6. Banyaknya desa yang termasuk daerah rawan bencana sedangkan fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana di mamuju tengah sangat terbatas;
7. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang PB di Mamuju Tengah;
8. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Mamuju Tengah. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat, Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial, Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah;
9. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah;
10. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Mamuju Tengah;
11. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Kabupaten Mamuju Tengah jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Mamuju Tengah yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebancanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

1. Tantangan

Penanggulangan bencana merupakan isu bersama sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Paradigm pengurangan risiko bencana yang menekankan pada kegiatan penanggulangan bencana dilakukan sejak dini, sejak tidak ada bencana, sangat menentukan dan dapat dilihat tingkat keberhasilannya ketika terjadi bencana. Indicator sederhananya adalah dampak negatifnya menjadi sangat kecil baik kerugian,

kerusakan harta bencana, dan infrstruktur maupun korba jiwa manusia.

Tingginya ancaman bencana di Mamuju Tengah perlu disikapi dengan meningkatkan kesiapsiagaan aparatur yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana PB pada semua jenis bencana dan disosialisasikan kepada selurah pemangku kepentingan PB.

Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana Mamuju Tengah oleh BPBD Kabupaten Mamuju Tengah diharapkan mampu menjadi Pusat data dan Informasi bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan komunikasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Mamuju Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Mamuju Tengah adalah:

a. Tingkat kerawanan bencana di Mamuju Tengah sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Mamuju Tengah;
b. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan, seperti aktivitas pemanfaatan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi, Rusaknya hutan dan kawasan lindung diatasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun menyebabkan semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas pasir permukaan dan sedimentasi;
c. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;

d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;

e. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;

f. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Mamuju Tengah sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penylenggaraan PB yang sangat luas. Distribusi kompetensi pegawai yang ada masih belum ideal antara kompetensi dengan bidang/ tanggung jawab pekerjaan.

g. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;

h. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;

i. Partisipasi dunia usaha melalui alokasi anggaran CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

2. Peluang

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur. Sesuai dengan UU maka BPBD Kabupaten Mamuju Tengah mempynyai 3 (tiga) fungsi utama PB yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Mamuju Tengah memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana;

b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PSDA dan Tata ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman dan dinas lain yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis. BPBD mengkoordinasikan program terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam OPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan;

c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incident commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lingkungan, ekonomi, pembangunan, energi, pertanian, perikanan, peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting. Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini, diharapkan bahwa strategi regional dalam adaptasi dan mitigasi akan dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim.

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam system penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (Lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

a. Legislasi

Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB. Di tingkat provinsi

ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjukan teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. Upaya yang dilakukan pada prioritas di Mamuju Tengah adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi;
2) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu :
   a) rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa, anggaran;
   b) rencana kontijensi: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder. Pada saat darurat, rencana konyinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan;
   c) rencana pemulihan : pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran;

c. Kelembagaan

Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal, seperti Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB, Forum PRB Provinsi atau Forum PRB Kabupaten/Kota.

d. Pengembangan kapasitas

Kerangka Pengurangan Risiko Bencana pasca 2015 telah diadopsi pada saat penyelenggaraan Konferensi Dunia ke-3 untuk Pengurangan Risiko Bencana, yang dilaksanakan pada tanggal 14 - 18 Maret 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang. Selama Konferensi, seluruh negara peserta juga menegaskan komitmen mereka untuk pengurangan risiko bencana dan pembangunan ketahanan bencana yang harus ditangani secara serius dalam konteks

pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan dan, jika perlu, untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan, perencanaan, program kerja, dan anggaran di semua tingkat dan dipertimbangkan dalam kerangka yang relevan. Kesepakatan dam hasil konferensi tersebut merupakan Kerangka aksi yang dikenal dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) merupakan kesepakatan internasional dalam rangka pengurangan risiko bencana tahun 2015-2030 sebagai lanjutan dari Kerangka Aski Hyogo (Hyogo Framework for Action).Hasil yang diharapkan sampai dengan 15 tahun dari SFDRR adalah Pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana.

e. Pendanaan

Pendanaan dalam penangulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1) Pendanaan dari pemerintah.
   a. Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana DIPA (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan) termasuk Dana Alokasi Khusus,
   b. Kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontinjensi
   c. Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL; Digunakan untuk bantuan kemanusiaan untuk penanganan dan siaga darurat bencana.
   d. Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman (build back better and safer)
2) Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional.

Mendasari permasalahan, tantangan dan peluang-peluang yang ada, maka isu-isu prioritas antara lain adalah:

1. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Mamuju Tengah;

2. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Sulawesi Barat dan BPBD kabupaten/Kota;
3. Kapasitas gedung untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana belum optimal;
4. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
5. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Mamuju Tengah;
6. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Mamuju Tengah;
7. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di Mamuju Tengah dibandingkan dengan banyaknya desa yang rawan dan risiko bencana;
8. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Prov Mamuju Tengah;
9. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Mamuju Tengah;
10. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Mamuju Tengah;
11. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Mamuju Tengah antara lain:

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya Upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :
   a. Kegiatan Penyusunan Peta Resiko Bencana Kabupaten Tengah;
   b. Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
   c. Kegiatan Gladi Manajemen Bencana;
   d. Kegiatan Pengembangan Forum Pengurangan Risko Bencana (PRB) Kabupaten Mamuju Tengah;
   e. Kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana;
   f. Kegiatan Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB);

g. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR)

untuk Reduksi Bencana;

h. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi (Contingency Plan);

i. Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK);

j. Kegiatan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana;

k. Kegiatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning

System) berbasis Masyarakat.

2. Penanganan Darurat Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

a. Kegiatan Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan

Penanganan Pengungsi;

b. Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR Melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian operasional kegiatan kedaruratan bencana;

c. Kegiatan SAR Pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Sedekah laut/Sura antisipasi dan partisipasi BPBD Mamuju Tengah dalam berbagai event kegiatan kemasyarakatan yang bersifat kebudayaan maupun keagamaan terutama pada event lebaran dan sura /sedekah laut dan telibat dalam posko gabungan natal dan tahun baru;

d. Kegiatan Evaluasi, Pemantauan, dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat Kesiapan pemerintah menghadapi ancaman bencana di Mamuju Tengah;

e. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana (Posko). Posko dilakukan melalui sistem piket petugas selama 24jam/7 hari dengan selama 1 tahun penuh untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan pelaporan kejadian bencana;

f. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat Bencana.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan dan Pembangunan yang Lebih Baik. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

a. Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana;
b. Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana;
c. Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jateng;
d. Kordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Mamuju Tengah Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
e. Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi PascaBencana;
f. Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian (Damage and Losses
Assesment) dan JITU PB;
g. Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Mamuju Tengah.

4. Logistik dan Peralatan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana, Peralatan dan Logistik Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

a. Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana, dilakukan pada saat tidak ada bencana dan bahan logistik dan peralatan difungsikan sebagai antisipasi dan buffer stock logistik kebencanaan. Stok logistik tersebut didorong di Kabupaten/Kota dan Bakorwil untuk mempermudah mobilisasi dan dropping logistik ke lokasi bencana;
b. Kegiatan Koordinasi, dan Konsolidasi Logistik Bencana, dilaksanakan sebagai bentuk saling koordinasi antar kabupaten/kota;
c. Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB dilaksanakan untuk memantau dan memberikan pendampingan agar pengelolaan logistik dan peralatan bencana sesuai dengan standar dan memenuhi kriteria yang aman penyimpanan;
d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Mamuju Tengah Merupakan sarana koordinasi dan komunikasi antar BPBD sebagai wujud tanggung Mamujub bersama dalam kebencanaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T- C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Mamuju Tengah

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(11)*	*(12)*
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	BPBD	***Persentase urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)***	***100***	**2.035.929.845,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	BPBD	***Persentase urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)***	***100***	**2.507.500.000,00**	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu (%)*	*100*	78.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu (%)*	*100*	57.000.000,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*2*	40.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*2*	35.000.000,00	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)*	*1*	7.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)*	*1*	4.000.000,00	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPBD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)*	*1*	7.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPBD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)*	*1*	4.000.000,00	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPBD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)*	*1*	7.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPBD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)*	*1*	4.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(11)*	*(12)*
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPBD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)*	*1*	7.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPBD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)*	*1*	4.000.000,00	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	*2*	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	*2*	4.000.000,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*1*	5.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*1*	2.000.000,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD	*Persentase Administrasi Keuangan PD yang Tepat Waktu (%)*	*100*	929.469.237,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD	*Persentase Administrasi Keuangan PD yang Tepat Waktu (%)*	*100*	1.495.500.000,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)*	*11*	901.969.237,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)*	*11*	1.450.000.000,00	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPBD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	*11*	5.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPBD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	*11*	5.000.000,00	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	*1*	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	*1*	5.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(11)*	*(12)*
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BPBD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)*	*6*	17.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BPBD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)*	*6*	35.500.000,00	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPBD	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Tepat Waktu (%)*	*100*	39.500.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPBD	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Tepat Waktu (%)*	*100*	36.500.000,00	
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPBD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*1*	5.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPBD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*1*	5.000.000,00	
1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	BPBD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*1*	26.500.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	BPBD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*1*	26.500.000,00	
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	*1*	7.000.000,00						
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPBD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*1*	1.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPBD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*1*	5.000.000,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPBD	*Persentase Jumlah Pengawai yang terlayani (%)*	*100*	102.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPBD	*Persentase Jumlah Pengawai yang terlayani (%)*	*100*	85.000.000,00	
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPBD	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*	*1*	5.500.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPBD	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*	*1*	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(11)*	*(12)*
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*	*1*	75.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*	*1*	75.000.000,00	
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPBD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*	*11*	11.000.000,00						
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPBD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*	*5*	11.000.000,00						
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD	*Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu (%)*	*100*	271.900.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD	*Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu (%)*	*100*	308.000.000,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1*	12.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1*	5.000.000,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1*	74.400.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1*	35.000.000,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	*1*	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	*1*	3.000.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPBD	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*1*	10.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPBD	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*1*	7.000.000,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	BPBD	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*1*	10.000.000,00						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	*3*	10.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	*3*	18.000.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	*25*	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	*25*	240.000.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu (%)*	*100*	318.544.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu (%)*	*100*	243.000.000,00	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*	*5*	196.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*	*5*	43.000.000,00	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	BPBD	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*	*8*	3.720.000,00	Pengadaan Mebel	BPBD	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*	*8*	25.000.000,00	
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*	*3*	118.824.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*	*3*	175.000.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	*Persentase Jasa Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu (%)*	*100*	116.526.608,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	*Persentase Jasa Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu (%)*	*100*	117.500.000,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*1*	15.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*1*	17.500.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*1*	57.754.608,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*1*	75.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(11)*	*(12)*
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*1*	43.272.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*1*	25.000.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dipelihara sesuai standar (%)*	*100*	179.490.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dipelihara sesuai standar (%)*	*100*	165.000.000,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*1*	42.400.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*1*	60.000.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*5*	130.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*5*	100.000.000,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*4*	7.090.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*4*	5.000.000,00	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Kab. Mamuju Tengah	***Persentase warga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar (%)***	***100***	**4.827.718.507,00**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Kab. Mamuju Tengah	***Persentase warga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar (%)***	***100***	**3.960.000.000,00**	
		Kab. Mamuju Tengah	***Persentasewarga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar ; Persentase Desa Tangguh Bencana (%)***	***100***		-	Kab. Mamuju Tengah	***Persentasewarga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar ; Persentase Desa Tangguh Bencana (%)***	***100***		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)*	*100*	54.000.000,00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)*	*100*	50.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(11)*	*(12)*
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)*	*100*	54.000.000,00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)*	*100*	50.000.000,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Mamuju Tengah	*Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)*	*100*	2.394.965.000,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Mamuju Tengah	*Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)*	*100*	2.710.000.000,00	
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)*	*1*	300.000.000,00	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)*	*1*	1.550.000.000,00	
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)*	*10*	65.505.000,00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)*	*10*	50.000.000,00	
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)*	*0*	-	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)*	*1*	120.000.000,00	
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)*	*100*	400.000.000,00	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)*	*100*	50.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(11)*	*(12)*
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)*	*3*	50.000.000,00	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)*	*3*	100.000.000,00	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)*	*75*	303.900.000,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)*	*100*	50.000.000,00	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)*	*1*	1.275.560.000,00	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)*	*1*	790.000.000,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Mamuju Tengah	*Persentase warga Negara yangemperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)*	*100*	854.903.507,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Mamuju Tengah	*Persentase warga Negara yangemperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)*	*100*	930.000.000,00	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)*	*1*	744.903.507,00	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)*	*1*	830.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(11)*	*(12)*
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)*	*50.00*	60.000.000,00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)*	*50.00*	70.000.000,00	
1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)*	*1*	50.000.000,00	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)*	*1*	30.000.000,00	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Mamuju Tengah	*Persentase daerah rawan bencana yang dibina (%)*	*100*	1.523.850.000,00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Mamuju Tengah	*Persentase daerah rawan bencana yang dibina (%)*	*100*	270.000.000,00	
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)*	*1*	100.000.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)*	*1*	60.000.000,00	
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)*	*1*	50.000.000,00	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)*	*1*	15.000.000,00	
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)*	*1*	70.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)*			
1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)*	*1*	1.303.850.000,00	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)*	*1*	195.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(11)*	*(12)*
JUMLAH					**6.863.648.352,00**					**6.467.500.000,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di mamuju tengah dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Mekanisme perencanaan pembangunan telah dirancang agar dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan rencana pembangunan telah ditempuh melalui beberapa mekanisme usulan, yaitu kegiatan musrenbang, aspirasi langsung kepada Bupati saat kujungan ke lapangan, aspirasi melalui hasil Reses DPRD, dll. Usulan terkait program dan kegiatan dari masyarakat hampir tidak ada selama proses tersebut.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Mamuju Tengah

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	*(kecamatan topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	*1 Unit*	
		(Desa Karossa, Kec. Karossa, KAB. MAMUJU TENGAH)		*1 Unit*	
		(Dusun Babana Utara sampai Dusun Pambutungan, Desa Babana, Kec. Budong - budong, KAB. MAMUJU TENGAH)		*100 Meter*	
		(Desa Topoyo, Kec. Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)		*300 Meter*	
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*(Dusun Karossa Desa Karossa Kecamatan Karossa, Karossa)*	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	*100 Meter*	
		(Desa Salubiro, Kec. Karossa, KAB. MAMUJU TENGAH)		*100 Meter*	

3	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	*(Tanah Merah Timur, Desa Bojo, Kec. Budong - budong, KAB. MAMUJU TENGAH)*	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	700 Meter	

Seiring dengan keterbukaan informasi public, dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah membuka beberapa sarana untuk membangun sinergi dan komunikasi pembangunan dengan masyarakat. Kanal yang dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten mamuju tengan antara lain melalui sms, website, media social (twitter, facebook, instagram, whatsapp, dll). Selain ditingkat pemerintah provinsi. Meskipun terhubung secara struktur, BPBD Kabupaten Mamuju Tengah juga mempunyai kanal tersendiri melalui berbagai media yang dimanfaatkan untuk jalur komunikasi dua arah sehingga penanganan bencana di Mamuju Tengah dapat berjalan dengan efektif, efisien, cepat, tanggap.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia berkembang sesuai dengan pembangunan nasional. Arah kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan skala pr ioritas pembangunan jangka menengah. Skala prioritas ini termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2005-2025. Arah kebijakan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2024 yaitu: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Arah kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Periode 2020-2024 adalah: "Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan"

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Kolaborasi akan mengarah kepada terciptanya teknologi keselamatan bencana dan system pendukung pengambilan keputusan yang tepat, akurat, dan handal.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugianekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasioanal Penanggulangan Bencana adalah : "Menurunnya Kerugian Ekonomi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana"

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana yang terdiri dari :

1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana dengan strategi :
   a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;

b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin professional, transparan, dan akuntabel.

2. Peningkatan sinergi antara kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi; penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrase kolaboratif multi pihak.

3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:

a. Peningkatan sarana prasarana mitigasi dan pengurangan risiko bencana;

b. Penguatan system kesiapsiagaan bencana;

c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang kolaboratif.

d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.

4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: penguatan system dan operasionalisasi penanganan darurat bencana;

5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: percepatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja)

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Tujuan :

1. Menurunkan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Meningkatkan tata kelola pada Badan Penanggulangan Benncana Daerah

Kabupaten Mamuju Tengah.

Sasaran:

1. Meningkatnya Indek ketahanan daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah merupakan OPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang dimaksud terdiri dari 3 sub urusan yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi. Tata cara penerapan SPM Sub-Urusan bencana dilakukan dengan tahapan :

1. Pengumpulan Data;
2. Penghitngan kebutuhan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun dokumen perencanaan memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan yang dimuat dalam dokumen perencanaan.

Pada Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Merencanakan 2 Program 12 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Lokasi kegiatan disebar ke beberapa kecamatan untuk mendukung terlaksananya kegiatan komunikasi informasi dan edukasi masyarakat yang masuk kedalam kawasan rawan bencana. Peningkatan SDM tenaga penanganan bencana juga direncanakan untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan operasi di lapangan pada saat terjadinya bencana. Penguatan regulasi urusan bencana perlu terus ditingkatkan dengan menyusun dokumen rencana kontingensi yang menjadi daasar dalam melaksanakan fungsi komando pada saat terjadi bencana.

Program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilihat pada table di bawah :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**6.863.648.352,00**				**6.538.828.352,00**
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**6.863.648.352,00**				**6.538.828.352,00**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)***	BPBD	***100***	**2.035.929.845,00**			***100***	**1.726.529.845,00**
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu (%)*	BPBD	*100*	78.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*100*	78.000.000,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	BPBD	*2*	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*2*	40.000.000,00
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	BPBD	*1*	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	7.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*	BPBD	*1*	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	7.000.000,00
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*	BPBD	*1*	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	7.000.000,00
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*	BPBD	*1*	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	7.000.000,00
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	BPBD	*2*	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*2*	5.000.000,00
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	BPBD	*1*	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	5.000.000,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD yang Tepat Waktu (%)*	BPBD	*100*	929.469.237,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*100*	929.469.237,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	BPBD	*11*	901.969.237,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*11*	901.969.237,00
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	BPBD	*11*	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*11*	5.000.000,00
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	BPBD	*1*	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	5.000.000,00
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	BPBD	*6*	17.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*6*	17.500.000,00
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Tepat Waktu (%)*	BPBD	*100*	39.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*100*	32.500.000,00
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	BPBD	*1*	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	5.000.000,00
1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	BPBD	*1*	26.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	26.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	BPBD	*1*	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	BPBD	*1*	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	1.000.000,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Pengawai yang terlayani (%)*	BPBD	*100*	102.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*100*	80.500.000,00
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*	BPBD	*1*	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	5.500.000,00
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*	BPBD	*1*	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	75.000.000,00
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*	BPBD	*11*	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*	BPBD	*5*	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu (%)*	BPBD	*100*	271.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*100*	187.500.000,00
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	BPBD	*1*	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	12.000.000,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	BPBD	*1*	74.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	-
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	BPBD	*1*	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	5.000.000,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	BPBD	*1*	10.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	10.500.000,00
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	BPBD	*1*	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	BPBD	*3*	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*3*	10.000.000,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	BPBD	*25*	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*25*	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu (%)* *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*	BPBD	*100*	318.544.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*100*	122.544.000,00
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*	BPBD	*5*	196.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*5*	-
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*	BPBD	*8*	3.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*8*	3.720.000,00
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*	BPBD	*3*	118.824.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*3*	118.824.000,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu (%)*	BPBD	*100*	116.526.608,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*100*	116.526.608,00
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	BPBD	*1*	15.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	15.500.000,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	BPBD	*1*	57.754.608,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	57.754.608,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	BPBD	*1*	43.272.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	43.272.000,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dipelihara sesuai standar (%)*	Kab. Mamuju Tengah	*100*	179.490.000,00			*100*	179.490.000,00
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	Kab. Mamuju Tengah	*1*	42.400.000,00			*1*	42.400.000,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	Kab. Mamuju Tengah	*5*	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*5*	130.000.000,00
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	Kab. Mamuju Tengah	*4*	7.090.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*4*	7.090.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Persentase warga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar (%)***	Kab. Mamuju Tengah	***100***	**4.827.718.507,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		***100***	**4.812.298.507,00**
		Persentasewarga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar ; Persentase Desa Tangguh Bencana	Kab. Mamuju Tengah	***100***		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		***100***	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)*	Kab. Mamuju Tengah	*100*	54.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*100*	54.000.000,00
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi,*	Kab. Mamuju Tengah	*100*	54.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*100*	54.000.000,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)*	Kab. Mamuju Tengah	*100*	2.394.965.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*100*	2.449.545.000,00
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	*Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)*	Kab. Mamuju Tengah	*1*	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	600.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)*	Kab. Mamuju Tengah	*10*	65.505.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*10*	65.505.000,00
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	*Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)*	Kab. Mamuju Tengah	*0*	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*0*	100.000.000,00
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)*	Kab. Mamuju Tengah	*100*	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*100*	400.000.000,00
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)*	Kab. Mamuju Tengah	*3*	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*3*	50.000.000,00
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*	Kab. Mamuju Tengah	*75*	303.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*75*	604.040.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)*	Kab. Mamuju Tengah	*1*	1.275.560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	630.000.000,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase warga Negara yangemperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	Kab. Mamuju Tengah	*100*	854.903.507,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*100*	854.903.507,00
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat*	Kab. Mamuju Tengah	*1*	744.903.507,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	744.903.507,00
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)*	Kab. Mamuju Tengah	*50.00*	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*50.00*	60.000.000,00
1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	*Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)*	Kab. Mamuju Tengah	*1*	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase daerah rawan bencana yang dibina (%)*		*100*	1.523.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*100*	1.453.850.000,00
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)*		*1*	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	100.000.000,00
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)*		*1*	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	50.000.000,00
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)*		*1*	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)*		*1*	1.303.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1*	1.303.850.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program BPBD Kab Mamuju Tengah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan program untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan BPBD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Indicator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menetukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program, sebagai bahan pengendalian dan evalasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang yang telah disertai kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kineja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Tabel T-B.36

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.467.500.000,00**					
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**6.467.500.000,00**					
1	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)***				***100***	**2.507.500.000,00**					
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu (%)*				*100*	57.000.000,00					
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	35.000.000,00					
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	4.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	4.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	4.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	4.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*1*	*1.00*	*1.00*	4.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*1*	*1*	2.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD yang Tepat Waktu (%)*				*100*	1.495.500.000,00					
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*13*	*13*	*13*	1.450.000.000,00					
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	5.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	5.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*1.00*	*2.00*	43.000.000,00					
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*8*	25.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*3*	*3*	*3*	175.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu (%)*				*100*	117.500.000,00					
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	17.500.000,00					
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	75.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	25.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dipelihara sesuai standar (%)*				*100*	165.000.000,00					
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*1*	*1*	*1*	60.000.000,00					
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*5*	*5*	*5*	100.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*4*	*4*	*4*	5.000.000,00					Pegawai BPBD Mamuju Tengah
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Persentase warga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar (%)***				***100***	**3.960.000.000,00**				**Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif**	
			Persentasewarga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar ; Persentase Desa Tangguh Bencana (%)				***100***						***Pegawai BPBD Mamuju Tengah***
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)*				*100*	50.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)*		*120*	*100*	*100*	50.000.000,00					
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)*				*100*	2.710.000.000,00				Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif	
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	*Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)*		*1*	*1*	*1*	1.550.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif	
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*10*	50.000.000,00					Masyarakat Dusun Lamba-lamba
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	*Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)*		*0*	*1*	*1*	120.000.000,00					TRC BPBD Mamuju Tengah
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*100*	50.000.000,00					Masyarakat Kab. Mamuju Tengah
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*3*	100.000.000,00					Masyarakat Kab. Mamuju Tengah
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)*		*0.00*	*0.00*	*100*	50.000.000,00					Masyarakat Kab. Mamuju Tengah
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)*		*1*	*1*	*1*	790.000.000,00				Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif	Masyarakat Kab. Mamuju Tengah
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase warga Negara yangemperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)*				*100*	930.000.000,00				Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	830.000.000,00					
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)*		*78.00*	*50.00*	*50.00*	70.000.000,00					Masyarakat Kab. Mamuju Tengah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	*Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	30.000.000,00					Masyarakat Kab. Mamuju Tengah
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase daerah rawan bencana yang dibina (%)*				*100*	270.000.000,00					
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)*		*1*	*0.00*	*1*	60.000.000,00					
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)*		*1*	*0.00*	*1*	15.000.000,00					Lintas Sektor OPD
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	195.000.000,00					Masyarakat Kab. Mamuju Tengah
	J U M L A H							**6.467.500.000,00**					

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi, sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan. Sebagai sebuah dokumen rencana, setiap tahapan telah diusahakan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan situasi terkini. Namun jika terdapat situasi-situasi yang masih belum diperhitungkan atau berpengaruh pada perjalanan dokumen ini maka dokumen rencana ini dapat ditinjau kembali untuk perbaikan dan penyesuaian kondisi.

Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terkait kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berpengaruh terhadap strategi dan pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten. Dokumen Renja BPBD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) dan angggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disusun diharapkan dapat terealisasi dan memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi masyarakat Mamuju Tengah yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana. Salam tangguh dan salam kemanusiaan.

Topoyo, 1 Agustus 2023

Kepala Pelaksana,

[illegible]CHTIAR, S.Kep
[illegible]angkat : Pembina Tk. I
NIP. 19680915 198803 1 005

RANWAL (RENJA)
TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAMUJU TENGAH

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawasi Mamuju Tengah-Palu Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, Kode Pos. 91564

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 mengacu pada Kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

Program dan Kegiatan yang direncanakan Awal di dalam Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tobadak,

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten
Mamuju Tengah

Hj. Nahda, S.Kep., MM
Pangkat: Pembina TK.I,IV/b
NIP. 19660501 198602 2 009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 8

1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Tahun Berjalan 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 16

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 20

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 22

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 31

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional..... 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 32

3.3 Program Dan Kegiatan 33

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 40

BAB V PENUTUP..... 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Dokumen Renja 2024.

1.1.1. Pengertian Rencana Kerja (RENJA)

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah selanjutnya disebut Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2021.

Dalam penyusunan RENJA SKPD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari Program/ Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan: 1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD. 2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan. 3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan. 4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Persiapan Penyusunan Renja ¬ Pembentukan Tim Penyusun Renja ¬ Orientasi mengenai Renja ¬ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja ¬ Pengumpulan Data dan Informasi b. Pengolahan Data dan Informasi Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja. c.

Tahap Perumusan Rancangan Renja Pengolahan data dan informasi;¬ Analisis gambaran pelayanan OPD;¬ Mereview hasil evaluasi pelaksanan Renja OPD tahun lalu berdasarkan¬ Renstra OPD; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Telaah terhadap rancangan awal RKPD¬ Perumusan tujuan dan sasaran;¬ Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;¬ Perumusan kegiatan prioritas;¬ Halaman | 8 Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dam Keluarga Berencana Tahun 2024 Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;¬ Penyempurnaan rancangan kerja OPD;¬ Pembahasan forum OPD; dan¬ Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan¬ sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah. d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD f. Penetapan Renja.

1.1.3. Keterkaitan antara Dokumen Renja dengan renstra Perangkat Daerah dan RKPD

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan

Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa pimpinan Kementerian/Lembaga menentukan Rencana Strategis (Renstra) K/L setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor4301);
12. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu, dan kerangka pengeluaran jangka menengah
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
22. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
23. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
24. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
26. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
27. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
29. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

30. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota
32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
39. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
45. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
46. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Rancangan Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB (Mendasarkan UU. 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 dan Pewakilan BKKBN No 163 Tahun 2016
47. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
48. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (sebagai dasar revisi Renstra);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
53. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verfikasi, dan Validasi Pemtakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah

54. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
55. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah. Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
56. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur,Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota Lampiran Peraturan
57. Kepala Bkkbn Nomor: 163 Tahun 2016 Tanggal :15 Agustus 2016;Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah No 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026
59. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Menjamin Konsistensi pencapaian program prioritas sesuai dengan kebutuhan.
2. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan secara kronologis dan berkelanjutan.
3. Memberi landasan penentuan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 Memenuhi kebutuhan target kinerja sesuai kondisi sasaran program yang ditetapkan pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

a. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

b. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

Bab ini menjelaskan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPDTahun Lalu dan Tahun berjalan, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, PenelahaanUsulan Program dan Kegiatan.

c. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini berisi tentang Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, Sasaran Renja serta Program dan Kegiatan.

d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Bab ini menjelaskan tentang rencana kerja dan pendanaan yang sesuai dengan renstra

e. BAB V. PENUTUP
Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut Input, Output dan Outcome.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab.Mamuju Tengah, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   -

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   1. Program pembinaan Keluarga Berencana
   2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
   3. Program Pengendalian Penduduk
   4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   5. Program Perlindungan Perempuan
   6. Program Perlindungan Anak
   7. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak
   8. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
   9. Program Khusus Perlindungan Anak
   10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

c. Faktor-Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan

   Beberapa faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah :

   1. Luasnya wilayah binaan penyuluh KB.
   2. Terciptanyan koordinasi antara Instansi terkait.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Triwulan IV, pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Tengah ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan OPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut. Evaluasi Pelaksanaan keseluruhan Program dan kegiatan urusan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun Tahun Lalu dan Tahun Berjalan dapat dilihat pada tabel T.C-29

Evaluasi

Evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah lingkup kabupaten
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Kleuarga Berencana
Kabupaten Mamuju Tengah
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Unit SKPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV				
				K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/5*100	15
1.	Meningkatnya prevalensi kepesertaan KB aktif dan keluarga sejahtera	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	55%	80,16%	22%		16,57%	16,61%	16,65%	16,65%	16,65%	30	*Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan Kabupaten Mamuju Tengah*

		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi di faskes**	**100%**	**100%**	**100%**		**100,00%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100%**	**100**	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya(DAK)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (laporan)	13	13	13			12	12	12	13	100	
		Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (orang)	26									0	

		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)(DAK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (orang)	19702	15803	19302			17676	17676	17676	15803	80	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB(DAK)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	13	13							13	100	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1		1			1	1	1	1	100	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1		1				1	1	1	100	

		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan(DAK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	30	30							30	100	
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1	1	1			1	1	1	1	100	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yan di didayagunakan	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)(DAK)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (orang)	409	162	409		208	108	93	409	409	100	

		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**persentase stakeholders dan mitra kerja yg berperan aktif dlm Program KKBPK**	**80%**		**60%**		**31,00%**		**80,00%**	**80%**	**80%**	100	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK(DAK)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5	5	5		1	1	3	5	5	100	
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	5		5				5	5	#REF!	#REF!	

			Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja											
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)(DAK)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5	5	5		1	1	3	5	5	100	

		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang(DAK)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6	1	6				6	6	1	17	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal(DAK)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	9	1	7			3	4	7	1	11	

		Pengendalian program KKBPK (DAK)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1		1				1	1	1	100	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Persentase kampung KB yang dibina**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB(DAK)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	17	17	17		17	17	17	17	17	100	

		Pembinaan Terpadu Kampung KB(DAK)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	17	17							17	100	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Ratio akseptor KB**	**79,10%**		**77,50%**			**61,59%**	**63,29%**	**63,29%**	**80,60%**	**101,90**	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Persentase Kelompok Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	**88%**	**80,60%**	**83%**			**31,48%**	**31,48%**	**31,48%**	**80,60%**	**92**	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(DAK)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50	21							21	**42**	

		penyediaan biaya operasioanal bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) (DAK)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80		80				80	80	80	**100**	
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30		30			22	8	30	30	**100**	

		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)(DAK)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	20	10	20			7	13	20	10	**50**	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**	**2,71**		**2,69**					**1,17**	**2,45**	**90**	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Persentase OPD yang berperan aktif dalam pengendalian kuantitas penduduk**	**90%**		**40%**				**29.41%**	**29.41%**	**0%**	**0**	

		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1		1				1	1	1	100	
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal											
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0	0	0		
		Predikat Kinerja (Nilai)								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Desa yg memiliki rumah data**	**80%**		**20,00%**		**12,56%**	**12,56%**	**41.17%**	**41.17%**	**58,82%**	74	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Pembinaan dan	1	1	1			1		1	1	100	

		Sistem Informasi Keluarga(DAK)	Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga											
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2	1	2		2	2	2	2	2	100	
		penyediaan data dan informasi Keluarga (DAK)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	863		863			863		863	#REF!	#REF!	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	**Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan Perempuan korban kekerasan yang dilayani**	**100%**	**100%**	**100%**		**100,00%**	**100,00%**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	100	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**% kasus kekerasan perempuan yang di layani**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100	

		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (PD)	15	13	15		2	2		2	13		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum**	**100%**		**100%**		**100%**	**100,00%**	**100%**	**100%**	**100%**	100	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30		15		4	2	1	7	7	23	
		Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut	30										

		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan**	**100%**		**100%**		**100,00%**		**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**100**	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan**	**100%**		**100%**				**100%**	**100%**	**100,00%**		
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	1		1				1	1	1		

			Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)											
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1										
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan**	**100%**		**100%**		**100%**			**100,00%**	**100%**	**100**	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	1		1		1			1	1	100	

		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**	**100%**	**100%**	**100%**		**100,00%**	**100,00%**	**100%**	**100,00%**	**100%**	**100**	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yg terlibat dlm PHA**	**90%**	**10%**	**20%**		**20,72%**	**29,28%**		**50,00%**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1		1	1	1	1	1		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yg di kembangkan**	**100%**	**100%**	**100%**		**#REF!**	**80%**		**100,00%**	**100,00%**		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	0						1		
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10		6			6		6	6		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		PROGRAM PERLINDUNGAN	**persentase anak korban**	**100%**	**100%**	**100%**		**100,00%**	**100,00%**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	100	

		KHUSUS ANAK	**kekerasan yang dilayani**										
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	
		Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	15							15	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20	15	17		12	4	5	21	7	

		Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2		1			1		1			
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Sasaran 2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100%**	**100%**	**100%**		**#REF!**	**35,57%**	**27,39%**	**95,38%**	**41,52%**	42	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pengganggaran dan evaluasi tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**		**#REF!**	**16,15%**	**60,04%**	**100,00%**	**23,02%**	23	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	1				1	1		0	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1		1	1		1	1	100	

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1				1	1		0	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1			1		1		0	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1				1	1		0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1	4				4	4		0	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2									0	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0,00	0	

		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**		**54,22%**	**32,72%**	**21,83%**	**100,00%**	**54,23%**	54	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19		19		19	19	19	19	19	100	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1		1	1	1	1	1	100	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1									-	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**		**100%**		**#REF!**	**19,39%**	**19,39%**	**#REF!**	**29,91%**	30	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										#DIV/0!	

		Kepegawaian													
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2										-	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2										-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5		5		2	1	1	5	1	20		
														#DIV/0!	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0		
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai Standar**	**100%**	**100%**	**100%**		**#REF!**	**9,70%**	**79,58%**	**100%**	**45,37%**	45		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5		5		1	1	1	5	1	20		

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	10	10		10			10	10	67	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80000	33000	40000		20000	10000	10000	40000	53.000	66	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2		1		1	1		1	1	50	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4		2		1		1	2	1	25	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**		**25%**	**75%**	**21,52%**	**100%**	**21,68%**	22	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	1		1	1	1	1	1	100	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5		20			20		20		-	

		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1		1		1			1	1	100	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		1		1			1	1	100	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1		1			1	1	100	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**		**#REF!**	**#REF!**	**68,78%**	**100%**	**8,84%**	**9**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1			1	1	1	1	100	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	1	1		1	1	1	1	1	50	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**100,00%**	**100%**	100	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	3				1	3	3	100	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1		1				1	1		-	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0	0	0	
		Predikat Kinerja (Nilai)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									**0**	**0**	**89**	
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya*)
Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam Renja PD Kabupaten*)

* Diisi oleh Bappeda Kabupaten

.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak menangani dua urusan pilihan yaitu Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak berkewajiban memenuhi target capaian dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

Gambaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Tengah dalam pencapaian target pelayanan SKPD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel T.C-30

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa.
2. Tingginya Angka Kelahiran (TFR) dilihat dari masih tingginya angka kematian pada bayi.
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB dan belum optimalnya pencapaian sasaran KB sesuai standar nasional
4. Masih tingginya persentase keluarga pra KS dan rendahnya Persentase kecamatan yang memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja
5. Belum optimalnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan ditandai dengan rendahnya capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan Perempuan dalam Keluarga.
6. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan
7. Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian kota Layak Anak
9. Belum adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan lembaga penyedia layanan bagi keluarga
10. Belum optimalnya sistem data gender dan anak

b. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tantangan

   Tantangan yang dihadapi dalam Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

   1) Faktor Sosial , Budaya, dan rendahnya Peran serta masyarakat memahami Program KKBPK.
   2) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih Kurang.
   3) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
   4) Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

5) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
6) Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
7) Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
8) Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1) Adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan tugas konkuren (8 urusan) melalui program Pengendalian penduduk, KB, dan Keluarga sejahtera,
2) serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3) Faskes, Klinik Swasta, dokter, bidan , perawat, dalam peningkatan penyelenggaraan pengeloalaan, pelayanan serta pembinaan keserta berKB dan peran serta masyarakat dalam pembangunan program KKBPK
4) Semakin banyaknya Tribina, UPPKS, PIK R/M sebagai bentuk peran serta masyarakat.
5) Adanya Kerjasama Lintas Sektor Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6) Tenaga R/R Terlatih, pelatihan Latihan Dasar Umum (LDU) Petugas lini lapangan, rendahnya peran serta masyarakat memahami program KKBPK, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7) Rendahnya peran serta masyarakat memahami Program KKBPK, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPoktan, dan penggerak tenaga ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
8) Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam upaya mendukung Program-program KKBPK, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
10) Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

11) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
12) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
13) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
14) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam RKPD Tahun 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tabel T- C31.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak disusun melalui Forum Musrembangcam bahkan Forum satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Stakeholder menyampaikan masukan tentang Prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Rancangan Rencana Kerja tersebut kemudian dibahas dalam musrembang Kabupaten untuk mematangkan/ memutakhiran Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Dalam menyusun rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga harus mempertimbangkan hasil musrembang kabupaten/ RKPD Final.

Usulan Tahun Anggaran 2023 dari masyarakat pada Kegiatan Musrenbang sesuai dengan isi dari tupoksi dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024. Adapun usulan Masyarakat pada Kegiatan Musrenbang Tahun Anggaran 2024 adalah dapat dilihat pada tabel 2.5 (T.C- 32)

TABEL T-C.31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7	
2	14	03			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**35%**	**4.915.165.402**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**35%**	**4.915.165.402**	
2	14	03	203		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi di faskes**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	**2.194.075.189**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi di faskes**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	**2.194.075.189**	
2	14	03	203	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya(DAK)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (laporan)	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	13	33.574.069	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya(DAK)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (laporan)	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	13	33.574.069	
2	14	03	203	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (orang)	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	26	78.640.640	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (orang)	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	26	78.640.640	
2	14	03	203	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)(DAK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (orang)	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	19502	190.987.656	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)(DAK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (orang)	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	19502	190.987.656	

2	14	03	203	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB(DAK)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	13	10.350.200	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB(DAK)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	13	10.350.200	
2	14	03	203	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	1.300.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	1.300.000.000	
2	14	03	203	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	19502	10.450.100	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	19502	10.450.100	
2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	128.700.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	128.700.000	
2	14	03	203	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan(DAK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	30 pasangan	282.200.280	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan(DAK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	30 pasangan	282.200.280	
2	14	03	203	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	19502	150.880.244	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	19502	150.880.244	
2	14	03	203	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria(DAK)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Akspetor	Dinas PP & KB serta PP & PA	7	8.292.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria(DAK)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Akspetor	Dinas PP & KB serta PP & PA	7	8.292.000	
2	**14**	**03**	**202**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yan di didayagunakan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	**550.270.000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yan di didayagunakan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	**550.270.000**	

2	14	03	201	08	Pengendalian program KKBPK (DAK)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	48.000.000	Pengendalian program KKBPK (DAK)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	48.000.000	
2	14	03	204		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persentase kampung KB yang dibina**	Persentase (%)	Dinas PP & KB serta PP & PA	**100%**	**266.000.000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persentase kampung KB yang dibina**	Persentase (%)	Dinas PP & KB serta PP & PA	**100%**	**266.000.000**	
2	14	03	204	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB(DAK)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	Dinas PP & KB serta PP & PA	17	77.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB(DAK)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di	Kampung	Dinas PP & KB serta PP & PA	17	77.000.000	
2	14	03	204	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB(DAK)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	17	154.000.000	Pembinaan Terpadu Kampung KB(DAK)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	17	154.000.000	
2	14	03	204	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	15	35.000.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	15	35.000.000	
2	14	04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Ratio akseptor KB**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	78,50%	**1.757.272.490**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Ratio akseptor KB**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	78,50%	**1.757.272.490**	
2	14	04	201		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Kelompok Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	Persentase (%)	Dinas PP & KB serta PP & PA	**86%**	**1.757.272.490**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Kelompok Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	Persentase (%)	Dinas PP & KB serta PP & PA	**86%**	**1.757.272.490**	
2	14	04	201	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi	Kelompok	Dinas PP & KB serta PP & PA	21	68.540.630	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi	Kelompok	Dinas PP & KB serta PP & PA	21	68.540.630	
2	14	04	201	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(DAK)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Unit	Dinas PP & KB serta PP & PA	10	392.100.060	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(DAK)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Unit	Dinas PP & KB serta PP & PA	10	392.100.060	
2	14	04	201	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	21	78.540.640	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	21	78.540.640	

2	14	04	201	05	penyediaan biaya operasioanal bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) (DAK)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	80	663.591.000	penyediaan biaya operasioanal bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) (DAK)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	80	663.591.000	
2	14	04	201	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	30	80.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	30	80.000.000	
2	14	04	201	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)(DAK)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	20	339.500.160	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)(DAK)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	20	339.500.160	
2	14	04	201	12	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	20	80.000.000	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	20	80.000.000	
2	14	04	201	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	20	55.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	20	55.000.000	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**	**Nilai**	Dinas PP & KB serta PP & PA	**2,71**	**501.540.461**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**	**Nilai**	Dinas PP & KB serta PP & PA	**2,71**	**501.540.461**	
2	**14**	**02**	**201**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persentase OPD yang berperan aktif dalam pengendalian kuantitas penduduk**	**Persentase (%)**	Dinas PP & KB serta PP & PA	**70%**	**87.100.000**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persentase OPD yang berperan aktif dalam pengendalian kuantitas penduduk**	**Persentase (%)**	Dinas PP & KB serta PP & PA	**70%**	**87.100.000**	
2	14	02	201	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	15.000.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	15.000.000	
2	14	02	201	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	5	7.900.000	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	5	7.900.000	

2	14	02	201	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	64.200.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	64.200.000	OPD
2	**14**	**02**	**202**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa yg memiliki rumah data**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**50,00%**	**414.440.461**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa yg memiliki rumah data**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**50,00%**	**414.440.461**	
2	14	02	202	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	5.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	5.000.000	
2	14	02	202	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	Dinas PP & KB serta PP & PA	3	60.000.000	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	Dinas PP & KB serta PP & PA	3	60.000.000	
2	14	02	202	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga(DAK)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	5	325.000.011	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga(DAK)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	5	325.000.011	
2	14	02	202	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	2	19.996.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	2	19.996.000	
2	14	02	202	11	penyediaan data dan informasi Keluarga (DAK)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	4.444.450	penyediaan data dan informasi Keluarga (DAK)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	4.444.450	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						

2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**% anggaran Rensponsif gender terhadap APBD**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**1%**	**115.000.000**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**% anggaran Rensponsif gender terhadap APBD**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**1%**	**115.000.000**	
2	**08**	**02**	**201**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**% OPD yang menerapkan PPRG dan ARG**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**80%**	**65.000.000**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**% OPD yang menerapkan PPRG dan ARG**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**80%**	**65.000.000**	
2	08	02	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	65.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	65.000.000	
2	08	02	201	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	
2	**08**	**02**	**202**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**% Perempuan dilembaga legislatif dan Lembaga Pemda**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**25%**	**50.000.000**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**% Perempuan dilembaga legislatif dan Lembaga Pemda**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**25%**	**50.000.000**	
2	08	02	202	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	
2	08	02	202	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	Dinas PP & KB serta PP & PA	50	50.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	Dinas PP & KB serta PP & PA	50	50.000.000	
2	**08**	**02**	**203**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**persentase Lembaga penyedia layanan perempuan yang diberdayakan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**5%**	**-**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**persentase Lembaga penyedia layanan perempuan yang diberdayakan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**5%**	**-**	
2	08	02	203	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	
2	08	02	203	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	

2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan korban kekerasan yang dilayani	Persentase (%)	Dinas PP & KB serta PP & PA	100%	150.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan korban kekerasan yang dilayani	Persentase (%)	Dinas PP & KB serta PP & PA	100%	150.000.000	
2	08	03	201		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% kasus kekerasan perempuan yang di layani	Persentase (%)	Dinas PP & KB serta PP & PA	100%	40.000.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% kasus kekerasan perempuan yang di layani	Persentase (%)	Dinas PP & KB serta PP & PA	100%	40.000.000	
2	08	03	201	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Dinas PP & KB serta PP & PA	15 Orang	40.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Dinas PP & KB serta PP & PA	15 Orang	40.000.000	
2	08	03	202		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase (%)	Dinas PP & KB serta PP & PA	100%	110.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum	Persentase (%)	Dinas PP & KB serta PP & PA	100%	110.000.000	
2	08	03	202	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	15	85.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	15	85.000.000	
2	08	03	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	25.000.000	
2	**08**	**03**	**203**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**% Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	-	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**% Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	-	
2	08	03	203	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	0	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	0	-	
2	08	03	203	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	
2	08	03	203	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	

2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	**117.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	**117.000.000**	
2	08	04	201		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	-	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	-	
2	08	04	201	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Dinas PP & KB serta PP & PA			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Dinas PP & KB serta PP & PA			
2	08	04	201	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	
2	08	04	201	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Laporan	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	
2	**08**	**04**	**202**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	**70.000.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	**70.000.000**	
2	08	04	202	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	
2	08	04	202	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	50 Orang	70.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	50 Orang	70.000.000	
2	**08**	**04**	**203**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan**	**persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	**47.000.000**	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan**	**persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	**47.000.000**	
2	08	04	203	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	Dinas PP & KB serta PP & PA	10	47.000.000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	Dinas PP & KB serta PP & PA	10	47.000.000	

2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	**135.000.000**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	**135.000.000**	
2	**08**	**06**	**201**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yg terlibat dlm PHA**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**70%**	**40.000.000**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yg terlibat dlm PHA**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**70%**	**40.000.000**	
2	08	06	201	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada LembagaPemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	Organisasi	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada LembagaPemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	Organisasi	Dinas PP & KB serta PP & PA	0	-	
2	08	06	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	40.000.000	
2	08	06	202		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yg di kembangkan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	95.000.000	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yg di kembangkan**	**Persentase (%)**	**Dinas PP & KB serta PP & PA**	**100%**	95.000.000	
2	08	06	202	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	45.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Dokumen	Dinas PP & KB serta PP & PA	1	45.000.000	
2	08	06	202	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	10	50.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Dinas PP & KB serta PP & PA	10	50.000.000	
2	08	05			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**persentase pemenuhan data gender dan anak**	persentase (%)	**DP2KBP3A**	**100%**	**72.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**persentase pemenuhan data gender dan anak**	persentase (%)	**DP2KBP3A**	**100%**	**72.000.000**	
2	08	05	201		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kabupaten /kota**	**Jumlah dokumen data gender dan anak**	**Dokumen**	**DP2KBP3A**	9	72.000.000	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kabupaten /kota**	**Jumlah dokumen data gender dan anak**	**Dokumen**	**DP2KBP3A**	9	72.000.000	
2	08	05	201	01	Penyediaan Data Gender dan Anak kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	**DP2KBP3A**	9	72.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	**DP2KBP3A**	9	72.000.000	

2	08	07			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**persentase anak korban kekerasan yang dilayani**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**340.000.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**persentase anak korban kekerasan yang dilayani**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**340.000.000**	
2	08	07	201		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase OPD yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**70%**	**75.000.000**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase OPD yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**70%**	**75.000.000**	
2	08	07	201	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	**DP2KBP3A**	0	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	**DP2KBP3A**	0	-	
2	08	07	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	75.000.000	
2	08	07	202		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan**	**DP2KBP3A**	2	**190.000.000**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan**	**DP2KBP3A**	2	**190.000.000**	
2	08	07	202	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	**DP2KBP3A**	20	95.000.000	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	**DP2KBP3A**	20	95.000.000	
2	08	07	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	**DP2KBP3A**	18	60.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	**DP2KBP3A**	18	60.000.000	
2	08	07	202	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	35.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	35.000.000	
2	**08**	**07**	**203**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus anak**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**75.000.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus anak**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**75.000.000**	
2	08	07	203	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	**DP2KBP3A**	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	**DP2KBP3A**	1		
2	08	07	203	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	75.000.000	

X	XX	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**3.435.579.198**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**3.435.579.198**	
X	XX	01	201		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pengganggaran dan evaluasi tepat waktu**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**77.600.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pengganggaran dan evaluasi tepat waktu**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**77.600.000**	
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	**DP2KBP3A**	2	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	**DP2KBP3A**	2	20.000.000	
X	XX	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	10.000.000	
X	XX	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	5.000.000	
X	XX	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	3.900.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	3.900.000	
X	XX	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	3.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	3.700.000	
X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	**DP2KBP3A**	4	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	**DP2KBP3A**	4	20.000.000	
X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	**DP2KBP3A**	2	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	**DP2KBP3A**	2	15.000.000	
X	XX	01	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu**	**persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**1.743.479.198**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu**	**persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**1.743.479.198**	
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	**DP2KBP3A**	19	1.643.479.198	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	**DP2KBP3A**	19	1.643.479.198	
X	XX	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	**DP2KBP3A**	1	80.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	**DP2KBP3A**	1	80.000.000	
X	XX	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	20.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	**DP2KBP3A**	1	20.000.000	

Rencana Kerja (RenJa) Tahun 2024

X	XX	01	203		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**101.500.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**101.500.000**	
X	XX	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	**DP2KBP3A**	8	80.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	**DP2KBP3A**	8	80.000.000	
X	XX	01	203	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	**DP2KBP3A**	5	15.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	**DP2KBP3A**	5	15.000.000	
X	XX	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	**DP2KBP3A**	1	6.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	**DP2KBP3A**	1	6.500.000	
X	XX	01	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**205.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**205.000.000**	
X	XX	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	**DP2KBP3A**	0	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	**DP2KBP3A**	0	-	
X	XX	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	**DP2KBP3A**	0	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	**DP2KBP3A**	0	-	
X	XX	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	**DP2KBP3A**	3	26.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	**DP2KBP3A**	3	26.000.000	
X	XX	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	**DP2KBP3A**	6	120.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	**DP2KBP3A**	6	120.000.000	
X	XX	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	**DP2KBP3A**	10	59.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	**DP2KBP3A**	10	59.000.000	
X	XX	01	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai Standar**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**522.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai Standar**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**522.000.000**	
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	**DP2KBP3A**	1	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	**DP2KBP3A**	1	10.000.000	
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	**DP2KBP3A**	5	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	**DP2KBP3A**	5	50.000.000	
X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	**DP2KBP3A**	15	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	**DP2KBP3A**	15	5.000.000	
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	**DP2KBP3A**	60000	12.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	**DP2KBP3A**	60000	12.500.000	
X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	**DP2KBP3A**	5	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	**DP2KBP3A**	5	10.000.000	
X	XX	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	**DP2KBP3A**	1	10.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	**DP2KBP3A**	1	10.500.000	

X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	DP2KBP3A	2	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	DP2KBP3A	2	300.000.000	
X	XX	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	DP2KBP3A	1 Dokumen	65.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	DP2KBP3A	1 Dokumen	65.000.000	
X	XX	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	DP2KBP3A	1 Dokumen	59.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	DP2KBP3A	1 Dokumen	59.000.000	
X	**XX**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**495.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**495.000.000**	
X	XX	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	DP2KBP3A	1	90.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	DP2KBP3A	1	90.000.000	
X	XX	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	DP2KBP3A	5	125.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	DP2KBP3A	5	125.000.000	
X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	DP2KBP3A	1	100.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	DP2KBP3A	1	100.000.000	
X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	DP2KBP3A	1	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	DP2KBP3A	1	20.000.000	
X	XX	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	DP2KBP3A	1	150.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	DP2KBP3A	1	150.000.000	
X	XX	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	DP2KBP3A	1	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	DP2KBP3A	1	10.000.000	
X	**XX**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tersedia**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**201.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tersedia**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**201.000.000**	
X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	DP2KBP3A	1	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	DP2KBP3A	1	7.000.000	
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	DP2KBP3A	1	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	DP2KBP3A	1	70.000.000	
X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	DP2KBP3A	4	4.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	DP2KBP3A	4	4.000.000	
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	DP2KBP3A	30	120.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	DP2KBP3A	30	120.000.000	

X	XX	01	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**90.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**	**Persentase (%)**	**DP2KBP3A**	**100%**	**90.000.000**	
X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	**DP2KBP3A**	1	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	**DP2KBP3A**	1	35.000.000	
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	**DP2KBP3A**	3	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	**DP2KBP3A**	3	50.000.000	
X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	**DP2KBP3A**	1	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	**DP2KBP3A**	1	5.000.000	

Topoyo
Mengetahui
Kepala Dinas ,

H. A. GAPRI, S.Sos., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640423 199703 1 003

Tabel 2.5 T.C- 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kab. Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Usulan	Lokasi	Vol	Pagu	Nama dewan / Pengusul	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Laju Penduduk yang tinggi serta tidak terkontrol merupakan ancama bagi pembangunan. Oleh karena itu, penduduk haruslah dikendalikan melalui program KB	Kab. Mamuju Tengah	100 Orang	Rp 200.000.000	Hj. Nirmalasari aras, SH	Proram Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2.	Melalui sosialasasi pelayanan KB ddan kesatuan Gerak PPK Bangga Kencana kesehatan, kita tingkatkan kepedulian bersama untuk hidup sehat dan sejahtera dalam adaptasi kebiasaan baru menuju indonesia baru	semua kecamatan	50 orang dalam 1 kecamatan	Rp 25.000.000	Elvis	program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutanusiaan serta pengelolaan keluanagn keluarga)
	banyaknya ibu tidak paham tentang penggunaan KB karena takut gemuk	semua kecamatan	100 orang	Rp 100.000.000	I Gusti Ayu Inggrit WB, SH	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
4.	kurangnya pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana, sehingga tidak dapat mengantisipasi stunting secara dini.	Kab. Mamuju Tengah	1 kali kegiatan	Rp 100.000.000	Herman	program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keluarga keluarga)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah sebagai berikut :

3.1.1 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga
2. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
3. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran
4. meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran
5. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi

3.1.2 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
2. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO,
3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya,

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk & KB memiliki Tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. **Tujuan :**Meningkatkan kualitas Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

   Sasaran : Meningkatnya prevalensi kepesertaan KB aktif

b. **Tujuan :**Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

   Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian **Misi ke 2** yaitu Meningkatkan kualitas Pelayanan Dasar. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Kegiatan

Jumlah Program yaitu 10 Program yang terdiri dari Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota, Program Pengarusutamaan Gender dan Program Pemberdayaan Perempuan, program perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga, program pengelolaan sistem data gender dan anak, program pemenuhan hak anak, Program Perlindungan khusus Anak, Program Pengendalian Penduduk, Program pembinaan Keluarga Berencana, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

Jumlah kegiatan yaitu 27 terdiri dari 8 kegiatan dan 39 sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/kota, 2 Kegiatan dan 4 sub kegiatan pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, 2 Kegiatan dan 3 sub kegiatan pada program perlindungan perempuan, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan pada program peningkatan kualitas keluarga, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan pada program pengolahan sistem data gender dan anak, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan pada program pemenuhan hak anak (PHA), 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan pada Program Perlindungan khusus Anak, 2 Kegiatan dan 9 sub kegiatan pada Program Pengendalian Penduduk, 4 kegiatan dan 23 sub kegiatan pada Program pembinaan Keluarga Berencana, 1 kegiatan dan 10 sub kegiatan pada program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejaterah (KS). Total Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang dirinci berdasarkan sumber pendanaan Total Kebutuhan dana Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu sebesar

Rp. **9.829.362.918** terdiri dari:

a. APBD (DAU)
b. APBD (DAK)

c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Tabel3.3(T-C.33):

Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Tabel3.3(T-C.33)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.829.362.918,00**							**12.405.732.948,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**4.048.119.138,00**							**4.202.779.194,00**	
1,	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)***				***100***	**3.235.579.198,00**							**3.615.779.194,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan evaluasi Tepat waktu (%)*				*100*	152.600.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	82.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*1*	*0*	*2*	100.000.000,00 100.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*2*	22.000.000,00 22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1*	*1.00*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.000.000,00								5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*0.00*	*1*	*5.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*5.000.000,00*	
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.900.000,00								3.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*0.00*	*1*	*3.900.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*3.900.000,00*	
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.700.000,00								3.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*0.00*	*1*	*3.700.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*3.700.000,00*	
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*4*	*0.00*	*4*	*10.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*OPD*	*4*	*20.000.000,00*	
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00								18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*	10.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*2*	18.000.000,00	

	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	1.693.479.198,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	1.912.679.194,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.643.479.198,00							1.812.679.194,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*19.00*	*19*	*19.00*	1.643.479.198,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*19.00*	1.812.679.194,00	
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						30.000.000,00							80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1.00*	*1*	*1.00*	*30.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1.00*	*80.000.000,00*	
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						20.000.000,00							20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	20.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1.00*	20.000.000,00	
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang di administrasi sesuai standar (%)*				*100*	101.500.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	101.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						80.000.000,00							80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8*	*80.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*8*	*80.000.000,00*	
	2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5*	*15.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*5*	*15.000.000,00*	
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						6.500.000,00							6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*6.500.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*6.500.000,00*	

	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						95.000.000,00							210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase Pegawai yang Prangkat Daerah yang dilayani (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						15.000.000,00							26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*	15.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*3*	26.000.000,00	
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*5.00*	*1.00*	*6.00*	*50.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*5.00*	*125.000.000,00*	
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						30.000.000,00							59.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*0*	*0.00*	*10*	*30.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*10*	*59.000.000,00*	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						522.000.000,00							522.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*	*10.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*10.000.000,00*	

	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*5*	*0.00*	*5*	50.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*5*	50.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*10.00*	*10*	*15.00*	5.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*15.00*	5.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.500.000,00							13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*40000*	*0.00*	*60000*	12.500.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*75000*	13.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.000.000,00							10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*	*10.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*5*	*10.000.000,00*	

	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.500.000,00							10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*10.500.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1.00*	*10.500.000,00*	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00							300.000.000,00 *300.000.000,00*	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*2.00*	*1*	*2.00*	300.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*2.00*	300.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						65.000.000,00							65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	65.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	65.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						59.000.000,00							59.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*59.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*59.000.000,00*	

	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					475.000.000,00							495.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase BMD-PD yang terpenuhi (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*100*		
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					90.000.000,00							90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		*1.00*	*1*	*1.00*	*90.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1.00*	*90.000.000,00*	
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					125.000.000,00							125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*20*	*0.00*	*5*	*125.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*5*	*125.000.000,00*	
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					100.000.000,00							100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*1*	*0.00*	*1*	100.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	100.000.000,00	
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00							20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1*	*0.00*	*1*	20.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	20.000.000,00	
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					130.000.000,00							150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1.00*	*1*	*1.00*	130.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1.00*	150.000.000,00	
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000,00							10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*	*10.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*10.000.000,00*	

	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106.000.000,00							201.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintahan Tersedia (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.000.000,00							7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	7.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*2*	7.000.000,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						40.000.000,00							70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1.00*	*1*	*1.00*	*40.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1.00*	*70.000.000,00*	
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.000.000,00							4.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*	*4.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*4*	*4.500.000,00*	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						55.000.000,00							120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1.00*	*1*	*5.00*	*55.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*5.00*	*120.000.000,00*	

	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang milik Daerah yang terpelihara (%)*				*100*	90.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*100*	90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.000.000,00						35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*	*35.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*35.000.000,00*	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00						50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*3.00*	*3*	*3.00*	*50.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*3.00*	*50.000.000,00*	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00						5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*1*	*0.00*	*1*	*5.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*5.000.000,00*	
2,	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**133.539.940,00**						**40.000.000,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
			Persentase anggaran Rensponsif gender terhadap APBD (%)				***1***								
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						83.539.940,00						40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase OPD yang menerapkan PPRG dan ARG (%)				*80*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*85*		
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG						23.539.940,00						-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*23.539.940,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*0.00*		

	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000,00							-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*30.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*0.00*		
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG					30.000.000,00							40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)		*0.00*	*0.00*	*35*	*30.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*30*	*40.000.000,00*	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000,00							-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase Perempuan di lembaga legislatif dan lembaga Pemda (%)				*25*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*						*25*		
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					50.000.000,00							-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi)		*0.00*	*0.00*	*50*	*50.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Organisasi*	*0*		
3,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					**115.000.000,00**							**150.000.000,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
			Cakupan Korban kekerasan Perempuan yang dilayani (%)				***100***								
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000,00							40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase Kasus kekerasan perempuan yang di layani (%)				*100*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*						*100*		
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					40.000.000,00							40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)		*2*	*0.00*	*15*	*40.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*15*	*40.000.000,00*	

	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						75.000.000,00							110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)				*100*		*(Kab. Mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00							85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)		*7*	*10*	*15*	*50.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Korban*	*20*	*85.000.000,00*	
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						25.000.000,00							25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)		*0.00*	*1*	*1*	*25.000.000,00*	*(UPTD PPPA, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Korban*	*1*	*25.000.000,00*	
4,	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**117.000.000,00**							**50.000.000,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
			Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan (%)				***100***									
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						70.000.000,00							-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Cakupan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						70.000.000,00					*masyarakat, organisasi ataupun UMKM yang belum memiliki pengetahuan tentang menambah penmgasilan rumah tangga*		-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*1*	*0.00*	*50*	*70.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0*		

	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						47.000.000,00							50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Cakupan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						47.000.000,00							50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Layanan)		*0.00*	*0.00*	*10*	*47.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*10*	*50.000.000,00*	
5,	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**72.000.000,00**							**72.000.000,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
			Persentase keterpenuhan data gender dan anak (%)				***100***									
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						72.000.000,00							72.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen data gender dan anak (Dokumen)				*9*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*9*		
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota						72.000.000,00							72.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9.00*	72.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*9.00*	72.000.000,00	

6,	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)***				***100***	**135.000.000,00**						**50.000.000,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						40.000.000,00						-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan dunia usaha yang terlibat dalam PHA (%)				*70*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*80*		
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						40.000.000,00						-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*40.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*0*		
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						95.000.000,00						50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak yang di lembagakan (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*100*		
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00						50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*6.00*	*10*	*10*	*50.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Forum Anak*	*10*	*50.000.000,00*	
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						45.000.000,00						-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*45.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Forum Anak*	*0*		

7,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**240.000.000,00**							**225.000.000,00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			persentase anak korban kekerasan yang dilayani (%)				***100***									
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase OPD yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak (%)*				*100*	75.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	*Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*1*	75.000.000,00 *75.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak korban kekerasan*	*1*	75.000.000,00 *75.000.000,00*	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kab/kota (Layanan)*				*2*	90.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*2*	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*20*	30.000.000,00 30.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak Berhadapan Hukum*	*25*	95.000.000,00 95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)*		*21*	*18*	*18*	60.000.000,00 60.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak Berhadapan Kekerasan*	*19*	55.000.000,00 55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00							-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase Lembaga Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Anak (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota						75.000.000,00							-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*	75.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forum Anak*	*1*		
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**5.781.243.780,00**							**8.202.953.754,00**	
1,	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**426.540.461,00**							**551.540.461,00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)				***2,71***									
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						87.100.000,00							87.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Presentase OPD yang berperan aktif dalam pengendalian kuantitas penduduk (%)				*70*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*80*		
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota						15.000.000,00							15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1*	*0.00*	*1*	*15.000.000,00*	*(OPD, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*OPD*	*1*	*15.000.000,00*	
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal						7.900.000,00							7.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan)		*0.00*	*5*	*5*	*7.900.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Pendidikan*	*5*	*7.900.000,00*	

	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana					64.200.000,00						64.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*64.200.000,00*	*(Balai Penyuluh KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*OPD*	*1*	*64.200.000,00*	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					339.440.461,00						464.440.461,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Presentase desa yang memiliki rumah data (%)				*50.00*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*60*		
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					200.000.011,00						325.000.011,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)		*1*	*0.00*	*5*	*200.000.011,00*	*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*OPD*	*5*	*325.000.011,00*	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					4.444.450,00						4.444.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)		*863*	*0.00*	*863*	*4.444.450,00*	*(OPD, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*OPD*	*863*	*4.444.450,00*	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					50.000.000,00						50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)		*0.00*	*1*	*1*	50.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*fasyankes*	*1*	50.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					19.996.000,00						19.996.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)		*2*	*1*	*2*	*19.996.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*OPD*	*2*	*19.996.000,00*	

	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain					60.000.000,00						60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3*	*60.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Kampung KB*	*3*	*60.000.000,00*	
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					5.000.000,00						5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*5.000.000,00*	*(OPD, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*OPD*	*1*	*5.000.000,00*	
2,	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					**3.284.045.189,00**				**Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**		**4.951.881.679,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP (%)				***65***							
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					432.700.000,00						1.908.820.213,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Presentase Stakeholders dan mitra kerja yang berperan aktif dalam progaram KKBPK (%)				*70*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*80*		
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK					48.000.000,00						50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*48.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*OPD*	*1*	*50.000.000,00*	

	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					270.000.000,00							1.744.120.213,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)		*5*	*5*	*5*	*270.000.000,00*	*(Balai penyuluh KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Balai penyuluh KB*	*5*	*1.744.120.213,00*	
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					26.000.000,00							26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)		*5*	*1*	*5*	*26.000.000,00*	*(Balai Penyuluh KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*PLKB*	*5*	*26.000.000,00*	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					21.050.000,00							21.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)		*6*	*6*	*6*	*21.050.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*	*6*	*21.050.000,00*	
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					41.650.000,00							41.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)		*7*	*1*	*7*	*41.650.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*	*7*	*41.650.000,00*	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					26.000.000,00							26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)		*5*	*5*	*5*	*26.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*OPD*	*5*	*26.000.000,00*	

	2.14.03.2.02	Penday agunaan Tenaga Peny uluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Presentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan (%)*				100	401.270.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				100	550.720.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Peny ediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB						200.000.000,00						200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*	*200.000.000,00*	*(Balai Penyuluh KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*PKB/PLKB*	*5*	*200.000.000,00*	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masy arakat Pedesaan (IMP)						175.000.000,00						324.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)		*409*	*409*	*409*	*175.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*Kader*	*409*	*324.000.000,00*	
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						26.270.000,00						26.720.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)		*0.00*	*77*	*7*	*26.270.000,00*	*(Balai Penyuluh KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*Organisasi*	*77*	*26.720.000,00*	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelay anan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan kesediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi di faskes (%)*				100	2.184.075.189,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*			Meningkatny a Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem		2.224.341.466,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelay anan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringny a						23.574.069,00						34.864.069,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		*12*	*13*	*13*	*23.574.069,00*	*(Fasilitas Kesehatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*Faskes*	*13*	*34.864.069,00*	

	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						190.987.656,00						238.734.570,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)		*17676*	*19402*	*19502*	*190.987.656,00*	*(Fasilitas Kesehatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Faskes*	*19602*	*238.734.570,00*	
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB						10.350.200,00						10.350.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*13*	*10.350.200,00*	*(OPD, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Faskes*	*13*	*10.350.200,00*	
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						1.300.000.000,00						1.300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)		*1*	*1*	*1*	*1.300.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)*			*Balai*	*1*	*1.300.000.000,00*	
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB						10.450.100,00						11.320.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)		*0.00*	*0.00*	*19502*	*10.450.100,00*	*(Fasilitas Kesehatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Akseptor KB*	*19602*	*11.320.100,00*	

Rencana Kerja (RenJa) Tahun 2024

	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					128.700.000,00				Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem			130.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*128.700.000,00*	*(Fasilitas Kesehatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Faskes*	*1*	*130.500.000,00*	
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak					150.880.244,00							204.880.244,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*150.880.244,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*PUS (Pasangan Usia Subur)*	*1*	*204.880.244,00*	
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria					8.292.000,00							9.292.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)		*0.00*	*0.00*	*7*	*8.292.000,00*	*(Fasilitas Kesehatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Akseptor Pria*	*8*	*9.292.000,00*	
	2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan					282.200.280,00							284.400.283,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kab/Kota)		*0.00*	*0.00*	*30*	*282.200.280,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Akseptor KB*	*30*	*284.400.283,00*	
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB					78.640.640,00							-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)		*0.00*	*0.00*	*26*	*78.640.640,00*	*(Balai Penyuluh KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Faskes*	*0.00*		
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					266.000.000,00							268.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Presentase kampung KB yang dibina (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					35.000.000,00							37.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*35.000.000,00*	*(Kampung KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Kampung KB*	*1*	*37.000.000,00*	
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB					154.000.000,00							154.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*154.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Kampung KB*	*1*	*154.000.000,00*	

	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					77.000.000,00							77.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)		*17*	*17*	*17*	*77.000.000,00*	*(Kampung KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Kampung KB*	*17*	*77.000.000,00*	
3,	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					**2.070.658.130,00**							**2.699.531.614,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
			Ratio akseptor KB (%)				***78,50***								
			Persentase Penerima layanan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dari keluarga Desil-1 P3KE (%)				***20***								
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					2.070.658.130,00							2.699.531.614,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Ratio Akseptor KB (%)				*78.50*		*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*78.80*		
			Persentase penerima layanan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga dari keluarga desil-1 P3KE (%)				*20*		*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*30*		
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					339.500.160,00							341.500.160,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)		*20*	*1*	*1*	*339.500.160,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga*	*1*	*341.500.160,00*	
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					80.000.000,00							80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)		*30*	*0.00*	*5*	*80.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Keluarga (BKB,BKR,PPPKS, PIK-R, Dan UPPPKS/A)*	*5*	*80.000.000,00*	

	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						392.100.060,00						569.150.090,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)		*0.00*	*15*	*10*	*392.100.060,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*BKB,BKR, PIK-R, BKL, UPPKS*	*15*	*569.150.090,00*	
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						78.540.640,00						79.430.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*21*	*78.540.640,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*Kader*	*21*	*79.430.120,00*	
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						78.540.640,00						79.430.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*78.540.640,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga dari desil-1 P3KE*	*1*	*79.430.120,00*	
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						80.000.000,00						80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*20*	*80.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*Masyarakat*	*0.00*	*80.000.000,00*	
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						563.591.000,00						670.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)		*80*	*80*	*80*	*563.591.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*Kader*	*80*	*670.000.000,00*	
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						55.000.000,00						60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*55.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*OPD*	*1*	*60.000.000,00*	

	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)*					334.845.000,00					*Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*		669.591.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					0.00	*0.00*	*28*	*334.845.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*28*	*669.591.000,00*	
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	*Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)*					68.540.630,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*					70.430.124,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					0.00	*0.00*	*21*	*68.540.630,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*BKB,BKR, PIK-R, BKL, UPPKS/UPPKA*	*21*	*70.430.124,00*	
	J U M L A H							**9.829.362.918,00**							12.405.732.948,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedalam rencana strategis. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif sesuai dengan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Catatan Penting
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.829.362.918,00**							**12.405.732.948,00**		
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**4.048.119.138,00**							**4.202.779.194,00**		
1,	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)***				***100***	**3.235.579.198,00**							**3.615.779.194,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan evaluasi Tepat waktu (%)*				*100*	152.600.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	82.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*1*	*0*	*2*	100.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*2*	22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1*	*1.00*	20.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1.00*	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.000.000,00						5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*0.00*	*1*	*5.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*5.000.000,00*		
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.900.000,00						3.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*0.00*	*1*	*3.900.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*3.900.000,00*		
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.700.000,00						3.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*0.00*	*1*	*3.700.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*3.700.000,00*		
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*4*	*0.00*	*4*	*10.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*OPD*	*4*	*20.000.000,00*		
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00						18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*	10.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*2*	18.000.000,00		
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.693.479.198,00						1.912.679.194,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat DaerahTepat Waktu (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*			

2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.643.479.198,00							1.812.679.194,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*19.00*	*19*	*19.00*	1.643.479.198,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*19.00*	1.812.679.194,00		
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						30.000.000,00							80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1.00*	*1*	*1.00*	*30.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1.00*	*80.000.000,00*		
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						20.000.000,00							20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	20.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1.00*	20.000.000,00		
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						101.500.000,00							101.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Barang Milik Daerah yang di administrasi sesuai standar (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*			
2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						80.000.000,00							80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8*	80.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*8*	80.000.000,00		
2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5*	*15.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*5*	*15.000.000,00*		
2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						6.500.000,00							6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*6.500.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*6.500.000,00*		

2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						95.000.000,00						210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Pegawai yang Prangkat Daerah yang dilayani (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*100*			
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						15.000.000,00						26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*	15.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*3*	26.000.000,00		
2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00						125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*5.00*	*1.00*	*6.00*	*50.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*5.00*	*125.000.000,00*		
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						30.000.000,00						59.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*0*	*0.00*	*10*	*30.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*10*	*59.000.000,00*		
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						522.000.000,00						522.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*100*			
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00						10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*	*10.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*10.000.000,00*		
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00						50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*5*	*0.00*	*5*	50.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*5*	50.000.000,00		

2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00						5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*10.00*	*10*	*15.00*	5.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*15.00*	5.000.000,00		
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.500.000,00						13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*40000*	*0.00*	*60000*	12.500.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*75000*	13.000.000,00		
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.000.000,00						10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*	*10.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*5*	*10.000.000,00*		
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.500.000,00						10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*10.500.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1.00*	*10.500.000,00*		
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00						300.000.000,00 *300.000.000,00*	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*2.00*	*1*	*2.00*	300.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*2.00*	300.000.000,00		
2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						65.000.000,00						65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	65.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	65.000.000,00		

2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						59.000.000,00						59.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*59.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*59.000.000,00*		
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						475.000.000,00						495.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase BMD-PD yang terpenuhi (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						90.000.000,00						90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		*1.00*	*1*	*1.00*	*90.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1.00*	*90.000.000,00*		
2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						125.000.000,00						125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*20*	*0.00*	*5*	*125.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*5*	*125.000.000,00*		
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00						100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*1*	*0.00*	*1*	100.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	100.000.000,00		
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00						20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1*	*0.00*	*1*	20.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	20.000.000,00		
2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						130.000.000,00						150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau						*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU*	*Dana Transfer Umum-Dana*							

2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00						10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*	*10.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*10.000.000,00*	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106.000.000,00						201.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintahan Tersedia (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.000.000,00						7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	7.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*2*	7.000.000,00	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						40.000.000,00						70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1.00*	*1*	*1.00*	*40.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1.00*	*70.000.000,00*	
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.000.000,00						4.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*	*4.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*4*	*4.500.000,00*	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						55.000.000,00						120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1.00*	*1*	*5.00*	*55.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*5.00*	*120.000.000,00*	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.000.000,00						90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Barang milik Daerah yang terpelihara (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		

2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.000.000,00						35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*	*35.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	*35.000.000,00*	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00						50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*3.00*	*3*	*3.00*	*50.000.000,00*	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*3.00*	*50.000.000,00*	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00						5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*1*	*0.00*	*1*	5.000.000,00	*(Dinas PPPA PPKB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*1*	5.000.000,00	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**133.539.940,00**						**40.000.000,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	
		Persentase anggaran Rensponsif gender terhadap APBD (%)				***1***									
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						83.539.940,00						40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase OPD yang menerapkan PPRG dan ARG (%)				*80*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*85*		
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG						23.539.940,00						-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*23.539.940,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*0.00*		

2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						30.000.000,00						-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*30.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*0.00*			
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG						30.000.000,00						40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)		*0.00*	*0.00*	*35*	*30.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*30*	*40.000.000,00*		
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Perempuan di lembaga legislatif dan lembaga Pemda (%)				*25*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*25*			
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						50.000.000,00						-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi)		*0.00*	*0.00*	*50*	*50.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Organisasi*	*0*			
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**115.000.000,00**						**150.000.000,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	
		Cakupan Korban kekerasan Perempuan yang dilayani (%)				***100***										
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00						40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Kasus kekerasan perempuan yang di layani (%)				*100*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*			
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						40.000.000,00						40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)		*2*	*0.00*	*15*	*40.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*15*	*40.000.000,00*		

2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						75.000.000,00						110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)				*100*		*(Kab. Mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*100*			
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00						85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)		*7*	*10*	*15*	*50.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Korban*	*20*	*85.000.000,00*		
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						25.000.000,00						25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)		*0.00*	*1*	*1*	*25.000.000,00*	*(UPTD PPPA, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Korban*	*1*	*25.000.000,00*		
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**117.000.000,00**						**50.000.000,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	
		Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan (%)				***100***									
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						70.000.000,00						-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Cakupan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*100*			
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						70.000.000,00				*masyarakat, organisasi ataupun UMKM yang belum memiliki pengetahuan tentang menambah pemngasilan rumah tangga*		-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*1*	*0.00*	*50*	*70.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0*			

2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						47.000.000,00							50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Cakupan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*			
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						47.000.000,00							50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Layanan)	*0.00*	*0.00*	*10*	*47.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*10*	*50.000.000,00*		
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**					**72.000.000,00**							**72.000.000,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
		Persentase keterpenuhan data gender dan anak (%)			***100***											
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					72.000.000,00							72.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		Jumlah Dokumen data gender dan anak (Dokumen)			*9*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*9*			
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota					72.000.000,00							72.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*9.00*	72.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD*	*9.00*	72.000.000,00		
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					**135.000.000,00**							**50.000.000,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)			***100***											
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					40.000.000,00							-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		Persentase Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan dunia usaha yang terlibat dalam PHA (%)			*70*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*80*			

2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						40.000.000,00						-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*40.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Timgugus KLA*	*0*			
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						95.000.000,00						50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak yang di lembagakan (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*			
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00						50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*6.00*	*10*	*10*	*50.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forum Anak*	*10*	*50.000.000,00*		
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						45.000.000,00						-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*45.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forum Anak*	*0*			
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**240.000.000,00**						**225.000.000,00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		persentase anak korban kekerasan yang dilayani (%)				***100***										
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00						75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase OPD yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*			

Rencana Kerja (RenJa) Tahun 2024

2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA						75.000.000,00						75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*	*75.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak korban kekerasan*	*1*	*75.000.000,00*		
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						90.000.000,00						150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kab/kota (Layanan)				*2*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*2*			
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00						95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*20*	*30.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak Berhadapan Hukum*	*25*	*95.000.000,00*		
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK						60.000.000,00						55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)		*21*	*18*	*18*	*60.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak Berhadapan Kekerasan*	*19*	*55.000.000,00*		
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00						-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Lembaga Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Anak (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*			
2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota						75.000.000,00						-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*	*75.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forum Anak*	*1*			

	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					**5.781.243.780,00**							**8.202.953.754,00**		
1,	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)***			***2,71***	**426.540.461,00**							**551.540.461,00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					87.100.000,00							87.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Presentase OPD yang berperan aktif dalam pengendalian kuantitas penduduk (%)			*70*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*80*			
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					15.000.000,00							15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1*	*0.00*	*1*	*15.000.000,00*	*(OPD, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*		*OPD*	*1*	*15.000.000,00*		
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal					7.900.000,00							7.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan)		*0.00*	*5*	*5*	*7.900.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*		*Pendidikan*	*5*	*7.900.000,00*		
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana					64.200.000,00							64.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*64.200.000,00*	*(Balai Penyuluh KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*		*OPD*	*1*	*64.200.000,00*		
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					339.440.461,00							464.440.461,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Presentase desa yang memliki rumah data (%)			*50.00*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*60*			

	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					200.000.011,00						325.000.011,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)		*1*	*0.00*	*5*	*200.000.011,00*	*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*OPD*	*5*	*325.000.011,00*		
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					4.444.450,00						4.444.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)		*863*	*0.00*	*863*	*4.444.450,00*	*(OPD, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*OPD*	*863*	*4.444.450,00*		
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					50.000.000,00						50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)		*0.00*	*1*	*1*	50.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*fasyankes*	*1*	50.000.000,00		
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					19.996.000,00						19.996.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)		*2*	*1*	*2*	*19.996.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*OPD*	*2*	*19.996.000,00*		
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain					60.000.000,00						60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3*	*60.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*Kampung KB*	*3*	*60.000.000,00*		
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					5.000.000,00						5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*5.000.000,00*	*(OPD, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*OPD*	*1*	*5.000.000,00*		

2,	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					**3.284.045.189,00**				**Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**			**4.951.881.679,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP (%)				***65***									
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					432.700.000,00							1.908.820.213,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Presentase Stakeholders dan mitra kerja yang berperan aktif dalam progaram KKBPK (%)				*70*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*80*			
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK					48.000.000,00							50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*48.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*		*OPD*	*1*	*50.000.000,00*		
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					270.000.000,00							1.744.120.213,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)		*5*	*5*	*5*	*270.000.000,00*	*(Balai penyuluh KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*		*Balai penyuluh KB*	*5*	*1.744.120.213,00*		
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					26.000.000,00							26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)		*5*	*1*	*5*	*26.000.000,00*	*(Balai Penyuluh KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*		*PLKB*	*5*	*26.000.000,00*		
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					21.050.000,00							21.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)		*6*	*6*	*6*	*21.050.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*		*Masyarakat*	*6*	*21.050.000,00*		

	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					41.650.000,00						41.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)		*7*	*1*	*7*	*41.650.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*Masyarakat*	*7*	*41.650.000,00*		
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					26.000.000,00						26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)		*5*	*5*	*5*	*26.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*OPD*	*5*	*26.000.000,00*		
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					401.270.000,00						550.720.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Presentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan (%)				*100*		*(KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*			
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB					200.000.000,00						200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*	*200.000.000,00*	*(Balai Penyuluh KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*PKB/PLKB*	*5*	*200.000.000,00*		
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					175.000.000,00						324.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)		*409*	*409*	*409*	*175.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*Kader*	*409*	*324.000.000,00*		
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					26.270.000,00						26.720.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)		*0.00*	*77*	*7*	*26.270.000,00*	*(Balai Penyuluh KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*Organisasi*	*77*	*26.720.000,00*		

	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan kesediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi di faskes (%)*				*100*	2.184.075.189,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*			Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem		*100*	2.224.341.466,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						23.574.069,00							34.864.069,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		*12*	*13*	*13*	*23.574.069,00*	*(Fasilitas Kesehatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Faskes*	*13*	*34.864.069,00*		
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						190.987.656,00							238.734.570,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)		*17676*	*19402*	*19502*	*190.987.656,00*	*(Fasilitas Kesehatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Faskes*	*19602*	*238.734.570,00*		
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB						10.350.200,00							10.350.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*13*	*10.350.200,00*	*(OPD, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Faskes*	*13*	*10.350.200,00*		
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						1.300.000.000,00							1.300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)		*1*	*1*	*1*	*1.300.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)*			*Balai*	*1*	*1.300.000.000,00*		
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB						10.450.100,00							11.320.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)		*0.00*	*0.00*	*19502*	*10.450.100,00*	*(Fasilitas Kesehatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Akseptor KB*	*19602*	*11.320.100,00*		

	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						128.700.000,00				Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem			130.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*128.700.000,00*	*(Fasilitas Kesehatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Faskes*	*1*	*130.500.000,00*		
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak						150.880.244,00							204.880.244,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*150.880.244,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*PUS (Pasangan Usia Subur)*	*1*	*204.880.244,00*		
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria						8.292.000,00							9.292.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)		*0.00*	*0.00*	*7*	*8.292.000,00*	*(Fasilitas Kesehatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Akseptor Pria*	*8*	*9.292.000,00*		
	2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan						282.200.280,00							284.400.283,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kab/Kota)		*0.00*	*0.00*	*30*	*282.200.280,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Akseptor KB*	*30*	*284.400.283,00*		
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB						78.640.640,00							-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)		*0.00*	*0.00*	*26*	*78.640.640,00*	*(Balai Penyuluh KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Faskes*	*0.00*			

	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Presentase kampung KB yang dibina (%)*				*100*	266.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*				*100*	268.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						35.000.000,00						37.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*35.000.000,00*	*(Kampung KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Kampung KB*	*1*	*37.000.000,00*		
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB						154.000.000,00						154.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*154.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Kampung KB*	*1*	*154.000.000,00*		
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas						77.000.000,00						77.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)		*17*	*17*	*17*	*77.000.000,00*	*(Kampung KB, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Kampung KB*	*17*	*77.000.000,00*		

3,	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					**2.070.658.130,00**							**2.699.531.614,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	
			Ratio akseptor KB (%)				***78,50***									
			Persentase Penerima layanan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dari keluarga Desil-1 P3KE (%)				***20***									
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					2.070.658.130,00							2.699.531.614,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Ratio Akseptor KB (%)				*78.50*		*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*78.80*			
			Persentase penerima layanan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga dari keluarga desil-1 P3KE (%)				*20*		*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*30*			
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					339.500.160,00							341.500.160,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)		*20*	*1*	*1*	*339.500.160,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*		*Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga*	*1*	*341.500.160,00*		
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					80.000.000,00							80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)		*30*	*0.00*	*5*	*80.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*		*Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Keluarga (BKB,BKR,PPPKS, PIK-R, Dan UPPPKS/A)*	*5*	*80.000.000,00*		
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					392.100.060,00							569.150.090,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)		*0.00*	*15*	*10*	*392.100.060,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*		*BKB,BKR, PIK-R, BKL, UPPKS*	*15*	*569.150.090,00*		
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					78.540.640,00							79.430.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*21*	*78.540.640,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*		*Kader*	*21*	*79.430.120,00*		

	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						78.540.640,00						79.430.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*78.540.640,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga dari desil-1 P3KE*	*1*	*79.430.120,00*		
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						80.000.000,00						80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*20*	*80.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*Masyarakat*	*0.00*	*80.000.000,00*		
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						563.591.000,00						670.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)		*80*	*80*	*80*	*563.591.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*Kader*	*80*	*670.000.000,00*		
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						55.000.000,00						60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*55.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*OPD*	*1*	*60.000.000,00*		
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						334.845.000,00						669.591.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)		*0.00*	*0.00*	*28*	*334.845.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*	*28*	*669.591.000,00*		
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)						68.540.630,00						70.430.124,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)		*0.00*	*0.00*	*21*	*68.540.630,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB*			*BKB,BKR, PIK-R, BKL, UPPKS/UPPKA*	*21*	*70.430.124,00*		
		J U M L A H						**9.829.362.918,00**						12.405.732.948,00		

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Mamuju Tengah telah disusun dalam Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini dibuat agar dapat diaplikasikan dalam berbagai permasalahan terkait dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian dan Keluarga Berencana Kab.Mamuju Tengah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat sehingga keberpihakan pada masyarkat benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian dan Keluarga Berencana Kab.Mamuju Tengah. Apabila terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan Perubahan Rencana Kerja dengan berpedoman pada kewenangan urusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis

Tobadak, 1 Agustus 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pengendalian dan Keluarga Berencana

Hj. NAHDA. S.Kep., MM
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP 19660501 198602 2 009

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

RANCANGAN AKHIR
2024





Disusun Oleh :
Kasubag Perencana

K A T A P E N G A N T A R

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rakhmat dan hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 telah selesai disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 tersebut, merupakan salah satu bagian dari dokumen rencana yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, program-program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Dispustsip Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024, yang telah memberikan waktu, pikiran dan tenaga sehingga Renja ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan, dan semoga dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Mamuju Tengah, Juli 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Ir.TRIKORA WAHAB
Pangkat : Pembina Utama Muda Tk.IV/c
NIP. 19631130 199303 1 004

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispustsip daerah 15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Distpusipda 38

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024 38

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 47

BAB V : PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan.

Setiap Perangkat Daerah akan berupaya untuk menyusun Renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komperehensif. Sehingga Renja Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepaskan dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Dispustsip) sebagai Perangkat Daerah Provinsi memiliki kewajiban untuk menyusun Renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyusunan Renja Tahun 2024 yang berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan

penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD tahun 2024, yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat
d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemrintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Kota.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tat Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
j. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025.

k. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.
l. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksudnya adalah :

Untuk memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan selama periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024

1.3.2. Tujuannya adalah

a. Mewujudkan tertib sistem perencanaan pembangunan daerah;
b. Menciptakan perencanaan yang konsisten dan sinergis;
c. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, RPOGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPK Tahun 2023

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 dan Capaian Renstra 2016-2022.

Dalam rangka meningkatkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada tahun 2021, sangat dibutuhkan evaluasi Renja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian kinerja Renstra sesuai atau sampai dengan periode akhir Renstra, dibandingkan atau disandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.1. sebagai berikut

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah s.d. Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (out come/out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Targe Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
	Wajib									
	Kearsipan									
1	**Program pembinaan dan Pengelolaan kerasipan**	**Jumlah Arsip in Aktif dari Perangkat Daerah yang disimpan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**	50 %	**0 %**	**15 %**	**15 %**		40 %	55 %	
1.1	Penyusunan perbub tentang jadwal RETENSI arsip (JRA)	Jumlah Perbup Tentang Jadwal Retasi Arsip (JRA)	-	-	1 dokumen perbup	1 dokumen perbup		-	1 dokumen perbup	
1.2	Penyusunan perbup tentang klasifikasi arsip	Jumlah perbup Tentang Klsfikasi Arsip	-	-	-	-		1 Dokumen	1 Dokumen	

1.3	Audit Internal Kearsipan	Jumlah OPD Yang Menerapkan Arsip Secarah Baku	34 OPD 54 Desa	-	-	-		100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD	100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD	
1.4	Penyusunan Perbup tentang tata naskah Dinas	Jumlah Perbup tentang tata naskah dinas	1 Tata Naskah	-	-	-		-	-	
1.5	Penyusunan perbup tentang klasifikasi akses dan keamanan arsip	Jumlah perbup tentang klasifikasi akses dan keamanan arsip	-	-	-	-		-	-	
1.6	Penyusunan perbup tentang pedoman kearsipan	Jumlah pedoman kearsipan	-	-	-	-		1 dokumen	1 dokumen	
1.7	Sosialisasi Perbup Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi Perbup Jadwal Retensi Arsip (JRA)	-	-	-	-		-	-	
1.8	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	1 Lemari Arsip Geser	-	-	-		-	-	
1.9	Bimtek tata cara pengelolaan arsip dokumen daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbinganteknis pengelolaan arsip dalam daerah	-	-	-	-		-	-	
1.10	workshop Pendataan dan Penataan dokumen/arsip daerah	jumlah Sarana/prasarana serta SDM berkualitas	-	0	100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD	100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD		-	100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD	

1.11	Bimbingan teknis pengelolaan arsip daerah di instansi Lingkup Pemerintah dan Swasta	Jumlah OPD yang Mengkuti bimbingan Teknis pengelolaan arsip di daerah instansi lingkungan pemerintah dan swasta	34 OPD 54 Desa		-	-		-	-	
1.12	workshop pengelolaan arsip aktif, in aktif dan arsip statis	Jumlah OPD Mengelola Arsip in Aktif disetiap SKPD	-		100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD	100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD		-	100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD	
1.13	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerntah/swasta	Jumlah Pengelola Arsip Memahaman Kearsipan	-	-	-	-		-	-	
1.15	Bimbingan dan konsultasi tentang jabatan fungsional arsiparis	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbigan dan konsulatasi jabatan fungsional arsiparis	1 Kegiatan	-	-	-		-	-	
1.16	Bimbingan dan konsultasi pengelolaan arsip aset daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan dan konsultasi arsip aset daerah	-	-	-	-		34 OPD	34 OPD	
1.17	Penelusuran /Pemotretan Bangunan dan benda-benda	Jumlah bangunan bersejarah dalam bentuk foto	-	-	-	-		5 Obyek	5 Obyek	

1.18	Memori arsip Bupati	Jumlah arsip Bupati yang tersusun	50 Dokumen	-	-	-		-	-	
1.19	Pengolahan jaringan informasi kearsipan	Jumlah jaringan informasi kearsipan yang terkelola	1 Kegiatan	-	-	-		-	-	
1.20	Pembuatan records center	Jumlah ruang penyimpanan arsip inaktif	-	-	-	-		-	-	
1.21	Penyusunan data pengembangan kearsipan	Jumlah data pengamanan kearsipan se-kabupaten mamuju tengah	-	-	-	-		-	-	
1.22	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Jumlah sarana layanan informasi arsip	-	-	-	-		-	-	
1.23	Pameran kearsipan	Jumlah pameran arsip yang terselenggara	-	-	-	-		-	-	
1.24	Penilaian dan akuisisi arsip	Jumlah arsip yang diselamatkan	-	-	-	-		-	-	
1.25	Penyusunan dan penerbitan sumber arsip Media elektronik	Jumlah penerbitan naskah arsip	-	-	-	-		-	-	

1.26	Sosialisasi JIKN dan SIKN	Jumlah OPD Mengikuti Sosialisasi JIKN dan SIKN	-	-	-	-		-	-	
1.27	Workshop sistem informasi kearsipan dinamis	Jumlah aparatur yang mengikuti workshop sistem informasi kearsipan dinamis	34 OPD	-	-	-		-	-	
1.28	LOmba Tertib Arsip	Jumlah OPD Yang mengikuti Lomba Tertib Arsip	-	-				-		
	Perpustakaan									
2	**Program Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan**	**Jumlah Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa Jumlah Koleksi Buku pada Perpustakaan Daerah, Koleksi Buku pada perpustakaan sekolah dan koleksi buku pada perpustakaan Desa**	**70 %**	**10 %**	**25 %**	**25 %**		**50 %**	**25 %**	
2.1	penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah buku yang tersedia di Perpusda Mateng	1300 exp	900 exp	1200 exp	1200 exp		1300 exp	3500 exp	
2.2	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan	Jumlah Perpustakaan desa dan sekolah yang diberikan bantuan	900 exp	-	800 exp	800 exp		900 exp	1700 exp	

2.3	Penyediaan fasilitas pelayan pustaka gerak	Jumlah Fasilitas pelayanan perpustakaan gerak	-	-	-	-		-	-	
2.4	Penyediaan Fasilitas dan bahan pustaka perpustakaan	Jumlah fasilitas dan bahan pelayanan pustaka perpustakaan	-	-	-	-		-	-	
2.5	Pengadaan sarana pengelolaan dan pelayanan perpustakaan desa dan sekolah	Jumlah sarana pengelolaan dan pelayanan perpustakaan desa dan sekolah	-	-	-	-		-	-	
2.6	Pembangunan klinik perpustakaan kreatif kecamatan	Jumlah gedung pelayanan perpustakaan kreatif lalla tassisara kecamatan	-	-	-	-		-	-	
2.7	Penyediaan bahan perpustakaan kraatif umum	Jumlah koleksi buku, komputer, wifi, dll. Diperpustakaan kreatif kabupaten	-	-	-	-		-	-	
2.8	Pembangunan Perpustakaan kreatif Lalla tassisara kabupaten	Jumlah gedung pelayanan perpustakaan kreatif lalla tassisara kabupaten	-	-	-	-		-	-	

2.9	Bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimbingsn teknis pengolahan perpustakaan	100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD	-	-	-		100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD	100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD	
2.10	Workshop pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah pelajar yang mengikuti workshop pengembangan minat dan budaya baca	100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD	-	-	-		100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD	100 Orang Pengelola Arsip di Tiap OPD	
2.11	Pelayanan perpustakaan keliling	Jumlah Perpustakaan yang di kungjungi. Meningkatnya minat baca pada masyarakat	5 kecamatan 54 desa	5 kecamatan	-	-		5 kecamatan 54 desa	10 kecamatan 54 desa	
2.12	Lomba Bercerita	Jumlah Peserta tingkat Pelajar di	5 Kecamatan	-	5 Kecamatan	5 Kecamatan		5 kecamatan	10 kecamatan	
2.13	Lomba Perpustakaan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti lomba	10 Desa	-	6 desa	6 desa		10 Desa	16 desa	
2.14	Lomba Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba	5 Sekolah	-	5 sekolah	5 sekolah		5 Sekolah	10 sekolah	
2.15	Lomba puisi	Jumlah Peserta tingkat Pelajar di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-		-	-	

2.16	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	-	-	-	-		-	-	
2.17	Penyusunan bibliografi induk daerah dan katalog induk daerah	Jumlah BID dan KID yang diterbitkan	-	-	-	-		-	-	
2.18	Kajian minat baca dan budaya baca masyarakat	Terlaksananya kajian minat dan budaya baca	-	-	-	-		-	-	
2.19	Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Digital	Terpenuhinya Sarana Perpustakaan Digital	-	-	-	-		-	-	
2.20	Pelestarian bahan pustaka	Terlestarikannya bahan pustaka	-	-	-	-		-	-	
2.21	Pengolahan dan Pengembangan jaringan otomasi perpustakaan	tersedianya jaringan otomasi perpustakaan	-	-	-	-		-	-	
2.22	Penyusunan data pengembangan perpustakaan	Tersedianya data perpustakaan se kabupaten	-	-	-	-		-	-	
2.23	Monitoring dan evaluasi perpustakaan	Jumlah perpustakaan se kabupaten	-	-	-	-		-	-	

2.24	Supervisi, bimbingan dan stimulasi pada perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang mendapat supervisi,	-	-	-	-		-	-	
2.25	Pameran perpustakaan	Jumlah pameran perpustakaan	-	-	-	-		-	-	
2.26	Perayaan hari kunjung perpustakaan (HKP) dan bulan gemar membaca (BGM)	Terlaksanya perayaan hari kunjung perpustakaan	-	-	-	-		-	-	
2.27	Stok Opname perpustakaan	Persentase kesesuaian jumlah stok koleksi	-	-	-	-		-	-	
	Bedah Buku	Jumlah Buku Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah Buku yang terkelola sesuai standar	1500 Buku		1500 Buku	1500 Buku		1500 Buku	1500 Buku	

Mamuju Tengah, Juli 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Ir.TRIKORA WAHAB
Pangkat : Pembina Utama Muda Tk.IV/c
NIP. 19631130 199303 1 004

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah sesuai tabel 2.1. diatas, untuk urusan wajib bidang perpustakaan dan kearsipan telah mempunyai program dan indikator program yang cukup jelas. Secara periodik realisasi kinerja dalam rangka target capaian kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2022, masih disebut wajar sesuai pendekatan *money follow function* artinya fungsi-fungsi yang berada pada masing-masing unit/satuan kerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah yang sudah dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

Meskipun program dan kegiatan bidang Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilaksanakan secara wajar, tetapi untuk mencapai target kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2022 masih diperlukan upaya-upaya perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien dan efektif.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah

Urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar. Dalam kerangka urusan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah memiliki tugas dan tanggungjawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan Perpustakaan maupun pelayanan Kearsipan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.2. sebagai berikut

Tabel 2.2.

Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	6	7	8			1	1	12			13
	PERPUSTAKAAN													
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	-	Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan sebanyak 1700 Pengunjung	500 Orang	1000 Orang	1200 Orang	1300 orang	1300 orang	581 Orang	1000 Orang	1200 Orang	550 Orang	794 Orang	
2	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	-	Ketersediaan Koleksi Bahan pustaka di perpustakaan Umum Sebayak : 6800 Exp	1300 EXP	1600 EXP	1700 EXP	1800 EXP	1800 EXP	1461 EXP	1600 EXP	1700 EXP	1722 exp	6134 exp	
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	-	Tersedianya Perpustakaan di desa-desa dan masjid	100 Perpustakaan	125 Perpustakaan	150 Perpustakaan	175 perpustakaan	175 perpustakaan	131 perpustakaan	125 Perpustakaan	150 Perpustakaan	124 perpustakaan	124 perpustakaan	
4.	Jumlah rata-rata Pengunjung Perpustakaan	-	Tersedianya	500 Orang/Tahun	1000 Orang/Tahun	1200 Orang/Tahun	1500 orang/tahun	1500 orang/tahun	581 Orang/Tahun	1000 Orang/Tahun	1200 Orang/Tahun	1300 orang	1300 orang	
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	-	Ketersediaan jumlah judul yang bergam perpustakaan Umum Sebayak : 3200 Judul	500 Judul	1000 exp	1200 exp	1200 eks	1200 eks	26 Judul	1000 exp	1200 exp	478 exp	6134	
6.	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki	-	Adaya Pustakawan yang profesional	3 Orang	4 Orang	5 Orang	6 orang	6 orang	0 Orang	4 Orang	5 Orang	6 orang	12 Orang	
	KEARSIPAN													
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip	-	Terkelolahnya Arsip Secara Baku di SKPD	1 SKPD	5 SKPD	10 SKPD	15 SKPD	15 SKPD	0 SKPD	5 SKPD	10 SKPD	10 skpd	34 skpd	
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	-	Meningkatnya SDM dalam dalam Mengelolaa Kearsian	1 Kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	3 Kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	2 Kegiatan	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah

a. Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah

Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 45 tahun 2016 Tentang Tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah;

Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju Tengah katagorinya tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang pencapaiannya akan diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program.

Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah yang jelas dalam pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten serta adanya Renstra tersebut, telah membuka peluang untuk melakukan perannya berkaitan dengan isu strategis bidang perpustakaan yaitu pemberdayaan Perpustakaan dalam mencerdaskan masyarakat, dan bidang Kearsipan yaitu arsip sebagai pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Dilihat dari kedudukan maupun katagori tipe C, saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah tengah menghadapi suatu kondisi lingkungan eksternal yaitu era globalisasi yang sangat cepat, tingkat keterbukaan informasi yang tinggi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat dan murah, sehingga sangat diperlukan pendekatan pengembangan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan maupun perkembangan kondisi lingkungan eksternal.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekertariat**
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
3. **Bidang Perpustakaan**
   a. Pejabat Fungsional Perpustakaan (Pustakawan)
4. **Bidang Kearsipan**
   a. Pejabat Fungsional Kearsipan (Pranata Komputer)

Permasalahan umum yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah saat ini adalah keterbatasan jumlah para pejabat fungsional yang difungsikan pada masing-masing bidang yang dipimpin oleh pejabat struktural, kondisinya belum merata. Akibat dari kondisi tersebut, tingkat pengendalian kinerja yang menjadi tanggungjawab para pejabat struktural menjadi kurang mencukupi dalam memacu akselerasi pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Permasalahan Program Pengelolaan Kearsipan adalah

a. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan
b. Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan
c. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang kearsipan
d. Belum terdata dan tertatanya arsip secara baku
e. Belum dilestarikannya benda-benda sejarah di Mamuju Tengah.

Sedangkan permasalahan Program Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan adalah :

a. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan
b. Kurangnya SDM Pengelola Perpustakaan
c. Kurangnya Minat Baca Masyarakat

c. Tantangan dan Peluang Peningkatan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah

1. Tantangan

Tantangan dan Peluang Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan Visi dan Misinya adalah :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang bersifat strategik baik dari internal maupun eksternal organisasi yang menjadi tantangan, yaitu :

a. Banyaknya jumlah penduduk umur 1 - 75 Kabupaten Mamuju Tengah dimana pada tahun 2022 sudah mencapai 17.300 jiwa dan luasnya wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari 5 kecamatan dan 54 desa/kelurahan menjadi tantangan bagi terselengaranya pelayanan perpustakaan yang merata dan berkeadilan. Sampai saat ini baru ada 18 perpustakaan desa/kelurahan dan Perpustakaan
b. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pentingnya perpustakaan dan arsip mengakibatkan buruknya pengelolaan perpustakaan dan arsip.
c. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi jika tidak disikapi dengan baik (penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga yang terampil dan profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi) akan menjadi bumerang yang menjadikan lembaga perpustakaan dan kearsipan tertinggal jauh dibelakang (tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern).
d. Tidak adanya tenaga fungsional arsiparis / petugas khusus yang menangani kearsipan di Perangkat Daerah dan kurangnya sarana prasana kearsipan di Perangkat Daerah merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai lembaga pembina kearsipan.
e. Kurangnya sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan, seperti gedung aula perpustakaan, mobil dan motor perpustakaan keliling,

gedung depo arsip, dll.

2. Peluang

a. Terbitnya undang-undang UU Nomor Tahun tentang perpustakaan dan UU Nomor Tahun tentang kearsipan beserta peraturan pelaksananya dan berubahnya status Kantor Perpustakaan, Arsip dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah semakin menguatkan keberadaan dan meningkatkan daya tawar lembaga perpustakaan dan kearsipan.

b. Adanya perhatian dari pengambil kebijakan di Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengembangan perpustakaan dan kearsipan ditandai

dengan pemberian anggaran yang relatif cukup untuk peningkatan sarana prasarana kearsipan dan penambahan koleksi perpustakaan, walaupun dari segi jumlah nominal masih perlu ditingkatkan.

c. Tingginya kebutuhan sebagian masyarakat terhadap informasi, buku dan bahan pustaka lainnya ditengah mahalnya harga perolehan, hal tersebut membuka peluang bagi lembaga perpustakaan untuk mengembangkan perpustakaan yang didukung layanan internet dan hot spot gratis hingga ke tingkat kecamatan/desa, juga dapat diupayakan pendirian taman baca/sudut baca ditempat-tempat yang strategis di wilayah perkotaan.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026, Visi Bupati Kabupaten Mamuju Tengah yaitu :

"***Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara "*** Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kab. Mamuju Tengah, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta

impian yangakan di wujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamuju Tengah dalam 5 (lima) tahun Kedepan.

Visi tersebut dijabarkan kedalam enam (6) Misi. Misi sesuai dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Misi Kedua (2) yaitu

"Meningkatkan kualitas pelayanan dasar"

Dinas perpustakaan dan Kearsipan Mengacu kepada Misi Bupati Yang ke 2 (Dua) di Bidang Pendidikan yang memiliki kaitan dengan perpustakaan.

Perpustakaan sebagai pusat sumber informasi, yang memudahkan masyarakat mendapat informasi melalui buku. Dunia Pendidikan, buku terbukti berdaya guna dan bertepat guna sebagai salah satu sarana pendidikan dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah perpustakaan dan pelayanan perpustakaan harus dikembangkan sebagai salah satu instalasi untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan merupakan bagian yang vital dan besar pengaruhnya terhadapa mutu pedidikan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024, dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

KODE	Rancanagan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024				
	Program dan Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Program dan Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan**	**100%**	**765.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan**	**100%**	**910.000.000**
2.23.02.201	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Perpustakaan yangdikelola**	**100%**	**440.000.00**	**PengelolaanPerpustakaan TingkatDaerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Perpustakaan yangdikelola**	**100%**	585.000.000
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik.	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan Berbasis Elektronik	1 Pepustakaan	50.000.000	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik.	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan Berbasis Elektronik	3 Pepustakaan	150.000.000,00
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	6 Pepustakaan	150.000.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	6 Pepustakaan	150.000.000,00
2.23.02.2.01.03	Pengembangan dan kekhasan koleksi perpustakaan Kabupaten	Mamuju Tengah	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5 Judul	30.000.000	Pengembangan dan kekhasan koleksi perpustakaan Kabupaten	Mamuju Tengah	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5 Judul	30.000.000
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Pustakawan yang mengikuti Bimtek/Diklat	50 Pustakawan	85.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Pustakawan yang mengikuti Bimtek/Diklat	50 Pustakawan	130.000.000,00
2.23.02.2.01.08	Pengembangan bahan pustaka	Mamuju Tengah	Jumlah Bahan Pustaka yang tersedia	600 Exp 300 Judul	90.000.000	Pengembangan bahan pustaka	Mamuju Tengah	Jumlah Bahan Pustaka yang tersedia	500 Exp 250 Judul	90.000.000
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Mamuju Tengah	Jumlah Bahan Pustaka yang di kelola	600 Exp 300 Judu	15.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Mamuju Tengah	Jumlah Bahan Pustaka yang di kelola	500 Exp 250 Judul	15.000.000
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Data Perpustakaan	1 dokumen	20.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Data Perpustakaan	1 dokumen	20.000.000

2.23.02.202	**Pembudayaan Gemar MembacaTingkatDaerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengunjung Perpustakaan**	**100%**	**325.000.000**	**Pembudayaan Gemar MembacaTingkatDaerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengunjung Perpustakaan**	**100%**	**325.000.000**
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada SatuanPendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus sertaMasyarakat	Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	100 peserta	80.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada SatuanPendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus sertaMasyarakat	Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	100 peserta	80.000.000
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan SaranaPerpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Sarana Perpustakaan yang tersedia	2 Unit	100.000.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Sarana Perpustakaan yang tersedia	2 Unit	100.000.000
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Mamuju Tengah	Jumlah Orang Menerima Penghargaan	20 Orang	95.000.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Mamuju Tengah	Jumlah Orang Menerima Penghargaan	20 Orang	95.000.000
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan yang berbasis Inklusi Sosial	5 Perpus	50.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan yang berbasis Inklusi Sosial	5 Perpus	50.000.000
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAHKUNO**		**Persentase koleksi nasionalNaskahKuno yangdilestarikan**	**100%**	**45.000.000**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAHKUNO**		**Persentase koleksi nasionalNaskahKuno yangdilestarikan**	**100%**	**45.000.000**
2.23.03.2.01	**PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIKDAERAH KABUPATEN /KOTA**		**Persentase NaskahKuno yangdilestarikan**	**100%**	**45.000.000**	**PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIKDAERAH KABUPATEN /KOTA**		**Persentase NaskahKuno yangdilestarikan**	**100%**	**45.000.000**
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan Pelestarian, dan pendaftaran Naskah Kuno	Mamuju Tengah	Jumlah masyarakat yang terlibat yang berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno	4 Orang	20.000.000	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan Pelestarian, dan pendaftaran Naskah Kuno	Mamuju Tengah	Jumlah masyarakat yang terlibat yang berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno	3 Orang	20.000.000
2.23.03.2.01.02	Pengemabangan, Pengolahan Pengalih median naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Mamuju Tengah	Jumlah Naskah kuno yang di alih mediakan	4 naskah	25.000.000	Pengemabangan, Pengolahan Pengalih median naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Mamuju Tengah	Jumlah Naskah kuno yang di alih mediakan	3 naskah	25.000.000
2.24.02	**ProgramPengelolaanArsip**		**Persentase ArsipDinamis danStatis yangdiarsipkan di Kearsipan**	**100%**	**80.000.000**	**ProgramPengelolaanArsip**		**Persentase ArsipDinamis danStatis yangdiarsipkan di Kearsipan**	**100%**	**200.000.000**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Arsip Dinamis yang terkelolah**	**10 Arsip**	**80.000.000**	**Pengelolaan ArsipD inamis Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Arsip Dinamis yang terkelolah**	**10 Arsip**	**200.000.000**
2.24.2.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Topoyo	Jumlah Arsip Dinamis yang di ciptakan	10 Arsip	50.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Topoyo	Jumlah Arsip Dinamis yang di ciptakan	10 Arsip	50.000.000

2.24.2.2.01.03	Pengawasan Arsip dinamis kewenagan kabupaten/kota	Topoyo	Jumlah Arsip Dinamis yang di Awasi	10 Arsip	30.000.000	Pengawasan Arsip dinamis kewenagan kabupaten/kota	**Topoyo**	Jumlah Arsip Dinamis yang di Awasi	10 Arsip	150.000.000
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**Persentase Arsipyang lindungidan di selamatkan**	**100%**	**70.000.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**Persentase Arsipyang lindungidan di selamatkan**	**100%**	**70.000.000**
2.24.03.205.05	**Pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang**		**Persentase ArsipYangdi musnahkan**	**5 Arsip**	**70.000.000**	**Pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang**		**Persentase ArsipYangdi musnahkan**	**5 Arsip**	**70.000.000**
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan penetapan autentitas arsip statis yang dinyatakan hilang	Topoyo	Jumlah Arsip statis yang di nilai	5 Arsip	70.000.000	Penilaian dan penetapan autentitas arsip statis yang dinyatakan hilang	**Topoyo**	Jumlah Arsip statis yang di nilai	5 Arsip	70.000.000
2.24.04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**		**Persentase Arsip yang memiliki Izin Penggunaan**	**100%**	**50.000.000**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**		**Persentase Arsip yang memiliki Izin Penggunaan**	**100%**	**50.000.000**
2.24.04.2.01	**Pelayanan izin menggunakan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota**		**Persentase Arsip yang memiliki Izin Penggunaan**	**2 Izin**	**50.000.000**	**Pelayanan izin menggunakan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota**		**Persentase Arsip yang memiliki Izin Penggunaan**	**2 Izin**	**50.000.000**
2.24.04.2.01.02	Penyedian daftar Dan penetapan izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	Topoyo & Tobadak	Jumlah Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	2 Izin	50.000.000	Penyedian daftar Dan penetapan izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	Topoyo & Tobadak	Jumlah Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	2 Izin	50.000.000
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**1.681.849.402**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**1.709.849.402**
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**226.400.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**226.400.000**
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Topoyo	Jumlah dokumen perencanaan PD	4Dokumen 110 Kali	130.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Topoyo	Jumlah dokumen perencanaan PD	4 Dokumen 105 Kali	130.000.000
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	25.000.000
2.23.01.2.01.0.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	6.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	6.800.000

2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 Dokumen	6.800.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 Dokumen	6.800.000
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dokumen	6.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dokumen	6.800.000
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	3 Dokumen	51.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	3 Dokumen	51.000.000
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**1.014.109.402**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**1.014.109.402**
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Topoyo	Jumlah ASN	12 ASN	1.004.109.402	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Topoyo	Jumlah ASN	12 ASN	1.004.109.402
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Topoyo	Jumlah DokumenPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	30 Jenis	4.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Topoyo	Jumlah DokumenPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	30 Jenis	4.000.000
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1 Dokumen	6.000.000
2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**9.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**9.000.000**
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Perpusta kaan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	2 Orang	9.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Perpusta kaan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	2 Orang	9.000.000
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai**	**100%**	**86.200.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai**	**100%**	**86.200.000**
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju tengah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	17.200.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju tengah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Unit	17.200.000
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	10 Jenis	2.600.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	10 Jenis	2.600.000
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju Tengah	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	5500 Lembar	6.900.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju Tengah	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	5500 Lembar	6.900.000
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju Tengah	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	5 Media	5.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju Tengah	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	5 Media	5.200.000
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	Jumlah tamu yang difasilitasi	220 Kotak	3.300.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	Jumlah tamu yang difasilitasi	220 Kotak	3.300.000
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	65 Kali	51.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	62 Kali	51.000.000

2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**287.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**287.500.000**
2.23.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	1 Unit 24 Bulan	104.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	1 Unit 24 Bulan	104.000.000
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mamuju Tengah	Jumlah mebel yang diadakan	1 Unit	13.500.000	Pengadaan Mebel	Mamuju Tengah	Jumlah mebel yang diadakan	3 Unit	13.500.000
2.23.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Topoyo	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	3 Unit	50.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Topoyo	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	3 Unit	50.000.000
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tobadak	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Tahun	120.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tobadak	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Tahun	120.000.000
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**43.400.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**71.400.000**
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju Tengah	Jumlah jasa surat menyurat	250 Lembar	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju Tengah	Jumlah jasa surat menyurat	250 Lembar	2.500.000
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju Tengah	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	5936 kwh,m3, bulan	25.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju Tengah	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	5936 kwh,m3, bulan	35.000.000
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju Tengah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Bulan	15.900.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju Tengah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Bulan	33.900.000,00
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**15.240.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**15.240.000**
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 Jasa	6.370.0000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 Jasa	6.370.0000
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Mamuju Tengah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 Jasa	6.370.0000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Mamuju Tengah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 Jasa	6.370.0000
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	4 Unit	2.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	4 Unit	2.500.000
JUMLAH					**2.691.849.40**					**2.984.849.402**

Berdasarkan hasil review rancangan awal RKPD 2024 sesuai Tabel 2.3. diatas, rencana kerja sesuai hasil analisis belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya mengingat kebijakan umum anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah untuk dialokasikan pada Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah masih terbatas.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Mamuju Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Penerima Manfaat)
(1)	(2)	(	(4)	(	(6)
	Program Pembinaan Perpustakaan		**Jumlah Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa** **Jumlah Koleksi Buku pada Perpustakaan Daerah, Koleksi Buku pada perpustakaan sekolah dan koleksi buku pada perpustakaan Desa**		
	Penyediaan Bantuan Perpustakaan Online	Tobadak 3 Desa Palongaan	Jumlah Perpustakaan Online	1	Masyarakat Umum dan Masyarakat yang ada di Desa Palongaan
	Pembangunan Gedung Perpustakaan	1 Desa Desa Topoyo	Jumlah Bangunan Perpustakaan	1 Unit	Masyarakat Yang ada di Desa Topoyo

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan berdasarkan Renstra Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2015-2019, dapat dilihat pada Tabel 2.6 :

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perpusnas 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan
1	Menggerakkan masyarakat gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan	1. Peningkatan Pembudayaan Kegemaran Membaca; 2. Pengembangan semua jenis perpustakaan; 3. Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Layanan Perpustakaan; 4. Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan; 5. Peningkatan Keragaman Koleksi yang lengkap dan mutakhir dan pelestarian Koleksi Warisan Budaya Bangsa Indonesia; 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana	A. Program Pengembangan Perpustakaan terdiri dari kegiatan : 1. Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional; 2. Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional; 3. Preservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno; 4. Peningkatan Layanan dan Jasa Perpustakaan dan Informasi; 5. Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca; 6. Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan; 7. Pengembangan Pustakawan; 8. Pengelolaan Perpustakaan

2	Mendorong perkembangan semua jenis perpustakaan sesuai standar dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat		B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Perpustakaan Nasional terdiri dari kegiatan : 1. Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional 2. Perencanaan, Hukum, dan Humas Perpustakaan Nasional; 3. Pengawasan dan Pendidikan Akuntabilitas Aparatur Perpustakaan Nasional
3	Meningkatkan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis TIK		
4 5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan Mengembangkan keragaman dan pelestarian koleksi nasional dalam mendukung masyarakat pembelajar sepanjang hayat sesuai karakter bangsa		C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional meliputi kegiatan Pengediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Nasional

Selanjutnya berdasarkan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia **(ANRI) 2015-2019** dapat dilihat pada Tabel 3.2. yaitu :

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan ANRI 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan
1	Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komperehensif dan terpadu melalui Sistem Kearsipan Nasional	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (PT Negeri), perusahaan BUMN, BUMD, oragnisasi Politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan/tokoh nasional	A. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional; B. Program Akreditasi Kearsipan; C. Program Pelaksanaan Bimbingan SDM Kearsipan dan Sertifikasi; D. Program Penilaian dan Akuisisi Arsip; E. Program Pembinaan Kearsipan Daerah I; F. Program Pembinaan Kearsipan II; G. Program Pembinaan Kearsipan Pusat; H. Program Pemanfaatan Arsip I. Program Pengolahan Arsip Statis; J. Program Preservasi Kearsipan; K. Program Peningkatan Jasa Sistem dan Pembenahan, Penyimpanan dan Perawatan Arsip; L. Program Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; M. Program Pengelolaan Data dan TIK ANRI; N. Program Penyelemggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, O. Program Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional
2	Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik	
3	Terwujudnya penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional	Terselenggaranya sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional	
4	Terwujudnya manajemen internal dan yang rpofesional dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional	Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional dan transparan	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju TengahTahun 2024

Tujuan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah 2024 sebagai berikut;

1. Memenuhi kebutuhan baca masyarakat dan penataan kearsipan perangkat daerah

Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan daerah (Jumlah buku dan jumlah judul buku yang tersedia)

2. Meningkatnya kapasitas sistem arsip daerah (Jumlah arsip OPD yang terdata dan tertata)

Sedangkan sasaran Program Kegitatan sebagai berikut;

1. Tersedianya sarana/prasarana perpustakaan serta bacaan yang sesuai kebutuhan
2. Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM Kearsipan yang sesuai standar
3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dukungan administrasi dan sarana/prasarana
4. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dalam mendukung penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan
5. Meningkatnya akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan dalam mendukung penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Tabel 3.3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Mamuju Tengah

KODE	Rancanagan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2025				
	Program dan Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Program dan Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Mamuju Tengah**	**Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan**	**100%**	**910.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Mamuju Tengah**	**Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustkaan**	**100%**	**1.055.000.000**
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Mamuju Tengah**	**Persentase Perpustakaan yang dikelola**	100%	585.000.000	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Mamuju Tengah**	**Persentase Perpustakaan yang di kelola**	100%	**655.000.000**
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik.	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan Berbasis Elektronik	3 Perpustakaan	150.000.000	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik.	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan Berbasis Elektronik	3 Perpustakaan	200.000.000
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan yang di kembangkan	6 Perpustakaan	150.000.000,00	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	6 Perpustakaan	150.000.000,00
2.23.02.2.01.0004	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 perpustakaan	30.000.000,00	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 perpustakaan	30.000.000,00

2.23.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50	130.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50	150.000.000
2.23.2.2.01.0008	Pengembangan bahan pustaka	Mamuju Tengah	(Orang)	500 Exp 250 Judul	90.000.000,00	Pengembangan bahan pustaka	Mamuju Tengah	Jumlah Bahan Pustaka yang tersedia	500 Exp 250 Judul	90.000.000,00
2.23.2.2.01.0009	Pengolahan dan pengembangan bahan pustaka	Topoyo	Jumlah Bahan Pustaka yang di kelola	500 Exp 250 Judul	15.000.000,00	Pengolahan dan pengembangan bahan pustaka	Topoyo	Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola	500 Exp 250 Judul	15.000.000,00
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan database dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kab. Mamuju Tengah	Topoyo	Jumlah Dokumen Data Perpustakaan	1 dokumen	20.000.000,00	Penyusunan database dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kab. Mamuju Tengah	Topoyo	Jumlah Dokumen Data Perpustakaan	1 dokumen	20.000.000,00
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Mamuju Tengah	**Persentase Pengunjung Perpustakaan**	100%	**325.000.000**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Mamuju Tengah	**Persentase Pengunjung Perpustakaan**	100%	**400.000.000**
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	100 peserta	80.000.000,00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Sosialisasi Buda Baca dan Literasi	100 peserta	100.000.000
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Sarana Perpustakaan yang tersedia	**2 Unit**	100.000.000,00	Pembagunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan si Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Tobadak	Jumlah Sarana Perpustakaan yang Tersedia	**2 Unit**	100.000.000,00
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Mamuju Tengah	Jumlah Orang Menerima Penghargaan	20 Orang	95.000.000,00	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Mamuju Tengah	Jumlah Orang Menerima Penghargaan	20 Orang	100.000.000,00
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	50.000.000,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	100.000.000,00

2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Mamuju Tengah**	**Presentase Koleksi Nasional Naskah Kuno yang dilestarikan**	100%	45.000.000	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Mamuju Tengah**	**Persentase Koleksi Nasional Naskah Kuno yang dilestarikan**	100%	**70.000.000**
2.23.03.2.01	**PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Mamuju Tengah**	**Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan**	100%	**45.000.000**	**PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Mamuju Tengah**	**Pesentase Naskah Kuno yang dilestarikan**	100%	**70.000.000**
2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan Pelestarian, dan pendaftaran Naskah Kuno	Mamuju Tengah	Jumlah masyarakat yang terlibat yang berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno	3 Orang	20.000.000,00	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan Pelestarian, dan pendaftaran Naskah Kuno	Mamuju Tengah	Jumlah Masyarkat yang Terlibat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno	5 Orang	40.000.000,00
2.23.03.2.01.0002	Pengemabangan, Pengolahan Pengalih median naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Mamuju Tengah	Jumlah Naskah kuno yang di alih mediakan	3 naskah	25.000.000,00	Pengemabangan, Pengolahan Pengalih median naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Mamuju Tengah	Jumlah Naskah Kuno yang di Alih Mediakan	3 naskah	30.000.000,00
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Mamuju Tengah**	**Persentase Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipkan di Kearsipan**	**100%**	**200.000.000**	**Program Pengelolaan Arsip**	**Mamuju Tengah**	**Persentase Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipkan di Kearsipan**	**100%**	**80.000.000**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Mamuju Tengah**	**Persentase Arsip Dinamis yang terkelolah**	**100%**	**200.000.000**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Mamuju Tengah**	**Persentase Arsip Dinamis yang terkelolah**	**100%**	**80.000.000**
2.24.2.2.01.0001	Penciptaan dan Pengunaan Arsip Dinamis	Mamuju Tengah	Jumlah Arsip yang di ciptakan	10 Arsip	50.000.000,00	Penciptaan dan Pengunaan Arsip Dinamis	Mamuju Tengah	Jumlah Arsip yang di ciptakan	10 Arsip	50.000.000,00
2.24.2.2.01.0003	Pengawasan Arsip dinamis kewenagan kabupaten/kota	Mamuju Tengah	Jumlah Arsip Dinamis yang di Awasi	10 Arsip	150.000.000,00	Pengawasan Arsip dinamis kewenagan kabupaten/kota	Mamuju Tengah	Jumlah Arsip Dinamis yang di Awasi	10 Arsip	30.000.000,00
2.24.04	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Mamuju Tengah**	**Persentase Arsip yang lindungi dan di selamatkan**	**100%**	**70.000.000,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Mamuju Tengah**	**Persentase Arsip yang lindungi dan di selamatkan**	**100%**	**70.000.000,00**
2.24.04.2.01	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Mamuju Tengah**	**Persentase Arsip Yang di musnahkan**	**100%**	**70.000.000,00**	**Pelayanan izin menggunakan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota**	**Mamuju Tengah**	**Persentase Arsip Yang di musnahkan**	**100%**	**70.000.000,00**

2.24.04.2.01.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Mamuju Tengah	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	5 Arsip	70.000.000,00	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Mamuju Tengah	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	5 Arsip	70.000.000,00
1.02.01.2.01	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Mamuju Tengah	**Persentase Arsip yang memiliki Izin Penggunaan (%)**	**100%**	**50.000.000,00**	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang di Gabung dan atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	Mamuju Tengah	**Persentase Arsip Penggabungan/Pemekaran di Kabupaten**	**100%**	**50.000.000**
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Persentase Arsip yang memiliki Izin Penggunaan (%)	100%	50.000.000,00	Pendataan,Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Arsip penggabungan daerah yang telah di nilai untuk di tetapkan pemusnahanya	100%	50.000.000
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Mamuju Tengah	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	2	50.000.000,00	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Mamuju Tengah	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	2 Arsip	50.000.000
1.02.01.2.05	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Mamuju Tengah	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**1.709.849.402**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Mamuju Tengah	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**1.714.049.402**
1.02.01.2.05.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Mamuju Tengah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	**100%**	**226.400.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Mamuju Tengah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	**100%**	**235.900.000**
1.02.01.2.05.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Jumlah dokumen perencanaan PD	4 Dokumen105 Kali	130.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Jumlah dokumen perencanaan PD	4 Dokumen105 Kali	135.000.000,00
1.02.01.2.05.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	27.500.000,00

1.02.01.2.05.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	6.800.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	7.300.000,00
1.02.01.2.05.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 Dokumen	6.800.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 Dokumen	7.300.000,00
1.02.01.2.05.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dokumen	6.800.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dokumen	7.300.000,00
1.02.01.2.05.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	3 Dokumen 95	51.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	3 Dokumen 95	51.500.000,00
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Mamuju Tengah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	**100%**	**1.014.109.402**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Mamuju Tengah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	**100%**	**1.064.709.402**
1.02.01.2.06.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju Tengah	Jumlah ASN	12 0rang	1.004.109.402,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju Tengah	Jumlah ASN	12 0rang	1.054.109.402,00
1.02.01.2.06.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	30 Jenis	4.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	30 Jenis	4.500.000,00
1.02.01.2.06.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1 dokumen	6.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1 dokumen	6.100.000,00
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Mamuju Tengah	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**9.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Mamuju Tengah	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**9.000.000,00**
1.02.01.2.07.05.1.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	2 Orang	9.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	2 Orang	9.000.000,00
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Mamuju Tengah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**86.200.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Mamuju Tengah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**88.300.000**
1.02.01.2.06.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 unit	17.200.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 unit	18.200.000,00

1.02.01.2.06.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	10 Jenis	2.600.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	10 Jenis	2.900.000,00
1.02.01.2.06.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju Tengah	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	5500 Lembar	6.900.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju Tengah	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	5500 Lembar	7.100.000,00
1.02.01.2.06.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju Tengah	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	5 Media	5.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju Tengah	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	5 Media	5.300.000,00
1.02.01.2.06.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	Jumlah tamu yang difasilitasi	220 Orang	3.300.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	Jumlah tamu yang difasilitasi	220 Orang	3.300.000,00
1.02.01.2.06.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	62 Kali	51.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	62 Kali	51.500.000,00
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Mamuju Tengah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	**100%**	**287.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Mamuju Tengah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	**100%**	**242.500.000**
1.02.01.2.07.1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	1 Unit 24 Bulan	104.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	1 Unit 24 Bulan	104.000.000,00
1.02.01.2.07.1.7.5	Pengadaan Mebel	Mamuju Tengah	Jumlah mebel yang diadakan	3 Unit	13.500.000,00	Pengadaan Mebel	Mamuju Tengah	Jumlah mebel yang diadakan	3 Unit	13.500.000,00
1.02.01.2.07.1.7.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	3 Unit	50.000.000,00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	3 Unit	5.000.000,00
1.02.01.2.07.1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Tahun	120.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Tahun	120.000.000,00
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Perpustakaan	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**71.400.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Perpustakaan	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**58.400.000**
1.02.01.2.08.1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perpustakaan	Jumlah jasa surat menyurat	250 Lembar	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perpustakaan	Jumlah jasa surat menyurat	250 Lembar	2.500.000
1.02.01.2.08.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perpustakaan	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	5936 kwh,m3,bulan	35.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perpustakaan	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	5936 kwh,m3,bulan	40.000.000
1.02.01.2.08.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perpustakaan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Bulan	33.900.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perpustakaan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Bulan	15.900.000

1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Mamuju Tengah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**15.240.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Mamuju Tengah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**15.240.000**
1.02.01.2.09.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 Jasa	6.370.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 Jasa	6.370.000
1.02.01.2.09.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju Tengah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 Jasa	6.370.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju Tengah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 Jasa	6.370.000
1.02.01.2.09.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	4 Unit	2.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	4 Unit	2.500.000
JUMLAH					**2.984.849.402**					**3.039.049.402**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	3	4
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan**	**100%**	**910.000.000**
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perpustakaan yang dikelola**	100%	585.000.000
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik.	Jumlah Perpustakaan Berbasis Elektronik	3 Perpustakaan	150.000.000
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang di kembangkan	6 Perpustakaan	150.000.000,00
2.23.02.2.01.0004	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 perpustakaan	30.000.000,00
2.23.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50	130.000.000,00
2.23.2.2.01.0008	Pengembangan bahan pustaka	(Orang)	500 Exp 250 Judul	90.000.000,00
2.23.2.2.01.0009	Pengolahan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang di kelola	500 Exp 250 Judul	15.000.000,00
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan database dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Data Perpustakaan	1 dokumen	20.000.000,00
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengunjung Perpustakaan**	100%	**325.000.000**
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	100 peserta	80.000.000,00
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Perpustakaan yang tersedia	**2 Unit**	100.000.000,00
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang Menerima Penghargaan	20 Orang	95.000.000,00
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	50.000.000,00
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Presentase Koleksi Nasional Naskah Kuno yang dilestarikan**	100%	45.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.23.03.2.01	**PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan**	100%	**45.000.000**
2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan Pelestarian, dan pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang terlibat yang berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno	3 Orang	20.000.000,00
2.23.03.2.01.0002	Pengemabangan, Pengolahan Pengalih median naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah kuno yang di alih mediakan	3 naskah	25.000.000,00
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipkan di Kearsipan**	**100%**	**200.000.000**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Dinamis yang terkelolah**	**100%**	**200.000.000**
2.24.2.2.01.0001	Penciptaan dan Pengunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip yang di ciptakan	10 Arsip	50.000.000,00
2.24.2.2.01.0003	Pengawasan Arsip dinamis kewenagan kabupaten/kota	Jumlah Arsip Dinamis yang di Awasi	10 Arsip	150.000.000,00
2.24.04	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase Arsip yang lindungi dan di selamatkan**	**100%**	**70.000.000,00**
2.24.04.2.01	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Persentase Arsip Yang di musnahkan**	**100%**	**70.000.000,00**
2.24.04.2.01.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	5 Arsip	70.000.000,00
1.02.01.2.01	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Persentase Arsip yang memiliki Izin Penggunaan (%)**	**100%**	**50.000.000,00**
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase Arsip yang memiliki Izin Penggunaan (%)	100%	50.000.000,00
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	2	50.000.000,00
1.02.01.2.05	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**1.709.849.402**
1.02.01.2.05.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	**100%**	**226.400.000**
1.02.01.2.05.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	4 Dokumen105 Kali	130.000.000,00
1.02.01.2.05.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	25.000.000,00

KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1.02.01.2.05.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	6.800.000,00
1.02.01.2.05.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 Dokumen	6.800.000,00
1.02.01.2.05.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dokumen	6.800.000,00
1.02.01.2.05.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	3 Dokumen 95	51.000.000,00
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	**100%**	**1.014.109.402**
1.02.01.2.06.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	12 0rang	1.004.109.402,00
1.02.01.2.06.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	30 Jenis	4.000.000,00
1.02.01.2.06.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1 dokumen	6.000.000,00
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**9.000.000**
1.02.01.2.07.05.1.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	2 Orang	9.000.000
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**86.200.000**
1.02.01.2.06.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 unit	17.200.000,00
1.02.01.2.06.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	10 Jenis	2.600.000,00
1.02.01.2.06.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	5500 Lembar	6.900.000,00
1.02.01.2.06.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	5 Media	5.200.000,00
1.02.01.2.06.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	220 Orang	3.300.000,00
1.02.01.2.06.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	62 Kali	51.000.000,00
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	**100%**	**287.500.000**
1.02.01.2.07.1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	1 Unit 24 Bulan	104.000.000,00
1.02.01.2.07.1.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 Unit	13.500.000,00
1.02.01.2.07.1.7.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	3 Unit	50.000.000,00
1.02.01.2.07.1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Tahun	120.000.000,00
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**71.400.000**

KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1.02.01.2.08.1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	250 Lembar	2.500.000,00
1.02.01.2.08.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	5936 kwh,m3,bulan	35.000.000,00
1.02.01.2.08.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Bulan	33.900.000,00
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**15.240.000**
1.02.01.2.09.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 Jasa	6.370.000,00
1.02.01.2.09.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 Jasa	6.370.000,00
1.02.01.2.09.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	4 Unit	2.500.000,00
JUMLAH				**2.984.849.402**

Mamuju Tengah, Juli 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Ir.TRIKORA WAHAB
Pangkat : Pembina Utama Muda Tk.IV/c
NIP. 19631130 199303 1 004

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah dan semestinya dapat dijadikan pedoman bagi setiap unit kerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan selama 1 (satu) tahun

Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi serta langkah-langkah nyata dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka merealisasikan rencana-rencana yang sudah tertuang dalam bentuk dokumen Renja tersebut agar dapat dilaksanakan secara optimal.

Dengan adanya perencanaan kinerja yang baik, tentu akan meningkatkan motivasi kerja seluruh pegawai, dan dapat mendorong terjadinya suatu peningkatan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

RENCANA KERJA RKPD

(RENJA)



KANTOR KECAMATAN KAROSSA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Karossa Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan sasaran program bagi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk Tahun 2024 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana Kerja ini di susun dengan memperhatikan isu strategis yang berkembang seiring dengan perubahan dalam pencapaian pembangunan di Kecamatan Karossa.

Dokumen Renja iini di susun untuk memenuhi ketentuan yang di atur dalam Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”;

Semoga Renja ini bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah, Khususnya Kecamatan Karossa dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara umum.

Karossa, 02 Agustus 2023
Kepala Kantor

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KECAMATAN KAROSSA

HAERIL RIJAL P,S.IP
Pangkat : Pembina
Nip. 19810516 200212 1 008

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM..... 1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 2
1.3.1 MAKSUD..... 2
1.3.2 TUJUAN 2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANWAL OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RANWAL OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD 7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN KAROSSA 17
2.3 ISU-ISI PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN KAROSSA..... 18
2.4 PENELAAN USAHA PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT..... 21

BAB III TUJUAN, SASARAN DEAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 22
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RANWAL OPD 22
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 25

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Ranwal OPD Sampai Tahun Berjalan

Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah 8

Tabel 2.2 Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2023 yang Telah Memenuhi Target Kinerja 15

Tabel 3.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayan Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten

Mamuju Tengah 24

Tabel 4.1 Rencana Kerja Kantor Kecamatan Karossa Tahun Anggaran 2024 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Karossa Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Kantor Kecamatan Karossa Tahun 2024 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Karossa selanjutnya disebut Renja Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dan Renstra Kantor Kecamatan Karossa Tahun 2021-2026, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen RenjaKantor Kecamatan Karossa. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dirubah dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Renja ini menggambarkan tentang sasaran dan

tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Kecamatan Karossa serta menjelaskan indikator yang menjadi dasar penilaian keberhasilan suatu program atau kegiatan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Ranwal ini yaitu :

1. Sebagai pedoman bagi Kantor Kecamatan Karossa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2024.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Kecamatan Karossa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Kecamatan Karossa untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja OPD agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD Proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKOPD, Renstra OPD, dengan Ranwal K/L dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.3 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, srta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Ranwal OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Ranwal OPD sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Ranwal OPD tahun - tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Ranwal OPD Tahun Lalu, dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan / atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja. Jika OPD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerjapelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standar pelayanan OPD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .

2.4 Review terhadap Rencana Kerja RKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Prosesyang dilakukan yaitu membandingkan antara Rencana Kerja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rencana Kerja RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Kerja RKPD, atau program dan giatan cocok namun besaranya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagamana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Diskripsi untuk mengisi sub-sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal SKPD

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

1. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Kerja RKPD, baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini memuat tentang program-program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 disertai informasi sebagai berikut:

1. indikator kinerja;
2. Kelompok sasaran;
3. Lokasi kegiatan;
4. Kebutuhan dana indikatif
5. Sumber dana

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra OPD

Pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Karossa Tahun 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2024. Kantor Kecamatan Karossa telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2024), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026.

Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Karossa tahun 2023 telah berjalan dengan baik, sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah program kegiatan yang tertuang di dalam APBD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 atau dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Karossa Tahun 2023, hampir 100% program kerja yang direncanakan didalam RENJA Kantor Kecamatan Karossa tahun 2024 dapat direalisasikan.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023, dan realisasi renstra Kantor Kecamatan Karossa yang mengacu padahasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Tahun Berjalan
Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Kode							Uraian / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra OPD tahun 2026 (akhir tahun renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kagiatan tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024			Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2023 s/d TW II		Catatan sumber dana
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
1							*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*
7	**01**	**01**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**25 %**	**25 %**	**DAU**
7	01	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DAU
7	01	01	2	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	DAU
7	01	01	2	01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	DAU
7	01	01	2	01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	DAU

7	01	01	2	01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	DAU
7	01	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	DAU
7	01	01	2	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	DAU
7	01	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Apratur Negara Sipil	19 Orang	19 Orang	19 Orang	19 Orang	19 Orang	4 Laporan	4 Laporan	DAU
7	01	01	2	02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	DAU
7	01	01	2	02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	DAU
7	01	01	2	02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	-	-	DAU

7	01	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	1 Paket	1 Paket	DAU
7	01	01	2	05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	DAU
7	01	01	2	05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	DAU
7	01	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-	DAU
7	01	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	-	-	DAU

7	01	01	2	06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	-	-	DAU
7	01	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4000 Lembar	4000 Lembar	4000 Lembar	4000 Lembar	4000 Lembar	-	-	DAU
7	01	01	2	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DAU
7	01	01	2	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	28 Orang	28 Orang	DAU
7	01	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252 Orang	252 Orang	252 Orang	252 Orang	252 Orang	26 Orang	26 Orang	DAU
7	01	01	2	07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	DAU
7	01	01	2	07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	-	-	DAU
7	01	01	2	07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit			

7	01	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	188 Orang	188 Orang	DAU
7	01	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	700	700	700	700	700	1975 KWH	1975 KWH	DAU
7	01	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Jasa	2 Jasa	2 Jasa	2 Jasa	2 Jasa	1 Jasa	1 Jasa	DAU
7	01	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	3 Unit	3 Unit	DAU
7	01	01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	-	DAU
7	01	03					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dikoordinasikan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**DAU**
7	01	03	2	01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65 Laporan	65 Laporan	65 Laporan	65 Laporan	65 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	DAU

7	01	03	2	01	02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembagaan Kemasyarakatan	15 Lembagaan Kemasyarakatan	DAU
7	01	04					**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kasus Ketentramandan Ketertiban Yang Berhasil Diselasikan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**DAU**
7	01	04	2	01	02		Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	DAU
7	01	05					**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase rasio kasus intoleransi SARA per 1000 penduduk	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**DAU**
7	01	05	2	01	05		Penangan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	-	DAU
7	01	06					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**DAU**

7	01	06	2	01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	-	-	DAU
7	01	06	2	01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	-	-	DAU
7	01	06	2	01	11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	-	-	DAU
7	01	06	2	01	18		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa			

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2023 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100 %).

1. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Persentase
			Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Program :** Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Dukungan Administrasi dan Sarana/Prasarana **Kegiatan :** 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli	400 lembar	400 lembar	100%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja pulsa listrik dan internet	132 Voucer	132 Voucer	100%
	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi	5 orang	5 orang	100%
	4. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yg dibeli	36 Jenis	36 Jenis	100%
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	6000 Lembar	6000 Lembar	100%
	6. Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yg dibeli	3 paket	3 paket	100%
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Belanja Surat Kabar	24 exp	24 exp	100%
	8. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Snack yg dibeli	3150 Kotak	3148 Kotak	100%
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	100%	100%	100%
	10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan dinas ke dalam daerah	100%	100%	100%
	11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yg dibeli	12 Unit	12 Unit	100%

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Persentase
			Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	12. Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yg dibeli	38 Unit	38 Unit	100%
	13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bahan bangunan yg dibeli	14 Jenis	14 Jenis	100%
	14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah suku cadang yg dibeli	1 Paket	1 Paket	100%
3	**Program :** Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mendudkung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan **Kegiatan :** Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	42 buah	42 buah	100%
4	**Program :** Program Peningkatan Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan **Kegiatan :** 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yg disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%
	2. Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	3. Penyusunan RKA-SKPD/RKA-PPKD/DPA-SKPD/DPA-PPKD	Jumlah dokumen yg dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	4. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal)	Jumlah dokumen yg dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	5. Penyusunan laporan kepegawaian akhir tahun	Jumlah laporan yg disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	**Program :** Program Pemerintahan Umum, Koordinasi Pembangunan, Pembinaan Desa Pelayanan Perizinan/Non Perizinan				

	Kegiatan :				
	1. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa	Jumlah Desa pelaksanaan Monev	11 Desa	11 Desa	100%
	2. Bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan keuangan Desa	Jumlah peserta bimtek	33 orang	33 orang	100%
	3. Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	4. Pemberdayaan Perempuan	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%

5. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 %.
6. Faktor–faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan, Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024, faktor-faktor penyebabnya adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing-masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM (Personil) di Kecamatan Karossa.
7. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD. Target capaian program Renstra tahun 2016-2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rancangan Awal (Ranwal)
8. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah :

   Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Karossa

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Karossa

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kanor Kecamatan Karossa tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadapperkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Isu-isu penting dan masalah yang dihadapi Kecamatan Karossa didalammelaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan terbaik kepadamasyarakat adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Karossa dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Karossa :
    a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Karossa sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Karossa;
    b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan peralatan perkantoran bagi masing-masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
    c. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Karossa sehingga tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
    d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Karossa sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Karossa terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;
3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

    Tantangan :

    a. Terbatasnya sarana prasarana yang ada sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;
    b. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;

c. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;
d. Proses perekamam e- KTP di Kecamatan Karossa saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e-KTP tidak bisa dioperasionalkan secara optimal karena sering mengalami kerusakan sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mamuju Tengahatau di Kantor Kecamatan lain;
e. Belum adanya pencetakan KK dan e-KTP di Kantor Kecamatan.

Peluang :

a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya;
c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Karossa terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
   a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

      Pada tahun anggaran 2020, telah berhasil dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Karossa melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.
   b. Urusan Perencanaan Pembangunan

      Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2020, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya belum maksimal, dikarenakan ada beberapa

program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.

c. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

   Kecamatan Karossa mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan-pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit-bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, sertaharus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi.

d. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

   Pada tahun anggaran 2020, Kantor Kecamatan Karossa telah melaksanakan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan Pentas seni dan budaya, festifal, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Diharapkan partisipasi masyarakat akan lebih meningkat lagi tiap tahunnya.

e. Urusan Pemberdayaan Perempuan

   Pada tahun anggaran 2020, Kantor Kecamatan Karossa telah melaksanakan program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Diharapkan perempuan dapat lebih berperan pembangunan daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalammusrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasandari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga mengahasilkan usulan program yang dibawah ke Musyawarah Desa.

Di Musyawarah Desa menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga Tahun 2015-2020, dan RPJMN keempat tahun 2021-2026. RKP 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMN keempat. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuangan dalam RKP 2023 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2024.

Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Tema pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah pada RKPD Tahun 2024 adalah **"Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur di Dukung Dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum".**

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Kabupaten maka Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Mamuju Tengah secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Karossa Tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja (renja) OPD Kecamatan Karossa sangat diperlukan untuk membuat kerangka yang jelas dan member arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan. Rumusan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Karossa.

Renja Kecamatan Karossa Tahun 2024 ditujukan untuk memberikan Arah, Kebijakan Umum dan Prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Karossa. Selain itu Renja juga sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) berdasarkan program dan kegiatan, serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan peran, tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan percepatan proses sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi daerah dan kemampuan masyarakat, serta pencapaian tujuan pelayanan publik.

Sasaran dari penyusunan Renja adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna

mempertajam prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang optimal.

Dalam Renja Kantor Kecamatan Karossa tahun 2024, rumusan tujuan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur pemeritah di Kecamatan Karossa;
3. Meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Adapun rumusan sasaran diuraikan sebagai berikut :

1. Meingkatnya pelayanan kependudukan di Kantor Kecamatan Karossa;
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan di Kecamatan dan Pemerintahan Desa;
3. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa.

Tabel 3.1.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Karossa
Kabupaten Mamuju Tengah

NO	Indikator	Target SPM / IKK / Standar Nasional / Internasional	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatknya Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Administrasi Pemerintahan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	95%	100%	100%	
2	Meningkatnya Kualitas & Kedisiplinan Aparat Pemerintahan di Kantor Kecamatan Karossa	Persentase sumber daya aparatur yang memenuhi standar kompetensi dan kedisiplinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	90%	100%	100%	
3	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Isinya Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	95%	100%	100%	
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi pembangunan dan pembinaan pemerintahan desa serta pelayanan perizinan/non perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	90%	100%	100%	

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2024 yang dituangkan dalam 2024 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum program dan kegiatan Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 sebagaimana pada bab selanjutunya.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sebagai leading sektor dalam hal perencanaan di Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiata rutin OPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Renwal 2024 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan,visi dan misi organisasi.

Secara umum program dan kegiatan Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 sesuai pada **Tabel** berikut.

Tabel 4.1

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Karossa Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Pagu Indikatif	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Sistem penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan	**Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pemerintahan dan pelayanan kecamatan**	**Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan**	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai standar**	**Baik**	**2.136.547.550**	**Kecamatan Karossa**
			7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**103.000.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	20.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	Kecamatan Karossa

			7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumenperubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA -SKPD	1 Dokumen	30.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
			7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dn Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	11.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000	Kecamatan Karossa
			7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**1.324.047.550**	**Kecamatan Karossa**
			7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara	19 Orang	1.268.047.550	Kecamatan Karossa

			7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntantasi SKPD	24 Dokumen	21.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16 Laporan	25.000.000	Kecamatan Karossa
			7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian berjalan sesuai standar**	**100%**	**298.000.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	01	01	2.05	02	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	11.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	10.000.000	Kecamatan Karossa

			7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	25.000.000	Kecamatan Karossa
			7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**95.500.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	3.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	56.500.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8 Paket	5.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4000 Lembar	5.000.000	Kecamatan Karossa

			7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	6.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	200 Orang	10.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252 Orang	10.000.000	Kecamatan Karossa
			7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**100%**	**61.000.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	31.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	17 Unit	20.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	10.000.000	Kecamatan Karossa

			7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**165.000.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	2 Laporan	45.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	700 KWH	20.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Jasa	100.000.000	Kecamatan Karossa
			7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**2 Laporan**	**90.000.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknnya	8 Unit	60.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30.000.000	Kecamatan Karossa

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	**Meningkatnya Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa dan kelurahan dengan penataan administrasi sesuai standar**	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN**	**Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**33.000.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**15.000.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	65 Laporan	15.000.000	Kecamatan Karossa
			7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan**	**100%**	**18.000.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000	Kecamatan Karossa

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang berhasil Disediakan**	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang berhasil Disediakan**	**100%**	**55.000.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang berhasil Disediakan**	**100%**	**55.000.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	01	04	2.01	02	Harmoniasasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	55.000.000	Kecamatan Karossa
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	**Meningkatnya Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Desa dan kelurahan dengan penataan administrasi sesuai standar**	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Rasio Kasus Intoleransi SARA Per 1.000 Penduduk**	**100%**	**10.000.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus Intoleransi SARA yang Diselesaikan di tingkat Kecamatan**	**100%**	**10.000.000**	**Kecamatan Karossa**

			7	01	05	2.01	05	Penaganan Konflk Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2 Laporan	10.000.000	Kecamatan Karossa
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	**Meningkatnya Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa dan kelurahan dengan penataan administrasi sesuai standar**	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	**100%**	**102.000.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan**	**100%**	**102.000.000**	**Kecamatan Karossa**
			7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Desa	35.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	11 Desa	25.000.000	Kecamatan Karossa

			7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	11 Desa	22.000.000	Kecamatan Karossa
			7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pendesaan Diwilayah Kecamatan	11 Desa	20.000.000	Kecamatan Karossa
TOTAL											**2.336.547.550**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karossa Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kabupaten 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Mamuju Tengah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Karossa sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Karossa Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Karossa diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Karossa, 02 Agustus 2023

Camat Karossa,

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KECAMATAN KAROSSA

HAERIL RIJAL.P, S.IP
Pangkat : Pembina
NIP. 19810516 2002212 1 008

RENJA

RANCANGAN KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAB. MAMUJU TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaanNyalah seluruh rangkaian program kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2024 mudah-mudahan dapat terlaksanakan dengan baik.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan semua pihak untuk turut serta aktif dalam memaksimalkan hubungan antar instansi pemerintah baik di Kabupaten maupun di Provinsi dengan baik, meningkatkan SDM yang berkualitas, meningkatkan hubungan antara supra dan infra struktur politik semakin baik, dan adanya Ormas dan organisasi profesi yang semakin berkualitas dalam berpartisipasi menangani pelaksanaan pembangunan di segala bidang serta tidak terlepas daripada adanya rasa kebersamaan dalam kesatuan bangsa dan masyarakat.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 (RENJA- TA.2024) ini berisikan seluruh rangkaian pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang Tahun Anggaran 2024 yang dalam penyusunannya tentunya tidak terlepas dari kekurangan. Saran dan perbaikan kami harapkan guna lebih menyempurnakan Rencana Kerja ini sebagai bahan acuan dan pedoman untuk menyusun program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 guna meningkatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Tobadak, 20 Juli 2023
Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mamuju Tengah

Abdullah Kalu, S.Pd.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19690518 199212 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…..…….

Daftar Isi…..…….

BAB I Pendahuluan…..……

A. Latar Belakang……

B. Landasan Hukum…….……

C. Maksud Dan Tujuan ……

D. Sistematika Penulisan ……

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu (2022)……

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2022) Dan Capaian Renstra SKPD …….

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD…….

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD……

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……..…….

E. Penelaahan Program / Kegiatan Masyarakat……

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan..…….

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional…..…….

B. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD..……

C. Program Dan Kegiatan……..……

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah…….

BAB V Penutup…….

A. Catatan Penting……...

B. Kaidah Pelaksanaan……...

C. Rencana Tindak Lanjut……...

Lampiran – Lampiran……

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun 2 dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya, dan merupakan satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah tahunan pada umumnya.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama– sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

Renja Badan Kesbangpo Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 disusun melalui perencanaan yang melibatkan seluruh Seksi yang ada. Masing-masing Seksi wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan sasaran prioritas yang sudah ditetapkan bersama.

Proses penyusunan Renja juga tidak terlepas dari penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan politik Tahun 2024 (Musrenbang) dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya.

Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja PD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Renja PD berfungsi menjabarkan Renstra (Rencana Strategis) ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan PD.

1.2. Landasa Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Mamuju Tengah adalah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Progr am dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

Maksud penyusunan Renja Badan Kesbangpo Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kesbangpo Kabupaten Mamuju Tengah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Tujuan penyusunan Renja adalah :

1. Menjabarkan Renstra Badan Kesatuan bangsa dan politik Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2021 dan rancangan awal Renstra 2021-2026 dalam rencana program kegiatan;
2. Sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan bangsa dan politik Mamuju Tengah dalam melaksanakan program kegiatan Tahun 2024;
3. Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan bangsa dan politik Mamuju Tengah dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
2.5 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

BAB III HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capain tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnnya pada waktu penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target Renstra Kesatuan Bangsa Dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun lalu, dan Ralisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan/atau realisasi APBD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil, keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil, keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil, keluaran yang direncanakan ;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program / kegiatan ;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktorfaktor penyebab tersebut.

Adapun tabel yang perlu disajikan, disesuaikan dengan perangkat daerah masing-masing sebagaimana format tabel sebagai berikut

Tabel 1.
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023
Kabupaten Mamuju Tengah

ode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Trget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kecukupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prsarana	1.469.811.032	788.813.571	1.514.011.032	1.267.233.677	1	210.198.000	491.865.469	2

	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & dan evaluasi tepat waktu**	**223.698.000**	**14.124.458**	**210.198.000**	**312.887.199**	**10**	**210.198.000**	**537.209.657**	**2**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan renja perangkat daerah yang tersusun	85.000.000	-	85.000.000	50.758.999	1	85.000.000	135.758.999	2
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan penyusunan Perubahan dokumenRKA-PD	47.198.000	14.124.458	47.198.000	66.850.880	1	47.198.000	128.173.338	3
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-PD	58.000.000		50.000.000	115.364.820	2	50.000.000	165.364.820	3
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan penyusunan Perubahan dokumen DPA-PD	18.000.000	-	15.000.000	5.709.780	0	15.000.000	20.709.780	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP,LPPD,LKPD dan Evaluasi RKPD Kinerja PD	15.500.000	-	13.000.000	74.202.720	6	13.000.000	87.202.720	6

	Administrasi keuangan perangkat daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**435.144.412**	**339.016.038**	**445.144.412**	**388.555.303**	**1**	**435.144.412**	**1.162.715.753**	**3**
	Penyediaan gaji dan tujangan ASN	Jumlah PNS yang digaji dan diberikan tunjangan ASN	435.144.412	339.016.038	445.144.412	388.555.303	1	435.144.412	1.162.715.753	3
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani**	**85.000.000**	**0**	**70.000.000**	**7.092.400**	**0**	**70.000.000**	**77.092.400**	**1**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	85.000.000		70.000.000	7.092.400	0	70.000.000	77.092.400	1
	Admininstrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**337.000.000**	**67.501.955**	**307.000.000**	**279.353.813**	**5**	**307.000.000**	**653.855.768**	**2**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kipas angin, AC 2 Unit, Leptop 3 Unit, Printer 4 Unit	21.000.000	-	24.000.000	78.493.880	3	24.000.000	102.493.880	5
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	18.000.000	5.426.200	18.000.000	5.283.400	0	18.000.000	28.709.600	2
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kebutuhan makan dan minum tamu yang terpenuhi	38.000.000	-	35.000.000	16.455.000	0	35.000.000	51.455.000	1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	260.000.000	62.075.755	230.000.000	179.121.533	1	230.000.000	471.197.288	2
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi**	**299.800.000**	**229.025.000**	**330.000.000**	**226.025.000**	**2**	**216.668.620**	**671.718.620**	2

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	119.900.000	89.925.000	130.000.000	86.925.000	1	26.668.620	203.518.620	2
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang tersedia	60.000.000	19.200.000	60.000.000	19.200.000	0	60.000.000	98.400.000	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	119.900.000	119.900.000	140.000.000	119.900.000	1	130.000.000	369.800.000	3
	Penjediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**persentase jasa penunjang urusan pemerintahan**	**62.500.000**	**125.000.000**	**125.000.000**	**50.958.562**	**50**	**125.000.000**	**300.958.562**	5
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat yang keluar	35.000.000	35.000.000	35.000.000	8.245.520	1	35.000.000	78.245.520	2
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah satuan jas komunikasi jasa sumber daya air dan jasa listrik yang dipakai	20.000.000	12.000.000	12.000.000	20.638.042	48	12.000.000	44.638.042	2
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	7.500.000	78.000.000	78.000.000	22.075.000	1	78.000.000	178.075.000	24
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**26.668.620**	**14.146.120**	**26.668.620**	**2.361.400**	**3**	**23.000.000**	**39.507.520**	**1**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	26.668.620	14.146.120	26.668.620	2.361.400	3	23.000.000	39.507.520	1

	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**308.550.000**	**281.490.000**	**308.550.000**	**897.962.640**	**100**	**897.962.640**	**2.077.415.280**	7
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Jumlah kebijakan teknis tentang fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik**	**308.550.000**	**281.490.000**	**308.550.000**	**897.962.640**	**100**	**897.962.640**	**2.077.415.280**	7
	Penyusuna program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi partai politik	Jumlah partai politik yang telah iverifikasi dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana hibah	308.550.000	281.490.000	308.550.000	897.962.640	100	897.962.640	2.077.415.280	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase kelompok yang dibina ketahanan ekonomi, sosial dan budayanya.**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**101.241.040**	**1**	101.241.040	**302.482.080**	3
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terumuskan**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**101.241.040**	**1**	**101.241.040**	**302.482.080**	3
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.241.040	1	101.241.040	302.482.080	3

	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase peningkatan kewaspadaan nasiaonal dan capaian penanganan konflik**	**200.000.000**	**79.886.895**	**125.000.000**	**341.937.598**	**1**	**341.937.598**	**763.762.091**	4
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Jumlah dokumen laporan Kebijakan teknis dan jumlah Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**200.000.000**	**79.886.895**	**125.000.000**	**341.937.598**	**1**	**341.937.598**	**763.762.091**	4
	Pelaksanaan forum kooordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	Jumlah pertemuan rapat fasilitasi FORKOPIMDA	200.000.000	79.886.895	125.000.000	341.937.598	1	341.937.598	763.762.091	4

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah Barat adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tercapai tidaknya pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah. Akuntabilitasis merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah selama Tahun 2022 dan Perkiraan target Tahun 2024. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

A. Penetapan Indikator Kinerja

   Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.Indikator Kinerja Kegiatan meliputi Indikator Masukan (Imput), Keluaran (Output), Hasil (Outcomes), Manfaat (Benefit) dan dampak (Impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indicator lainnya. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indicator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

   Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, Pengukuran ini dilakukan dengan mamanfaatkan data kinerja. Secara terinci hasil-hasil yang telah dicapai selama Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2019.

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Mamuju Tengah

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Unit Pelaksana
						21	22	23	24	25	21	22	23	24	25	21	22	23	24	25	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

	Meningkatnya kualitas layanan dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah																																				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase kecukupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prsarana**	**705.271.599**	**60.240**	**1.442.811.032**	**10.864**	**1.175.636.636**	**60.423**	**1.632.011.032**	**60.423**	**1.671.511.032**	**60.423**	**1.714.011.032**	**60.424**	**1.757.511.032**	**351**	**996.713.571**	**60.475**	**1.267.233.677**																	

		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & dan evaluasi tepat waktu**	**-**	**100%**	**223.698.000**	**3**	**186.060.299**	**9**	**210.198.000**	**9**	**212.698.000**	**9**	**216.198.000**	**9**	**220.698.000**	**100%**	**14.124.458**	**4**	**312.887.199**																	

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan renja perangkat daerah yang tersusun			85.000.000		-	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	0	-	1	50.758.999																	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan penyusunan			47.198.000	1	130.800.000	1	47.198.000	1	47.198.000	1	47.198.000	1	47.198.000	1	14.124.458	1	66.850.880																	

			Perubahan dokumenRKA-PD																																		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-PD			58.000.000	1	48.198.000	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.000.000	1	58.000.000			0	115.364.820																	

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan penyusunan Perubahan dokumen DPA-PD			18.000.000	1	7.062.299	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	0	-	0	5.709.780																	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP, LPPD ,LKPD dan Evaluasi RKPD Kinerja PD			15.500.000	-	-	4	13.000.000	4	13.500.000	4	15.000.000	4	15.500.000	0	-	2	74.202.720																	

		Administrasi keuangan perangkat daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**301.120.044**	**100%**	**435.144.412**	**6**	**435.144.412**	**6**	**445.144.412**	**6**	**461.144.412**	**6**	**445.144.412**	**6**	**445.144.412**	**6**	**339.016.038**	**100**	**388.555.303**																	

		Penyediaan gaji dan tujangan ASN	Jumlah PNS yang digaji dan diberikan tunjangan ASN	301.120.044	6	435.144.412	6	435.144.412	6	445.144.412	6	461.144.412	6	445.144.412	6	445.144.412	6	339.016.038	6	388.555.303																	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**70.000.000**	**8**	**75.000.000**	**5**	**80.000.000**	**7**	**85.000.000**	**0**	**0**	**86**	**7.092.400**																	

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	0					6	70.000.000	8	75.000.000	5	80.000.000	7	85.000.000			6	7.092.400																	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**152.152.100**	**60.004**	**337.000.000**	**10.018**	**62.319.325**	**60.163**	**307.000.000**	**60.161**	**299.000.000**	**60.164**	**325.000.000**	**60.163**	**337.000.000**	**72**	**67.501.955**	**60.135**	**279.353.813**																	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kipas angin, AC 2 Unit, Leptop 3 Unit,		3	21.000.000	2	10.560.000	3	24.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	3	21.000.000	**-**	**-**	**3**	**78.493.880**																	

			Printer 4 Unit																																		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	6.103.300	60.000	18.000.000	9.984	2.995.200	60.000	18.000.000	60.000	18.000.000	60.000	18.000.000	60.000	18.000.000	12	5.426.200	**60.000**	**5.283.400**																	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kebutuhan makan dan minum tamu		100%	38.000.000	12	5.437.965	100	35.000.000	100	36.000.000	100	37.000.000	100	38.000.000	-	-	12	16.455.000																	

			yang terpenuhi																																		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	146.048.800	60 Kali	260.000.000	20	43.326.160	60	230.000.000	60	240.000.000	60	250.000.000	60	260.000.000	60	62.075.755	120	179.121.533																	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi**	**112.000.000**	**2**	**289.800.000**	**17**	**322.700.000**	**17**	**380.000.000**	**17**	**395.000.000**	**17**	**410.000.000**	**17**	**415.000.000**	**50**	**233.025.000**	**50**	**226.025.000**																	

		Pemerintah Daerah																																								
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan		1	119.900.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	140.000.000	1	145.000.000	1	89.925.000	1	86.925.000																						
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpeli	-	4 Unit	50.000.000	14 unit	7.700.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	14 unit	4.000.000																						

			hara																																		
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang tersedia				15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	48	19.200.000	48	19.200.000																	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	112.000.000	1	119.900.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	119.900.000	1	119.900.000																	

		Penjediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**persentase jasa penunjang urusan pemerintahan**	**132.409.455**	**225**	**80.500.000**	**813**	**135.043.980**	**215**	**143.000.000**	**215**	**152.000.000**	**215**	**161.000.000**	**215**	**178.000.000**	**215**	**324.900.000**	**97**	**50.958.562**																	

		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat yang keluar	6.600.000	200	35.000.000	800	9.711.000	200	35.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000	48	8.245.520																	

		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah satuan jas komunikasi jasa sumber daya air dan jasa listrik yang dipakai	7.706.155	12	20.000.000	12	6.332.980	12	12.000.000	12	14.000.000	12	18.000.000	12	20.000.000	12	12.000.000	48	20.638.042																	

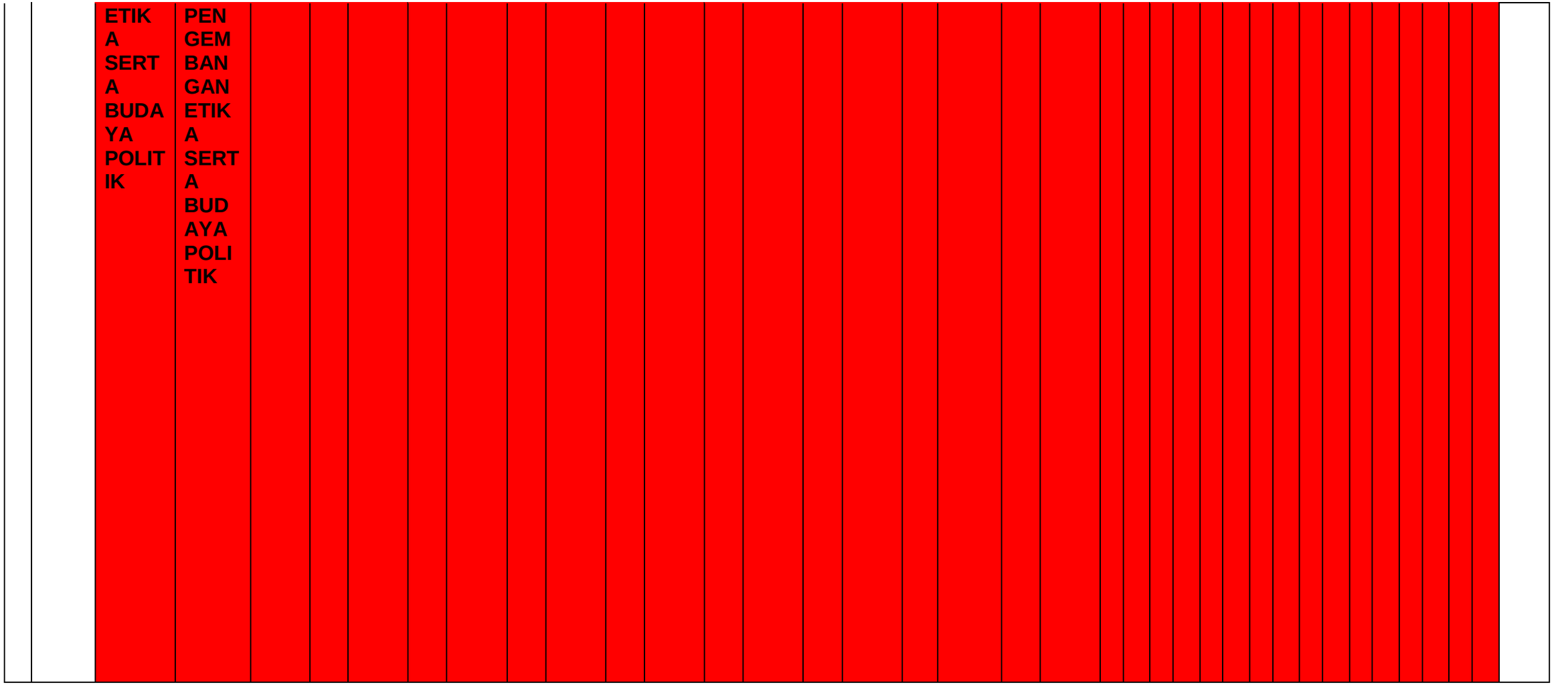
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	112.000.000	1	18.000.000	1	119.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	199.900.000	0	0																	

		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6.103.300	12	7.500.000	-	-	2	78.000.000	2	85.000.000	2	90.000.000	2	105.000.000	2	78.000.000	1	22.075.000																	

		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**7.590.000**	**7**	**76.668.620**	**7**	**34.368.620**	**7**	**76.668.620**	**7**	**76.668.620**	**7**	**76.668.620**	**7**	**76.668.620**	**7**	**18.146.120**	**3**	**2.361.400**																	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeli	Jumlah kendaraan dinas operasional atau	7.590.000	3	26.668.620	3	26.668.620	3	26.668.620	3	26.668.620	3	26.668.620	3	26.668.620	3	14.146.120	3	2.361.400																	

		haraan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dinas operasional atau lapangan	lapangan																																		
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	-	4	50.000.000	4	7.700.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	4.000.000	0	-																	

		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	**PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN**	**149.199.152**	**15**	**403.550.000**	**15**	**382.000.000**	**10**	**308.550.000**	**15**	**383.550.000**	**15**	**393.550.000**	**15**	**403.550.000**	**15**	**72.231.490.000**	**100**	**897.962.640**																	


ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demo	**Jumlah kebijakan teknis tentang fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik**	**149.199.152**	**15**	**403.550.000**	**15**	**382.000.000**	**10**	**308.550.000**	**15**	**383.550.000**	**15**	**393.550.000**	**15**	**403.550.000**	**15**	**72.231.490.000**	**100**	**897.962.640**																	

		krasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta																																			

		Pemantauan Situasi Politik																																			

		Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan,	Jumlah partai politik yang telah iverifikasi dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana hibah	102.331.695	10	308.550.000	10	308.550.000	10	308.550.000	10	308.550.000	10	308.550.000	10	308.550.000	10	281.490.000	100	897.962.640																	

		perwakilan dan partai politik, pemilihan umum /pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi partai politik																																			

		Pelaksanaan monitoring , evaluasi Dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan	Jumlah tim pengawas pemilihan umum	46.867.457	5	95.000.000	5	73.450.000	-	-	5	75.000.000	5	85.000.000	5	95.000.000	5	71.950.000.000	0	-																	

		pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum /pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi partai politik																																			

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase kelompok yang dibina ketahanan ekonomi, sosial dan budayanya.**	**25.253.620**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**101.241.040**																	

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terumuskan**	**25.253.620**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**101.241.040**																	

		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Keruk	Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	25.253.620	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	101.241.040																	

		unan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																																			

		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase peningkatan kewaspadaan nasiaonal dan capaian penanganan konflik**	**78.916.897**	**4**	**200.000.000**	**4**	**80.265.945**	**4**	**125.000.000**	**4**	**140.000.000**	**4**	**150.000.000**	**4**	**200.000.000**	**4**	**79.886.895**	**1**	**341.937.598**																	

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Jumlah dokumen laporan Kebijakan teknis dan jumlah Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konfl**	**78.916.897**	**4**	**200.000.000**	**4**	**80.265.945**	**4**	**125.000.000**	**4**	**140.000.000**	**4**	**150.000.000**	**4**	**200.000.000**	**4**	**79.886.895**	**1**	**341.937.598**																	

			ik Sosial																																		
		Pelaksanaan forum kooordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	Jumlah pertemuan rapat fasilitasi FOR KOPIMDA	78.916.897	4	200.000.000	4	80.265.945	4	125.000.000	4	140.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	79.886.895	1	341.937.598																	

Tindak lanjnut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya ; Tetap mempertahankan kerjasama yang baik dan terkordinir sesuai target

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya*);

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
2) Menyelenggarakan pemberian dukungan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi kesekretariatan, hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategis daerah dan pelindungan masyarakat;
3) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Analisis kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

- **Sasaran** : Peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan hak dan kewajiban politik yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan berdemokrasi, hal ini dapat tertuang dalam Program Pendidikan Politik Masyarakat yang dijabarkan dalam Kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Mamuju Tengah dan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.
- **Sasaran** : Peningkatan pengembangan dan pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang dalam Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas yang dijabarkan dalam Kegiatan Tim Fasilitasi, Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Ormas dan Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Permendagri No.57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas.
- **Sasaran** : Peningkatan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara yang tertuang dalam Program Pembinaan Ideologi yang djabarkan dalam Kegiatan Dialog dan Seminar Nilai-Nilai Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Komunisme, Terorisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi

Muda; Program Pembinaan Karakter Bangsa dijabarkan dalam RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024

- **Sasaran** : Peningkatan waspada dini, deteksi dini & cegah dini gejala gangguan Kamtibmas yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang dijabarkan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi dam Evaluasi Penanganan Konflik Sosial; Kegiatan Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing; Kegiatan Pemantauan dan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial serta Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban yang dijabarkan dalam Kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- **Sasaran** : Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Harmonis Antar Suku, Umat Beragama dan Golongan yang tertuang dalam Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan yang dijabarkan ke dalam Kegiatan Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama serta Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas yang dijabarkan dalam Kegiatan Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama.

Kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1) Terlaksananya proses pelayanan secara umum kepada publik sesuai kemampuan yang dimiliki.
2) Terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.
3) Terwujudnya sinkronisasi antar mitra kerja yang terkait.
4) Terdeteksinya secara dini hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan sosial politik di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
5) Hasil realisasi yang dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

1) Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik.
2) Kurangnya fasilitas infrastrutur politik.
3) Masih kurangnya kemandirian dan kinerja infrastruktur politik
4) Pembangunan wawasan kebangsaan dan watak budaya demokrasi.
5) Ketahanan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa akan ancaman bencana.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan Uraian Mengenai

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah, serta hambatam dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan / atau realisasi APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1) Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil, keluaran yang direncanakan ;
2) Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil, keluaran yang direncanakan ;

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 537.209.657; yang terdiri dari 7 kegiatan sebagai berikut;
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 1.162.715.753 yang terdiri dari 2 Kegiatan sebagai berikut;
   1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 77.092.400; yang terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut'
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 653.855.678; yang terdiri dari 7 kegiatan;
   1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Badan
   2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   3) Penyediaan Bahan Logistik Badan
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 671.718.620yang terdiri dari 5 kegiatan;
   1) Pengadan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Lapangan
   2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3) Pengadaan Mebel
   4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   5) Pengadaan Gedung Badan atau Bangunan Lainnya
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Pagu Anggaran Rp. 300.958.562; Yang Terdiri Dari 4 Kegiatan;
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan
   4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan
g. Penjediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan pagu anggaran Rp. 300958562; yang terdiri dari 5 kegiatan;
   1) Penyediaan jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perrangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   4) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan
   5) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 39.507.520; yang terdiri dari 2 kegiatan;
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
i. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan

Etika Serta Budaya Politik dengan pagu anggaran Rp. 2.077.415.280; yang terdiri dari 3 kegiatan;

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

j. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan pagu anggaran Rp. 302.482.080; yang terdiri dari 1 kegiatan;

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

k. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan pagu anggaran Rp. 763.762.091; yang terdiri dari 1 Kegiatan:

1) Pelaksanaan forum kooordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota

3) Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil, keluaran yang direncanakan ;

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program / kegiatan ;

a. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana.

a) Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada di bawah langsung kendali tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah.

b) Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

a) Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b) Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah.

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

a) Terlaksananya proses pelayanan secara umum kepada publik sesuai kemampuan yang dimiliki.
b) Terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.
c) Terwujudnya sinkronisasi antar mitra kerja yang terkait.
d) Terdeteksinya secara dini hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan sosial politik di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
e) Hasil realisasi yang dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

6) ijakan / tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

a) Peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan hak dan kewajiban politik yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan berdemokrasi.

b) Peningkatan pengembangan dan pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Kbupaten Mamuju Tengah.
c) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara.
d) Peningkatan waspada dini, deteksi dini & cegah dini gejala gangguan Kamtibmas yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta,
e) Peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.
f) Peningkatan fasilitasi kelembagaan partai politik serta mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**3.691.147.240,00**							**6.882.700.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**3.691.147.240,00**							**6.882.700.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)***				***100***	**1.414.597.240,00**							**2.337.700.000,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					82.000.000,00							202.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)				*100*		*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					35.000.000,00							50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*3.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*3.00*	
			Forum opd badan kesatuan bangsa dan polik kab. mamuju tengah (Dokumen)				*1*	*20.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD di kab. mamuju tengah, skpd lintas sektor*		

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Renstra dan renja (Laporan / Dokumen)				*2*	*15.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*			
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*1.00*		
			Penyusunan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan kesbangpol kab. mamuju tengah*			
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.000.000,00					Badan kesbangpol kab. mamuju tengah		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan kesbang pol kab. mamuju tengah*	*1*		
			Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbang pol kab. mamuju tengah*			
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						7.000.000,00					Badan Kesbang pol kab. mamuju tengah		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbang pol kab. mamuju tengah*	*1*		

			Penyusunan dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*7.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbabgpol kab. mamuju tengah*			
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.000.000,00					Badan Kesbabgpol kab. mamuju tengah		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbabgpol kab. mamuju tengah*	*1*		
			penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah*			
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan						15.000.000,00					Badan Kesbangpol kab.		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										mamuju tengah			POLITIK
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*4*	*4*	*4.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah*	*4*		
			Penyusunan Dokumen LKjIP,LPPD,LKPD dan Evaluasi RKPD Kinerja PD (Laporan)				*4*	*15.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah*			
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat						10.000.000,00					Badan Kesbangpol kab.		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

		Daerah										mamuju tengah			POLITIK
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah*	*1*		
			Penyusunan Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kab. Mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Badan Kesbangpol Kab. mamuju tengah*			
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						420.000.000,00						840.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)				*100*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*100*		
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						400.000.000,00						800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*6.00*	*6.00*	*12*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*12*		
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Dan Tunjangan Fungsional (Orang / Bulan)				*12*	*400.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN*			
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00					ASN		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*ASN*	*1.00*		

			(Laporan)												
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pegawai kesbangpol*			
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.000.000,00						pegawai kesbangpol		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		*0.00*	*1*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*pegawai kesbangpol*	*1*		

			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)													
			penyusunan laporan keuangan bulanan/ trisemester / semster SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ trisemester / semster SKPD (Laporan)				*2*	*10.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai kesbangpol*			
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000,00							10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)				*100*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		

	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					5.000.000,00						10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*1*		
		Penyusunan Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Laporan)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol kab. Mamuju Tengah*		
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					250.000.000,00						270.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)				*100*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*100*		

	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					20.000.000,00						20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*1*	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					200.000.000,00					Pegawai Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*1*	*1*	*5.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*Pegawai Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*5.00*	

			Jumlah PTT yang Dibayarkan Gajinya dan Jumlah operator yang dibayarkan gajinya (Bulan)				*12*	*200.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PTT Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*			
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						30.000.000,00					PTT Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Sulawesi selatan dan Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*PTT Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*10*		
			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yang mampu implement				*3*	*30.000.000,00*	*(Sulawesi Selatan, Kab. Mamuju, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*			

			asikan peraturan perundang-undangan (Orang)													
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						295.000.000,00							452.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)				*100*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*1*		
			Tersediany a peralatan dan perlengkap an kantor (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbang pol Kab. Mamuju Tengah*			

								)							
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*1*		
		Jumlah ATK yang disediakan (Bulan)				*12*	*15.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*			
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*1*		

								)							
			Laporan Fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat, Lsm, Omas, partai politik, Para opd, Mahasiswa/mahasiswi, pelajar*			
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							250.000.000,00					masyarakat, Lsm, Omas, partai politik, Para opd, Mahasiswa/mahasiswi, pelajar	350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*2.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*masyarakat, Lsm, Omas, partai politik, Para opd, Mahasiswa/mahasiswi, pelajar*	*2*		

			Penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*200.000.000,00*	*(Sulawesi Selatan, Kalimantan, DKI Jakarta, dan kab. mamuju, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Kesbangpol dan PTT*			
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*50.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Kebangpol dan PTT*			
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						262.997.240,00							447.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)				*100*		*(Kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau						95.997.240,00							-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KAb. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*0.00*		
			Belanja sewa kendaraan dinas (Unit)				*1*	*95.997.240,00*	*(mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*badan kesbang pol*			
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						22.000.000,00					badan kesbang pol		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kab. Mamuju Tengah, Tobadak)*				*badan kesbang pol*	*4*		
			Tersediany a kendaraan				*1*	*22.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah,*	*Dana Transfer Umum-*			*Badan Kesbang pol Kab.*			

			dinas ooperasional atau lapangan (motor metik dan motor trail (Unit)					*KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Alokasi Umum*			*Mamuju Tengah*			
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						75.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*8.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*8.00*		
		Pengadaan mebel (4 Meja Pejabat dan 4 kursi Pejabat) (Unit)				*8*	*75.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*			
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		177.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*10.00*		
			3 Leptop, 1 Komputer, 2 AC, 1 Printer, 2 Kipas Angin, (Unit)				*9*	*70.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah*			
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.600.000,00							61.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)				*100*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00							15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, Tobadak)*					*1*		
			Penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)				*1*	*15.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*			
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		21.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*3.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*3*		
			Jumlah pembayaran bulan rekening telepon, air dan listrik. (Laporan)				*3*	*20.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan kesabngpol Kab. Mamuju Tengah*			

								)							
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					24.600.000,00					Badan kesabng pol Kab. Mamuju Tengah		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*2*	*2.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*Badan kesabng pol Kab. Mamuju Tengah*	*2.00*		
			Pembayaran honorarium supir (Laporan)				*1*	*15.600.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Masyarakat Non PNS*			
			Pembayaran honorarium tenaga kebersihan (Laporan)				*1*	*9.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*masyarakat non PNS*			
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah					40.000.000,00							55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													POLITIK
			Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)				*100*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					15.000.000,00							30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*1*	

			pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit)				*1*	*15.000.000,00*	*(Kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kepala badan kesbangpol kab. mamuju tengah*			
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00					Kepala badan kesbangpol kab. mamuju tengah		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*1.00*	*1.00*	*7*		*(Kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Kepala badan kesbangpol kab. mamuju tengah*	*7*		
			Pembayaran pajak kendaraan				*7*	*5.000.000,00*	*(Kab. mamuju tengah,*	*Dana Transfer Umum-*			*Badan Kesbangpol Kab.*			

		dinas operasional atau lapangan (Tahun)						*KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Alokasi Umum*			*Mamuju Tengah*			
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*10*		
		Pemeliharaan mebel (Unit)				*10*	*10.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*			
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		*0.00*	*0.00*	*20*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJ*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*20*		

			(Unit)						*U TENGAH)*						
			Pemilharaan peralatan dan mesin lainnya (Unit)				*20*	*10.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*		
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (%)***				***100***	**1.020.000.000,00**				**Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat**	***Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah***		**1.600.000.000,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan						1.020.000.000,00				Meningkatkan			1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

		Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat				POLITIK
			Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dokumen)				*5*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*5*		
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah						970.000.000,00				Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Kebangsaan												
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*5*	
			Fasilitasi penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera (PASKIBRAKA) (Dokumen)				*1*	*850.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelajar SMA sederajat,*		

			Pembentukan tim gugus tugas gerakan nasional revolusi mental (GNRM) (Dokumen)				*1*	*45.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN*			
			Penguatan peran dan kapasitas forum pembauran kebangsaan (FPK) (Dokumen)				*1*	*40.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
			Peningkatan kesadaran bela negara (Dokumen)				*1*	*35.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN*			
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,						35.000.000,00					ASN		65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*150.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*ASN*	*150.00*		
			Jumlah orang yang mengikuti koordinasi (Orang)				*50*	*35.000.000,00*	*(Jakarta, Sulawesi barat, sulawesi selatan, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Mitra Badan kesbang pol kab. mamuju tengah*			
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang						15.000.000,00					Mitra Badan kesbang pol kab. mamuju		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										tengah			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Mitra Badan kesbang pol kab. mamuju tengah*	*1.00*		

			Terlaksananya monitoring evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)				*1*	*15.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai kesbangpol*			
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA**						**793.550.000,00**				**Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**			**1.635.000.000,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

		SERTA BUDAYA POLITIK	***PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK (%)***				***100***					***Pegawai kesbangpol***			
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan					793.550.000,00				Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			1.635.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik													
			Jumlah dokumen kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (Dokumen)				*15*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*1.600.000.000*		

	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					748.550.000,00				Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai		*0.00*	*1*	*6*		*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*60*	

			Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)																				
			Belanja bantuan hibah bantuan keuangan kepada partai politik (Dokumen)				*1*	*308.550.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*partai politik*										
			Kampanye publik iklan layanan masyarakat untuk mengingkatkan partisiipasi pemilu sentak 2024 (Dokumen)				*1*	*45.000.000,00*	*(KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*										
			pembentukan dan operasional tim				*1*	*75.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*pegawai kesbangpol*										

			pemantauan penyelenggaraan tahapan pemilu pilkaa 2024 (DESK PILKADA) (Dokumen)						*, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Alokasi Umum*							
			sosialisasi desa peduli pemilu pemilihan (DP3) (Dokumen)			*1*	*250.000.000,00*		*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pelajar*				
			Sosialisasi peningkatan peran masyarakat dalam mengikuti pilkada tahun 2024 (Dokumen)			*1*	*50.000.000,00*		*(kabupaten mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kelompok perempuan dan pemilih pemula*				
			varifikasi, evaluasi dan pelaporan bantuan keuangan partai			*10*	*20.000.000,00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*partai polik*				

			politik (Dokumen)						*)*						
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					25.000.000,00					partai polik		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi		*0.00*	*0.00*	*100*		*(kab.mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*partai polik*	*100*	

			Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)																
			Terlaksananyankoordinasi dinidang pendidikan politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe				*100*	*25.000.000,00*	*(kab.mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Mitra Badan kesbangpol kab. mamuju tengah*					

			milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)													
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						20.000.000,00					Mitra Badan kesbang pol kab. mamuju tengah		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Mitra Badan kesbangpol kab. mamuju tengah*	*1*		
			pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di daerah (Laporan / Dokumen)				*1*	*20.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			

4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG EMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN (%)***				***100***	**145.000.000,00**				**Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat**	***masyarakat***		**440.000.000,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						145.000.000,00				Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			440.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terumuskan. (Dokumen)				*3*		*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*355.000.000*		
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						75.000.000,00				Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(kab.mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*3*		
			temu toko agama, generasi muda antar umat beragama se-kabupaten mamuju tengah (Dokumen)				*1*	*75.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ormas,fkub, pemuda di kabupaten mamuju tengah*		
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,						35.000.000,00				Meningkatkan Ketenteraman dan	ormas,fkub, pemuda di kabupaten mamuju		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									Ketertiban Masyarakat	tengah		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(Kab. mamuju tengah dan kementrian hukum dan HAM, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*ormas,fkub, pemuda di kabupaten mamuju tengah*	*50.00*	
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi			*50*	*35.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah dan kementrian hukum dan HAM, KAB.*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*mitra kesbangpol kab. mamuju tengah*		

			dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)						*MAMUJU TENGAH)*						
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					35.000.000,00					mitra kesbang pol kab. mamuju tengah		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*mitra kesbang pol kab. mamuju tengah*	*1*	

			n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)													
			terlaksanana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)				*1*	*35.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ormas,masyarakat,lsm*			
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN**						**58.000.000,00**				**Meningkatkan**			**170.000.000,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN**

		PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	***PERSENTASE KELOMPOK YANG DIBINA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYANYA. (%)***				***100***					**Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat**	***ormas, masyarakat,lsm***			**POLITIK**
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					58.000.000,00					Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan				*1*		*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJ*					*300.000.000*		

		Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terumuskan (Dokumen)						*U TENGAH)*							
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						55.000.000,00				Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*1.00*		

			Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)													
			Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (Dokumen)				*1*	*55.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pelajar*			
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						3.000.000,00					pelajar		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*pelajar*	*1*		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan				*1*	*3.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat, pelajar, ormas,lsm*			

			Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)													
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**260.000.000,00**				**Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat**			**700.000.000,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
			Persentase peningkatan kewaspadaan nasiaonal dan capaian penanganan konflik sosial (%)				***100***						***masyarakat, pelajar, ormas,lsm***			

	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					260.000.000,00				Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah dokumen laporan Kebijakan teknis dan jumlah Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (Dokumen)				*3*		*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*480.000.000*		
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga					150.000.000,00				Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									t			
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang		*0.00*	*1.00*	*3.00*		*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*3.00*		

				Disusun (Dokumen)															
				Antisipasi cegah dini dan deteksi dini berbagai bentuk ancan tantangan hambatan gangguan (ATHG) pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*				
				Pembentukan Tim kewaspadaan dini daerah (TKDD) sebagai wadah untuk menampung seluruh				*1*	*50.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*				

			informasi terkait keamann dan ketertiban masyarakt di kabupaten mamuju tengah (Dokumen) Sosialisasi penanganan konflik sosial (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan						35.000.000,00				Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	masyarakat		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*masyarakat*	*50*	

			Terlaksanaanya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)				*50*	*35.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat, tim TKDD, BIN, Polres, kesbabgpol*			
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan						75.000.000,00				Meningkatkan Keten	masyarakat, tim TKDD, BIN,		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Daerah Kabupaten/Kota										teramandan Ketertiban Masyarakat	Polres, kesbabg pol			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*masyarakat, tim TKDD, BIN, Polres, kesbabg pol*	*1*		
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				*1*	*75.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Otonomi Khusus*			*Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*			
	J U M L A H							**3.691.147.240,00**							6.882.700.000,00	

BAB III
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah yaitu;

A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi.
C. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
    a) Penyelenggaraan pemberian dukungan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi kesekretariatan; politik dalam negeri; ketahanan ekonomi, sosial, budaya & organisasi kemasyarakatan; bina ideologi, wawasan kebangsaan & karakter bangsa; penanganan konflik & kewaspadaan nasional;
    b) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah.

A. Meningkatkan wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan berdemokrasi.
B. Penguatan fungsi kelembagaan Ormas yang berorientasi pada wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila.
C. Menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
D. Mendukung terciptanya stabilitas politik, sosial budaya, keamanana, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
E. Meningkatkan fasilitasi kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah.

A. Peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan hak dan kewajiban politik yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan berdemokrasi.
B. Peningkatan pengembangan dan pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Kbupaten Mamuju Tengah.
C. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara.
D. Peningkatan waspada dini, deteksi dini & cegah dini gejala gangguan Kamtibmas yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta,

E. Peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.

F. Peningkatan fasilitasi kelembagaan partai politik serta mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

3.3. Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah

   c. Faktor Internal

   Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana.

   a) Aspek Kekuatan

   Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada di bawah langsung kendali tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah.

   b) Aspek Kelemahan

   Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah.

   d. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

c) Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

d) Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah

I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 759.396.000; yang terdiri dari 7 kegiatan sebagai berikut;

8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
10) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
11) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
12) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
13) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

14) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

m. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 461.144.412; yang terdiri dari 2 Kegiatan sebagai berikut;

3) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

n. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 304.200.000; yang terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut'

5) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
7) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
8) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

o. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 341.000.000; yang terdiri dari 7 kegiatan;

8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Badan
9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10) Penyediaan Bahan Logistik Badan
11) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13) Fasilitasi Kunjungan Tamu

14) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

p. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 506.668.620 yang terdiri dari 5 kegiatan;
   6) Pengadan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Lapangan
   7) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   8) Pengadaan Mebel
   9) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   10) Pengadaan Gedung Badan atau Bangunan Lainnya
q. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Pagu Anggaran Rp. 152.000.000; Yang Terdiri Dari 4 Kegiatan;
   5) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   6) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   7) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan
   8) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan
r. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp.125.968.620; yang terdiri dari 5 kegiatan;
   6) Penyediaan jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perrangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

7) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan
10) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan

s. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 34.000.000; yang terdiri dari 2 kegiatan;
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

t. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan pagu anggaran Rp. 265.000.000; yang terdiri dari 3 kegiatan;
1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

u. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan pagu anggaran Rp. 748.550.000; yang terdiri dari 3 kegiatan;
   2) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
   3) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
   4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemntauan situasi politik
v. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan pagu anggaran Rp. 130.000.000; yang terdiri dari 3 kegiatan;
   1) Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
   2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
w. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan pagu anggaran Rp. 350.000.000; yang terdiri dari 3 kegiatan;

2) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah

Rumusan Rencanan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Format Excel.

4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil keluaran pada sistem SIMDA Perencanaan / ePlanning Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam Format Excel.

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada Permendagri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran, Kode Fikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. RPJMD 2021-2026 yang belum ditetapkan menyebabkan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga belum disusun, menyebabkan

rencana kerja Tahun 2024 mendasarkan pada rancangan awal Restra perangkat daerah 2021-2026. Sebagai perencaan antara program dan kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Bupati dan Wakil terpilih periode 2021-2026 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026 Badan Kesatuan bangsa dan politik Mamuju Tengah sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik bisa relevan kesemua misi yang diemban, namun lebih memfokuskan pada misi kelima yaitu ***"Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat"***

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah sebagai perangkat daerah yang menjalankan tusi bidang kesatuan bangsa dan politik bisa relevan kesemua misi yang diemban, namun lebih memfokuskan pada misi pertama yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Serta Kehidupan Bermasyarakat Yang Agamis, Kondusif Dan Bernudaya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan politik Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Meskipun saat

Perencanaan masih bantuk lembaga Badan dan nantinya berubah menjadi lembaga badan. Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuhdari Badan kesatuan bangsa dan politik mamuju tengah sendiri, instansi terkait dan

partisipasi aktif masyarakat. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stekholder.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin keberhasilan implementasi renja 2024 maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengkomunikasian/sosialisasi renja kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi;
2) Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan tidak menyimpang dari renja;
3) Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan renja yang telah dibuat.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja 2024 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi terciptanya tujuan akhir bersama.

Tobadak, 20 Juli 2023
Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mamuju Tengah

Abdullah Kalu, S.Pd.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19690518 199212 1 003

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**3.691.147.240,00**							**6.882.700.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**3.691.147.240,00**							**6.882.700.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)***				***100***	**1.414.597.240,00**							**2.337.700.000,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran*				*100*	82.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH*					*100*	202.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		& evaluasi tepat waktu (%)						*)*						
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						35.000.000,00						50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*3.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*3.00*		
		Forum opd badan kesatuan bangsa dan polik kab. mamuju tengah (Dokumen)				*1*	*20.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD di kab. mamuju tengah, skpd lintas sektor*		
		Penyusunan Dokumen Perencanan Renstra dan renja (Laporan / Dokumen)				*2*	*15.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*		
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah	26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		*1*	*1*	*1.00*		*(Kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*1.00*	

			(Dokumen)												
			Penyusunan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan kesbangpol kab. mamuju tengah*			
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							5.000.000,00					Badan kesbangpol kab. mamuju tengah	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan kesbangpol kab. mamuju tengah*	*1*	
			Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah*			
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							7.000.000,00					Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		*1*	*1*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah*	*1*	

		Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)												
		Penyusunan dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*7.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbabgpol kab. mamuju tengah*		
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.000.000,00					Badan Kesbabgpol kab. mamuju tengah	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbabgpol kab. mamuju tengah*	*1*	
		penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah*		
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.000.000,00					Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		*4*	*4*	*4.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH*				*Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah*	*4*	

			Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)						*)*						
			Penyusunan Dokumen LKjIP,LPPD,LKPD dan Evaluasi RKPD Kinerja PD (Laporan)				*4*	*15.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah*			
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah*	*1*		
			Penyusunan Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kab. Mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. mamuju tengah*			
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						420.000.000,00							840.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)				*100*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						400.000.000,00							800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*6.00*	*6.00*	*12*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*12*	
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Dan Tunjangan Fungsional (Orang / Bulan)				*12*	*400.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN*		
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00					ASN		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*ASN*	*1.00*	

			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pegawai kesbangpol*			
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.000.000,00					pegawai kesbangpol		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*pegawai kesbangpol*	*1*		
			penyusunan laporan keuangan bulanan/ trisemester/ semster SKPD dan laporan				*2*	*10.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai kesbangpol*			

			koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ trisemester/ semster SKPD (Laporan)												
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000,00						10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)				*100*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*100*		
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.000.000,00						10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*1*		
			Penyusunan Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Laporan)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol kab. Mamuju Tengah*		
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000.000,00						270.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)				*100*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						20.000.000,00							20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*1*		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*			
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						200.000.000,00					Pegawai Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*1*	*1*	*5.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Pegawai Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*5.00*		
			Jumlah PTT yang Dibayarkan Gajinya dan Jumlah operator yang dibayarkan				*12*	*200.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PTT Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*			

			gajinya (Bulan)												
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					30.000.000,00					PTT Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Sulawesi selatan dan Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*PTT Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*10*		
			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yang mampu implementasikan peraturan perundang-undangan (Orang)				*3*	*30.000.000,00*	*(Sulawesi Selatan, Kab. Mamuju, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Pegawai Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*			
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					295.000.000,00							452.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)				*100*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*100*		

8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00						27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*1*	
		Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*		
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*1*	
		Jumlah ATK yang disediakan (Bulan)				*12*	*15.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*		
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*1*	

			Laporan Fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat, Lsm, Omas, partai politik, Para opd, Mahasiswa/mahasiswi, pelajar*			
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250.000.000,00					masyarakat, Lsm, Omas, partai politik, Para opd, Mahasiswa/mahasiswi, pelajar		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*2.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*masyarakat, Lsm, Omas, partai politik, Para opd, Mahasiswa/mahasiswi, pelajar*	*2*		
			Penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*200.000.000,00*	*(Sulawesi Selatan, Kalimantan, DKI Jakarta, dan kab. mamuju, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Kesbangpol dan PTT*			
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*50.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Kebangpol dan PTT*			
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						262.997.240,00							447.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)				*100*		*(Kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*100*		
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						95.997.240,00						-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KAb. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*0.00*		
		Belanja sewa kendaraan dinas (Unit)				*1*	*95.997.240,00*	*(mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*badan kesbangpol*			
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						22.000.000,00					badan kesbangpol	120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kab. Mamuju Tengah, Tobadak)*				*badan kesbangpol*	*4*	
		Tersediany a kendaraan dinas ooperasio				*1*	*22.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*		

			nal atau lapangan (motor metik dan motor trail (Unit)						*TENGAH)*	*Umum*					
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						75.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*8.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*8.00*		
			Pengadaan mebel (4 Meja Pejabat dan 4 kursi Pejabat) (Unit)				*8*	*75.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*			
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		177.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*10.00*		
			3 Leptop, 1 Komputer, 2 AC, 1 Printer, 2 Kipas Angin, (Unit)				*9*	*70.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol kab. mamuju tengah*			
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						59.600.000,00							61.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Daerah													
			Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)				*100*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00							15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, Tobadak)*					*1*		
			Penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)				*1*	*15.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*			
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah		21.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*3.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*3*		
			Jumlah pembayaran bulan rekening telepon,				*3*	*20.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Badan kesabngpol Kab. Mamuju Tengah*			

			air dan listrik. (Laporan)						*TENGAH)*	*Umum*					
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						24.600.000,00					Badan kesabngpol Kab. Mamuju Tengah	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*2*	*2.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan kesabngpol Kab. Mamuju Tengah*	*2.00*	
			Pembayaran honorarium supir (Laporan)				*1*	*15.600.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Non PNS*		
			Pembayaran honorarium tenaga kebersihan (Laporan)				*1*	*9.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat non PNS*		
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.000.000,00						55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)				*100*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	

8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						15.000.000,00						30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*1*		
		pemeliharaan kendaraan peroranga n dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit)				*1*	*15.000.000,00*	*(Kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kepala badan kesbangpol kab. mamuju tengah*		
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00					Kepala badan kesbangpol kab. mamuju tengah	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional		*1.00*	*1.00*	*7*		*(Kab. mamuju tengah, KAB.*				*Kepala badan kesbangpol kab. mamuju tengah*	*7*	

		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)						*MAMUJU TENGAH)*						
		Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan (Tahun)				*7*	*5.000.000,00*	*(Kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*		
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*10*	
		Pemeliharaan mebel (Unit)				*10*	*10.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*		
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00					Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*	*20*	

			Pemiliharaan peralatan dan mesin lainnya (Unit)				*20*	*10.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah*			
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (%)***				***100***	**1.020.000.000,00**				**Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat**	***Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah***		**1.600.000.000,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dokumen)*				*5*	1.020.000.000,00	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat		*5*	1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					970.000.000,00				Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*5*		
			Fasilitasi penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera (PASKIBRAKA) (Dokumen)				*1*	*850.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Pelajar SMA sederajat,*			

			Pembentukan tim gugus tugas gerakan nasional revolusi mental (GNRM) (Dokumen)				*1*	*45.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN*			
			Penguatan peran dan kapasitas forum pembauran kebangsaan (FPK) (Dokumen)				*1*	*40.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
			Peningkatan kesadaran bela negara (Dokumen)				*1*	*35.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN*			
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						35.000.000,00					ASN		65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*150.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*ASN*	*150.00*		
		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi (Orang)				*50*	*35.000.000,00*	*(Jakarta, Sulawesi barat, sulawesi selatan, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Mitra Badan kesbangpol kab. mamuju tengah*			
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						15.000.000,00					Mitra Badan kesbangpol kab. mamuju tengah		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KAB. MAMUJU TENGAH , KAB. MAMUJU TENGAH)*				*Mitra Badan kesbangpol kab. mamuju tengah*	*1.00*		

			Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)												
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)				*1*	*15.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai kesbangpol*			
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA**						**793.550.000,00**				**Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat**			**1.635.000.000,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

		SERTA BUDAYA POLITIK	***PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK (%)***				***100***					***Pegawai kesbangpol***			
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						793.550.000,00				Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			1.635.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Jumlah dokumen kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (Dokumen)				*15*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*1.600.000.000*		
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						748.550.000,00				Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*1*	*6*		*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*60*			
			Belanja bantuan hibah bantuan keuangan kepada partai politik (Dokumen)				*1*	*308.550.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*partai politik*				
			Kampanye publik iklan layanan masyarakat untuk mengingkatkan partisiipasi pemilu sentak 2024				*1*	*45.000.000,00*	*(KABUPATEN MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*masyarakat*				

			(Dokumen)													
			pembentukan dan operasional tim pemantauan penyelenggaraan tahapan pemilu pilkaa 2024 (DESK PILKADA) (Dokumen)				*1*	*75.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH , KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pegawai kesbangpol*			
			sosialisasi desa peduli pemilu pemilihan (DP3) (Dokumen)				*1*	*250.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH , KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pelajar*			
			Sosialisasi peningkatan peran masyarakat dalam mengikuti pilkada tahun 2024 (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(kabupaten mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kelompok perempuan dan pemilih pemula*			
			varifikasi, evaluasi dan pelaporan bantuan keuangan partai politik				*10*	*20.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*partai polik*			

		(Dokumen)													
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						25.000.000,00					partai polik		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		*0.00*	*0.00*	*100*		*(kab.mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*partai polik*	*100*		

			(Orang)																	
			Terlaksanan yankoordinasi dinidang pendidikan politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)				*100*	*25.000.000,00*	*(kab.mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Mitra Badan kesbangpol kab. mamuju tengah*				

8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						20.000.000,00				Mitra Badan kesbangpol kab. mamuju tengah		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*			*Mitra Badan kesbangpol kab. mamuju tengah*	*1*		

			(Laporan)												
			pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di daerah (Laporan / Dokumen)				*1*	*20.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG EMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN (%)***				***100***	**145.000.000,00**				**Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**	***masyarakat***		**440.000.000,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan						145.000.000,00				Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			440.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan													
			Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terumuskan. (Dokumen)				*3*		*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*355.000.000*		
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						75.000.000,00				Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(kab.mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*3*		

		Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)												
		temu toko agama, generasi muda antar umat beragama se-kabupaten mamuju tengah (Dokumen)				*1*	*75.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ormas,fkub, pemuda di kabupaten mamuju tengah*		
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						35.000.000,00				Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	ormas,fkub, pemuda di kabupaten mamuju tengah	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(Kab. mamuju tengah dan kementrian hukum dan HAM, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*ormas,fkub, pemuda di kabupaten mamuju tengah*	*50.00*	

			Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)												
			Terlaksanaanya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)				*50*	*35.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah dan kementrian hukum dan HAM, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*mitra kesbangpol kab. mamuju tengah*			
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						35.000.000,00					mitra kesbangpol kab. mamuju tengah		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*mitra kesbangpol kab. mamuju tengah*	*1*		
			terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)				*1*	*35.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ormas,masyarakat,lsm*			
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANG**						**58.000.000,00**				**Meningkatkan Ketentraman dan**			**170.000.000,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

		AN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	***PERSENTASE KELOMPOK YANG DIBINA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYANYA . (%)***				***100***					**Ketertiban Masyarakat**	***ormas,masyarakat,lsm***			
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terumuskan (Dokumen)*				*1*	58.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH , KAB. MAMUJU TENGAH)*			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		*300.000.000*	170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,						55.000.000,00				Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*1.00*		
			Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (Dokumen)				*1*	*55.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pelajar*			
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,						3.000.000,00					pelajar		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*pelajar*	*1*		
	Terlaksanaanya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi				*1*	*3.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat, pelajar, ormas,lsm*			

			Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)												
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase peningkatan kewaspadaan nasiaonal dan capaian penanganan konflik sosial (%)***				***100***	**260.000.000,00**				**Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat**	***masyarakat, pelajar, ormas,lsm***		**700.000.000,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah dokumen laporan Kebijakan teknis dan jumlah Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan*				*3*	260.000.000,00	*(KAB. MAMUJU TENGAH , KAB. MAMUJU TENGAH)*			Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat		*480.000.000*	700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Penanganan Konflik Sosial (Dokumen)												
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					150.000.000,00				Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,		*0.00*	*1.00*	*3.00*		*(KAB. MAMUJU TENGAH, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*3.00*	

			serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)													
			Antisipasi cegah dini dan deteksi dini berbagai bentuk ancan tantangan hambatan gangguan (ATHG) pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
			Pembentukan Tim kewaspadaan dini daerah (TKDD) sebagai wadah untuk menampung seluruh informasi terkait keamann dan ketertiban masyarakt di				*1*	*50.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH , KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			

			kabupaten mamuju tengah (Dokumen)											
			Sosialisasi penanganan konflik sosial (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							35.000.000,00				Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	masyarakat		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*masyarakat*	*50*		

			Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)															
			Terlaksanaanya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)				*50*	*35.000.000,00*	*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat, tim TKDD, BIN, Polres, kesbabgpol*			

	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00				Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	masyarakat, tim TKDD, BIN, Polres, kesbabgpol		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(kab. mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*				*masyarakat, tim TKDD, BIN, Polres, kesbabgpol*	*1*		
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota (Dokumen)				*1*	*75.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH , KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Otonomi Khusus*			*Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*			
	J U M L A H							**3.691.147.240,00**							6.882.700.000,00	

RENCANA KERJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

RENCANA KERJA
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2024



Pemerintah Kabupaten
Mamuju Tengah

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah. Renja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan kegiatan Tahun 2023 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memuat uraian lebih rinci Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) secara garis besar berisikan tentang evaluasi kinerja Tahun sebelumnya dan Rencana Kerja Tahun yang akan datang. Uraian dan evaluasi Program dan kegiatan tahun sebelumnya, berfungsi sebagai pedoman serta arah kebijakan pembangunan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta digunakan sebagai dasar penilaian tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sedangkan Rencana Kerja Tahun yang akan berjalan merupakan pedoman rencana program dan kegiatan serta target kinerja tahun yang akan datang.

Akhir kata melalui dokumen Rencana kerja ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Tobadak, 07 Agustus 2024

Kepala Satuan

Drs. H. Muhammad Samsir, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691231 199412 1 069

DAFTAR ISI

Halaman

Kata pengantar..... i

Daftar isi ii

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 5

1.3 Maksud Dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun 2019..... 8

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja OPD dan capaian Renstra OPD..... 8

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah..... 58

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 59

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Opd 58

3.3 Program Dan kegiatan 60

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 61

Bab V Penutup 77

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Setiap tahun pada Organisasi Perangkat Daerah (Renstra –OPD Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021 –2026, Dengan Mempedomani Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015 – 2025. Renja OPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasanaparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan sertapeningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranKabupatenMamuju Tengah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwaRencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2021-2026 dan akandilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, programdan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerahmaupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja OPD menerjemahkan danmengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dankegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program OPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalamRenstra OPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranKabupatenMamuju Tengah sebagai salahsatu Dinas daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah No. 8 tahun 2010

tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah, merupakan implementasi dari berlakunya Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2008 tentang Penataan Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau disebut juga dengan Renja-OPDmerupakan dokumen perencanaan tahunan tingkat OPD. Penyusunan Renja OPDmerupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan oleh aturan hukum yang berlaku mengacu kepada RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dan berpedoman kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026.Secara ringkas penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaranterdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024



Lebih jelas tahapan dan proses yang mesti dilakukan dalam penyusunan renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Tahapan Persiapan ;

(1) Pembentukan SK tim penyusun renja
(2) Orientasi tim kerja
(3) Penyusunan agenda tim kerja
(4) Penyiapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

II. Tahapan Penyusunan rancangan renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024;

(1) Penyusunan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Tahun 2024 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJP 2016- 2025 Kabupaten Mamuju Tengah
(2) Mengacu pada evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
(3) Memecahkan masalah yang sedang dihadapi
(4) Berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

III. Pelaksanaan Forum OPD.

Peserta forum OPD terdiri dari wakil peserta MusrenbangKecamatan, OPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD kabupaten/kota. Dimana teknik pelaksanaan forum OPD tidak diatur secara rinci dalam Permendagri 86 tahun 2017, namun disarankan agar dapat dilakukan menggabungkan beberapa OPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangka ntingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. Adapun tujuan pelaksanaan forum OPD adalah untuk :

a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masingOPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;

b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugasdan fungsi OPD;
c. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD; dan;
d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD, sesuai dengan surat edaran Bupati tentang rancangan awal RKPD.

Hasil pelaksanaan forum OPD dituangkan dalam berita acara kesepakatan forumOPD, berita acara forum OPD dijadikan bahan dalam penyempurnaan rancangan Renja OPD. Dimana penyempurnaan seluruh rancangan renja OPD menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD yang akan dijadikan bahan dalam Musrenbang RKPD tahun 2024.

IV. Penetapan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024.

Langkah terakhir proses dari penyusunan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam melakukan penyempurnaan didasarkan pada isi RKPD yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran oleh tim penyusun RKPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi Renja OPD yang telah sesuai dengan RKPD selanjutnya disampaikan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakarankepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, proses akhir adalah ditetapkannya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranTahun 2024 melalui Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranTahun 2024 mengacu kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

8. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranTahun 2024 adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranTahun 2024 adalah :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran tahun 2024.
- Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepadaSatuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sesuai aturan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranKabupaten Mamuju Tengah ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan**

  Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan rencana kerja yang berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

  Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal OPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- **BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan**

  Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja OPD, program dan kegiatan.

- **BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

  Bab ini berisikan tentang rencana kerja dan pendanaan oragnisasi perangkat daerah pada tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu indikatif.

- **BAB V Penutup**

  Bab ini berisikan tentang catatan penting dalam rangka pelaksanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RenstraSatpol PP Dan Damkar Kab. Mamuju Tengah

Dalam melakukan penyusunan RenjaSatuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranKab. Mamuju Tengah Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasiatas pelaksanaan kegiatanSatuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju Tengah untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu, evaluasi terhadap capaian Renja di Tahun 2021, dan 2022 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan, yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranKab. Mamuju Tengah sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 terhadap target di Tahun2024 yang merupakan tahun ke-4 periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju Tengah Tahun 2021-2026. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju Tengah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju Tengah pada tabel berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun .... (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021(Tahun Lalu / (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1	05	02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**% Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	**05**	**02**	**02,1**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**
1	05	02	02,1	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Frekuensi Jumlah Patroli Perpekan	52 x Patroli		52x Patroli	52 x Patroli	100%	52 x Patroli	104 x Patroli	100%

1	05	02	02,1	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibun dalam kota/kabupaten yang ditangani	100%							0%
1	05	02	02,1	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang koordinasikan	1 Urusan					1 Urusan	1 Urusan	100%
1	05	02	02,1	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	171 Org							0%
1	05	02	02,1	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang terlatih	50 Org							0%
1	05	02	02,1	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga / Mitra yang bekerjasama	5 Mitra							0%
1	05	02	02,1	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan dipelihara	5 Unit							0%

1	05	02	02,1	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	jumlah SOP	1 SOP					1 SOP	1 SOP	100%
1	05	02	02,1	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	jumlah Layanan	1 Layanan							0%
1	**05**	**02**	**02,2**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**
1	05	02	02,2	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah kegiatan sosialisasi		100%					100%	#DIV/0!
1	05	02	02,2	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati penegakan yang dipatuhi	3 Perda							0%
1	05	02	02,2	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran perda dan perkada yang ditangani	100%							0%
1	**05**	**02**	**02,3**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pol-PP yang Memiliki Kwalitas Sebagai PPNS**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
1	05	02	02,3	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS								#DIV/0!
1	**05**	**04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**Presentase Pelayananan Penyelamatan dan evakuasi Korban**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**

						Kebakaran dan non kebakaran								
1	**05**	**04**	**2,01**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan penaganan bahan berbahaya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	05	04	2,01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1	05	04	2,01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	jumlah saran dan prasarana yang di standarisasi								#DIV/0!
1	05	04	2,01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadaman	5 Set	-	5 Set	8 Set	100%	5 Set	13 Set	260%
1	05	04	2,01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumalah Aparatur yang Berkwalitas sesuai pemendagari 18 tahun 2020	25 Org	-						0%
1	05	04	2,01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Jumlah lembaga yang bekerjasama dalam penanggulangan kebakaran di daerah perbatasan	2 Kegiatan							0%

					Penyelamatan Non Kebakaran									
1	**05**	**04**	**2,04**	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**Persentase pemberdayaan Masyarakat dalam hal pencegahan kebakaran**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**	**100%**	**200%**	**200%**
1	05	04	2,04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	120 Org	100%					100%	1%
1	**05**	**04**	**2,05**	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**		**JJumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

1	05	04	2,05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	presentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau	100%	100%					100%	100%
1	05	04	2,05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi								#DIV/0!
1	05	04	2,05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang telah dibina	100 Org	-						0%
1				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**

						berjalan sesuai standar								
1	**1**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	1	1			Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	300%
1	1	2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	300%
1	1	3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dok							0%
1	1	4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 Dok							0%
1	1	5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dok							0%
1	1	6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	5 Dok		5 Dok	5 Dok	100%		5 Dok	100%
1	1	7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	4 Dok					4 Dok	4 Dok	100%

1	**2**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	2	1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	14 ASN	8 ASN	9 ASN	8 ASN	100%	14 ASN	30 ASN	214%
1	2	2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN	12 Dok							0%
1	2	5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1 Dok	12 Dok				1 Dok	13 Dok	1300%
1	2	6			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	5 Dok					5 Dok	5 Dok	100%
1	2	7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran PD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	100%	18 Dok	54 Dok	300%
1	2	8			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%		2 Dok	200%
1	**5**				**Administrasi Kepegawaian PD**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**
1	5	1			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Org					1 Org	1 Org	100%

1	5	2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	145 stel					145 stel	145 stel	100%
1	5	3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai PD	9 ASN					14 ASN	14 ASN	156%
1	5	4			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian								#DIV/0!
1	5	5			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai								#DIV/0!
1	5	9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi	2 Org		2 org	2 Org	100%	2 Org	4 Org	200%
1	5	10			Sosialisasi Peraturan Perundangan	Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundangan							-	100%
1	5	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	2 Org		2 Orang	2 Org	100%	2 Org	4 Org	200%
1	**6**			**Administrasi Umum PD**		**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**

						standar								
1	6	1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	5 Komponen							#VALUE!
1	6	2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			5 Buah	3 Buah	60%	5 Buah	8 Buah	#DIV/0!
1	6	3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	5 Jenis							0%
1	6	4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 Jenis					3 Jenis	3 Jenis	100%
1	6	8			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi								#DIV/0!
1	6	9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	20 kali							0%
1	**7**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	7	1			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	300%

1	7	2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 Unit							0%
1	7	5			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 Unit		5 Unit	1 Unit	20%		1 Unit	20%
1	7	6			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan								#DIV/0!
1	7	9			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	250%
1	7	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		-						#DIV/0!
1	**7**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	7	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	9 Jenis	300%
1	7	3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapa							-	

						n kantor yang disediakan								
1	7	4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	307 Org	307 Org	307 Org	307 Org	100%	307 Org	921Org	300%
1	**7**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	7	1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara	6 Unit					11 Unit		0%
1	7	2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	11 Unit	11 Unit	11 unit	11 Unit	100%	11 Unit	33 Unit	300%
1	7	5			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	5 Unit					5 Unit		0%
1	7	6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	5 Unit					2 Unit		0%
1	7	7			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	1 Unit					2 Unit		0%

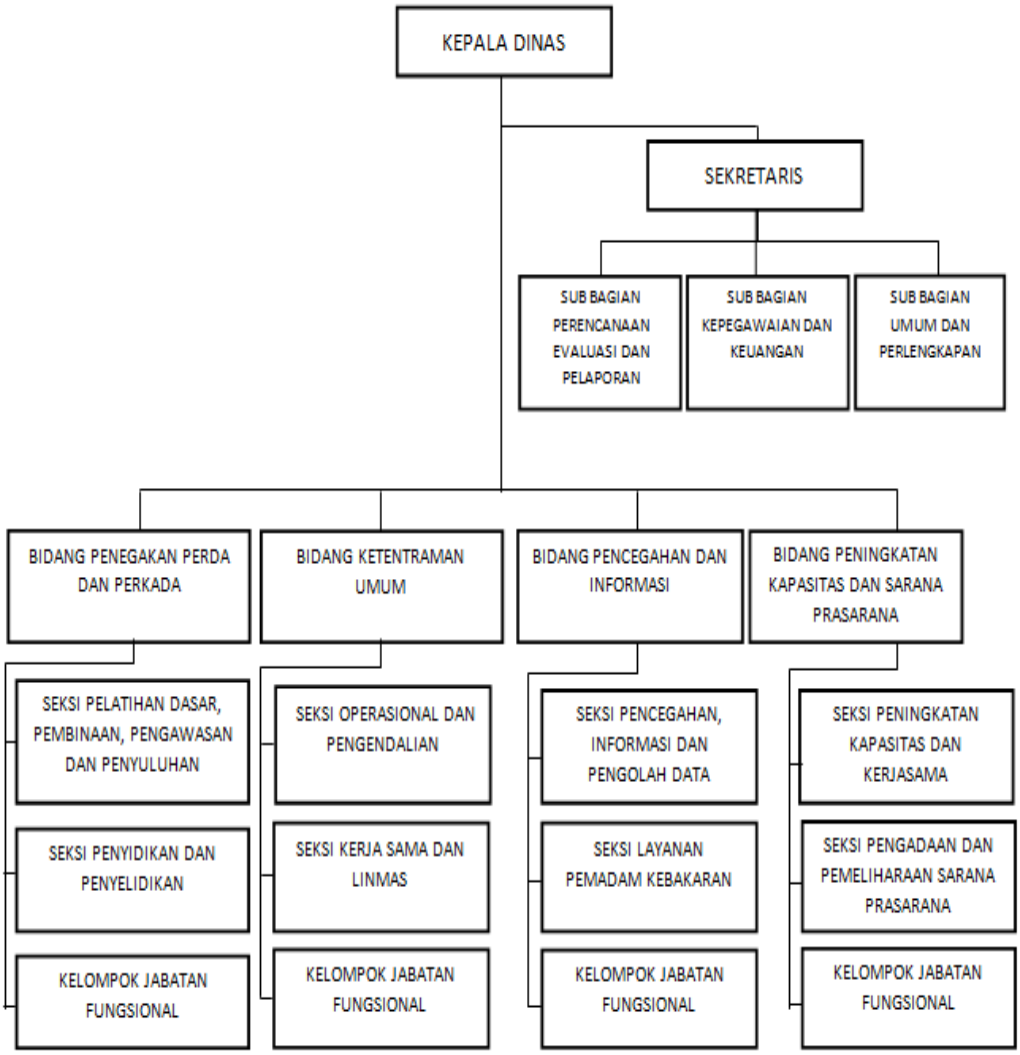
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai tugas pokok fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, struktur Organisasai Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

a) Kepala Satuan
b) Sekretariat, membawahi :
   - Sub Bagian BagianPerencanaan dan Pelaporan
   - Sub Bagian Bagian Keuangan
   - Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian
c) Kepala Bidang Penegakan Perda Dan Perkada, membawahi:
   - Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan
   - Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
d) BidangKetertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
   - Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
   - Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman
e) BidangPencegahan, membawahi :
   - Kepala Seksi Seksi Pencegahan dan Inspeksi
   - Kepala SeksiPemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
f) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahi:
   - Kepala SeksiPemadaman Kebakaran
   - Kepala Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Pengolahan Data
g) Unit pelaksana teknis dinas adalah unit pelaksana teknis dinas yang diatur tersendiri sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA KEBAKARAN
Kabupaten Mamuju Tengah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran maka dibutuhkan



dukungan sumber daya manusia serta sarana prasarana penunjang kinerja yang memadai. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran dapat digambarkan melalui tabel berikut :

No	Pendidikan	Jumlah
	Pegawai Negeri Sipil	
1.	S2	4 Orang
2.	S1	10 Orang
3.	D3	-
4.	D2	-
5.	SLTA	-
	Jumlah	14 Orang

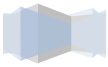
No	Pendidikan	Jumlah
	Non PNS	
1.	S2	- Orang
2.	S1	21 Orang
3.	D3	5 Orang
4.	D2	3 Orang
5.	SLTA	286 Orang
6.	SLTP	-
	Jumlah	297 Orang

No	Golongan	Jumlah
1.	I	-Orang
2.	II	-Orang
3.	III/a	1 Orang
4.	III/b	1 Orang

5.	III/c	3 Orang
6.	III/d	3 Orang
7.	IV/a	5 Orang
8.	IV/c	1 Orang
	Jumlah	14O rang

Kondisi Sarana dan Prasarana
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Mobil Operasional Kasat	-
2.	Mobil Operasional Kasi	-
3.	Mobil Pengawal	-
4.	Mobil Operasional Lapangan	-
5.	Mobil Dalmas	-
6.	Mobil Pemantau Kagiatan	-
7.	Mobil Patroli Wilayah	-
8.	Mobil Pemadam Kebakaran	9 Unit
9.	Mobil Tangki Pemadam	1 Unit
10.	Motor Patroli dan Pengawalan	2 Unit
11.	Motor Operasional Pegawai	6 unit
12.	Motor Petugas Reaksi Cepat	-



Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	448 org	448 org	450 org	500 org	448 org	450 org	500 org	500 org
2	Menurunnya kasus pelanggaran terhadap penegakanPerda		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, keindahan)	0	0	8	2	0	8	2	2
3	Menurunnya risiko bencana kebakaran	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	90 Km	181 Km	211 Km	211 Km	180 km	211 Km	211 Km	211 Km
4	Meningkatnya layanan penanganan korban bencana kebakaran		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	40%	55%	75%	75%	3	3	75%	75%

2.3 Isu-isu PentingPenyelenggaraan Tugas dan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Isu – isu penting berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi /kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

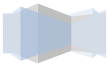
Secara umum yang menjadi isu penting pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Belum memiliki PPNS
2. Belum memiliki anggota Satpol- PP
3. Antisipasi meningkatnya tindak kriminalitas/gangguan keindahan, keamanan dan ketertiban
4. Keterbatasan anggaran Diklat Damkar Dan SATPOL PP
5. JumlahTenaga Pemadam yang masih minim
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan, khususnya perlengkapan keamanan personil pemadam kebakaran.
7. Peningkatan kebutuhan suku cadang kendaraan operasional Damkar

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah telah sesuai dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai beserta indikator kinerja sasaran. Dan rencana capaiannya yang merupakan representase tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah.



Disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen rencana kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran

, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)
3	10	4	8	9	3	10	4	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**9.695.800.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9.695.800.000,00**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**9.695.800.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**9.695.800.000,00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		***Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)***	***100***	**3.734.000.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)***	***100***	**3.734.000.000,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				130.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				130.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)*	*100*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat*	*100*	

							waktu (%)		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*2*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*2*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*2*	*20.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*2*	*20.000.000,00*
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*1*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*1*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*1*	*15.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*1*	*15.000.000,00*

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*	*1*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*	*1*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD (Dokumen)*	*1*	*15.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD (Dokumen)*	*1*	*15.000.000,00*
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				15.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*	*1*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*	*1*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD (Dokumen)*	*1*	*15.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD (Dokumen)*	*1*	*15.000.000,00*

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				15.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*	*1*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*	*1*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD (Dokumen)*	*1*	*15.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD (Dokumen)*	*1*	*15.000.000,00*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	*5*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	*5*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (Dokumen)*	*5*	*30.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan Lapor*	*5*	*30.000.000,00*

							an Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (Dokumen)		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*4*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*4*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)*	*4*	*20.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)*	*4*	*20.000.000,00*
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.901.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.901.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)*	*100*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)*	*100*	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.826.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.826.000.000,00
	(Dinas Satpol-pp dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*20*			*(Dinas Satpol-pp dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*20*	

	(Dinas Satpol-Pp dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)*	*20*	*1.826.000.000,00*		*(Dinas Satpol-Pp dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)*	*20*	*1.826.000.000,00*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	*1*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	*1*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD (Dokumen)*	*1*	*20.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD (Dokumen)*	*1*	*20.000.000,00*
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				15.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				15.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*	*5*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*	*5*	

	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)*	*5*	*15.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)*	*5*	*15.000.000,00*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				25.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	*4*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	*4*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD (Dokumen)*	*4*	*25.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD (Dokumen)*	*4*	*25.000.000,00*
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				15.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				15.000.000,00

	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*	*1*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*	*1*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*biaya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*	*1*	*15.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*biaya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*	*1*	*15.000.000,00*
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				403.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				403.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)*	*100*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)*	*100*	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				313.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				313.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	*313*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	*313*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Setel)*	*313*	*313.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta*	*313*	*313.000.000,00*

							Atribut Kelengkapannya (Setel)		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				70.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				70.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*	*2*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*	*2*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi (Orang)*	*2*	*70.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)*	*2*	*70.000.000,00*
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*	*2*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*	*2*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan (Orang)*	*2*	*20.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan*	*2*	*20.000.000,00*

							Perundangundangan (Orang)		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				440.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				440.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)*	*100*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)*	*100*	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*5.00*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*5.00*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor (Bangunan Gedung)*	*5*	*35.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor (Bangunan Gedung)*	*5*	*35.000.000,00*
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)*	*5*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)*	*5*	

						TENGAH)			
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)*	*5*	*35.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)*	*5*	*35.000.000,00*
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Tahun)*	*1*	*70.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Tahun)*	*1*	*70.000.000,00*
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00
	(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	*1.00*			*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	*1.00*	
	(Lima Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD (Tahun)*	*1*	*300.000.000,00*		*(Lima Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*	*1*	*300.000.000,00*

							PD (Tahun)		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				160.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				160.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)*	*100*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)*	*100*	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)*	*1.00*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)*	*1.00*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Perorangan (Unit)*	*1*	*50.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Perorangan (Unit)*	*1*	*50.000.000,00*
Pengadaan Mebel				50.000.000,00	Pengadaan Mebel				50.000.000,00
	(Dinas Satpol dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*	*7.00*			*(Dinas Satpol dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*	*7.00*	
	(Dinas Satpol dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pengadaan Mebel (Unit)*	*7*	*50.000.000,00*		*(Dinas Satpol dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pengadaan Mebel (Unit)*	*7*	*50.000.000,00*

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000,00
	(Dinas Satpol dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*	*2*			*(Dinas Satpol dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*	*2*	
	(Dinas Satpol dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)*	*2*	*60.000.000,00*		*(Dinas Satpol dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)*	*2*	*60.000.000,00*
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)*	*100*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)*	*100*	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*5*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*5*	
	(Dinas Satpol-pp dan damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (Unit)*	*5*	*100.000.000,00*		*(Dinas Satpol-pp dan damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumb*	*5*	*100.000.000,00*

							erday a Air dan Listrik (Unit)		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000,00
	(Dinas Satpol dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*1.00*			*(Dinas Satpol dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*1.00*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan / Dokumen)*	*1*	*250.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan / Dokumen)*	*1*	*250.000.000,00*
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)*	*100*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)*	*100*	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar)	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*6.00*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar)*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang*	*6.00*	

							Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)*	*6*	*50.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)*	*6*	*50.000.000,00*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*11.00*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*11.00*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau(Unit)*	*11*	*300.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijin*	*11*	*300.000.000,00*

							an Kendaraan Dinas Operasional atau(Unit)		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		***Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan (%)***	***100***	**3.651.600.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		***Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan (%)***	***100***	**3.651.600.000,00**
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.466.600.000,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.466.600.000,00
	(KAB. MAMUJU TENGAH)	*Persentase Penanganan GangguanKetentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (%)*	*100*			*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Persentase Penanganan GangguanKetentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (%)*	*100*	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				75.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				75.000.000,00
	(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*	*1*			*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*	*1*	

	(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten (Laporan / Dokumen)*	*1*	*75.000.000,00*		*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten (Laporan / Dokumen)*	*1*	*75.000.000,00*
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				50.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				50.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)*	*30.00*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)*	*30.00*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia (%)*	*100*	*50.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk*	*100*	*50.000.000,00*

							dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia (%)		
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				50.000.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				50.000.000,00
	(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)*	*5*			*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)*	*5*	
	(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan / Dokumen)*	*5*	*50.000.000,00*		*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan / Dokumen)*	*5*	*50.000.000,00*
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				2.661.600.000,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				2.661.600.000,00

	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)*	*182*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)*	*182*	
	(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Orang / Bulan)*	*182*	*2.661.600.000,00*		*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Orang / Bulan)*	*182*	*2.661.600.000,00*
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				80.000.000,00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				80.000.000,00
	(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk*	*5*			*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan*	*5*	

		Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)					*Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)*		
	(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (%)*	*100*	*80.000.000,00*		*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (%)*	*100*	*80.000.000,00*
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				50.000.000,00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				50.000.000,00
	(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)*	*1*			*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)*	*1*	

	(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan / Dokumen)*	*1*	*50.000.000,00*		*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan / Dokumen)*	*1*	*50.000.000,00*
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				500.000.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				500.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)*	*4.00*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)*	*4.00*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum (Unit)*	*4*	*500.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum (Unit)*	*4*	*500.000.000,00*
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				110.000.000,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				110.000.000,00
	(KAB. MAMUJU TENGAH)	*Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)*	*100*			*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)*	*100*	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-
	(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)*	*5*			*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)*	*5*	

	(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanBupati (kegitan)*	*5*			*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanBupati (kegitan)*	*5*	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				50.000.000,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				50.000.000,00
	(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)*	*1.00*			*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)*	*1.00*	
	(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (Laporan / Dokumen)*	*1*	*50.000.000,00*		*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (Laporan / Dokumen)*	*1*	*50.000.000,00*
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				60.000.000,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				60.000.000,00
	(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)*	*1.00*			*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)*	*1.00*	

	(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (Laporan / Dokumen)*	*1*	*60.000.000,00*		*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (Laporan / Dokumen)*	*1*	*60.000.000,00*
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				75.000.000,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				75.000.000,00
	(KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Pol-PP yang Memiliki Kwalitas Sebagai PPNS (%)*	*100*			*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Pol-PP yang Memiliki Kwalitas Sebagai PPNS (%)*	*100*	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				75.000.000,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				75.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)*	*1.00*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)*	*1.00*	
	(Luar Daerah Kab.Mamuju Tengah, Luar Wilayah)	*Pendidikan PPNS (Orang)*	*1*	*75.000.000,00*		*(Luar Daerah Kab.Mamuju Tengah, Luar Wilayah)*	*Pendidikan PPNS (Orang)*	*1*	*75.000.000,00*
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		***Presentase Pelayananan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan non kebakaran (%)***	***100***	**2.310.200.000,00**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		***Presentase Pelayananan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan non***	***100***	**2.310.200.000,00**

							kebakaran (%)		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.060.200.000,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.060.200.000,00
	(Wilayah Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan penaganan bahan berbahaya (%)*	*100*			*(Wilayah Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan penaganan bahan berbahaya (%)*	*100*	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.585.200.000,00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.585.200.000,00
	(Wilayah Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)*	*20*			*(Wilayah Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)*	*20*	
	(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Orang / Bulan)*	*104*	*1.585.200.000,00*		*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Orang / Bulan)*	*104*	*1.585.200.000,00*
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				50.000.000,00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				50.000.000,00

	(KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)*	*25*			*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)*	*25*	
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran (Orang)*	*25*	*50.000.000,00*		*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran (Orang)*	*25*	*50.000.000,00*
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				375.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				375.000.000,00
	(KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)*	*5*			*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)*	*5*	
	(Pemadam Kebakaran, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakarandan Alat Pelindung Diri(Set)*	*5*	*375.000.000,00*		*(Pemadam Kebakaran, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri(Set)*	*5*	*375.000.000,00*

Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				50.000.000,00	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				50.000.000,00
	(Kec.Mamuju dan Kec.Mamuju Utara, Luar Wilayah)	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)*	*2*			*(Kec.Mamuju dan Kec.Mamuju Utara, Luar Wilayah)*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)*	*2*	
	(Kab.Mamuju dan Kab.Mamuju Utara, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, (Wilayah)*	*2*	*50.000.000,00*		*(Kab.Mamuju dan Kab.Mamuju Utara, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, (Wilayah)*	*2*	*50.000.000,00*
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				100.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				100.000.000,00
	(KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi (Kegiatan)*	*5*			*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi (Kegiatan)*	*5*	

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				100.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				100.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)*	*250*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)*	*250*	
	(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (Kecamatan)*	*5*	*100.000.000,00*		*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (Kecamatan)*	*5*	*100.000.000,00*
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				150.000.000,00	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				150.000.000,00
	(KAB. MAMUJU TENGAH)	*Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang membahayakan manusia (%)*	*100*			*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang membahayakan manusia (%)*	*100*	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan				50.000.000,00	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan				50.000.000,00

Manusia					Manusia				
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	*1*				*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)*	*1*	
	(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yangMenimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia (%)*	*100*	*50.000.000,00*		*(5 Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yangMenimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia (%)*	*100*	*50.000.000,00*
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				50.000.000,00	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				50.000.000,00
	(Dinas Satpol-Pp dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)*	*1.00*			*(Dinas Satpol-Pp dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)*	*1.00*	

	(Dinas Satpol-pp dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi (Orang)*	*50*	*50.000.000,00*		*(Dinas Satpol-pp dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi (Orang)*	*50*	*50.000.000,00*
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				50.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				50.000.000,00
	(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)*	*5*			*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)*	*5*	
	(Dinas Satpol-pp dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)	*Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (%)*	*100*	*50.000.000,00*		*(Dinas Satpol-pp dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (%)*	*100*	*50.000.000,00*
				9.695.800.000,00					**9.695.800.000,00**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah dibuat berdasarkan penelaahan beberapa bahan kajian diantaranya:

1. Sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Rencana pembangunan jangka panjang nasional
3. Rencana pembangunan jangka menengah nasional
4. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal
5. Rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat
6. Rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Barat
7. Visi misi Bupati terpilih Kabupten Mamuju Tengah
8. Potensi dan permasalahan yang menyangkut Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabuapten Mamuju Tengah
9. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
10. Musyawarah pembangunan ditingkat kecamatan
11. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabuapten Mamuju Tengah

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Mamuju Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
1	NIHIL					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan Nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan. Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial.

Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertumbuhan berkualitas itu dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, dan mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Dalam satu tahun pertama, agenda pembangunan bertujuan membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya."Hal itu disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak," seperti tertulis dalam Perpres tersebut. Untuk agenda pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan selanjutnya. "Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan," kata Perpres itu RPJMN 2019-2024 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Amin Ma’ruf, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu, menurut Perpres tersebut, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Sesuai dengan 9 Nawacita Presiden Repoblik Indoinesia diataranya yang berhubungan dengan Visi Misi **Satpol-PP Dan Damkar** adalah **"Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Untuk Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara, Melalui Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Keamanan Nasional Yang Terpercaya Dan Pembangunan Pertahanan Negara Tri Matra Terpadu Yang Dilandasi Kepentingan Nasioanaldan Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim''**

3.2 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, maka perlu di jabarkan dalam Renja untuk menjadi tujuan dan sasaran yang lebih operasional yang di tuangkan dalam APBD Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yaitu :

- **Tujuan :**

  " Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman,Nyaman dan tertib menuju Masyarakat Mamuju Tengah yang sadar dan patuh hukum."

- **Sasaran :**
  - Meningkatkan kinerja atas pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan aturan lainnya yang dilaksanakan oleh OPD
  - Meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
  - Meningkatkan penanganan dan pelayanan personil Pemadam Kebakaran
  - Meningkatkan kerjasama antar leading sektor dalam peningkatan kinerja
  - Meningkatkan sistem penegakan hukum dalam rangka penegakan/kepastian hukum

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran direncanakan akan dilaksanakan beberapa Program dan Kegiatan dengan total alokasi dana sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2024 ialah sebesar Rp. **7.498.597.240,00,-**. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024.

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3	4		8	9		15	16	17
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**7.498.597.240,00**			**10.519.800.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**7.498.597.240,00**			**10.519.800.000,00**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.966.997.240,00**			**4.398.000.000,00**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)		***100***					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				61.500.000,00			115.000.000,00	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*			*100*		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00			20.000.000,00	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*2*			*2*		

	Biaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2*	*20.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.000.000,00			15.000.000,00	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*			*1*		
	Biaya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*7.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.000.000,00			15.000.000,00	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD(Dokumen)		*1*			*1*		
	Biaya Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD (Dokumen)		*1*	*7.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				10.000.000,00			15.000.000,00	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*			*1*		
	Biaya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD (Dokumen)		*1*	*10.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000,00			30.000.000,00	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*5*			*5*		

		Biaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (Dokumen)		*5*	*15.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.500.000,00			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*4*			*4*		
		Biaya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)		*4*	*2.500.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.859.000.000,00			1.901.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*			*100*		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.826.000.000,00			1.826.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*20*			*20*		
		Biaya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)		*20*	*1.826.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6.000.000,00			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD(Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB.MAMUJU TENGAH)*	*1*			*1*		
		Biaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD (Dokumen)		*1*	*6.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				7.000.000,00			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*5*			*5*		
		Biaya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)		*5*	*7.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000,00			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*4*			*4*		
		Biaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD (Dokumen)		*4*	*10.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				10.000.000,00			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*			*1*		
		biaya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*10.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				210.000.000,00			403.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*			*100*		

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				150.000.000,00			313.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*313*			*313*		
		Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Setel)		*313*	*150.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.000.000,00			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*2*			*2*		
		Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi (Orang)		*2*	*40.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*2*			*2*		
		Biaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan (Orang)		*2*	*20.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				200.000.000,00			429.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*			*100*		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000,00			24.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*3.00*			*5.00*		PEMADAM KEBAKARAN
		Biaya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor (Bangunan Gedung)		*3*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000,00			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*5*			*5*		
		Biaya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)		*5*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*			*1*		
		Biaya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Tahun)		*1*	*50.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1.00*			*1.00*		
		Biaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD (Tahun)		*1*	*100.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				185.997.240,00			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*			*100*		PEMADAM KEBAKARAN
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				95.997.240,00			150.000.000,00	
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1.00*			*1*		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Biaya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Perorangan (Unit)		*1*	*95.997.240,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Pengadaan Mebel				30.000.000,00			50.000.000,00	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*5.00*			*7.00*		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Biaya Pengadaan Mebel (Unit)		*5*	*30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000,00			200.000.000,00	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*2*			*2*		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Biaya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)		*2*	*60.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				235.500.000,00			600.000.000,00	
		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*			*100*		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.500.000,00			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*5*			*5*		
		Biaya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (Unit)		*5*	*85.500.000,00*	*Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum*			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.000.000,00			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1.00*			*1*		
		Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan / Dokumen)		*1*	*150.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215.000.000,00			550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*			*100*		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*6.00*			*6*		
		Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)		*6*	*50.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				165.000.000,00			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*11.00*			*11*		PEMADAM KEBAKARAN
		Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau (Unit)		*11*	*165.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
2.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**2.971.600.000,00**			**3.661.600.000,00**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan (%)		***100***					
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.786.600.000,00			3.466.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase Penanganan GangguanKetentraman dan Ketertiban Umum SertaPerlindungan Masyarakat(%)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB.MAMUJU TENGAH)*	*100*			*100*		
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				25.000.000,00			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*			*1*		
		Biaya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten (Laporan / Dokumen)		*1*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				50.000.000,00			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*30.00*			*30*		
	Biaya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia (%)		*100*	*50.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				50.000.000,00			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)*	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*5*			*5*		
	Biaya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan / Dokumen)		*5*	*50.000.000,00*				
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				2.561.600.000,00			2.661.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan(laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB.MAMUJU TENGAH)*	*182*			*182*		

	Biaya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Orang / Bulan)		*182*	*2.561.600.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				50.000.000,00			80.000.000,00	
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*5*			*100*		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Biaya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (%)		*100*	*50.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				25.000.000,00			50.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*			*1*		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Biaya Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan / Dokumen)		*1*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				25.000.000,00			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*4.00*			*4.00*		

		Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum (Unit)		*4*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				110.000.000,00			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan(%)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB.MAMUJU TENGAH)*	*100*			*100*		
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				50.000.000,00			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1.00*			*1*		
		Biaya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (Laporan / Dokumen)		*1*	*50.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				60.000.000,00			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1.00*			*1*		
		Biaya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (Laporan / Dokumen)		*1*	*60.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				75.000.000,00			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Pol-PP yang Memiliki Kwalitas Sebagai PPNS (%)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*			*100*		

	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				75.000.000,00			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1.00*			*1.00*		
		Pendidikan PPNS (Orang)		*1*	*75.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
3.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				**1.560.000.000,00**			**2.460.200.000,00**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
		Presentase Pelayananan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan non kebakaran (%)		***100***					
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.440.000.000,00			2.060.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan penaganan bahan berbahaya(%)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB.MAMUJU TENGAH)*	*100*			*100*		
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.300.000.000,00			1.585.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*20*			*20*		
		Biaya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Orang / Bulan)		*104*	*1.300.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				30.000.000,00			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*25*			*250.00*		PEMADAM KEBAKARAN
		Biaya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran (Orang)		*25*	*30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				100.000.000,00			375.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*5*			*5*		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakarandan Alat Pelindung Diri (Set)		*5*	*100.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				10.000.000,00			50.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*2*			*2*		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Biaya Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, (Wilayah)		*2*	*10.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				20.000.000,00			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (Persentase)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*			*100*		

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				20.000.000,00			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*250*			*250*		
		Biaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (Kecamatan)		*5*	*20.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				100.000.000,00			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan (Persentase)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*			*100*		
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				50.000.000,00			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*			*1*		
		Biaya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yangMenimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia (%)		*100*	*50.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				20.000.000,00			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1.00*			*50*		

		Biaya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi (Orang)		*50*	*20.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				30.000.000,00			100.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	*(Dinas Satpol-PP dan Damkar, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*5*			*5*		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (%)		*100*	*30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
					7.498.597.240,00			10.519.800.000,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagaipersoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyatadari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakatberdasarkan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community BaseDevelopment* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku kepentingan(*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigmabaru. Proses perencanaan pembangunan seperti ini pada gilirannya akan mampumenciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat (*trickle downeffect*), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.Output Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah adalah **Program Tahunan** yang sesuai dengan Tupoksi. Rencana Kerja ini, selainmenjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, berfungsi pula sebagai saranapeningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruhstaf Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian Rencana Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 disusun dan menyadari bahwa perkembangan ilmupengetahuan teknologi akan berkembang pesat dalam kurun waktu yang cepat, maka Renjaini buat dengan seksama dan untuk disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan kedepan.

Tobadak, 07 Agustus 2024
Kepala Satuan,

Drs. H. Muhammad Samsir, M.Pd
Pangkat : PembinaUtama Muda, IV/c
NIP. 19691231 199412 1 069



Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2024 ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Rencana kerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaaan kewenangan Dinas Sosial selama satu tahu ke depan sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja sehingga Rencana Kerja (Renja) berperan sebagai alat kendali dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun-tahun berikutnya. Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah.

Mamuju Tengah, 31 Juli 2023

Kepala Dinas Sosial

HJ. NIRWANASARI ARAS, T., SE., MM

NIP. 19790907 201101 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II	**HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	31
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	31
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
	3.3 Program dan Kegiatan	34
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	37
BAB V	**PENUTUP**	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang aktual dan berhasil guna sejalan dengan pembangunan di bidang lainnya. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Untuk Periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Sosial mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraaan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA-SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam Program dan Kegiatan dan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. RENJA merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA - PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. RENJA-SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD sebagai wujud dari kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024.

Mengingat pentingnya Dokumen RENJA-SKPD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah, maka hendaknya dari mulai awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya secara baik dan benar. Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu SKPD teknis yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang ada yaitu melaksanakan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi Program :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai rumusan prioritas kegiatan pembangunan daerah serta sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial untuk tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun tujuan disusunnya Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, efektif, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2024;
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen rencana kerja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bagian ini terdiri atas 4 (empat) sub-bab yakni latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu. Pada bagian ini terdiri atas 5 (lima) sub-bab yakni evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah tahun lalu dan capaian renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini terdiri atas 3 (tiga) sub-bab yakni telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, serta program dan kegiatan.

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan Program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2021. Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2022 dan 2023.

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2022 yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 2.585.178.326 dengan capain realisasi kinerja fisik sebesar 99% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.582.165.706 (99,8%).

Implikasi yang timbul terhadap Capaian Program Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah adalah Persentase Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 100 % dan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya sebesar 100 %. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2022 :

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL YANG DILAKSANAKAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1	06	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

1	6	2	2.03	02	*Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah TKSK yang memperoleh layanan peningkatan kemampuan*	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	6 Orang	**16 Orang**	**320%**
1	06	03			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**PERSENTASE PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	06	03	2.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Jumah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	06	03	2.01	01	*Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal*	*Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi*	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	**15 Orang**	**300%**
1	**06**	**03**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	**06**	**03**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**

1	06	03	2.01	01	*Penyediaan Sandang*	*Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang*	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	50 Paket	60 Paket	1200%
1	06	03	2.01	09	*Pemberian Layanan Data dan Pengaduan*	*Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan data dan pengaduaan*	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	120 Orang	300%
1	06	03	2.01	10	*Pemberian Layanan Kedaruratan*	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	25 Orang	65 Orang	325%
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial**	**91%**	**91%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**291%**	**320%**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemutakhran data terpadu penanggulangan kemiskinan yang telah diaksanakan**	**91%**	**91%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**291%**	**320%**
1	06	05	2.02	01	*Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	*Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	37.121 Jiwa	37.121 Jiwa	37.121 Jiwa	37.121 Jiwa	100%	37.121 Jiwa	111.363 Jiwa	300%
1	06	05	2.02	03	*Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluargaa*	*Jumlah Kepala Keluarga yang menerima fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan Keluarga*	6.692 Orang	6.692 Orang	6.692 Orang	6.692 Orang	100%	6.692 Orang	20.076 Orang	2990%
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**

1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima Perlindungan dan Jaminan sosial**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	06	06	2.01	01	*Penyediaan Makanan*	*Jumlah korban bencana yang mendapat makanan*	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	30 Orang	300%
1	06	06	2.01	05	*Pelayanan Dukungan Psikososial*	*Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial*	10 Orang	10 Orang	10 Orang	30 Orang	100%	10 Orang	50 Orang	500%
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	06	06	2.02	02	*Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana*	*Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia*	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100%	50 Orang	120 Orang	343%
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	06	07	2.01	02	*Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*	*Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Dipelihara*	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	3 Titik	300%
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**

1	06	01	2.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan PD*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	300%
1	06	01	2.01	02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	06	01	2.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah jasa surat menyurat	1800 Surat	300 Surat	300 Surat	300 Surat	100%	300 Surat	900 Surat	50%
1	06	01	2.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumber daya air dan jasa listrik yang dipakai	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
1	06	01	2.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	06	01	2.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	300%
1	06	01	2.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	9 Unit	300%
1	06	01	2.09	08	*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Aset	1 Aset	1 Aset	1 Aset	100%	1 Aset	3 Aset	300%
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	06	01	2.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	10 Unit	15 Unit	750%
1	06	01	2.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	5.042 Lembar	20.090 Lembar	20.090 Lembar	20.090 Lembar	100%	20.090 Lembar	60270 Lembar	1195%

1	06	01	2.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	50 Kegiatan	83%	60 Kegiatan	170 Kegiatan	243%
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**99%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**299%**	**299%**
1	06	01	2.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah ASN	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	30 Orang	300%
1	06	01	2.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	300%
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	06	01	2.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	3 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	5 Orang	167%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan, memonitoring hasil pelaksanaan suatu program, kegiatan, dan sub kegiatan serta mengevaluasi dampak yang terjadi pada target program sesuai dengan yang diharapkan. Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksana teknis kegiatan dilapangan dan dimasukkan ke dalam tabel pelaporan maka dapat diperoleh pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERENGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		100%	100%	100%	100%	100%	94,08%		95%	96%	
2	Persentase PMKS yang tertangani		100%	100%	100%	100%	100%	94,08%		95%	96%	
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		100%	100%	100%	100%	100%	94,08%		95%	96%	
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainya		100%	100%	100%	100%	100%	0,04%		1%	1,50%	

5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		100%	100%	100%	100%	100%	0%		0,10%	0,20%	
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		100%	100%	100%	100%	100%	46,22%		50%	53%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, maka Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial dengan memperhatikan petunjuk pedoman teknis dari Menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya, maka Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di bidang sosial;
b. Pembinaan dan pengendalian pelayanan Sosial, baik teknis maupun administrasi;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang sosial;
d. Pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan satuan organisasi lingkup Dinas Sosial ;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di bidang Sosial dengan instansi terkait; dan
f. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan di bidang Sosial.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mamuju Tengah adalah :

“**Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla’ Tassisara”**

Kata kunci yang terkandung dalam rumusan visi ini adalah maju, sejahtera dan bingkai *Lalla' Tassisara***.** Ketiga kata kunci ini saling terkait satu sama lain dalam menggambarkan kondisi masa depan yang hendak dicapai bersama oleh seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah. Artikulasi atau penjelasan dari masing-masing kata kunci tersebut teruraikan sebagai berikut.

"Maju" adalah kondisi dimana kualitas manusia Kabupaten Mamuju Tengah semakin tinggi dan didukung oleh pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai baik dari segi jangkauannya maupun dari segi kualitasnya.

"Sejahtera" adalah kondisi dimana kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah semakin meningkat dengan didukung oleh pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

"Bingkai Lalla' Tassisara" adalah kondisi dimana kebersamaan di tengah keberagaman menjadi acuan nilai dan norma bagi seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenteraman.

Dengan visi tersebut, kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dicita-citakan semakin membalik, ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2025, maka ditempuh misi sebagai berikut :

1. **Misi 1**

   Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar

   Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya umum ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.

2. **Misi 2**

   Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar

   Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta pelayanan umum lainnya.

3. **Misi 3**

   Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah

   Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian dalam arti umum yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, selain memperkuatan sistem agribisnis dan agroindustri berbasis kelapa sawit untuk sebanyak-banyaknya memberi manfaat bagi penghidupan rakyat. Seiring dengan peningkatan daya saing perekonomian, kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian, terutama dalam penanggulangan kemiskinan.

4. **Misi 4**

   Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

   Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi. Area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Termasuk juga dalam misi ini adalah penguatan pemerintahan kecamatan dan pembinaan desa.

5. **Misi 5**

   Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

   Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara, memperkuat dan mengembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang heterogen. Upaya itu dimaksudkan agar masyarakat tetap hidup rukun dan damai serta mengacu pada nilai *Lalla' Tassisara*, yakni berbeda-beda tetapi tetap dalam kebersamaan untuk membangun Kabupaten Mamuju Tengah.

6. **Misi 6**

   Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup

   Misi ini mencakup upaya umum dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan seperti degradasi lahan, kerusakan sungai, kerusakan pesisir dan kerusakan tutupan lahan. Misi ini juga terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengelolaan sampah.

Telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah memberi gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini ditunjukan melalui :

a. Melalui Misi ke-2 : Meningkatkan kualitas pelayanan dasar

   Adapun sasaran dari misi tersebut yang berkaitan langsung dengan tugas Dinas Sosial adalah terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten dengan indikator sasaran rata-rata capaian SPM.

b. Melalui Misi ke-3 : Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah

   Adapun sasaran dari misi tersebut yang berkaitan langsung dengan tugas Dinas Sosial adalah meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat dengan indikator

sasaran angka kemiskinan.

c. Melalui Misi ke-4 : Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik
   adapun sasaran dari misi tersebut yang berkaitan langsung dengan tugas rutin Dinas Sosial adalah Meningkatnya dukungan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Sosial.

Dengan adanya sasaran tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten mamuju Tengah sebagai penyelenggara pelayanan bidang sosial menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai sasaran tersebut. Pencapaian suatu indikator kinerja tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan serta faktor pendukung yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan.

Adapun permalasahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

1. Basis Data yang belum valid dan belum berbasis manajemen sistem informasi yang baik;
2. Belum konsisten dan terintegrasinya kebijakan setiap perangkat daerah yang terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Belum mantapnya pemahaman koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kesejahteraan sosial masyarakat terutama berkaitan dengan program lintas sektor;
4. Rendahnya taraf pendidikan dan Sumber daya manusia, serta infrastruktur yang belum memadai;
5. Kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
6. Sistem administrasi pemerintahan belum tersusun dengan jelas dan rapih sehingga masih banyak peraturan-peraturan yang tumpang tindih;
7. Luasnya Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan aksesibilitas yang sulit dikarenakan ada beberapa daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau;
8. Laju Pertumbuhan Penduduk yang tinggi baik alami maupun migrasi serta tingginya mobilitas penduduk;
9. Keadaan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah yang heterogen;
10. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat;
11. Terjadinya berbagai masalah di bidang sosial seperti bencana, konflik, krisis ekonomi yang memerlukan penanganan yang cepat dan intensif.

Selain permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah juga mempunyai peluang, di antaranya sebagai berikut :

1. perundang-undangan yang mendukung koordinasi, sinkronisasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Potensi alam yang mendukung;

3. Peraturan Komitmen pimpinan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;
4. Terdapat media massa yang cukup beragam seperti media online, Koran, radio, dan tv swasta;
5. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya dan dinamis bagi daerah untuk melakukan pembangunan khususnya di bidang kesejahteraan sosial;
6. Komitmen pembangunan nasional untuk mewujudkan kejahteraan sosial masyarakat;
7. Adanya berbagai program nasional beserta seluruh struktur pendukungnya seperti PKH, BPNT, dan program-program lainnya;
8. Kemudahan dalam komunikasi (via internet) untuk penanggulangan masalah-masalah sosial.

Dari penjabaran di atas dapat ditentukan isu-isu penting yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

a. Tingkat akurasi Basis Data Terpadu;
b. Masih tingginya penduduk miskin;
c. Angka penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masih cukup tinggi;
d. Tingkat pendapatan penduduk yang masih rendah sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar;
e. Kualitas dan kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial belum maksimal;
f. Belum adanya sarana dan prasarana atau tempat perlindungan untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS serta penanganan kebencanaan;
g. Sarana dan prasarana kantor berupa perangkat pengolahan data yang belum memadai;
h. Minimnya kualitas dan kuantitas tenaga programmer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan;
i. SOP yang belum terintegrasi;
j. Kurangnya sinergitas stakeholders dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan setiap tahun sebagai pedoman dalam menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah bertanggung jawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni penanggulangan kemiskinan serta menjadi salah satu Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Oleh karena itu dalam perumusan

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif yang termuat dalam dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah harus menitikberatkan pada pencapaian prioritas dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Mamuju Tengah.

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan tahun 2024, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah. Berikut adalah perbandingan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah :

Tabel 2.4.1

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

NO	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*4*	*3*	*5*	*6*	*2*	*4*	*3*	*5*	*6*	
	SOSIAL					**SOSIAL**					
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**1.948.685.300**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**1.948.685.300**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**118.381.628**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**118.381.628**	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MAMUJU TENGAH	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 Dokumen	64.683.354	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MAMUJU TENGAH	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 Dokumen	64.683.354	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	36.199.174	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	36.199.174	
c	Forum OPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah Dokumen Ranwal	1 Dokumen	17.499.100	Forum OPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah Dokumen Ranwal	1 Dokumen	17.499.100	

2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**739.877.685**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**739.877.685**	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MAMUJU TENGAH	Jumlah ASN	10 Orang	709.397.276	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MAMUJU TENGAH	Jumlah ASN	10 Orang	709.397.276	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Dokumen	30.480.409	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Dokumen	30.480.409	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**241.176.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**241.176.000**	
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	MAMUJU TENGAH	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	18 Orang	241.176.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	MAMUJU TENGAH	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	18 Orang	241.176.000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**301.221.490**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**301.221.490**	
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAMUJU TENGAH	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit	180.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAMUJU TENGAH	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	180.000.000	
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	MAMUJU TENGAH	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	10 jenis	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	MAMUJU TENGAH	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	10 jenis	5.000.000	
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	MAMUJU TENGAH	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	38 Meter, 20049 Lembar	8.915.170	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	MAMUJU TENGAH	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	38 Meter, 20049 Lembar	8.915.170	

d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	60 Kali	107.306.320	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	60 Kali	107.306.320	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**185.404.135**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**185.404.135**	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MAMUJU TENGAH	Jumlah jasa surat menyurat	300 Surat	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MAMUJU TENGAH	Jumlah jasa surat menyurat	300 Surat	3.000.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MAMUJU TENGAH	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	20 mbps 1000 m3 19785 kwh	39.000.135	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MAMUJU TENGAH	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	20 mbps 1000 m3 19785 kwh	39.000.135	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MAMUJU TENGAH	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Orang	143.404.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MAMUJU TENGAH	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Orang	143.404.000	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**97.289.362**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**97.289.362**	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MAMUJU TENGAH	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	42.097.912	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MAMUJU TENGAH	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	42.097.912	

b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAMUJU TENGAH	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 Unit	25.191.450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAMUJU TENGAH	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 Unit	25.191.450	
c	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	MAMUJU TENGAH	Jumlah aset tak berwujud terpelihara	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	MAMUJU TENGAH	Jumlah aset tak berwujud terpelihara	1 Unit	30.000.000	
B	**Program Pemberdayaan Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Jenis PSKS yang meningkat kemampuannya**	**100%**	**72.835.855**	**Program Pemberdayaan Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Jenis PSKS yang meningkat kemampuannya**	**100%**	**72.835.855**	
1	**Pengembangan Potensi Sumber KesejahteraanSosial Daerah Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah PSKS yang memperoleh layanan pengembangan Potensi**	**6 PSKS**	**72.835.855**	**Pengembangan Potensi Sumber KesejahteraanSosial Daerah Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah PSKS yang memperoleh layanan pengembangan Potensi**	**6 PSKS**	**72.835.855**	
a	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	MAMUJU TENGAH	Jumlah TKSK yang memperoleh layanan peningkatan kemampuan	6 Orang TKSK, 108 Orang Karang Taruna	72.835.855	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	MAMUJU TENGAH	Jumlah TKSK yang memperoleh layanan peningkatan kemampuan	6 Orang TKSK, 108 Orang Karang Taruna	72.835.855	
C	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani**	**100%**	**7.728.000**	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani**	**100%**	**7.728.000**	
1	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan**	**5 Orang**	**7.728.000**	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan**	**5 Orang**	**7.728.000**	

a	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	MAMUJU TENGAH	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi	5 Orang	7.728.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	MAMUJU TENGAH	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi	5 Orang	7.728.000	
D	**Program Rehabilitasi Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)**	**100%**	**355.070.000**	**Program Rehabilitasi Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)**	**100%**	**355.070.000**	
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar yang sesuai standar**	**40 Orang**	**355.070.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar yang sesuai standar**	**40 Orang**	**355.070.000**	
a	Penyediaan Sandang	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	5 orang	106.767.000	Penyediaan Sandang	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	5 orang	106.767.000	
b	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan data dan pengaduaan	20 orang	71.279.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan data dan pengaduaan	20 orang	71.279.000	

c	Pemberian Layanan Kedaruratan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	15 orang	90.319.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	15 orang	90.319.000	
d	Penyediaan Alat bantu	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	15 orang	52.710.000	Penyediaan Alat bantu	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	15 orang	52.710.000	
e	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lansia dan tuna sosial terlantar di luar panti sosial	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	5 orang	33.995.000	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lansia dan tuna sosial terlantar di luar panti sosial	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	5 orang	33.995.000	
2	**Rehabilitasi Sosial penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	MAMUJU TENGAH	**Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial**	**100%**	**296.120.000**	**Rehabilitasi Sosial penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial**	**100%**	**296.120.000**	
a	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	10 Orang	42.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	10 Orang	42.000.000	
b	Pemberian Layanan Kedaruratan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	15 Orang	65.520.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	15 Orang	65.520.000	

c	Penyediaan Permakanan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bantuan Permakanan sesuai standar Gizi	10 orang	35.700.000	Penyediaan Permakanan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bantuan Permakanan sesuai standar Gizi	10 orang	35.700.000	
d	Penyediaan Sandang	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkanBantuan Sandang sesuai standar	10 orang	22.900.000	Penyediaan Sandang	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkanBantuan Sandang sesuai standar	10 orang	22.900.000	
e	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial dan Atau Pusat Kesejahteraan Sosial	75 orang	100.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial dan Atau Pusat Kesejahteraan Sosial	75 orang	100.000.000	
f	Pemberian Layanan Rujukan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	5 orang	15.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	5 orang	15.000.000	
g	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	5 Orang	15.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	5 Orang	15.000.000	

E	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial**	**100%**	**810.532.400**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial**	**100%**	**810.532.400**	
1	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan**	**100%**	**323.404.772**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan**	**100%**	**323.404.772**	
a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	MAMUJU TENGAH	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/kota yang terdata	37121 Jiwa	255.315.700	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	MAMUJU TENGAH	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/kota yang terdata	37121 Jiwa	255.315.700	
b	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	MAMUJU TENGAH	Jumlah Kepala Keluarga yang menerima fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan Keluarga	6692 KK	68.089.072	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	MAMUJU TENGAH	Jumlah Kepala Keluarga yang menerima fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan Keluarga	6692 KK, 6000 KPM, 20 Kel	68.089.072	
F	**Program Penanganan Bencana**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100%**	**720.813.400**	**Program Penanganan Bencana**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100%**	**720.813.400**	
1	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima Perlindungan dan Jaminan sosial**	**20 Orang**	**280.974.800**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima Perlindungan dan Jaminan sosial**	**20 Orang**	**280.974.800**	

a	Penyediaan Makanan	MAMUJU TENGAH	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial dan mendapat makanan	10 Orang	7.782.800	Penyediaan Makanan	MAMUJU TENGAH	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial dan mendapat makanan	10 Orang	7.782.800	
b	Pelayanan Dukungan Psikososial	MAMUJU TENGAH	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	10 Orang	273.192.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	MAMUJU TENGAH	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	10 Orang	273.192.000	
2	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah penerima layanan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana**	**35 Orang**	**439.838.600**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah penerima layanan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana**	**35 Orang**	**439.838.600**	
a	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	MAMUJU TENGAH	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	35 Orang	439.838.600	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	MAMUJU TENGAH	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	35 Orang	439.838.600	
G	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**BABANA**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**100%**	**61.726.578**	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**BABANA**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**100%**	**61.726.578**	
1	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**BABANA**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Dipelihara**	**1 Titik**	**61.726.578**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**BABANA**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Dipelihara**	**1 Titik**	**61.726.578**	
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota	BABANA	Jumlah Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota yang Dipelihara	1 Titik	61.726.578	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota	BABANA	Jumlah Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota yang Dipelihara	1 Titik	61.726.578	
JUMLAH				**3.977.391.533**		**JUMLAH**				**3.977.391.533**	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan hasil perbandingan antara RKPD Kabupaten Mamuju Tengah dan hasi analisis kebutuhan pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada RKPD tahun 2024 sama dengan Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024;
2. Seluruh target capaian indikator kinerja yang ada RKPD tahun 2024 sama dengan Seluruh target capaian indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024;
3. Pagu indikatif setiap program/kegiatan/sub kegiatan yang ada RKPD tahun 2024 sama untuk kebutuhan dana setiap program/kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang dihadiri oleh kelompok masyarakat, kepala desa, ormas dan LSM. Pada pembahasan di Forum OPD, pada Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 tidak terdapat usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari masyarakat.

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

NO	PRORAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penganganan Fakir Miskin	Mamuju Tengah	Sosialisasi Penanganan Fakir Miskin	175.000.000	Sosialisasi ini akan memberikan pemahaman untuk upaya Penanganan Fakir Miskin
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Rencana pembangunan yang dimaksud adalah rencana pembangunan jangka panjang yang selanjutnya disebut disusun dalam dokumen RPJPN, rencana pembangunan jangka menengah yang selanjutnya disebut RPJMN, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut RKP.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025 adalah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis *(Major Project).* Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Proyek Prioritas Strategis *(Major Project)* lebih lanjut dijabarkan salah satunya ke dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Renstra Kementerian/Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah: ‘‘Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitan serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Adapun sasaran strategis Kementerian Sosial yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan melalui indikator Indeks Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional melalui indikator :
   a. Indeks Partisipasi Sosial
   b. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
   c. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
   d. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan

e. Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan

3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik melalui indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Dari hasil telaahan Renstra Kementerian Sosial ditemukan sasaran strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebing lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran serta indikator tujuan dan sasaran

Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (T1)	Skor Kepuasan Masyarakat atas SPM Sosial	Meningkatnya Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (S1)	Rata-rata Capaian SPM Bidang Sosial

		Rasio rumah tangga fakir miskin terhadap total rumah tangga miskin		Persentase Penurunan Rumah Tangga Fakir Miskin
				Persentase Penurunan Rumah Tangga Nelayan Miskin
2	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Sosial (T2)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya dukungan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Sosial (S2)	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial. Program dan kegiatan ini tentunya secara langsung menyasar pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya dituangkan juga ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan direncanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :
   - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub-kegiatan :
     - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub-kegiatan :
     - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub-kegiatan :
     - 1.3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub-kegiatan :

1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub-kegiatan :

1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub-kegiatan :

1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.3 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

2. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan :

2.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub-kegiatan :

2.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan kegiatan :

3.1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, dengan sub-kegiatan :

3.1.1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

4. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan :

4.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan sub-kegiatan :

4.1.1 Penyediaan Sandang

4.1.2 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

4.1.3 Pemberian Layanan Kedaruratan

4.1.4 Penyediaan Alat bantu

4.1.5 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lansia dan tuna sosial terlantar di luar panti sosial

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :
   5.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub-kegiatan :
      5.1.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
      5.1.2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
6. Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan :
   6.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan sub-kegiatan :
      6.1.1 Penyediaan Makanan
   6.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub-kegiatan :
      6.2.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan :
   7.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan sub-kegiatan :
      7.1.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mamuju Tengah oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah. Ada 6 Program, 13 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 11.267.000.000,- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagaimana tabel 4.1. dibawah ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	SOSIAL								
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**1.948.685.300**	**DAU**		**100%**	**1.948.685.300**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**118.381.628**	**DAU**		**100%**	**118.381.628**
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	MAMUJU TENGAH	2 Dokumen	64.683.354	DAU		2 Dokumen	64.683.354
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	MAMUJU TENGAH	1 Dokumen	36.199.174	DAU		1 Dokumen	36.199.174
c	Forum OPD	Jumlah Dokumen Ranwal	MAMUJU TENGAH	1 Dokumen	17.499.100	DAU		1 Dokumen	17.499.100

2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**739.877.685**	**DAU**		**100%**	**739.877.685**
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	MAMUJU TENGAH	10 Orang	709.397.276	DAU		10 Orang	709.397.276
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	MAMUJU TENGAH	2 Dokumen	30.480.409	DAU		2 Dokumen	30.480.409
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**241.176.000**	**DAU**		**100%**	**241.176.000**
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	MAMUJU TENGAH	18 Orang	241.176.000	DAU		18 Orang	241.176.000
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**301.221.490**	**DAU**		**100%**	**301.221.490**
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	MAMUJU TENGAH	2 Unit	180.000.000	DAU		10 Unit	180.000.000
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	MAMUJU TENGAH	10 jenis	5.000.000	DAU		10 jenis	5.000.000
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	MAMUJU TENGAH	38 Meter, 20049 Lembar	8.915.170	DAU		38 Meter, 20049 Lembar	8.915.170
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	MAMUJU TENGAH	60 Kali	107.306.320	DAU		60 Kali	107.306.320

5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**185.404.135**	**DAU**		**100%**	**185.404.135**
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	MAMUJU TENGAH	300 Surat	3.000.000	DAU		300 Surat	3.000.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	MAMUJU TENGAH	20 mbps	39.000.135	DAU		20 mbps	39.000.135
				1000 m3		DAU		1000 m3	
				19785 kwh		DAU		19785 kwh	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	MAMUJU TENGAH	12 Orang	143.404.000	DAU		12 Orang	143.404.000
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**97.289.362**	**DAU**		**100%**	**97.289.362**
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	MAMUJU TENGAH	1 Unit	42.097.912	DAU		1 Unit	42.097.912
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	MAMUJU TENGAH	3 Unit	25.191.450	DAU		3 Unit	25.191.450
c	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud terpelihara	MAMUJU TENGAH	1 Unit	30.000.000	DAU		1 Unit	30.000.000
B	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase Jenis PSKS yang meningkat kemampuannya**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**72.835.855**	**DAU**		**100%**	**72.835.855**
1	**Pengembangan Potensi Sumber KesejahteraanSosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PSKS yang memperoleh layanan pengembangan Potensi**	**MAMUJU TENGAH**	**6 PSKS**	**72.835.855**	**DAU**		**6 PSKS**	**72.835.855**
a	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang memperoleh layanan peningkatan kemampuan	MAMUJU TENGAH	6 Orang TKSK, 108 Orang Karag Taruna	72.835.855	DAU		6 Orang TKSK, 108 Orang Karag Taruna	72.835.855

C	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**7.728.000**	**DAU**		**100%**	**7.728.000**
1	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan**	**MAMUJU TENGAH**	**5 Orang**	**7.728.000**	**DAU**		**5 Orang**	**7.728.000**
a	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi	MAMUJU TENGAH	5 Orang	7.728.000	DAU		5 Orang	7.728.000
D	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase (%) penyandang disabilitas**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**355.070.000**	**DAU**		**100%**	**355.070.000**
		terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan							
		gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)							
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas**	**Jumlah penyandang disabilitas**	**MAMUJU TENGAH**	**40 Orang**	**355.070.000**	**DAU**		**40 Orang**	**355.070.000**
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	**terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan**							
	serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**gelandangan pengemisyang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar yang sesuai standar**							
a	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	MAMUJU TENGAH	5 orang	106.767.000	DAU		5 orang	106.767.000

b	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan data dan pengaduaan	MAMUJU TENGAH	20 orang	71.279.000	DAU		20 orang	71.279.000
c	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	MAMUJU TENGAH	15 orang	90.319.000	DAU		15 orang	90.319.000
d	Penyediaan Alat bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	MAMUJU TENGAH	15 orang	52.710.000	DAU		15 orang	52.710.000
e	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lansia dan tuna sosial terlantar di luar panti sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	MAMUJU TENGAH	5 orang	33.995.000	DAU		5 orang	33.995.000
2	**Rehabilitasi Sosial penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial**	MAMUJU TENGAH	**100%**	**296.120.000**	**DAU**		**100%**	**296.120.000**
a	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	MAMUJU TENGAH	10 Orang	42.000.000	DAU		10 Orang	42.000.000
b	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	MAMUJU TENGAH	15 Orang	65.520.000	DAU		15 Orang	65.520.000

c	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bantuan Permakanan sesuai standar Gizi	MAMUJU TENGAH	10 orang	35.700.000	DAU		10 orang	35.700.000
d	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkanBantuan Sandang sesuai standar	MAMUJU TENGAH	10 orang	22.900.000	DAU		10 orang	22.900.000
e	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial dan Atau Pusat Kesejahteraan Sosial	MAMUJU TENGAH	75 orang	100.000.000	DAU		75 orang	100.000.000
f	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	MAMUJU TENGAH	5 orang	15.000.000	DAU		5 orang	15.000.000
g	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	MAMUJU TENGAH	5 Orang	15.000.000	DAU		5 Orang	15.000.000

E	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**810.532.400**	**DAU**		**100%**	**810.532.400**
1	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**323.404.772**	**DAU**		**100%**	**323.404.772**
a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/kota yang terdata	MAMUJU TENGAH	37121 Jiwa	255.315.700	DAU		37121 Jiwa	255.315.700
b	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga yang menerima fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan Keluarga	MAMUJU TENGAH	6692 KK	68.089.072	DAU		6692 KK, 6000 KPM, 20 Kel	68.089.072
F	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**720.813.400**	**DAU**		**100%**	**720.813.400**
1	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima Perlindungan dan Jaminan sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**20 Orang**	**280.974.800**	**DAU**		**20 Orang**	**280.974.800**
a	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial dan mendapat makanan	MAMUJU TENGAH	10 Orang	7.782.800	DAU		10 Orang	7.782.800

b	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	MAMUJU TENGAH	10 Orang	273.192.000	DAU		10 Orang	273.192.000
2	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah penerima layanan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana**	**MAMUJU TENGAH**	**35 Orang**	**439.838.600**	**DAU**		**35 Orang**	**439.838.600**
a	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	MAMUJU TENGAH	35 Orang	439.838.600	DAU		35 Orang	439.838.600
G	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**BABANA**	**100%**	**61.726.578**	**DAU**		**100%**	**61.726.578**
1	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Dipelihara**	**BABANA**	**1 Titik**	**61.726.578**	**DAU**		**1 Titik**	**61.726.578**
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota yang Dipelihara	BABANA	1 Titik	61.726.578	DAU		1 Titik	61.726.578
JUMLAH				***3.977.391.533***				***3.977.391.533***	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 yang disusun berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Penyusunan Renja didasarkan pada program,kegiatan, dan sub kegiatan dengan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan sesuai yang telah direncanakan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, di antaranya sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi prioritas pertama yang harus dilaksanakan.
2. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada Tahun 2024 diharapkan sudah dapat dilaksanakan dengan paradigma baru. Selama ini pembangunan bidang kesejahteraan sosial masih menggunakan paradigma lama dengan pendekatan kelayakan sebagai penyandang masalah, sehinga orientasinya pada pemecahan masalah *(problem solving).* Sebagai konsekuensinya peran pemerintah lebih dominan melalui kegiatan rehabilitatif, penyantunan, pemberian bantuan, dan lain-lain. Dalam jangka panjang ternyata paradigma ini menciptakan sikap malas, ketergantungan yang tinggi, dan hanya berharap bantuan pemerintah, serta di kalangan penyandang masalah kesejahteraan sosial menuntut pada pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial lebih dikenal dengan istilah *Employment Community For Development,* artinya memandang penyandang masalah sosial dari segi potensi dan kemampuan internalnya. Paradigma ini tidak melihat kelayakan sebagai orang bermasalah, namun mereka dianggap memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan berusaha sehingga perlu dioptimalkan. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan potensi melalui kegiatan pemberdayaan. Pada paradigma ini peran pemerintah sangat kecil dan lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat dan kalangan lembaga swadaya masyarakat untuk berperan aktif dalam usaha kesejahteraan sosial. Dengan paradigma ini diharapkan tumbuh sikap dan perilaku kemandirian dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Kualitas dan kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencapaian indikator kinerja dan sasaran.

4. Ketepatan sasaran dalam memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kunci pokok keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Ketepatan sasaran pelayanan berangkat dari Basis Data Terpadu yang valid dan terverifikasi sehingga diperlukan adanya pemutakhiran basis data di setiap tahunnya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai bahan pertimbangan penyusunan anggaran pembangunan dan acuan dalam pelaksanaaan program kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami sangat harapkan sebagai perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja ini pada masa yang mendatang.

Mamuju Tengah, 02 Agustus 2023

Kepala Dinas Sosial

HJ. NIRWANASARI ARAS T., SE., MM

NIP. 19790907 201101 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

RENJA 2024

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor dan Instansi Pemerintah lainnya. RENJA OPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen perencanaan, juga diharapkan menyatukan Visi, Misi dan Strategi OPD dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang maju, mandiri khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan, serta untuk mengevaluasi kinerja OPD pada semester pertama pada tahu berjalan dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada semester berikutnya, terutama peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manusia di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan Distransnaker untuk periode 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkembang di Distransnaker Kabupaten Mamuju Tengah serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

RENJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kepala Dinas untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024. Adapaun berhasil dan tidaknya RENJA ini tidak lepas dari profesionalitas, integritas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap Prioritas Program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama

bagi pelaksanaan kinerja yang pada akhirnya mampu mewujutkan VISI dan MISI Kabupaten Mamuju Tengah.

Kami menyadari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masih banyak kelemahan-kekurangan, oleh karena itu kami mohon masukan dari semua pihak dan Masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan Program dan Kegiatan yang Startegis pada masa yang akan datang.

Tobadak, 27 Juli 2023
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

MUHAMMADIA, SE
Pangkat : Pembina, Tk.I IV/b
Nip. 19661125 198903 1 014

DAFTAR ISI

SAMPUL ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **3**

1.1 Latar belakang..... 3
1.2 Landasan Hukum..... 7
1.3 Maksud dan Tujuan 10
1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **17**

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah 17
2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah 27
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah..... 30
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 36
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat..... 44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 46

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional..... 46
3.2 Tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah 48
3.3 Program dan Kegiatan 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **65**

BAB V PENUTUP..... **83**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah merupakan dari penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memberikan gambaran tentang program kegiatan yang akan dikerjakan oleh organisasi oleh perangkat daerah (OPD) dalam satu tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pemerintahan.

Penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas

Perangkat Daerah;

5. Perumusan Rancangan Akhir dan;
6. Penetapan.

Dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten mamuju Tengah Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten mamuju Tengah tahun 2021-2026. Yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten mamuju Tengah.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Mamuju Tengah dalam pelayanan dibidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan berdasarkan visi dan misi Kabupaten mamuju Tengah yang tertuan dalam Renstra 2021-2026 Yaitu :

Visi “Terwujudnya Kemandirian Daerah Dalam Bingkai Lalla Tasi’sara Melalui Gerakan Bersama Membangun Mamuju Tengah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ”

Misi

1. Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar
3. Mendorong daya saing perekonomian daerah
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
5. Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat .

Rencana Kerja PD Tahun 2024 sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

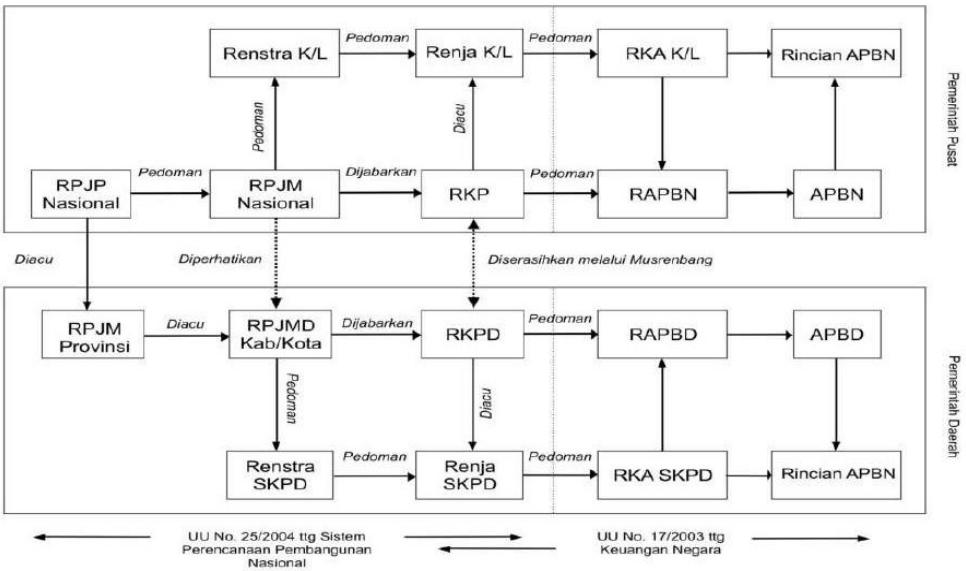
Penyusunan Renja dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2021 – 2026 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 -2024 dan RPJMN Tahun 2020 -2024, di mana RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2021 -2026 sebagai pedoman didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Pada lingkup pemerintahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Gambaran tentang hubungan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Yaitu :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam pencapai visi, misi dan tujuan organsiasi serta memberikan pedoman dalam pencapaian program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten mamuju Tengah Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Mamuju Tengah ini bertujuan untuk mensikronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga

Kerja dalam pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten mamuju Tengah untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan rencana kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN SEBELUMNYA

Terdiri dari :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangat Daerah Tahun Anggaran
sebelumnya dan Capaian Renstra Perangat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangat Daerah.

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang uraian program, kegaiatan dan pendanaan yang direncanakan

BAB V PENUTUP.

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, oleh karena itu Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 meliputi kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2022 perkiraan tahun berjalan, bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2025 telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau Realisasi APBD untuk Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah:

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah: Nol semua memenuhi target kinerja.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah:

Realisasi program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada tahun 2022 yang meliputi 7 Program dan kegiatan telah memenuhi target sesuai dengan target yang diusulkan baik dalam dokumen Renstra maupun Renja tahun 2022.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:-
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan adalah:
   Program / Kegiatan yang melebihi target adalah:-
5. Implikasi yang timbul terhadap capaian target capaian program Renstra PD adalah:
   1. Apabila target capaian program dalam Renstra tidak tercapai berakibat pada rendahnya kinerja OPD sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
   2. Apabila target capaian program dalam renstra tercapai dan melebihi target kinerja berakibat baik dan sangat baiknya kinerja OPD sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan guna memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan tentunya dapat menekan nilai kemiskinan ekstrim di Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan(Output)	Target kinerja capaian program Renstra perangkat daerah akhir tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan (renja perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Produktivitas Tenaga Kerjas**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	**100%**	60	100%	100%	**100%**	100%	100%	100%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat PelatihanBerbasis Kompetensi pada Tahun n	165	60	30	30	**100%**	25	115	70%
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Rasio Tenaga Kerja yang siap kerja**	**100%**	**0,945**	**100%**	**0,89**	**89%**	**100%**	**95%**	**95%**

		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase peningkatan tenaga kerja yang terdata	**100%**	0,945	100%	0,89	**89%**	100%	95%	95%
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	4	1	1	1	**100%**	1	3	75%
	PROGRAM PENEMPATAN KERJA		**Persentase Pencari kerja yang ditempatkan**	**100%**	**48%**	**12%**	**96%**	**80%**	**-**	**48%**	**48%**
		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis kegiatan pelayanan yang dilakukan	100%	48%	12%	96%	**80%**	0	48%	48%
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	**20**	0	**0**	0	**0%**	20	20	100%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		**Persentase kasus terselesaikan**	**100%**	**48%**	**12%**	**96%**	**80%**	**-**	**48%**	**48%**
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	48%	12%	96%	**80%**	0	48%	48%
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	91780	17696	**18.356**	17696	**96%**	17.696	53088	58%

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		**Persentase kawasan Transmigrasi yang di kembangkan**	**100%**	**90%**	**400%**	**0,8075**	**20%**	**100%**	**90%**	**90%**
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		*Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangnkan*	100%	0,90375	4	0,8075	**20%**	100%	90%	90%
		Penguatan SDM dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina*	424	5,23	**2**	1,23	**62%**	100	106,46	25%
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*	10	2	**2**	2	**100%**	2	6	60%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		**Persentase kawasan Transmigrasi yang dibangun**	**100%**	**1**	**2**	**2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kawasan Transmigrasi	100%	2	2	2	**100%**	100%	100%	100%
		kooordinasi dan singkronisasi Kerja Pembangunan Transmigrasi yang berasal darri 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	12	0	**0**	0	**0%**	2	2	17%
		Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi*	670	149	84	84	**100%**	111	2	0%

			Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	*Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan*	105	0	0	0	**0%**	105	105	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Persentase capaian kinerja program perangkat daerah**	**100%**	**76%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**80%**	**80%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggar dan evaluasi tepat waktu**	100%	1	7	7	**100%**	100%	100%	100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	1	1	1,02	**102%**	1	3,02	60%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	**100%**	1	3	60%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	**100%**	1	3	60%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	**100%**	1	3	60%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1	**100%**	1	3	60%

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	1	2	1,99	**100%**	1	3,99	80%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	100%	91%	100%	82%	**82%**	100%	91%	91%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	26	14	12	**86%**	14	52	72%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	1	**2**	1,0694444	**53%**	2	4,0694444	81%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	17	4	4	4	**100%**	8	16	94%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15.202	7200	4000	4000	**100%**	3.200	14400	95%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	330	88	66	48	**73%**	40	176	53%

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	1	1	1	**100%**	1	3	75%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	100%	75%	100%	100%	**100%**	100%	75%	75%
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14	10	**12**	12	**100%**	4	26	186%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	100%	93%	100%	85%	**85%**	100%	93%	93%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.268	785	400	340	**85%**	445	1570	124%
			Penyediaan Jasa Komunkiasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	46.158	25.800,00	2,043	2,043	**100%**	24	25.826,04	56%

2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan dua urusan, yaitu urusan wajib Ketenagakerjaan dan urusan pilihan Transmigrasi. Meskipun sebagai organisasi pelaksana urusan non pelayanan dasar, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab besar bagi keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah Periode 2021 – 2026.

Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD dapat diukur dengan menggunakan dasar Indikator SPM/Standar nasional, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama SKPD.

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tah 20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
	IKU								
1	Tingkat Pengangguran Tebuka (TPT)			2.70%	2.20%	1.87%	1.50%	2,52%	1.8
2	Tingkat partisipasi angkatan Kerja(TPAK)			70%	80%	85%	90%	70,84%	63,1
3	jumlah usaha industrial			0	5	5	5	5	5
	IKK								
1	Persentase Kegiatan Yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			20%	25%	30%	35%	29%	23
2	Persentase Tenaga Kerja yang di tempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten / Kota			30%	30%	40%	40%	39,32%	0.03

3	Persentase Tenaga kerja bersertifikat Kompetensi			100%	100%	100%	100%	2.28%	0,95%	100%	100%	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			15%	20%	20%	25%	32,00%	14,22%	20%	25%	
5	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Bina			2	2	2	2	2	2	2	2	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat kinerja pelayanan perangkat Daerah dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas

Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi bisa memperbaiki iklim ekonomi yang amat diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk keluar dari kritis ekonomi berkepanjangan. Kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia yang sering disororti masyarakat menjadi faktor penentu yang penting dari penurunan minat investasi. Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik berimplikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mataa masyarakat, karena dengan kualitas pelayanana yang membaik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa di bangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik. Pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai jenis layanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai pengaduan maupun keluhan, baik yang disampaikan secara langsung kepada institusi unit pelayanan maupun melalui media cetak elektronika.

Di sisi lain, masyarakat sendiripun belum memberi kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Karenanya, untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek

kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana dan akuntabilitas. Acuan pelaksanaan pelayanan publik harus berlandaskan pada pelayanan prima dengan prinsip baik (better), lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih sederhana (more simple dan aktual (newer).

Beberapa pelayanan yang harus dilaksanakan Dinas **Urusan Tenaga Kerja**, yaitu:

a. Pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Pelayanan dasar wajib diberikan berupa pelaksanaan pelatihan kerja;
b. Penempatan tenaga kerja. Pelayanan dasar yang wajib diberikan berupa:
    1) Pelayanan Informasi Pasar Kerja;
    2) Penenmpatan tenagaa Kerja di dalam Negeri; dan
    3) Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
c. Hubungan industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja. Pelayanan dasar yang wajib berupa:
    1) Pembinaan kelembagaan hubunga industrial dan syarat-syarat kerja; dan
    2) Pemerantaraan/mediasi perselisihan hubungan industrial
d. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pelayaann dasar yang wajib berupa:
    1) Pengawasan Norma ketenagakerjaan;
    2) Pengawasan norma kerja perempuan dan anak; dan
    3) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Urusan Transmigrasi

a. Pemberian fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigran.
b. Pembinaan/pelatihan calon transmigran sesuai dengan tingkat kompetensi yang dibutuhkan / dikembangkan.

2. Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas

Pada dasarnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan implementasi dari Tupoksi dan Kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah melalui capaian Visi dan Misi. Semua tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program dan kegiatan diarahkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan. Dalam Pelaksanaannya, tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja saja tetapi perlu dukungan PD lain.

Ada beberapa faktor yang sangat memengaruhi terealisasinya tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dinamika masyarakat, penyelenggaraan pemerintah dan lingkungan kerja yang ada menuntut percepatan dalam penyelesaian masalah yang cepat. Apabila faktor pengaruh dan permasalahan, abaik internal maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun faktor pengaruh sekaligus permasalahan tersebut, adalah:

a. Keterbatasan SDM

Kondisi ini terjadi disebabkan kurangnya SDM yang ada di Dinas dan kurangnya perputaran pegawai yang seharusnya dapat mejadi penyegaran dan pengalaman. Sehingga kuantitas juga, masih kurang memadai sehingga percepatan pekerjaan tertunda dari target waktu sehingga pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu.

b. Alokasi anggaran;

   Komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan seringkali tidak dapat teralisir seluruhnya. Hal ini dapat membawa konsekuensi perunya revisi terhadap program dan kegiatan yang sudah diusulkan. Optimalisasi menjadi berkurang, disebabkan alokasi anggaran yang terbatas.

c. Sarana dan prasarana

   Kenyamanan kerja dan peningkatan kinerja sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran program/kegiatan. Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan juga tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menunjang secara langsung. Seringkali kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kondisi pada akhirnya dapat tidak tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Kekurangan perlengkapan kantor seperti sarana mobilitas.

3. **Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Provinsi dan Nasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)**

Renja merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi acuan bagi setiap Dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bentuk rumusan kebijakan, penetapan program/kegiatan, sasaran, indikator dan target terukur serta penyediaan sumber pembiayaannya.

Selanjutnya, pelaksanaan Renja harus sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang merupakan kebijakan pembangunan daerah. Dengan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah maka secara otomatis capaian program Provinsi dan Nasional akan tercapai dikarenakan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah mengacu kepada RPJMD Provinsi dan Nasional, sehingga dengan tercapainya pembangunan dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat di Daerah secara khusus dan Nasional secara umum.

4. **Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas**

Tantangan dalam peningkatan pelayanan dinas adalah:

1. Angka pengangguran masih cukup tinggi
2. Dukungan personel yang kurang memadai dalam hal jumlah terutama personel yang berkaitan dengan pendataan tenaga kerja dan penempatan. Jumlah pegawai yang menangani penempatan/pengantar kerja sebanyak 2 orang hal ini tidak sebanding dengan jumlah penganggur yang membutuhkan fasilitasi penempatan.
3. Masih lemahnya lembaga hubungan industrial,
4. Belum adanya pengawas ketenagakerjaan, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja,

5. Masih banyaknya anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak,
6. Beberapa permasalahan di bidang ketransmigrasian yang masih dijumpai, diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi, rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi, serta belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi.

5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya sering kali menghadapi beberapa isu dan permasalahan yang dapat mengurangi optimalisasi dalam melaksanakan tugas fungsi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Masih tingginya tingkat pengangguran disebabkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan, keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang terdaftar;
b. Masih perlunya penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, belum sinkronnya kebijakan ketenagakerjaan pusat dengan kebijakan/peraturan daerah,
c. Banyaknya kesempatan kerja di dalam dan luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja daerah akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja.

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merencanakan untuk

mengadakan program dan kegiatan guna menjawab atau memberikan solusi yang tepat diantaranya adalah:

a. Pada tahun berikutnya dalam penanganan pengangguran volumenya perlu ditingkatkan dan mengusulkan anggaran pembantuan dari APBN dan APBD ;
b. Sosialisasi terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan perlu diintensifkan dan melibatkan semua pihak, khususnya serikat pekerja dan pihak pengusaha; dan
c. Peningkatan jumlah tenaga kerja terlatih dan tersentifikasi sesuai kompetensinya

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan pada evaluasi capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja tahun 2023, program indikatif di tahun 2024 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform kepala Daearah dan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026, maka tema RKPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021 – 2026 adalah "Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Didukung dengan Ketentraman dan Ketertiban"

Dari Tema tersebut di tetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota Mamuju Tengah

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu**	**Program/Kegiatan/Sub.kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu**	**Catatan Penting**
	(5)			(9)	(10)	(4)	(5)			(9)	(10)	
DINAS TRANSMIGRASI						**DINAS TRANSMIGRASI**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	*Kec. Tobadak*	***Persentase lulusan bersertifikat pelatihan***		**20%**	**130.000.000,00**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	*Kec. Tobadak*	***Persentase lulusan bersertifikat pelatihan***		**100%**	77.700.393	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Kec. Tobadak*	*Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi*		30	130.000.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Kec. Tobadak*	*Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi*		30	77.700.393	

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Kec. Tobadak*	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*	*Orang*	30	130.000.000,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Kec. Tobadak*	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*	*Orang*	30	77.700.393	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	*Kab. Mamuju Tengah*			**20%**	**360.000.000,00**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	*Kab. Mamuju Tengah*			**100%**	39.734.592	
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Kab. Mamuju Tengah*			40	280.000.000	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Kab. Mamuju Tengah*			20	39.734.592	
Perluasan Kesempatan Kerja	*Kab. Mamuju Tengah*	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja*	*Orang*	55	130.000.000,00	Perluasan Kesempatan Kerja	*Kab. Mamuju Tengah*	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja*	*Orang*	20	39.734.592	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		***Persentase Rencana Tenaga Kerja***		**100%**	**44.000.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		***Persentase Rencana Tenaga Kerja***		**100%**	42.947.979	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				1	44.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				1	42.947.979	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	*Kab. Mamuju Tengah*	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*	*Dokumen*	1	44.000.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	*Kab. Mamuju Tengah*	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*	*Dokumen*	1	42.947.979	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	*Kab. Mamuju Tengah*			**20%**	**74.000.000,00**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	*Kab. Mamuju Tengah*			**20%**	**74.000.000,00**	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Kab. Mamuju Tengah*			5	30.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Kab. Mamuju Tengah*			5	1.731.467158	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Kab. Mamuju Tengah*	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*	*Perkara*	5	30.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Kab. Mamuju Tengah*	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*	*Perkara*	5	1.731.467158	

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*			**100%**	**898.000.000,00**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*			**100%**	**898.000.000,00**	
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*			119	898.000.000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*			119	898.000.000	
kooordinasi dan singkronisasi Kerja Pembangunan Transmigrasi yang berasal darri 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Laporan*	2	24.000.000	kooordinasi dan singkronisasi Kerja Pembangunan Transmigrasi yang berasal darri 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Laporan*	4	52.759.000	
Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi*	*KK*	170	170.000.000	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi*	*KK*	170	90.595.000	
Pendampingan dari Kabupaten / Kota Sampai Ke Lokasi	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi*	*KK*	105	60.000.000	Pendampingan dari Kabupaten / Kota Sampai Ke Lokasi	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi*	*KK*	105	38.706.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	***Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian***		**66**	**190.000.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	***Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian***		**66**	**190.000.000,00**	
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian*		400	190.000.000	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian*		400	190.000.000	
Penguatan SDM dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina*	*Kepala Keluarga*	150	70.000.000	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina*	*Kepala Keluarga*	150	32.696.645	
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*	*Satuan Permukiman*	250	120.000.000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*IPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*	*Satuan Permukiman*	250	176.804.572	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Distrans naker***	***Persentase capaian kinerja program perangkat daerah***		**100%**	**2.563.801.761**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Distrans naker***	***Persentase capaian kinerja program perangkat daerah***		**100%**	**1.883.660.492**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Distrans naker***	***Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggar dan evaluasi tepat waktu***		**6**	**393.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Distrans naker***	***Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggar dan evaluasi tepat waktu***		**6**	**1.883.660.492**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	1	46.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	1	43.965.587	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Dokumen*	1	51.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Dokumen*	1	49.674.454	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Dokumen*	1	63.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Dokumen*	1	51.130.384	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Dokumen*	1	58.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Dokumen*	1	51.063.002	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*Dokumen*	1	58.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*Dokumen*	1	50.277.021	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	1	65.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	1	35.767.992	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Distrans naker***	***Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu***		**100%**	**1.288.554.786**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Distrans naker***	***Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu***		**100%**	**1.358.082.640**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	***Distrans naker***	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/ bulan*	14	1.123.933.786	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	***Distrans naker***	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/ bulan*	14	1.313.943.070	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Laporan*	1	19.621.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Laporan*	1	44.139.570	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Distrans naker***	***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		**100%**	**109.200.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Distrans naker***	***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		**o**	**o**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Dokumen*	15	31.200.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Dokumen*	0	0	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Dokumen*	6	30.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Dokumen*	0	0	
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Laporan*	15	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Laporan*	0	0	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*Dokumen*	2	33.000.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	***Distrans naker***	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*Dokumen*	0	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Distrans naker***	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**100%**	**108.239.612**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Distrans naker***	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**100%**	**53.524.500**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	***Distrans naker***	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	12	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	***Distrans naker***	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	6	5.100.951	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	***Distrans naker***	*Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor*	*Paket*	8	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	***Distrans naker***	*Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan*	*Paket*	8	10.119.870	

		yang Disediakan									
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	***Distrans naker***	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Paket*	14	8.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	***Distrans naker***	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Paket*	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	***Distrans naker***	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Paket*	6	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	***Distrans naker***	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Paket*	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	***Distrans naker***	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	4.000	2.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	***Distrans naker***	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	4.000	3.470.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Laporan*	66	51.239.612	Fasilitasi Kunjungan Tamu	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Laporan*	12	5.550.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	24	15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	24	29.283.679
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi***		**100%**	**400.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Distrans naker***	***Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi***		**100%**	**400.000.000**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	***Distrans naker***	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*Unit*		96.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	***Distrans naker***	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*Unit*	1	95.997.240
Pengadaan Mebel	***Distrans naker***	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*Unit*	6	34.000.000	Pengadaan Mebel	***Distrans naker***	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*Unit*	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Distrans naker***	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	3	120.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Distrans naker***	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	***Distrans naker***	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	1	150.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	***Distrans naker***	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia***		**100%**	**- 76.972.037**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia***		**100%**	**- 76.972.037**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Laporan*	400	15.134.861	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Laporan*	12	6.739.878	
Penyediaan Jasa Komunkiasi Sumber Daya Air dan Listrik	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	48	27.837.176	Penyediaan Jasa Komunkiasi Sumber Daya Air dan Listrik	***Distrans naker***	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	48	27.955.878	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Distrans naker***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**100%**	**227.579.400**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Distrans naker***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**100%**	**59.482.786**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	***Distrans naker***	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Unit*	15	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	***Distrans naker***	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Unit*	7	14.500.780	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	***Distrans naker***	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	1	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	***Distrans naker***	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	1	44.982.006	
Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	***Distrans naker***	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	14	35.000.000	Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	***Distrans naker***	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	14	35.000.000	

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan Daerah, Nasional maupun Global. Perbandingan dilakukan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang timbul agar capaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun dapat tercapai.

Pada prosesnya, penentuan rancangan awal RKPD didasarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya pada Renstra PD periode tahun 2021-2026, sedangkan hasil analisis kebutuhan merupakan kolaborasi dari rancangan awal dan proses-proses penyerapan usulan sperti Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, Musrenbang Kabupaten dan Reses DPRD.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisi kebutuhan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program realitas dengan mengantisipasi perkembangan/dinamika masa depan, dengan pendekatan yang jelas dan sinergis, Instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Adanya perbedaan antara Rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan disebabkan dilakukannya kembali rasionalisasi, kegiatan/subkegiatan, target dan pagu, yang disesuaikan dengan kondisi daerah terkini dan kebutuhan OPD.

.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat didapat dari Musrembang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah serta Reses DPRD. Dengan adanya proses ini maka terhimpun program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat

sesuai dengan tugas dan fungsi dinas serta indikator yang telah tertuang dalam RPJMD serta Renstra dinas tahun 2021-2026. Usulan yang masuk melalui Musrenbang Kecamatan, Forum PD dan Reses DPRD terkait pelatihan keterampilan bagi pencari kerja tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Mamuju Tengah. Keterangan lebih detail dapat dilihat pada tabel 32.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Mamuju Tengah
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	-Posk. Saluandeang -Posk. Salulisu -Posk. Lumu	Insentif Daerah Khusus	12 bulan	usulan Dinas Kesehatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Transmirasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah adalah:

No	Prioritas Nasional	Prioritas sulawesi Barat	Arah kebijakan Provinsi	Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan Kabupaten
1	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;	Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ektrem	Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pemantapan infrastruktur dasar untuk penguatan perekonomian rakyat berbasis agribisnisagropolitan didukung pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman

Rencana kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci dibidang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan Tahun 2024 agar terarah, efektif, efisien, terpadu, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan rencana kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 terutama berpedoman Rencana

Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang dimasyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan kementerian ketenagakerjaan RI dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja selaras denga salah satu panca program prioritas Kabupaten Mamuju Tengah difokuskan kepada *perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.*

Dalam menanggapi kebiajakan nasional, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah selalu mengacu pada kebijakan nasional dan daerah sehingga tetap sasaran dan berhasil guna bagi masyarakat.

Secara nasional hal yang perlu diperhatikan dari arah kebijakan pembangunan nasional adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhamkan dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten mamuju Tengah Tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
   - Meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Daerah
   - Meningkatkan nilai tambah ekonomi kawasan KTM
   - Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan transmigrasi dan tenaga kerja
2. sasaran
   - Meningkatnya Kompetensi dan daya saing Tenaga Kerja
   - meningkatnya Penyelesaian perselisishan hubungan industrial
   - Meningkatnya aksesibillitas kegiatan ekonomi kawasan Transmigrasi
   - Meningkatnya akuntanilitas kinerja penyelenggaraan urusan Transnaker

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/sub kegiatan adalah:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah:
   Rumusan Program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Target Indikator strategis yang digunakan terhadap rumusan program dan Kegiatan sudah sesuai dengan SDG's.

3. Dalam rumusan program dan Kegiatan beriorentasi terhadap pengentasan kemisikinan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program/ kegiatan/sub kegiatan antara lain meliputi:

1. Jumlah Urusan sebanyak 2 yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
2. Jumlah program sebanyak 8 Program dan jumlah kegiatan 15 Kegiatan.
3. Lokasi Program Kegiatan dan sub kegiatan di Kabupaten Mamuju Tengah, terutama Program Transmigrasi berfokus ke Desa Batu Parigi Kec Tobadak.
4. Total Kebutuhan dana / pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2024				
		Lokasi	Satuan	Target	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	***Persentase lulusan bersertifikat pelatihan***	***Kab. Mamuju Tengah***	***Persen***	**30**	**120.000.000**	**APBD**
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*jumlah tenaga Kerja*	*Kab. Mamuju Tengah*	*Orang*	100	120.000.000	APBD
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	***Persentase Pencari kerja yang ditempatkan***	***Kab. Mamuju Tengah***	***Persen***	**45%**	**100.000.000**	**APBD**
Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah jenis kegiatan pelayanan yang dilakukan*	*Kab. Mamuju Tengah*	*Dokumen*	1	100.000.000	APBD
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	***Persentase Rencana Tenaga Kerja***	***Kab. Mamuju Tengah***	***Persen***	**100**	**50.000.000**	**APBD**
Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja tersusun*	*Kab. Mamuju Tengah*	*Dokumen*	1	50.000.000	APBD
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	***Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yang terselesaikan***	***Kab. Mamuju Tengah***	***Persen***	**100**	**35.000.000**	**APBD**
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*persentase pembinaan ke perusahaan*	*Kab. Mamuju Tengah*	*Persen*	100	35.000.000	APBD

PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	***Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis (Persen)***	***UPT Saluandeang & UPT Salulisu***	***Persen***	**100**	**118.500.000**	**APBD**
Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Persentase perencanaan Transmigrasi*	*UPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Persen*	100	118.500.000	APBD
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	***Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis***	*UPT Saluandeang & UPT Salulisu*	***Persen***	**100**	**270.000.000,00**	**APBD**
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah kawasan transmigrasi*	*UPT Saluandeang & UPT Salulisu*	*Kawasan*	2	270.000.000	APBD
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	***Persentase Produktivitas Pertanian pada kawasan Transmigrasi***	*UPT Saluandeang & UPT Salulisu*	***Persen***	**82**	**140.000.000,00**	**APBD**
Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian*	*UPT Saluandeang & UPT Salulisu*	Kawasan	2	140.000.000	APBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar***	***Distransnaker***	***Persen***	**100**	**2.055.631.637**	**APBD**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggar dan evaluasi*	*DIstransnaker*	*Persen*	100	69.046.918	APBD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu*	*Distransnaker*	*Persen*	100	1.372.073.070	APBD
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar*	*Distransnaker*	*Persen*	100	79.575.000	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai PD yang dilayani*	*Distransnaker*	*Persen*	100	78.000.000	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar*	*Distransnaker*	*Persen*	100	94.239.612	APBD
Pengadaan Barang Kegiatan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi*	*Distransnaker*	*Persen*	100	184.000.000	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan*	*Distransnaker*	*Persen*	100	42.972.037	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara*	*Distransnaker*	*Persen*	100	135.725.000	APBD
TOTAL PAGU					**2.889.131.637**	

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai degan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduannya adalah :

Pagu yang di rencana kerja tahun 2024 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp. 2.889.131.637 yang akan dialokasikan pada 7 Program Kegiatan. Adapun Kegiatan beberapa Kegiatan yang tidak sesuai dengan dengan renstra antara lain:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga pada Renstra dianggarkan sebesar 150.000.000 sedangan di rencana kebutuhan sebesar 120.000.000, melihat dari realisasi dari tahun sebelumnya dan kecukupan Pagu anggaran sehingga dirasionalkan.
2. Tidak ada Program/Kegiatan/subkegiatan yang tidak sesuai dengan nomenklatur.

Tabel T-C. 33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

KODE					Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (*outcome*) dan Kegiatan *(output*)	Rencana Tahun 2024				Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
(3)					(4)	(5)	(20)	(11)	(12)			
02.	**07**				**DINAS TRANSMIGRASI**							
2.	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							
2.	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	*Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi*	Mamuju Tengah	100 %	120.000.000	DAU	100	150.000.000,00
2.	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi*	Mamuju Tengah	100 %	120.000.000	DAU	50	150.000.000,00

2.	07	03	2.01	01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*	Mamuju Tengah	40	*Orang*	120.000.000	DAU	50	150.000.000,00
2.	07	04			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			*Persentase Tenaga kerja yang di fasilitasi pelayanan antar kerja*	Mamuju Tengah	1		100.000.000	DAU	100	170.000.000,00
2.	07	04	2.03				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah jenis kegiatan pelayanan yang dilakukan*	Mamuju Tengah	1	*Kegiatan*	100.000.000	DAU	60	170.000.000,00
2.	07	04	2.01	01			Penyediaan Sumber Daya Pelayan antar kerja	*Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi*	Mamuju Tengah	50	*Orang*	100.000.000	DAU	60	170.000.000,00
2.	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			***Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja***	**Mamuju Tengah**	**100**	**%**	**50.000.000**	DAU	**100**	**50.000.000,00**
2.	07	02	2.01				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja tersusun*	Mamuju Tengah	1	*Dokumen*	50.000.000	DAU	1	50.000.000,00

2.	07	02	2.01	01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*	Mamuju Tengah	1	*Dokumen*	50.000.000	DAU	1	50.000.000,00
2.	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			***Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan(%)***	**Mamuju Tengah**	**100**	**%**	30.000.000	DAU	**100%**	**35.000.000,00**
2.	07	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		*persentase pembinaan ke perusahaan*	Mamuju Tengah	5		30.000.000	DAU	100%	35.000.000,00
2.	07	05	2.02	01			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*	Mamuju Tengah	5	*Perkara*	30.000.000	DAU	5	35.000.000,00

3.	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangan**	**Mamuju Tengah**	**100**	**%**	140.000.000	DAU	**100%**	**185.000.000,00**
3.	32	04	2.01			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		*Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan*	Mamuju Tengah	2	*Kawasan*	140.000.000	DAU	2	185.000.000,00
3.	32	04	2.01	01			Penguatan SDM dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina*	Mamuju Tengah	120	*KK*	40.000.000	DAU	105	60.000.000,00
3.	32	04	2.01	02			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*	Mamuju Tengah	2	*Satuan Permukiman*	100.000.000	DAU	2	125.000.000,00
3.	32	02			**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			*Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis (Persen)*	Mamuju Tengah	4		118.500.000	DAU	100%	20.000.000,00
3.	32	02	2.01			Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		*Persentase Perencanaan Transmigrasi*	Mamuju Tengah	4		118.500.000	DAU	100%	20.000.000,00

3.	32	02	2.01	01			Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain*	Mamuju Tengah	2	*Dokumen*	98.000.000	DAU	0	-
3.	32	02	2.01	02			Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	*Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untukMendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi*	Mamuju Tengah	2	*Kawasan Transmigrasi*	20.500.000	DAU	2	20.000.000,00
3.	32	03			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			*Persentase kawasan Transmigrasi yang dibangun*	Mamuju Tengah	100	%	501.000.000	DAU	100%	342.000.000,00
3.	32	03	2.01			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			*Jumlah Kawasan Transmigrasi*	Mamuju Tengah	2	*Kawasan*	501.000.000	DAU	2	342.000.000,00
3.	32	03	2.01	01			kooordinasi dan singkronisasi Kerja Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Mamuju Tengah	4	*Laporan*	50.000.000	DAU	5	55.000.000,00

3.	32	03	2.01	03			Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	*Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)*	Mamuju Tengah	2	*Dokumen*	120.000.000	DAU	23	220.000.000,00
3.	32	03	2.01	05			Penyuluhan Transmigrasi	*Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan*	Mamuju Tengah	50	*Kepala Keluarga*	50.000.000	DAU	105	55.000.000,00
3.	32	03	2.01	06			Pelatihan Transmigrasi	*Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan*	Mamuju Tengah	50	*Orang*	50.000.000	DAU	105	12.000.000,00
3	**32**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			***Persentase capaian kinerja program perangkat daerah***	**Mamuju Tengah**	**2**		**1.607.131.741**	DAU	**100%**	**1.417.500.000,00**
3	**32**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		***Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggar dan evaluasi tepat waktu***	**Mamuju Tengah**	**7**		**69.046.918**	DAU	**100%**	**72.500.000,00**

3	32	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Mamuju Tengah	1	*Dokumen*	18.291.330	DAU	2	20.000.000,00
3	32	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Mamuju Tengah	1	*Dokumen*	30.713.940	DAU	1	31.000.000,00
3	32	01	2.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Mamuju Tengah	1	*Dokumen*	2.899.705	DAU	1	3.000.000,00
3	32	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Mamuju Tengah	1	*Dokumen*	2.800.000	DAU	1	3.000.000,00
3	32	01	2.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Mamuju Tengah	1	*Dokumen*	2.800.207	DAU	1	3.000.000,00

3	32	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Mamuju Tengah	1	*Laporan*	6.241.736	DAU	2	6.500.000,00
3	32	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Mamuju Tengah	1	*Laporan*	5.300.000	DAU	1	6.000.000,00
3.	**32**	**01**	**2.02**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu***	**Mamuju Tengah**	**1**		**1.123.933.786**	**DAU**	**100%**	**680.000.000,00**
3	32	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Mamuju Tengah	15	*Orang/bulan*	1.123.933.786	DAU	1	1.125.000.000,00
3	32	01	2.02	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	Mamuju Tengah	1	*Dokumen*	30.750.000	DAU	5	32.000.000,00
3	32	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan*	Mamuju Tengah	10	*Laporan*	20.500.000	DAU	5	21.000.000,00

								Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
3	32	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	Mamuju Tengah	1	*Laporan*	20.111.525	DAU	2	680.000.000,00
3.	**32**	**01**	**2.03**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		**1**		**79.575.000**	**DAU**	**100%**	**81.000.000,00**
3	32	01	2.03	01			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	Mamuju Tengah	18	*Dokumen*	31.200.000	DAU	8	32.000.000,00
3	32	01	2.03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Mamuju Tengah	18	*Laporan*	15.375.000	DAU	8	16.000.000,00
3	32	01	2.03	07			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	Mamuju Tengah	2	*Dokumen*	33.000.000	DAU	4	33.000.000,00

3.	**32**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu***	Mamuju Tengah	**1**		**78.000.000**	**DAU**	**100%**	**78.000.000,00**
3	32	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Mamuju Tengah	14	*Orang*	45.000.000	DAU	2	45.000.000,00
3	32	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Mamuju Tengah	2	*Orang*	33.000.000	DAU	2	33.000.000,00
3.	**32**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Mamuju Tengah**	**1**		**22.000.000**	**DAU**	**100%**	**103.000.000,00**
3	32	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Mamuju Tengah	12	*Paket*	10.000.000	DAU	1	12.000.000,00
3	32	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan*	Mamuju Tengah	8	*Paket*	12.000.000	DAU	8	18.000.000,00

3	32	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Mamuju Tengah	4.000	*Paket*	2.000.000	DAU	4000	3.000.000,00
3	32	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Mamuju Tengah	66	*Laporan*	51.239.612	DAU	12	52.000.000,00
3	32	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Mamuju Tengah	1	*Laporan*	15.000.000	DAU	1	18.000.000,00
3.	**32**	**01**	**2.07**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi***	**Mamuju Tengah**	**1**		**184.004.000**	**DAU**	**100**	**219.000.000,00**
3	32	01	2.07	01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	Mamuju Tengah	3	*Unit*	150.004.000	DAU	1	184.000.000,00
3	32	01	2.07	05			Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	Mamuju Tengah	6	*Unit*	34.000.000	DAU	8	35.000.000,00
3.	**32**	**01**	**2.08**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**Mamuju Tengah**	**1**		**42.972.037**	**DAU**	**100%**	**46.000.000,00**
3	32	01	2.08	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Mamuju Tengah	400	*Laporan*	15.134.861	DAU	12	16.000.000,00

3	32	01	2.08	2			Penyediaan Jasa Komunkiasi Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Mamuju Tengah	50	*Laporan*	27.837.176	DAU	2	30.000.000,00
3.	**32**	**01**	**2.09**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara***	**Mamuju Tengah**	**1**		**7.600.000**	**DAU**		**138.000.000,00**
3	32	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Mamuju Tengah	16	*Unit*	7.600.000	DAU	**1**	**8.000.000,00**
3	32	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Mamuju Tengah	17	*Unit*	15.375.000	DAU	17	17.000.000,00
3	32	01	2.12	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Mamuju Tengah	4	*Unit*	25.625.000	DAU	6	25.000.000,00
3	32	01	2.10	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Mamuju Tengah	2	*Unit*	51.250.000	DAU	1	52.000.000,00

3	32	01	2.11	10		Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	Mamuju Tengah	16	*Unit*	35.875.000	DAU	2	36.000.000,00
											2.796.631.741		2.369.500.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kinerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelahkegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk

memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Berikut Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 :

RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
								NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**305.000.000,00**					
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**305.000.000,00**					
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Rencana Tenaga Kerja (%)**	**100**	**50.000.000,00**					
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja tersusun (Dokumen)	1	50.000.000,00	(seluruh Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)				
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	50.000.000,00	(Seluruh Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)				

			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	50.000.000,00	(Seluruh Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Kecamatan
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**120.000.000,00**					
			Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	**30**						**Seluruh Kecamatan**
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			120.000.000,00				Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	100		(Kecamatan Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)				
			Persentase Lulusan pelatihan yang memenuhi kompetensi kewirausahaan, teknologi dan manajemen usaha (%)	100		(Seluruh Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)				
			Persentase Lulusan pelatihan yang mengembangkan usaha mikro secara mandiri (%)	100		(semua Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)				
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			120.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	40		(Tobadak, Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)				
			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Orang)	30	120.000.000,00	(Kecamatan Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Usaha

3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**100.000.000,00**					
			Persentase Pencari kerja yang ditempatkan (%)	**45**						**Kelompok Usaha**
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00				Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	
			Jumlah jenis kegiatan pelayanan yang dilakukan (Dokumen)	1		(seluruh Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)				
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja			100.000.000,00				Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	40.00		(Kec. Topoyo, Kec. Tobadak, Kec. Karossa, Kec. Budong-Budong, KAB. MAMUJU TENGAH)				
			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar kerja (Orang)	40	100.000.000,00	(seluruh kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			pencari kerja
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**35.000.000,00**					
			Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yang terselesaikan (%)	**100**						**pencari kerja**
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000,00					

			persentase pembinaan ke perusahaan (%)	100		(seluruh kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)				
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000,00					
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	5		(semua Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)				
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Perkara)	5	35.000.000,00	(seluruh Kecamatan, KAB. MAMUJU TENGAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perusahaan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**2.584.131.637,00**					
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**2.584.131.637,00**					
1.	**3.32.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.055.631.637,00**					
			Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	**100**						**Perusahaan**
	3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			69.046.918,00					
			Persentase Penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi (%)	100		(Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Tobadak)				
	3.32.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			18.291.330,00					

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		(Disnakertrans, Tobadak)				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	18.291.330,00	(Distransnaker, Tobadak, Kec. Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Disnakertrans
	3.32.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			30.713.940,00					Disnakertrans
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.00		(Disnakertrans, Tobadak)				Disnakertrans
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	30.713.940,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.899.705,00					Distransnaker
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		(Disnakertrans, Tobadak)				Distransnaker
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.899.705,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.800.000,00					Distransnaker
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		(Disnakertrans, Tobadak)				Distransnaker
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2.800.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.800.207,00					Distransnaker

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		(Disnakertrans, Tobadak)				Distransnaker
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	2.800.207,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.241.736,00					Distransnaker
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		(Disnakertrans, Tobadak)				Distransnaker
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	2	6.241.736,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.300.000,00					Distransnaker
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		(Disnakertrans, Tobadak)				Distransnaker
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	1	5.300.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.372.073.070,00					
			Persentase Administrasi Keuangan Distransnaker tepat waktu (%)	100		(Distransnaker, Tobadak)				
	3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.313.943.070,00					

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14.00		(Disnakertrans, Tobadak)				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	14	1.313.943.070,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN
	3.32.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			30.750.000,00					ASN
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.00		(Distransnaker, Tobadak)				ASN
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	30.750.000,00	(Distransmigrasi, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			20.500.000,00					Distransnaker
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		(Distransnaker, Tobadak)				Distransnaker
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	20.500.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			6.880.000,00					Distransnaker
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.00		(Distransnaker, Tobadak)				Distransnaker
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	6.880.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker

	3.32.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			79.575.000,00					
			Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100		(Distransnaker, Tobadak)				
	3.32.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			31.200.000,00					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		(Distransnaker, Tobadak)				
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4	31.200.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			15.375.000,00					Distransnaker
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.00		(Distransnaker, Tobadak)				Distransnaker
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	15.375.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			33.000.000,00					Distransnaker
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		(Distransnaker, Tobadak, Kec. Tobadak)				Distransnaker
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	33.000.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			78.000.000,00					
			Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100		(Distransnaker, Tobadak)				

	3.32.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			45.000.000,00					
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		(Distransnaker, Tobadak)				
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)	2	45.000.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN
	3.32.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			33.000.000,00					ASN
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2		(Distransnaker, Tobadak)				ASN
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	33.000.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN
	3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			94.239.612,00					
			Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100		(Distransnaker, Mahahe, Kec. Tobadak)				
	3.32.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		(Distransnaker, Tobadak)				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	12	10.000.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			16.000.000,00					Distransnaker

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		(Distransnaker, Tobadak)				Distransnaker
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	8	16.000.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.000.000,00					Distransnaker
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4000		(Distransnaker, Tobadak)				Distransnaker
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)	4.000	2.000.000,00	(Distransnaker, KAB. MAMUJU TENGAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			51.239.612,00					Distransnaker
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12.00		(Distransnaker, Tobadak)				Distransnaker
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	51.239.612,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15.000.000,00					Distransnaker
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		(Distransnaker, Tobadak)				Distransnaker
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	15.000.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			184.000.000,00					
			Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi (%)	100		(Distransnaker, Tobadak)				

	3.32.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			150.000.000,00					
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		(Distransnaker, Tobadak)				
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	3	150.000.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			34.000.000,00					Distransnaker
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.00		(Distransnaker, Tobadak)				Distransnaker
			Pengadaan Mebel (Unit)	6	34.000.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.972.037,00					
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan (%)	100		(Distransnaker, Tobadak)				
	3.32.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.134.861,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		(Distransnaker, Tobadak)				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	15.134.861,00	(distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			27.837.176,00					Distransnaker
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		(Distransnaker, Tobadak)				Distransnaker

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	12	27.837.176,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			135.725.000,00					
			Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)	100		(Distransnaker, Tobadak)				
	3.32.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			7.600.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		(Distransnaker, Tobadak)				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	16	7.600.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			15.375.000,00					Distransnaker
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17		(Distransnaker, Tobadak)				Distransnaker
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	17	15.375.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.625.000,00					Distransnaker
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		(Distransnaker, Tobadak)				Distransnaker

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	4	25.625.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			51.250.000,00					Distransnaker
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		(Distransnaker, Tobadak)				Distransnaker
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	1	51.250.000,00	(Distransnaker, Tobadak, Kec. Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
	3.32.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			35.875.000,00					Distransnaker
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		(Distransnaker, Tobadak)				Distransnaker
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	8	35.875.000,00	(Distransnaker, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Distransnaker
2.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**118.500.000,00**					
			Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis (%)	**100**						**Distransnaker**
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			118.500.000,00					
			persentase perencanaan Transmigrasi (%)	100		(Saluandeang, Salulisu, Tobadak)				
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi			98.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		

			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	2.00		(Saluandeang, Salulisu, Tobadak)				
			Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	2	98.000.000,00	(Saluandeang, Salulisu, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kawasan Transmigrasn
	3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan			20.500.000,00					Kawasan Transmigrasn
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	2		(Saluandeang, Salulisu, Tobadak)				Kawasan Transmigrasn
			Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan (Kawasan)	2	20.500.000,00	(Saluandeang, Salulisu, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kawasan Transmigrasn
3.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis (%)**	**100**	**270.000.000,00**					**kawasan Transmigrasn**
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			270.000.000,00					
			jumlah kawasan transmigrasi (Kawasan)	2		(Saluandeang dan Salulisu, Tobadak)				
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	4		(Jawa Timur, DIY, DKI, Lampung, Luar Wilayah)				

			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	4	50.000.000,00	(pulau jawa, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			transmigran
	3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi			120.000.000,00					transmigran
			Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	12		(Salulisu, Tobadak)				transmigran
			Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi (KK)	12	120.000.000,00	(Salulisu, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Transmigran Penduduk Setempat
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi			50.000.000,00					Transmigran Penduduk Setempat
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	95		(Saluandeang, Salulisu, Tobadak)				Transmigran Penduduk Setempat
			Penyuluhan Transmigrasi (Kepala Keluarga)	95	50.000.000,00	(Saluandeang, Salulisu, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Transmigran
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi			50.000.000,00					Transmigran
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	95		(Tobadak, Tobadak)				Transmigran
			Pelatihan Transmigrasi (Kepala Keluarga)	50	50.000.000,00	(Tobadak, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			calon Transmigrasn
4.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**140.000.000,00**					

			Persentase Produktivitas Pertanain pada kawasan Transmigrasi (%)	**82**						**calon Transmigrasn**
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			140.000.000,00					
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan (Kawasan)	2		(Saluandeang, Salulisu, Tobadak)				
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			40.000.000,00					
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	120.00		(Saluandeang, Salulisu, Tobadak)				
			Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman (Kepala Keluarga)	40	40.000.000,00	(Saluandeang, Salulisu, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Transmigran
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			100.000.000,00					Transmigran
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	2		(UPT Saluandeang UPT Salulisu, Tobadak)				Transmigran
			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman (Satuan Permukiman (SP))	2	100.000.000,00	(Saluandeang, Salulisu, Tobadak)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Transmigran
	J U M L A H				**2.889.131.637,00**					

BAB V
PENUTUP

Dengan adanya Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Maka dengan ini diharapkan pelaksanakan pembangunan akan terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mencapai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) , Khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah .

Keberhasilan pencapain tujuan dan sasaran rencana strategis Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah tidak hanya tergantung pada Dinas yang terkait saja akan tetapi harus dikoordinasikan secara terpadu dengan instansi itu sendiri dan keikutsertaan masyarakat , mulai dari perencanaan , penyusunan program dan pelaksanaan.

Diharapkan Renja ini dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kita semua khusus Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah serta mampu mengoptimalkan upaya untuk pencapaian tujuan yang kita inginkan.

Tobadak, 27 Juli 2023

KEPALA DINAS



MUHAMMADIA, SE

Pangkat : Pembina, Tk.I IV/b

Nip. 19661125 198903 1 014

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 merupakan faktor yang penting dan mendasar agar mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berksesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebijakan, program dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannnya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, kami ucapkan terima kasih.

Topoyo, 31 Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

ZULKIFLI, SE

Nip. 19760217 201101 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-4

1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II-6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-9

2.4 Permasalahan pada urusan administrasi lingkupan hidup II-9

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-10

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-11

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-11

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III-12

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-14

BAB V PENUTUP V-25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 ..... II-6

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-8

Tabel 2.3 Permasalahan pada urusan administrasi lingkupan hidup II-9

Tabel 2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat II-10

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup III-12

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup IV-14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana pembangunan daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maksud dan tujuan dari pedoman ini adalah untuk memperjelas tahapan,langkah dan substansi penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten/kota dan provinsi.

Dengan demikian maka sangat jelaslah bahwa penyusunan Rencana Kerja atau Renja PD adalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Demikian pula dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah, untuk merealisasikan kepentingan dan kebutuhan

satu tahun kedepan maka Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun dan dibuat dengan memperhatikan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dibidang Lingkungan Hidup.

Maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas untuk pengendalian dan pemantauan kualitas lingkungan yang meliputi Udara, Air dan Tanah, menjaga keseimbangan lingkungan dengan dilaksanakannya penghijauan lingkungan, menjaga kualitas ekosistem hutan lindung dan daerah aliran sungan (DAS) sebagai sumber oksigen dan air. Dengan demikian sangatlah tepat jika sekiranya pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam memantapkan programnya dan memantapkan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup, mewujudkan program serta kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 4 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya

Pengelolaan Lingkugan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah adalah untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai pendukung pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka

mendukung tercapainya kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	**100%**	**100%**	**100%**
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten yang disusun	3	1	1
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Cakupan Wilayah Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**100%**	**44%**	**44%**
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang terlaksana	100%	100%	100%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang dikoordinasikan Pengendalian Limbahnya**	**100%**	**100%**	**60%**

Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang memiliki Penyimpanan Sementara Limbah B3	100%	100%	60%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten**	**95%**	**75%**	**75%**
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	100%	100%	100%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Cakupan keanekaragaman hayati yang dikelola**	**100%**	**100%**	**100%**
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	1	1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	100%	100%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kinerja pelayanan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Terget Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,71	74,71	75,00	75,29	75,59	75,88	76,17
2	Indeks Gas Rumah Kaca (GRK)	-	-	7641,34	7564,93	7489,28	7414,39	7340,24
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,75	58,75	58,85	58,95	59,05	59,15	59,25
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,05	86,05	86,16	86,26	86,36	86,46	86,56

5	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	81,11	81,11	82,09	83,07	84,05	85,03	86,01
6	Persentase Penurunan Emisi GRK	-	-	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %
7	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	70 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
8	Persentase Penanganan Timbulan Sampah	24 %	24 %	26 %	27 %	28 %	30 %	30 %
9	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	74 %	74 %	73 %	72 %	71 %	70 %	70 %
10	Persentase Cakupan Area Pelayanan Sampah	1,23 %	1,23 %	1,23 %	1,24 %	1,26 %	1,27 %	1,29 %
11	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Kawasan Perkotaan	0,00011 %	0,00011 %	0,00011 %	0,00011 %	0,00013 %	0,00016 %	0,00019 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. Pengelolaan Persampahan;
2. Penurunan Pencemaran Air, Udara dan Tanah;
3. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; dan
4. Penambahan Ruang Terbuka Hijau.

2.4 Permasalahan pada urusan administrasi lingkupan hidup meliputi:

a. Belum optimalnya pengelolaan sampah
b. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
c. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup, tertutama kualitas air
d. Tidak adanya permohonan penyimpanan semnetara LB3
e. Tidak adanya penambahan area cakupan pelayanan sampah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Program Pengelolaan Sampah	Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pelanggan Sampah	1000 unit	Pengadaan Tong Sampah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Amanat RPJP 2005-2025 untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari menetapkan fokus kegiatan pada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkannya perlu dilakukan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

1. Mendayagunakan dan mengelola sumberdaya alam terbarukan;
2. Menjaga dan melestarikan sumberdaya air dan energi;
3. Mengembangkan potensi kelautan;
4. Menjaga, mengelola dan meningkatkan nilai tambah sumberdaya khas dan kehati;
5. Mitigasi bencana;
6. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta
7. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Hal ini mengimplikasikan diharuskannya kelembagaan di bidang lingkungan hidup untuk menangani pengelolaan sumberdaya alam dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Selain itu, amanat Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan menetapkan target Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup untuk Mengoptimalkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran pokok:

a. Terlindunginya kualitas lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan flora/ fauna langka karena tekanan ekstensifikasi pertanian dan perkebunan, perkembangan pemukiman, eksploitasi pertambangan dan kerusakan hutan.

b. Meningkatnya kapasitas dan kinerja pelayanan dalam penanganan sampah dan limbah, bahan beracun dan berbahaya, pencemaran tanah, air dan udara serta kebersihan dan keindahan kota.

c. Berkembangnya kapasitas penanganan sumberdaya air dan Kawasan pesisir (rawa, sungai, waduk, irigasi, drainase, embung, lahan gambut, lahan pasang surut pesisir) dalam mencegah kejadian bencana yang bersumber dari alam.

d. Berkembangnya kapasitas penanganan bencana dalam pengelolaan Kawasan rawan banjir, Kawasan rawan longsir, Kawasan rawan banjir bandang, Kawasan rawan kebakaran lahan, Kawasan rawan gelombang besar dan tsunami, serta Kawasan rawan gempa bumi.

e. Berkembangnya kapasitas pengurangan emisi gas rumah kaca dan kemampuan adaptasi mitigasi terhadap perubahan iklim pada berbagai aspek kehidupan.

Berikut tabel tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,71	75,00	75,29	75,59	75,88	76,17
	Indeks Gas Rumah Kaca (GRK)	-	7641,34	7564,93	7489,28	7414,39	7340,24

	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah serta menurunnya emisi gas rumah kaca (S1)	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,75	58,85	58,95	59,05	59,15	59,25
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,05	86,16	86,26	86,36	86,46	86,56
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	81,11	82,09	83,07	84,05	85,03	86,01
		Persentase Penurunan Emisi GRK	-	1%	2%	3%	4%	5%
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan (S2)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	70%	75%	80%	85%	90%	95%
	Meningkatnya pengelolaan persampahan (S3)	Persentase penanganan timbulan sampah	24%	26%	27%	28%	30%	30%
		Persentase pengurangan timbulan sampah	74%	73%	72%	71%	70%	70%
		Persentase cakupan area pelayanan sampah	1,23%	1,23%	1,24%	1,26%	1,27%	1,29%
	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (S4)	Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Kawasan Perkotaan	0,00011%	0,00011%	0,00011%	0,00013%	0,00016%	0,00019%

Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Lingkungan Hidup (T2)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	C	C	CC	CC	B
Meningkatnya Dukungan dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah (S1)	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.791.500.000,00**							**7.244.600.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**5.791.500.000,00**							**7.244.600.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)***				***100***	**2.253.100.000,00**							**3.185.600.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)*				*100*	96.000.000,00	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*2.00*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*2.00*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*1*	*1*	*1.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah Mamuju Tengah*	*1.00*	7.000.000,00 *7.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*1*	*1*	*1.00*	2.000.000,00 *2.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1.00*	7.000.000,00 *7.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*1*	*1*	*1.00*	2.000.000,00 *2.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1.00*	7.000.000,00 *7.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.000.000,00							7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*	*5.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1.00*	*7.000.000,00*	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*4*	*4*	*4.00*	*50.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*4.00*	*80.000.000,00*	
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*2.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	*7.000.000,00*	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						955.000.000,00							973.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						810.000.000,00							810.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*10*	*10*	*10.00*	*810.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*10.00*	*810.000.000,00*	
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						100.000.000,00							130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*	*100.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1.00*	*130.000.000,00*	
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						4.000.000,00							9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*4.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	*9.000.000,00*	
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						6.000.000,00							12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1.00*	*6.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1.00*	*12.000.000,00*	
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						35.000.000,00							12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*18*	*18*	*18.00*	*35.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*18.00*	*12.000.000,00*	
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)*				*100*	40.000.000,00	*(Kantor DLH Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	256.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	65.000.000,00 *65.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	65.000.000,00 *65.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	76.000.000,00 *76.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)*				*100*	35.000.000,00	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	45.000.000,00 *45.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kantor DLH Desa Topoyo*	*1*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150.000.000,00							317.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)				*100*		*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						20.000.000,00							20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*10*	*20.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*10*	*20.000.000,00*	
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						10.000.000,00							50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*10.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	*50.000.000,00*	
	2.11.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						30.000.000,00							50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*30.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah*	*1*	*50.000.000,00*	
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						10.000.000,00							67.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*10.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	*67.000.000,00*	
	2.11.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun						10.000.000,00							10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3*	*10.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	*10.000.000,00*	
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00							20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10*	*30.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*10*	*20.000.000,00*	
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						10.000.000,00							50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10*	*10.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*10*	*50.000.000,00*	
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						30.000.000,00							50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5*	*30.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*5*	*50.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						110.000.000,00							348.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)				*100*		*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00							3.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*4*	*5*	*5.00*	*1.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*5.00*	*3.500.000,00*	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*0.00*	*10.00*	*10.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*10.00*	*150.000.000,00*	
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.000.000,00							4.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10.00*	*4.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*10.00*	*4.500.000,00*	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.000.000,00							9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*2*	*2*	*2.00*	*8.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*2.00*	*9.000.000,00*	
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.000.000,00							7.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*	*7.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*12.00*	*7.500.000,00*	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						55.000.000,00							50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*10*	*10.00*	*55.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*10.00*	*50.000.000,00*	
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*5.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	*65.000.000,00*	
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						20.000.000,00							59.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*20.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	*59.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00							225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)				*100*		*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						25.000.000,00							25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*	*25.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*5*	*25.000.000,00*	
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						125.000.000,00							200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1*	*1*	*1.00*	*125.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1.00*	*200.000.000,00*	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56.100.000,00							71.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)				*100*		*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000,00							3.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*3.500.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	*3.500.000,00*	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.000.000,00							40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*	*25.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*12.00*	*40.000.000,00*	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						27.600.000,00							27.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*	*27.600.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*12.00*	*27.600.000,00*	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						661.000.000,00							770.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)				*100*		*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.000.000,00							90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*12*	*12*	*12.00*	*60.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*14.00*	*90.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000.000,00							500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*11*	*11*	*11.00*	*500.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*11.00*	*500.000.000,00*	
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						80.000.000,00							150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)		*2*	*2*	*2.00*	*80.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*2.00*	*150.000.000,00*	
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.000.000,00							7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*	*2.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*5*	*7.000.000,00*	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.000.000,00							10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*	*7.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*1*	*10.000.000,00*	
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.000.000,00							13.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*18*	*18*	*18.00*	*12.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup*	*18.00*	*13.000.000,00*	
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**650.000.000,00**					**Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif**		**400.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
			Persentase dokumen perencanaan lingkungan hdiup yang tersedia (%)				***41***									
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						300.000.000,00					Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten yang disusun dan diimplementasikan (Dokumen)				*1*		*(Kantor DLH DesaTopoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokuman)*		*0.00*	*0.00*	*1*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif	*Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah*	*0.00*	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten yang disusun (Dokumen)*				*1*	350.000.000,00	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*			Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif		*1*	400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	*Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)*		*1*	*1*	*1.00*	*350.000.000,00*	*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif	*Masyarakat dan OPD Kabupaten Mamuju Tengah*	*1.00*	*400.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Cakupan wilayah pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan (%)***				***100***	**195.000.000,00**				**Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif**			**605.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang terlaksana (%)*				*100*	120.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*			Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif		*100*	495.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						90.000.000,00				Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*	*90.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Titik Pantau di Kabupaten Mamuju Tengah*	*1.00*	*350.000.000,00*	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						30.000.000,00							145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.01*	*1*	*1*	*30.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Mamuju Tengah*	*1*	*145.000.000,00*	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						40.000.000,00							75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase Jumlah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang ditangani (%)				*100*		*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						20.000.000,00							35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*20.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1*	*35.000.000,00*	
	2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						20.000.000,00							40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)		*0.00*	*0.00*	*1*	*20.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat/Kelompok usaha/kegiatan*	*1*	*40.000.000,00*	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						35.000.000,00							35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase Jumlah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang dipulihkan (%)				*100*		*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran						35.000.000,00							35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*35.000.000,00*	*(MamujuTengah, Provinsi, Kementerian, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kantor DLH Mamuju Tengah*	*1*	*35.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Cakupan keanekaragaman hayati yang dikelola (%)***				***100***	**280.000.000,00**							**120.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah lokasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Lokasi)*				*1*	280.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*1*	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)*		*0.16*	*0.16*	*0.20*	280.000.000,00 *280.000.000,00*	*(Desa Topoyo dan Desa Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif	*Taman di Desa Waeputeh dan Desa Tobadak*	*0.25*	120.000.000,00 *120.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Persentase Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang dikoordinasikan Pengendalian Limbahnya (%)***				***100***	**55.000.000,00**							**112.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Persentase Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang memiliki Penyimpanan Sementara Limbah B3 (%)*				*100*	55.000.000,00	*(Kantor DLH Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	112.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)*		*3*	*6*	*7.00*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemilik Usaha/Kegiatan di Kabupaten Mamuju Tengah*	*8.00*	64.000.000,00 *64.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)*		*3*	*6*	*7.00*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemilik usaha/kegiatan di mamuju tengah*	*8.00*	48.000.000,00 *48.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten (%)***				***85***	**110.000.000,00**							**210.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Daerah kabupaten (%)*				*100*	110.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)*		*12*	*24*	*6*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Mamuju Tengah, Perangkat Daerah, Provinsi dan Kementerian*	*6*	95.000.000,00 *95.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)*		*12*	*24*	*10*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemilik usaha / kegiatan di Kabupaten Mamuju Tengah*	*10*	45.000.000,00 *45.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	*Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pejabat Kantor Dinas Lingkungan Hidup*	*2*	70.000.000,00 *70.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (Orang)***				***100***	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten yang dilaksanakan (%)*				*100*	50.000.000,00	*(Kantor Dinas Lingkungan Hidup Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	*(Mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat dan Pejabat di Kantor DLH Mamuju Tengah, Masyarakat/Lembaga Mamuju Tengah*	*1*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*50*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Mamuju Tengah*	*50*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)*		*0.00*	*0.00*	*50*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Mamuju Tengah*	*50*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Jumlah Jenis Pemberian Penghargaan Lingkungan hidup untuk masyarakat (Entitas)***				***1***	**10.000.000,00**							**80.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang di berikan (Entitas)*				*1*	10.000.000,00	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*1*	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)*		*0.00*	*0.00*	*2*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Masyarakat Mamuju Tengah*	*2*	80.000.000,00 *80.000.000,00*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**50.000.000,00**							**76.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
			Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang tertangani (%)				***100***									
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						50.000.000,00							76.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten yang diselesaikan (%)				*100*		*(Kantor DLH Desa Topoyo, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*100*		
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						20.000.000,00							31.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*20.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Mamuju Tengah*	*12*	*31.000.000,00*	
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						30.000.000,00							45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)		*0.00*	*0.00*	*7.00*	*30.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Mamuju Tengah*	*8*	*45.000.000,00*	
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**2.138.400.000,00**				**Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif**			**2.306.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
			Persentase sampah yang dikelola (%)				***75***									
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						2.138.400.000,00				Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif			2.306.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Pelanggan Sampah (Orang)				*1.000*	*2.138.400.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*					*1.050*		
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						10.000.000,00							70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*10.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Mamuju Tengah*	*1*	*70.000.000,00*	
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						10.000.000,00							40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*10.000.000,00*	*(kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, OPD , Provinsi dan Kementrian*	*1*	*40.000.000,00*	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						100.000.000,00							250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*100.000.000,00*	*(Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Mamuju Tengah*	*5*	*250.000.000,00*	
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah						30.000.000,00							40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)		*0*	*1*	*1.00*	*30.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Mamuju Tengah*	*1.00*	*40.000.000,00*	
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						1.988.400.000,00				Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif			1.906.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)		*4127*	*610*	*620.00*	*1.988.400.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Desa Tabolang, Masyarakat Mamuju Tengah*	*630.00*	*1.906.000.000,00*	
	J U M L A H							**5.791.500.000,00**							7.244.600.000,00	

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana KerjaSKPD Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 untuk dilaksanakan pada tataran implementasi. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja PD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama. Mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mamuju Tengah.

Hasil kinerja Renja PD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja PD tahun berikutnya sehingga kinerja SKPD dapat terukur dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan rencana kerja ini akan di prioritaskan untuk dapat menjalankan program dan kegiatan yang dapat mendukung pemerintahan.

RENCANA KERJA (RENJA)
BPKPAD

KAB. MAMUJU TENGAH

TAHUN 2024



BPKPAD KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Jl. Tammauni Pue Ballung Kompleks Kantor Bupati Mamuju Tengah,
Tobadak, Mamuju Tengah 91564

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wata'ala karena atas karunia dan RahmatNyalah, sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 bisa diselesaikan tepat waktu.

Rancangan Awal ini kami susun dalam bentuk dokumen, dimana penyusunannya merujuk pada Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dan menyelaraskannya dengan Visi Kabupaten Mamuju Tengah yaitu "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara*".

Rancangan Awal Rencana Kerja BPKPAD merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan di BPKPAD Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja termasuk BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah dalam pencapaian sasaran dan program Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja BPKPAD ini masih jauh dari sempurna, maka dalam proses perumusan dan penyusunannya menjadi dokumen Rencana Kerja akan melibatkan setiap unit kerja atau bidang yang ada di Lingkungan BPKPAD dan seluruh stake holder terkait.

Oleh karenanya, kami mengharapkan semua pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan, baik berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka penyelesaian dokumen Rencana Kerja.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini, besar harapan kami untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam

pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan BPKPAD sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... iii

Daftar Tabel iv

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG..... 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BPKPAD TAHUN 2022 7

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKPAD 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan 19

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra PD Tahun 2023 22

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BPKPAD 35

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional 35

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 36

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38

BAB V : PENUTUP..... 47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 8

Tabel 2.2. Penetapan Indikator Kinerja..... 18

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 22

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 36

Tabel 4.1. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2024 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya yang dikelola oleh BPKPAD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang mana disusun untuk mendukung secara langsung maupun tidak langsung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sejalan dengan arahan RPJPD serta Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 yaitu “*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla’ Tassisara*” diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Mamuju

Tengah secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki untuk meningkatkan dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia sesuai dengan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan yaitu :

1. Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar;
3. Mendorong daya saing perekonomian daerah;
4. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik;
5. Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat;
6. Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan di kantor BPKPAD yang telah ditetapkan sebagai prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun Renja adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2023;
15. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-2023 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawsi Barat Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
20. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rencana Kerja ini bagi BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah.

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja BPKPAD Tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan l Renja BPKPAD Tahun 2024 adalah sebagai:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2024;
2. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Mamuju Tengah;

4. Sebagai Upaya mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKPAD Mamuju Tengah;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Renja BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, meliputi :

I. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

II. BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN

2.1. Evaluasi Kerja Pelaksanaan Rencana Kerja BPKPAD Tahun 2022;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKPAD;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi BPKPAD Kab. Mamuju Tengah;

2.4. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. BAB III TUJUAN, DAN SASARAN BADAN KEUANGAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan BPKPAD Tahun 2024

IV. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BPKPAD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2022 dan Capaian Renstra BPKPAD

Rencana Kerja BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah adalah penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis BPKPAD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah selama Tahun 2022.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BADAN KEUANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
BPKPAD									
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	3	2	2	100	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10	3	2	2	100	2	2	100
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	225	45	45	45	100	45	45	100
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanRKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	225	45	45	45	100	45	45	100
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	225	45	45	45	100	45	45	100
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanDPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	225	45	45	45	100	45	45	100
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	3	2	2	100	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	2	2	100	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	20	100	4	4	100	4	4	100
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5	-	-	-		-	-	

	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5	-	-	-		-	-	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5	-	-	-		-	-	
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan penetausahaan keuangan	750	-	100	100	100	-	-	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60	12	12	12	100	2	2	100
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5	1	1	1	100	-	-	100
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60	12	12	12	100	12	12	100
	Penatausahaan Pembiayan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayan Daerah	4	-				-	-	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5	1	1	1	100	1	1	100
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Juamlah dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	175	-	-	-		-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5	-	-	-		1	1	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5	-	-	-		-	-	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	225	100	1	1	100	45	43	100

		Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4	-	-	-		-		
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45	-	45	45	100	45	45	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	99	-	-	-		-	-	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	4	-	-	-		-	-	
	Konsolidasi Penyusunan Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	12	-	3	3	100	3	3	100
	Konsilidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	225	45	45	45	100	45	45	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	2	2	2	100	2	2	100
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	-	-	-		-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	-	-	-		1	1	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	-	-	-		-	-	

	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4	-	-	-		-	-	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	4	-	-	-		-	-	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45	-	-	-		-	-	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	1	-	-	-		-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	4	-	-	-		-	-	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Produk Hukum yang didokumentasikan dan di Publikasikan								
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	-	-	-		5	5	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3	-	-	-		1	1	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah									
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	45	-	-	-		45	45	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	20	4	4	4	100	4	4	100
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150	-	-	-		150	150	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah										
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4	-	1	1	100	1	1	100
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	1	1	1	100	1	1	100
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	40	-	1	1	100	-	-	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5	1	1	1	100	1	1	100
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	40	40	40	40	100	40	40	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	175	30	40	40	100	40	40	100

	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	50	-	10	10	100	10	10	100
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	60	60	60	45	100	60	60	100
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	-	4	4	100	4	4	100
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4	-	4	4	100	4	4	100
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	-	50	50	100	50	50	100
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah										
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	-	1	1	100	1	1	100
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasl Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3	-	-			-	-	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10	10	10	10	100	10	10	100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20	20	20	20	100	20	20	100
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5	-	-			-	-	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan yang disusun	1	-	1	1	100	1	1	100
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang dinilai	5	5	5	5	100	70.000	70.000	100
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100	-	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100	-	100	100	100	100	100	100

	Penilitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	-	-	-		1	1	
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60	12	12	12	100	12	12	100
	Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	1	-	-	-		-	-	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	367.443	-	-	-		75.000	75.000	
	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah	jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	1	1	1	1	100	1	1	100
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perekembangan Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	5	-	-	-		-	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-PD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-PD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0	4	4	100	4	4	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100			100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	25	25	25	100	100	100	100

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	-	-	-		-	-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	-	-	-		-	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	-	-	-		-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	-	-		-	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	-	-	-		-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	1	5	1	1	100	5	5	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15	-	15	15	100	-	-	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15	-	-	-		-	-	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3	-	3	3	100	-	-	100
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15	-	-	-		15	15	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	-	3	3	100	3	3	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	-	-		-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	25	25	25	100	-	-	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50	-			100	-	-	100

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	25	25	25	100	1	1	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50	20	50	50	100	50	50	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	50	20	50	50	100	50	50	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	5	5	100	5	5	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	-	-	-		-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	-	-	-		50	50	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20	20	20	100	20	20	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	-	-	-		-	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	4	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	50	50	50	100	50	50	100
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	-	-	-		-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	-	200	200	100	200	200	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	-	-	-		-	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	2	-	-	-		2	2	
	Pengadaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	2	2	1	100	2	2	100

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	-	5	5	100	5	5	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	10	10	10	100	10	10	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	20	20	20	100	20	20	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	100	-	-	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	20	20	20	100	1	1	100
	Pemeliharaan Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	20	12	12	100	12	12	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	-	12	12	100	12	12	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	-			100	1	1	100

Sumber : BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dengan cara mengkaji indkator kinerja yang akan dicapai oleh instansi. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan *(input),* keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, manfaat *(benefit)* dan dampak *(impact)*. Sesuai analisis yang telah dilakukan, BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah memiliki sasaran yakni terwujudnya pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah yang akuntabel dan transparan.

Penetapan indikator kinerja tersebut diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan seperti pada tabel 2.2 berikut.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPKPAD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO.	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	Nilai Absolut dari Total Belanja dalam APBD dibagi Total Belanja APBD x 100%	100%	100%	100%	100%	94%	93%	100	100	
2	Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen yang di Publikasikan di Website Pemda dibagi Jumlah Dokumen yang telah dirinci x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Indeks Penyerapan anggaran	Nilai Realisasi Belanja di bagi Total Belanja Anggaran Tahun berkenaan x 100%	100%	100%	100%	100%	94%	93%	92%	95%	
4	Indeks Kondisi keuangan	Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Belanja	100%	100%	100%	100%	4,94%	5,09%	5,5%	5,9%	
5	Indeks Perangkat Daerah taat Pengelolaan BMD	Jumlah BMD terkelola dengan baik dibagi Jumlah BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPAD

a. Tingkat kinerja pelayanan guna mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan maka tidak lepas dari faktor pendanaan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun pembangunan di bidang keuangan daerah, sumber-sumber dana yang dipergunakan adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penerimaan keuangan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah. Dari aspek keuangan, pelaksanaan kegiatan di BPKPAD selaku PPKD terbagi dalam bagian pendapatan, bagian belanja dan pembiayaan.

Bagian pendapatan meliputi sebagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Bagian belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Bagian Pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPAD :

1) Kurangnya SDM dan sarana prasarana perkantoran mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan di BPKPAD;
2) Belum tersedianya database pajak yang valid dan banyaknya objek pajak seperti warung, minerba yang belim memiliki izin usaha ;
3) Terjadinya perubahan sistem pelayanan baik secara Peraturan Perundang-undangan maupun sistem pelayanan pembayaran digital dan tuntutan pelayanan lainnya kepada masyarakat serta banyaknya evaluasi kinerja pengelolaan PAD;
4) Perubahan kebijakan yang dinamis.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah (RPJMD) Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-

2026 yaitu "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara*". Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD tahun 2017-2022 serta penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang urusan keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas BPKPAD terkait erat dengan pencapaian misi ke 4, yaitu "Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik".

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021 - 2026 dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Tantangan :

1) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
2) Kurangnya jumlah SDM pengelola keuangan pendapatan dan aset daerah yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di BPKPAD.
3) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat;

Peluang :

1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah.
2) Hubungan kerja dengan instansi terkait telah terjalin dengan baik.

3) Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
4) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun legeslatif.

e. Formulasi Isu-isu penting dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah :

1) Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah;
2) Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah;

2.4. Review terhadap RKPD Tahun Anggaran 2023.

BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah termasuk dalam salah satu pelaksana peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi yang memfungsikan diri sebagai perumus kebijakan penataan dan evaluasi kelembagaan serta fasilitasi penyusunan standarisasi ketatalaksanaan khususnya pelayanan publik berkewajiban mendukung terwujudnya pelayanan prima pada seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada dilaksanakan penyesuaian RKPD Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

REVIEW TERHADAP RKPD (BPKPAD) TAHUN 2024
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No	Ranwal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEUANGAN					**122.114.431.931**						
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		**Rasio PAD terhadap total APBD**	**100**	**106.518.231.931**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Rasio PAD terhadap total APBD**	**100**	**103.623.808.984**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		**Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100**	**2.431.431.447**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100**	**Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100**	**1.799.500.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tobadak	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tobadak	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	55.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	55.400.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tobadak	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	75.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tobadak	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	74.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanRKA-SKPD	Tobadak	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	75.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanRKA-SKPD	Tobadak	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	72.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	70.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	48.600.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanDPA-SKPD	Tobadak	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	45 Dokumen	65.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanDPA-SKPD	Tobadak	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	45 Dokumen	57.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tobadak	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	900.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tobadak	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	848.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tobadak	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	386.431.447	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tobadak	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	419.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tobadak	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	480.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tobadak	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	170.000.000	

			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	20.000.000			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	0	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	20.000.000			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	0	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	20.000.000			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	0	
			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab	Tobadak	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan penetausahaan keuangan	150 Orang	200.000.000			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab	Tobadak	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan penetausahaan keuangan	150 Orang	0	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		**Tobadak**	**Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100**	**1.597.308.984**			**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Tobadak**	**Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100**	**882.308.984**	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	445.578.000			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	380.578.000	
			Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	30.000.000			Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	10.000.000	
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	41.960.984			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	41.960.984	
			Penatausahaan Pembiayan Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayan Daerah	1 Dokumen	20.000.000			Penatausahaan Pembiayan Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayan Daerah	1 Dokumen	10.000.000	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	175.870.000			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	95.870.000	
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tobadak	Juamlah dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	47.000.000			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tobadak	Juamlah dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	20.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi	Tobadak	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan	4 Laporan	155.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi	Tobadak	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan	4 Laporan	137.000.000	

			Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	20.000.000			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	0	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	45 Dokumen	77.900.000			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	45 Dokumen	36.900.000	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tobadak	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Laporan	234.000.000			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tobadak	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Laporan	50.000.000	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Orang	350.000.000			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Orang	100.000.000	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100**	**2.374.491.500**			**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100**	**844.000.000**	
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	2 Laporan	171.600.500			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	2 Laporan	50.000.000	

					dan Pengeluaran Kas Daerah								dan Pengeluaran Kas Daerah		
			Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	4 Dokumen	110.250.500			Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	4 Dokumen	60.000.000	
			Konsolidasi Penyusunan Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Tobadak	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	122.750.000			Konsolidasi Penyusunan Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Tobadak	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	40.000.000	
			Konsilidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	225.890.500			Konsilidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	75.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Laporan	550.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Laporan	290.000.000	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	225.890.500			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		0	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	550.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		0	

			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tobadak	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	20.000.000			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tobadak	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	10.000.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	188.500.000			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	118.500.000	
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tobadak	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	20.000.000			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tobadak	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	10.000.000	
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20.000.000			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20.000.000			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	15.000.000	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Oang	350.000.000			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Oang	120.000.000	
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	50 Orang	350.000.000			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	50 Orang	30.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	225.500.000			Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	25.500.000	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			**Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100**	**99.650.000**			**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100**	**99.650.000**	
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	50 Laporan	90.150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	50 Laporan	90.150.000.000	

			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	9.500.000.000			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	9.500.000.000	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		**Tobadak**	**Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**100**	**465.000.000**			**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Tobadak**	**Persentase Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**100**	**148.000.000**	
			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	150.000.000			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	148.000.000	
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	190.000.000			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	181.500.000	
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah orang yang mengikuti Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	125.000.000			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah orang yang mengikuti Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	118.500.000	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				**Tobadak**	**Persentase Nilai Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD**	**100**	**1.017.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**Tobadak**	Persentase Nilai Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD	**100**	**859.100.000**	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		**Tobadak**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**1.017.000.000**			**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Tobadak**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**859.100.000**	
			Penyusunan Standar Harga	Tobadak	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	70.000.000			Penyusunan Standar Harga	Tobadak	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	52.000.000	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Laporan	30.000.000			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Laporan	18.000.000	
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 Dokumen	20.000.000			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 Dokumen	20.000.000	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	78.500.000			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	71.000.000	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	135.000.000			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	100.000.000	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	120.000.000			Pengamanan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	98.000.000	

			Penilaian Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	70.000.000			Penilaian Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	57000.000	
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	60 Laporan	65.000.000			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	60 Laporan	51.100.000	
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan	115.000.000			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan	93.200.000	
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	16.000.000			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	12.000.000	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	232.000.000			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	226.500.000	
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	65.500.000			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	60.500.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				**Persentase Nilai Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD**	**100**	**1.963.000.000**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Tobadak**	**Persentase Nilai Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD**		**1**	
		Pengelolaan pendapatan Daerah				**100**	**1.963.000.000**			Pengelolaan pendapatan Daerah					
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	270.000.000			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	270.000.000	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasl Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	200.000.000			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasl Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	200.000.000	

			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	270.000.000			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	270.000.000	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	90.000.000			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	90.000.000	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	10 Laporan	49.500.000			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	10 Laporan	49.500.000	
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah laporan yang disusun	4 Laporan	35.000.000			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah laporan yang disusun	4 Laporan	35.000.000	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tobadak	Jumlah Objek Pajak yang dinilai	80.000 Objek	350.000.000			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tobadak	Jumlah Objek Pajak yang dinilai	80.000 Objek	350.000.000	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	300 Dokumen	41.077.400			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	300 Dokumen	41.077.400	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	35.000.000			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	35.000.000	
			Penilitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen	30.500.000			Penilitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen	30.500.000	
			Penagihan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Dokumen	232.422.600			Penagihan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Dokumen	232.422.600	
			Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	50 Dokumen	50.000.000			Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	50 Dokumen	50.000.000	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	250.000.000			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	250.000.000	
			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Tobadak	jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	12 Laporan	39.500.000			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Tobadak	jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	12 Laporan	39.500.000	
			Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Perekembangan Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	12 Lapoan	20.000.000			Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Perekembangan Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	12 Lapoan	20.000.000	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tobadak**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100**	**12.616.200.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tobadak**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100**	**9.256.550.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tobadak**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu**	**100**	**182.950.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tobadak**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu**	**100**	**139.050.000**	
	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	37.550.000	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	37.550.000	
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-PD	Tobadak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan RKA-PD	Tobadak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	14.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-PD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16.500.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-PD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.200.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7 Dokumen	14.500.000	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7 Dokumen	12.600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	46.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	25.900.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	36.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tobadak**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	100	**9.560.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	100	**7.345.000.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tobadak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	9.200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tobadak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	7.300.000.000	

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	50.000.000								
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	50.000.000								
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50.000.000								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	50.000.000								
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tobadak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	50.000.000								
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	1 Dokumen	60.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	1 Dokumen	45.000.000	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tobadak	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	50.000.000								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Tobadak**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100**	**194.000.000**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Tobadak**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100**	**48.700.000**	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tobadak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	120.000.000			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tobadak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.800.000	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	8.000.000								
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	8.000.000								
			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.700.000	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Tobadak	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1 Laporan	7.500.000			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Tobadak	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1 Laporan	7.500.000	

			Barang Milik Daerah pada SKPD		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Barang Milik Daerah pada SKPD		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.700.000			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.700.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Tobadak**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100**	**513.750.000**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tobadak**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100**	**313.800.000**	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tobadak	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	25.000.000			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tobadak	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	10.000.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tobadak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket	60.000.000			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tobadak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket	60.000.000	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobadak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	43.800.000			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobadak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Paket	43.800.000	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tobadak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	2 Dokumen	100.000.000			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tobadak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	2 Dokumen	100.000.000	
			Monitoring, Evluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tobadak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	30.000.000			Monitoring, Evluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tobadak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	30.000.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tobadak	Jumlah pegawai berdasarkan	3 Orang	95.000.000			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tobadak	Jumlah pegawai berdasarkan	3 Orang	40.000.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundangundangan	Tobadak	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangan	50 orang	30.000.000								
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tobadak	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	45.000.000			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tobadak	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	30.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Tobadak**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100**	**994.500.000**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tobadak**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100**	**799.000.000**	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tobadak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Unit	25.000.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tobadak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Unit	427.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tobadak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96 Paket	60.000.000			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tobadak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96 Paket	11.500.000	

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tobadak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Dokumen	45.200.000									
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tobadak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen	135,000,000									
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tobadak	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	78.550.000			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tobadak	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	35.500.000	
			Penyediaan Bahan/ Material	Tobadak	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Orang	95.000.000			Penyediaan Bahan/ Material	Tobadak	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Orang	95.000.000	
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tobadak	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50	10.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tobadak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Orang	30.000.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tobadak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Orang	10.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Orang	45.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Orang	300.000.000	
										Dukungan Pelaksanaan Sistm Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tobadak	Jumlah dokumn Dukungan Pelaksanaan Sistm Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Tobadak**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**625.000.000**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tobadak**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**101.000.000**	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tobadak	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tobadak	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	25.000.000	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tobadak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	300.000.000			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tobadak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	20.000.000	
			Pengadaan Mebel	Tobadak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Paket	22.000.000			Pengadaan Mebel	Tobadak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Paket	20.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobadak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	73.000.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobadak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	36.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tobadak**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100**	**195.000.000**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tobadak**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100**	**190.000.000**	

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tobadak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	195.000.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobadak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	190.000.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tobadak**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100**	**351.000.000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tobadak**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100**	**320.000.000**	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tobadak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	135.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tobadak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	125.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobadak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	66.000.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobadak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	50.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tobadak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tobadak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	145.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BPKPAD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Pembangunan wilayah Sulawesi akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Isu-isu nasional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah lima tahun kedepan terutama bersumber dari RPJMN 2020-2024 yang dapat diidentifikasi berdasarkan agenda pembangunan nasional yang termuat di dalamnya yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung proses pembangunan daerah melalui dukungan Terhadap Visi dan Misi Bupati Mamuju Tengah 2021-2026, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi Bupati Terpilih.

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kab. Mamuju Tengah. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara* dan mendukung misi yang pertama *"*Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar*".*

3.2. Tujuan dan sasaran Renja BPKPAD

3.2.1 Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra BPKPAD dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 900.1.15.5.2023 tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja BPKPAD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka

tujuan Renja BADAN KEUANGAN tahun 2023 adalah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel dan tranparan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran Renja BPKPAD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya pengelolaan keuangan, asset dan pendapatan daerah yang akuntabel dan transparan;
b. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada BPKPAD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKPAD

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah, direncanakan akan dilaksanakan Program dan Kegiatan dengan total alokasi dana Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 115.387.458.984 (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
BPKPAD Kabupaten Mamuju tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KEUANGAN				**115.387.458.984**				**115.696.368.047**
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Rasio PAD terhadap total APBD**	**Tobadak**	**100**	**103.623.808.984**	**DAU**		**100**	**100.206.618.047**
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Persentase penyusunan rencana anggaran daerah**	**Tobadak**	**100**	**1.799.500.000**	**DAU**		**1000**	**2.171.431.447**
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Tobadak	2 Dokumen	55.500.000	DAU		2 Dokumen	60.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Tobadak	2 Dokumen	55.400.000	DAU		2 Dokumen	60.000.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Tobadak	45 Dokumen	74.000.000	DAU		45 Dokumen	75.000.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanRKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Tobadak	45 Dokumen	72.000.000	DAU		45 Dokumen	75.000.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Tobadak	45 Dokumen	48.600.000	DAU		45 Dokumen	70.000.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanDPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	Tobadak	45 Dokumen	57.000.000	DAU		45 Dokumen	65.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tobadak	2 Dokumen	848.000.000	DAU		2 Dokumen	900.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tobadak	2 Dokumen	419.000.000	DAU		2 Dokumen	386.431.447
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tobadak	4 Dokumen	170.000.000	DAU		4 Dokumen	480.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase Pengelolaan Perbendaharaan DAerah**	**Tobadak**	**100**	**882.308.984**			**100**	**1.481.000.000**
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tobadak	12 Dokumen	380.578.000	DAU		12 Dokumen	375.000.000

			Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Tobadak	1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	30.000.000
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tobadak	12 Dokumen	41.960.984	DAU		12 Dokumen	35.000.000
			Penatausahaan Pembiayan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayan Daerah	Tobadak	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	20.000.000
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tobadak	4 Dokumen	95.870.000	DAU		4 Dokumen	220.000.000
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Juamlah dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tobadak	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	47.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tobadak	4 Laporan	137.000.000	DAU		4 Laporan	140.000.000
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tobadak	45 Dokumen	36.900.000	DAU		45 Dokumen	30.000.000
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tobadak	1 Laporan	50.000.000	DAU		1 Laporan	234.000.000
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	45 Orang	100.000.000	DAU		45 Orang	350.000.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		**Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**100**	**844.000.000**				**2.219.891.000**
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tobadak	2 Laporan	50.000.000	DAU		2 Laporan	37.000.000
			Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Tobadak	4 Dokumen	60.000.000	DAU		4 Dokumen	110.250.500

			Konsolidasi Penyusunan Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	Tobadak	12 Laporan	40.000.000	DAU		12 Laporan	122.750.000
			Konsilidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	4 Laporan	75.000.000	DAU		4 Laporan	225.890.500
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tobadak	2 Laporan	290.000.000	DAU		2 Laporan	550.000.000
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tobadak	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	20.000.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tobadak	1 Dokumen	118.500.000	DAU		1 Dokumen	188.500.000
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tobadak	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	20.000.000
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	20.000.000
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	50 Oang	120.000.000	DAU		50 Oang	350.000.000
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Tobadak	50 Orang	30.000.000	DAU		50 Oang	350.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	4 Laporan	25.500.000	DAU		4 Laporan	225.500.000
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		**Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Tobadak**	**100**	**99.650.000.000**				**93.434.295.600**
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tobadak	50 Laporan	90.150.000.000	DAU		50 Laporan	90.284.295.600
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tobadak	1 Laporan	9.500.000.000	DAU		1 Laporan	3.150.000.000
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		**Persentase data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Tobadak**	**100**	**448.500.000**			**100**	**900.000.000**

			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tobadak	1 Dokumen	148.000.000	DAU		1 Dokumen	150.000.000
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tobadak	1 Dokumen	181.500.000	DAU		1 Dokumen	550.000.000
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	150 Orang	118.500.000	DAU		150 Orang	200.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			**Persentase Nilai Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD**	**Tobadak**	**100**	**859.100.000**			**100**	**1.057.000.000**
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		**PersentasePengelolaan Barang Milik Daerah**	**Tobadak**	**100**	**859.100.000**	**DAU**		**100**	**1.057.000.000**
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Tobadak	1 Dokumen	52.000.000	DAU		1 Dokumen	120.000.000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tobadak	1 Laporan	18.000.000	DAU		1 Laporan	62.000.000
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tobadak	40 Dokumen	20.000.000	DAU		40 Dokumen	20.000.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tobadak	1 Laporan	71.000.000	DAU		1 Laporan	60.000.000
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Tobadak	12 Laporan	100.000.000	DAU		12 Laporan	140.000.000
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Tobadak	12 Laporan	98.000.000	DAU		12 Laporan	150.000.000
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Tobadak	4 Laporan	57.000.000	DAU		10 Laporan	60.000.000
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tobadak	4 Laporan	51.100.000	DAU		60 Laporan	150.000.000
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tobadak	1 Laporan	93.000.000	DAU		1 Laporan	100.000.000
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tobadak	4 Laporan	12.000.000	DAU		4 Laporan	15.000.000
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Tobadak	1 Laporan	226.500.000	DAU		1 Laporan	100.000.000
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	50 Orang	60.500.000	DAU		50 Orang	80.000.000

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			**Persentasi Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD**	**Mamuju Tengah**	**100**	**1.648.000**			**100**	**2.011.000.000**
		Pengelolaan pendapatan Daerah		**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Tobadak**	**100**	**1.963.000.000**			**100**	**2.011.000.000**
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Tobadak	3 Dokumen	195.000.000	DAU		3 Dokumen	280.000.000
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasl Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tobadak	3 Dokumen	145.000.000	DAU		3 Dokumen	205.000.000
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tobadak	10 Laporan	160.000.000	DAU		10 Laporan	275.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tobadak	5 Unit	90.000.000	DAU		5 Unit	100.000.000
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tobadak	10 Laporan	49.500.000	DAU		10 Laporan	51.000.000
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan yang disusun	Tobadak	4 Laporan	35.000.000	DAU		4 Laporan	40.000.000
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang dinilai	Tobadak	80.000 Objek	350.000.000	DAU		80.000 Objek	355.000.000
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Tobadak	300 Dokumen	41.077.400	DAU		300 Dokumen	42.500.000
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tobadak	12 Layanan	35.000.000	DAU		12 Layanan	37.000.000
			Penilitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Tobadak	4 Dokumen	30.500.000	DAU		4 Dokumen	31.500.000
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tobadak	12 Dokumen	232.422.600	DAU		12 Dokumen	233.000;000
			Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	Tobadak	50 Dokumen	50.000.000	DAU		50 Dokumen	52.000.000
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tobadak	12 Dokumen	250.000.000	DAU		12 Dokumen	255.000.000
			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah	jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	Tobadak	12 Laporan	39.500.000	DAU		12 Laporan	41.500.000
			Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perekembangan Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	Tobadak	12 Lapoan	20.000.000	DAU		12 Lapoan	12.500.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**Mamuju Tengah**	**100**	**9.256.550.000**	**DAU**			**13.032.750.000**

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**Tobadak**	**100**	**139.050.000**	**DAU**		**100**	**186.200.000**
			Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tobadak	4 Dokumen	37.550.000	DAU		4 Dokumen	38.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan RKA-PD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tobadak	5 Dokumen	14.000.000	DAU		5 Dokumen	16.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-PD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tobadak	1 Dokumen	15.200.000	DAU		1 Dokumen	17.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tobadak	1 Dokumen	13.800.000	DAU		1 Dokumen	17.500.000
			Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tobadak	7 Dokumen	12.600.000	DAU		7 Dokumen	15.200.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobadak	4 Laporan	25.900.000	DAU		4 Laporan	46.500.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobadak	5 Laporan	20.000.000	DAU		5 Laporan	36.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu**	**Tobadak**	**100**	**7.345.000.000**			**100**	**9.560.000.000**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tobadak	26 Orang/Bulan	7.300.000.000	DAU		25 Orang	9.500.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Tobadak	2 Dokumen	45.000.000	DAU		2 Dokumen	60.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**Tobadak**	**100**	**48.700.000**	**DAU**		**100**	**168.000.000**
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tobadak	1 Dokumen	15.800.000	DAU		1 Dokumen	120.000.000
			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	1 Laporan	8.700.000	DAU		1 Laporan	10.000.000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	1 Laporan	7.500.000	DAU		1 Laporan	8.000.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	1 Laporan	16.700.000	DAU		1 Laporan	30.000.000

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**Tobadak**	**100**	**313.800.000**			**100**	**498.550.000**
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tobadak	10 Unit	10.000.000	DAU		10 Unit	25.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tobadak	96 Paket	60.000.000	DAU		100 Paket	60.000.000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobadak	12 Dokumen	43.800.000	DAU		12 Dokumen	60.000.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tobadak	2 Dokumen	100,000,000	DAU		2 Dokumen	135,000,000
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tobadak	3 Dokumen	30.000.000	DAU		3 Dokumen	78.550.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tobadak	3 Orang	40.000.000	DAU		5 Orang	95.000.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tobadak	5 Orang	30.000.000	DAU		5 Orang	45.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**Tobadak**	**100**	**799.000.000**			**100**	**969.500.000**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tobadak	1 Paket	427.000.000	DAU		10 Paket	450.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobadak	2 Paket	11.500.000	DAU		2 Paket	12.500.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tobadak	12 Paket	35.500.000	DAU		12 Paket	36.500.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tobadak	50 Dokumen	10.000.000	DAU		50 Dokumen	50.000.000
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tobadak	100 Laporan	10.000.000	DAU		100 Laporan	50.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobadak	100 Laporan	300.000.000	DAU		100 Laporan	360.000.000
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Tobadak	1 Dokumen	5.000.000	DAU		2 Dokumen	10.500.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah PD penunjang yang terpenuhi**	**Tobadak**	**100**	**101.000.000**	**DAU**		**100**	**493.500.000**
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tobadak	1 Unit	25.000.000	DAU		2 Unit	100.000.000

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tobadak	1 Unit	20.000.000	DAU		5 Unit	300.000.000
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tobadak	30 Paket	20.000.000	DAU		30 Paket	20.500.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tobadak	10 Unit	36.000.000	DAU		10 Unit	73.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**Tobadak**	**100**	**190.000.000**	**DAU**		**100**	**195.000.000**
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tobadak	1 Laporan	190.000.000	DAU		1 Laporan	195.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**Tobadak**	**100**	**320.000.000**	**DAU**		**100**	**351.000.000**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tobadak	23 Unit	125.000.000	DAU		25 Unit	135.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tobadak	20 Unit	50.000.000	DAU		20 Unit	65.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tobadak	1 Unit	145.000.000	DAU		1 Unit	150.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(Stakeholders)* dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah adalah Program Tahunan BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah yang akan disempurnakan menjadi Rencana Kerja dengan menampung seluruh usulan dan perbaikan dari stakeholder terkait.

Rencana Kerja (Renja) BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah selain menjadi rencana pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah.

Renja juga dapat digunakan sebagai umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan manajemen dan seluruh staf BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Tobadak, 31 Juli 2023

Plt. Kepala BPKPAD Mamuju Tengah

PEMERINTAH KABUPATEN BPKPAD MAMUJU TENGAH

IMANSYAH, S.Kom., MM

Pangkat : Pembina IV.a

NIP : 19800101 200901 1 025

RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun belum optimal. Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mamuju Tengah, Februari 2024

Kepala Dinas

HASANUDDIN,HW,S.Ag.,M.Si.
NIP : 19750608 200112 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LatarBelakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan Publik lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Kependudukan Kab. Mamuju tengah Tahun Anggaran 2024, mengacu kepada rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati defenitif Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah, selaras dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah. Selanjutnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan lagi Bagian, melainkan sudah berganti status sebagai Dinas. Sehingga sebagai salah satu SKPD baru dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tentu berusaha semaksimal mungkin untuk memacu diri dalam rangka memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat, khususnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

I.2 LandasanHukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Mamuju Tengah No. 04 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;

9. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengan Tahun Anggaran 2016.
10. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Wilayah KabupatenMamuju Tengah.
11. Peraturan Bupati Mamuju Tengah No. 27 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kebupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

I.3 Maksud danTujuan

Maksud :

Secara umum, maksud penyusunan Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Defenitif Kabupaten Mamuju Tengah yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di pedomani setiap tahunnya. Hal ini merupakan tujuan yang tidak terpisah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026

Tujuan :

a. Menyamakan persepsi dan pandangan semua jajaran pegawai/ staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah dalam tujuan organisasi
b. Tersedianya tolok ukur dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah
c. Menyediakan informasi mengenai kegiatan program yang akan di jalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sesuai skala prioritas pertahun berdasarkan rencana strategis dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat

I.8 SistematikaPenulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju TengahTahun 2024, meliputi :

 BAB I PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

2.2 Landasan Hukum

2.3 Maksud Dan Tujuan

2.4 Sistematika Penulisan

 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkast Daerah

2.3 Isu-Isu Pentingh Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Proram dan Kegiatan

 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

 BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2024 yang menjadi tujuan utama adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan professional, demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik, sehingga berbagai sasaran dan program dapat dicapai. Sedangkan Prioritas Program RENSTRA yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022 dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja tahun berikutnya dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022 disampaikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG.	BELANJA DAERAH		
	ANGGARAN	REALISASI	%
01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Rp 1,584,605,314.00**	**Rp 1,546,354,847.00**	97.59
02. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Rp 527,343,955.00**	**Rp 526,911,705.00**	99.92
03. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Rp 383,889,890.00**	**Rp 383,537,622.00**	99.91
04. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Rp 674,716,395.00**	**Rp 674,639,621.00**	99.99
05. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Rp 98,681,300.00**	**Rp 98,681,300.00**	100.00
JUMLAH TOTAL	**3,269,236,854**	**3,230,125,095**	**98.80**

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) tehadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan program dan kegiatannya.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Kinerja				
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***
	Persentase Perekaman KTP elektronik	92%	93%	94%	95%	97%	98%	93,03	94.00			
	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	13%	28%	43%	58%	73%	88%	35.00	36.71			
	Persentase Kepemilikan akte kelahiran 0 sd 18 Tahun	61%	70%	75%	80%	85%	90%	95.00	98.72			
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	14.00%	55%	65%	75%	85%	95%	65%	67.00			

Seperti yang telah di cantumkan pada tabel Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah diatas

Persentase Data Kependudukan pada tahun 2021 telah melampui target Renstra yang telah ditentukan dan pada Tahun 2022 telah memenuhi target. Untuk perhitungan data kependudukan pada IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah menggunakan Data Konsoilidasi Bersih dari Kementerian Dalam Negeri Semester II dan untuk capaian tahun 2022 untuk sementara masi menggunakan data semester I disebabkan Data Konsoilidasi Bersih belum rilis dari Kementerian Dalam Negeri

adapun mengenai masalah formulasi perhitungan IKU seperti pada tabel sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula Perhitungan		Sumber Data
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan	1	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP / Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	X 100	Data Konsilidasi Bersih (DKB) Dukcapil yang dikeluarkan oleh Kemendagri
		2	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari	x 100	Data Konsilidasi Bersih (DKB) Dukcapil yang dikeluarkan oleh Kemendagri
		3	Persentase Kepemilikan akte kelahiran 0 sd 18 Tahun	%	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / Jumlah anak usia 0-18 tahun	X 100	Data Konsilidasi Bersih (DKB) Dukcapil yang dikeluarkan oleh Kemendagri
		4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama / Jumlah OPD	X 100	Laporan Perjanjian Kerjasama

2. Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					Realisasi Kinerja Pada Tahun Ke-				
					2021	2022	2024	2024	2025	2021	2022	2024	2024	2025
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan dukcapil	75.254	77	80	84	87	90	75,774	80,48			
		Terpenuhinya pelayanan kependudukan	Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan kependudukan	na	75	78	81	84	90	75,774	80,48			
		Terpenuhinya pelayanan Pencatatan Sipil	Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan pencatatan sipil	na	75	78	81	84	90	75,774	80,48			
2	Meningkatnya Tata Kelola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Indeks RB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Na	CC	CC	C	C	B	C	C			
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pad Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil	Na	CC	CC	C	C	B	CC	C			

			Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada dinas DUKCAPIL	Na	0%	0%	0%	0%	0%	0%				

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan administrasi kependudukan diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana di atur dalam Permendagrai Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persentase Perekaman KTP elektronik
2. Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA
3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 s/d 18 Tahun
4. Persentase OPD yang tela memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

TABEL 2.3.a

PENACAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Perekaman KTP elektronik				93%	94%	95%	97%	98%										
	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA				28%	43%	58%	73%	88%										
	Kepemilikan akte kelahiran 0 sd 18 Tahun				70%	75%	80%	85%	90%										
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama				55%	65%	75%	85%	95%										

2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini yang utama yaitu :

”**PERCEPATAN**” terkait dengan Pelayanan/Penerbitan Dokumen Kependudukan, **”KOLABORASI**” dalam upaya Pemanfaatan Data Base Kependudukan dan ”**JANGKAUAN**” dalam rangka peningkatan pelayanan Publik Administrasi yang berarti Pendekatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan.

Dalam hal pencapaian kinerja pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah sering melakukan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun tingkat pusat dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Administrasi

Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah diberlakukannya Undang-undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dan juga dilakukannya Bimtek mengenai administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat guna pencapaian kinerja khususnya dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang ditempuh dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

1. Belum tertibnya dokumen kependudukan di masyarakat, sehingga perlu diberikan pemahaman melalui sosialisasi kebijakan kependudukan kepada masyarakat tidak hanya kepada aparat desa/kelurahan akan tetapi kepada masyarakat langsung.

2. sarana dan prasarana IT untuk pelayanan administrasi kependudukan kurang memadai, untuk itu perlu di adakan pembaruan untuk sarana dan prasarana IT.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebelum nanti akhirnya menjadi dokumen RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang disahkan dengan Peraturan Bupati Trenggalek. Sangat dimungkinkan dalam proses berjalan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 menjadi dokumen RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 terjadi perbedaan/pergeseran program/kegiatan beserta pagu anggaran yang disinkronkan dengan program prioritas Provinsi Sulawesi Barat, Nasional maupun perkembangan di daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kenaikan pada pagu anggaran dari tahun yang lalu dan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil untuk tahun 2024.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD											
KABUPATEN MAMUJU TENGAH											
	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**DUKCAPIL**	**PERSENTASE PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK**	**95%**	**Rp 790,000,000**						
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	**Persentase Dokumen Permohonan peristiwa kependudukan yang diterbitkan**	**100%**	**Rp 300,000,000**						
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	18000	Rp 170,000,000						
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	Rp 125,000,000						
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5500	Rp 100,000,000						

	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2	Rp 100,000,000						
	Penataan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	**Persentase Pemenuhan Perekaman KTP Elektronik**	**88%**	**Rp 50,000,000**						
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	40000 Set	Rp 50,000,000						
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	**Persentase Perekaman KTP El**	**88%**	**Rp 483,000,000**						
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	Rp 50,000,000						
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	3444	Rp 158,000,000						
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1	Rp 125,000,000						
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	50 Orang	Rp 75,000,000						

	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	150	Rp 75,000,000						
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	**Persentase dokumen Pedaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu**	**91%**	**Rp 50,000,000**						
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	Rp 50,000,000						
		DUKCAPIL									
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DUKCAPIL	**Persentase rata-rata kepemilikan Dokumen pencatatan sipil**	**80%**	**Rp 1,045,000,000**						
	Pelayanan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	**Rasio bayi berakte kelahiran**	**0.98**	**Rp 445,000,000**						

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7000	Rp 170,000,000						
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2500	Rp 125,000,000						
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	65,000	Rp 150,000,000						
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	**Persentasi anak usia 01-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA**	**58%**	**Rp 425,000,000**						
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	3 Lembaga	Rp 50,000,000						

	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2890	Rp 100,000,000						
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	**7 Unit**	**Rp 125,000,000**						
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	**50 Orang**	**Rp 75,000,000**						
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	**3 Media**	**Rp 75,000,000**						
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	**Persentase Penerbitan Akta Perkawinan**	**36%**	**Rp 50,000,000**						
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	5 Orang	Rp 50,000,000						
		DUKCAPIL									

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DUKCAPIL	**Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan**	**75%**	**Rp 1,145,000,000**						
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	DUKCAPIL	**Jumlah Dokumen Database Kependudukan skala kabupaten**	**2 Dokumen**	**Rp 150,000,000**						
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	**2 Dokumen**	Rp 150,000,000						
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	**Persentase Pengelolaan administrasi kependudukan yang terselenggara dengan baik**	**100%**	**Rp 995,000,000**						
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45 Lembaga	Rp 100,000,000						
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16 Unit	Rp 450,000,000						

	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	Rp 220,000,000						
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50 Peserta	Rp 100,000,000						
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Media	Rp 75,000,000						
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Pegawai PIAK yang mengikuti Bimtek terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	8 Orang	Rp 50,000,000						
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DUKCAPIL	**Persentase Buku Profil Kependudukan yang tersedia di lembaga yang dikerjasamakan**	**100%**	**Rp 125,000,000**						
	Penyusunan Profil Kependudukan	DUKCAPIL	**Jumlah Buku Profil Kependudukan**	**45 Buku**	**Rp 125,000,000**						

	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	DUKCAPIL	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	16 Dokumen	Rp 100,000,000						
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	114 Eksamplar	Rp 25,000,000						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	DUKCAPIL	**Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**Rp 3,416,600,000**						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DUKCAPIL	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu**	**100%**	**Rp 200,000,000**						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 40,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 25,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 25,000,000						

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 25,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 25,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Rp 45,000,000						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Rp 15,000,000						
		DUKCAPIL									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DUKCAPIL	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**100%**	**Rp 1,139,000,000**						

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DUKCAPIL	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	Rp 1,000,000,000						
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	Rp 14,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DUKCAPIL	Jumlah laporan yang tersedia	1	Rp 50,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Rp 75,000,000						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DUKCAPIL	**Persentase pegawai perangkat daera yang dilayani**	100%	**Rp 95,000,000**						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DUKCAPIL	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Rp -						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DUKCAPIL	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Rp 45,000,000						

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DUKCAPIL	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Rp 50,000,000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DUKCAPIL	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	100%	**Rp 60,000,000**						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DUKCAPIL	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Rp 20,000,000						
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DUKCAPIL	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1500	Rp 25,000,000						
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	440	Rp 15,000,000						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DUKCAPIL	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100%	**Rp 1,785,000,000**						
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DUKCAPIL	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Rp -						
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DUKCAPIL	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Rp 1,500,000,000						

	Pengadaan Mebel	DUKCAPIL	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Rp 25,000,000						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DUKCAPIL	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Rp 50,000,000						
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DUKCAPIL	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp 210,000,000						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DUKCAPIL	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	**Rp 112,600,000**						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000 Surat	Rp 35,000,000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	34269 KWh.	Rp 50,000,000						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Orang	Rp 27,600,000						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DUKCAPIL	Persentase kendaraan dinas yang dipelihara	**100%**	**Rp 25,000,000**						

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	DUKCAPIL	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp 25,000,000						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	12
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DUKCAPIL	**PERSENTASE PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK**	**95%**	**95%**	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	**Persentase Dokumen Permohonan peristiwa kependudukan yang diterbitkan**	**100%**	**100%**	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	18000	18000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	1	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5500	5500	

	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2	2	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	**Persentase Pemenuhan Perekaman KTP Elektronik**	**88%**	**88%**	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	40000 Set	40000 Set	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	**Persentase Perekaman KTP El**	**88%**	**88%**	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	1	

	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	3444	3444	
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1	1	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	50 Orang	50 Orang	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	150	150	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	**Persentase dokumen Pedaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu**	**91%**	**91%**	
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	1	
		DUKCAPIL				

	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DUKCAPIL	**Persentase rata-rata kepemilikan Dokumen pencatatan sipil**	**80%**	**80%**	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	**Rasio bayi berakte kelahiran**	**0.98**	**0.98**	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7000	7000	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2500	2500	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	65,000	65,000	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	**Persentasi anak usia 01-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA**	**58%**	**58%**	

	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	3 Lembaga	3 Lembaga	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2890	2890	
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	**7 Unit**	**7 Unit**	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	**50 Orang**	**50 Orang**	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	**3 Media**	**3 Media**	

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	**Persentase Penerbitan Akta Perkawinan**	**36%**	**36%**	
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	5 Orang	5 Orang	
		DUKCAPIL				
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DUKCAPIL	**Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan**	**75%**	**75%**	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	DUKCAPIL	**Jumlah Dokumen Database Kependudukan skala kabupaten**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	**Persentase Pengelolaan administrasi kependudukan yang terselenggara dengan baik**	**100%**	**100%**	

	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45 Lembaga	45 Lembaga	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16 Unit	16 Unit	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50 Peserta	50 Peserta	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Media	3 Media	

	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Pegawai PIAK yang mengikuti Bimtek terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	8 Orang	8 Orang	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DUKCAPIL	**Persentase Buku Profil Kependudukan yang tersedia di lembaga yang dikerjasamakan**	**100%**	**100%**	
	Penyusunan Profil Kependudukan	DUKCAPIL	**Jumlah Buku Profil Kependudukan**	**45 Buku**	**45 Buku**	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	DUKCAPIL	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	16 Dokumen	16 Dokumen	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	114 Eksamplar	114 Eksamplar	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	DUKCAPIL	**Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DUKCAPIL	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu**	**100%**	**100%**	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	
		DUKCAPIL				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DUKCAPIL	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DUKCAPIL	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	13	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	13	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DUKCAPIL	Jumlah laporan yang tersedia	1	1	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DUKCAPIL	**Persentase pegawai perangkat daera yang dilayani**	100%	100%	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DUKCAPIL	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DUKCAPIL	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DUKCAPIL	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DUKCAPIL	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	100%	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DUKCAPIL	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DUKCAPIL	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1500	1500	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	440	440	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DUKCAPIL	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100%	100%	

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DUKCAPIL	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DUKCAPIL	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	
	Pengadaan Mebel	DUKCAPIL	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	20	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000 Surat	1.000 Surat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	34269 KWh.	34269 KWh.	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Orang	3 Orang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kendaraan dinas yang dipelihara	**100%**	**100%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Orang	3 Orang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kendaraan dinas yang dipelihara	**100%**	**100%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaran kendaran dinas yang dipeliharan	5 Unit	5 Unit	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan visi pembangunan nasional "***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***". Dengan upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan arah pembangunan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;

5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;

6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sedangkan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk itu, pemerintah kabupaten Mamuju Tengah harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah dan Poin 6 Misi Bupati dan Wakil Bupati defenitif, maka perlu di jabarkan dalam Renja untuk menjadi tujuan dan sasaran yang lebih operasional yang di tuangkan dalam APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 yaitu :

- **Tujuan :**
  1. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
  2. Meningkatnya Tata Kelola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- **Sasaran :**
  1. Terpenuhinya pelayanan kependudukan
  2. Terpenuhinya pelayanan Pencatatan Sipil
  3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan padA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, direncanakan akan dilaksanakan beberapa Program dan Kegiatan dengantotal alokasi dana sebagaimana

tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 ialah sebesar **Rp. 3.335.597.686** Program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lainsebagai berikut :

1. **Anggaran Belanja Terdiri Dari**
   A. Belanja tidak langsung
   B. Belanja langsung
   C. Gaji dan tunjangan pegawai

PROGRAM/KEGIATAN

2

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Penataan Pendaftaran Penduduk

Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Pencatatan Sipil

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Penyusunan Profil Kependudukan

Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

a. Sekretariat

1. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran yang bertanggung jawab.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang lebih baik.

b. Bidang Pendaftaran Penduduk

1. Penyusunan produk hukum daerah sebagai turunan dari produk hukum induk yang mengatur tentang administrasi kependudukan, cetak blanko KK dan KTP, serta jasa layanan.
2. Meningkatkan pemahaman Operator, register, dan Supervisor serta pengelola SIAK mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten mengenai tata aturan administrasi kependudukan.
3. Meningkatkan kualitas data, jaminan keamanan data yang dihimpun.
4. Menyelenggarakan pelayanan pendaftaranan penduduk dengan mengacu pada Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi hukum yang mengatur tentang administrasi kependudukan beserta perubahannya.
5. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendaftaran penduduk bagi petugas , supervisor, registrar dan operator.
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk meminimalisir pelanggaran administrasi kependudukan melalui sweeping KK / KTP di masyarakat.
7. Penyajian dan pendayagunaan hasil pendayagunaan hasil pendaftaran penduduk dalam pengelolaan administrasi kependudukan untuk pelayanan publik guna pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah

c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Menyediakan blanko akta-akta catatan sipil.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang membuat akta-akta catatan sipil sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008.

3. Menertibkan pembukuan akta-akta catatan sipil.
4. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan langsung akta-akta catatan sipil di 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Meningkatkan pengelolaan arsip akta-akta catatan sipil.
6. Memberikan layanan informasi tentang akta-akta catatan sipil secara prima

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Data dan Informasi

1. Melengkapi/menambah/mengganti perangkat komputer dan jaringan program SIAK sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
2. Memelihara/merawat perangkat dan jaringan program SIAK agar tetap dapat di fungsikan dalam pemrosesan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
3. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola perangkat SIAK dan jaringan tehnologi informasi.
4. Menyediakan back up data dan memelihara data base kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Menyediakan data base kependudukan dan Pecatatan Sipil yang steril dari virus/updating data.
6. Memberi dan mencabut hak akses supervisor dan operator kecamatan.
7. Memberikan format contoh blanko laporan kependudukan bulanan dan triwulan dan mensosialisasikan sampai tingkat yang paling bawah.
8. Mengintensifkan pengumpulan laporan kependudukan bulanan dan triwulan secara berjenjang dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kabupaten.
9. Mengevaluasi dan menganalisa hasil laporan kependudukan.
10. Memonitor pelaksanaan sistem administrasi kependudukan baik itu prosedur pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil ditingkat Desa dan Kecamatan.
11. Memberikan Reward bagi pengumpul laporan terbaik dan tercepat di tingkat RT dan RW.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI SULAWESI BARAT KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
						APBD II				
						DAU	DAK			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(11)*
	BELANJA									
	BELANJA TIDAK LANSUNG									
	BELANJA LANGSUNG									
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**PERSENTASE PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK**		**95%**	**Rp 790,000,000**					
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Dokumen Permohonan peristiwa kependudukan yang diterbitkan**		**100%**	**Rp 300,000,000**	DAU				
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		18000	Rp 170,000,000	DAU				

				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1	Rp 125,000,000	DAU				
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		5500	Rp 100,000,000	DAU				
				Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		2	Rp 100,000,000	DAU				
				Penataan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Pemenuhan Perekaman KTP Elektronik**		**88%**	**Rp 50,000,000**	DAU				
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		40000 Set	Rp 50,000,000	DAU				
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Perekaman KTP El**		**88%**	**Rp 483,000,000**	DAU				
				Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1	Rp 50,000,000	DAU				
				Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		3444	Rp 158,000,000	DAU				

				Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk		1	Rp 125,000,000	DAU				
				Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk		50 Orang	Rp 75,000,000	DAU				
				Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk		150	Rp 75,000,000	DAU				
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Persentase dokumen Pedaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu**		**91%**	**Rp 50,000,000**	DAU				
				Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		1	Rp 50,000,000	DAU				
									DAU				
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase rata-rata kepemilikan Dokumen pencatatan sipil**		**80%**	**Rp 1,045,000,000**	DAU				
				Pelayanan Pencatatan Sipil	**Rasio bayi berakte kelahiran**		**0.98**	**Rp 445,000,000**	DAU				
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		7000	Rp 170,000,000	DAU				
				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		2500	Rp 125,000,000	DAU				

				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		65,000	Rp 150,000,000	DAU				
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentasi anak usia 01-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA**		**58%**	**Rp 425,000,000**	DAU				
				Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		3 Lembaga	Rp 50,000,000	DAU				
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		2890	Rp 100,000,000	DAU				
				Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		**7 Unit**	**Rp 125,000,000**	DAU				
				Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		**50 Orang**	**Rp 75,000,000**	DAU				
				Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil		**3 Media**	**Rp 75,000,000**	DAU				

				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Penerbitan Akta Perkawinan**		**36%**	**Rp 50,000,000**	DAU				
				Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		5 Orang	Rp 50,000,000	DAU				
									DAU				
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan**		**75%**	**Rp 1,145,000,000**	DAU				
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Jumlah Dokumen Database Kependudukan skala kabupaten**		**2 Dokumen**	**Rp 150,000,000**	DAU				
				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		**2 Dokumen**	Rp 150,000,000	DAU				
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Pengelolaan administrasi kependudukan yang terselenggara dengan baik**		**100%**	**Rp 995,000,000**	DAU				

				Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		45 Lembaga	Rp 100,000,000	DAU				
				Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		16 Unit	Rp 450,000,000	DAU				
				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		12 Dokumen	Rp 220,000,000	DAU				
				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		50 Peserta	Rp 100,000,000	DAU				
				Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		3 Media	Rp 75,000,000	DAU				
				Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Pegawai PIAK yang mengikuti Bimtek terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		8 Orang	Rp 50,000,000	DAU				
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Persentase Buku Profil Kependudukan yang tersedia di lembaga yang dikerjasamakan**		**100%**	**Rp 125,000,000**	DAU				
				Penyusunan Profil Kependudukan	**Jumlah Buku Profil Kependudukan**		**45 Buku**	**Rp 125,000,000**	DAU				

				Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		16 Dokumen	Rp 100,000,000	DAU					
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		114 Eksamplar	Rp 25,000,000	DAU					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**		**100%**	**Rp 3,416,600,000**	DAU					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu**		**100%**	**Rp 200,000,000**	DAU					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	Rp 40,000,000	DAU					
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	Rp 25,000,000	DAU					
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	Rp 25,000,000	DAU					
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	Rp 25,000,000	DAU					

				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	Rp 25,000,000	DAU				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	Rp 45,000,000	DAU				
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	Rp 15,000,000	DAU				
									DAU				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**		**100%**	**Rp 1,139,000,000**	DAU				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		13	Rp 1,000,000,000	DAU		-		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		13	Rp 14,000,000	DAU				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan yang tersedia		1	Rp 50,000,000	DAU				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		12	Rp 75,000,000	DAU				

					SKPD									
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pegawai perangkat daera yang dilayani**		100%	**Rp 95,000,000**	DAU					
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	Rp -	DAU					
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Orang	Rp 45,000,000	DAU					
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5 Orang	Rp 50,000,000	DAU					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**		100%	**Rp 60,000,000**	DAU					
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	Rp 20,000,000	DAU					
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1500	Rp 25,000,000	DAU					
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		440	Rp 15,000,000	DAU					
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan		100%	**Rp 1,785,000,000**	DAU					

				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	Rp -	DAU				
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	Rp 1,500,000,000	DAU				
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20	Rp 25,000,000	DAU				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5	Rp 50,000,000	DAU				
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	Rp 210,000,000	DAU				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100%	**Rp 112,600,000**	DAU				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.000 Surat	Rp 35,000,000	DAU				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		34269 KWh.	Rp 50,000,000	DAU				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3 Orang	Rp 27,600,000	DAU				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas yang dipelihara		**100%**	**Rp 25,000,000**	DAU				

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 Unit	Rp 25,000,000					

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumenperencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPDdisusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepadaRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Defenitif, diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupunyang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTahun Anggaran 2024 inimerupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD, dandiharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh,agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Kerja ini secara umum menguraikanprogram dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta indikator kinerja untuk program yangdinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatanpembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diharapkan tugaspokokdanfungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terlaksana dalam upayameningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasipelaksanaan kegiatan program Pemerintah,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kotakhususnya dan dapat mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024.

Sangat disadari bahwa penulisan Renja ini jauh dari kesempurnaan, olehnya itu dengan segala kerendahan hati, kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang konstruktif dari semua pihak demi kelengkapannya.

Topovo, Februari 2024

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

HASANUDDIN HW,S.Ag.,M.Si.
Pangkat,Gol : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19750608 200112 1 003

RENJA
TAHUN 2024



INSPEKTORAT
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

SAKARIA K S.Ag.,M.Pd.,MM., CGCAE.,CIPA

mswordcoverpages.com

Daftar Isi

Kata Pengantar 1

Bab I

Pendahuluan 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud Tujuan 7

1.4 Sistematik Penulisan 8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU **9**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 10

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD 15

2.4. Review RKPD 22

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 23

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 23

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 33

3.3. Program dan Kegiatan 36

BAB IV

PENUTUP 39

KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur Kita Panjatkan Ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pada Akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 Dapat Disajikan Untuk Memberikan Gambaran Mengenai Kegiatan-Kegiatan Yang Telah Dilakukan Yang Dapat Diukur Baik Secara Kualitatif Maupun Kuantitatif.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 Ini Pada Hakikatnya Merupakan Perencanaan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Pengelolaan Sumber Daya Dan Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Yang Dipercayakan Kepada Setiap OPD Berdasarkan Suatu Sistem Akuntabilitas Yang Memadai.

Untuk Meningkatkan Daya Guna Laporan Dan Peningkatan Kinerja, Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Secara Bertahap Berupaya Untuk Mengembangkan Kualitas Implementasi Pelaporan Kinerja Dengan Memperhatikan Kriteria Komponen-Komponen Perencanaan, Memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja Untuk Monitoring Kegiatan Dan Meningkatkan Mutu Informasi Dalam Laporan Kinerja.

Dengan Telah Disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 Ini, Diharapkan Dapat Bermanfaat Bagi Semua Pihak Terkait, Khususnya Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Sebagai Sarana Evaluasi Atas Pencapaian Kinerjanya.

Topoyo, 12 Oktober 2023
INSPEKTUR
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

SAKARIA K S.Ag.,M.Pd.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV c
NIP : 19731010 200003 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan dan Perundang - undangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk memperbaiki dan menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.

Rencana Kerja OPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja perubahan perangkat daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja perubahan OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, RENSTRA OPD dan RPJM.

Rencana Kerja (RENJA) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Tahapan penyusunan renja OPD yaitu:

1. Persiapan penyusunan renja OPD;
2. Penyusunan renja OPD;
3. Pelaksanaan forum OPD;
4. Penetapan renja OPD.

Rencana Kerja OPD kabupaten disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada renstra OPD, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan awal RKPD

menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam renja perangkat daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renja OPD juga disusun berdasarkan Renstra OPD, dimana Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan renja OPD, selaras dengan renstra OPD. Renja seluruh OPD se-Kabupaten Mamuju Tengah akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten Mamuju Tengah. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RABPD, sehingga renja OPD adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja perangkat daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016, Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja OPD dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakanisu-isu strategis tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip- prinsip Good Governance dan Clean Government.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

2.4. Review Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.4. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.5. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.6. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;

b. Pendampingan dan Asistensi.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. ANGGARAN BELANJA, REALISASI, DAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB.

Pada Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan yang dialokasikan sebesar Rp. **4.540.908.351** (Target dan Realisasi Pada Lampiran I).

2.2. Analis Kinerja Pelayanan OPD

Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian Tujuan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi.

a. Kedudukan Inspektorat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Bab IV Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota bagian Ketiga pasal 12 ayat (5) yang berbunyi inspektur dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasif mendapat pembinaan dari Sekretariat Daerah.

Hal ini di kuatkan lagi dengan peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dan peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada bagian kedua pasal 79 ayat 1 yang menyatakan inspektorat dipimpin oleh inspektur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah

b. Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan peraturan bupati Mamuju Tengah nomor 29 tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas inspektorat kabupaten Mamuju Tengah yang dijelaskan pada bab 2 pasal 2 mengenai tugas dan fungsi inspektorat kabupaten dan peraturan bupati nomor 25 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten MamujuTengah pada bagian kedua pasal 79 ayat 1. Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaiman yang dimaksud pada pasal 2 mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan inspektorat.

c. Susunan organisasi dan personil

Struktur organisasi inspektorat kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam peraturan bupati nomor 39 tahun 2023 tentang struktur organisasi perangkat daerah dan peraturan bupati Mamuju Tengah nomor 29 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi dan uraian tugas inspektorat kabupaten Mamuju Tengah.

Inspektorat kabupaten Mamuju Tengah sejak tanggal 01 Januari tahun 2022 dipimpin oleh Inspektur atas nama **SAKARIA K S.Ag.,M.Pd.,MM** dalam melaksanakan tugas inspektur dibantu oleh sekretaris yang membawahi 1 sub bagian yaitu sub bagian kepegawaian dan keuangan serta 3 inspektur pembantu wilayah selaku unsure pelaksana teknis yang masing-masing telah ditetapkan wilayah kerjanya berdasarkan peraturan daerah Mamuju Tengah.

Adapun struktur organisasi inspektorat kabupaten Mamuju Tengah sesuai Peraturan Bupati Mamuju Tengah No 39 Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Inspektur
2. Sekretaris, membawahi:
    a. Sub bagian kepegawaian dan keuangan
    b. Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
3. Inspektur pembantu wilayah 1
4. Insptektur pembantu wilayah 2
5. Inspektur pembantu wilayah 3
6. Kelompok jabatan fungsional

Untuk kelompok jabatan fungsional yaitu terdiri atas pejabat fungsional auditor sebanyak 12 orang yang berasal dari inpassing yang dilakukan oleh

BPKP adapun jumlah pegawai pada inspektorat kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 adalah sebanyak 23 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Inspektur : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Inspektur pembantu : 4 Orang
4. Kepala sub.bagian : 1 Orang
5. Jabatan fungsional auditor : 9 Orang
6. Jabatan fungsional P2UPD : 3 Orang
7. Staf : 4 Orang

Jumlah : 23 Orang

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dalam Penetapan Kinerja tahun 2023 dengan realisasinya.

Mendasari Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 serta Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan (tahun 2024), Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah berencana melaksanakan program dan kegiatan dengan nilai anggaran sebesar **Rp 5.190.759.805** terdiri dari Belanja Operasi **Rp 5.261.225.427** dan Belanja Modal **Rp 50.400.397**.

Pada akhir tahun 2023 dicapai dengan realisasi anggaran 97,72%. Untuk mencapai realisasi di atas, Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah telah menyusun tahapan pencairan anggaran agar target yang diharapkan dapat tercapai.

No	Program / Kegiatan	Anggaran Pokok	Perubahan	Realisasi	Presentasi Setelah Perubahan
	INSPEKTORAT	5,187,952,719	5,311,625,824	5,190,759,805	97.72%
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	1,113,373,000	1,124,638,000	1,118,390,400	99%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	952,158,000	923,938,000	917,785,400	99%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	99,200,000	49,920,000	49,920,000	100%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	62,400,000	110,400,000	110,400,000	100%

	Reviu Laporan Kinerja	295,680,000	301,280,000	301,280,000	100%
	Reviu Laporan Keuangan	196,988,000	212,668,000	210,908,200	99%
	Pengawasan Desa	108,540,000	81,120,000	81,120,000	100%
	Kerjasama Pengawasan Internal	20,800,000	0	-	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	168,550,000	168,550,000	164,157,200	97%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	161,215,000	200,700,000	200,605,000	100%
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	70,495,000	33,160,000	33,160,000	100%
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	90,720,000	167,540,000	167,445,000	100%
2	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	582,019,785	632,905,908	567,766,123	90%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	306,832,508	283,192,508	221,611,000	78%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	177,240,000	158,400,000	158,400,000	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	129,592,508	124,792,508	63,211,000	51%
	Pendampingan dan Asistensi	275,187,277	349,713,400	346,155,123	99%
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	252,593,277	223,633,277	220,075,000	98%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	22,594,000	126,080,123	126,080,123	100%
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	3,492,559,934	3,554,081,916	3,504,603,282	99%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111,735,714	105,702,469	105,218,340	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,118,467	31,640,867	31,634,400	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,128,514	8,044,914	8,041,500	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8,191,043	7,844,352	7,839,440	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	46,578,677	53,396,415	53,013,000	99%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8,276,485	4,775,921	4,690,000	98%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,442,528	-	-	#DIV/0!
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,981,087,083	2,106,280,933	2,085,851,263	99%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,967,752,839	2,094,874,005	2,074,515,263	99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,667,122	6,003,464	5,938,000	99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6,667,122	5,403,464	5,398,000	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195,108,000	213,896,000	207,159,200	97%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195,108,000	213,896,000	207,159,200	97%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	775,668,100	816,552,138	816,381,210	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,446,058	1,428,330	1,427,500	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119,991,000	119,991,000	119,991,000	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,668,242	2,650,008	2,640,000	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27,805,800	37,805,800	37,805,600	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	623,757,000	654,677,000	654,517,110	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	189,400,397	65,400,397	50,400,000	77%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134,900,000	-	-	#DIV/0!
	Pengadaan Mebel	4,100,000	-	-	#DIV/0!
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,400,397	50,400,397	50,400,000	100%
	Pengadaan Aset tak Berwujud	-	15,000,000	15,000,000	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196,064,390	202,753,729	200,607,969	99%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,810,470	1,500,000	1,500,000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,053,920	41,053,729	40,407,969	98%
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	172,200,000	160,200,000	160,200,000	100%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43,496,250	43,496,250	38,985,300	90%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26,261,250	26,261,250	26,195,500	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11,235,000	11,235,000	6,789,800	60%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%
		5,187,952,719	5,311,625,824	5,190,759,805	97.72%

2.3 . Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah

Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati, menyusun laporan hasil pengawasan, melaksanakan administrasi Inspektorat dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh OPD.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Kajian terhadap Kinerja Pengawasan	• Pemeriksaan Komprehensif dan khusus • Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah	• PP No. 60 Tahun 2008 • Permenpan No.04/MPAN/03/2008 • Permenpan No.05/MPAN/03/2008 • Permenpan No. 059 Tahun 2009 • Permenpan No. 019 Tahun 2009	Semakin banyaknya jumlah obyek pemeriksaan yaitu sebanyak 34 OPD, obrik ditambah 54 desa, obrik ditambah sekolah SD dan SMP dan Puskesmas maupun sub obrik	Adanya kebijakan perubahan organisasi OPD sehingga jumlah obrik semakin meningkat	• Jumlah obyek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Tim Pemeriksa, untuk mengawasai seluruh obrik yang ada • Aparatur Pengawas (APIP) belum sepenuhnya memiliki kompetensi • Jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan sangat minim • Jumlah Auditor / P2UPD masih sangat

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Inspektorat sebagai Internal Kontrol yang berfungsi menjadi Quality Assurance	Dalam proses pelaksanaan	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Audit	Pedoman Pemeriksaan/Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler (POPREG)	Prosedur/Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian	Penyempurnaan POPREG yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat
Kuantitas Auditor dan P2UPD	Sudah ada 10 orang Auditor dan 3 orang P2UPD	Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah seharusnya sudah memiliki jumlah Auditor lebih besar dari yang ada.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Proses rekuitmen dan Pembentukan Auditor dan P2UPD	Peningkatan Kapabilitas SDM Pengawas
Level Kapabilitas APIP	APIP Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah berada pada Level 3 dengan catatan	Kondisi saat ini seharusnya kapabilitas APIP Daerah sudah pada Level 3 penuh	Pengembangan SDM Pengawasan dan Profesional Auditor	Penguatan Kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektivitas	Peningkatan Kapabilitas APIP menuju ke Level 3 penuh
Level Maturitas SPIP	Level “terdefinisi dengan nilai 3,000	Hasil evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP			
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan	Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan	LHP yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan	Taraf pengetahuan yang dimiliki oleh Auditor berbedabeda	Belum pernah dilaksanakannya Bimtek Penulisan LHP yang efektif	Peningkatan kualitas laporan dan format laporan belum seragam

Efektifitas Dampak Hasil Pemeriksaan	Masih belum efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan hasil pemeriksaan	Semakin rendahnya jumlah temuan pemeriksaan	Kualitas temuan kurang memadai	Sistem Pengendalian internal OPD masih lemah	Hasil Temuan Pemeriksaan yang berulang
Kajian terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan inspektorat dan BPK	Daftar obrik yang sudah selesai tindaklanjutnya, dalam proses tindak lanjut ataupun belum selesai tindak lanjutnya	Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2006	• Fungsi Tim tindak lanjut • Koordinasi tindak lanjut • Sarana dan Prasarana penunjang olah data tindak lanjut	*Auditee* yang menindaklanjuti	Ada beberapa obrik yang kurang kooperatif
Opini BPK	Opini WTP	Hasil pemeriksaan atas LKPD oleh BPK-RI	Pendampingan dan asistensi secara berkala	Komitmen seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Mamuju Tengah	Pengelolaan kas, barang inventaris dan Barang persediaan pada satuan kerja belum tertib

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian tersebut yaitu sebagai berikut :

1) Anggaran Pengawasan masih sangat kurang;
2) Terbatasnya Aparatur Pengawasan (Auditor,P2UPD);
3) Pemeriksaan lebih ke aspek administrate bukan ke hasil;
4) Perangkat Daerah menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan mendasar;
5) Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja (hingga ke keuangan daerah);
6) OPD masih tidak fokus terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan,Tidak Kooperatif dalam Memberikan data yg di minta Inspektorat;
7) Kesulitan reviu dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam formatnya;
8) Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa);
9) Peningkatan kapabilitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya controllable bagi Inspektorat;
10) Sistem penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten);
11) Teknis audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik yang administratif masih lemah;
12) Standar kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi;
13) Norma, standar dan prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
14) Peraturan Bupati yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP tentang tata cara pemeriksaan;
15) Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;
16) Pemeriksaan Belum terlalu menyentuh akar permasalahan;
17) Hard and soft controll atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan. Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya sehingga dapat

dicapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam rangka

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping kendala, Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1) Adanya program pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) secara periodik bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
2) Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Bupati Mamuju Tengah;
3) Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklatwas BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan;
4) Adanya semangat Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya;
5) Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
6) Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang Kepemerintahan yang baik.

Sedangkan tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1) Masih Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan Pemerintah Daerah pada umumnya.
2) Kurangnya tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan.
3) Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja SKP

Tantangan dan Peluang tersebut harus dijadikan acuan bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Mamuju Tengah ini.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2023, maka Renja Tahun 2024 terdapat banyak perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan baik dari jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan maupun besaran anggaran yang menjadi kebutuhan Inspektorat Mamuju Tengah.

Pembandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja SKPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut maka rumusan pernyataan visi, pokok-pokok visi, penjelasan pernyataan visi dan penjelasan pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 adalah:

“” Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera Dalam Bingkai La’la Tassisara”

Pada rumusan visi ini terdapat beberapa pokok visi, yakni: (1) Maju; (2) Sejahtera; (3) Bingkai La’la Tassisara. Muara dari visi ini adalah kesejahteraan masyarakat, hulu dari visi ini adalah kemandirian daerah, sementara jembatan antara hulu dan hilir tersebut adalah bingkai lalla tassi’sara melalui gerakan

bersama membangun Mamuju Tengah. Adapun penjelasan dari visi ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1 Penjelasan Visi

No.	Visi	Pokok visi	Penjelasan pokok visi
1.	"Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara"	"Maju"	kondisi dimana kualitas manusia Kabupaten Mamuju Tengah semakin tinggi dan didukung oleh pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai baik dari segi jangkauannya maupun dari segi kualitasnya.
2.		"Sejahtera"	kondisi dimana kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah semakin meningkat dengan didukung oleh pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
3.		"Bingkai La'la Tassisara"	kondisi dimana kebersamaan di tengah keberagaman menjadi acuan nilai dan norma bagi seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah

3.1.2. Misi

Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Keseluruhan rumusan misi ini terkait dengan upaya umum dalam mewujudkan keseluruhan pokok-pokok visi serta terkait pula dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Adapun rumusan misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dibagi menjadi 6 sebagai berikut:

(1) Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya umum ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung

sentra agribisnis di seluruh kecamatan.

(2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar

Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta pelayanan umum lainnya.

(3) Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian dalam arti umum yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, selain memperkuatan sistem agribisnis dan agroindustri berbasis kelapa sawit untuk sebanyak-banyaknya memberi manfaat bagi penghidupan rakyat. Seiring dengan peningkatan daya saing perekonomian, kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian, terutama dalam penanggulangan kemiskinan.

(4) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi. Area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Termasuk juga dalam misi ini adalah penguatan pemerintahan kecamatan dan pembinaan desa.

(5) Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara, memperkuat dan mengembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang heterogen. Upaya itu dimaksudkan agar masyarakat tetap hidup rukun dan damai serta mengacu pada nilai *Lalla' Tassisara*, yakni berbeda-beda tetapi tetap dalam kebersamaan untuk membangun Kabupaten Mamuju Tengah.

(6) Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup

Misi ini mencakup upaya umum dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan seperti degradasi lahan, kerusakan

sungai, kerusakan pesisir dan kerusakan tutupan lahan. Misi ini juga terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengelolaan sampah.

Tabel 3.1.3
Penjelasan Misi Dan Keterkaitannya Dengan Pokok-Pokok Visi

No.	Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	Kemandirian Daerah	Percepatan peningkatan instrastruktur dasar meliputi perbaikan kualitas jalan dan jembatan, sarana dan prasarana air bersih, sumber energy listrik serta energy yang lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Misi ini sangat relevan dengan kondisi daerah yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur transportasi dan air bersih serta kebutuhan listriknya masih bergantung kepada pusat pelayanan di daerah tetangga. Bila masalah tersebut terpecahkan maka Mamuju Tengah dapat lebih mandiri memanfaatkan berbagai potensi daerah

2.	Kemandirian Daerah	Perbaikan dan peningkatan infrastruktur kesehatan melalui peningkatanlayanan rumah sakit, puskesmas dan pustu serta sumberdaya manusia di bidang kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat	Misi ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang masih rendah derajat kesehatannya dimana infrastruktur pelayanan kesehatan masih terbatas sehingga bergantung pada pelayanan di luar daerah. Bila misi ini berjalan maka Mamuju Tengah dapat melayani sendiri sebagian besar pemenuhan kesehatan Masyarakat
3.	Kemandirian Daerah	Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan untuk menciptakan generasi yang berkualitas, terandalkan dan bermoral	Misi ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang masih rendah derajat pendidikannya. Pengembangan infrastrukt ur pendidikan yang merata dikecamatan aka
4.	Kemandirian daerah dan Kesejahteraan masyarakat	Peningkatan dan penyediaan infrastruktur dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai sector unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Misi ini terkait dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan sekaligus terkait dengan kemandirian daerah melalui kemampuan kedaulatan pangan. Misi ini sangat relevan dengan potensi sumberdaya alam dan posisi Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu lumbung pangan dan produk agribisnis Provinsi Sulawesi Barat.
5.	Kesejahteraan Masyarakat	Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki berdasarkan kondisi wilayah di setiap kecamatan	Misi ini terkait denganpengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang selain berpotensi bagi kesejahteraan juga membawa kerentanan bagi bencana dan gangguan
6.	Kemandirian daerah dan Kesejahteraan masyarakat	Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintahan yang bersih, jujur dan bermartabat serta berdaya saing	Misi ini sangat relevan dengan kondisi pemerintahan Mamuju Tengah yang merupakan DOB sehingga sangat urgen mengakselerasi penguatan kelembagaan dan kapasitas pelayanan.

7.	Dalam bingkai Lala Tassi'sara melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah	Mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan masyarakat Mamuju Tengah melalui toleransi antar ummat beragama serta perlindungan hak asasi manusia	Misi ini terkait erat dengan kondisi heterogenitas social masyarakat Mamuju Tengah yang rentan terhadap konflik social. Bingkai budaya daerah diarahkan untuk mengikat keberagaman tersebuat kedalam satu kebersamaan untuk memajukan daerah
8.	Dalam bingkai Lala Tassi'sara melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah	Mendorong terpeliharanya nilai-nilai budaya, kearifan local, tradisi dan keyakinan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan ras di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.	Misi ini terkait dengan keberagaman social-budaya masyarakat Mamuju Tengah yang perlu digali dan dikembangkan sebagai basis spirit bagi kebersamaan dalam pembangunan daerah

Tabel 3.1.4
Tujuan dan indikator kinerja tujuan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026

Visi: **"Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara"**			
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
1.	**Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar** Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya umum ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan	Menjamin pemenuhan infrastruktur dasar	Indeks infrastruktur daerah
2.	**Meningkatkan kualitas pelayanan dasar** Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak	IPM

3.	**Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah** Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian dalam arti umum yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, selain memperkuatan sistem agribisnis dan agroindustri berbasis kelapa sawit untuk sebanyak-banyaknya memberi manfaat bagi penghidupan rakyat. Seiring dengan peningkatan daya saing perekonomian, kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian terutama		
4.	**Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik** Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi. Area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Termasuk juga dalam misi ini adalah penguatan pemerintahan kecamatan dan pembinaan desa	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
5	**Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat** Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara, memperkuat dan mengembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang heterogen. Upaya itu dimaksudkan agar masyarakat tetap hidup rukun dan damai serta mengacu pada nilai *Lalla' Tassisara*, yakni berbeda-beda tetapi tetap dalam kebersamaan untuk membangun Kabupaten Mamuju Tengah.		

6.	**Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup** Misi ini mencakup upaya umum dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan seperti degradasi lahan, kerusakan sungai, kerusakan pesisir dan kerusakan tutupan lahan. Misi ini juga terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengelolaan sampah.	Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks risiko bencana

Agar pelaksanaan Program Kegiatan berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perlu ada Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Adapun Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:

1. **Visi**

   "Terwujudnya Manajemen Pemerintahan yang baik melalui Pengawasan yang Profesional".

2. **Misi**

   Misi yang dirumuskan dalam usaha mencapai visi adalah sebagai berikut:

   a. **Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dan Pembinaan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah**

      Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan diharapakan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi unit kerja khususnya dan bagi pemerintah Daerah pada umumnya dalam upaya melakukan perubahan-perubahan menuju kearah manajemen yang lebih baik, sehingga pengawasan yang dilakukan harus mempunyai kualitas yang dapat diandalkan serta dapat berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) untuk itu pengawasan harus bersifat konstruktif dan dinamis.

   b. **Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Aparatur Pengawasan**

      Dalam pelaksanaan pengawasan harus menggunakan metode pemeriksaan yang baik sehingga temuan yang didapat juga berkualitas. Hal tersebut dapat tercapai apabila Inspektorat didukung oleh tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang berkualitas, sehingga senantiasa diperlukan pengiriman Diklat dan Pelatihan dalam rangla meningkatkan profesionalisme dan kemandirian aparatur pengawas.

c. **Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan**.

Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan, kantor yang memadai dapat menciptakan kondisi kerja yang kondusi, yangberdampak positif terhadap produktifitas pegawai.

Agar pelaksanaan program kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan pada tahun 2023 berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana yang dituangkan dalam Visi dan Misi OPD perlu diambil langkah - langkah strategis sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Negara dan Daerah secara ekonomis, efesien, efektif, transparan dan akuntabilitas;
b. Meningkatkan Manejemen Pemerintahan yang baik ;
c. Meningkatkan sinergi Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
d. Meningkatkan mutu SDM aparat Inspektorat sesuai dengan standar audit
e. Meningkatkan dan memberdayakan sarana dan prasarana dalam mendukung hasil Pengawasan yang efektif;
f. Meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan

a. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Insektorat Kabupaten Mamuju Tengah, maka arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan tujuan:

1. Meningkatkan Pengelolaan anggaran Negara/secara ekonomis, efesien, efektif, transparan, dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan sinerji Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
4. Meningkatkan mutu SDM aparat pengawas sesuai standar audisi;
5. Meningkatkan dan memberdayakan sarana dan prasarana dalam mendukung hasil pengawasan yang efektif;
6. Meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

b. Sasaran

1. Terwujudnya pengelolaan Anggaran Negara dan Daerah yang ekonomis, efesien, transparan, dan akuntabilitas;
2. Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik;
3. Tewujudnya pelayanan dan penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pengawas interen pemerintah (APIP) secara efektif sesuai rekomendasi
4. Terwujudnya peningkatan kompetisi aparat Inspektorat sesuai standar audit;
5. Terwujudnya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara ekonomis, efesien, dan efektif;
6. Terselenggaranya sistem dan metode kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

c. Prioritas Rencana Kerja

1. Pemeriksaan PKPT mencakup OPD dan OPD Kecamatan.
2. Review atas laporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah.
3. Pemeriksaan kepala desa yang berakhir masa jabatanya.
4. Pemeriksaan ADD dan Dana Desa.
5. Pemeriksaan Puskesmas.
6. Pemeriksaan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Mamuju Tengah
7. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat.
8. Pemutahiran data hasil temuan internal dan eksternal .

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah merupakan Implementasi yang hams dilakukan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 - 2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Mamuju Tengah terpilih periode 2021 - 2026.

Sesuai visi, misi, tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai peran dalam mewujudkan visi diatas melalui misi ke enam yaitu ***Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintahan yang bersih, jujur dan bermartabat serta berdaya saing.***

Misi Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintahan yang bersih, jujur dan bermartabat serta berdaya saing mengandung makna penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif. Prinsip-prinsip Pemerintahan yang bersih meliputi wawasan ke depan, keterbukaan dan tranparansi,

partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisien dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen pada perlindungan lingkungan hidup dan komitmen pada pasar yang fair. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah melalui pelaksanaan pengawasan yang profesional dan akuntabel mengimplementasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah tersebut dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukkan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparatur Pengawas adalah sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi pada dinamika masyarakat melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan. Peningkatan aparatur pengawas baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif diarahkan untuk dapat meningkatkan jangkauan ataupun cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawas.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan yang merupakan capaian yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan sasaran yang merupakan capaian yang ingin dicapai setiap tahunnya. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran.

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan organisasi dalam merealisasikan program kerja yang ditetapkan Jumlah Program Yang Direncanakan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun Anggaran 2024 Secara Keseluruhan Adalah 3 Program Dengan Total 11 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan .

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Presentase penurunan jumlah temuan hasil pengawasan**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**4,500,427,050**	**APBD**		**4,465,699,403**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah temuan Hasil pengawasan internal**	**Mamuju Tengah**	**125 Laporan**	**3,894,493,050**	**APBD**		**3,829,468,703**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporkan hasil pemeriksaan kinerja yang diterbitkan	Mamuju Tengah	11 LHP	253,575,000	APBD		261,182,250
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Obrik yang dilaporkan hasil pemeriksaan keuangannya	Mamuju Tengah	48 LHP	1,295,646,975	APBD		1,360,429,324
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu kinerja	Mamuju Tengah	18 LHR	331,014,600	APBD		347,565,330
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu keuangan	Mamuju Tengah	2 LHR	36,779,400	APBD		38,618,370
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa yang diterbitkan	Mamuju Tengah	21 LHP	1,325,701,125	APBD		1,391,986,181
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Temuan APIP dan BPK Yang Telah Ditindaklanjuti	Mamuju Tengah	25 Dokumen/Laporan	409,225,950	APBD		429,687,248
6	01	02	2.01	08	Kerja sama pengawasan Internal	Jumlah instansi Kerja sama pengawasan Internal yang terlaksana	Mamuju Tengah	2 Instansi	242,550,000	APBD		254,677,500

6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**penurunan jumlah pengaduan stakeholder**	**Mamuju Tengah**	**6 Kegiatan / Kasus**	**605,934,000**	**APBD**		**636,230,700**
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase penyelesaian kerugian negara yang ditindaklanjuti	Mamuju Tengah	3 Kegiatan / Kasus	415,091,250	APBD		435,845,813
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah aduan dan *current issue* yang ditindaklanjuti	Mamuju Tengah	3 Kegiatan/ Kasus	190,842,750	APBD		200,384,888
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Kebijakan yang dirumuskan pelaksanaannya, pendampingan dan asistensi**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**720,894,751**	**APBD**		**756,939,489**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang ditetapkan**	**Mamuju Tengah**	**6 Kegiatan**	**291,324,644**	**APBD**		**305,890,876**
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang di laksanakan	Mamuju Tengah	3 kegiatan	68,329,797	APBD		71,746,287
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Yang Dilaksanan	Mamuju Tengah	3 Kegiatan	222,994,847	APBD		234,144,590
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah OPD dan Desa yang didampingi dan di asistensi**	**Mamuju Tengah**	**7 Kali Pendampingan**	**429,570,107**	**APBD**		**451,048,612**
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah urusan yang dilakukan pendampingan dan asistensi atas proses perencanaan dan penggaran	Mamuju Tengah	3 Kali Pendampingan	122,193,107	APBD		128,302,762

6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang terlaksana	Mamuju Tengah	1 Kali Pendampingan	121,275,000	APBD		127,338,750
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Rapat koordinasi serta pengawasan yang dilaksanakan terkait MCP KPK	Mamuju Tengah	1 Kali Pendampingan	106,942,500	APBD		112,289,625
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Yang Terlaksana	Mamuju Tengah	2 Kali Pendampingan	79,159,500	APBD		83,117,475
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**3,072,696,313**	**APBD**		**165,450,000**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**163,250,000**	**APBD**		**37,000,000**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	2 Dokumen	37,000,000	APBD		25,000,000
6	01	03	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	25,000,000	APBD		29,000,000
6	01	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	29,000,000	APBD		29,700,000
6	01	03	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	29,700,000	APBD		24,200,000

6	01	03	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	22,000,000	APBD		20,550,000
6	01	03	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	20,550,000	APBD		1,968,364,602
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**1,874,632,954**	**APBD**		**1,917,862,638**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Mamuju Tengah	24 orang	1,826,535,846	APBD		24,727,500
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	23,550,000	APBD		25,774,464
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	Mamuju Tengah	4 Dokumen	24,547,108	APBD		531,807,038
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai Perangkat daerah yang dilayani**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**506,482,893**	**APBD**		**132,300,000**
6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai PD berdisiplin baik	Mamuju Tengah	24 Orang	126,000,000	APBD		64,508,653
6	01	03	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Mamuju Tengah	31 Pasang	61,436,813	APBD		334,998,385
6	01	03	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Fungsi	Mamuju Tengah	24 Orang	319,046,081	APBD		305,225,185
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**290,690,653**	**APBD**		**5,440,838**
6	01	03	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	Mamuju Tengah	10 Buah	5,181,750	APBD		145,739,199

6	01	03	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	1 Unit	138,799,238	APBD		6,088,866
6	01	03	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga PD yang disediakan	Mamuju Tengah	12 Buah	5,798,920	APBD		46,189,238
6	01	03	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	18000 kotak	43,989,750	APBD		42,846,595
6	01	03	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Mamuju Tengah	36025 Lembar	40,806,281	APBD		58,920,450
6	01	03	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	Mamuju Tengah	80 Kali	56,114,714	APBD		2,323,000,000
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**72,000,000**	**APBD**		**-**
6	01	03	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	Mamuju Tengah	-	-	APBD		-
6	01	03	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Mamuju Tengah	3 unit	-	APBD		-
6	01	03	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Mamuju Tengah	1 Unit	30,000,000	APBD		-
6	01	03	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	17 Unit	42,000,000	APBD		2,000,000,000
6	01	03	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	-	-	APBD		323,000,000
6	01	03	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	-	-	APBD		88,300,000

6	**01**	**03**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**88,300,000**	**APBD**		**6,000,000**
6	01	03	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Mamuju Tengah	2 orang	6,000,000	APBD		47,300,000
6	01	03	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Mamuju Tengah	1669 Kwh 50 Mbps 50 M3	47,300,000	APBD		35,000,000
6	01	03	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	4 Orang	35,000,000	APBD		85,073,794
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**77,339,813**	**APBD**		**41,000,000**
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Mamuju Tengah	1 Unit	40,500,000	APBD		28,350,000
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Mamuju Tengah	13 Unit	27,000,000	APBD		10,331,803
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Mamuju Tengah	6 Unit	9,839,813	APBD		35,500,000
6	01	01	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Mamuju Tengah	-	-	APBD		-

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Mamuju Tengah yaitu **“Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera Dalam Bingkai La’la Tassisara”.**

RENCANA KERJA

KECAMATAN TOPOYO

TAHUN 2024

KECAMATAN TOPOYO

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Topoyo Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tooyo Kabupaten Mamuju Tengah dimaksudkan untuk memenuhi Rencana Kerja Kabupaten Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Topoyo Tahun Anggaran 2024 ini, oleh sebab itu mohon kritik dan saran dari berbagai pihak yang terkait.

Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini.

Topoyo, Janiari 2024

CAMAT TOPOYO

MASRI R., S.Pd
Pangkat: Penata Tk I/ III/d
NIP. 19770310 200906 1 003

DAFTAR IS

SAMPUL.....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Landasan Hukum .....

1.3 Maksud dan Tujuan .....

1.4 Sistematika Penulis .....

BAB II Hasil Evaluasi Kecamatan Topoyo Tahun Lalu .....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Topoyo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Topoyo .....

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....

3.2 Program dan Kegiatan kecamatan Topoyo 2024 .....

BAB IV Rencana Kerja Perangkat Daerah .....

4.1 Strategi dan Kebijakan .....

BAB V Penutup.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah. Melalui perencanaan yang baik, diharapkan tujuan pembangunan yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Perikanan (DISKAN) Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1.1.1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan Daerah satu tahun;

1.1.2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Rancangan Renja OPD dibahas pada forum OPD, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Proses penyusunan Rancangan awal RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Rancangan Awal Rencana Kerja Keamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra OPD

Kantor Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah kabupaten Mamuju Tengah dibidang urusan Pelayanan.

Setiap Satuan Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan(RKT).

Acuan utama yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Kecamatan Topoyo.

Penyusunan RENJA berpedoman pada Kecamatan Topoyo dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Topoyo merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Topoyo. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Kerja Kecamatan Topoyo Tahun 2024 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja PD Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ini adalah :

1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundan g- undangan;

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Topoyo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui potensi pembangunan yang perlu untuk digali dan dikembangkan serta diaplikasikan pada tahun-tahun berikutnya ;
2. Untuk mengetahui prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkanbaik dalam program Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan masyarakat ;
3. Untuk mengetahui hambatan dan pemecahan masalah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan secara umum ;

4. Untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan dan yang akan dikeluarkan pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 ;
5. Untuk lebih meningkatkan kinerja, etos kerja dan kemampuan aparat Pemerintah Kecamatan Topoyo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta hasil pembangunannya.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Topoyo Tahun 2023 adalah sebagai pedoman / acuan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kecamatan Topoyo kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penyusunan.

Bab II merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan tahun lalu yang berisi tentang: Evaluasi Pelaksnaan Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III merupakan penjelasan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, yang terdiri dari: Telaahan terhadap kebijakan nasional, Telaahan terhadap kebijakan provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan.

Bab IV merupakan Bab Penutup, yang terdiri dari Penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI KECAMATAN TOPOYO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Topoyo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Topoyo

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan- kebijakan dalam pelaksanaanya serta organisasi pelaksananya

Penyusunan Renja Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 juga memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah -masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sampai dengan tahun 20223 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan	100%	559.200.000	100%	1.406.004.526	100%	1.562.797.595	100%	1.426.757.162	100%	2.832.761.688	100%	56.655.233.760
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	100%	138.000.000	100%	57.951.549	100%	135.989.350	100%	132.909.350	100%	190.860.899	100%	3.817.217.980
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	7.000.000	6	49.813.376	6	6.990.050	6	6.990.050	7	56.803.426	140	1.136.068.520
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	1	3.999.982	1	3.999.800	1	3.999.800	1	7.999.782	20	159.995.640
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.000.000	-	-	1	1.999.900	1	1.899.900	1	1.899.900	20	37.998.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.000.000	1	4.138.191	1	3.999.950	1	3.899.950	1	8.038.141	20	160.762.820
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.000.000	1	-	1	1.999.800	1	1.999.800	1	1.999.800	20	39.996.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	112.000.000	-	-	1	112.000.000	1	109.140.000	1	109.140.000	20	2.182.800.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	5.000.000	3	-	3	4.999.850	3	4.979.850	3	4.979.850	60	99.597.000

		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**100%**	**29.000.000**	**100%**	**1.147.285.973**	**100%**	**1.142.043.608**	**100%**	**975.060.931**	**100%**	**212.236.904**	**100%**	**42.446.938.080**
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	4.000.000	15	1.128.449.468	13	1.117.368.708	13	950.526.031	17	2.078.975.499	340	41.579.509.980
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	4.000.000	100%	3.463.931	1	4.674.900	1	4.654.900	1	8.118.831	20	162.376.620
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	25.000.000	18	15.372.574	18	20.000.000	18	19.880.000	18	35.252.574	360	705.051.480
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100%**	**237.200.000**	**100%**	**77.101.597**	**100%**	**132.426.655**	**100%**	**126.335.440**	**100%**	**203.437.037**	**100%**	**4.068.740.740**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	85.000.000	8	33.681.265	8	29.999.615	8	3.410.250	8	37.091.515	160	741.830.300
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	25.000.000	-	-	10	9.997.250	10	10.321.150	10	10.321.150	200	206.423.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	30.000.000	40	14.748.635	40	14.949.950	40	14.821.010	40	29.569.645	800	591.392.900
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	7.200.000	36	5.060.000	6	7.480.000	6	7.400.000	6	12.460.000	120	249.200.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3000	20.000.000	-	-	2000	10.000.000	2.000	10.000.000	2.000	10.000.000	40.000	200.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	70.000.000	90	23.611.697	100	59.999.840	100	80.383.030	100	103.994.727	2.000	2.079.894.540
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**40.000.000**	**100%**	**6.600.000**	**100%**	**28.499.500**	**101%**	**50.480.663**	**100%**	**57.080.663**	**100%**	**1.141.513.260**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	28.000.000	-	-	4	10.500.000	4	10.500.000	4	10.500.000	80	210.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	12.000.000	1	6.600.000	1	17.999.500	1	39.980.663	1	46.580.663	20	931.613.260

		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**65.000.000**	**100%**	**73.513.445**	**100%**	**80.669.157**	**100%**	**68.600.778**	**100%**	**149.262.935**	**100%**	**2.985.398.700**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	50.000.000	12	47.630.163	12	48.669.975	12	44.129.975	12	92.799.950	240	1.855.999.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	15.000.000	12	10.883.282	12	11.999.282	12	6.570.903	12	18.570.185	40	371.403.700
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	-	2	15.000.000	2	19.999.900	2	17.899.900	2	37.899.800	40	757.996.000
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**43.551.962**	**100%**	**43.169.325**	**100%**	**73.370.000**	**100%**	**116.921.962**	**100%**	**2.338.439.240**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	50.000.000	6	43.551.962	5	43.169.325	6	73.370.000	6	116.921.962	120	2.338.439.240
2.	**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan dan pelayanan di Kantor Kecamatan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan**	**100%**	**135.000.000**	**100%**	**212.487.584**	**100%**	**128.999.516**	**300%**	**112.619.566**	**100%**	**325.107.150**	**100%**	**6.502.143.000**
		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DITINGKAT KECAMATAN	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	**100%**	**100.000.000**	**100%**	**44.412.061**	**100%**	**88.999.816**	**100%**	**65.459.866**	**100%**	**109.871.927**	**100%**	**2.197.438.540**
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	50.000.000	1	44.412.061	2	44.999.866	2	41.459.866	2	85.871.927	40	1.717.438.540
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	50.000.000	-	-	12	43.999.950	12	24.000.000	12	24.000.000	240	480.000.000
		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PEMERINTAHAN DAERAH YANG ADA DIKECAMATAN	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada dkecamatan**	**100%**	**35.000.000**	**100%**	**-**	**100%**	**19.999.800**	**100%**	**19.959.800**	**100%**	**19.959.800**	**100%**	**399.196.000**
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6	35.000.000	-	-	6	19.999.800	6	19.959.800	6	19.959.800	120	399.196.000

		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	Persentase kegiatan yang dilimpahkan ke kecamatan yang mencapai target	**100%**	**35.000.000**	**100%**	**168.075.523**	**100%**	**19.999.900**	**100%**	**27.199.900**	**100%**	**195.275.423**	**100%**	**3.905.508.460**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6	35.000.000	1	168.075.523	1	19.999.900	1	27.199.900	1	195.275.423	20	3.905.508.460
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**68.000.000**	**100%**	**34.717.706**	**100%**	**71.780.074**	**102%**	**50.134.974**	**100%**	**84.852.680**	**100%**	**1.697.053.600**
		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	**Persentase Kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan**	**100%**	**68.000.000**	**100%**	**34.717.706**	**100%**	**71.780.074**	**102%**	**50.134.974**	**100%**	**84.852.680**	**100%**	**1.697.053.600**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1			-	1	34.999.950	3	34.999.950	4	34.999.950	80	699.999.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	350	68.000.000	100	34.717.706	100	36.780.124	100	15.135.024	110	49.852.730	2.200	997.054.600
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan**	**100%**	**55.000.000**	**100%**	**4.699.800**	**100%**	**19.999.650**	**100%**	**19.919.650**	**100%**	**24.619.450**	**100%**	**492.389.000**
		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase kasus yang terselesaikan**	**100%**	**55.000.000**	**100%**	**4.699.800**	**100%**	**19.999.650**	**100%**	**19.919.650**	**100%**	**24.619.450**	**100%**	**492.389.000**
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	55.000.000	1	4.699.800	1	19.999.650	1	19.919.650	1	24.619.450	20	492.389.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk**	**100%**	**47.000.000**	**100%**	**75.604.550**	**100%**	**44.999.750**	**100%**	**35.579.750**	**100%**	**111.184.300**	**100%**	**2.223.686.000**
		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Persentase kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan	**100%**	**47.000.000**	**100%**	**75.604.550**	**100%**	**44.999.750**	**100%**	**35.579.750**	**100%**	**111.184.300**	**100%**	**2.223.686.000**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65	37.000.000	50	20.104.750	55	34.999.850	55	32.479.850	55	52.584.600	1.100	1.051.692.000
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2	10.000.000	0	55.499.800	10	9.999.900	10	3.099.900	10	58.599.700	200	1.171.994.000

3.	**Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	**100%**	**55.000.000**	**100%**	**44.256.497**	**100%**	**19.999.900**	**100%**	**16379900**	**100%**	**60.636.397**	**100%**	**1.212.727.940**
		FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	**100%**	**55.000.000**	**100%**	**44.256.497**	**100%**	**19.999.900**	**100%**	**16379900**	**100%**	**60.636.397**	**100%**	**1.212.727.940**
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	**15**	55.000.000	**15**	44.256.497	**15**	19.999.900	**15**	**16379900**		**60.636.397**	**0**	**1.212.727.940**

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Topoyo 3 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Tidak terdapat Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja sampai saat ini belum ada program/kegiatan yang telah melebihi target yang telah ditentukan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Adapun implikasi yang timbul dari program kerja Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah berupa adanya peningkatan dedikasi sumber daya aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perikanan Kab. Mamuju Tengah.
4. Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah:
    - Mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud;
    - Memberikan argumentasi/presentasi atas program/kegiatan sehingga nantinya akan mengarah pada terwujudnya Pembangunan di Kecamatan Topoyo.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Topoyo dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Kecamatan Topoyo Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator –indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan yang diselenggarakan Pemerinah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional yang dikenal dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem musrenbang sudah dikembangkan lebih baik, dalam pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut diatas Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah selaku OPD yang menangani urusan Pilihan Kecamatan Topoyo mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi, baik antar daerah antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksana dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam hal pengusulan Program dan Kegiatan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan dan bekelanjuta

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya di tentukan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Topoyo.

Kecamatan Topoyo Kab.Mamuju Tengah dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Isu- isu strategis dimaksud antara lain:

1. Faktorsosiologis :

   Kecamatan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan.Dengan jumlah penduduk yang banyak dan terletak di Ibu kota Kec.Topoyo mempunyai kontribusi yang besar dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan.

1. Faktor ekonomi:

   Sebagian besar wilayah Kecamatan Topoyo merupakan wilayah perdagangan dan jasa, menuntut penyediaan layanan yang cepat, akurat,efektif, efisien dan akuntable.

2. Faktor pendidikan :

masyarakat Tingkat pendidikan yang relative menengah kebawah menjadi perhatian Pemerintah Kecamatan mendorong partisipasi dan kreatifitas masyarakat.

3. Faktor Kesehatan Masyarakat :

   Kesadaran dan perilaku warga perlu diarahkan dalam mewujudkan Perilaku HidupBersih dan Sehat.

4. Faktor keamanan dan kenyamanan lingkungan Masyarakat:

   Koordinasi dan kerja sama antara Linmas Desa dengan pembinaan Forkopimkasetempat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk menjaga bahwa Perencanaan Pembangunan yang direncanakan agar tetap dalam koridor yang ada dan sesuai dengan yang diinginkan, tentunya Kecamatan Topoyo harus melakukan review Terhadap Program Kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan untuk mengetahui bahwa program dan kegiatan tersebut masih layak atau tidak untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi aktual yang ada.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cacatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Belanja Langsung					**Belanja Lan gsung**					
A	**Kegiatan Rutin**	**Kecamatan Topoyo**				**KegiatanRutin**	**Kecamatan Topoyo**				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan**	**100%**	**1.716.949.468**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan**	**100%**	**1.716.949.468**	
1. 1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu**	**100%**	**138.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu**	**100%**	**138.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	112.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	112.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokuemen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokuemen	5.000.000	
1. 2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**100%**	**1.190.449.468**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**100%**	**1.190.449.468**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Topoyo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 PNS	1.128.449.468	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Topoyo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 PNS	1.128.449.468	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Topoyo	Jumlah Aparatur Sipil Negara	15 PNS	15.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Topoyo	Jumlah Aparatur Sipil Negara	15 PNS	15.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Kegiatan yang dikoordinasikan	1 Kegiatan	18.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Kegiatan yang dikoordinasikan	1 Kegiatan	18.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	25.000.000	
1. 3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100 %**	**70.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100 %**	**70.000.000**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Topoyo	Jumlah sarana pendukung Disiplin PNS	3 Unit	20.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Topoyo	Jumlah sarana pendukung Disiplin PNS	3 Unit	20.000.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Topoyo	Jumlah dokumen monev dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen	10.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Topoyo	Jumlah dokumen monev dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen	10.000.000	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah pegawai yang memahami peraturan perundang-undangan	80 Orang	15.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah pegawai yang memahami peraturan perundang-undangan	80 Orang	15.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan	4 Orang	25.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan	4 Orang	25.000.000	
1. 4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**177.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**177.500.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah jenis komponen	12 Jenis	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah jenis komponen	12 Jenis	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Buah	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Buah	45.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Buah	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Buah	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan	5 Buah	2.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan	5 Buah	2.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Dokumen	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Examplar	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Examplar	10.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Topoyo	Jumlah Bahan Material	10 Jenis	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Topoyo	Jumlah Bahan Material	10 Jenis	15.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3000 Orang	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3000 Orang	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Kali	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Kali	50.000.000	

1. 5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**20.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**20.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Buah	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Buah	10.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Topoyo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Topoyo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	10.000.000	
1. 6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**121.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**121.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Jenis	50.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Jenis	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Jenis	15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Jenis	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Jenis	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Jenis	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 dokuemn	20.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 dokuemn	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Topoyo	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	16.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Topoyo	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	16.000.000	
1. 7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**50.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**50.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan	7 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan	7 Unit	50.000.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan**	**100%**	**202.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan**	**100%**	**202.000.000**	

2. 1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**95.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**95.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	45.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	45.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	50.000.000	
2. 2	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada dkecamatan**	**100%**	**80.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada dkecamatan**	**100%**	**80.000.000**	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat yang direncanakan	6 Kegiatan	25.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat yang direncanakan	6 Kegiatan	25.000.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 OPD	35.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 OPD	35.000.000	
	Peningkatan Efektivitas pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah mengenai fasilitas pemerintah atau pelayanan umum	15 Layanan	20.000.000	Peningkatan Efektivitas pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah mengenai fasilitas pemerintah atau pelayanan umum	15 Layanan	20.000.000	
2. 3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Persentase kegiatan yang dilimpahkan ke kecamatan yang mencapai target**	**100%**	**27.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Persentase kegiatan yang dilimpahkan ke kecamatan yang mencapai target**	**100%**	**27.000.000**	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Kegiatan	27.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Kegiatan	27.000.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**308.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**308.000.000**	

3. 1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan**	**100%**	**113.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan**	**100%**	**113.000.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan	45.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan	45.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	350 Orang	68.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	350 Orang	68.000.000	
3. 2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan di kelurahan**	**100%**	**73.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan di kelurahan**	**100%**	**73.000.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Topoyo	Jumlah peserta yang hadir dalam Musrembang	300 Orang	45.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Topoyo	Jumlah peserta yang hadir dalam Musrembang	300 Orang	45.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Topoyo	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan	100 Orang	28.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Topoyo	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan	100 Orang	28.000.000	
3. 3	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina**	**100%**	**122.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina**	**100%**	**122.000.000**	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	40.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	40.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Sarpras lembaga kemasyarakatan	1 Unit	25.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Sarpras lembaga kemasyarakatan	1 Unit	25.000.000	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Topoyo	Jumlah lembaga kemasyarakat yang difasilitasi	1 Lembaga	57.000.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Topoyo	Jumlah lembaga kemasyarakat yang difasilitasi	1 Lembaga	57.000.000	

4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan**	**100%**	**90.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan**	**100%**	**90.000.000**	
4. 1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase kasus yang terselesaikan**	**100%**	**55.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase kasus yang terselesaikan**	**100%**	**55.000.000**	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	55.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	55.000.000	
4. 2	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**100%**	**35.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**100%**	**35.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Topoyo	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	35.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Topoyo	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	35.000.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk**	**100%**	**154.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk**	**100%**	**154.000.000**	
5. 1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan**	**100%**	**154.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan**	**100%**	**154.000.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Topoyo	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan	55 Orang	23.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Topoyo	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan	55 Orang	23.000.000	

	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang	37.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang	37.000.000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Topoyo	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, Ras, dan Golongan	65 Orang	24.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Topoyo	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, Ras, dan Golongan	65 Orang	24.000.000	
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Kasus	10.000.000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Kasus	10.000.000	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Topoyo	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terlaksana	1 Kegiatan	45.000.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Topoyo	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terlaksana	1 Kegiatan	45.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Topoyo	jumlah kegiatan forum koordinasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	15.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Topoyo	jumlah kegiatan forum koordinasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	15.000.000	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	**100%**	**298.256.497**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	**100%**	**298.256.497**	
6. 1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan**	**100%**	**298.256.497**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan**	**100%**	**298.256.497**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	30.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	30.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	10.000.000	

	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	21.000.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	21.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	10.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	10.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	15.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	15.000.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah rekomendasi	30 Rekomendasi	15.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah rekomendasi	30 Rekomendasi	15.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	45.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	45.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	25.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	25.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	10.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	10.000.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	23.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	23.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	30.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	30.000.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa	15 Desa	20.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa	15 Desa	20.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa	15 Desa	44.256.497	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Desa	15 Desa	44.256.497	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Topoyo Tahun 2024, mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan oleh peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 - 2026 dan Hasil Pelaksanaan Musrembang di Kecamatan Topoyo. Dimana tujuan pembuatan Ranwal renja Tahun 2024 lebih terfokus kepada pembangunan infrastruktur fasilitas atau sarana prasarana masyarakat, meningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian program pembangunan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor kecamatan Topoyo.

Dalam perencanaan kinerja Kecamatan Topoyo merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis lokasi, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan RI. Dengan perencanaan yang strategis yang jelas dan sinsergis, instansi Pemerintah dapat menyelaraskan visi misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Topoyo, maka diperlukan arah kebijakan yang menjadi prioritas. Dalam arah kebijakan ini memuat juga tujuan, dan Sasaran.

Adapun Tujuan dan Sasaran Perankat Daerah Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah adalah Sebagai Berikut :

1. Tujuan

Tujuan Pembangunan Kecamatan Topoyo untuk Priode diarahkan kepada :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kecamatan;
2. Mengadakan rapat kordinasi satu kali dalam satu bulan dan konsultasi keluar dan dalam daerah;
3. Meningkatkan disiplin administrasi perkantoran;
4. Meningkatkan peran aktif dan control masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan;

5. Meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan;
6. Meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
7. Meningkatkan kinerja petugas pelayanan dengan SDM yang handal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal;
8. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

2. Sasaran Renja

Adapun sasaran dari renja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi Kebutuhan Pelengkapan Administrasi dan ATK Perkantoran ;
2. Memenuhi Kebutuhan Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah.
3. Menyediakan kebutuhan kebersihan gedung dan lingkungan Kantor.
4. Memberikan kesempatan Kepada staf atau Pegawai untuk melakukan DIKLAT dan Pelatihan (LATPIM).
5. Memenuhi Kelengkapan sarana dan prasarana Gedung Kantor.
6. Mendapatkan juara dalam kegiatan lomba atau event-event nasional atau tingkat kota seperti MTQ dan Kegiatan Hari hari Besar lainnya

a. Meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga rencana kerja

merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan oleh indikator kinerja kegiatan, Rencana Kerja Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tabel dilembaran berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

NO	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			Cacatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1		*2*	*4*		*5*	*6*	*12*		*5*
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan**		**100%**	**1.766.949.468**		**100%**	**1.984.949.468**
1. 1	**07.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu**		**100%**	**138.000.000**		**100%**	**164.000.000**
	07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	6 Dokumen	7.000.000		6 Dokumen	15.000.000
	07.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	5.000.000		1 Dokumen	10.000.000
	07.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	2.000.000		1 Dokumen	10.000.000
	07.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	5.000.000		1 Dokumen	5.000.000

	07.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	2.000.000		1 Dokumen	2.000.000
	07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	5 Dokumen	112.000.000		5 Dokumen	112.000.000
	07.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	3 Dokuemen	5.000.000		3 Dokuemen	10.000.000
1. 2	**07.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**		**100%**	**1.190.449.468**		**100%**	**1.312.449.468**
	07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju Tengah	15 PNS	1.128.449.468		15 PNS	1.250.449.468
	07.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara	Mamuju Tengah	15 PNS	15.000.000		15 PNS	15.000.000
	07.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan yang dikoordinasikan	Mamuju Tengah	1 Kegiatan	18.000.000		1 Kegiatan	18.000.000
	07.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	4.000.000		1 Dokumen	4.000.000
	07.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju Tengah	18 Dokumen	25.000.000		18 Dokumen	25.000.000
1. 3	**07.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**		**100 %**	**70.000.000**			**70.000.000**
	07.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana pendukung Disiplin PNS	Mamuju Tengah	3 Unit	20.000.000		3 Unit	20.000.000
	07.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monev dan penilaian kinerja pegawai	Mamuju Tengah	2 Dokumen	10.000.000		2 Dokumen	10.000.000
	07.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memahami peraturan perundang-undangan	Mamuju Tengah	80 Orang	15.000.000		80 Orang	15.000.000

	07.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan	Mamuju Tengah	4 Orang	25.000.000		4 Orang	25.000.000
1. 4	**07.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**		**100%**	**177.500.000**		**100%**	**177.500.000**
	07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	Mamuju Tengah	12 Jenis	15.000.000		12 Jenis	15.000.000
	07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	4 Buah	45.000.000		4 Buah	45.000.000
	07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mamuju Tengah	4 Buah	5.000.000		4 Buah	5.000.000
	07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	5 Buah	2.500.000		5 Buah	2.500.000
	07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mamuju Tengah	50 Dokumen	15.000.000		50 Dokumen	15.000.000
	07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mamuju Tengah	40 Examplar	10.000.000		40 Examplar	10.000.000
	07.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Material	Mamuju Tengah	10 Jenis	15.000.000		10 Jenis	15.000.000
	07.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	3000 Orang	20.000.000		3000 Orang	20.000.000
	07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	80 Kali	50.000.000		80 Kali	50.000.000
1. 5	**07.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**		**100 %**	**70.000.000**		**100%**	**130.000.000**
	07.01.01.2.07.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan	Mamuju Tengah	7 Unit	50.000.000		7 Unit	50.000.000
	07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mamuju Tengah	2 Buah	10.000.000		5 Buah	30.000.000

	07.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mamuju Tengah	1 Unit	10.000.000		1 Unit	50.000.000
1. 6	**07.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**		**100%**	**121.000.000**		**100%**	**131.000.000**
	07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju Tengah	12 Jenis	50.000.000		12 Jenis	55.000.000
	07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mamuju Tengah	2 Jenis	15.000.000		2 Jenis	20.000.000
	07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	2 Jenis	20.000.000		2 Jenis	20.000.000
	07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	3 dokuemn	20.000.000		3 dokuemn	20.000.000
	07.01.01.2.08.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Mamuju Tengah	100%	16.000.000		100%	16.000.000
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan**		**100%**	**202.000.000**		**100%**	**2.675.512.994**
2. 1	**7.01.02.2.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan**		**100%**	**95.000.000**		**100%**	**100.000.000**
	7.01.02.2.01.10	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Mamuju Tengah	1 Kegiatan	45.000.000		1 Kegiatan	50.000.000
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Mamuju Tengah	12 Kegiatan	50.000.000		12 Kegiatan	50.000.000

2. 2	**7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada dkecamatan**		**100%**	**80.000.000**		**100%**	**105.000.000**
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat yang direncanakan	Mamuju Tengah	6 Kegiatan	25.000.000		6 Kegiatan	30.000.000
	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Mamuju Tengah	6 OPD	35.000.000		6 OPD	50.000.000
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah mengenai fasilitas pemerintah atau pelayanan umum	Mamuju Tengah	15 Layanan	20.000.000		15 Layanan	25.000.000
2. 3	**7.01.02.2.4**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase kegiatan yang dilimpahkan ke kecamatan yang mencapai target**		**100%**	**27.000.000**		**100%**	**2.470.512.994**
	7.01.02.2.4.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Mamuju Tengah	3 Kegiatan	27.000.000		3 Kegiatan	30.000.000
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan**		**100%**	**308.000.000**		**100%**	**355.000.000**
3. 1	**7.01.03.2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan**		**100%**	**113.000.000**		**100%**	**125.000.000**
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Mamuju Tengah	1 Kegiatan	45.000.000		1 Kegiatan	50.000.000
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Mamuju Tengah	350 Orang	68.000.000		400 Orang	75.000.000

3. 2	**7.01.03.2.02**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan di kelurahan**		**100%**	**73.000.000**		**100%**	**108.000.000**
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir dalam Musrembang	Mamuju Tengah	300 Orang	45.000.000		500 Orang	80.000.000
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan	Mamuju Tengah	100 Orang	28.000.000		100 Orang	28.000.000
3. 3	**7.01.03.2.03**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina**		**100%**	**122.000.000**		**100%**	**122.000.000**
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	Mamuju Tengah	1 Lembaga	40.000.000		1 Lembaga	40.000.000
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarpras lembaga kemasyarakatan	Mamuju Tengah	1 Unit	25.000.000		1 Unit	25.000.000
	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah lembaga kemasyarakat yang difasilitasi	Mamuju Tengah	1 Lembaga	57.000.000		1 Lembaga	57.000.000
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan**		**100%**	**90.000.000**		**100%**	**90.000.000**
4. 1	**7.01.04.2.01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase kasus yang terselesaikan**		**100%**	**55.000.000**		**100%**	**55.000.000**
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Mamuju Tengah	1 Kegiatan	55.000.000		1 Kegiatan	55.000.000
4. 2	**7.01.04.2.02**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**		**100%**	**35.000.000**		**100%**	**35.000.000**

	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	Mamuju Tengah	2 Kegiatan	35.000.000		2 Kegiatan	35.000.000
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk**		**100%**	**154.000.000**		**100%**	**169.000.000**
5. 1	**7.01.05.2.01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan**		**100%**	**154.000.000**		**100%**	**169.000.000**
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan	Mamuju Tengah	55 Orang	23.000.000		55 Orang	23.000.000
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Mamuju Tengah	65 Orang	37.000.000		65 Orang	37.000.000
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, Ras, dan Golongan	Mamuju Tengah	65 Orang	24.000.000		65 Orang	24.000.000
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	2 Kasus	10.000.000		2 Kasus	25.000.000
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terlaksana	Mamuju Tengah	1 Kegiatan	45.000.000		1 Kegiatan	45.000.000
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah kegiatan forum koordinasi yang dilaksanakan	Mamuju Tengah	2 Kegiatan	15.000.000		2 Kegiatan	15.000.000

6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**		**100%**	**298.256.497**		**100%**	**299.256.497**
6. 1	**7.01.06.2.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan**		**100%**	**298.256.497**		**100%**	**299.256.497**
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Mamuju Tengah	15 Desa	30.000.000		15 Desa	30.000.000
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Mamuju Tengah	15 Desa	10.000.000		15 Desa	10.000.000
	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang difasilitasi	Mamuju Tengah	15 Desa	21.000.000		15 Desa	21.000.000
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Mamuju Tengah	15 Desa	10.000.000		15 Desa	10.000.000
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Mamuju Tengah	15 Desa	15.000.000		15 Desa	15.000.000
	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi	Mamuju Tengah	30 Rekomendasi	15.000.000		30 Rekomendasi	15.000.000
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Mamuju Tengah	15 Desa	45.000.000		15 Desa	45.000.000
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang difasilitasi	Mamuju Tengah	15 Desa	25.000.000		15 Desa	25.000.000
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa yang difasilitasi	Mamuju Tengah	15 Desa	10.000.000		15 Desa	10.000.000
	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Mamuju Tengah	15 Desa	23.000.000		15 Desa	23.000.000
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Mamuju Tengah	15 Desa	30.000.000		15 Desa	30.000.000
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa	Mamuju Tengah	15 Desa	20.000.000		15 Desa	20.000.000
	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa	Mamuju Tengah	15 Desa	44.256.497		15 Desa	45.256.497
	Total					**2.819.205.965**			**5.573.718.959**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Strategis umum untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut :

1. Pemantapan dan Peningkatan Sumber Daya dan Manajemen Kelembagaan dalam rangka mendukung tugas penjabat Bupati Mamuju Tengah.
2. Pemantapan kualitas pembangunan dalam pelayanan masyarakat yang konsisten dan terpadu dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;
3. Harmonisasi kerjasama antar lembaga multi stakeholders. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Mewujudkan Kecamatan Topoyo sebagai pintu gerbang ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
5. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
7. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
8. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
9. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

2. Kebijakan

Arah kebijakan Pembangunan di Kecamatan Kasemen diarahkan Kepada :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kecamatan;
2. Mengadakan rapat kordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah;
3. Meningkatkan disiplin administrasi perkantoran;

4. Meningkatkan peran aktif dan control masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan;
5. Meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan;
6. Meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
7. Meningkatkan kinerja petugas pelayanan dengan SDM yang handal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal;
8. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi ;

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Topoyo tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja sebagai aparatur kecamatan topoyo sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan efektif dan efisien.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Topoyo selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Topoyo. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kantor Kecamatan Topoyo. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Topoyo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Topoyo Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Topoyo untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Topoyo pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Topoyo, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Topoyo diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Topoyo, Februari 2024

Plt. CAMAT TOPOYO

MASRI R., S.Pd

Nip. 19770310 200906 1 003

RENCANA KERJA



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

T.A. 2024

KATA PENGANTAR

Kami mengawali penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dengan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT dengan harapan agar kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah dapat tercapai dengan baik sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dan program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Renja ini dibuat sebagai acuan bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kami berharap Rencana Kerja (Renja) ini dapat berguna bagi pihak – pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas – tugas dibidang kepegawaian serta kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah selama Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangannya, oleh sebab itu saran dan perbaikan perlu dilakukan agar renja ini dapat mengakomodir kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Tobadak, Juli 2023
Kepala Badan,

Dr. ISHAQ YUNUS, S.IP., M.A.P
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19711011 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II 7
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD 7
Tabel 2.1.1 8
Tabel 2.1.2 12
2.2. Analisis Kinerjs Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34
BAB III 35
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM 35
Tabel 3.2 36
BAB IV 37
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DERAH 37
BAB V 49
PENUTUP 49

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BKPSDM mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPSDM) Kabupaten Mamuju Tengah yang adalah Membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah**,** maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPSDM) Kabupaten Mamuju Tengah menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. dimana Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan,dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019, berlandaskan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,

kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan APBD BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja		Realisasi		Sisa Pagu
		K	Rp	K	Rp.	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Rasio Pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan**	**29,14%**		**47,28%**		
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	**760,87%**	**1.703.960.023**	**88,18%**	**1.695.079.525**	**8.880.498**
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Rasio Antara Jumlah Pengangkatan PNS dengan Jumlah PNS yang Pensiun**	**5,15%**	**799.786.375**	**4,74%**	**799.040.780**	**745.595**
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen ASN yang tersusun	1 Dokumen	15.530.150	1 Dokumen	15.518.150	12.000
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK yang dilaksanakan	5 Usulan	327.166.645	5 Usulan	327.049.878	116.767
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Usulan Berkas Pensiun	26 Orang	43.257.500	26 Orang	42.823.740	433.760
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah pembuatan kelengkapan administrasi kepegawaian	350 Arsip	31.554.480	350 Arsip	31.514.480	40.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase data ASN yang masuk dalam sistem informasi kepegawaian	1 Arsip	50.000.000	1 Arsip	49.920.000	80.000
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang valid	1816 Data	332.277.600	1816 Data	332.214.532	63.068

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja		Realisasi		Sisa Pagu
		K	Rp	K	Rp.	
Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase Pengangkatan dalam jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi**	**96%**	**337.642.538**	**100%**	**331.566.750**	**6.075.788**
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK mutasi PNS yang diterbitkan	85 SK	71.812.040	45 SK	71.807.759	4.281
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat ASN yang diterbitkan	410 SK	160.971.458	346 SK	160.900.346	71.112
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dipromosikan	200	104.859.040	158	98.858.645	6.000.395
Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**100%**	**450.941.610**	**93%**	**448.958.810**	**1.982.800**
Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	20 Orang	41.427.010	20	39.450.010	1.977.000
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang melaksanakan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	9 Orang	409.514.600	7	409.508.800	5.800
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase pelaporan SKP**	**100%**	**115.589.500**	**93%**	**115.513.185**	**76.315**
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	1400 Orang	47.438.200	1400 Orang	47.370.150	68.050
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan satya lencana	65 SK	32.521.150	30 SK	32.513.040	8.110
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	181600%	35.630.150	181600%	35.629.995	155
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan Nakes) (%)**	**24%**	**155.205.835**	**62,36%**	**154.467.875**	**737.960**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja		Realisasi		Sisa Pagu
		K	Rp	K	Rp.	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Jumlah Peserta yang Bersertifikat Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**57**	**155.205.835**	**53**	**154.467.875**	**737.960**
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah pejabat struktural yang ikut diklat kepemimpinan	7 Orang	155.205.835	53	154.467.875	737.960
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase capaian kinerja program perangkat daerah**	**100%**	**1.497.524.461**	**100%**	**1.467.982.331**	**29.542.130**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**24.729.000**	**100%**	**24.729.000**	**-**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	200%	24.729.000	1	24.729.000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**1.180.367.623**	**100%**	**1.151.875.151**	**28.492.472**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	1900%	1.180.367.623	19	1.151.875.151	28.492.472
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**54.809.380**	**100%**	**54.797.200**	**12.180**
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundangan	1900%	61.055.540	19	54.797.200	6.258.340
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**18.072.790**	**100%**	**18.072.200**	**590**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja		Realisasi		Sisa Pagu
		K	Rp	K	Rp.	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	700%	98.378.960	7 Jenis	96.875.500	1.503.460
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	10000%	143.601.000	93 Jenis	143.597.896	3.104
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**254.547.458**	**100%**	**253.509.980**	**1.037.478**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	8400	25.422.458	8400	24.784.980	637.478
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	229.125.000	4 Pelayanan	228.725.000	400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**7.800.000**	**100%**	**7.800.000**	**220.250**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	11	26.820.450	11	26.600.200	220.250
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	7	7.800.000	7 Unit	7.800.000	-

Tabel 2.1.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Resntra perangkat Daerah tahun 2021-2026)	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja BKPP Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Target Renstra BKPP s/d Tahun Berjalan 2023	
				Target Renja BKPP Tahun 2022	Realisasi Renja BKPP Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=4+6	10=9/3
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan Nakes) (%)**	**100%**	**22,11%**	**23,68%**	**62,36%**	**100%**	**44,74%**	**84%**	**84,47%**
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Jumlah Peserta yang Bersertifikat Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**129**	**6**	**57**	**53**	**93%**	**102**	**59**	**45,74%**
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional	Jumlah peraturan terkait kediklatan yang disusun	1	1	-	0	**0%**	1	100%	100,00%

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta yang lulus pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	7	6	7 Orang	53 Orang	757%	7 Orang	59 Orang	100,00%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Rasio Pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan**	**29%**	**31,67%**	**29,14%**	**47,28%**	100%	**47,94%**	**39,48%**	**100,00%**
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	**1112%**	**757%**	**761%**	**88,18%**		**92,96%**	**845,32%**	**76,00%**
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Rasio Antara Jumlah PNS yang Pensiun dengan Jumlah Pengangkatan PNS**	**8,02%**	**100%**	**5,15%**	**83%**	100%	**0,64%**	**100%**	**100%**
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Juklat Juknis Pengadaan ASN yang tersusun	1	0	0	0	0%	1	0	0,00%
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen ASN yang tersusun	1	1	1	1	100%	1	1	100,00%
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK yang dilaksanakan	5	0	5	5	100%	5 SK	5	100,00%
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Seleksi Penerimaan ASN	1	0	0	0	0%	1	0	0,00%

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Usulan Berkas Pensiun	42	20	26	26	100%	33	46	100,00%
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah pembuatan kelengkapan administrasi kepegawaian	450	341	350	350	100%	380	691	100,00%
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah perbub yang ditetapkan	1	0	0	0	0%	0	0	0,00%
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase data ASN yang masuk dalam sistem informasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	100,00%
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah arsip dokumen kepegawaian yang dikelola	1705	0	0	0 SK	0%	1783 SK	0	0,00%
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang valid	1705	1842	1816	1816	100%	1783	3658	100,00%
Mutasi dan Promosi	**Persentase Pengangkatan dalam jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi**	**99%**	**100%**	**96%**	**79,00%**	**82%**	**97%**	**89,50%**	**90,40%**
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK mutasi PNS yang diterbitkan	95	239	85	45	53%	90	284	100,00%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Jumlah SK kenaikan pangkat ASN yang diterbitkan	425	118	410	346	84%	415	464	100,00%
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dipromosikan	200	196	200	158	79%	50	354	100,00%

Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**100%**	**64%**	**100%**	**93%**	**93%**	**100%**	**1,57**	**100,00%**
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang bersertifikat	25	0	0	0	0%	25 Orang	0	0,00%
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat yang selesai mengikuti Assessment Lelang Jabatan	50	31	0	0	0%	50	31	62,00%
Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	20	0	20	20	100%	0	20	100,00%
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang melaksanakan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	15	6	9	7	78%	11	13	86,67%
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Lembaga diklat yang dikerjasamakan	3	0	0	0	0%	3	0	0,00%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase pelaporan SKP**	**100%**	**100%**	**100%**	**99%**	**99%**	**100%**	**100%**	**99,50%**
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah perbub penilaian dan evaluasi kinerja yang ditetapkan	1	0	0	0	0%	0	0	0,00%
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	1800	1400	1400	1400	100%	1500	1400	77,78%
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pengawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan satya lencana	300	49	65	30	46%	70	79	26,33%

Pembinaan Disiplin ASN	Persentase PNS yang mendapatkan pembinaan disiplin	20%	0%	0,2	1816	100%	0,2	1816	100,00%
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan	100%	0	0	0	0%	1	0	0,00%
Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Kegiatan Evaluasi Displin ASN yang terlaksana	4	0	0	0	0%	4	0	0,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase capaian kinerja program perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	2	0	2	2	100%	2%	2	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	1	0	0	0	0%	1	0	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1	0	0	0	0%	1	0	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	1	0	0	0	0%	0,01	0	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	19	19	19 Orang	19 Orang	100%	19	19	100,00%

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN	19	19	0	0	0%	19	19	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1	0	0	0	0%	1 Dokumen	0	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	1	0	0	0	0%	1 Dokumen	0	0,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100%**	**0**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50,00%**
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD-PD	1	0	0	0	0%	1	0	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	19	0	0	0	0%	0%	0	0,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai PD	19	0	0	0	0%	19	0	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi	2	0	0	0	0%	2	0	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	10	0	0	0	0%	0	0	0,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundangan	19	19	19	19	0%	19	19	100,00%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	7	7	7	100%	7	7	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2	0	2	0	0%	2 Jenis	0	0,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	8	0	8	0	0%	8	0	0,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	100	0	100	0	0%	100	0	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	100	0	100	93	93%	100 Kali	93	93,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**0%**	**100%**	**0%**	**0,00%**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	2	0	0	0	0%	0	0	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4	0	0	0	0%	0	0	0,00%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	0	0	0	0%	-	0	0,00%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**0**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50,00%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	750	0	750 Surat	0	0%	750 Surat	0	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	8400	0	8400	8400	0%	8400Gb	8400	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	0	4	4	100%	4	4	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	11	11	11	11	100%	11	11	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	7	0	7	7	100%	7	7	100,00%

2.2. Analisis Kinerjs Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Mamuju Tengah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Rekapitulasi dari Capaian Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2. Tabel Pencapaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menurut Permendagri 18 Tahun 2020

No	IKK Outcome	SPM Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2021	*2022*	*2023*	*2024*	*2021*	*2022*	*2024*	*2025*
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Nakes	-	0	702,70%	760,87%	828,13%	94,25%	757,14%	88,18%	94,25%	95,56%
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk Guru dan Nakes	-	0	6,90%	29,14%	29,14%	48,61%	31,67%	47,28%	48,61%	49,27%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk Guru dan Nakes	-	0	95,56%	23,68%	44,74%	65,17%	22,11%	62,36%	65,17%	66,57%

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Terkait dengan kepegawaian, BKPSDM dituntut untuk lebih berperan besar dalam perumusan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat serta kesejahteraan pegawai;
2. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah ;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ;
4. Pembinaan pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penerapan e-govement sesuai dengan tuntutan jaman dan keterbukaan informasi yang dapat diakses publik.

2.3.2. Sumber Daya Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme

2.3.3. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonomi harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Mamuju Tengah menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju 2025	
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Target**	**Pagu Indikatif**
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan**	Mamuju Tengah	**94,25%**	**1766463981**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan**	Mamuju Tengah	**94,25%**	**1.766.463.981**	**95,56%**	**1.827.738.733**
	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Mamuju Tengah	**65,17%**			**Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	Mamuju Tengah	**65,17%**		**66,57%**	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah**	Mamuju Tengah	**51,08%**	**398959000**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah**	Mamuju Tengah	**51,08%**	**398.959.000**	**62,32%**	**414.960.094**
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Mamuju Tengah	1 Dokumen	21152750	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Mamuju Tengah	1 Dokumen	21.152.750	1 Dokumen	27.717.947
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Mamuju Tengah	2	26780625	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Mamuju Tengah	2	26.780.625	2	27.717.947

Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju 2025	
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Mamuju Tengah	300	80341875	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Mamuju Tengah	300	80.341.875	200	83.153.841
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Mamuju Tengah	1	13390312,5	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Mamuju Tengah	1	13.390.313	1	13.858.973
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Mamuju Tengah	1	13390312,5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Mamuju Tengah	1	13.390.313	1	13.858.973
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Mamuju Tengah	40	26780625	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Mamuju Tengah	40	26.780.625	35	27.717.947
Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian	Mamuju Tengah	1	26780625	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian	Mamuju Tengah	1	26.780.625	1	26.780.625
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Mamuju Tengah	1	50883187,5	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Mamuju Tengah	1	50.883.188	1	52.664.099
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Mamuju Tengah	1	10000000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Mamuju Tengah	1	10.000.000	1	11.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju Tengah	1	100000000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju Tengah	1	100.000.000	1	100.000.000
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Mamuju Tengah	1800 Dokumen	13390312,5	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Mamuju Tengah	1800 Dokumen	13.390.313	1800 Dokumen	13.858.973

Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju 2025	
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju Tengah	1	16068375	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju Tengah	1	16.068.375	1	16.630.768
Mutasi dan Promosi	**Persentase Jabatan Struktural yang terisi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi**	Mamuju Tengah	**100%**	**150418716,1**	**Mutasi dan Promosi**	**Persentase Jabatan Struktural yang terisi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi**	Mamuju Tengah	**100%**	**150.418.716**	**100,00%**	**155.683.371**
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Mamuju Tengah	50 Dokumen	32136750	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Mamuju Tengah	50 Dokumen	32.136.750	50 Dokumen	33.261.536
Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Mamuju Tengah	200	96857466,06	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Mamuju Tengah	200	96.857.466	200	100.247.477
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	Mamuju Tengah	50 Dokumen	21424500	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	Mamuju Tengah	50 Dokumen	21.424.500	50 Dokumen	22.174.358
Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah**	Mamuju Tengah	**100%**	**877758452**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah**	Mamuju Tengah	**100%**	**877.758.452**	**100,00%**	**917.767.455**
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Mamuju Tengah	40	56250000,01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Mamuju Tengah	40	56.250.000	40	56.250.000
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Mamuju Tengah	50	235093042	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Mamuju Tengah	50	235.093.042	35	235.093.042
Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Mamuju Tengah	60	35000000	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Mamuju Tengah	60	35.000.000	75	35.000.000

Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju 2025	
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Mamuju Tengah	50	333808160	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Mamuju Tengah	50	333.808.160	50	373.808.160
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Mamuju Tengah	2	36267875	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Mamuju Tengah	2	36.267.875	3	36.269.376
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Mamuju Tengah	30	36267875	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Mamuju Tengah	30	36.267.875	40	36.269.376
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Mamuju Tengah	2	36267875	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Mamuju Tengah	2	36.267.875	2	36.269.376
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Mamuju Tengah	25	36267875	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Mamuju Tengah	25	36.267.875	30	36.269.376
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Mamuju Tengah	40	36267875	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Mamuju Tengah	40	36.267.875	45	36.269.376
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan	Mamuju Tengah	3	36267875	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan	Mamuju Tengah	3	36.267.875	4 dokumen	36.269.376
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik**	Mamuju Tengah	**100%**	**339327813**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik**	Mamuju Tengah	**100%**	**339.327.813**	**100,00%**	**339.327.813**
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Mamuju Tengah	1 Dokumen	21152750	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Mamuju Tengah	1 Dokumen	21.152.750	1 Dokumen	21.152.750

Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju 2025	
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Mamuju Tengah	1 Dokumen	17417003	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Mamuju Tengah	1 Dokumen	17.417.003	1 Dokumen	17.417.003
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Mamuju Tengah	1 Dokumen	15000000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Mamuju Tengah	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pengawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Mamuju Tengah	30 Orang	72193940	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pengawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Mamuju Tengah	30 Orang	72.193.940	20 Orang	72.193.940
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Mamuju Tengah	3 Orang	25000000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Mamuju Tengah	3 Orang	25.000.000	3 Orang	25.000.000
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Mamuju Tengah	1 Dokumen	25000000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Mamuju Tengah	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Mamuju Tengah	0 Orang	91113650	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Mamuju Tengah	0 Orang	91.113.650	0 Orang	91.113.650
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Mamuju Tengah	1 Laporan	42450470	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Mamuju Tengah	1 Laporan	42.450.470	1 Laporan	42.450.470
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Mamuju Tengah	2	15000000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Mamuju Tengah	2	15.000.000	2	15.000.000
Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Mamuju Tengah	1	15000000	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Mamuju Tengah	1	15.000.000	1	15.000.000
		Mamuju Tengah	65				Mamuju Tengah	65		67	

Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju 2025	
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Target**	**Pagu Indikatif**
		Mamuju Tengah	65				Mamuju Tengah	65		67	
		Mamuju Tengah	0				Mamuju Tengah	0		0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah**	Mamuju Tengah	**100%**	**2744506970**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah**	Mamuju Tengah	**100%**	**2.744.506.970**	**100,00%**	**2.595.977.929**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	Mamuju Tengah	**100%**	**32136750**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	Mamuju Tengah	**100%**	**32.136.750**	**100,00%**	**33.261.536**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	2	10712250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	2	10.712.250	2	11.087.179
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1	5356125	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1	5.356.125	1	5.543.589
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1	5356125	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1	5.356.125	1	5.543.589

Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju 2025	
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	1	10712250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	1	10.712.250	1	11.087.179
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	1	5356125	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	1	5.356.125	1	5.543.589
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	Mamuju Tengah	**100%**	**1685548014**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	Mamuju Tengah	**100%**	**1.685.548.014**	**100,00%**	**1.649.151.787**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju Tengah	17	1535178244	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju Tengah	17	1.535.178.244	17	1.588.909.483
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju Tengah	1	10000000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju Tengah	1	10.000.000	1	10.350.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju Tengah	1	10712250	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju Tengah	1	10.712.250	1	11.087.179
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju Tengah	1	10712250	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju Tengah	1	10.712.250	1	11.087.179

Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju 2025	
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju Tengah	1	10712250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju Tengah	1	10.712.250	1	11.087.179
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju Tengah	1	16068375	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju Tengah	1	16.068.375	1	16.630.768
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	Mamuju Tengah	**1**	**5356125**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	Mamuju Tengah	**1**	**5.356.125**	**100,00%**	**5.543.589**
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju Tengah	1	5356125	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju Tengah	1	5.356.125	1	5.543.589
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju Tengah	1	5356125	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju Tengah	1	5.356.125	1	5.543.589
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	Mamuju Tengah	**100%**	**158834750**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	Mamuju Tengah	**100%**	**158.834.750**	**100,00%**	**214.393.966**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mamuju Tengah	1	31000000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mamuju Tengah	1	31.000.000	1	32.085.000

Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju 2025	
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju Tengah	1	5356125	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju Tengah	1	5.356.125	1	5.543.589
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju Tengah	1	5356125	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju Tengah	1	5.356.125	1	5.543.589
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mamuju Tengah	2	10000000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mamuju Tengah	2	10.000.000	2	10.350.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	83	107122500	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	83	107.122.500	83	110.871.788
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	-	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	-	-	2	50.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	Mamuju Tengah	**100%**	**301014225**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	Mamuju Tengah	**100%**	**301.014.225**	**100,00%**	**273.561.393**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	1	20353275	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	1	20.353.275	1	21.065.640
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	1	12000000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	1	12.000.000	1	12.420.000

Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju 2025	
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Mamuju Tengah	1	7000000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Mamuju Tengah	1	7.000.000	1	7.245.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	1	10712250	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	1	10.712.250	1	11.087.179
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	100	214245000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	100	214.245.000	100	221.743.575
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	Mamuju Tengah	**100%**	**215920000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	Mamuju Tengah	**100%**	**215.920.000**	**100,00%**	**85.863.600**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Mamuju Tengah	-	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Mamuju Tengah	-	-	1	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mamuju Tengah	1	50000000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mamuju Tengah	1	50.000.000	1	51.750.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mamuju Tengah	5	32960000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mamuju Tengah	5	32.960.000	5	34.113.600
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mamuju Tengah			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mamuju Tengah				

Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju 2025	
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	Mamuju Tengah	**100%**	**32960000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	Mamuju Tengah	**100%**	**32.960.000**	**100,00%**	**34.113.600**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju Tengah	1	290244128,9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju Tengah	1	290.244.129	1	291.149.314
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mamuju Tengah	1	7498575	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mamuju Tengah	1	7.498.575	1	7.761.025
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	-	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	Mamuju Tengah	**100%**	**273805110**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	Mamuju Tengah	**100%**	**273.805.110**	**100,00%**	**283.388.289**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mamuju Tengah	1	31596852,6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mamuju Tengah	1	31.596.853	1	43.052.742
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mamuju Tengah	12	23991155,1	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mamuju Tengah	12	23.991.155	12	24.830.846
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mamuju Tengah	5	10000000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mamuju Tengah	5	10.000.000	5	10.350.000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Mamuju Tengah	8	7605697,5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Mamuju Tengah	8	7.605.698	8	7.871.897

Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju 2025	
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Mamuju Tengah	1	50000000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Mamuju Tengah	1	50.000.000	1	51.750.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tengah akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan elaksanaan musrenbang kecamatan maupun kabupaten.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2018

Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan dan sasaran BKPSDM adalah dimaksudkan untuk mendukung pecapaian target kinerja Visi dan Misi Kepala Daerah, sebagaimana yang telah dibahas pada Bab III bahwa Visi Bupati Mamuju adalah Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla Tasisara yang dijabarkan kedalam 6 misi dimana BKPSDM sebagai Fungsi Penunjang dibidang Pemerintahan masuk kedalam Misi ke 4 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik pada sasaran ke 7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka BKPSDM menetapkan tujuan, sasaran serta target kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun Ke					Kondisi Akhir Periode RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Kinerja ASN Daerah (T1)		Nilai IRB	C	CC	CC	B	B	B
		Meningkatnya Profesionalitas ASN dan penerapan Merit System dalam manajemen ASN (S1)	Indeks Profesionalitas ASN	46.44	50.05	51.00	51.50	51.80	52.00
			Indeks Merit System	0	0.3	0.4	0.5	0.6	0.65
			Indeks Kepuasan ASN	0	76.50	78.50	80.50	82.50	84.50
2	Meningkatnya tata kelola pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (T2)		Indeks RB BKPSDM	50	55	60	65	67	70
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (S2)	Nilai SAKIP BKPSDM	50	55	60	65	67	70
			Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0%	0%	0%	0%	0%	0%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DERAH

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)***	***100***	**1.998.953.768,00**	***(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)***	***ASN BKPSDM***		**2.732.841.519,00**	***BKPSDM***
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)*	*100*	37.492.875,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*100*	38.717.946,00	*BKPSDM*
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*2*	10.712.250,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*2*	11.000.000,00	*BKPSDM*
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*	1	5.356.125,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	1	5.543.589,00	*BKPSDM*
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*	*1*	5.356.125,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	5.543.589,00	*BKPSDM*

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	*1*	10.712.250,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	11.087.179,00	*BKPSDM*
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*1*	5.356.125,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	5.543.589,00	*BKPSDM*
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)***	***100***	**1.256.104.901,00**	***(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)***	***ASN BKPSDM***	***100***	**1.649.151.788,00**	***BKPSDM***
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*17*	1.197.899.776,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*17*	1.588.909.483,00	*BKPSDM*
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	*1*	10.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	10.350.000,00	*BKPSDM*
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*	*1*	10.712.250,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	11.087.179,00	*BKPSDM*
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*	*1*	10.712.250,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	11.087.179,00	*BKPSDM*

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	*1.00*	10.712.250,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1.00*	11.087.179,00	*BKPSDM*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	*1*	16.068.375,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*0.00*	16.630.768,00	*BKPSDM*
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)***	***100***	**10.712.250,00**	***(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)***	*ASN BKPSDM*	***100***	**11.087.178,00**	***BKPSDM***
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*1*	5.356.125,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	5.543.589,00	*BKPSDM*
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*1*	5.356.125,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	5.543.589,00	*BKPSDM*
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)***	***100***	**112.767.790,00**	***(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)***	*ASN BKPSDM*	***100***	**164.393.956,00**	***BKPSDM***
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	*1*	31.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	32.085.000,00	*BKPSDM*

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*	*1*	5.356.125,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	5.543.589,00	*BKPSDM*
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)*	*1*	5.356.125,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	5.543.589,00	*BKPSDM*
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*	*2*	10.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*2*	10.350.000,00	*BKPSDM*
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*	*83*	61.055.540,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*83*	110.871.778,00	*BKPSDM*
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)***	***100***	**250.065.525,00**	***(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)***	*ASN BKPSDM*	***100***	**273.561.394,00**	***BKPSDM***
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1*	20.353.275,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	21.065.640,00	*BKPSDM*
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*	1	12.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	1	12.420.000,00	*BKPSDM*
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*1*	7.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	7.245.000,00	*BKPSDM*

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	*1*	10.712.250,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*Tamu BKPSDM*	*1*	11.087.179,00	*BKPSDM*
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	100	200.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	100	221.743.575,00	*BKPSDM*
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)***	**100**	**92.695.000,00**	***(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)***	***ASN BKPSDM***	**100**	**158.227.200,00**	***BKPSDM***
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*	*5.00*	29.695.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM, ASN Mamuju Tengah*	*5.00*	90.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		*5*	13.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*5*	34.113.600,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		*2*	50.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*2*	34.113.600,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)***	***100***	**976.55188.575,00**	***(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)***	*ASN BKPSDM*	***100***	**291.149.314,00**	***BKPSDM***
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*1*	7.498.575,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	7.761.025,00	*BKPSDM*

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*1*	90.020.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	283.388.289,00	*BKPSDM*
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)*	*100*	141.596.852,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*100*	146.552.743,00	*BKPSDM*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*12*	23.991.155,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*12*	24.830.846,00	*BKPSDM*
Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)*	*5*	10.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*5*	10.350.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*8*	7.605.697,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*8*	7.871.897,00	*BKPSDM*
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)*	*1*	50.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	51.750.000,00	*BKPSDM*
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		*1*	50.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN BKPSDM*	*1*	51.750.000,00	*BKPSDM*

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	***Rasio Pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan (%)***	***29,14***	**2.001.046.232,00**	***(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)***	***ASN Mamuju Tengah***		**1.969.369.485,00**	***BKPSDM***
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan (%)	***906,78***						
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	***Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (%)***	***100***	**629.371.345,00**	***(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)***	***ASN Mamuju Tengah***	***100***	**428.329.325,00**	***BKPSDM***
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dokumen)*	*1.00*	21.152.750,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	27.717.947,00	*BKPSDM*
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)*	*2*	26.780.625,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*2*	27.717.947,00	*BKPSDM*
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)*	*300*	306.377.020,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*200*	83.153.841,00	*BKPSDM*

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)*	*1*	13.390.312,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	13.858.973,00	*BKPSDM*
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	*Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)*	*1*	13.390.312,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	13.858.973,00	*BKPSDM*
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)*	*40*	26.780.625,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*35*	27.717.947,00	*BKPSDM*
Evaluasi Pemberhentian ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen)*	*1*	26.780.625,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	26.780.625,00	*BKPSDM*
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)*	*1*	50.883.187,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	52.664.099,00	*BKPSDM*
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dokumen)*	*1*	10.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	11.000.000,00	*BKPSDM*
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)*	*1*	100.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	100.000.000,00	*BKPSDM*
Pengelolaan Data Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)*	*1800*	13.390.312,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1800*	13.858.973,00	*BKPSDM*

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)*	*1*	20.445.577,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	30.000.000,00	*BKPSDM*
Mutasi dan Promosi ASN	***Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Mutasi dan Promosi (%)***	***100***	**385.240.081,00**	***(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)***	***ASN Mamuju Tengah***	***100***	**390.509.013,00**	***BKPSDM***
Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)*	*50*	32.136.750,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*50*	33.261.536,00	*BKPSDM*
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)*	*200*	96.857.466,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*200*	100.247.477,00	*BKPSDM*
Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)*	*50*	256.245.865,00 663	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*50*	257.000.000,00	*BKPSDM*
Pengembangan Kompetensi ASN	***Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN (%)***	***100***	**809.697.651,00**	***(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)***	*ASN Mamuju Tengah*	***100***	**917.767.454,00**	***BKPSDM***
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	*Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)*	*40*	56.250.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*40*	56.250.000,00	*BKPSDM*

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Assessment Center	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)*	*50*	167.032.241,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*50*	235.093.042,00	*BKPSDM*
Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)*	*60.00*	35.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*75.00*	35.000.000,00	*BKPSDM*
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)*	*50*	333.808.160,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*50*	373.808.160,00	*BKPSDM*
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)*	*2*	36.267.875,00 664	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*3*	36.269.376,00	*BKPSDM*
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)*	*30*	36.267.875,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*40*	36.269.376,00	*BKPSDM*
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional (Dokumen)*	*2*	36.267.875,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*2*	36.269.375,00	*BKPSDM*
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	*Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)*	*25*	36.267.875,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*30*	36.269.375,00	*BKPSDM*
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	*Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)*	*40*	36.267.875,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*45*	36.269.375,00	*BKPSDM*

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (Laporan)*	*3*	36.267.875,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*4*	36.269.375,00	*BKPSDM*
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	***Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (%)***	***100***	**176.737.155,00**	***(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)***	*ASN Mamuju Tengah*	***100***	**232.763.693,00**	***BKPSDM***
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)*	*1*	21.152.750,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	21.152.750,00	*BKPSDM*
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)*	*1*	17.417.003,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	17.417.003,00	*BKPSDM*
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)*	*1*	15.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	15.000.000,00	*BKPSDM*
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)*	*30*	19.718.116,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*20*	72.193.940,00	*BKPSDM*
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)*	*3*	25.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*3*	25.000.000,00	*BKPSDM*

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Dokumen)*	*1*	25.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	25.000.000,00	*BKPSDM*
Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)*	*1.00*	16.868.782,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1.00*	17.000.000,00	*BKPSDM*
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)*	*1*	6.580.504,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	10.000.000,00	*BKPSDM*
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	*Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)*	*2*	15.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*2*	15.000.000,00	*BKPSDM*
Evaluasi Disiplin ASN	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)*	*1*	15.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*ASN Mamuju Tengah*	*1*	15.000.000,00	*BKPSDM*

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Mamuju Tengah dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kab. Mamuju Tengah Tahun 2021 - 2026. Rencana Kerja (Renja) BKPSDM yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Mamuju Tengah.

Renja sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.
b. Kaidah-Kaidah sebagai berikut :
    i. BKPSDM berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kab. MAmuju Tengah Tahun 2024.
    ii. BKPSDM berkewajiban untuk menyusun rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDM 2024 dengan berpedoman kepada Renja BKPSDM Tahun 2024 dan RKPD Mamuju Tengah Tahun 2024.
    iii. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024 wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
c. Rencana Tindak Lanjut

    Rencana Kerja (Renja) BKPSDM selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BKPSDM. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BKPSDM Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

    Semoga keberadaan Renja BKPSDM ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kab. Mamuju Tengah serta

memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kab. Mamuju Tengah.

2024

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Jl. Tammauni Pue Ballung No. 1, Gedung Kantor Bupati Mamuju Tengah, Kompleks KTM. Tobadak, Tobadak, Mamuju Tengah 91563

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Perkenaan dan Rahmat-Nya, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen mengacu Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Visi Kabupaten Mamuju Tengah yaitu "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara*". Untuk mencapai Visi yang telah diuraikan di atas, ditetapkan beberapa Misi Pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga. Dalam Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam pencapaian sasaran dan program Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 ini masih jauh dari sempurna, maka dalam proses perumusan dan penyusunannya menjadi dokumen Rencana Kerja akan melibatkan setiap unit kerja atau Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan seluruh stakeholder terkait, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka penyelesaian dokumen Rencana Kerja. Awalnya dengan telah disusunnya Rencana Kerja (RENJA) tersebut, besar harapan

Sekretariat Daerah untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

Tobadak, 31 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH

Dr. H. ASKARY, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19700807 200112 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 8

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekreatriat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah 8

2.2. Penetapan Indikator Kinerja 15

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah 17

2.4. Reviu terhadap RKPD Tahun 2024 18

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 31

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 31

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 32

3.3. Program dan Kegiatan 33

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 41

BAB V : PENUTUP..... 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 9

Tabel 2.2. Penetapan Indikator Kinerja 16

Tabel 2.4. Review terhadap RKPD tahun 2024..... 19

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025..... 36

Tabel 4.1. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang didalamnya juga mencakup perencanaan mengenai pengarusutamaan gender yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Sekretariat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju TengahTahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan kinerja perangkat daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung secara langsung maupun tidak langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahunke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sejalan dengan arahan RPJPD serta Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 yaitu "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara*" diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Mamuju Tengah secara bahu

membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia sesuai dengan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan yaitu :

1. Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar;
3. Mendorong daya saing perekonomian daerah;
4. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik;
5. Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat;
6. Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2023;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor XX Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
16. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutAwalan Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawsi Barat Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
21. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rencana Kerja ini bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2024;
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
4. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya;
6. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, meliputi :

I. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

II. BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Evaluasi Kerja Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Sekretraiat Daerah;

2.4. Review Terhadap 2024 RKPD;

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. BAB III TUJUAN, DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024

IV. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah adalah penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari apa yang telah di raih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase capaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**			**4.824.520.737**	**4.563.788.840**	94,60			
Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang terpenuhi**			**982.915.838**	**976.055.324**	99,30			
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			250.741.425	250.667.945	99,97			
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			451.239.843	445.039.843	98,63			
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			280.934.570	280.347.536	99,79			
Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Persentase kerjasama yang difasilitasi**			**30.767.210**	**29.265.510**	95,12			
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			29.267.210	29.265.510	99,99			
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			1.500.000	1.500.000	100			
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			**556.379.384**	**532.950.228**	95,79			

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			276.542.215	254.671.159	92,09			
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			66.927.400	66.881.700	99,93			
Penumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Diumentasi			212.909.769	211.397.369	99,29			
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Pesentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan**			**3.254.458.305**	**2.725.517.778**	83,75			
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			2.768.312.561	2.245.812.561	81,13			
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			314.963.309	309.870.437	98,38			
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			171.182.435	169.834.780	99,21			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**			**2.287.966.729**	**2.281.835.914**	99,73			

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**			**484.057.696**	**481.708.006**	99,51			
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			360.186.454	358.442.984	99,52			
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			123.871.242	123.265.022	99,51			
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam yang di Pantau**			**88.741.960**	**88.280.880**	99,48			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			37.986.210	37.771.370	99,43			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			32.709.550	32.589.910	99,63			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			18.046.200	17.919.600	99,30			
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Administrasi Pembangunan yang terlaksana**			**535.197.119**	**532.629.027**	99,52			
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			267.159.157	266.820.992	99,87			
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			115.237.250	113.049.600	98,10			

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pe Pelaksanaan Pembangunan			152.800.712	152.758.435	99,97			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Paket yang Ditender/Lelang secara Elektronik**			**1.179.969.954**	**1.179.218.001**	99,94			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			358.493.864	358.166.918	99,91			
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			605.945.220	605.606.834	99,94			
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			215.530.870	215.444.249	99,96			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**			**28.532.855.743**	**28.256.032.622**	99,03			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan umen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**			**23.509.160**	**23.499.000**	99,96			
Koordinasi dan Penyusunan Doumen RKA-PD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan umen RKA-SKPD			9.156.440	9.156.000	100			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan umen DPA-SKPD			6.006.440	6.006.000	99,99			
Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.346.280	8.337.000	99,89			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**			**3.651.393.940**	**3.569.457.830**	97,76			

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3.422.050.980	3.340.119.330	97,61			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			229.342.960	229.338.500	100			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**			**563.306.020**	**563.305.000**	100			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			482.436.000	482.436.000	100			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			80.870.020	80.869.000	100			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**			**864.720.000**	**864.720.000**	100			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			864.720.000	864.720.000	100			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**			**6.808.917.320**	**6.805.872.177**	99,96			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			224.680.000	224.665.000	99,99			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1.208.551.600	1.205.854.700	99,78			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			47.230.000	47.230.000	100			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			664.550.000	664.523.500	100			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			61.950.000	61.942.800	99,99			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.338.475.000	1.338.471.500	100			

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.263.480.720	3.263.184.677	99,99			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**			**4.179.364.720**	**4.179.221.875**	100			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			3.629.813.875	3.629.813.875	100			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			230.600.000	230.580.000	99,99			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			318.950.845	318.828.000	99,96			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**			**3.897.553.775**	**3.884.944.272**	99,68			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			38.234.450	38.230.000	99,99			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1.028.997.300	1.018.116.124	98,94			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1.479.800.000	1.479.800.000	100			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1.350.522.025	1.348.798.148	99,87			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**			**2.379.780.050**	**2.258.635.998**	94,91			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1.554.827.050	1.553.967.498	99,94			

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			509.505.000	509.478.000	99,99			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			315.448.000	195.190.500	61,88			
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase keuangan dan operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi**			**813.791.508**	**780.555.868**	95,92			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			184.291.508	172.059.904	93,36			
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			143.500.000	143.500.000	100			
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Medical Check Up Kepala Daeran dan Wakil Kepala Daerah			165.000.000	164.995.964	100			
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			321.000.000	300.000.000	93,46			
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase kerumahtanggaan setda yang difasilitasi**			**4.042.646.500**	**4.042.401.500**	99,99			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			2.146.717.000	2.146.476.000	99,99			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1.895.929.500	1.895.925.500	100			
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase kebutuhan keprotokoleran pimpinan yang terpenuhi**			**603.994.575**	**599.762.430**	99,30			

Fasilitasi Keprotokoleran	Jumlah Hasil Fasilitasi Keprotokolan			420.200.629	416.245.450	99,06			
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			129.848.470	129.715.150	99,90			
Penumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan			53.945.476	53.801.830	99,73			
Penataan Organisasi	**Jumlah Dokumen penataan organisasi**			**703.878.175**	**683.656.672**	97,13			
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			120.035.330	120.035.330	100			
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			42.564.850	41.874.850	98,38			
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			343.873.175	327.141.192	95,13			
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			134.474.800	133.568.400	99,33			
Koordinasi dan Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah			62.930.020	61.036.900	96,99			

Sumber : Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisi kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dengan cara mengkaji indicator kinerja yang akan dicapai oleh instansi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah indikator kinerja kunci Sekretariat tertuang secara langsung, indikator apa yang akan ditetapkan dan dicapai oleh Sekretariat Daerah. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan *(input),* keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, manfaat *(benefit)* dan dampak *(impact)*. Sesuai analisis yang telah dilakukan, Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah memiliki sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Meningkatnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah;
c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa;
d. Terkendalikannya Inflasi Daerah;
e. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah;
f. Terpenuhinya Penunjang Pemerintahan dalam Percapaian Kinerja Setda.

Indikator kinerja kunci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diuraikan pada tabel 2.2 berikut.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN INDKATOR KINERJA KUNCI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO.	Fungsi Penunjang	IKK	TARGET				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kwartal pertama	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3,45 %	3 %	3 %
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	9 %	10 %	11 %	14 %	10 %	10,71 %	11 %	11 %
		Rasio nilai belanja yang melalui pengadaan	45 %	47 %	48 %	49 %	48 %	49,30 %	48 %	49 %

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Perencanaan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *world class governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah yang akan dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknogi yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4) Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5) Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
6) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan komitmen;
7) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2.4. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2024.

Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah termasuk dalam salah satu pelaksana peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi yang memfungsikan diri sebagai perumus kebijakan penataan dan evaluasi kelembagaan serta fasilitasi penyusunan standarisasi ketatalaksanaan khususnya pelayanan publik berkewajiban mendukung terwujudnya pelayanan prima pada seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada sekretariat daerah dilaksanakan penyesuaian terhadap RKPD Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BAGIAN PEMERINTAHAN											
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Tobadak**	**Persentase capaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Tobadak**	**Persentase capaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**		
	1 Administrasi Tata Pemerintahan	**Tobadak**	**Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang terpenuhi**	**100**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Tobadak**	**Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang terpenuhi**	**100**		
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	350.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	350.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	500.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	300.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	300.000.000	
	2 Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Tobadak**	**Persentase kerjasama yang difasilitasi**	**100**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Tobadak**	**Persentase kerjasama yang difasilitasi**	**100**		
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	100.000.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	90.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	90.000.000	
BAGIAN HUKUM											
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Tobadak**	**Persentase capaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Tobadak**	**Persentase capaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**		
	3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Tobadak**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**3**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Tobadak**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**3**		

			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tobadak	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	313 Dokumen	292.162.500			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tobadak	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	313 Dokumen	292.162.500	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Tobadak	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	176.400.000			Fasilitasi Bantuan Hukum	Tobadak	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	176.400.000	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tobadak	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	313 Dokumen	231.525.000			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tobadak	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	313 Dokumen	231.525.000	
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100**		
	4	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Tobadak**	**Pesentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan**	**100**			**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Tobadak**	**Pesentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan**	**100**		
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	3.950.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	3.950.000.000	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	375.000.000			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	375.000.000	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi	3 Dokumen	225.000.000			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi	3 Dokumen	225.000.000	

					Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM																
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100**				**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100**		
	5	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100**			**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100**		
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	370.000.000			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	370.000.000	
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	100.000.000			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	100.000.000	
			Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan Evaluasi kebijakan penelolaan BUMD dan BLUD	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	85.000.000			Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan Evaluasi kebijakan penelolaan BUMD dan BLUD	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	85.000.000	
	6	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam yang di Pantau**	**100**			**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam yang di Pantau**	**100**		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	80.000.000			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	80.000.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	2 Dokumen	80.000.000			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	2 Dokumen	80.000.000	

			Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian					Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	80.000.000			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	80.000.000	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100**		
	7	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Tobadak**	**Persentase Administrasi Pembangunan yang terlaksana**	**100**			**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Tobadak**	**Persentase Administrasi Pembangunan yang terlaksana**	**100**		
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	33 Dokumen	270.000.000			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	33 Dokumen	270.000.000	
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	140.000.000			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	140.000.000	
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	320.000.000			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	320.000.000	
BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA																
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100**		

	8	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Tobadak**	**Persentase Paket yang Ditender/Lelang secara Elektronik**	**100**			**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Tobadak**	**Persentase Paket yang Ditender/Lelang secara Elektronik**	**100**		
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	18 Dokumen	300.000.000			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	18 Dokumen	300.000.000	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	80 Dokumen	620.000.000			Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	80 Dokumen	620.000.000	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	33 Orang	350.000.000			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	33 Orang	350.000.000	
BAGIAN UMUM																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Tobadak**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Tobadak**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100**		
	9	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tobadak**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tobadak**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**		
			Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.993.125			Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	**Tobadak**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.993.125	
			Koordinasi dan Penyusunan RKA-PD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.993.125			Koordinasi dan Penyusunan RKA-PD	Tobadak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.993.125	
			Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahab RKA-PD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.993.125			Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahab RKA-PD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.993.125	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.371.250			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.371.250	
			Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.371.250			Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.371.250	

					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	13.230.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	13.230.000	
	10	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tobadak**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tobadak**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100**			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tobadak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	5.356.125.000			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tobadak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	5.356.125.000	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	275.625.000			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	275.625.000	
	11	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Tobadak**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Tobadak**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100**			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	591.611.373			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	591.611.373	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	138.033.000			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	138.033.000	
	12	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Tobadak**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Tobadak**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100**			
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobadak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Paket	1.042.705.000			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobadak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Paket	1.042.705.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tobadak	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	84,574,237			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tobadak	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	84,574,237	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tobadak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket	129,000,000			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tobadak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket	129,000,000	

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tobadak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	42,000,000			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tobadak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	42,000,000	
			Sosialisasi Peraturan Perundangan	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	28,350,000			Sosialisasi Peraturan Perundangan	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	28,350,000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	40,000,000			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	40,000,000	
	13	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tobadak**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tobadak**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100**		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tobadak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	231.411.338			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tobadak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	231.411.338	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tobadak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.362.863.494			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tobadak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.362.863.494	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tobadak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	120.767.085			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tobadak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	120.767.085	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tobadak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	808.837.838			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tobadak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	808.837.838	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tobadak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	39.691.378			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tobadak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	39.691.378	
			Penyediaan Bahan/ Material	Tobadak	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	23.890.132			Penyediaan Bahan/ Material	Tobadak	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	23.890.132	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tobadak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.149.119.213			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tobadak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.149.119.213	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.880.648.430			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.880.648.430	

	14	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tobadak**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tobadak**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tobadak	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tobadak	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tobadak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.300.000.000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tobadak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.300.000.000	
		Pengadaan Mebel	Tobadak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	154.367.971		Pengadaan Mebel	Tobadak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	154.367.971	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobadak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	867.936.768		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobadak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	867.936.768	
	15	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tobadak**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tobadak**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100**		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobadak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	60.998.431		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobadak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	60.998.431	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tobadak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.032.579.037		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tobadak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.032.579.037	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tobadak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.372.612.500		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tobadak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.372.612.500	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tobadak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.615.356.191		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tobadak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.615.356.191	
	16	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tobadak**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tobadak**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tobadak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	56 Unit	1.847.857.311		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tobadak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	56 Unit	1.847.857.311	

			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobadak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	596.209.450			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobadak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	596.209.450	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tobadak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	734.749.260			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tobadak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	734.749.260	
	17	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Tobadak**	**Persentase keuangan dan operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi**	**100**			**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Tobadak**	**Persentase keuangan dan operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi**	**100**		
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tobadak	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	301.875.000			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tobadak	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	301.875.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tobadak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	200.000.000			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tobadak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	200.000.000	
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	165.375.000			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	165.375.000	
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tobadak	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	529.733.742			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tobadak	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	529.733.742	
	18	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Tobadak**	**Persentase kerumahtanggaan setda yang difasilitasi**	**100**			**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Tobadak**	**Persentase kerumahtanggaan setda yang difasilitasi**	**100**		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tobadak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	2.157.625.575			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tobadak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	2.157.625.575	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tobadak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.918.057.838			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tobadak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.918.057.838	

			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tobadak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	400.000.000			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tobadak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	400.000.000	
BAGIAN ORGANISASI																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Tobadak**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Tobadak**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100**		
	19	**Penataan Organisasi**		**Tobadak**	**Jumlah Dokumen penataan organisasi**	**1**			**Penataan Organisasi**			**Tobadak**	**Jumlah Dokumen penataan organisasi**	**1**		
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tobadak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dok	600.000.000			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tobadak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dok	600.000.000	
			Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 dok	300.000.000			Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 dok	300.000.000	
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tobadak	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dok	250.000.000			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tobadak	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dok	250.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dok	150.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dok	150.000.000	
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tobadak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dok	100.000.000			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tobadak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dok	100.000.000	
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Tobadak**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Tobadak**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**			
	20	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Tobadak**	**Persentase kebutuhan keprotokoleran pimpinan yang terpenuhi**				**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			**Tobadak**	**Persentase kebutuhan keprotokoleran pimpinan yang terpenuhi**			
			Fasilitasi Keprotokolan	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	623.150.000			Fasilitasi Keprotokolan	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	623.150.000	

			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	249.826.500			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	249.826.500	
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tobadak	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	153.521.500			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tobadak	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	153.521.500	

Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah juga membuka usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dan Masyarakat melalui penelitian lapangan dan musrenbang, namun Sektertariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah hanya memiliki pagu yang sangat terbatas, sehingga plafon usulan dibatasi hanya pada program dan kegiatan yang urgent dan prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis yang dapat diusulkan dalam Musrenbang, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak ada yang berubah dari Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Pembangunan wilayah Sulawesi akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sulawesi akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi Bupati Terpilih.

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kab. Mamuju Tengah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretaris Daerah. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara* dan mendukung misi keempat *"Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik".*

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.2.1 Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka tujuan Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi
b. Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda.

3.2.2 Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, maka sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Meningkatnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah;
c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa;
d. Terkendalikannya Inflasi Daerah;
e. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah;
f. Terpenuhinya Penunjang Pemerintahan dalam Percapaian Kinerja Setda.

3.3. Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapainnya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renja ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini

dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Review rencana kerja merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review renja menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya.

Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2024 terbagi pada Sembilan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 3 program, 20 kegiatan, dan 56 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tobadak			DAU			
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang terpenuhi	Tobadak		1.076.861.609	DAU			
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Tobadak	3 Dokumen	202.442.839	DAU		3 Dokumen	350.000.000
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tobadak	2 Dokumen	641.677.772	DAU		2 Dokumen	500.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tobadak	3 Laporan	232.740.998	DAU		3 Laporan	300.000.000
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang difasilitasi	Tobadak		50.524.750	DAU			
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Tobadak	1 Dokumen	47.937.033	DAU		1 Dokumen	100.000.000
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tobadak	1 Dokumen	2.587.717	DAU		1 Dokumen	90.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tobadak	3 Dokumen	471.871.203	DAU		3 Dokumen	3 Dokumen
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Tobadak	313 Dokumen	228.524.269	DAU		313 Dokumen	292.162.500
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Tobadak	1 Kasus	98.283.686	DAU		1 Kasus	176.400.000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Tobadak	313 Dokumen	145.063.248	DAU		313 Dokumen	231.525.000
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pesentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Tobadak		1.894.338.874	DAU			
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tobadak	1 Dokumen	1.621.059.409	DAU		1 Dokumen	3.950.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Tobadak	3 Dokumen	194.318.998	DAU		3 Dokumen	375.000.000

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Tobadak	3 Dokumen	78.960.467	DAU		3 Dokumen	225.000.000
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	Tobadak			DAU			
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tobadak	12 Laporan	375.497.917	DAU			12 Laporan
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Dokumen	12 Laporan	259.030.228	DAU		12 Laporan	370.000.000
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	2 Laporan	116.467.689	DAU		2 Laporan	100.000.000
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam yang di Pantau	Tobadak		86.808.708	DAU			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Tobadak	2 Dokumen	86.808.708	DAU		2 Dokumen	80.000.000
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			Persentase Administrasi Pembangunan yang terlaksana	Tobadak		365.048.924	DAU			
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Tobadak	33 Dokumen	195.829.924	DAU		33 Dokumen	270.000.000
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tobadak	12 Laporan	77.139.000	DAU		12 Laporan	140.000.000
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tobadak	1 Laporan	92.080.000	DAU		1 Laporan	320.000.000
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Persentase Paket yang Ditender/ Lelang secara Elektronik	Tobadak		911.153.422	DAU			
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tobadak	18 Dokumen	344.039.841	DAU		18 Dokumen	300.000.000
				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tobadak	80 Dokumen	470.172.574	DAU		80 Dokumen	620.000.000
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tobadak	33 Orang	96.941.007	DAU		33 Orang	350.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tobadak			DAU			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Tobadak	100%	24.438.460	DAU			
				Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tobadak	1 Dokumen	10.221.960	DAU		1 Dokumen	

			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tobadak	1 Dokumen	6.371.960	DAU		1 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobadak	2 Laporan	7.844.540	DAU		4 Dokumen	13.230.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Tobadak		4.779.663.332	DAU			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tobadak	65 Orang/ Bulan	4.548.788.146	DAU		65 Orang	5.356.125.000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tobadak	1 Dokumen	230.875.186	DAU		1 Dokumen	275.625.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Tobadak		482.175.547	DAU			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tobadak	1 Dokumen	380.000.000	DAU		1 Dokumen	591.611.373
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	2 Laporan	102.175.547	DAU		2 Laporan	138.033.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai PD yang dilayani	Tobadak		909.120.000	DAU			
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobadak	1 Paket	909.120.000	DAU		1 Paket	1.042.705.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Tobadak		6.064.816.995	DAU			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tobadak	10 Paket	259.600.075	DAU		10 Paket	231.411.338
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobadak	10 Paket	892.361.400	DAU		10 Paket	1.362.863.494
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tobadak	10 Paket	32.092.750	DAU		10 Paket	120.767.085
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tobadak	10 Paket	703.395.000	DAU		10 Paket	808.837.838
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tobadak	10 Paket	30.142.000	DAU		10 Paket	39.691.378
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tobadak	1 Laporan	1.016.725.000	DAU		1 Laporan	1.149.119.213
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobadak	1 Laporan	3.130.500.770	DAU		1 Laporan	4.880.648.430
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Tobadak		70.500.000	DAU			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tobadak	1 Unit	25.000.000	DAU		4 Unit	1.300.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tobadak	4 Unit	45.500.000	DAU		14 Unit	867.936.768
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Tobadak		3.668.790.769	DAU			

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobadak	1 Laporan	45.974.738	DAU		1 Laporan	60.998.431
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tobadak	1 Laporan	1.081.717.000	DAU		1 Laporan	1.032.579.037
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobadak	1 Laporan	1.826.040.000	DAU		1 Laporan	1.372.612.500
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tobadak	1 Laporan	715.059.031	DAU		1 Laporan	1.615.356.191
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Tobadak		1.792.550.000	DAU			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tobadak	56 Unit	1.007.660.000	DAU		56 Unit	1.847.857.311
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tobadak	56 Unit	447.045.000	DAU		56 Unit	596.209.450
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Tobadak	4 Unit	337.845.000	DAU		4 Unit	734.749.260
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase keuangan dan operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	Tobadak		495.273.314	DAU			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tobadak	2 Orang/ Bulan	174.273.314	DAU		2 Orang/ Bulan	
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tobadak	2 Orang/ Bulan	321.000.000	DAU		2 Orang/ Bulan	529.733.742
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase kerumahtanggaan setda yang difasilitasi	Tobadak		3.840.241.850	DAU			
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Tobadak	1 Paket	2.063.970.000	DAU		1 Paket	2.157.625.575
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Tobadak	1 Paket	1.776.271.850	DAU		1 Paket	1.918.057.838
		Penataan Organisasi		Jumlah Dokumen penataan organisasi	Tobadak		713.642.827	DAU			
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tobadak	3 Dok	248.100.340	DAU		3 Dok	600.000.000
			Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		2 dok	161.575.964			2 dok	
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tobadak	2 Dok	115.381.504	DAU		2 Dok	250.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tobadak	1 Dok	105.296.157	DAU		1 Dok	150.000.000
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tobadak	1 dok	83.288.862	DAU		1 dok	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase kebutuhan keprotokoleran pimpinan yang terpenuhi	Tobadak		537.663.078	DAU			

			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Tobadak	1 Laporan	359.916.441	DAU		1 Laporan	623.150.000
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tobadak	1 Laporan	145.127.039	DAU		1 Laporan	249.826.500
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tobadak	1 Laporan	32.619.598	DAU		1 Laporan	153.521.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, direncanakan akan dilaksanakan Program dan Kegiatan dengan total alokasi dana Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 28.610.981.579 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Kerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024	
			Target	Pagu Indikatif
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang terpenuhi	100 %	1.076.861.609
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	202.442.839
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	641.677.772
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	232.740.998
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang difasilitasi	100 %	50.524.750
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	47.937.033
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	2.587.717
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	471.871.203
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	313 Dokumen	228.524.269
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	98.283.686
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	313 Dokumen	145.063.248

		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pesentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100 %	1.894.338.874
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1.621.059.409
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	3 Dokumen	194.318.998
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3 Dokumen	78.960.467
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		375.497.917
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	259.030.228
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	116.467.689
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam yang di Pantau	100 %	86.808.708
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	2 Dokumen	86.808.708
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Administrasi Pembangunan yang terlaksana	Tobadak	365.048.924
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	33 Dokumen	195.829.924
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	77.139.000
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	92.080.000
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket yang Ditender/ Lelang secara Elektronik		911.153.422

			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	18 Dokumen	344.039.841
			Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	80 Dokumen	470.172.574
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	33 Orang	96.941.007
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	24.438.460
			Koordinasi dan Penyusunan RKA-SDPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.221.960
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 Dokumen	6.371.960
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7.844.540
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu		4.779.663.332
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	4.548.788.146
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	230.875.186
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100 %	482.175.547

			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	380.000.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	102.175.547
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 %	909.120.000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai PD	1 Paket	909.120.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 %	6.064.816.995
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	259.600.075
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	892.361.400
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	32.092.750
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	703.395.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	30.142.000
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.016.725.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	3.130.500.770
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	70.500.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	45.500.000

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 %	3.668.790.769
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45.974.738
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.081.717.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.826.040.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	715.059.031
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100 %	1.792.550.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56 Unit	1.007.660.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	447.045.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	337.845.000
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase keuangan dan operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	100 %	495.273.314
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	174.273.314
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	321.000.000
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kerumahtanggaan setda yang difasilitasi	100 %	3.840.241.850

			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	2.063.970.000
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.776.271.850
		Penataan Organisasi		Jumlah Dokumen penataan organisasi		713.642.827
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dok	161.575.964
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen layanan publik dan tata laksana PD	3 Dok	115.381.504
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dok	105.296.157
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen monev mutu layanan publik dan tata laksana PD	1 Dok	83.288.862
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase kebutuhan keprotokoleran pimpinan yang terpenuhi	Tobadak	537.663.078
			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	359.916.441
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	145.127.039
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	32.619.598
					TOTAL	***28.610.981.579***

Sumber : Bagian-Bagian Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Tengah

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan yang termuat dalam Perubahan Renstra yang mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 untuk dipergunakan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Energi Sumber Daya Mineral.

Rencana Kerja disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dalam penerapannya diharapkan dapat dilakukan secara utuh serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen lainnya, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian target indikator serta parameter yang ada.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana strategis OPD yang telah ditetapkan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN

2024



DINAS PEKERJAAN UMUM

&

PENATAAN RUANG

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat disusun dan terselesaikan dengan baik, dan disampaikan tepat waktu sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini merupakan manifestasi pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Peenataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Mamuju Tengah,……..2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mamuju Tengah

MUH. YAHYA SALEH, ST.,M. Eng
NIP. 19750403 200212 1 007

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistimatika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3 Isu-isu Penting Peyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 32
2.4 Riew Terhadap Rancangan Awal RKPD 38
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyrakat 58

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 63
3.3 Program dan Kegiatan 65

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 84

BAB VI PENUTUP 90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan kelanjutan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 .Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 – 2026, evaluasi hasil Rencana Kerja DPUPR Tahun lalu (2023) dan hasil evaluasi Rencana Kerja tahun berjalan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 berisi kebijakan Pembangunan Infrastruktur, yaitu Bidang PSDA, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi , Bidang Penataan Ruang,UPT Air kegiatan-kegiatan pendukungnya, baik yang akan dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2024 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dengan mengacu kepada agenda pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah yang perlu diselesaikan pada tahun 2024. Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Berdasarkan program tersebut, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah ;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Instansi Pemerintah.

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan rancangan awal RKPD yang menuangkan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 termasuk dukungan terhadap tugas-tugas yang diemban Pejabat Bupati, rancangan Renja ini kemudian dibuat setelah mengumpulkan data dan informasi berupa regulasi terkait, kebijakan-kebijakan nasional terkait, hasil evaluasi pelaksanaannya, dan dokumen realisasi pencapaian Renja tahun sebelumnya, serta data khusus yang dibutuhkan (termasuk data dari musrenbang kecamatan). Setelah menelaah rancangan awal RKPD, Renja Bappeda akhirnya merumuskan dukungan terhadap RKPD dan sesuai dengan tugas Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan daerah,

penelitian, pengembangan serta pengendalian daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen in.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 disusun dan disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Sbb :

a. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 125);
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438) ;
d. Undang – undang No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
e. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan PermendagriNomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; f. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010, tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Buku IV) Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA) ;

g. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Perangkat Daerah Kab. Mamuju Tengah..

h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawsi Barat Nomor 25);

i. Undang – undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;

j. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.

k. Permendagri Nomor 52 tahun 2015, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 ;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2041;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Mamuju Tengah; Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

q. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8);

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2019;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Secara umum, maksud penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 untuk

mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah yang berorientasi pada pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi yang dipedomani setiap tahunnya. Hal ini merupakan tujuan yang tidak terpisah dalam rangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Mamuju Tengah 2021- 2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelengaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga. **Tujuan :**

a. Menyamakan persepsi dan pandangan semua jajaran pegawai/staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah.
b. Tersedianya tolak ukur dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi aparat lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah
c. Tersedianya informasi mengenai kegiatan program yang akan dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sesuai skala prioritas pertahun berdasarkan rencana strategi dan hasil penjaringan *Aspirasi Masyarakat* melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja – SKPD) perubahan anggaran Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 disusun dengan

sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari:

1.1 Latar Belakang. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Terdiri dari:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dan Capaian Renstra Perangat Daerah. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangat Daerah. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangat Daerah berdasarkan indikator.kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangat Daerah. Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangat Daerah; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangat Daerah; 3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangat Daerah; dan 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan

temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;

2.5 PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Terdiri dari:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atau rumusan isu-isu penting penyelenggaraan.tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan. Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang uraian program, kegaiatan dan pendanaan yang direncanakan

BAB V PENUTUP.

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja P-Renstra PD sebagai pedoman dalam mengidentifikasi pelaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja P-Renstra PD. Perencanaan pembangunan yang telah disusun melalui program dan kegiatan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan dan sejalan dengan Visi dan Misi Bupati/ Wakil Bupati terpilih .

Program dan kegiatan P-Renstra PD yang direncanakan untuk mencapai target periode P-Renstra PD harus mengalami peningkatan capaian dan melanjutkan beberapa target yang diharapkan pada tahun sebelumnya. Evaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun sebelumnya.

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju tahun 2023 sebesar Rp. 94.564.454.480. Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ruang Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 sebesar Rp81.865.961.715 (87 %). Pada sasaran program meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kabupaten, didalamnya terdapat sub kegiatan rekonstruksi jalan kinerja telah tercapai namun

pada realisasi anggaran belum sesuai dengan target. Hal ini dikarenakan pada kegiatan tersebuat, penyerapan pada sub kegiatan rekonstruksi jalan belum maksimal. Selain itu capaian kinerja pada indikator kinerja persentase jumlah jembatan kondisi baik masih belum tercapai karena pada Tahun Anggaran 2023, sub kegiatan pemeliharaan rutin jembatan tidak dianggarkan. Pada sasaran program Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi untuk Pertanian pada Sistem Irigasi yang sudah ada, didalamnya terdapat beberapa realisasi anggaran pada sub kegiatan yang penyerapannya belum maksimal serta adanya perubahan formulasi dalam menghitung realisasi kegiatan. Pada sasaran Program Meningkatnya Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang, realisasi kinerja belum mencapai target sehingga terkait permasalahan dalam penyelenggaraan program kegiatan belum ada. Keberhasilan dari penyelenggaraan sasaran program ini didukung dari SDM yang mumpuni serta perencanaan yang sesuai dengan target yang disusun.

Evaluasi pelaksanan Renja dan capaian P-Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Kinerja pada tahun 2023

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (A)	REALISASI (B)	CAPAIAN (B/A x 100%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.422.775	30.422.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.134.185	20.134.185	87
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22.558.688	22.465.000	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.510.737	20.760.000	97
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	21.067.670	20.296.000	96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.836.794	12.836.794	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.466.331	24.466.000	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.933.543.048	2.871.842.505	98
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.737.393	11.737.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22.112.343	22.112.343	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	39.065.000	39.065.000	100
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12.700.018	12.497.500	98
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.530.982	18.515.982	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.749.139	22.446.000	99
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	23.132.291	23.132.000	100
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.600.000	6.600.000	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	138.686.777	128.082.000	92
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	69.306.000	50.340.000	73
Administrasi Umum Perangkat Daerah'			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.800.429	210.120.670	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.059.260	3.059.260	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	112.064.000	112.060.000	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.285.000	105.220.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	328.683.000	322.247.674	98
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.287.660	34.239.500	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.069.617	36.041.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.532.373	134.097.533	96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.600.000	103.600.000	73
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.180.000	67.161.421	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.965.050	74.873.934	96
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.900.000	8.500.000	71
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	100
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	134.800.041	111.979.000	83
Pembangunan Tanggul Sungai	315.398.395	275.915.000	87
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	114.427.000	71.778.000	63
Pembangunan Kanal Banjir	4.341.626.605	2.898.296.270	67
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.300.000	8.300.000	100
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	25.000.000	24.960.000	100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaaan	10.368.620.063	9.676.487.000	93
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	3.508.747.931	3.216.673.985	92
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	600.000.000	600.000.000	100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	13.191.435.000	11.406.944.976	86
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	821.095.530	768.846.800	94
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	199.424.139	197.495.000	99
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3.944.799.579	3.466.651.205	88
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	405.667.734	384.646.488	95
Rekonstruksi Jalan	43.849.260.972	38.296.627.611	87
Pemeliharaan Berkala Jalan			78

	807.949.698	631.262.900	
Pembangunan Jembatan	1.949.739.637	1.450.492.199	74
Penggantian Jembatan	4.205.488.725	2.822.877.000	67
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	758.872.374	758.783.000	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	256.214.497	192.973.980	75
	94.564.454.480	81.865.961.715	87

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan PD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Ruang yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang. Serta sesuai dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang ruang, pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya sebagaimana pada rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja sesuai

Tabel 2.2.

Adapun Struktur Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah dapat diuraikan sebagai berikut : Struktur Organisasi

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Teknis dan Konstruksi, terdiri dari atas Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari atas Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Bina Marga, terdiri dari atas Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari atas Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam meyelenggarakan koordinasi, pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), pasal ini kepala dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, dan Penataan ruang;
b. Pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, dan Pentaan ruang ;
c. Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang pekerjaan umum, dan Penataan Ruang yang menjadi tanggungjawabnya.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok mengkoordinir penyelenggaraan tugas serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum,dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan, penataan dan penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mekanisme kerja pada dinas.
b. Pengoordinasian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan
c. Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
d. Pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan dan perlengkapan.

Bidang sekretariat meliputi:

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian dalam penyusunan rencana program kerja.
b. Pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data bahan evaluasi dan pelaporan.

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian dan pengelolaan anggaran dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian kepegawaian dan keuangan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan kepangkatan, promosi jabatan dan pengembangan SDM melalui Diklat;
b. Penyusun rencana anggaran dinas, pembukuan dan perhitungan anggaran, verifikasi serta perbendaharan.

SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melakukan surat menyurat, Kearsipan, urusan rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pendistribusian surat serta pengarsipan;

b. Pelaksanaan urusan pengelolaan dan pemeliharaan barang/perlengkapan dinas.

BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Bidang Bina Marg mempunyai tugas pokok menyusun dan mengumpulkan bahan/data perencanaan pembangunan jalan dan jembatan dan pekerjaan umum .

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, penyiapan, pengoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan;

b. Pembuatan desain/gambar, daftar analisa dan penyiapan data pemeliharaan jalan dan jembatan;

c. Penyusunan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap jalan dan jembatan;

Bidang Bina Marga terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

c. Seksi Reservasi Jalan dan Jembatan.

Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Bina Marga

BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, merencanakan, menyusun bahan uji bangunan, menganalisa dan penyehatan lingkungan perumahan rakyat serta mengumpul bahan/data inventarisasi peralatan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta program pemeliharaan alat.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. Pembuatan dan penyusunan program kebijakan teknis uji bangunan, cipta karya dan penyehatan lingkungan perumahan rakyat;
b. Pengoordinasian dan pengelolaan program kegiatan pengujian bangunan, cipta karya dan penyehatan lingkungan perumahan rakyat;
c. Penginventarisasian dan penyusunan seluruh peralatan dan sarana perbengkelan dan rencana kebutuhan alat dan sarana perbengkelan;
d. Penyusunan program pemeliharaan alat, sarana perbengkelan dan pengelolaan sarana perbengkelan secara profesional dan optimal;
e. Penyusunan rencana operasional peralatan alat berat, mobil dan penyusunan konsep kajian penerimaan retribusi sewa alat.

Bidang Cipta Karya terdiri dari atas :

a. Seksi Bangunan Gedung;
b. Seksi Air Minum, Drainase dan Sanitasi;
c. Seksi Peralatan dan Laboratorium.

Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Cipta Karya.

SEKSI BANGUNAN GEDUNG

Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok menganalisa, mengolah, mengawasi dan menguji bahan bangunan serta menyusun dan mengolah data bangunan dan gedung.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Bangunan Gedung mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional kegiatan dibidang bangunan dan gedung;
b. Peningkatan mutu bahan bangunan melalui pemeriksaan laboratorium;
c. Peningkatan, pengendalian dan analisa kegiatan program bangunan dan gedung;
d. Pelaksanaan pengawasan kegiatan program uji bahan dan bangunan serta gedung sebagai bahan laporan.

SEKSI AIR MINUM, DRAINASE DAN SANITASI

Seksi Air Minum, Drainase dan Sanitasi tugas pokok menyusun, merencanakan, mengumpulkan data dan bahan, serta melaksanakan urusan penyediaan, pembangunan, penataan dan pemeliharaan, pengawasan serta pemanfaatan dan penggunaan sarana air minum, drainase dan sanitasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Air Minum, Drainase dan Sanitasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan rancangan kebijakan dan strategi serta sistem pengelolaan air minum (SPAM), drainase dan sanitasi di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil berpenghuni berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi skala kabupaten;
b. Pelaksanaan, penetapan dan kebijakan teknis program kegiatan dalam penyediaan dan pembangunan sarana air minum, drainase dan sanitasi bagi masyarakat;

c. Penyusunan rencana induk dan/atau rencana detail untuk penyediaan, pengembangan, dan peningkatan infrastruktur air minum, drainase dan sanitasi di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil;

d. Penyiapan rencana lokasi tempat sanitasi dan drainase di wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

e. Penyelenggaraan dan sistem pengelolaan air minum (SPAM), drainase dan sanitasi, skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

f. Pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi bagi masyarakat yang kurang mampu dalam kawasan permukiman kumuh;

g. Pelaksanaan, penataan dan pemeliharaan drainase dan sanitasi;

h. Pengawasan dan membina kinerja pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi dalam lingkup wilayah kabupaten, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak lain;

i. Penyiapan rencana dan fasilitasi upaya-upaya peningkatan pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi di kawasan tertinggal, terpencil, dan pulau-pulau kecil berpenghuni;

j. Perumusan rencana program kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi antar kabupaten/kota dan desa dalam wilayah kabupaten untuk mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat;

k. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi dalam lingkup wilayah kabupaten;

l. Perumusan rancangan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan penyajian informasi teknis dalam penyelenggaraan urusan infrastruktur air minum,

drainase dan sanitasi di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil berpenghuni;

m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi dalam lingkup wilayah kabupaten;

n. Pengusulan peraturan daerah kebijakan dan strategi daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

o. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan;

p. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;

q. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan drainase;

r. Penyusunan rencana induk drainase;

s. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di daerah;

t. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan program kegiatan secara umum;

SEKSI PERALATAN DAN LABORATORIUM

Seksi Peralatan dan Laboratorium mempunyai tugas pokok mengumpul bahan rencana teknis operasional sesuai sasaran dan menyusun daftar/inventarisasi peralatan sebagai bahan program kerja pemeliharaan serta pengelolaan peralatan/perbengkelan secara rutin/berkala dan profesional sebagai aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Peralatan dan Laboratorium mempunyai fungsi :

a. Penyiapan dan peningkatan tenaga teknis operasional yang terampil dan handal melalui pembinaan dan barier;

b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pedoman standar peralatan;

c. Menyusun rencana kebutuhan peralatan;

d. Inventarisasi dan pendataan terhadap peralatan;

e. Melaksanakan operasional peralatan untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya;

f. Melaksanakan pengendalian, perawatan dan perbaikan atas kerusakan peralatan dan menyusun laporan terhadap kondisi peralatan secara berkala.

g. Penginventarisasian seluruh jenis peralatan dan peningkatan, pengembangan pemeliharaan peralatan sesuai peruntukannya;

h. Menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan laboratorium bidang pekerjaan umum;

i. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan laboratorium bidang pekerjaan umum;

j. Melaksanakan pengujian terhadap tanah dan bahan yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum;

k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan pengujian laboratorium bidang pekerjaan umum;

l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan hasil pengujian laboratorium terhadap tanah dan bahan

m. Pemanfaatan dan peningkatan sarana perbengkelan.

BIDANG TATA RUANG

Bidang Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan, bimbingan dan pengawasan tata ruang serta menyelenggarakan kebersihan jalan, selokan, lingkungan, serta melakukan pengendalian penanggulangan sampah air kotoran, air limbah serta tinja.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi ;

Menyusun program kerja bidang penataan ruang berdasarkan kebijakan teknis pembangunan sumber daya air sebagai pedoman dalam melaksanakan program

b. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lampu jalan, pertamanan dan pemakaman untuk keterpaduan pencapaian program

c. Melakukan penelitian rumusan kebijakan teknis perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lampu taman, pertamanan dan pemakaman sesuai dengan perencanaan program penyelenggaraan jalan
d. Melakukan penelitian rumusan pedoman perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lampu taman, pertamanan dan pemakaman
e. Melakukan penelitian rumusan program perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lampu taman, pertamanan dan pemakaman sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
f. Melakukan penelitian rumusan rencana tata ruang wilayah Kabupaten selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
g. Melakukan penelitian rumusan program penyusunan RTRKSK Kabupaten selaras dengan kebijakan regional dan nasional sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
h. Melakukan penelitian rumusan program penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
i. Melakukan penelitian rumusan program penyusunan zonasi system Kabupaten sesuai kewenangan
j. Melakukan penelitian rumusan program perumusan kebijakan perangkat insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
k. Melakukan penelitian rumusan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kawasan kabupaten sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
l. Melakukan penelitian rumusan merumuskan program pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
m. Melakukan penelitian rumusan program pembinaan operasionalisasi PPNS bidang penataan ruang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
n. Melakukan penelitian rumusan program evaluasi pemanfaatan ruang Kabupaten

sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku

o. Melakukan penelitian rumusan program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penataan ruang Kabupaten sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku

p. Melakukan penelitian rumusan program penelitian dan pengembangan penataan ruang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku

q. Melakukan penelitian rumusan program pengelolaan lampu Taman, pertamanan dan pemakaman umum

r. Melakukan penelitian rumusan NSPK penataan ruang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku

Bidang Bidang Penataan Ruang terdiri atas ;

a) Seksi Pengaturan, Pembinaaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang;

b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					REALISASI		PROYEKSI		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) (11+8)/2	(13)(9=13)	(14) (10=14)	
1	Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas, hidup yang layak													
		Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pada Pekerjaan Umum & Tata Ruang	``````	71%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	136%	100%	100%	
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik.	72%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	144%	100%	100%	
2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan													
		Terpenuhinya kemantapan kondisi prasarana jalan (Konektifitas antar wilayah) semua sarana ke PU-an	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	45,25 %	48,25 %	50%	53%	56%	59%	38%	64%	56%	59%	
			Reancana tata pengaturan air dan tata pengairan Kabupaten	29,66 %	30,66 %	31,66 %	32,66 %	33,66 %	34,66 %	4,84%	21%	33,66 %	34,66 %	
			Persentase drainase dalam kondisi baik	25,55	48,25 %	50%	53%	56%	59%	38%	64%	56%	59%	
			Persentase bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten Kota								0%	0%	0%	
			Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	150%	100%	100%	
			Jumlah bangunan ber- IMB persatuan bangunan yang di berikan Kabupaten Kota dalam tahun Eksisting	2228	2562	2946	3388	2896	4480	120		2896	4480	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					REALISASI		PROYEKSI		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) (11+8)/2	(13)(9=13)	(14) (10=14)	
3	Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan													
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati Daerah	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota	30,66 %	31,66 %	32,66 %	33,66 %	34,66 %	36%	4,84%	22%	34,66 %	36%	
			Jumlah penaggulangan persampahan di Kabupaten	3000 Rumah Tangga	3700Rumah Tangga	4400 Rumah Tangga	5100 Rumah Tangga	5800 Rumah Tangga	6500 Rumah Tangga			5800 Rumah Tangga	6500 Rumah Tangga	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Belum meratanya penyediaan kualitas layanan jalan kabupaten tiap kecamatan dalam kondisi mantap;
2. Belum optimalnya pemenuhan aksesibilitas jalan menuju pusat kegiatan khususnya daerah pesisir, tertinggal dan terisolir dalam wilayah kabupaten;
3. Belum optimalnya penyediaan jaringan irigasi untuk lahan pertanian sesusai dengan kewenangan, baik kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam wilayah kabupaten;
4. Masih lemahnya sistem informasi/ database jaringan irigasi untuk mengoptimalkan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
5. Belum optimalnya penanganan jalan dan drainase skala perkotaan dan pedesaan sehingga menghambat aksesibilitas jalan menuju pusat fasilitas umum dan masih banyak terjadi genangan;
6. Belum maksimalnya proses perencanaan, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian tata ruang.
7. Beberapa fokus tematik Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2023, yaitu :

    a. Penurunan Angka Kemiskinan;

    b. Peningkatan Indeks Desa Membangun;

    c. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia;

    d. Peningkatan Indeks Pendidikan;

    e. Penanggulangan Stunting;

    f. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Dari 6 Fokus Tematik tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah mendukung seluruh fokus tematik pembangunan yang

ada. Adapun yang menjadi masalah salah satu masalah yaitu rendahnya Presentase pertumbuhan sektor unggulan dan ekonomi terutama sektor infrastruktur dengan akar masalah diantaranya banyak jalan dan jembatan dalam kondisi rusak, banyak bangunan irigasi yang belum memadai, kurangnya regulasi perencanaan dan pemanfaatan ruang, kurang optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang, kurang optimalnya pembinan pembangunan dan pengawasan bangunan pemerintah, belum optimalnya pengelolaan lahan kosong serta belum optimalnya upaya penatagunaan tanah.

Sebagai unsur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Pembina, pengawas serta pengatur bidang infrastruktur daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Tengah di masa yang akan datang haruslah mempunyai strategi dan kebijakan serta inovasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas diatas secara lebih baik dan optimal. Strategi dan kebijakan tersebut dapat dirumuskan dengan melihat faktor – faktor yang berada di sekitar organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah itu sendiri. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal/ Internal *Factors Strategic Analysis* (IFSA) dan lingkungan eksternal/ External *Factors Strategic Analysis* (EFSA) dengan menggunakan analisis SWOT, yang terdiri dari unsur *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), O*pportunities (*Peluang), dan *Threats (*Tantangan).

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat

meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Identifikasi faktor-faktor dalam analisis SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan *(Strengh)* :
    1. Adanya regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang pedoman ataupun petunjuk teknis tentang ke pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang layanan pekerjaan umum dan pembina serta pengatur infrastruktur di daerah;
    2. Adanya peraturan-peraturan pendukung tentang proses- proses pelaksanaan maupun pengadaan;
    3. Adanya Sumber Daya Manusia berupa aparatur yang memadai tugas pokok dan fungsinya, serta fasilitas, peralatan dan perangkat yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas;
    4. Adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan maupun biaya operasional, seperti dana dari DAK, maupun APBD.

b. Kelemahan (Weaknesses) :
    1. Masih kurangnya data dan informasi mengenai kebutuhan ideal infrastruktur di Kabupaten Lumajang serta koordinasi antar instansi tekait yang belum optimal;
    2. Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang ada untuk menjalankan tugas teknis dan administrasi, sehingga terjadi penumpukan beban kerja di beberapa jabatan;
    3. Kualitas sumber daya manusia / aparatur yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga dalam pelaksanaan tugas teknis dan administrasi masih memerlukan pembenahan;
    4. Akibat kurangnya pemahaman personil akan tupoksinya mengakibatkan motivasi kerja yang kurang;
    5. Seringnya terjadi perubahan peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas,

sehingga perlunya pemahaman yang selalu mengikuti perubahan tersebut;

6. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang belum memadai secara teknis maupun jumlahnya;
7. Terbatasnya ketersediaan dana yang ada, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan pelaksanaan kegiatan pembangunan ataupun pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Mamuju Tengah

c. Peluang (Opportunities) :

1. Adanya komitmen, kerja sama, koordinasi serta komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah
2. Situasi dan kondisi Kabupaten Mamuju Tengah yang cukup aman dan kondusif;
3. Kompetitifnya dunia usaha untuk penyedia jasa konstruksi dan konsultansi di Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Adanya kesempatan bagi aparat / personil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi di bidang teknis maupun administrasi sehingga dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik dan benar;
5. Perkembangan teknologi dan informasi sehingga semua informasi khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum dapat diketahui dengan segera.

d. Ancaman (Threats) :

1. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan lahan demi penyediaan dan pembangunan fasilitas umum;
2. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil pekerjaan penyedia jasa konstruksi;

3. Belum optimalnya pelaksanaan komitmen dan konsistensi kebijakan;
4. Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah;
5. Di beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, terdapat masih rendahnya kualitas hasil pekerjaan penyedia jasa konstruksi dan konsultansi.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi, yaitu:

1. Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar- besarnya;
2. Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman;
3. Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada;
4. Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Faktor-faktor kunci keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu pertama melakukan proses perencanaan yang baik dan tepat, selanjutnya adalah pelaksanaan yang tepat waktu sesuai dengan rencana *(schedule)* serta target yang sudah ditentukan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah merupakan kegiatan prioritas masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten, lanjutan pekerjaan pada tahun sebelumnya, dan telaah percepatan capaian visi misi Kabupaten Mamuju Tengah

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah review terhadap rancangan awal RKPD diuraikan pada Tabel 2.3.

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**71.103.453.330,00**			**2.253.358.375.114,95**
1,03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**71.103.453.330,00**			**2.253.358.375.114,95**
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)***		***100***	**4.784.163.930,00**			**6.587.139.769,00**
1.03.01.2.01 1.03.01.2.01.0001 1.03.01.2.01.0002 1.03.01.2.01.0003 1.03.01.2.01.0004 1.03.01.2.01.0005	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja program perangkat daerah (%)*		*100*	185.500.000,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*	233.512.239,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*1,00*	*31.000.000,00*	*(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*26.415.404,00*
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*1,00*	*25.500.000,00*	*(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RUang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	23.437.489,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*1,00*	*25.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*	*20.707.608,00*

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*1,00*	22.000.000,00	*(Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*	*22.468.578,00*
1.03.01.2.01.0006 1.03.01.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*1,00*	22.000.000,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*	20.638.794,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*1,00*	*30.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*	*78.915.850,00*
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*1,00*	*30.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	40.928.516,00
1.03.01.2.02 1.03.01.2.02.0001 1.03.01.2.02.0002 1.03.01.2.02.0005 1.03.01.2.02.0007	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu (%)*		*100*	3.111.844.210,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*	3.421.038.280,00

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*50,00*	*3.048.333.919,00*	*(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RUang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*50,00*	3.353.167.311,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*1,00*	*19.903.510,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*19.903.510,00*
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1,00*	*21.893.861,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	24.083.247,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*1,00*	*21.712.920,00*	*(Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*23.884.212,00*
1.03.01.2.03 1.03.01.2.03.0001 1.03.01.2.03.0004 1.03.01.2.03.0005 1.03.01.2.03.0006	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tepat waktu (%)*		*100*	105.000.000,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*	220.526.971,00

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*1,00*	*40.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*48.741.236,00*
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*1,00*	*15.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	56.300.640,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*1,00*	*20.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*	*41.030.495,00*
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*1,00*	*30.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*74.454.600,00*
1.03.01.2.05 1.03.01.2.05.0001 1.03.01.2.05.0002 1.03.01.2.05.0003	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase jumlah pegawai yang terlayani (%)*		*100*	235.000.000,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*	1.141.453.202,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)*		*4,00*	*25.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*50359287.00*	*50.359.287,00*

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*1,00*	*10.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*300000000.00*	*300.000.000,00*
1.03.01.2.05.0009 1.03.01.2.05.0010 1.03.01.2.05.0011	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*		*1,00*	125.000.000,00 *125.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*86762966.00*	86.762.966,00 *86.762.966,00*
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*3*	*20.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*66050947.00*	*66.050.947,00*
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*		*100,00*	*20.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*132000000.00*	*132.000.000,00*
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*		*100*	*35.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*506280002*	*506.280.002,00*
1.03.01.2.06 1.03.01.2.06.0002 1.03.01.2.06.0003 1.03.01.2.06.0005 1.03.01.2.06.0008	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu (%)*		*100*	500.389.200,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*	745.884.184,00

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1,00*	*80.000.000,00*	*(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*204.499.380,00*
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*1,00*	*5.000.000,00*	*(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	21.358.920,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*1,00*	*103.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*	*95.512.692,00*
1.03.01.2.06.0009 1.03.01.2.06.0010 1.03.01.2.06.0011	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*1,00*	*91.000.000,00*	*(Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*108.900.000,00*
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*1,00*	*176.389.200,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang)*	*1,00*	*194.028.120,00*
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*1,00*	*25.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*55.000.000,00*
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*1,00*		*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*66.585.072,00*

1.03.01.2.08 1.03.01.2.08.0001 1.03.01.2.08.0002 1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan tepat waktu (%)*		*100*	310.000.000,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*	384.386.993,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*1,00*	*28.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	49.998.894,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*1*	*140.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*192788099*	192.788.099,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*1,00*	142.000.000,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*141.600.000,00*
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)*		*100*	336.430.520,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*	440.337.900,00
1.03.01.2.09.0001 1.03.01.2.09.0002 1.03.01.2.09.0006 1.03.01.2.09.0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*10,00*	*70.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*154.233.780,00*

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*30,00*	*211.430.520,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*30,00*	211.430.520,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*1,00*	*15.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*15.000.000,00*
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1,00*	*40.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*59.673.600,00*
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastrutkru pengendalian banjir di WS kewenangan kab/ kota (%)***		***100***	**9.186.000.000,00**			**279.255.173.053,00**
1.03.02.2.01 1.03.02.2.01.0093	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola (%)*		*100,00*	8.531.000.000,00	*(Kab. Mamjuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*	267.857.092.000,00

	Normalisasi/Restorasi Sungai	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)*		*5*	*281.000.000,00*	*(kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*8*	757.000.000,00
1.03.02.2.01.0115 1.03.02.2.01.0117 1.03.02.2.01.0122 1.03.02.2.01.0128	Pembangunan Tanggul Sungai	*Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)*		*16*	*5.300.000.000,00*	*(Kabupaten Mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*20*	*198.840.092.000,00*
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	*Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)*		*19*	*2.100.000.000,00*	*(Kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*20*	*58.160.000.000,00*
	Rehabilitasi Kanal Banjir	*Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)*		*30*	*800.000.000,00*	*(Kabupaten mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*35*	*10.100.000.000,00*
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)*		*1*	*50.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	*0,00*	-
1.03.02.2.02 1.03.02.2.02.0002 1.03.02.2.02.0014	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jaringan Primer dan Sekunder dalam jaringan baik (%)*		*100,00*	655.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*	11.398.081.053,00
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)*		*0,1*	200.000.000,00	*(Daerah irigasi (DI) Tabolang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*0,2*	*400.000.000,00*

1.03.02.2.02.0021 1.03.02.2.02.0022 1.03.02.2.02.0035	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)*		*1*	105.000.000,00 *105.000.000,00*	*(kabupaten mamuju, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*2*	9.998.081.053,00 *9.998.081.053,00*
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)*		*0,1*	*150.000.000,00*	*(Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*0,2*	*400.000.000,00*
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	*Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendung)*		*3,00*	*150.000.000,00*	*(32 daerah irigasi kewenangan kabupaten mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*5,00*	*500.000.000,00*
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)*		*10*	*50.000.000,00*	*(Daerah Irigasi Kewenangan Mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*10*	100.000.000,00

1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%)***		***100***	**5.645.309.000,00**			**20.050.000.000,00**
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah penerima manfaat sarana air bersih/air minum (%)*		*100,00*	5.645.309.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*	20.050.000.000,00
1.03.03.2.01.0026 1.03.03.2.01.0028 1.03.03.2.01.0029	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)*		*1500*	*2.031.309.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1550*	*12.250.000.000,00*

	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)*		*1500*	*1.114.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1550*	*7.800.000.000,00*
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)*		*5*	2.500.000.000,00 *2.500.000.000,00*		*0,00*	-
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	***Persentase sampah yang dikelola (%)*** ***Persentase sampah yang dikelola (%)***		***100***	**150.000.000,00**			**200.000.000,00**
1.03.04.2.01 1.03.04.2.01.0017	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Luas area pemukiman terlayani TPS3R dan pengadaan pengelolaan persampahan (Hektar)*		*5,100*	150.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*5,800*	200.000.000,00

	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	*Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)*		*3*	*150.000.000,00*	*(Desa Polongaan Kec.Tobadak, Desa Salupangkang Kec.Topoyo Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*5*	200.000.000,00
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domesti (%)***		***100***	**1.092.000.000,00**			**14.000.000.000,00**
1.03.05.2.01 1.03.05.2.01.0037	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat jaringan pengelolaan dan pengembangan air limbah (%)*		*100,00*	1.092.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*	14.000.000.000,00
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	*Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)*		*1*	*600.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1*	500.000.000,00
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)*		*700*	492.000.000,00	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*800*	*13.500.000.000,00*
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase Panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah Kabuapaten (%)***		***100***	**1.700.000.000,00**			**11.375.000.000,00**

1.03.06.2.01 1.03.06.2.01.0012 1.03.06.2.01.0020 1.03.06.2.01.0024 1.03.06.2.01.0029	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase panjang drainase dalam daerah Kabupaten/Kota (%)*		*50,55*	1.700.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*55*	11.375.000.000,00
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)*		*2525*	*500.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*2600*	*2.600.000.000,00*
	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)*		*2650*	*200.000.000,00*		*2950*	*2.950.000.000,00*
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)*		*2750*	*500.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*2835*	*2.835.000.000,00*
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)*		*2650*	*500.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*2990*	2.990.000.000,00
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***persentase bangunan milik permerintah dan lingkungannya yang ditata (%)***		***100***	**1.120.000.000,00**			**1.762.070.163,00**
1.03.08.2.01 1.03.08.2.01.0018 1.03.08.2.01.0019 1.03.08.2.01.0022 1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Rasio Bangunan Gedung Kabupaten Kota IMB dan sertifikat LAIK fungsi (IMB)*		*2,896*	1.120.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*4,480*	1.762.070.163,00

	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)*		*6*	*1.000.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*8*	1.492.070.163,00
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)*		*1,00*	10.000.000,00	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*10.000.000,00*
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)*		*20*	*10.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*20*	*10.000.000,00*
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)*		*65*	*100.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*80*	250.000.000,00

1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***persentase bangunan milik permerintah dan lingkungannya yang ditata (%)***		***10 0***	**100.000.000,00**			**450.000.000,00**
1.03.09.2.01 1.03.09.2.01.0009 1.03.09.2.01.0010	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terkendalinya Aktifitas pemanfaatan dan pengendalian bangunan (%)*		*100,00*	100.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*100*	450.000.000,00
	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan (Dokumen)*		*1,00*	50.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	*200.000.000,00*
	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*1,00*	*50.000.000,00*	*(TOBADAK, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*1,00*	250.000.000,00
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat kemantapan jalan Kabupaten (%)***		***57***	**46.375.000.000,00**			**1.918.678.992.129,95**

1.03.10.2.01 1.03.10.2.01.0031 1.03.10.2.01.0033	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Panjang jalan berdasarkan yang di tetapkan kepala daerah dalam SK kewenagan jalan Kabupaten (%)*		*57*	46.375.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*60*	1.918.678.992.129,95
	Penggantian Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)*		*87,00*	*2.250.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*102,00*	9.856.000.000,00
	Rekonstruksi Jalan				38.885.000.000,00			1.804.228.694.129,95

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang ada di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah berisikan usulan-usulan dari masyarakat, baik melalui Musrenbang Kabupaten, maupun penyampaian proposal dan penjabaran dari visi misi Bupati/ Wakil Bupati dan visi misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Mamuju Tengah. Usulan tersebut membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun tercapainya target pada program dan kegiatan serta mempercepat tercapainya target yang telah ditetapkan. Adapun Usulan Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang ruang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mamuju Tengah tentunya selalu melakukan strategi dan inovasi dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.1.1 TeRhadap RPJMN

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan **Gotong Royong".** Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, serta;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Ditetapkan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) ke-2 (kedua) Tahun 2020-2024 yang merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita ke-1 (pertama). Melalui 9 (Sembilan) misi presiden sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

3.1.2 Terhadap Renstra Kementrian PUPR

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Rensponsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan **Misi Presiden dan Wakil Presiden.”**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 (empat) misi yaitu:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya

air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu

3. pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
4. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai RPJMN 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensipemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

3.1.3 Prioritas Pembangunan Nasional

Terdapat 7 program yang masuk dalam prioritas pembangunan nasional, 7 program tersebut yaitu :

1. Percepatan penghapusan ekonomi ekstrem..
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Ekonomi hijau.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

3.1.4 Prioritas Pembangunan Provinsi

Terdapat program yang merupakan prioritas pembangunan Sulawesi Barat yaitu program tersebut diantaranya :

1. Menyelesaikan Kemiskinan Estrim
2. Stunting
3. Mencegah terjadnya Infelasi
4. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.

3.1.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju tengah

Yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, yaitu :

1. Menghapusan kemiskinan ekstrim
2. Penurunan prevelensi stunting
3. Peningkatan kapasitas SDM
4. Pengendalian inflasi terutama inflasi pangan
5. Pemanfaatan infrastruktur dasar

6. Hilirisasi komoditas unggulan, pemilu serentak, pengolahan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Dalam upaya mendukung program prioritas pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Perangkat Daerah yang membidangi bidang pekerjaan umum dan infrastruktur yaitu melalui program peningkatan layanan infrastruktur pendukung ekonomi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah . Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Tengah yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang secara lengkap terdapat pada Tabel 3.1.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai yaitu antara lain meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kabupaten, meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada, meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang, dan meningkatnya pelayanan pengelolaan pertanahan yang secara lengkap terdapat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1. Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	TARGET 2024

Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks layanan infrastruktur	$$IA = \frac{\Sigma Pn}{\Sigma P0} \times 100\%$$ Penjelasan : IA = Angka Indeks Pn = Infrastruktur Tahun Po = Infrastruktur Tersedia Σ = Jumlah	64 %

Tabel 3.2. Sasaran

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	TARGET 2024
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Jumlah Panjang Jalan kondisi mantap ---------- x 100% Jumlah Panjang Jalan total Penjelasan : - Jumlah panjang jalan kondisi mantap adalah jumlah panjang jalan dalam kondisi (baik dan sedang) - Jumlah panjang jalan total adalah jumlah panjang jalan kabupaten	64 %
	Persentase jumlah jembatan kondisi baik	Jumlah Jembatan kondisi baik ---------- x 100% Jumlah Jembatan total Penjelasan : - Jumlah jembatan kondisi baik adalah jumlah jembatan dalam kondisi (baik dan sedang) - Jumlah jembatan total adalah jumlah jembatan kabupaten	64 %
Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	Indeks Kinerja Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi (DI) kondisi baik ---------- x 100% Jumlah Daerah Irigasi (DI) total Penjelasan : - Jumlah DI kondisi baik adalah jumlah DI dalam kondisi baik - Jumlah DI total adalah jumlah DI kabupaten	21%
Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang	Luas wilayah perencanaan (WP) ---------- x 100% Luas wilayah kabupaten	100 %
Jumlah Rumah Tangga yg meperoleh layanan air limbah	Indeks rumah tangga yg terlayani	Jumlah Rumah Tangga yg Terlayani Layanan Air Limbah (Sanitasi) ---------- x 100% Jumlah KK dalam Kabupaten Kota	100 %

Jumlah Rumah Tangga yg meperoleh layanan air bersih	Indeks rumah tangga yg terlayani air bersih	Jumlah Rumah Tangga yg Terlayani Layanan Air bersih (SPAM) ---------- x 100% Jumlah KK dalam Kabupaten Kota	100 %

3.3 Program dan Kegiatan

Prioritas program diarahkan untuk tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan infrastruktur untuk mendorong partisipasi aktif penyedia jasa konstruksi dan masyarakat serta para pihak terkait (*stakeholders*) dalam berbagai aspek pembangunan infrastruktur daerah. Adapun tujuan dan sasaran, serta indikator data capaian pada tahun awal perencanaan serta target kinerja program dan kerangka pendanaan serta kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah diuraikan pada

Tabel 3.2.

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**71.103.453.330,00**		**2.253.358.375.114,95**	
	1,03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**71.103.453.330,00**		**2.253.358.375.114,95**	
1 ,	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)***		***100***	**4.784.163.930,00**		**6.587.139.769,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
	1.03.01.2.01 1.03.01.2.01.0001 1.03.01.2.01.0002 1.03.01.2.01.0003 1.03.01.2.01.0004 1.03.01.2.01.0005	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja program perangkat daerah (%)*		*100*	185.500.000,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	233.512.239,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*1,00*	*31.000.000,00*	*(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*26.415.404,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*1,00*	*25.500.000,00*	*(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RUang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	23.437.489,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*1,00*	*25.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*20.707.608,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*1,00*	22.000.000,00	*(Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*22.468.578,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006 1.03.01.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*1,00*	22.000.000,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	20.638.794,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*1,00*	*30.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*78.915.850,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*1,00*	*30.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	40.928.516,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02 1.03.01.2.02.0001 1.03.01.2.02.0002 1.03.01.2.02.0005 1.03.01.2.02.0007	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu (%)*		*100*	3.111.844.210,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	3.421.038.280,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*50,00*	*3.048.333.919,00*	*(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RUang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	3.353.167.311,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*1,00*	*19.903.510,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*19.903.510,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1,00*	*21.893.861,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	24.083.247,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*1,00*	*21.712.920,00*	*(Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*23.884.212,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03 1.03.01.2.03.0001 1.03.01.2.03.0004 1.03.01.2.03.0005 1.03.01.2.03.0006	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tepat waktu (%)*		*100*	105.000.000,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	220.526.971,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*1,00*	*40.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*48.741.236,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*1,00*	*15.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	56.300.640,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*1,00*	*20.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*41.030.495,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*1,00*	*30.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*74.454.600,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05 1.03.01.2.05.0001 1.03.01.2.05.0002 1.03.01.2.05.0003	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase jumlah pegawai yang terlayani (%)*		*100*	235.000.000,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	1.141.453.202,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)*		*4,00*	*25.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*50.359.287,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*1,00*	*10.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*300.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009 1.03.01.2.05.0010 1.03.01.2.05.0011	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*		*1,00*	125.000.000,00 *125.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	86.762.966,00 *86.762.966,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*3*	*20.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*66.050.947,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*		*100,00*	*20.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*132.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*		*100*	*35.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*506.280.002,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06 1.03.01.2.06.0002 1.03.01.2.06.0003 1.03.01.2.06.0005 1.03.01.2.06.0008	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu (%)*		*100*	500.389.200,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	745.884.184,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1,00*	*80.000.000,00*	*(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*204.499.380,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*1,00*	*5.000.000,00*	*(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	21.358.920,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*1,00*	*103.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*95.512.692,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Fasilitasi Kunjungan Tamu							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1.03.01.2.06.0009 1.03.01.2.06.0010 1.03.01.2.06.0011		*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*1,00*	*91.000.000,00*	*(Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*108.900.000,00*	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*1,00*	*176.389.200,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang)*	*194.028.120,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*1,00*	*25.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*55.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*1,00*		*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*66.585.072,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08 1.03.01.2.08.0001 1.03.01.2.08.0002 1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan tepat waktu (%)*		*100*	310.000.000,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	384.386.993,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*1,00*	*28.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	49.998.894,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*1*	*140.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	192.788.099,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*1,00*	142.000.000,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*141.600.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)*		*100*	336.430.520,00	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	440.337.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001 1.03.01.2.09.0002 1.03.01.2.09.0006 1.03.01.2.09.0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*10,00*	*70.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*154.233.780,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*30,00*	*211.430.520,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	211.430.520,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*1,00*	*15.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*15.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1,00*	*40.000.000,00*	*(dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*59.673.600,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastrutkru pengendalian banjir di WS kewenangan kab/ kota (%)***		***100***	**9.186.000.000,00**		**279.255.173.053,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
	1.03.02.2.01 1.03.02.2.01.0093	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola (%)*		*100,00*	8.531.000.000,00	*(Kab. Mamjuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	267.857.092.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Normalisasi/Restorasi Sungai	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)*		*5*	*281.000.000,00*	*(kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	757.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115 1.03.02.2.01.0117 1.03.02.2.01.0122 1.03.02.2.01.0128	Pembangunan Tanggul Sungai	*Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)*		*16*	*5.300.000.000,00*	*(Kabupaten Mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*198.840.092.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	*Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)*		*19*	*2.100.000.000,00*	*(Kabupaten Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*58.160.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Rehabilitasi Kanal Banjir	*Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)*		*30*	*800.000.000,00*	*(Kabupaten mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*10.100.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)*		*1*	*50.000.000,00*	*(KAB. MAMUJU TENGAH)*	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02 1.03.02.2.02.0002 1.03.02.2.02.0014	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jaringan Primer dan Sekunder dalam jaringan baik (%)*		*100,00*	655.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	11.398.081.053,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)*		*0,1*	200.000.000,00	*(Daerah irigasi (DI) Tabolang, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*400.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021 1.03.02.2.02.0022 1.03.02.2.02.0035	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)*		*1*	105.000.000,00 *105.000.000,00*	*(kabupaten mamuju, KAB. MAMUJU TENGAH)*	9.998.081.053,00 *9.998.081.053,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)*		*0,1*	*150.000.000,00*	*(Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*400.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	*Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendung)*		*3,00*	*150.000.000,00*	*(32 daerah irigasi kewenangan kabupaten mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*500.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)*		*10*	*50.000.000,00*	*(Daerah Irigasi Kewenangan Mamuju tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3,	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%)***		***100***	**5.645.309.000,00**		**20.050.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah penerima manfaat sarana air bersih/air minum (%)*		*100,00*	5.645.309.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	20.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026 1.03.03.2.01.0028 1.03.03.2.01.0029	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)*		*1500*	*2.031.309.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*12.250.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)*		*1500*	*1.114.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*7.800.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)*		*5*	2.500.000.000,00 *2.500.000.000,00*		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4,	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	***Persentase sampah yang dikelola (%)*** ***Persentase sampah yang dikelola (%)***		***100***	**150.000.000,00**		**200.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
	1.03.04.2.01 1.03.04.2.01.0017	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Luas area pemukiman terlayani TPS3R dan pengadaan pengelolaan persampahan (Hektar)*		*5,100*	150.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	*Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)*		*3*	*150.000.000,00*	*(Desa Polongaan Kec.Tobadak , Desa Salupangkang Kec.Topoyo Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5,	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domesti (%)***		***100***	**1.092.000.000,00**		**14.000.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
	1.03.05.2.01 1.03.05.2.01.0037	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat jaringan pengelolaan dan pengembangan air limbah (%)*		*100,00*	1.092.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	14.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	*Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)*		*1*	*600.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)*		*700*	492.000.000,00	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*13.500.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6,	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase Panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah Kabuapaten (%)***		***100***	**1.700.000.000,00**		**11.375.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
	1.03.06.2.01 1.03.06.2.01.0012 1.03.06.2.01.0020 1.03.06.2.01.0024 1.03.06.2.01.0029	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase panjang drainase dalam daerah Kabupaten/Kota (%)*		*50,55*	1.700.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	11.375.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)*		*2525*	*500.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*2.600.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)*		*2650*	*200.000.000,00*		*2.950.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)*		*2750*	*500.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*2.835.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)*		*2650*	*500.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	2.990.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7,	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***persentase bangunan milik permerintah dan lingkungannya yang ditata (%)***		***10 0***	**1.120.000.000,00**		**1.762.070.163,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
	1.03.08.2.01 1.03.08.2.01.0018 1.03.08.2.01.0019 1.03.08.2.01.0022 1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Rasio Bangunan Gedung Kabupaten Kota IMB dan sertifikat LAIK fungsi (IMB)*		*2,896*	1.120.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	1.762.070.163,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)*		*6*	*1.000.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	1.492.070.163,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)*		*1,00*	10.000.000,00	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*10.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)*		*20*	*10.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*10.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)*		*65*	*100.000.000,00*	*(Kab.Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8,	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***persentase bangunan milik permerintah dan lingkungannya yang ditata (%)***		***100***	**100.000.000,00**		**450.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
	1.03.09.2.01 1.03.09.2.01.0009 1.03.09.2.01.00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terkendalinya Aktifitas pemanfaatan dan pengendalian bangunan (%)*		*100,00*	100.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	10	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan (Dokumen)*		*1,00*	50.000.000,00	*(Tobadak, KAB. MAMUJU TENGAH)*	*200.000.000,00*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*1,00*	*50.000.000,00*	*(TOBADAK, KAB. MAMUJU TENGAH)*	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9 ,	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat kemantapan jalan Kabupaten (%)***		***57***	**46.375.000.000,00**		**1.918.678.992.129,95**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
	1.03.10.2.01 1.03.10.2.01.0031 1.03.10.2.01.0033	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Panjang jalan berdasarkan yang di tetapkan kepala daerah dalam SK kewenagan jalan Kabupaten (%)*		*57*	46.375.000.000,00	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	1.918.678.992.129,95	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penggantian Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)*		*87,00*	*2.250.000.000,00*	*(Kab. Mamuju Tengah, KAB. MAMUJU TENGAH)*	9.856.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

		Rekonstruksi Jalan				38.885.000.000,00		1.804.228.694.129,95	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Jumlah pagu total Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah di tahun 2024 adalah sebesar Rp. 66.512.461.907

Adapun Rencana Kerja dan sumber pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2023 secara lebih lengkap dapat dilihat dan diuraikan pada Tabel 4.1.

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T 1	Tahun				T 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1.03.0.00.0.00.01.0000					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp14.473.577.258	Rp52.038.884.649	Rp0	Rp0	Rp66.512.461.907	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp14.473.577.258	Rp52.038.884.649	Rp0	Rp0	Rp66.512.461.907	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp14.473.577.258	Rp52.038.884.649	Rp0	Rp0	Rp66.512.461.907	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp3.852.303.143	Rp38.431.400	Rp0	Rp0	Rp3.890.734.543	
1	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp83.945.535	Rp0	Rp0	Rp0	Rp83.945.535	
1	03	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp9.491.614	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.491.614	
1	03	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp12.999.641	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.999.641	
1	03	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp16.493.604	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.493.604	
1	03	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp12.989.228	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.989.228	
1	03	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp16.488.909	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.488.909	
1	03	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp15.482.539	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.482.539	
1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp3.119.605.152	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.119.605.152	
1	03	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD			Rp3.093.624.548	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.093.624.548	
1	03	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp7.493.926	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.493.926	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T 1	Tahun				T 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	03	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp18.486.678	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.486.678	
1	03	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp18.492.898	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.492.898	
1	03	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp18.492.898	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.492.898	
1	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp100.250.308	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.250.308	
1	03	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp68.890.308	Rp0	Rp0	Rp0	Rp68.890.308	
1	03	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp31.360.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.360.000	
1	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp312.600.885	Rp7.091.000	Rp0	Rp0	Rp319.691.885	
1	03	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp7.091.000	Rp0	Rp0	Rp7.091.000	
1	03	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp15.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.600.000	
1	03	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp19.970.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.970.000	
1	03	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp260.543.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp260.543.000	
1	03	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp16.487.885	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.487.885	
1	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp165.598.365	Rp0	Rp0	Rp0	Rp165.598.365	
1	03	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp149.998.365	Rp0	Rp0	Rp0	Rp149.998.365	
1	03	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp15.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.600.000	
1	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp51.810.000	Rp31.340.400	Rp0	Rp0	Rp83.150.400	
1	03	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp37.110.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp37.110.000	
1	03	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp14.700.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.700.000	
1	03	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp31.340.400	Rp0	Rp0	Rp31.340.400	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T 1	Tahun				T 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA				Rp81.191.271	Rp2.523.120.589	Rp0	Rp0	Rp2.604.311.860	
1	03	02	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai WS dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp81.191.271	Rp2.375.224.520	Rp0	Rp0	Rp2.456.415.791	
1	03	02	2,01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp588.375.404	Rp0	Rp0	Rp588.375.404	
1	03	02	2,01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp274.877.666	Rp0	Rp0	Rp274.877.666	
1	03	02	2,01	0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp1.511.971.450	Rp0	Rp0	Rp1.511.971.450	
1	03	02	2,01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			Rp81.191.271	Rp0	Rp0	Rp0	Rp81.191.271	
1	03	02	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp0	Rp147.896.069	Rp0	Rp0	Rp147.896.069	
1	03	02	2,02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp98.070.501	Rp0	Rp0	Rp98.070.501	
1	03	02	2,02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp49.825.568	Rp0	Rp0	Rp49.825.568	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				Rp3.332.750.866	Rp11.849.777.966	Rp0	Rp0	Rp15.182.528.832	
1	03	03	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota				Rp3.332.750.866	Rp11.849.777.966	Rp0	Rp0	Rp15.182.528.832	
1	03	03	2,01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Dana Transfer Khusus– Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp5.562.522.080	Rp0	Rp0	Rp5.562.522.080	
1	03	03	2,01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Dana Transfer Khusus– Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp6.045.555.886	Rp0	Rp0	Rp6.045.555.886	
1	03	03	2,01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			Rp3.332.750.866	Rp241.700.000	Rp0	Rp0	Rp3.574.450.866	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T 1	Tahun				T 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				Rp112.447.823	Rp0	Rp0	Rp0	Rp112.447.823	
1	03	09	2,01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				Rp112.447.823	Rp0	Rp0	Rp0	Rp112.447.823	
1	03	09	2,01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp112.447.823	Rp0	Rp0	Rp0	Rp112.447.823	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Rp603.133.560	Rp36.151.564.352	Rp0	Rp0	Rp36.754.697.912	
1	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				Rp603.133.560	Rp36.151.564.352	Rp0	Rp0	Rp36.754.697.912	
1	03	10	2,01	0033	Rekonstruksi Jalan	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi DR			Rp73.200.000	Rp28.617.234.278	Rp0	Rp0	Rp28.690.434.278	
1	03	10	2,01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp196.353.876	Rp0	Rp0	Rp196.353.876	
1	03	10	2,01	0040	Pembangunan Jembatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi DR			Rp0	Rp5.165.999.185	Rp0	Rp0	Rp5.165.999.185	
1	03	10	2,01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp529.933.560	Rp0	Rp0	Rp0	Rp529.933.560	
1	03	10	2,01	0044	Rehabilitasi Jalan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi DR			Rp0	Rp2.171.977.013	Rp0	Rp0	Rp2.171.977.013	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Rp80.051.572	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.051.572	
1	03	12	2,04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp80.051.572	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.051.572	
1	03	12	2,04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp80.051.572	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.051.572	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah merupakan gambaran rencana kerja dalam menunjang tercapainya visi, misi dan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mewujudkan Kabupaten Lumajang yang maju.

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah disusun dalam rangka penyusunan rencana awal penetapan prioritas program dan kegiatan berdasarkan telaah visi dan misi Bupati/Wakil Bupati dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya.

Diharapkan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah menjadi arah bagi pemenuhan dan memperluas akses terdapat hak-hak dasar yang terkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai percepatan pembangunan infrastruktur.

Mamuju Tengah, Mei 2024

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

MUH. YAHYA SALEH, ST., M.Eng
Nip : 19750403 200212 1 007

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

RENCANA KERJA

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2024 ini telah selesai disusun. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran kegiatan tahunan dari rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, sekaligus sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 ini masih jauh dari sempurna, maka dalam proses perumusan dan penyusunannya akan melibatkan setiap bidang yang ada di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah dan seluruh stakeholder terkait, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka penyempurnaan dokumen Rencana Kerja 2024. Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Kerja (RENJA) tersebut, besar harapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dalam bingkai Lalla Tassisara.

Topoyo, 31 Juli 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mamuju Tengah,

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. H. BUSDIR, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19590908 198003 1 008

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Kata Pengantar ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 18
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan 18
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD 27

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 29
3.3 Program dan Kegiatan 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD 43

BAB V PENUTUP 57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada tahun ini Kabupaten Mamuju Tengah mengusung Tema RKPD yaitu "Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Didukung dengan Ketentraman dan Ketertiban". Tema pembangunan tahun 2024 berpedoman pada RPJMD dimana arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 yaitu "Pemantapan Infrastruktur Dasar untuk Penguatan Perekonomian Rakyat Berbasis Agribisnis-Agropolitan Didukung Pemeliharaan Ketertiban dan Ketenteraman".

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan Pembangunan Pendidikan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan pendidikan senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan

perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.

Rencana Kerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan Pendidikan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 untuk memecahkan permasalahan pembangunan pendidikan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, kepastian, dan kualitas pelayanan pendidikan akan membuat masyarakat Kab. Mamuju Tengah memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Adanya tantangan era globalisasi dan otonomi daerah serta kondisi obyektif di masyarakat yang tengah menghadapi terjadinya krisis yang berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan mempengaruhi pada aspirasi serta partisipasi masyarakat terhadap pendidikan maka penyempurnaan kebijakan dan program pendidikan harus dilaksanakan secara nyata untuk kepentingan masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas di Kab. Mamuju Tengah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah merasa perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023. Sebagai dokumen perencanaan tahunan telah disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen rencana kerja OPD Dinas Pendidikan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan hasil Perubahan Renstra yang merujuk pada percepatan pemenuhan tujuan Organisasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 yang berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai penjentawaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah Tahun 2021 - 2026.

Dengan adanya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diharapkan dapat diketahui dan diperhitungkan berbagai faktor lingkungan dalam suatu wilayah operasional yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang bersifat eksternal dan internal. Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disebut dengan RKPD, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal itu berarti RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS), yang selanjutnya KUA PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
20. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
33. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini adalah sebagai perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah dan Kerangka Acuan untuk dokumen RENJA Tahun 2023.

A. Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja;
3. Untuk Meningkatkan Pemenuhan SPM Pelayanan Pendidikan Khususnya dalam hal Pelayanan Pendidikan Dasar;

B. Tujuan

a. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2024;
b. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
c. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
d. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;
e. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya;
f. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu membahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Tahun berjalan dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD dan Program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA (SKPD) TAHUN LALU

TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

Pembangunan pendidikan mempunyai peranan penting karena di samping sebagai indikator capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga sebagai investasi jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Kab. Mamuju Tengah maka diperlukan suatu sistem yang terpadu, terarah dan secara berkesinambungan dapat diaplikasikan ke seluruh masyarakat Kab. Mamuju Tengah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, pembangunan bidang pendidikan menjadi salah satu kebijakan prioritas sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kab. Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dan di jabarkan dalan Rencana Strategis Dinas Pendidikan kab. Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian kinerja dan anggaran renja 2023	Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Dinas Pendidikan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar								
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	15	3	3	3	100%	3	9	60%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	5	3	5	167%	5	15	60%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2728		2726	2726	100%	2.726	5.452	200%
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	4	4	4	100%	4	12	20%

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang sesuai standar								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang sesuai standar								
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5		1	1	100%	1	2	40%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5		1	1	100%	1	2	40%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5		1	1	100%	1	2	40%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250	20	50	60	120%	30	110	44%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	1	1	1	100%	1	3	60%

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi								
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6		1	1	100%	2	3	50%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	2	2	4	200%	6	12	80%
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	2	2	2	100%	2	6	60%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70	16	16	16	100%	16	48	69%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4		1	1	100%	1	2	50%
	Meningkatnya Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	Angka harapan lama sekolah								
	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan								
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)								
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	70	5	1		0%	10	15	21%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	21	31	31	100%	17	69	69%
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	30		5	5	100%	6	11	37%
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	464	-	116	116	100%	116	232	50%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	185	-	210	210	100%	50	260	141%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2500	-	1276	1276	100%	526	1.802	72%

	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	240	-	40	50	125%	60	110	46%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	464	-	116	116	100%	116	232	50%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Warga Negara Usia 12-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)								
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	45	5	30	30	100%	3	38	84%
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	3		3	3	100%	1	4	133%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	6500	-	2650	2650	100%	1475	4.125	63%
	Pembinaan Minat Bakat Dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	170	-	60	60	100%	50	110	65%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	130	-	20	20	100%	60	80	62%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	152	-	38	38	100%	38	76	50%

	Pengelolaan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	52	-	5	5	100%	2	7	13%
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD	5	-	5	1	20%	1	2	40%
	Penyelengaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	80	-	60	60	100%	50	110	138%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	400	-	200	200	100%	100	300	75%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200	-	80	80	100%	60	140	70%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	528	-	60	90	150%	132	222	42%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	528	-	130	131	101%	100	231	44%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga Yang Meningkat kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	150	-	150	150	100%	50	200	133%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan								

	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utulitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana Prasarana Dan Utulitas Sekolah Dan Nonformal/Kesetaraan Yang Telah Dibangun	30	-	1	6	600%	1	7	23%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	80	-	10	10	100%	10	20	25%
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	132	-	25	25	100%	25	50	38%
	Meningkatnya aksesbilitas penduduk dan partisipasi terhadap layanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah								
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum yang ditetapkan								
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase keterpenuhan Kurikulum Muatan Lokal								
	Penyusunan Konpetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Konpetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang Tersusun	5	-	1	1	100%	1	2	40%
	Pelatihan Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	215	-	100	100	100%	50	150	70%
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal									
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Penyusunan Konpetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal Yang Tersusun	5	-	1	1	100%	1	2	40%

	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan									
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	5	-	1	1	100%	1	2	40%
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5	-	1	1	100%	1	2	40%
	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Budaya								
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Kebudayaan yang Dikelola								
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kebudayaan yang Dikelola								
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200	-	30	30	100%	30	60	30%
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan								

	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5	-	1	1	100%	1	2	40%

2.2. Analisis Kinerja Layanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan.

Kemajuan Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah cukup menggembirakan hal ditandai dengan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang disebabkan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah-daerah tersebut.

2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah

Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul dalam persaingan global. Pendidikan dianggap sebagai bidang yang paling strategis untuk mewujudukan kesejahteraan nasional. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berkarakter merupakan prasyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Sebaliknya, SDM yang rendah akan menghasilkan peradaban yang kurang baik pula. Untuk dapat mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persenatse penduduk menurut partisipasi sekolah dengan beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partsipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM).

1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) di defenisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu dimasa akan datang. Angka Harapan Lama Sekolah menunjukan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah di defenisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Berdasarkan data dari Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah konstan menunjukan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,65 tahun. Angka ini meningkat sebesar 0,9 persen di tahun sebelumnya sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju tengah pada tahun 2022 berada pada poin 7,61 tahun. Angka ini meningkat sebesar 1.13 poin dari tahun sebelumnya. Faktor yang menyebabkan masih rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah antara lain masih terdapatnya siswa yang putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak sekolah, lulusan SD/MI dan lusan SMP/Mts yang tidak melanjutkan sekolah. Namun demikian, pemerintah Kabupaten

Mamuju Tengah melalui program Gerakan Kembali Bersekolah terus berupaya untuk mengembalikan anak putus sekolah untuk kembali sekolah sesuai dengan jenjangnya. Capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018-2022

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Harapan Lama Sekolah	11,71	11,92	12,23	12,53	12,65
2	Rata-Rata Lama Sekolah	7,23	7,24	7,46	7,51	7,61

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Perhitungan APK yaitu jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sekolah dikali 100%. Makin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan atau semakin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah ditingkat pendidikan tertentu. Nilai APK dapat lebih dari 100% hal ini disebabkan terdapat siswa diluar usia kelompok usia sekolah, wilayah kota atau perbatasan.

Tabel 2
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten
Mamuju Tengah Tahun 2018-2022

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	APK SD/MI	84	83	86	94,59	109,52
2	APK SMP/MTs	54	48	50	114	91,26

Tabel diatas menunjukan bahwa Angka Partisipasi Kasar di jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 capaian APK SD/MI berhasil mencapai pada 109,52 persen sedangkan APK SMP/MTs pada tahun 2022 mencapai pada poin 91,26 persen. Angka ini menurun sebesar 19,9 persen dari tahun sebelumnya.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Semakin tinggi APM maka menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang tertentu.

APM pada jenjang SD/MI mulai pada tahun 2019 menunjukan progresifitas yang meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2022 APK SD sebesar 93,72 persen Sementara itu untuk APK SMP/MI pada tahun 2022 sebesar 72,33 persen atau mengalami penurunan sebesar 15,6 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 3
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten
Mamuju Tengah Tahun 2018-2022

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	APM SD/MI	74	74	86	85,5	93,73
2	APM SMP/MTs	49	49	50	85,8	72,33

4. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Angka Putus Sekolah (APtS) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Rumus AptS adalah jumlah siswa yang tidak melajutkan pembelajaran (keluar) pada jenjang tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang tertentu yang sesuai tahun t-1 dikali 100%.

Siswa putus sekolah yaitu siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran tanpa membawa surat keterangan pindah atau ijazah. Kriteria: makin rendah APtS, berarti makin baik, idealnya 0% berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. APtS digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 4
Angka Putus Sekolah (APtS) di Kabupaten
Mamuju Tengah Tahun 2018-2022

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	APts SD	0,29	0,22			

	Jumlah Siswa PTs	42	31	42	1	6
	Jumlah Siswa SD	14.336	14.193	13.796	13.569	13,584
2	APts SMP	0,38	0,31	0	0,11	0
	Jumlah Siswa PTs	16	14	0	5	0
	Jumlah Siswa SMP	4.231	4.493	4.803	4.469	6.255

Pada tahun 2021 pemerintah daerah telah berhasil menurunkan jumlah angka putus sekolah dasar dari 42 orang menjadi 1 orang. Namun di tahun 2022 kembali terjadi kenaikan jumlah angka putus sekolah dasar menjadi 6 orang. Sementara itu melihat data dari angka putus sekolah menengah pertama sudah menunjukan pencapaian yang baik karena pada tahun 2022 tercatatkan tidak ada siswa tingkat sekolah menengah pertama yang mengalami putus sekolah.

5. Angka Kelulusan (AL)

Angka Lulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus pada jenjang tertentu dengan jumlah peserta ujian pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilainya, berarti makin baik. Idealnya Angka Kelulusan adalah sama dengan 100%, yang berarti semua siswa peserta ujian lulus seluruhnya. Angka Kelulusan digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus, dari jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 4
Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten
Mamuju Tengah Tahun 2018-2022

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angaka Lulusan SD/MI	100	98	100	100	99,5
2	Angka Lulusan SMP/Mts	99,5	97,64	99,76	100	100

6. Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi AM angkanya makin baik. Idealnya AM adalah sama dengan 100% yang berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bila angkanya lebih dari 100% hal itu disebabkan karena ada siswa baru yang berasal dari daerah lain. AM digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi.

Tabel 5
Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten
Mamuju Tengah Tahun 2017-2021

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angaka Melanjutkan SD/MI	100	100	100	100	97,5
2	Angka Melanjutkan SMP/Mts	105	84	85	94	96,5

7. Rasio Siswa per Guru

Rasio siswa per guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Kriteria: makin tinggi rasio berarti makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di suatu daerah. Khusus pendidikan nonformal berarti makin banyak peserta didik yang harus dilayani oleh tutor. Rumus rasio siswa per guru adalah jumlah siswa dibagi jumlah guru. Rasio Siswa per Guru digunakan untuk mengetahui rata-rata guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah dan daerah sehingga dapat ditentukan sekolah/daerah mana yang memerlukan tambahan guru. Khusus nonformal untuk mengetahui beban kerja tutor apakah cukup atau sudah melebihi ketentuan.

Tabel 6
Rasio Siswa per Guru di Kabupaten
Mamuju Tengah Tahun 2018-2022

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	31,71	23,85	24,54	24,53	19,32

	Jumlah Siswa SD/MI	14.336	14.193	13.796	13.569	13.584
	Jumlah Guru	452	595	562	553	703
2	SMP/MTS	17,48	15,65	14,82	13,96	17,82
	Jumlah Siswa SD/MI	4.231	4.493	4.803	4.469	6.255
	Jumlah Guru	242	287	324	320	351

8. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ketersediaan sekolah dihitung dari perbandingan jumlah sekolah jenjang tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang sesuai dikali 10.000.

Tabel 7
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018-2022

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio SD/MI	69,27	67,63	72,26	71,34	79,56
	Jumlah BangunanSD/MI	116	116	116	116	116
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	16.744	17.150	16.053	16.258	15.961
2	Rasio SMP/MTS	45,05	31,60	34,02	61,94	46,59
	Jumlah Bangunan SMP/Mts	32	32	32	38	38
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	7.102	10.126	9.406	6.134	8.156

9. Ruang Kelas dalam Kondisi Baik

Kondisi ruang kelas dalam kondisi baik dinyatakan dengan perbandingan antar jumlah ruang kelas menurut kondisi pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai.

Pada tahun 2022 total ruang kelas SD/MI sebayak 743 unit dengan rincian: kondisi baik sebanyak 410 unit, kondisi rusak ringan sebanyak 125 unit, kondisi rusak sedang sebanyak 155 orang, dan kondisi rusak berat sebanyak 53 unit. Sementara untuk ruang kelas SMP/MTS sebanyak 808 unit dengan rincian: kondisi baik sebanyak 394 unit, kondisi rusak ringan sebanyak 80 unit, kondisi rusak sedang sebanyak 126 unit dan kondisi berat sebanyak 208 unit.

Tabel 8
Ruang Kelas dalam Kondisi Baik di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018-2022

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kondisi Bangunan SD/MI	726	726	726	732	743
	Baik	348	381	399	431	410
	Rusak Ringan	119	109	97	81	125
	Rusak Sedang	179	161	152	135	155
	Rusak Berat	80	75	78	85	53
2	Kondisi Bangunan SMP/Mts	n.a	n.a	n.a	247	808
	Baik	n.a	n.a	n.a	166	394
	Rusak Ringan	n.a	n.a	n.a	21	80
	Rusak Sedang	n.a	n.a	n.a	28	126
	Rusak Berat	n.a	n.a	n.a	32	208

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik pada satuan pendidikan dasar memiliki kualifikasi akademik S1/D4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang

relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28 Ayat 2). Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 diharapkan dapat menggali dan mengembangkan potensi peserta didik, sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang tinggi. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 dihitung dari perbandingan antara jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah guru seluruhnya pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dikali 100 persen. Perlu dikatehui bahwa dalam pengukuran ini belum mempertimbangkan kesesuaian jurusan dengan mata pelajaran yang diampu.

Tabel 9
Jumlah Guru SD/MI dan SMP/MTS yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4
Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018-2021

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	% Guru Bersertifikat S1.D4	99,08	99,08	93,18	36,02	94,48
	Jumlah Guru Kualifikasi S1/D4	647	647	820	317	1.078
	Jumlah Guru	653	653	880	880	1.141

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah terdapat beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Angka melek huruf dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis sehingga dapat dipakai sebagai dasar melihat perkembangan potensi perkembangan intelektual.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Ini untuk mengukur partisipasi sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Penghitungan APK sangat dipengaruhi jumlah penduduk. Pergerakan APK untuk semua jenjang secara umum mengalami peningkatan.

3. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi partisipasinya berarti penduduk usia sekolah di wilayah tersebut telah menempuh pendidikan sesuai usianya. Secara umum APM di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan yang secara umum berarti

semakin tinggi kesadaran masyarakat Mamuju tengah untuk menyekolahkan putera puterinya.

4. Belum meratanya mutu pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah. Keadaan ini terlihat masih banyaknya warga Mamuju Tengah yang menyekolahkan putera puterinya ke luar Mamuju Tengah.

5. Kualifikasi guru yang perlu ditingkatkan. Dari data yang ada menunjukkan bahwa belum semua guru di Kabupaten Mamuju Tengah berkualifikasi akademik S1 atau D4. Tentunya ini memerlukan perhatian khusus karena pendidik mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan karena mereka yang melakukan transformasi terhadap nilai kognitif, afektif dan psikomotorik di dalam melakukan proses pendidikan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional seperti tertuang didalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka untuk perencanaan lima tahun kedepan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 - 2026 dengan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, SDM pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2021 - 2026 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

1) Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
2) Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
3) Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
4) Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:

1) Ekosistem pendidikan;
2) Guru;
3) Pedagogi;
4) Kurikulum; dan
5) Sistem penilaian.

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memampukan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pemelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pemelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (soft skills). Dengan menekankan sentralitas pemelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pemelajaran dan menggunakan portofolio.



Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran Rancangan Awal RENJA Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan - Sasaran
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Penyelengaraan Pendidikan dan Kebudayaan (T1)		Indeks Pendidikan	10,02 Tahun	10,23 Tahun	10,50 Tahun	10,76 Tahun	11,04 Tahun	11,35 Tahun
		Meningkatnya aksesbilitas penduduk dan partisipasi terhadap layanan pendidikan (S1)	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,51 Tahun	7,63 Tahun	7.82 Tahun	8,02 Tahun	8,24 Tahun	8.48 Tahun
		Meningkatnya pencapaian SPM urusan pendidikan (S2)	Angka harapan lama sekolah (AHRLS)	12.53 Tahun	12,82 Tahun	13,17 Tahun	13,49 Tahun	13,84 Tahun	14,21 Tahun
		Meningkatnya Pelestarian dan pengelolaan Budaya (S3)	Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	6,90%	10,34%	41,38%	48,28%	55,17%	65,52%
2	Meningkatnya tata kelola urusan pendidikan dan kebudayaan (T2)		Indeks reformasi birokrasi (IRB) Dinas Pendidikan	C	C	C	CC	CC	B
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan urusan pendidikan dan kebudayaan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	C	C	C	CC	CC	B
			Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Dinas Pendidikan	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perencanaan jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) indikator tujuan, 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah dan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026 dengan uraian sebagai berikut :

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan adalah :

   Meningkatkan Kualitas Penyelengaraan Pendidikan dan Kebudayaan (T1)

   Dari Tujuan tersebut diatas Dinas Pendidikan ingin mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar serta semua jalur pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta perhatian penuh terhadap nilai-nilai budaya.

   Meningkatnya tata kelola urusan pendidikan dan kebudayaan (T2)

   Dari Tujuan tersebut diatas Dinas Pendidikan ingin meningkatkan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas untuk mengikuti wajib belajar 9 tahun, Pendidikan bagi Anak Usia Dini, pendidikan non formal dan kesetaraan berkualitas yang lebih merata dan bermutu agar potensi anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggali, memelihara dan melestarikan Peninggalan Budaya, Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan kearsipan & dokumentasi yang berkaitan dengan Budaya Mamuju Tengah.

b. Indikator Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan adalah :

   Indeks Pendidikan

   Adalah pengukuran perbandingan dari harapan lama sekolah, rata-rata sekolah dan cakupan pelestarian dan pengelolaan budaya.
   Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
   Mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

c. Sasaran yang akan dicapai Dinas Pendidikan adalah :

   Meningkatnya aksesbilitas penduduk dan partisipasi terhadap layanan pendidikan (S1 dari T1)
   Masih rendahnya aksesibilitas memperoleh pendidikan itu dapat berpengaruh terhadap peringkat Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, karena salah satu indikator HDI adalah pendidikan. Aksesibilitas pendidikan memberikan kemudahan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya memasuki suatu program pendidikan.

   Meningkatnya pencapaian SPM urusan pendidikan (S2 dari T1)

SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperolah setiap Warga Negara secara minimal. Standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.

Meningkatnya Pelestarian dan pengelolaan Budaya (S3 dari T1)

Sasaran ini mengambarkan jumlah seni budaya, situs, cagar budaya yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya" sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan urusan pendidikan dan kebudayaan (S1 dari T2)

Kondisi yang ingin dicapai pada penguatan sistem tata kelola kinerja pendidikan dan kebudayaan, adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

d. Indikator Sasaran :

1. Rata-rata Lama sekolah

   Adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk jangka waktu lima tahun ke depan rata rata lama sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah diharapkan sudah mencapai 12 tahun, sehingga rata rata lulusan pendidikan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah adalah tamatan Sekolah Menengah Atas.

2. Harapan Lama sekolah

   Adalah lamanya sekolah yang diharapkan.
   Untuk Harapan lama Sekolah lima tahun ke depan di harapkan bahwa penduduk Kabupaten Mamuju Tengah dapat mengenyam pendidikan sampai dengan perguruan tinggi.

3. Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Budaya

   Adalah persentase kesenian, cagar budaya dan sejarah lokal yang dibina.
   Untuk Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Budaya ini mengarah kepada pembinaan kesenian daerah, cagar budaya yang akan dilestarikan dan pembinaan sejarah lokal.

4. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

   Adalah kualitas laporan kinerja perangkat daerah.

Indikator Capaian Kinerja Perangkat Daerah ini adalah meningkatkan kualitas dari laporan penyelenggaraan pemerintahan dan sistem akunatabilitas kinerja.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu pengukuran indikator kinerja melalui indikator sasaran. Target pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah dengan target minimal sebagaimana terdapat pada Standar Pelayanan Minimal, sehingga penerapan target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus sama atau melebihi Standar Pelayanan Minimal Nasional.
Dengan demikian indikator program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah diharapkan akan memenuhi target RPJMD di Tahun 2021-2026.

Untuk memenuhi target tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan program dan kegiatan yang mendukung pencapaiannya.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan didasarkan kepada analisa kondisi umum pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang, tantangan dan ancaman dalam proses pembangunan pendidikan untuk jangka lima tahun kedepan. Oleh sebab itu perlu dibuat rumusan kebijakan strategis, program strategis bahkan sampai kegiatan yang ditujukan untuk mencapai sasaran kinerja yang realistis.

Untuk mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati di bidang pendidikan serta tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perlu diciptakan program dan kegiatan yang mendukung. Salah satu Misi Bupati dan Wakil Bupati adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar. Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta pelayanan umum lainnya. Hal ini telah diakomodir dalam kegiatan Dinas Pendidikan yang rencana pelaksanaannya dibagi menjadi 5 tahun.

Demikian juga dengan target pencapaian SPM bidang pendidikan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018, Permendagri No. 100 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 telah dimasukkan kedalam perencanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2021 yang diusulkan Dinas Pendidikan.

Dalam RKPD Tahun 2024 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki pagu anggaran sebanyak Rp. xxx.xxx.xxx.xxx,- yang terdiri dari Belanja Urusan Bidang Pendidikan Rp. xxx.xxx.xxx.xxx,- dan Belanja Urusan Kebudayaan Rp. xxx. xxx. xxx,- yang terdiri atas 2 Urusan, 5 Program 16 Kegiatan dan 90 Sub Kegiatan.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		**115.663.481.815**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		421.795.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	155.000.000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	22.500.000	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	16.735.000	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	13.894.000	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	13.666.000	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah	175.000.000	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kab. Mamuju Tengah	25.000.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu		113.905.459.815	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah	113.798.009.815	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah	7.450.000	APBD
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Mamuju Tengah	25.000.000	APBD

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah	75.000.000	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		150.000.000	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	30.000.000	APBD
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	120.000.000	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani		345.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab. Mamuju Tengah	15.000.000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Mamuju Tengah	60.000.000	APBD
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mamuju Tengah	50.000.000	APBD
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Mamuju Tengah	90.000.000	APBD
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah	85.000.000	APBD
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah	45.000.000	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar		346.740.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	7.500.000	APBD
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	13.240.000	APBD
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	30.000.000	APBD
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah	26.000.000	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah	250.000.000	APBD

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Kab. Mamuju Tengah	20.000.000	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		224.900.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		35.000.000	
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	25.000.000	APBD
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	45.000.000	APBD
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	119.900.000	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		181.794.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Mamuju Tengah	84.795.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	63.399.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	33.600.000	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		87.793.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Mamuju Tengah	45.025.000	APBD
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Mamuju Tengah	16.500.000	APBD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mamuju Tengah	16.500.000	APBD
4	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Mamuju Tengah	9.768.000	APBD
II	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan		**42.425.401.255**	

9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD)		22.030.373.491	
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	300.000.000	APBD dan APBN
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Mamuju Tengah	200.000.000	APBD dan APBN
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	300.000.000	APBD dan APBN
4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	200.000.000	APBD dan APBN
5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	300.000.000	APBD dan APBN
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	8.345.846.824	APBD dan APBN
7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	250.000.000	APBD dan APBN
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah RuangKelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Mamuju Tengah	314.666.667	APBD dan APBN
9	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	250.000.000	APBD
10	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	45.000.000	APBD
11	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Kab. Mamuju Tengah	150.000.000	APBD
12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Mamuju Tengah	200.000.000	APBD
13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Mamuju Tengah	200.000.000	APBD
14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Mamuju Tengah	150.000.000	APBD
15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Mamuju Tengah	200.000.000	APBD
16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Mamuju Tengah	10.554.860.000	APBN
17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Sekolah	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Mamuju Tengah	70.000.000	APBD

10.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP)		13.915.200.418	
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	200.000.000	APBD
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Mamuju Tengah	200.000.000	APBD
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	300.000.000	APBD
4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	250.000.000	APBD
5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	300.000.000	APBD
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	5.471.786.168	APBD dan APBN
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Mamuju Tengah	348.674.250	APBD dan APBN
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Mamuju Tengah	300.000.000	APBD dan APBN
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Kab. Mamuju Tengah	300.000.000	APBD dan APBN
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Mamuju Tengah	200.000.000	APBD dan APBN
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Mamuju Tengah	200.000.000	APBD dan APBN
12	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	60.000.000	APBD
13	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	25.000.000	APBD
14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Mamuju Tengah	50.000.000	APBD
15	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Kab. Mamuju Tengah	150.000.000	APBD
16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	125.000.000	APBD
17	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Kab. Mamuju Tengah	147.500.000	APBD
18	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Mamuju Tengah	200.000.000	APBD

19	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	322.000.000	APBD
20	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Mamuju Tengah	150.000.000	APBD
21	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Mamuju Tengah	250.000.000	APBD
22	Pengelolaan Dana BOS Sekolah menegah perama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Mamuju Tengah	4.265.240.000	APBD
23	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	100.000.000	APBD
11	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun		4.256.110.346	
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	413.406.346	APBD dan APBN
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Mamuju Tengah	211.270.000	APBD dan APBN
4	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	60.000.000	APBD
5	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah PerlengkapanPeserta Didik PAUD yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	25.000.000	APBD
6	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan	Kab. Mamuju Tengah	175.000.000	APBD
7	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Mamuju Tengah	120.000.000	APBD
9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Mamuju Tengah	200.000.000	APBD
10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Mamuju Tengah	210.000.000	APBD
11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Mamuju Tengah	120.000.000	APBD
12	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Mamuju Tengah	1.855.400.000	APBN
13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Mamuju Tengah	150.000.000	APBD

14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	Kab. Mamuju Tengah	150.000.000	
15	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	Kab. Mamuju Tengah	350.000.000	
16	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	Kab. Mamuju Tengah	216.034.000	
12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan		2.223.717.000	
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	100.000.000	APBD
3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	100.000.000	APBD
4	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Mamuju Tengah	200.000.000	APBD
5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	100.000.000	APBD
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Mamuju Tengah	75.000.000	APBD
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Mamuju Tengah	100.000.000	APBD
8	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Mamuju Tengah	1.328.000.000	APBD
9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	50.000.000	APBD
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	Kab. Mamuju Tengah	170.717.000	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum yang ditetapkan		**550.000.000**	
13	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Muatan Lokal yang ditetapkan		400.000.000	
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Mamuju Tengah	150.000.000	APBD
2	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kab. Mamuju Tengah	250.000.000	APBD

14	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Pemenuhan APS PAUD & APS Penyetaraan		150.000.000	
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Kab. Mamuju Tengah	150.000.000	APBD
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Satuan Pendidikan		**350.000.000**	
15	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Peserta didik		350.000.000	
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	200.000.000	APBD
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	150.000.000	APBD
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Kebudayaan yang Dikelola		**160.000.000**	
16	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebudayaan		80.000.000	
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Mamuju Tengah	80.000.000	APBD
17	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan		80.000.000	
1	Pembinaan Sumber Daya manusia, Lembaga dan Pranata tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Mamuju Tengah	80.000.000	APBD
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan		**195.000.000**	
18	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang Dibina		195.000.000	
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kab. Mamuju Tengah	70.000.000	APBD
2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Kab. Mamuju Tengah	75.000.000	APBD

3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Mamuju Tengah	50.000.000	APBD
VII	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya yang Dikelola		**130.000.000**	
19	Penetapan Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan		130.000.000	
1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Mamuju Tengah	75.000.000	APBD
2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Mamuju Tengah	55.000.000	APBD
J U M L A H				159.473.883.070	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Tahun 2024 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran, beserta indikatornya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel.

Rencana kerja Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Pelaksanaan tupoksi merupakan upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diusahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah, dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah telah memiliki pedoman untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja, kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Tabel

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			**115.663.481.815**				**115.618.481.815**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu			421.795.000				396.795.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	3 Dokumen	155.000.000	APBD		3 Dokumen	155.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	22.500.000	APBD		1 Dokumen	22.500.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	16.735.000	APBD		1 Dokumen	16.735.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	13.894.000	APBD		1 Dokumen	13.894.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	13.666.000	APBD		1 Dokumen	13.666.000

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah	5 Laporan	175.000.000	APBD		5 Laporan	175.000.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kab. Mamuju Tengah	5 Laporan	25.000.000	APBD		5 Laporan	25.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu			113.905.459.815				113.905.459.815
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah	2728 OB	113.798.009.815	APBD		2728 OB	113.798.009.815
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 Laporan	7.450.000	APBD		1 Laporan	7.450.000
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah	4 Laporan	75.000.000	APBD		4 Laporan	75.000.000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar			150.000.000				150.000.000
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 Laporan	30.000.000	APBD		1 Laporan	30.000.000
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 Laporan	120.000.000	APBD		1 Laporan	120.000.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani			345.000.000				345.000.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab. Mamuju Tengah	30 Pasang	15.000.000			30 Pasang	15.000.000

2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Mamuju Tengah	60 Dokumen	60.000.000	APBD		60 Dokumen	60.000.000
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Mamuju Tengah	4 Orang	90.000.000	APBD		4 Orang	90.000.000
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah	30 Orang	85.000.000	APBD		30 Orang	85.000.000
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah	10 Orang	45.000.000	APBD		10 Orang	45.000.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar			346.740.000				326.740.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	1 Paket	7.500.000	APBD		1 Paket	7.500.000
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	17727 Paket	13.240.000	APBD		17727 Paket	13.240.000
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	30.000.000	APBD		1 Dokumen	30.000.000
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah	1 Laporan	26.000.000	APBD		1 Laporan	26.000.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah	65 Laporan	250.000.000	APBD		65 Laporan	250.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000

		(Dokumen)							
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi			224.900.000				224.900.000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1 Unit	35.000.000			1 Unit	35.000.000
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	3 Unit	25.000.000	APBD		3 Unit	25.000.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	3 Unit	45.000.000	APBD		3 Unit	45.000.000
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	1 Unit	119.900.000	APBD		1 Unit	119.900.000
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia			181.794.000				181.794.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Mamuju Tengah	2000 Laporan	84.795.000	APBD		2000 Laporan	84.795.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	14100 Laporan	63.399.000	APBD		14100 Laporan	63.399.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	2 Laporan	33.600.000	APBD		2 Laporan	33.600.000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara			87.793.000				87.793.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Mamuju Tengah	30 Unit	45.025.000	APBD		30 Unit	45.025.000
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Mamuju Tengah	3 Unit	16.500.000	APBD		3 Unit	16.500.000

3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mamuju Tengah	3 Unit	16.500.000	APBD		3 Unit	16.500.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Mamuju Tengah	1 unit	9.768.000	APBD		1 unit	9.768.000
II	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan			**42.425.401.255**				**42.425.401.255**
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD)			22.030.373.491				22.030.373.491
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	1 unit	300.000.000	APBD dan APBN		1 unit	300.000.000
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Mamuju Tengah	1 Ruang	200.000.000	APBD dan APBN		1 Ruang	200.000.000
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	1 Ruang	300.000.000	APBD dan APBN		1 Ruang	300.000.000
4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	1 Ruang	200.000.000	APBD dan APBN		1 Ruang	200.000.000
5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	1 Ruang	300.000.000	APBD dan APBN		1 Ruang	300.000.000
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	17 Unit	8.345.846.824	APBD dan APBN		17 Unit	8.345.846.824
7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	1 Unit	250.000.000	APBD dan APBN		1 Unit	250.000.000
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah RuangKelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Mamuju Tengah	6 Ruang	314.666.667	APBD dan APBN		6 Ruang	314.666.667

9	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	6 Paket	250.000.000	APBD		6 Paket	250.000.000
10	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	2 Unit	45.000.000	APBD		2 Unit	45.000.000
11	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Kab. Mamuju Tengah	116 Satuan Pendidikan	150.000.000	APBD		116 Satuan Pendidikan	150.000.000
12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Mamuju Tengah	200 peserta	200.000.000	APBD		200 peserta	200.000.000
13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Mamuju Tengah	526 Orang	200.000.000	APBD		526 Orang	200.000.000
14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Mamuju Tengah	60 Orang	150.000.000	APBD		60 Orang	150.000.000
15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Mamuju Tengah	116 Satuan Pendidikan	200.000.000	APBD		116 Satuan Pendidikan	200.000.000
16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Mamuju Tengah	116 Satuan Pendidikan	10.554.860.000	APBN		116 Satuan Pendidikan	10.554.860.000
17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Sekolah	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Mamuju Tengah	116 Orang	70.000.000	APBD		116 Orang	70.000.000
10.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP)			13.915.200.418				13.915.200.418
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	1 Unit	200.000.000	APBD		1 Unit	200.000.000

2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Mamuju Tengah	1 Ruang	200.000.000	APBD		1 Ruang	200.000.000
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	1 Ruang	300.000.000	APBD		1 Ruang	300.000.000
4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	1 Ruang	250.000.000	APBD		1 Ruang	250.000.000
5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	1 Ruang	300.000.000	APBD		1 Ruang	300.000.000
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	16 Unit	5.471.786.168	APBD dan APBN		16 Unit	5.471.786.168
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Mamuju Tengah	2 Ruang	348.674.250	APBD dan APBN		2 Ruang	348.674.250
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Mamuju Tengah	3 Ruang	300.000.000	APBD dan APBN		3 Ruang	300.000.000
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Kab. Mamuju Tengah	3 Ruang	300.000.000	APBD dan APBN		3 Ruang	300.000.000
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Mamuju Tengah	2 Ruang	200.000.000	APBD dan APBN		2 Ruang	200.000.000
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Mamuju Tengah	2 Ruang	200.000.000	APBD dan APBN		2 Ruang	200.000.000
12	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	2 Paket	60.000.000	APBD		2 Paket	60.000.000
13	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	5 Paket	25.000.000	APBD		5 Paket	25.000.000
14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Mamuju Tengah	30 Peserta Didik	50.000.000	APBD		30 Peserta Didik	50.000.000
15	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Kab. Mamuju Tengah	154 Buku	150.000.000	APBD		154 Buku	150.000.000

16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	5 Paket	125.000.000	APBD		5 Paket	125.000.000
17	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Kab. Mamuju Tengah	1475 peserta didik	147.500.000	APBD		1475 peserta didik	147.500.000
18	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Mamuju Tengah	120 Peserta	200.000.000	APBD		120 Peserta	200.000.000
19	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	287 Orang	322.000.000	APBD		287 Orang	322.000.000
20	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Mamuju Tengah	60 Orang	150.000.000	APBD		60 Orang	150.000.000
21	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Mamuju Tengah	38 Satuan Pendidikan	250.000.000	APBD		38 Satuan Pendidikan	250.000.000
22	Pengelolaan Dana BOS Sekolah menegah perama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Mamuju Tengah	38 Satuan Pendidikan	4.265.240.000	APBD		38 Satuan Pendidikan	4.265.240.000
23	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	76 Orang	100.000.000	APBD		76 Orang	100.000.000
11	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun			4.256.110.346				4.256.110.346
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	7 Unit	413.406.346	APBD dan APBN		7 Unit	413.406.346
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Mamuju Tengah	5 Unit	211.270.000	APBD dan APBN		5 Unit	211.270.000
4	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	4 Paket	60.000.000	APBD		4 Paket	60.000.000

5	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah PerlengkapanPeserta Didik PAUD yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	2 Paket	25.000.000	APBD		2 Paket	25.000.000
6	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan	Kab. Mamuju Tengah	2 Paket	175.000.000	APBD		2 Paket	175.000.000
7	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Mamuju Tengah	200 Peserta Didik	120.000.000	APBD		200 Peserta Didik	120.000.000
9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Mamuju Tengah	287 Orang	200.000.000	APBD		287 Orang	200.000.000
10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Mamuju Tengah	60 Orang	210.000.000	APBD		60 Orang	210.000.000
11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Mamuju Tengah	132 Satuan Pendidikan	120.000.000	APBD		132 Satuan Pendidikan	120.000.000
12	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Mamuju Tengah	132 Satuan Pendidikan	1.855.400.000	APBN		132 Satuan Pendidikan	1.855.400.000
13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Mamuju Tengah	120 Orang	150.000.000	APBD		120 Orang	150.000.000
14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	Kab. Mamuju Tengah	150 Peserta	150.000.000			150 Peserta	150.000.000
15	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	Kab. Mamuju Tengah	2 Unit	350.000.000			2 Unit	350.000.000
16	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	Kab. Mamuju Tengah	2 Unit	216.034.000			2 Unit	216.034.000

12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan			2.223.717.000				2.223.717.000
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Kab. Mamuju Tengah	1 Unit	100.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000
3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
4	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Mamuju Tengah	464 Peserta Didik	200.000.000	APBD		464 Peserta Didik	200.000.000
5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	30 Orang	100.000.000	APBD		30 Orang	100.000.000
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Mamuju Tengah	40 Orang	75.000.000	APBD		40 Orang	75.000.000
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Mamuju Tengah	14 Satuan Pendidikan	100.000.000	APBD		14 Satuan Pendidikan	100.000.000
8	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Mamuju Tengah	25 Lembaga	1.328.000.000	APBD		25 Lembaga	1.328.000.000
9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	30 Orang	50.000.000	APBD		30 Orang	50.000.000
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	Kab. Mamuju Tengah	1 Unit	170.717.000			1 Unit	170.717.000
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum yang ditetapkan		790000000	**550.000.000**				**550.000.000**

13	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Muatan Lokal yang ditetapkan			400.000.000				400.000.000
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
2	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kab. Mamuju Tengah	116 Orang	250.000.000	APBD		116 Orang	250.000.000
14	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Pemenuhan APS PAUD & APS Penyetaraan			150.000.000				150.000.000
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Kab. Mamuju Tengah	60 Dokumen	150.000.000	APBD		60 Dokumen	150.000.000
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Satuan Pendidikan			**350.000.000**				**350.000.000**
15	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Peserta didik			350.000.000				350.000.000
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	1 Laporan	150.000.000	APBD		1 Laporan	150.000.000

V	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Kebudayaan yang Dikelola			**160.000.000**				**160.000.000**
16	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebudayaan			80.000.000				80.000.000
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Mamuju Tengah	30 Orang	80.000.000	APBD		30 Orang	80.000.000
17	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan			80.000.000				80.000.000
1	Pembinaan Sumber Daya manusia, Lembaga dan Pranata tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Mamuju Tengah	1 Laporan	80.000.000	APBD		1 Laporan	80.000.000
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan			**195.000.000**				**195.000.000**
18	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang Dibina			195.000.000				195.000.000
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kab. Mamuju Tengah	30 Orang	70.000.000	APBD		30 Orang	70.000.000
2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Kab. Mamuju Tengah	70 Sertifikat	75.000.000	APBD		70 Sertifikat	75.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Mamuju Tengah	9 lembaga	50.000.000	APBD		9 lembaga	50.000.000
VII	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya yang Dikelola			**130.000.000**				**130.000.000**

19	Penetapan Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan			130.000.000				130.000.000
1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Mamuju Tengah	61 Objek	75.000.000	APBD		61 Objek	75.000.000
2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Mamuju Tengah	5 Objek	55.000.000	APBD		5 Objek	55.000.000
J U M L A H					**159.473.883.070**				**159.428.883.070**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan sebuah dokumen menyeluruh mencakup rencana pengembangan satuan-satuan pendidikan formal maupun nonformal dan informal.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 menjamin program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2024, dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pengembangan pendidikan daerah dengan tetap mengacu pada Forum MusrenbangDes, Murenbangcam, forum OPD dan Musrenbang kabupaten dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Disamping itu, usulan-usulan hasil Forum Musrenbangdes maupun Musrenbangcam dapat dijadikan landasan untuk membuat suatu kegiatan yang terukur sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, pemerintah memanfaatkan otonomi daerah seoptimal mungkin untuk memacu pendidikan daerah dalam rangka pembangunan pendidikan nasional secara keseluruhan, dalam kerangka ini Rencana Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 sekaligus merupakan masukan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan permasalahan pendidikan dan Kebudayaan di Kab. Mamuju Tengah.

Meskipun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen pengembangan pendidikan formal maupun non formal dan informal, namun dokumen ini tidak berdiri sendiri atau terpisah dari Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional, RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan, oleh karena materi substansi dasar penjabaran materi Rencana Kerja OPD mengacu pada lima pilar pendidikan yang meliputi Ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, kepastian, dan kualitas pelayanan pendidikan akan membuat masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Tentu Dokumen Perencanaan ini diharapkan dapat menjadi tolak Ukur percepatan Pemenuhan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga

Pemenuhan standar Pelayanan Pendidikan sebagaimana merupakan cita-cita setiap Negara dapat segera tercapai.

Sebagaimana RKPD Tahun 2024, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 masih akan dihadapkan pada beberapa tantangan yang diakibatkan oleh resesi global, diantaranya penurunan pertumbuhan ekonomi, menurunnya pendapatan daerah, potensi meningkatnya jumlah KK Miskin, potensi meningkatnya jumlah pengangguran, dan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Untuk itu diperlukan kerja cerdas dan upaya bersama semua pemangku kepentingan dalam melewati tantangan diatas.

Topoyo, 31 Juli 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mamuju Tengah,

Dr. H. BUSDIR, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19590908 198003 1 008

LAMPIRAN

Tabel T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		**371.795.000**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	155.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	155.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	22.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	22.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16.735.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16.735.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.894.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.894.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.666.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.666.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 Laporan	150.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2728 OB	89.142.241.665	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2728 OB	89.142.241.665	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	7.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	7.450.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	25.000.000				1 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	4 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	4 Laporan	75.000.000	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		**150.000.000**	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000				1 Laporan	30.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	120.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	120.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai PD yang dilayani		**330.000.000**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai PD yang dilayani			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	60.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	60.000.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	90.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	90.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	85.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	85.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	45.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	45.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar		**226.740.000**	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17727 Paket	13.240.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17727 Paket	13.240.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	26.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	26.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	150.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		**189.900.000**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi			
	Pengadaan Mebel	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	25.000.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	119.900.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	119.900.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		**181.794.000**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	84.795.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	84.795.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14100 Laporan	63.399.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14100 Laporan	63.399.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	33.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	33.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		**87.793.000**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	45.025.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	45.025.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	16.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	16.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	16.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	16.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	9.768.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	9.768.000	
	Program Pengelolaan Pendidikan		Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan			Program Pengelolaan Pendidikan		Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD)		**36.711.438.000**	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD)			
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 unit	300.000.000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 unit	300.000.000	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	200.000.000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	200.000.000	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	

	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	250.000.000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	250.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah RuangKelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	672.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah RuangKelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	672.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Unit	45.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Unit	45.000.000	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	116 Satuan Pendidikan	200.000.000	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	116 Satuan Pendidikan	200.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	116 Satuan Pendidikan	200.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	116 Satuan Pendidikan	200.000.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	17.044.178.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	17.044.178.000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6 Paket	180.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6 Paket	180.000.000	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	116 Satuan Pendidikan	200.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	116 Satuan Pendidikan	200.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan.	60 Orang	250.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan.	60 Orang	250.000.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 peserta	250.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 peserta	250.000.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	526 Orang	3.156.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	526 Orang	3.156.000.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	116 Satuan Pendidikan	12.764.260.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	116 Satuan Pendidikan	12.764.260.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	116 Orang	200.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	116 Orang	200.000.000	

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP)		**27.437.715.000**	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP)			
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	300.000.000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	300.000.000	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	200.000.000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	200.000.000	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	250.000.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	250.000.000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	200.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	200.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	225.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	225.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	3 Ruang	300.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	3 Ruang	300.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	200.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	200.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	200.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	200.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	5 Paket	25.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	5 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 Peserta Didik	50.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 Peserta Didik	50.000.000	
	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	154 Buku	150.000.000	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	154 Buku	150.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	125.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	125.000.000	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	38 Satuan Pendidikan	180.500.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	38 Satuan Pendidikan	180.500.000	

	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	287 Orang	1.722.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	287 Orang	1.722.000.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	16 Unit	16.042.475.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	16 Unit	16.042.475.000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	60.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	60.000.000	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1475 peserta didik	147.500.000	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1475 peserta didik	147.500.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	120 Peserta	245.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	120 Peserta	245.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	250.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	250.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	38 Satuan Pendidikan	200.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	38 Satuan Pendidikan	200.000.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	38 Satuan Pendidikan	5.265.240.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	38 Satuan Pendidikan	5.265.240.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	76 Orang	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	76 Orang	200.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun		**12.228.513.000**	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun			
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	500.000.000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	500.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	2.000.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	2.000.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah PerlengkapanPeserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	25.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah PerlengkapanPeserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	25.000.000	
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan	2 Paket	150.000.000	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan	2 Paket	150.000.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	287 Orang	1.200.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	287 Orang	1.200.000.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	4.498.113.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	4.498.113.000	

	Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	120.000.000	Pengadaan MebelPAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	120.000.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	200 Peserta Didik	120.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	200 Peserta Didik	120.000.000	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	132 Satuan Pendidikan	150.000.000	Penyedia dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	132 Satuan Pendidikan	150.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan.	60 Orang	210.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan.	60 Orang	210.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	132 Satuan Pendidikan	200.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	132 Satuan Pendidikan	200.000.000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	132 Satuan Pendidikan	2.855.400.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	132 Satuan Pendidikan	2.855.400.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	120 Orang	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	120 Orang	200.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan		**3.142.517.000**	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan			
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	300.000.000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	300.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	64 Peserta Did	200.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	64 Peserta Did	200.000.000	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidi	180.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidi	180.000.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	30 Orang	150.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	30 Orang	150.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan.	40 Orang	200.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan.	40 Orang	200.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidi	200.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidi	200.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non	30 Orang	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non	30 Orang	150.000.000	
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	I unit	670.717.000	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	I unit	670.717.000	

	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25 Lembaga	991.800.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25 Lembaga	991.800.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Kurikulum yang ditetapkan			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Kurikulum yang ditetapkan			
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Pemenuhan APK PAUD & APK Penyetaraan		**250.000.000**	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Pemenuhan APK PAUD & APK Penyetaraan			
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	60 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	60 Dokumen	250.000.000	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Persentase Muatan Lokal yang ditetapkan		**500.000.000**	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Persentase Muatan Lokal yang ditetapkan			
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	116 Orang	250.000.000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	116 Orang	250.000.000	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Satuan Pendidikan			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Satuan Pendidikan			
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Peserta didik		**600.000.000**	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Peserta didik			
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	1 Dokumen	300.000.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	1 Dokumen	300.000.000	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	1 Laporan	300.000.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	1 Laporan	300.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Cakupan Kebudayaan yang Dikelola			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Cakupan Kebudayaan yang Dikelola			
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Kebudayaan		**180.000.000**	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Kebudayaan			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30 Orang	180.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30 Orang	180.000.000	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan		**180.000.000**	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan			
	Pembinaan Sumber Daya manusia, Lembaga dan Pranata tradisional	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	180.000.000	Pembinaan Sumber Daya manusia, Lembaga dan Pranata tradisional	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	180.000.000	

VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Cakupan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan								
18	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Mamuju Tengah	Persentase Kesenian Tradisional yang Dibina		**900.000.000**						
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	350.000.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	350.000.000	
2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	70 Sertifikat	275.000.000	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	70 Sertifikat	275.000.000	
3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 lembaga	275.000.000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 lembaga	275.000.000	
VII	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Cakupan Cagar Budaya yang Dikelola								
19	Penetapan Cagar Budaya Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan		**430.000.000**						
1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	61 Objek	275.000.000	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	61 Objek	275.000.000	
2	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	155.000.000	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	155.000.000	
JUMLAH					#VALUE!					173.347.896.665	

Tabel E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

RENJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PerangkatDaerahTahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 6 + 12*		*14 = 13/5*100*		*15*
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Urusan Pendidikan dan		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Dinas Pendidikan																					Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	10.927.613.417	100%	10.779.918.657	100%	12.540.792.816	13%	1.595.867.216	36%	3.059.457.024	24%	3.429.883.356	30%	3.676.727.112	104%	11.761.934.707	204%	22.541.853.364	204%	206%	Dinas Pendidikan
01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	545.000.000,00	100%	233.267.810	100%	385.729.550,00	33,33%	49.641.950,00	33,33%	90.217.000,00	0,00%	24.979.800,00	33,33%	220.875.500,00	100,00%	385.714.250	100%	618.982.060	100%	114%	Dinas Pendidikan
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000	1	96.099.000	3	137.815.200,00		-	2	32.180.000		16.879.800	1	88.755.100	3	137.814.900	4	233.913.900	400	156	Dinas Pendidikan
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	75.000.000	1	21.999.700	1	20.942.000,00	1	3.180.000		17.757.000					1	20.937.000	2	42.936.700	200	57,25	Dinas Pendidikan
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	65.000.000	1	7.500.000	1	16.734.800,00		-					1	16.734.800	1	16.734.800	2	24.234.800	200	37,28	Dinas Pendidikan
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	1	18.000.180	1	13.894.150	1	13.889.150							1	13.889.150	2	31.889.330	200	91,11	Dinas Pendidikan
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	1	6.399.940	1	13.668.600		-					1	13.663.600	1	13.663.600	2	20.063.540	200	57,32	Dinas Pendidikan
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	185.000.000	1	83.268.990	5	182.674.800	2	32.572.800	2	40.280.000		8.100.000	1	101.722.000	5	182.674.800	6	265.943.790	120	143,75	Dinas Pendidikan
																		100%	**100%**	100%	265%	100%	114%	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	85.431.907.339	100%	85.450.625.339	100%	98.845.660.498	24,99%	12.690.006.834,00	25,03%	24.012.227.313,00	24,99%	27.099.579.075	24,99%	28.814.410.869	100,00%	92.616.224.091	100%	178.066.849.430	100%	208%	Dinas Pendidikan
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2728 OB	85.371.407.339	2.728	85.371.407.339	2.728	98.765.283.038	682	12.683.256.834	682	23.989.427.353	682	27.075.401.575	682	28.787.765.869	2.728	92.535.851.631	5.456	177.907.258.970	200	208	Dinas Pendidikan
2		Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	1	7.518.000	1	7.349.960		-	1	7.349.960				-	1	7.349.960	2	14.867.960	200	59	Dinas Pendidikan
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	35.500.000	4	71.700.000	4	73.027.500	1	6.750.000	1	15.450.000	1	24.177.500	1	26.645.000	4	73.022.500	8	144.722.500	200	408	Dinas Pendidikan
																		100%	**94%**	**1**	**208%**	**100%**	**208%**	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang sesuai standar	100%	75.000.000	100%	20.500.000	100%	49.460.150	0,00%	-	100,00%	29.580.150,00	0,00%	-	0,00%	19.860.000	100,00%	49.440.150	200%	69.940.150	200	93%	Dinas Pendidikan
1		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	75.000.000	1	20.500.000	1	49.460.150	-	-	1	29.580.150				19.860.000	1	49.440.150	2	69.940.150	200	93,25	Dinas Pendidikan
																		100%	**100%**	**200%**	**341%**	**200**	**93%**	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
04		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang sesuai standar	100%	500.000.000	100%	146.235.938	100%	286.826.510	0,00%	-	6,06%	103.898.650,00	121,21%	93.503.660	3,03%	89.424.200	130,30%	286.826.510	115%	433.062.448	115%	87%	Dinas Pendidikan
1		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	85.000.000	-	-	1	70.007.850		-	1	34.028.650				35.979.200	1	70.007.850	1	70.007.850	100	82,36	Dinas Pendidikan
2		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	250.000.000	-	-	1	101.190.000		-	1	69.870.000				31.320.000	1	101.190.000	1	101.190.000	100	40,48	Dinas Pendidikan
3		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 org	120.000.000	-	-	1	22.125.000		-					1	22.125.000	1	22.125.000	1	22.125.000	20	18,44	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat DaerahTahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 6 + 12*		*14 = 13/5*100*		*15*
4		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 org	45.000.000	30	146.235.938	30	93.503.660		-			40	93.503.660		-	40	93.503.660	70	239.739.598	28	532,75	Dinas Pendidikan
																		130%	**100%**	**115%**	**296%**	**115%**	**87%**	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Dinas Pendidikan
05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	375.000.000	100%	101.113.910	100%	310.042.000	14%	15.804.300,00	29%	117.342.243,00	14%	70.180.000	43%	106.696.180	100%	310.022.723	100%	411.136.633	100%	110%	Dinas Pendidikan
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	-	-	1	11.934.000	1	11.934.000						-	1	11.934.000	1	11.934.000	100	79,56	Dinas Pendidikan
2		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	65.000.000	2	6.509.910	2	18.490.000		2.040.300	1	2.772.600			1	13.677.000	2	18.489.900	4	24.999.810	200	38,46	Dinas Pendidikan
3		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	35.000.000	0	-	1	26.400.000		-		6.059.000			1	20.341.000	1	26.400.000	1	26.400.000	100	75,43	Dinas Pendidikan
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	260.000.000	3	94.604.000	3	253.218.000		1.830.000	1	108.510.643	1	70.180.000	1	72.678.180	3	253.198.823	6	347.802.823	200	133,77	Dinas Pendidikan
																		100%	**100%**	**100%**	**407%**	**100%**	**110%**	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
06		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	175.000.000	100%	147.400.000	100%	208.095.018	0%	-	40%	59.390.475,00	20%	119.900.000	40%	28.785.418	100%	208.075.893	100%	355.475.893	100%	203%	Dinas Pendidikan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	80.000.000	-	-	1	4.000.000							1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	5	5,00	Dinas Pendidikan
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	55.000.000	2	27.500.000	3	84.195.018		-	2	59.390.475			1	24.785.418	3	84.175.893	5	111.675.893	125	203,05	Dinas Pendidikan
2		Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	120.000.000	1	119.900.000	1	119.900.000		-		-	1	119.900.000		-	1	119.900.000	2	239.800.000	200	199,83	Dinas Pendidikan
																		100%	**100%**	**100%**	**241%**	**100%**	**203%**	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	204.000.000	100%	108.395.359	100%	172.523.204	25%	10.918.140,00	50%	48.800.360,00	0%	15.656.310	25%	96.230.630	100%	171.605.440	100%	280.000.799	100%	137%	Dinas Pendidikan
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	125.000.000	1	60.815.352	1	78.223.680		2.518.140	1	31.310.360		8.100.000		36.046.840	1	77.975.340	2	138.790.692	40	111,03	Dinas Pendidikan
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	55.000.000	2	30.000.007	2	60.699.524		-	1	9.090.000		3.656.310	1	47.283.790	2	60.030.100	4	90.030.107	40	163,69	Dinas Pendidikan
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	24.000.000	1	17.580.000	1	33.600.000	1	8.400.000		8.400.000		3.900.000		12.900.000	1	33.600.000	2	51.180.000	40	213,25	Dinas Pendidikan
																		100%	**99%**	**100%**	**258%**	**100%**	**137%**	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	115.000.000	100%	31.810.900	100%	68.005.600	7,14%	566.500,00	7,14%	14.200.000,00	14,29%	15.268.000	71,43%	37.534.100	100%	67.568.600	100%	99.379.500	100%	86%	Dinas Pendidikan
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	55.000.000	30	26.560.900	10	41.737.600		-	1	14.200.000		3.000.000	9	24.298.100	10	41.498.100	40	68.059.000	133	123,74	Dinas Pendidikan
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	25.000.000	3	5.250.000	3	16.500.000	1	566.500		-	1	2.500.000	1	13.236.000	3	16.302.500	6	21.552.500	150	86,21	Dinas Pendidikan
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000	-	-	1	9.768.000		-			1	9.768.000			1	9.768.000	1	9.768.000	100	27,91	Dinas Pendidikan
																		100%	**99%**	**100%**	**312%**	**100%**	**86%**	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat DaerahTahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 6 + 12*		*14 = 13/5*100*		*15*
	Meningkatnya Pencapaian SPM Urusan Pendidikan		Angka harapan lama sekolah																					Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan	100%	12.867.914.984	75%	12.679.676.373	100%	18.751.983.962	35%	691.520.363	17%	4.256.687.877	27%	7.535.380.945	27%	5.972.630.864	106%	18.456.220.048	181%	31.135.896.421	181%	242%	Dinas Pendidikan
01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100%	35.662.179.934	78%	43.939.069.622	100%	45.244.215.322	10,55%	150.000.200,00	38,09%	10.880.580.810,00	29,73%	17.465.593.008,00	19,73%	15.647.043.306,00	98%	44.143.217.324	88%	88.082.286.946	88%	247%	Dinas Pendidikan
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Unit				1	2.700.000	-	-							0	-	0	-	0	#DIV/0!	Dinas Pendidikan
1		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	35 Unit	18.107.179.934	31	18.107.179.934	17	19.688.500.868	-	-	1	3.815.327.350	7	7.458.047.398	9	8.407.738.696	17	19.681.113.444	48	37.788.293.378	137,1428571	208,69	Dinas Pendidikan
2		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	9 Paket	270.000.000	-	-	2	150.040.000	-	-	2	59.570.000				90.255.000	2	149.825.000	2	149.825.000	22	55,49	Dinas Pendidikan
3		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	116 Sekolah	265.000.000	131	99.999.836	116	150.000.200	116	150.000.200						-	116	150.000.200	247	250.000.036	212,9310345	94,34	Dinas Pendidikan
4		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	185 Peserta	300.000.000	-	-	210	155.735.880	-	-	50	43.961.460	20	25.960.810	110	85.813.610	180	155.735.880		155.735.880	-	51,91	Dinas Pendidikan
5		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	### Guru	450.000.000	1276	7.042.800.000	598	6.055.200.000	-	-	200	1.547.700.000	300	2.996.550.000	98	1.510.950.000	598	6.055.200.000	1874	13.098.000.000	74,96	2910,67	Dinas Pendidikan
6		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Org	270.000.000	20	72.017.243	40	150.000.000	-	-	50	5.172.000				144.828.000	50	150.000.000	70	222.017.243	116,6666667	82,23	Dinas Pendidikan
7		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	116 Sekolah	16.000.000.000	152	18.617.072.609	116	18.892.038.374,00	-	-	116	5.408.850.000		6.985.034.800		5.407.458.000,00	116	17.801.342.800	268,00	36.418.415.409,00	231	228	Dinas Pendidikan
																		98%	**98%**	**88%**	**200%**	**88%**	**247%**	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SMP/MTs)	100%	9.840.000.000	85%	2.408.345.354	100%	19.664.619.425	47,81%	200.000.050,00	18,33%	4.908.171.695,00	31,47%	8.423.335.149,00	25,50%	6.127.546.128,00	123%	19.659.053.022	104%	22.067.398.376	104%	224%	Dinas Pendidikan
1		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	45 Unit	9.000.000.000	5	2.043.008.000	30	19.145.378.955	-	-	10	4.730.958.395	16	8.328.988.999	4	6.080.313.158	30	19.140.260.552	35	21.183.268.552	78	235,37	Dinas Pendidikan
2		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	120.000.000	0	-	3	50.180.000	-	-			3	48.380.000		1.800.000	3	50.180.000		50.180.000	-	41,82	Dinas Pendidikan
3		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	80 Peserta	120.000.000	2650	125.334.385	60	45.974.150	-	-			60	45.966.150		-	60	45.966.150	2.710	171.300.535	3.388	142,75	Dinas Pendidikan
4		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	170 Peserta	300.000.000	0	-	60	45.872.970	-	-					60	45.432.970	60	45.432.970		45.432.970	-	15,14	Dinas Pendidikan
5		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	37 Org	150.000.000	20	100.000.185	60	200.000.050	120	200.000.050		-				-	120	200.000.050	140	300.000.235	378	200,00	Dinas Pendidikan
6		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	38 Sekolah	150.000.000	40	140.002.784	38	177.213.300,00	-	-	36	177.213.300,00				-	36	177.213.300	76	317.216.084,00	200,00	211,48	Dinas Pendidikan
																		123%	**100%**	**104%**	**916%**	**104%**	**224%**	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
03		Pengelolaan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	4.585.000.000	72%	3.508.390.587	100%	8.044.504.100	53,73%	1.931.881.200,00	9,70%	1.141.324.752,00	6,87%	2.961.337.852,00	34,33%	1.982.239.922,00	105%	8.016.783.726	88%	11.525.174.313	88%	251%	Dinas Pendidikan
1		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	131 Unit	250.000.000	2	449.990.108	5	4.556.713.000	-	-	5	1.047.903.252		1.696.595.852		1.812.096.896	5	4.556.596.000	7	5.006.586.108	5	2002,63	Dinas Pendidikan
2		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	150.000.000	-	-	5	50.000.000		-			5	50.000.000			5	50.000.000		50.000.000	-	33,33	Dinas Pendidikan
3		Penyelengaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	80 Peserta	360.000.000	40	50.000.222	200	100.036.100	-	-	0	-			200	97.036.100	200	97.036.100	240	147.036.322	300	40,84	Dinas Pendidikan
4		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	80 Org	180.000.000	40	100.000.200	40	117.500.300	40	117.500.300							40	117.500.300	80	217.500.500	100	120,83	Dinas Pendidikan
5		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Org	120.000.000	40	100.000.017	80	199.908.300	80	199.908.300							80	199.908.300	120	299.908.317	300	249,92	Dinas Pendidikan
6		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	130 Paud	300.000.000	40	160.000.040	60	166.531.800	-	-	60	93.421.500,00			30	73.106.926,00	90	166.528.426	130,00	326.528.466,00	100,00	108,84	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat DaerahTahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 6 + 12*		*14 = 13/5*100*		*15*
7		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	130 Paud	3.000.000.000	113	2.648.400.000	130	2.653.800.000	90	1.414.458.000,00			41	1.214.742.000			131	2.629.200.000		5.277.600.000,00	-	175,92	Dinas Pendidikan
8		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	150 Org	225.000.000	-	-	150	200.014.600	150	200.014.600							150	200.014.600		200.014.600,00	-	88,90	Dinas Pendidikan
																		105%	**100%**	**88%**	**329%**	**88%**	**251%**	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	
04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	1.384.480.000	65%	862.899.930	100%	2.054.597.000	27,78%	484.200.000,00	2,78%	96.674.250,00	41,67%	1.291.257.770,00	27,78%	133.694.100,00	100,00%	2.005.826.120	83%	2.868.726.050	0,825	207%	Dinas Pendidikan
1		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	144.480.000	-	-	1	670.717.000		-	1	94.474.250		458.257.770		117.814.100	1	670.546.120		670.546.120	-	464,11	Dinas Pendidikan
2		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	80 Peserta	240.000.000	200	87.999.930	10	18.080.000		-		2.200.000			10	15.880.000	10	18.080.000	210	106.079.930	263	44,20	Dinas Pendidikan
3		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25 Sekolah	1.000.000.000	13	774.900.000	25	1.365.800.000	10	484.200.000,00			15	833.000.000			25	1.317.200.000		2.092.100.000	-	209,21	Dinas Pendidikan
																		100%	**98%**	83%	332%	83%	207%	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya aksesbilitas penduduk dan partisipasi terhadap layanan		Rata-rata lama sekolah																					Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum yang ditetapkan	100%	396.666.667	67%	139.639.510	3433%	215.727.793	17%	62.408.417	50%	86.246.633	0%	3.200.000	33%	63.834.496	100%	215.689.546	167%	355.329.056	167%	90%	Dinas Pendidikan
01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	100%	470.000.000	100%	200.000.000	101	255.791.650	0,99%	110.763.220,00	0,00%	-	0,00%	-	99,01%	145.028.430,00	100%	255.791.650	100%	455.791.650	100%	97%	Dinas Pendidikan
1		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	120.000.000	-	-	1	110.763.220	1	110.763.220	0					-	1	110.763.220	1	110.763.220	100%	92,30	Dinas Pendidikan
2		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	215 Org	350.000.000	30	200.000.000	100	145.028.430	-	-	0				100	145.028.430	100	145.028.430	130	345.028.430	60%	98,58	Dinas Pendidikan
																		100%	**100%**	100%	228%	100%	97%	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan	100%	120000000	-	-	1	113.374.040	0,00%	-	100,00%	113.275.040,00	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	113.275.040	50%	113.275.040	50%	94%	Dinas Pendidikan
1		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	120.000.000	-	-	1	113.374.040		-	1	113.275.040					1	113.275.040	1	113.275.040	100	94,40	Dinas Pendidikan
																		100%	**100%**	50%	#DIV/0!	50%	94%	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	#DIV/0!	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
03		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik	100%	600.000.000	100%	218.918.531	100%	278.017.690	50,00%	76.462.030,00	50,00%	145.464.860,00	0,00%	9.600.000,00	0,00%	46.475.058,00	100,00%	278.001.948	100%	496.920.479	100%	83%	Dinas Pendidikan
1		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	1 Dokumen	300.000.000	1	70.779.336	1	114.862.030	1	76.462.030	-	9.600.000		9.600.000		19.200.000	1	114.862.030	2	185.641.366	200	61,88	Dinas Pendidikan
2		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Laporan	300.000.000	1	148.139.195	1	163.155.660	-	-	1	135.864.860				27.275.058	1	163.139.918	2	311.279.113	200	103,76	Dinas Pendidikan
																		100%	**100%**	100%	227%	100%	83%	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat DaerahTahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 6 + 12*		*14 = 13/5*100*		*15*
	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Budaya		Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Budaya																					Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Kebudayaan yang Dikelola	30	160.000.000	15	70.400.021	16	264.394.735	50%	53.047.000	50%	38.052.750	0%	103.491.500	0%	44.595.735	100%	239.186.985	16	309.587.006	53%	193%	Dinas Pendidikan
01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek budayan yang Dikelola	30	120.000.000	30	140.800.042	30	253.800.000	100,00%	106.094.000,00	0,00%	76.105.500,00	0,00%	7.200.000,00	0,00%	14.400.000,00	100%	203.799.500	1550%	344.599.542	52%	287%	Dinas Pendidikan
1		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Org	120.000.000	30	140.800.042	30	253.800.000,00	30	106.094.000		76.105.500		7.200.000		14.400.000	30	203.799.500	60	344.599.542	120	287,17	Dinas Pendidikan
																		100%	**80%**	1550%	245%	52%	287%	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	64%	200.000.000	-	-	1	274.989.470	0,00%	-	100%	-	0,00%	199.783.000,00	0,00%	74.791.470,00	100%	274.574.470	50%	274.574.470	78%	137%	Dinas Pendidikan
1		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	200.000.000	-	-	1	274.989.470	-	-	1			199.783.000		74.791.470	1	274.574.470	1	274.574.470	100	137,29	Dinas Pendidikan
																		100%	**100%**	50%	#DIV/0!	78%	137%	Dinas Pendidikan
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	#DIV/0!	Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								146	176.510.251.227		15.826.338.424		41.837.253.098		57.797.173.624		53.585.035.311	103%	169.045.800.457					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																		**103%**	**95,77**			**53,64**	**6,67**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Topoyo, Januari 2023
Kepala Dinas

Dr. HABUSDIR, S.Pd. M.M
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19641201 198803 1 012



RENCANA KERJA (RENJA)

Tahun 2024





DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah S.W.T, yang senatiasa memberi Rahmat dan Karunianya atas terselesaikannya, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024 adalah implementasi dan amanat Undang
– Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024 pada hakikatnya adalah merupakan komitmen bersama yang lahir dari Nilai dan Norma Organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan dimasa mendatang.

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki arti yang sangat penting dalam suatu rencana kerja dalam melaksanakan program kerja yang terarah dan berkesinambungan dalam pembangunan kedepannya. Karena merupakan suatu acuan dalam menentukan arah program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang dijadikan sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi semua Pegawai di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinnya masing – masing.

Topoyo, Maret 2024

Mengatatahui,
Kepala Dinas

H. A. GAPRI S.Sos., MM
Pangkat : Pembina Muda IV/c
NIP. 19640423 199703 1 004

DAFTARA ISI

Kata Pengantar... i
DAFTAR ISI..... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang... 1
1.2 Landasan hukum..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistimatika... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... 7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 18
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 21
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 25
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT..... 52
BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 58
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 59
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN..... 60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 63
BAB V PENUTUP. 78

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembagunan Daerah secara sistimatis terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan janejang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangkah menegah maupun perencanaan tahunan, untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan renjana pembagunan jangka panjang (RPJP) Daerah, rencana pembagunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki rencana kerja atau (RENJA) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada RESTRA Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunn rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (RAPBD), kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan, penyusunnannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembagunan melalui penyelenggaraan musrembang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, menyusun Rancana Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Rencana Pembagunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoprasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatakan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah pejabat dan staf yang benar-benar siap dalam hal waktu dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah.
b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
c. Penyusunan Agenda Kerja Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah.
d. Pengumpulan Data dan Informasi Rencana kerja (Renja).

Rencana Kerja tahun 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah, jadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembagunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembagunan yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan acuan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Akhir RENJA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah:

a. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
b. Undang-undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang No. 10 tahun 2009, Tentang Kepariwisataan;
d. Undang-Undang No. 24 tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;
e. Undang-Undang No. 40 tahun 2009, Tentang Kepemudaan;
f. Undang-Undang No. 11 tahun 2022, Tentang Keolahragaan;
g. Undang-Undang No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
h. Undang-UndangNo. 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
i. Undang-Undang No. 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahan 2005-2025;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasipembangunan daerah, tata cara evaluasirancangan peraturan daerah tentang rencanapembangunan jangka panjang daerah danrencana pembangunan jangka menengah daerah,serta

tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelakasanaan Rencana Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi , kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiranklasifikasi, kodefikasi dan nomenklatir perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
m. Peraturan Daerah Mamuju Tengah Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
n. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022;
o. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Mamuju Tengah Tahun 2024, menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur Penilaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023 Sedangkan tujuan :

1. Acuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam mengoprasionalkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kab. Mamuju Tengah tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai VISI dan MISI Bupati, Wakil Bupati Mamuju Tengah.
2. Merumuskan program dan kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah menjadi wewenangnya di Tahun 2024.

1.4. SISTIMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Kabupaten,serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah,dan ketentuan Peraturan lainnyayang mengatur tentang SOTK Kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengurangi pokok pembahasan dalam penulisan Renja Perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian reviu terhadap hasil evaluasi pelakasanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahun Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSKP dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2020.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat Pelayanan Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPM, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam rumusan program dan kegiatan perioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan akhir RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok nemun besarannya berbeda;
4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dalam bagian inin diuraikan hasil kajian terhadap program/kerja yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dangan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyeleggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misalnya :
   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
   b. Pencapaian SDGs;
   c. Pengentasan Kemiskinan;
   d. Pencapaian NSPK dan SPM;
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
   f. Pengembangan daerah terisolir;
   g. dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
   a. Jumlah Program dan Kegiatan;
   b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke 5 (lima) Kecamatan dan apa saja yang terfokus pada 5 (lima) Kecamatan atau kelompok masyarakat tertentu);
   c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil penjabaran table.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam jengka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut;
4. Pada bagian lembaran terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah serta Cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Mamuju Tengah adalah penjabaran perencanaan Tahunan dan rencana strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tesebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di susun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujaun-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.Terkait dengan hal tesebut rencana kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah menerangkan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan penelaan usulan program dan kegiatan Mayarakat.

A. Penetapan indikator kerja, merupakan ukuran kuatitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan dan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.Untuk itu agar berperannya Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai tugas pokok danfungsinya, kedepan isu-isu strategis yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya PERDA terkait retribusi sektor pariwisata
2. Perlunya Pembinaan sumber daya manusia yang handal di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, yang berorientasi pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Menjadikan Kab. Mamuju Tengah sebagai Daerah Tujuan wisata di Sulawesi Barat.

4. Perlunya membuat konsep Pariwisata yang terintegrasi, yang berkualitas dan memiliki daya saing.
5. Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
6. Perlunya menjadikan industri pariwisata, ekonomi kreatif yang religius berdasarkan adat istiadat di Kab. Mamuju Tengah.
7. Perlunya mengsingkronkan industri pariwisata, ekonomi kreatif yang di dukung oleh *Stakeholder* terkait.
8. Perlunya dilakukan promosi Kepariwisataan secara gencar untuk meningkatkan destinasi wisata sebagai lokomotif ekonomi kota.
9. Perlunya menciptakan event-event dan atraksi seni dan budaya yang berkualitas bagi pengembanganpariwisata daerah.
10. Perlunya menciptakan iklim investasi yang sehatdi bidang pariwista kepemuda dan olahraga.
11. Perlunya menciptakan organisasi pemuda yang kreatif dan produktif yang berkemampuan untuk tumbuh sehat, maju, mandiri, bertaqwa, berjiwa usaha, unggul dan kompetitif.
12. Perlunya pengembangan atlet-atlet Olahraga prestasi yang handal dan profesional serta menciptakan Olahraga rekreasi dan kemasyarakatan Olahraga sebagai penopang sektor Pariwisata.

Pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2021 dengan alokasi sebesar **Rp. 4.749.202.584,00-** (*Empat milyar Tujuh ratus empat puluh sembilan juta Dua ratus dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah koma nol*).Terurai dalam 16 (enam belas) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari sebelumnya.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 dan Realisasi tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN	
	2022	2023	2022	2023
Belanja	**4.934.003.013,00**	**16.169.778.556**	**3.033.517.569,00**	**16.169.778.556**
Belanja Operasi		8.043.932.528		8.043.932.528
Belanja Pegawai	1.046.406.940,00	1.227.700.089	699.710.369,00	1.227.700.089
Belanja Barang dan Jasa	1.833.056.502,00	2.552.883.337	1.112.439.200,00	2.552.883.337
Belanja Modal	42.189.970,00	81.913.500	42.189.000,00	81.913.500,00
Belanja Hibah	2.263.349.102	4.263.349.102	1.179.179.000,00	4.263.349.102
Belanja Bantuan social	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BELANJA	**4.934.003.013,00**	**16.169.778.556**	**3.033.517.569,00**	**16.169.778.556**

Tabel 2.2

Penjelasan Perbelanja Realisasi Anggaran

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
	BIDANG KEPEMUDAAN	**1.098.744.170**	**1.084.653.724**	**14.090.446**	
I	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**1.098.744.170**	**1.084.653.724**	**14.090.446**	
1	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor**	**81.239.115**	**81.239.115**	-	
	Belanja Barang Pakai Habis	31.789.115	31.789.115	-	
	Belanja Jasa Kantor	49.450.000	49.450.000	-	
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000	3.484.800	-	
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.050.000	7.050.000	-	
2	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula**	**2.921.598**	**2.921.500**	**98**	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	200.000	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	481.598	481.500	98	
	Belanja Perjalanan Dinas	2.240.000	2.240.000	-	

3	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**164.003.755**	**149.913.500**	14.090.255	
	Belanja Barang Pakai Habis	64.003.755	60.573.500	3.430.255	
	Belanja Jasa Kantor	25.700.000	18.450.000	7.250.000	
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.000.000	17.000.000	-	
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	56.500.000	53.090.000	3.410.000	
	Belanja Perjalanan Dinas	800.000	800.000	-	
4	**Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera**	**850.579.702**	**850.579.609**	93	
	Belanja Barang Pakai Habis	276.603.702	276.603.609	93	
	Belanja Jasa Kantor	34.000.000	34.000.000	-	
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	86.700.000	86.700.000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	393.276.000	393.276.000	-	
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000	60.000.000	-	
II	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**160.549.389**	**160.547.800**	**1.589**	
5	**Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota**	**160.549.389**	**160.547.800**	**1.589**	
	Belanja Barang Pakai Habis	27.379.389	27.377.800	1.589	
	Belanja Jasa Kantor	69.950.000	69.950.000	-	
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.400.000	8.400.000	-	
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	46.500.000	46.500.000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas	8.320.000	8.320.000	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**88.223.870**	**88.223.786**	**84**	
III	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	11.724.000	11.724.000		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	11.724.000	11.724.000		
	Belanja Perjalanan Dinas	11.724.000	11.724.000		
IV	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**76.499.870**	**76.499.786**	**84**	
6	**Pengembangan Organisasi Keolahragaan**	**76.499.870**	**76.499.786**	**84**	
	Belanja Barang Pakai Habis	43.847.870	43.847.786	84	
	Belanja Jasa Kantor	7.600.000	7.600.000	-	

	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000	6.000.000	-	
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.800.000	7.800.000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.252.000	11.252.000	-	
7	**Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah**	**265.000.000**	**265.000.000**	**-**	
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	265.000.000	265.000.000	-	
	SEKRETARIAT DINAS	**1.320.083.293**	**1.306.655.603**	**13.427.690**	
V	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**44.368.004**	**44.366.956**	**1.048**	
8	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**16.626.256**	**16.626.256**	**-**	
	Belanja Barang Pakai Habis	4.346.256	4.346.256	-	
	Belanja Jasa Kantor	5.680.000	5.680.000	-	
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.600.000	6.600.000	-	
9	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**8.626.484**	**8.626.300**	**184**	
	Belanja Barang dan Jasa	8.626.484	8.626.300	184	
10	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	**8.626.484**	**8.626.300**	**184**	
	Belanja Barang dan Jasa	8.626.484	8.626.300	184	
11	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**5.306.484**	**5.306.300**	**184**	
	Belanja Barang dan Jasa	5.306.484	5.306.300	184	
12	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.182.296**	**5.181.800**	**496**	
	Belanja Barang dan Jasa	**5.182.296**	**5.181.800**	**496**	
VI	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.227.700.089**	**1.193.556.440**	**34.143.649**	
13	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**828.074.081**	**815.404.441**	**12.669.640**	
	Belanja Gaji Pokok PNS	699.989.875	699.989.875		
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	87.304.975	87.304.975		
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	101.084.750	101.084.750		
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.463.000	23.463.000		
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.502.500	8.502.500		
	Belanja Tunjangan Beras PNS	45.523.212	45.523.212		
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.772.207	2.772.207		
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.424	10.424		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	185.503.596	185.503.596	-	
	Belanja Iuran Jaminan PNS	37.150.940	37.150.940		

	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36.394.610	36.394.610		
14	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**80.416.377**	**80.416.198**	**179**	
	Belanja Barang dan Jasa	80.416.377	80.416.198	179	
15	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**5.848.927**	**5.848.800**	**127**	
	Belanja Barang dan Jasa	5.848.927	5.848.800	127	
16	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**5.848.927**	**5.848.500**	**427**	
	Belanja Barang dan Jasa	5.848.927	5.848.500	427	
VII	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**5.250.000**	**5.250.000**		
17	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000	5.250.000		
VIII	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**19.950.000**	**19.950.000**	**-**	
18	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**19.950.000**	**19.950.000**	**-**	
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000	15.000.000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000	4.950.000		
IX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**160.988.438**	**160.963.296**	**25.142**	
19	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**7.645.784**	**7.645.700**	**84**	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.645.784	7.645.700	84	
20	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**26.810.888**	**26.810.830**	**58**	
	Belanja Barang Pakai Habis	26.810.888	26.810.830	58	
21	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	7.581.600	7.581.600	**-**	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.581.600	7.581.600	-	
22	**Penyediaan Bahan/Material**	**4.425.166**	**4.425.166**		
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.425.166	4.425.166		
23	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**11.700.000**	**11.700.000**		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.700.000	11.700.000	**-**	
24	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**102.825.000**	**102.800.000**	**-**	
	Belanja Perjalanan Dinas	102.825.000	102.800.000	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**11.913.100**	**11.913.100**		
	Belanja Modal Alat Pendingin	3.748.100	3.748.100		
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	8.165.000	8.165.000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**3.015.600**	**3.015.600**		
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.015.600	3.015.600		

X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**119.991.000**	**119.991.000**	**-**	
25	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**119.991.000**	**119.991.000**	-	
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	119.991.000	119.991.000	-	
26	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**37.000.000**	**37.000.000**		
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	37.000.000	37.000.000		
27	**Pengadaan Mebel**	**29.984.800**	**29.984.800**		
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	29.984.800	29.984.800		
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.789.800	14.789.800		
XI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.424.830**	**50.415.227**	**9.603**	
28	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**7.098.927**	**7.098.927**	**-**	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.898.927	3.898.927	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.200.000	3.200.000	-	
29	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**28.199.419**	**28.190.000**	**9.419**	
	Belanja Jasa Kantor	28.199.419	28.190.000	9.419	
30	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**13.300.000**	**13.300.000**		
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.300.000	13.300.000		
31	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**5.026.484**	**5.026.300**	**184**	
	Belanja Barang dan Jasa	5.026.484	5.026.300	184	
XII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.155.975**	**51.155.975**		
32	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**33.327.300**	**32.857.250**	**470.050**	
	Belanja Barang Pakai Habis	32.601.595	32.601.595	-	
	Belanja Jasa Kantor	18.554.380	18.554.380	-	
	BIDANG PARIWISATA				
XIII	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**702.371.222**	**702.371.222**		
33	**Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**4.466.484**	**4.466.484**	**-**	
	Belanja Barang Pakai Habis	626.484	626.484	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.840.000	3.840.000		
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	527.450.000	527.450.000		
34	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**122.454.738**	**122.454.738**		
	Belanja Barang Pakai Habis	32.534.738	32.534.738	-	
	Belanja Jasa Kantor	19.950.000	19.950.000	-	

	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	19.300.000	19.300.000	-	
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	35.200.000	35.200.000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.470.000	15.470.000	-	
XIV	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**70.099.915**	**70.099.915**		
35	**Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**70.099.915**	**70.099.915**		
	Belanja Barang Pakai Habis	9.087.915	9.087.915		
	Belanja Jasa Kantor	29.880.000	29.880.000		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.132.000	31.132.000		
XV	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**400.002.468**	**399.986.700**	**15.768**	
36	**Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota**	**400.002.468**	**399.986.700**	**15.768**	
	Belanja Barang Pakai Habis	294.362.468	294.346.700	15.768	
	Belanja Jasa Kantor	25.500.000	25.500.000	-	
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	62.500.000	62.500.000	-	
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.840.000	3.840.000	-	
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.800.000	13.800.000	-	
XVI	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**64.099.825**	**64.099.700**	**125**	
37	**Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif**	**64.099.825**	**64.099.700**	**125**	
	Belanja Barang Pakai Habis	10.179.825	10.179.700	125	
	Belanja Jasa Kantor	31.790.000	31.790.000	-	
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	-	
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.250.000	8.250.000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.880.000	10.880.000	-	
XVII	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**140.000.000**	**140.000.000**		
	Pengembangan Sistem Pemasaran	**140.000.000**	**140.000.000**		
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	140.000.000	140.000.000		
XVIII	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**1.193.500.000**	**1.193.500.000**		
38	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor**	**165.000.000**	**165.000.000**		
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	165.000.000	165.000.000		

39	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula**	**288.500.000**	**288.500.000**		
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	288.500.000	288.500.000		
40	**Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda**	**740.000.000**	**740.000.000**		
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	650.000.000	650.000.000		
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	90.000.000	90.000.000		
XIX	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**537.399.102**	**537.399.102**		
41	**Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota**	**537.399.102**	**537.399.102**		
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	372.500.000	372.500.000		
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	164.899.102	164.899.102		
XX	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.600.000.000**	**1.600.000.000**		
42	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota**	**1.600.000.000**	**1.600.000.000**		
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	1.600.000.000	1.600.000.000		
XXI	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**265.000.000**	**265.000.000**		
43	**Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah**	**265.000.000**	**265.000.000**		
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	265.000.000	265.000.000		

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan di tempuh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pelayanan Prima

   Strategi :

   a. Tersedianya fasilitas pendukung pada pelayanan prima dan perlegkapan kerja aparatur.
   b. Tersedianya sarana dan prasarana Pariwisata,kepemudaan dan Olahraga..
   c. Meningkatkan SDM aparatur.

2. Kebijakan Peningkatan Pariwisata, Ekonomi Kreatif yang berbasis ekonomi kerakyatan

   Strategi :

   a. Menyediakan data base potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif Daerah.
   b. Meningkatkan SDM pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
   c. Meningkatkan sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
   d. Meningkatkan even-even Pariwisata dan Ekonomi Kreatif promosi Sektor Pariwisata.
   e. Meningktatkan peranan dan kerjasama bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan investor/pengusaha dan masyarakat.

3. Kebijakan Pengembangan Generasi Muda yang Kreatif,Maju,Sehat,Bertaqwa, Unggul dan kompetitif

   Strategi :

   a. Menyediakan data base potensi Kepemudaan.
   b. Meningkatkan SDM Kepemudaan
   c. Meningkatnya Organisasi Kepemudaan yang mendorong pembangunan daerah
   d. Meningkatkan wira usaha muda.

4. Kebijakan Peningkatan Olahraga Prestasi, tradisional dan Rekreasi Strategi :

   a. Menigkatkan sarana dan prasarana Olahraga prestasi, tradisional dan rekreasi.
   b. Meningkatkan kegiatan kompetisi Olahraga prestasi, tradisional dan rekreasi even-even berskala regional dan nasional.
   c. Memberikan penghargaan terhadapatlit berprestasi dalam Olahraga.
   d. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga di kab. Mamuju Tengah

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menganilisi Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju tengah, tentunya mengacu pada Indikator kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukan kinerja yang dicapai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD.

Untuk mengukut keberhasilan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tentunya mengacupada indikator yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikuit :

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten

Mamuju Tengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN					FORMULASI HITUNGAN	SUMBE DATA
				1	2	3	4	5		
			%	0.45 %	0.76 %	1.08 %	1.39 %	1.71 %	Jumlah Organisasi Pemuda Cabang Olahraga Terdata X 100%Jumlah Organisasi Pemuda dan Cabang Olahraga yang di bina	Bidang Kepemuda
1	Meningkatnya Kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	0.35 %	0.76 %	1.07 %	1.39 %	1.71 %	Jumlah Organisasi Pemuda Terdata X 100%Jumlah Organisasi Pemuda yang di bina dan berprestasi	Bidang Kepemuda
		Persentase Cabang Olahraga yang Aktif dalam kompetisi Daerah	%	3.75%	1.25%	1.75%	2.25%	2.75%	Jumlah Cabang Olahraga Terdata X 100%Jumlah Cabang Olahraga yang di bina dan berprestasi	Bidang Kepemuda dan Olahra
									$\frac{Jumlah\ wirausaha\ muda}{Jumlah\ seluruh\ wirausaha} x\ 100$ Jumlah Kontribusi sektor pariwisata di semua destinasi(kebidang)	Bidang Pariwisa
2	Meningkatnya daya saing wisata	Jumlah Wisatawan Asing dan Domistik	Jmh	17.000 Domistik dan 0Asing	45.000 Domistik dan 0Asing	46.000 Domistik dan 10 Asing	46.500 Domistik dan 10 Asing	47.000 Domistik dan 10 Asing	Jumlah Pengunjung di semua Destinasi dan kegiatan EVEN	Bidang Pariwisa
		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersertifikat	%	23%	25%	27%	29%	30%	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang bersetifikat X 100%Jumlah pelaku ekonomi kreatif	Bidang Ekonom Kreati

Permasalahan

Banyak hal yang perlu dibenahi dalam menjalankan tupoksi yang diemban oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, namun hal yang paling sentral adalah kejelasan atas status asset yang dikelola serta pentingnya ruang kerja atau kantor yang representative dalam pengelolaan pengambangan serta peningkatan destinasi wisata, peran serta pemuda serta memasyarakatkan olahraga di tengah-tengah masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Belum adanya peraturan terkait retribusi sektor Pariwisata
2. Kepemilikan lokasi objek wisata sebagian besar masih merupakan tanah yang belum berstatus.
3. Relatif terbatasnya dana yang tersedia untuk mendukung pengembangan sector Pariwisata
4. Belum adanya dukungan jasa-jasa komersil pada lokasi-lokasi objek wisata yang ada dalam bentuk pusat rekreasi, pusat souvenir, dan cendramata
5. Masih terbatasnya akomodasi hotel,penginapan,wisma yang memadai untuk wisatawan.
6. Belum adanya sarana transportasi yang berkuwalitas yang dapat mendukung kelancaran dan kenyamanan wisatawan untuk mengunjungi objek wisata yang ada.
7. Belum adanya biro-biro perjalanan untuk mendukung pengelolaan sektor Pariwisata.
8. Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan umum yang bersih dan layak di lokasi Objek-objek wisata yang ada yang memungkinkan wisatawan menikmati objek wisata dengan nyaman.
9. Masih adanya sikap masyarakat yang kurang mendukung pengembangan objek wisata yang ada.
10. Terdapat beberapa objek wista yang belum mempunyai Master Plan Kepariwisataan.
11. Belum adanya sarana dan prasarana Olahraga yang Representatif
12. Belum adanya Master Plan Sarana dan prasarana penunjang Olahraga/Kepemudaan.
13. Belum terdata dan infentarisasi organisasi kepemudaan dan kegiatan kepemudaan.

Dari identifiseksi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang di laksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistimatis dan terstruktur.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dengan mengunakan analisa SWOT (strength, Weknes, Opportunity, Treath) dilakukan identifikasi factor strategis yang sangat perlu dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas suatu organisasi.Lingkungan strategis tersebut sendiri terdiri dari faktor lingkungan eksternal.Pada analisa SWOT faktor internal dan Eksternal yang sangat mempengaruhi adalah :

A. Strengthness

1. Dengan Otonomi Daerah dan perangkat hukumnya akan mampu meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membangun destinasi unggulan khususnya pengembangan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa dan sarana wisata.
2. Adanya Master Plan atau rencana pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah secara terpadu.
3. Telah tersedianya standart, pedoman teknis, kriteria dan prosedur pengelolaan Kebudayaan dan Pariwisata, Ekomoni Kreatif.
4. Potensi ekonomi pariwisata relative besar dan menjanjikan untuk meningkatkan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, pemerintah berusaha untuk memberikan kemudahan agar pengusaha tertarik untuk berusaha di bidang Pariwisata, dan sebaliknya para pengusaha sendiri berminat cukup besar untuk mengembangkan usahanya di bidang Pariwisata, sehingga jumlah usaha Pariwisata semakin meningkat;
5. Sosialisasi branding baru untuk pasar luar negeri “Indonesia The Ultinaite in Diversity” dan untuk pasar dalam negeri “Kenali Negerimu, Cintai Negerimu” diharapkan akan membangkitkan Citra Pariwisata (dalam dan Luar Negeri)
6. Adanya jalinan kerja sama yang harmonis antara Pemerintah Daerah, Pelaku pariwisata dan komponen pariwisata untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan pembangunan pariwisata;
7. Tersedianya teknologi informasi dan Telekomunikasi untuk melakukan promosi;
8. Tersedianya Sumber Daya Manusia Kepariwisataan
9. Adanya wadah Organisasi Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Ekonomi Kreatif.
10. Tingginya Komitmen Pemerintah terhadap pengembangan Pariwisata Pemuda, Olahraga dan Ekonomi Kreatif.
11. Adanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten di Bidang Pariwisata Pemuda, Olahraga dan Ekonomi Kreatif.

B. Weakness

1. Data base pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan Pembangunan Sektor Pariwisata yang actual
2. Masih rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan produk local
3. Krisis Nilai jati diri (identitas) Nasional, nilai-nilai solidaritas social, kekeluargaan, keramah tamahan sosial dan rasa cinta tanah air yang penuh dianggap sebagai kerukunan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia, mulai pudar bersamaan dengan meningkatnya nilai-nilai materialisme.
4. Kurang tersosialisasinya standar, pedoman teknis, kriteri dan prosedur pengembangan nilai budaya
5. Rendahnya pengelolaan destinasi Pariwisata khususnya dalam pengemasan daya tarik wisata ke dalam produk Pariwisata dan paket- paket wisata.
6. Belum optimalnya peran masyarakat dan insanPariwisata dalam pembangunan Kepariwisataan
7. Belum efektifnya upaya pemasaran dalam dan luar Negeri
8. Obyek dan daya tarik wisata belum tertata secara optimal
9. Belum optimalnya pola kemitraan masyarakat dibidang Kepariwisataan 10.Kurangnya aksesibilitas menuju obyek wisata dan daya tarik wisata potensial

11.Belum optimalnya pengelolaan usaha jasa dan sarana wisata 12.Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai

13. Sarana dan prasarana bidang Pariwisata,Ekonomi Kreatif,Kepemuda, Olahraga dan yang belum memadai
14. Belum optimalnya upaya meningkatkan SDM Pegawai pada Dinas Pariwisata Kepemudaan danOlahraga.
15. Terbatasnya dana Pembinaan Olahraga, Promosi wisata dan pengadaan sarana dan prasarana Pariwisata Kepemudaan, Olahraga dan Ekonomi Kreatif.
16. Belum adanya database bidang Pemuda dan Olahraga.

C. Opportunities

1. Kode etik pariwisata dunia membantu proses pelestarian benda peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) agar tetap lestari dan mampumember manfaat.
2. Dengan semakin tersegmentasinya wisatawan yang memiliki motovasi khusus, menuntut destinasi yang mampu menawarkan keanekaragaman produk wisata.
3. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis diklaim suka membantu dan ramah yang merupakan modal untuk mambangun industri pariwisata sebagai industry jasa.
4. Adanya peluang dengan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi Kepariwisataan Kabupaten Mamuju Tengah
5. Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan peningkatan obyek dan daya tarik wisata
6. Adanya produk usaha jasa dan sarana yang berdaya saing tinggi
7. Adanya komitmen dan terpadu antara pemerintah sebagai Fasilitator dengan masyarakat dan swasta untuk memajukan pembangunan Kepariwisataan
8. Adanya komitmen yang kuat di bidang birokrasi perijinan dalam menumbuhkan keinginan pengusaha mengiinvestasikan modalnya di Kabupaten Mamuju Tengah
9. Terbukanya kesempatan bagi aparat pariwisata dalam mengembangkan sumber dayanya
10. Adanya kewenangan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang diberikan oleh pemerintah Pusat dan Provinsi
11. Adanya berbagai jenis pelatihan kepemudaan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi
12. Adanya penghargaan atas prestasi dibidang Olahraga oleh Pemerintah 13.Terciptanya kesempatan untuk meningkatkan prestasi Olahraga
14. Adanya komitmen Pemeritah Pusat dan Provinsi untuk pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan
15. Terbukanya peluang kerja sama di bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga
16. Letak geografis kabupaten Mamuju Tengah yang strategis, kondisi iklim dan pemandangan alam yang mendukung
17. Adanya kalender even Pariwisata Nasional yang melibatkan Daerah- daerah di Sulawesi barat yang dapat dijadikan promosi Pariwisata Daerah di tingkat Internasional
18. Terdapatnya potensi Pariwisata tengah kota yang dapat ditumbuh kembangkan menjadi wisata unggulan keluarga tengah kota

D. Treathness

1. Lemahnya SDM pengelola peninggalan sejarah kepurbakalaan dan budaya lokal, serta pengelolaan obyek dan daya tarik wisata
2. Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam Negeri masih rendah karena keterbatasan informasi
3. Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan aspek kepentingan dan manfaat bagi masyarakat lokal
4. Adanya kesamaan potensi Kepariwisataan dengan daerah lain, masih tingginya persaingan antar daerah dalam pengelolaan Pepariwisataan Pemuda dan Olahraga
5. Masuknya pengaruh budaya asing yang berkembang di masyarakat
6. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat di bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga
7. Adanya daerah lain/daerah pesaing yang memiliki SDM dan sarana Wisata olahraga yang lebih unggul
8. Belum tersedianya Dokumen perencanaan pembangunandaerah khususnya sector pariwisata sehingga pembangunan kepariwisataan terkesan tidak terarah dan tidak jelas.

Untuk itu, agar berperannya Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ke depan, isu-isu strategis yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya mempersiapkan SDM yang handal di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yag berorientasi pelayanan prima kepada masyarakat
2. Perlunya menjadikan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah tujuan wisata utama di Sulawesi Barat
3. Perlunya membuat konsep Pariwisata yang terintegrasi yang berkualitas dan memiliki daya saing.
4. Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dibidang pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
5. Perlunya menjadikan Industri Pariwisata yang Religius berdasarkan Norma Agama dan Adat Istiadat
6. Perlunya mensinkronkan industri Kepariwisataan yang didukung oleh stage holder terkait
7. Perlunya dilakukan promosi Kepariwisataan secara gencar untuk meningkatkan destinasi wisata sebagai Lokomotif ekonomi Daerah.
8. Perlunya menciptakan event-event dan atraksi Seni yang berkualitas bagi pengembangan Pariwisata Daerah

9. Perlunya melestarikan dan mengembangkan kesenian Budaya lokal 10.Perlunya menciptakan iklim investasi yang sehat di bidang Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga

11. Perluya menciptakan pemuda yang kreatif dan produktif yang berkemampuan untuk tumbuh sehat, maju, mandiri, bertaqwa, berjiwa usaha, unggul dan kompetitif.
12. Perlunya pengembangan atlet-atlet Olahraga prestasi yang handal dan profesional, serta mencptakan olahraga rekreasi dan pemasyarakatan Olahraga sebagai penopang sektor Pariwisata.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Untuk melakukan review terhadap rancangan awal pelaksanaan RKPD, diperlukan proses membandingkan antara kesesuaian dan kecocokan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting dalam setiap perencanaan program dan kegiatan yag dilaksanakan dapat diuraikan dalam tabel T-C. 3.1 sebagai berikut :

Tabel T-C. 3.1
Program Dan Kegiatan Awal Renja an Akhir Renjia 2023

AWAL RENJA				AKHIR RENJA			
PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)DAN KEGIATAN(OUTPUT)	TAHUN 2023		PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)DAN KEGIATAN(OUTPUT)	TAHUN 2023	
		TARGET	Rp			TARGET	Rp
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Berbagai Sektor Kegiatan			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Berbagai Sektor Kegiatan		

Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 orang	150.000.000	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 orang	150.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	190.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	190.000.000
Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	150 orang	200.000.000	Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	150 orang	200.000.000
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100	80.000.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100	80.000.000

Program Pengembangan Kapasitas Daya saiang Keolahragaan	**Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten/Kota**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya saiang Keolahragaan**	**Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten/Kota**		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Prestasi Olahraga pada Jenjang Pendidikan Kab/Kota**			**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Prestasi Olahraga pada Jenjang Pendidikan Kab/Kota**		
Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	225.000.000	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	225.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peserta Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah**			**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peserta Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah**		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Organisasi Olahraga			**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Organisasi Olahraga**		

Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen	125.000.000	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen	125.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase Meningkatnya Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Meningkatnya Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata**		
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Kawasan Stategis Pariwisata yang ditetapkan**			**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Kawasan Stategis Pariwisata yang ditetapkan**		
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Orang	150.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Orang	150.000.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Kab/Kota**			**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Kab/Kota**		
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	140.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	140.000.000

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Destinasi dan Kawasan Startegis Pariwisata yang Memiliki Tingkat daya tarik di kab/kota**			**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Destinasi dan Kawasan Startegis Pariwisata yang Memiliki Tingkat daya tarik di kab/kota**		
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	400.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	400.000.000
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	15000 Promosi	40.000.000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	15000 Promosi	40.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	**Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**		
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kawasan Usaha Ekonomi Kreatif**			**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kawasan Usaha Ekonomi Kreatif**		
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	50 Unit	185.000.000	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	50 Unit	185.000.000
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Bimbingan dan Pengembangan**			**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Bimbingan dan Pengembangan**		

Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	15 Laporan	200.000.000	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	15 Laporan	200.000.000
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5 Laporan	50.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5 Laporan	50.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase Peningkatan Mutu Pelaku Usaha Kreatif**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Peningkatan Mutu Pelaku Usaha Kreatif**		
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Persentase Bimbingan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif**			**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase Bimbingan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif**		
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang	75.000.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang	75.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	4 Dokumen	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	4 Dokumen	20.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7,500,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**30%**	**1,567,500,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**30%**	**1,567,500,000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1,350,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1,350,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	210,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	210,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	7,500,000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**30%**	**7,500,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**30%**	**7,500,000**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7,500,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7,500,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**30%**	**20,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**30%**	**20,000,000**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	20,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	20,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**30%**	**327,250,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**30%**	**327,250,000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	27,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	27,500,000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,000,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	5,250,000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	5,250,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	110,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	110,000,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	116,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	116,000,000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**30%**	**120,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**30%**	**120,000,000**
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	120,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	120,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**30%**	**37,100,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**30%**	**37,100,000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,600,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**30%**	**6,942,250**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**30%**	**6,942,250**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	6,942,250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	6,942,250

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagai upaya untuk menyempurnakan sitem perencanaan daerah yang akan dilakukan perlu dilakukan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung maupun dari Perangkat Daerah yang menjadi stakeholder Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai berikut :

Tabel T-C.3.2.
Usulan Kegiatan Masyarakat yang Menjadi Urusan Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	TUJUAN
1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Kombiling Kec.Pangale Kab.Mamuju Tengah	1 Unit	Pendapatan Masyarakat Desa akan Bertambah dengan adanya Pariwisata di desa (Rumah Singgah/Home Stay)
2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Tabolang Kec.Topoyo Kab.Mamuju Tengah	1 Unit	Masih kurangnya/belum terpenuhinya sarana dan prasarana wisata air terjun
3	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Kambunong Kec. Karossa	2 Km	Destinasi wisata sulit di kembangkan karna tidak memadainya akses jalan di lokasi wisata panjang 2 km
4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Saloadak Kec.Tobadak	1 Unit	Tidak adanya pasilitas yang memadai di lokasi wisata
5	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Desa Barakkang Kec. Budong-Budong	1 Lokasi	Pembangunan Agro Wisata di perlukan di kerenakan Dapat meningkatan Peningkatan PAD Desa Dan Kabupaten. Kawasan Wisata Desa Barakkang Sudah Terdapat Titik Lokasi yang seluas 3 Ha

6	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Sartanamaju Kec. Pangale	1 Unit	Belum memadainya prasarana olahraga Penimbunan Lapangan
7	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Polo Pangale Kec. Pangale	500 M	Kondisi lapangan sepak bola yang ada di desa polo pangale sangat membutuhkan pembangunan talud lapangan sepanjang 500 meter di sekeliling lapangan di sebabkan karena kondisi tanah yang mudah tergenang air dan mudah jebol/erosi sehingga lapangan tidak dapat digunakan secara maksimal.
8	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Lamba – Lamba Kec. Pangale	1 Unit	Belum tersedianya sarana olahraga masyarakat, maka dari itu masyarakat meminta penyediaan lapangan futsal dengan ukuran 25 meter x 45 meter.
9	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Kuo Kec. Pangale	1 Unit	Kondisi lapangan sepakbola yang sering tergenang air pada saat musim penghujan dan banyak lubang di dalam lapangan, serta tidak adanya track joging yang diperlukan bagi warga yang ingin menerapkan gerakan hidup sehat serta sehingga perlu penimbunan lapangan dan pembangunan track joging 1 Ls
10	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Polo Lereng Kec. Pangale	100 M	Kondisi Lapangan Yang Perlu Penimbunan Karna Rendah Dari Badan Jalan Sehingga Sering Becek Dan Kebanjiran, Perlunya Perbaikan-Perbaikan Agar Lapangan Tersebut Layak Digunakan Latihan Dan Mengadakan Turnamen.Dengan Adanya Penimbunan Lapangan Ini Diharapkan Memberikan Semangat Pemuda Dan Umumnya Masyarakat Luas.

11	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Kabubu Kec. Topoyo	1 Unit	Belum Adanya Prasarana Olahraga Masyarakat terutama pembangunan lapangan Sepak Bola Mini (Mini Soccer) 1 Unit ukuran 55 x 35 M2
12	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Waeputeh Kec. Topoyo	1 Unit	Belum tersedianya Tribun Lapangan Sepak Bola. (6x20 M)
13	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Pangalloang Kec. Topoyo	100 M	Kurang baiknya fasilitas lapangan olahraga sehingga membutuhkannya penimbunan
14	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Paraili Kec. Topoyo	1 Unit	Kondisi Lapangan Bola Desa Paraili masih kurang memadai, maka perlunya peningkatan lapangan bola desa paraili 1 paket
15	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Topoyo Kec. Topoyo	1 Unit	Belum Adanya Pagar Lapangan untuk menahan Bola
16	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Tangkou Kec. Topoyo	1 Unit	Belum memadainya sarana prasarana olahraga masyarakat volume 1 Ha
17	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Kayu Calla Kec. Karossa	1 Unit	Lapangan Bola Tidak Memadai (Penimbunan Lapangan)
18	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Benggaulu Kec. Karossa	1 Unit	Tidak Tersedianya Lapangan Sepak Bola Sehingga Membutuhkan Bantuan Penimbunan Lapangan Seluas 10.000 M2
19	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Kadaila Kec. Karossa	1 Unit	Rehabilitasi Lapangan Sepak bolah Penimbunan dan penggusuran untuk meratakan yang masih miring.
20	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Saloadak Kec. Tobadak	1 Unit	Tidak tersedianya pasilitas Lapangan olahraga yang memadai
21	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Tobadak Kec. Tobadak	1 Unit	Belum memadainya prasarana olahraga masyarakat dan tergenangnya air

				ditengah lapangan 1 Unit
22	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Palongaan Kec. Tobadak	1 Unit	PEMBANGUNAN LAPANGAN FUTSAL 1. Dilatarbelakangi oleh minat masyarakat 2. Potensi Wisata dan Perkembangan UMKM yang ada disekitarnya 3. Potensi Badan Usaha MIlik Desa
23	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Lumu Kec. Budong-Budong	1 Unit	Sering dimasuki oleh ternak (Pembuatan Pagar Besi Keliling Lapangan)
24	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Salumanurung Kec. Budong-Budong	1 Unit	Rusak dan butuh peningkatan yang berkualitas Serta Penimbunan pasir lapangan sepak bola desa salumanurung

BAB III

TUJUAN,SASARAN DAN PROGRM KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusanpemerintahan bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yangmenjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikankepada kabupaten di Bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dengan memperhatikan petunjuk pedoman teknis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemudaan dan Olahraga

Jika kita mendasari Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah yang diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaikni :

Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dindikatorkan dengan Kontribusi sektorkepariwisataan terhadap PDRB, yang diukur melalui indicator-indikator sebagai berikut :

a) Persentase Kunjungan wisata,
b) Lama kunjungan Wisata dan
c) Peresentase PAD dari sektor pariwisata.

Untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga Tingkat keberhasilan dari setiap Sasaran (dampak/impact) yang ingin dicapai dapat diukur melalui indicator-indiukator sebagai berikut :

a) Persentase organisasi pemuda yang aktif
b) Persentase wirausaha muda
c) Cakupan pembinaan olahraga
d) Cakupan Pelatih yang bersertifikasi
e) Cakupan pembinaan atlet muda
f) Jumlah atlet berprestasi
g) Jumlah prestasi olahraga

Sesuai urusan yang melekat padanya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah memerlukan anaslisis mendalam terkait Rencana Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah untuk tahun 2021 – 2026 hal ini berkaitan dengan rencana strategis peningkatan Pembanguna Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga di wilayah Mamuju Tengah seperti yang tertera dalam peraturan Daerah kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 tahun 2017

Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Mamuju Tengah dalam rangka pencapaian tujuan dan misinya secara efektif dan efisien. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata membutuhkan faktor-faktor kunci penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas yang meliputi :

1. Melakukan kerjasama kemitraan dengan seluruh jajaran dan pihak-pihak yang bekepentingan *(stakeholders)* yang terkait.
2. Memposisikan diri (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pemandu (*conductor*) pencapaian keserasian pembangunan pariwisata, pemuda dan olahraga antar *stakeholders.*
3. Mensosialisasikan norma, standar, pedoman tentang usaha ekonomi kreatif, jasa kepariwisataan, pemuda dan olahraga.
4. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara transparan, terkoordinasi, dan selaras (sinkron) sehingga tercapai kesamaan gerak dan langkah dalam pembangunan kepariwisataan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Pembelajaran aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah dalam peningkatan profesionalisme.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang di tetapkan setelah penetapan visi dan misi, Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin di capai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,terinci,terukur, dan dapat dicapai.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di tuntut untuk lebih profesional dalam menjalankan beban tugasnya. Untuk itu, disusun Visi dan Misi Disparpora yang akan di capai

melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, Visi dan Misi Bupati, Wakil Bupati kabupaten mamuju Tengah yang tertuang dala RPJMD 2021-2026.VISI Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah adalah :

"TERWUJUDNYAN MASYARAKAT MAMUJU TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA"

Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran dari pada Misi. Dari tujuan akan tergambar kerangka prioritas yang menentukan arah dari setiap program dan kegiatan serta aktifitas lembaga dalam melaksanakan Misi Bupati, Wakil Bupati Preriode 2021-2026 .

Tujuan yang hendak di capai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah
2. Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga

Sasaran :

Adapun sasaran yang hendak di capai Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab.MamujuTengah adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Domistik
2. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersertifikat
3. Meningkatnya cakupan organisasi pemuda aktif
4. Meningkatnya cakupan cabang olahraga aktif

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Disparpora sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan melaksanakan tugas- tugas pembantuan dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan beban tugasnya. Untuk itu, disusun visi dan misi disparpora yang akan dicapai melelaui pencapaian tujuan dan pelaksanaaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamuju Tengah periode 2021-2026 "Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla Tassisara". Penjelasan dari tiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut.

"Maju" adalah kondisi dimana kualitas manusia Kabupaten Mamuju Tengah semakin tinggi dan didukung oleh pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai baik dari segi jangkauannya maupun dari segi kualitasnya. Pokok visi ini terutama ditandai dengan indicator IPM.

"Sejahtera" adalah kondisi dimana kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah semakin meningkat dengan didukung oleh pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pokok visi sejahtera ini terutama ditandai dengan indicator pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan.

"Bingkai Lalla Tassisara" adalah kondisi dimana kebersamaan di tengah keberagaman menjadi acuan nilai dan norina bagi seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah dalam membangun daerah. Indikator dari pokok visi ini adalah terpeliharanya ketertibandan ketenteraman dalam masyarakat.

Sebagai salah satu Organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam naungan Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melakukan strategi dan arah kebijakan tentunya berpedoman pada Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan yang telah di tetapkan oleh kepala Daerah dalam rancangan pembangunan jangka menengan Daerah dan dinilai memiliki keterkaitan dukungan terhadap Visi Misi Kepala daerah Kabupaten Mamuju Tengah dari 6 (enam) Misi Bupati Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengemban 2 (dua) misi yang merupakan urusan yang dilaksanakan. Dari satu misi tersebut dapat dijabarkan dalam Tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang diaktualisasikan dalam Program prioritas sebagai berikut :

Visi :**"Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla Tassisara"**

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan dasar

Tujuan	Sasaran	Program
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak	Meningkatnya kualitas kehidupan manusia	1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 3. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Visi :**"Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla Tassisara"**

Misi 2 : Mendorong daya saing perekonomian daerah

Tujuan	Sasaran	Program
Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah	Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	1. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) 2. Program pengembangan umkm 3. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024 yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah sebagi berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
   - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
   - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
   - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
   - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
   - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
4. Program Pemasaran Pariwisata
   - Pemasaran pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota

5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
   - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif)sebagai ruang berekspresi,berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengembangan Ekosistem ekonomi Kreatif
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
   - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
   - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
7. Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata
   - Pengelolaan Daya Tarik Wisata kabupaten/Kota
   - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
   - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   - Penetapan Tanda daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk memaksimalkan pelaksanaan rencana kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023 diperlukan penyajian rencana kerja dan pendaan yang kami paparkan mulai dari tahun n 1 yaitu tahun 2024 dan prediksi maju n 2 yaitu tahun 2025 sebagaimana terurai pada tabel berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju ke tahun 2025

Program dan Kegiatan untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif**	**50%**		**50%**	**620,000,000**		**65%**	**1,800,000,000**
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Berbagai Sektor Kegiatan**	**50%**		**50%**	**620,000,000**		**65%**	**1,650,000,000**
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang		100 Orang	150,000,000		100 Orang	150,000,000
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang		50 Orang	190,000,000		50 Orang	200,000,000

2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	150 Orang		150 Orang	200,000,000		150 Orang	800,000,000
2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen			1 Dokumen	50,000,000
2	19	02	2.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit		Unit			2 Unit	150,000,000
2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang		Orang			20 Orang	200,000,000

2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100 Orang		100 Orang	80,000,000		100 Orang	100,000,000
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**	**50%**		**50%**	**0**		**65%**	**150,000,000**
2	19	02	2.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang		Orang			5 Orang	100,000,000
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen		Dokumen			1 Dokumen	50,000,000
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten/Kota**	**50%**		**50%**	**500,000,000**		**65%**	**3,935,000,000**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Prestasi Olahraga pada Jenjang Pendidikan Kab/Kota**	**50%**		**50%**	**225,000,000**		**65%**	**800,000,000**

2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit		Unit			1 Unit	200,000,000
2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen		Dokumen			1 Dokumen	200,000,000
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit		2 Unit	225,000,000		5 Unit	400,000,000
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peserta Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah**	**50%**		**50%**	**150,000,000**		**65%**	**0**
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	150,000,000		Dokumen	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Atlet dalam mengikuti kejuaraan Olahraga tingkat Provinsi**	**%**		**%**	**0**		**65%**	**830,000,000**

2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang		Orang			200 Orang	500,000,000
2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science)*	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (*Sport Science)*	Pelatda		Pelatda			2 Pelatda	100,000,000
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang		Orang			50 Orang	150,000,000
2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen		Dokumen			1 Dokumen	80,000,000
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Organisasi Olahraga**	**50%**		**50%**	**125,000,000**		**65%**	**2,205,000,000**
2	19	03	2.04	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen		2 Dokumen	125,000,000		2 Dokumen	125,000,000
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi		Organisasi			22 Organisasi	2,000,000,000

2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen			1 Dokumen	80,000,000
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Olahraga Rekreasi yang ditetapkan**	**%**		**%**	**0**		**65%**	**100,000,000**
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit		Unit			2 Unit	100,000,000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Partisipasi Pramuka**	**%**		**%**	**0**		**65%**	**250,000,000**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Anggota Pramuka yang mendapatkan pembinaan**	**%**		**%**	**0**		**65%**	**250,000,000**
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi		Organisasi			1 Organisasi	250,000,000
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Meningkatnya Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata**	**50%**		**50%**	**290,000,000**		**65%**	**1,460,000,000**
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan di Kab/Kota**	**%**		**%**	**0**		**65%**	**210,000,000**
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi		Lokasi			2 Lokasi	150,000,000

3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan			1 Laporan	60,000,000
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Kawasan Stategis Pariwisata yang ditetapkan**	**50%**		**50%**	**150,000,000**		**65%**	**340,000,000**
3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen			1 Dokumen	60,000,000
3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Orang		5 Orang	150,000,000		50 Orang	200,000,000
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan			1 Laporan	80,000,000
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Kab/Kota**	**50%**		**50%**	**140,000,000**		**65%**	**460,000,000**

3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi		5 Lokasi	140,000,000		5 Lokasi	140,000,000
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit		Unit			2 Unit	200,000,000
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan			1 Laporan	70,000,000
3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan			1 Laporan	50,000,000
3	**26**	**02**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang sudah mempunyai Izin**	**%**		**%**	**0**		**55%**	**450,000,000**
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha		Usaha			50 Usaha	200,000,000

3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Dokumen		Dokumen			1 Dokumen	50,000,000
3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Usaha		Usaha			50 Usaha	50,000,000
3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan		Laporan			25 Laporan	100,000,000
3	26	02	2.04	0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Laporan		Laporan			1 Laporan	50,000,000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan**	**50%**		**50%**	**440,000,000**		**65%**	**1,060,000,000**
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen		Dokumen			1 Dokumen	80,000,000
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen		Dokumen			1 Dokumen	80,000,000

3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan		2 Kegiatan	400,000,000		1 Kegiatan	800,000,000
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	15000 Promosi		15000 Promosi	40,000,000		Promosi	
3	**26**	**03**	**3.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Kunjungan Wisatawan di Kab/Kota**	**%**		**%**	**0**		**30%**	**100,000,000**
3	26	03	3.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen		Dokumen			1 Dokumen	100,000,000
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**50%**		**50%**	**435,000,000**		**65%**	**370,000,000**

3	**26**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kawasan Usaha Ekonomi Kreatif**	**50%**		**50%**	**185,000,000**		**65%**	**50,000,000**
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	50 Unit		50 Unit	185,000,000		1 Unit	50,000,000
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Bimbingan dan Pengembangan**	**50%**		**50%**	**250,000,000**		**65%**	**320,000,000**
3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	15 Laporan		15 Laporan	200,000,000		1 Laporan	50,000,000
3	26	04	2.02	0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha			25 Pelaku Usaha	100,000,000
3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan		Kegiatan			2 Kegiatan	150,000,000
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5 Laporan		5 Laporan	50,000,000		1 Laporan	20,000,000

3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Peningkatan Mutu Pelaku Usaha Kreatif**	**50%**		**50%**	**75,000,000**		**65%**	**70,000,000**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Pengembangan SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif**	**%**		**%**	**0**		**30%**	**20,000,000**
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi,dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan		Laporan			1 Laporan	20,000,000
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase Bimbingan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif**	**50%**		**50%**	**75,000,000**		**65%**	**50,000,000**
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang		100 Orang	75,000,000		Orang	
3	26	05	2.02	0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan		Laporan			1 Laporan	50,000,000

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan kegiatan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga. Agar terciptanya arah pembangunan Kepariwisataan, peningkatan, partisipasi Pemuda dan kualitasnya serta menjadikan Olahraga sebagai kegiatan yang bermasyarakat diantara rutinitas, merupakan hal yang wajib dikembangkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Output Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah adalah program tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran program Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah selain jadi pelaksana kegiatan Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Disparpora Kab. Mamuju Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.Sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasipembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencanapembangunan jangka menengah daerah, danrencana kerja pemerintah daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelakasanaan Rencana Pembangunan Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2023.

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah bahwa dalam pelaksanaan tugas mengacu kepada rencana kerja Perangkat Daerah yang berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi.

Disamping itu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah secara rutin melakukan kegiatan kantor seperti :

- Melakukan pelayanan umum dan administrasi
- Penguatan SDM aparatur Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
- Melakukan pengembangan destinasi wisata
- Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang ada di sekitaran destinasi wisata
- Melakukan pembinaan terhadap wira usaha muda
- Melakukan pembinaan terhadap organisasi Kepemudaan yang dapat mendorong pembangunan daerah
- Melakukan pembinaan terhadap olahraga berprestasi

Topoyo, Maret 2024

Mengatatahui,
Kepala Dinas

H. A. GAPRI S.Sos., MM
Pangkat : Pembina Muda IV/c
NIP. 19640423 199703 1 004

RENCANA KERJA



TAHUN ANGGARAN 2024





DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024.

Renja ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah 2021 – 2026, dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan serta visi kabupaten Mamuju Tengah.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024, dapat diselesaikan penyusunnannya dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Tobadak, Juli 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Hj. ASMIRAH DJAMAL, S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19790623 200212 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengatar i

Daftar isi ii

BAB I PENDAHULIAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematikan Penulisan 4

BAB II EVALUASIPELAKSANAANRENCANA KERJA OPD TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 7

2.3 Isu-IsuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsiOPD 8

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 9

3.1 Telaah Terhadap KebijakanNasional 10

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD 11

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 12

4.1 Program dan Kegiatan 13

BAB V PENUTUP 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Rencana Kerja Perangakat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah yaitu tentang optimalisasi kapasitas daerah untuk pembangunan yang merata melalui penguatan infrastruktur dan sarana prasarana yang terpadu dan terintegrasi.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan meliputi :
    a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
    b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
    c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan
    d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal

    Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:
    a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan
    b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
3. Penyusunan Rancangan

    Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalamforum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Mamuju Tengah dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusanrancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan

dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah menjabarkan rencana kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.

Keterkaitan Antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

7. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
8. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk

memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awalRKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pertanian dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai fungsi :

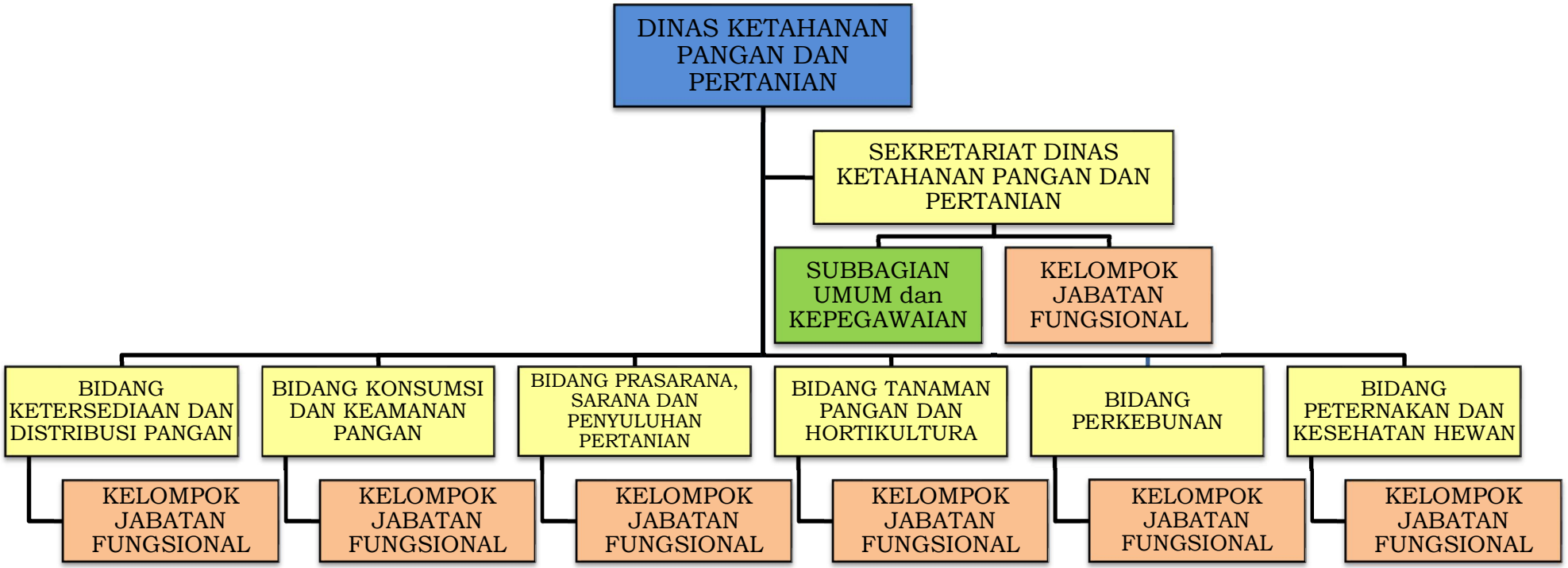
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidangPertanian;
b. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang Pertanian;
c. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas danfungsinya

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari :

A. Kepala Dinas
B. Sekretaris Dinas
C. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
D. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
E. Bidang Perkebunan
F. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
G. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
H. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
I. Kelompok Jabatan Fungsional
J. Balai Penyuluhan, Puskeswan, Balai Perbibitan Hijauam Pakan Ternak, Balai Perbibitan/perbenihan Tanaman Perkebunan dan Taman Teknologi Pertanian

Berikut gambaran struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten MamujuTengah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 sesuai gambar 1.1 :

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



Ketentuan Tentang Perencanaan

Adapun peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ketentuan Tentang Penganggaran

Peraturan yang menjadi pedoman dalam penganggaran adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianKabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran OPD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra OPD secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah:

1. Memberikan gambaran kemampuan OPD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.
2. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas tugas OPD serta indikator atau ukuran keberhasilan/ kegagalan pada tahun 2022.
3. Memberikan arah/ acuan dalam menyusunan Program/ kegiatan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusuanan Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten MamujuTengah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

BAB V PENUTU

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) dan pencapaian Rancangan Renstra Tahun 2021-2026 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra OPD disajikan pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju tengah dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan realisasinya.

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Pangan tahun 2020 didasarkan pada review hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Pangan. Analisa juga menyajikan perkiraan realisasi capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Pangan Tahun 2022 serta proyeksi realisasi capaian Renstra Tahun 2023 dan Tahun 2024. Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Pangan yang meliputi indikator sasaran, indikator program, SPM.

2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menetapkan tiga (3) Indikator Sasaran Strategis dengan Sembilan (9) inikator Kinerja utama yaitu " Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan peternakan", "Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Mandiri", dan "menurunnya kejadian bencana pertanian". Evaluasi capaian indikator tujuan dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator tujuan tahun 2021 dengan target akhir renstra.

Table 2.1 Capaian Tujuan Sasaran, Indikator Kinerja tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	KINERJA				KATEGORI
	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian	1. Jumlah produksi tanaman Pangan (%)	1,75	-25,56	-14,61	rendah
	2. Jumlah produksi tanaman Hortikultura (%)	0,92	7,90	8,59	tinggi
	3. Jumlah produksi tanaman Perkebunan (%)	1,29	0,79	0,61	rendah
	4. Jumlah populasi Ternak (%)	1,98	-1,00	-0,51	rendah
Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	1. Rasio ketersediaan sarana prasarana pertanian (%)	31	31	1,00	tercapai
	2. fasilitasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (%)	1	2	2,00	tinggi
	3. cakupan pembinaan kelambagaan penyuluhan dan kelembagaan petani (%)	0,5	1	2,00	tercapai
	2. penurunan kasus penyakit hewan menular (%)	100	100	1,00	tercapai
	1. presentase penurunan kejadian bencana pertanian (%)	80	100	1,25	tinggi

Pencapaian tujuan digunakan untuk melihat sejauh mana capaian pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target akhir Renstra. Hal ini digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap indikator kinerja maupun target Renstra, apakah masih relevan atau perlu dilakukan reviu.

Sedangkan evaluasi capaian indikator sasaran dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator tujuan tahun 2021 dengan target tahun 2022.

Table 2.2 Capaian Kinerja Sasaran 2022

SASARAN STRATEGIS	KINERJA			
	INDIKATOR	REALISASI 2021	REALISASI 2022	% CAPAIAN
1	*2*		*4*	*5*
Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian	1. Jumlah produksi tanaman Pangan (%)	1,26	-25,56	518,50
	2. Jumlah produksi tanaman Hortikultura (%)	96	7,90	0,08
	3. Jumlah produksi tanaman Perkebunan (%)	1,21	0,79	0,65
	4. Jumlah populasi Ternak (%)	1,21	-1,00	0,83
Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	1. Rasio ketersediaan sarana prasarana pertanian (%)	30	31	1,83
	2. fasilitasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (%)	1	2	2,00
	3. cakupan pembinaan kelambagaan penyuluhan dan kelembagaan petani (%)	1	1	100,00
Menurunya kejadian bencana pertanian	1. presentase penurunan kejadian bencana pertanian (%)	85	100	1,18
	2. penurunan kasus penyakit hewan menular (%)	95	100	1,05

Dari capaian kinerja sasaran untuk tahun 2022 pada Tabel di atas, terlihat bahwa indikator kinerja realisasinya dinamis ada yang tidak mencapai taget (rendah), tinggi dan tercapai target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis “Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian dan peternakan” dengan empat indicator kinerja hanya satu yang melebihi dari target atau dengan kategori Tinggi yakni pada indicator peningkatan produksi tanaman hortikultura dengan

capaian 7,90% dari target 0,90% peningkatan dengan presentase capaian 8,59%, sedangkan tiga indicator lainnya tidak mencapai target atau dibawah target atau dengan kategori rendah. Sasaran Strategis "Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri" dengan tiga (3) indicator kinerja utama dua (2) indicator melebihi target atau kategori tinggi, satu (1) indicator mencapai target dengan kategori tercapai

Sasaran Strategis "Menurunya kejadian bencana pertanian" dengan dua (2) indicator kinerja utama satu dengan kategori capaian tinggi dan satu (1) dengan capaian tercapai. Pada capaian dengan kategori tinggi ini di pengaruhi oleh kinerja perangkat daearah dan dukungan masyarakat serta kompenen kegiatan yang mendukung indicator tujuan.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA OPD						REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2016	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	Jumlah produksi tanaman Pangan (%)			0,75	2,35	2,38	2,42	2,45	2,48	-25,56						2,35	2,38	
2	Jumlah produksi tanaman Hortikultura (%)			0,59	1,10	1,22	1,24	1,25	1,26	7,90						1,10	1,22	
3	Jumlah produksi tanaman Perkebunan (%)			1,21	1,23	1,25	1,26	1,27	1,28	0,79						1,23	1,25	
4	Jumlah populasi Ternak (%)			1,21	1,23	1,25	1,26	1,27	1,28	-1,00						1,23	1,25	
5	Rasio ketersediaan sarana prasarana pertanian (%)			31	32	35	36	40	42	31						32	35	
6	fasilitasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (%)			1	1	1,25	1,27	1,29	1,33	2						1	1,25	
7	cakupan pembinaan kelambagaan penyuluhan dan kelembagaan petani (%)			1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1						0,5	0,5	
8	presentase penurunan kejadian bencana pertanian (%)			80	85	90	95	95	95	100						85	90	
9	penurunan kasus penyakit hewan menular (%)			95	97	97	98	98	100	100						97	97	

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dipengaruhi

oleh faktor internal (kewenangan PD) dan faktor eksternal (di luar kewenangan PD). Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (STRENGTHS)

a. Adanya peraturan daerah tentang pembentukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
b. Tersedianya sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu pertanian ;
c. Adanya sarana dan fasilitas yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan budidaya pertanian dan agribisnis;
d. Adanya alokasi dana untuk kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;
e. Besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan pertanian ;
f. Tersedianya peraturan perundang-undangan lingkup pertanian ;
g. Adanya potensi komoditas unggulan dan sentra agribisnis yang dapat dikembangkan;
h. Adanya hasil olahan produk pertanian yang memiliki nilai tambah.

Kelemahan (WEAKNESSES)

a. Masih lemahnya kemampuan manajerial, teknis dan penerapan teknologi tepat guna, baik di tingkat aparatur maupun kelembagaan petani;
b. Masih lemahnya kemampuan petani/kelompok tani dalam meningkatkan posisi tawar;
c. Masih rendahnya validitas data pertanian ;

d. Belum terwujudnya mekanisme kerja yang memadai;
e. Masih lemahnya koordinasi antar bidang;
f. Masih belum maksimalnya kinerja sebagai aparat pertanian ;
g. Luas dan beragamnya lingkup kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dibandingkan dengan SDM
yang terbatas.

Peluang (OPPORTUNITIES)

a. Adanya lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;
b. Tingginya kebutuhan dan permintaan terhadap komoditi pertanian sehingga masih terbuka kesempatan bagi petani untuk mengembangkan budidaya danproduksi komoditi pertanian yang mempunyai nilai ekonomis dan daya jual tinggi;
c. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu kabupaten di propinsi Sulawesi barat sebagai penyangga Ibukota Negara;
d. Masih adanya areal pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah yang cukup luas;
e. Adanya kelembagaan tani yang perlu difasilitasi;
f. Peluang pasar yang besar untuk komoditas pertanian.

Ancaman (THREATS)

a. Berkurangnya lahan pertanian produksi karena adanya alih fungsi lahan oleh berbagai kepentingan;
b. Persaingan pasar produksi pertanian yang cukup tinggi dan berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja serta berusaha di bidang pertanian;

c. Belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis;
d. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, permodalan dan pemasaran.
e. Adanya impor produk pertanian;
f. Terbatasnya sumber pangan lokal, terutama sumber karbohidrat non beras terkait pola pangan harapan.
g. Belum adanya pengaturan yang memadai tentang teknis penggunaan lahan pertanian dan non pertanian serta pengalih fungsi lahan.
h. anomali iklim dampak perubahan cuaca.
i. Pemulihan ekonomi dampak covid

Solusi

Solusi untuk berbagai permasalahan di atas dilakukan dengan 6 program dan 13 kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah meskipun sampai saat ini belum semua dapat dilaksanakan dilaksanakan, ditambah inovasi-inovasi seperti Jiatadal (Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal) dan Evaluasi Sawah Lestari,Perda Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Perbup Nomor ….Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

1 Pengembangan pertanian berbasis kawasan dengan mengintensifkan pelaksanaan pengembangan potensi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan sebagai

upaya peningkatan ketersediaan pangan yang merupakan salah satu komponen dari IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

2 Upaya pengendalian ketersediaan dan pendisdribusian pupuk bersubsidi guna menjawab kelangkaan pupuk di tingkat petani

3 Pengawasan terhadap peredaran benih, bibit, ternak dan bahan hasil produksi pertanian antar propinsi dan kabupaten di perbatasan sebagai upaya penjaminan keamnan pangan komsumsi dan mutu produk kepada masyarakat

4 Pencegahan dan pengendalian penyakit yang bersumber dari hewan (zoonosa) perlu terus dilakukan.

5 Pengembangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai pusat layanan perbenihan, edukasi dan penelitian sekaligus penyedia sarana produksi pertanian masih perlu ditingkatkan.

6 Pengawasan terhadap usaha pengolahan hasil produksi perkebunan (perizinan), tanaman pangan, dan peternakan perlu ditingkatkan

7 Upaya perbaikan pola dan tatalaksana kemitraan perkebunan yang efektif

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang disusun melalui mekanisme bottom up maupun top down.Mekanisme bottom up dilaksanakan melalui penyerapan aspirasi di tingkat desa (Musrenbangdes), Kecamatan (Musrenbangkec) dan tingkat Kabupaten (Musrenbangkab).Sedangkan mekanisme top down dilaksanakan melaluiForum Perangkat Daerah (forum PD) dengan mengkoordinasikan materi yangberasal dari Renja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan dari sisipemerintah daerah.Sehingga RKPD

mengedepankan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021, DinasPertanian melaksanakan (satu) program urusan penunjang, 4 (empat) program urusan pemerintahan pilihan, sehingga total ada 5 (lima) program, yakni :

I. Urusan Pemerintahan Penunjang

1. Program Penunjang urusan pemerinyahan daerah kabupaten/kota

II. Urusan Pemerintahan Pilihan (Pertanian)

1. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
8. Program Penyuluhan Pertanian

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2024 Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2024					ANALISIS KEBUTUHAN 2024				
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
I.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Mamuju Tengah**	**Peningkatan Produktivitas dan Produksi hasil Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Populasi ternak (%)**	**6,10**	**3.285.000.000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Mamuju Tengah**	**Peningkatan Produktivitas dan Produksi hasil Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Populasi ternak (%)**	**6,10**	**1.437.000.000**
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Mamuju Tengah			1.650.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Mamuju Tengah			742.500.000
2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Mamuju Tengah			135.000.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Mamuju Tengah			94.500.000
3	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Mamuju Tengah			1.500.000.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Mamuju Tengah			600.000.000
II	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Mamuju Tengah**	**Menurunnya kasus penyakit hewan ternak %**	**97,00**	**830.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Mamuju Tengah**	**Menurunnya kasus penyakit hewan ternak %**	**97,00**	**501.000.000**
4	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah			150.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah			105.000.000

5	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah			320.000.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah			144.000.000
6	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah			180.000.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah			153.000.000
7	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Mamuju Tengah			180.000.000	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Mamuju Tengah			99.000.000
III	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Mamuju Tengah**	**Penurunan kejadian bencana pertanian dan jumlah kasus penyakit hewan menular %**	**90,00**	**550.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Mamuju Tengah**	**Penurunan kejadian bencana pertanian dan jumlah kasus penyakit hewan menular %**	**90,00**	**247.500.000**
8	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah			550.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah			247.500.000
IV	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Mamuju Tengah**	**Rasio ketersediaan sarana prasarana pertanian (%)**	**35**	**2.360.000.000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Mamuju Tengah**	**Rasio ketersediaan sarana prasarana pertanian (%)**	**35**	**1.062.000.000**
9	Pengembangan Prasarana Pertanian	Mamuju Tengah			850.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Mamuju Tengah			382.500.000
10	Pembangunan Prasarana Pertanian	Mamuju Tengah			1.510.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Mamuju Tengah			679.500.000
V	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Mamuju Tengah**	**persentase peningkatan usaha bidang pertanian dan peternakan**	**1,25**	**835.000.000**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Mamuju Tengah**	**persentase peningkatan usaha bidang pertanian dan peternakan**	**1,25**	**268.750.000**
11	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah			735.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah			183.750.000

12	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Mamuju Tengah			100.000.000	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Mamuju Tengah			85.000.000
VI	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Mamuju Tengah**	**cakupan pembinaan kelambagaan penyuluhan dan kelembagaan petani (%)**	**0,5**		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Mamuju Tengah**	**cakupan pembinaan kelambagaan penyuluhan dan kelembagaan petani (%)**	**0,5**	**494.000.000**
13	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Mamuju Tengah			760.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Mamuju Tengah			494.000.000
VII	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Mamuju Tengah**	**Persentase penunjang urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berjalan sesuai standar (%)**	**100**	**3.712.200.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Mamuju Tengah**	**Persentase penunjang urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berjalan sesuai standar (%)**	**100**	**2.819.970.000**
14	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77.000.000
15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				48.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				48.000.000
16	Kepegawaian Perangkat Daerah				462.000.000	Kepegawaian Perangkat Daerah				392.700.000
17	Umum Perangkat Daerah				655.000.000	Umum Perangkat Daerah				425.750.000
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.200.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				780.000.000
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				933.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				793.220.000
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				337.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				303.300.000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020- 2024 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia Maju yangBerdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yangselaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melaluimisi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera.

Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah sebagai bagian dari unit kerja di lingkunganPemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah berusaha mewujudkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang nomenklatur program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten mamuju Tengah menyelengarakan urusan pilihan pertanian.

Dalam mewujudkan keterpaduan dan keselarasan dengan program – program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mendasarkan

pada tema dan prioritas pembangunan nasional, serta visidan misi dari Kementerian Pertanian yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta disesuaikan dengan kondisialam dan kondisi wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dengan mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pertanian menetapkan Tujuandan Sasaran pembangunan Bidang Pertanian untuk tahun 2024

Dalam perumusan sasaran ditetapkan pula indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing.

Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di tetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah adalah :

a. Misi 3 : “Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah

   Tujuan : Meningkatkan Produktivitas Perekonomian daerah

   Sasaran : Meningkatnya Produktivitas dan Produksihasil Pertanian

   Indikator : 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

2. Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

3. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

4. Peningkatan Populasi Ternak

b. Misi 3 : "Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah

Tujuan : Meningkatkan Produktivitas Perekonomian daerah

Sasaran : Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri

Indikator : 1. Rasio Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Pertanian

2. Fasilitasi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian

3. Cakupan Pembinaan Kelembagaan Penyuluh Dan Kelembagaan Petani

c. Misi : "Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup"

Tujuan : Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Sasaran : Menurunya kejadian bencana pertanian

Indikator : 1. Presentase penurunan kejadian bencana pertanian

2. Penurunan kasus penyakit hewan menular

Tabel 3.1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target capaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2023
1	Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian	Peningkatan produksi tanaman Pangan (%)	1,69
2		Peningkatan produksi tanaman Hortikultura (%)	1,22
3		Peningkatan produksi tanaman Perkebunan (%)	1,25
4		Peningkatan populasi Ternak (%)	1,25
5	Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Rasio ketersediaan sarana prasarana pertanian (%)	35
6		fasilitasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (%)	1,25
7		cakupan pembinaan kelambagaan penyuluhan dan kelembagaan petani (%)	0,5
8	Menurunya kejadian bencana pertanian	presentase penurunan kejadian bencana pertanian (%)	90
9		penurunan kasus penyakit hewan menular (%)	97

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang terkait dengan urusan pelayanan administratif perkantoran dan program yang terkait denganurusan pilihan pertanian, direncanakan jumlah program ada tujuh (70), kegiatan 22 (dua puluh dua) dan sub kegiatan berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan).

Program urusan pilihan pertanian adalah program strategis yang diharapkan dapatmewujudkan visi dan misi pembangunan pertanian Kabupaten Mamuju tengah selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

HasilVerifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

A. Urusan Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
B. Urusan Pilihan Pertanian
    1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
    2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
    3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
    4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
    5. Program Perizinan Usaha Pertanian; Dan
    6. Program Penyuluhan Pertanian.

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN PENUNJANG							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase penunjang urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berjalan sesuai standar**		**100%**	**8.108.849.884**		**100%**	**6.828.849.884**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen prencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan		100%	77.000.000		100%	77.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen		1	15.000.000		1	15.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Perangkat Daerah	jumlah dokumen		1	12.000.000		1	12.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Perangkat Daerah	jumlah dokumen		1	10.000.000		1	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Perangkat Daerah	jumlah dokumen		1	10.000.000		1	10.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-Perangkat Daerah	jumlah dokumen		1	10.000.000		1	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen		1	8.000.000		1	8.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen		1	12.000.000		1	12.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu		100%	4.396.649.884		100%	4.396.649.884
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen		1	4.369.649.884		1	4.369.649.884
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	jumlah dokumen		1	7.000.000		1	7.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah	jumlah dokumen		1	20.000.000		1	20.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase administrasi barang milik perangkat daerah		100%	48.000.000		100%	48.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	jumlah dokumen		1	20.000.000		1	20.000.000

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	jumlah dokumen		1	18.000.000		1	18.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah dokumen		1	10.000.000		1	10.000.000
Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian		100%	462.000.000		100%	337.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan praasarana disiplin pegawai		3	35.000.000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya		57	90.000.000			
Pendataan dan Pengolahan Kepegawaian	jumlah dokumen		1	8.500.000		1	8.500.000
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen		1	10.500.000		1	10.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai		57	200.000.000		57	200.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundangan	jumlah pegawai		57	53.000.000		57	53.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah pegawai		57	65.000.000		57	65.000.000
Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi		100%	655.000.000		100%	700.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen		5	55.000.000		6	65.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis		50	100.000.000		50	150.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis		3	50.000.000		3	50.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis penyediaan bahan logistik kantor		3	50.000.000		3	50.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan		5	40.000.000		5	40.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8	60.000.000		8	60.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi tamu		100	50.000.000		100	35.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		23	150.000.000		23	150.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis PD		1	55.000.000		1	55.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Jumlah SPBE yang terlaksana dengan baik di PD		1	45.000.000		1	45.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD		100%	1.200.000.000			

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional		4	750.000.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor		2	100.000.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		7	150.000.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		7	200.000.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pertanian yang tersedia		100%	933.200.000		100%	933.200.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi		125	4.200.000		125	4.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan		12	75.000.000		12	75.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		30	54.000.000		30	54.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah luasan yang dibersihkan		180	800.000.000		180	800.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		100%	337.000.000		100%	337.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan		47	57.000.000		47	57.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung		3	150.000.000		3	150.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000			100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi		5	30.000.000		5	30.000.000

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**peningkatan Produktivitas dan produksi hasil komoditas pertanian**		**2,76**	**3.285.000.000**		**2,79**	**3.285.000.000**
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	persentase penggunaan sarana pertanian		100%	1.650.000.000		100%	1.650.000.000

Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan penggunaan Sarana pendukung produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		7	1.500.000.000		7	1.500.000.000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah pendampingan penggunaan sarana pertanian		2	150.000.000		2	150.000.000
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase peredaran benih/bibit ternak dan tanaman serta pakan ternak dalam daerah kabupaten		75	135.000.000		75	135.000.000
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	jumlah laporan pengawasan kwalitas benih/bibit, bahan pakan/tanaman skala kecil		1	75.000.000		1	75.000.000
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	jumlah laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan ternak		1	60.000.000		1	60.000.000
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	persentase penyediaan bbit ternak dan Hijauan pakan ternak		1,25%	1.500.000.000		1,26%	1.500.000.000
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	jumlah penyediaan Bibit ternak yang berasal dari daerah provinsi Lain		5100	1.500.000.000		5100	1.500.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Presentase Peningkatan Populasi Ternak**		**1,25**	**830.000.000**		**1,26**	**830.000.000**
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan penanggulangan penyakit hewan menular		85%	150.000.000		85%	150.000.000
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	jumlah jenis pelayanan penyediaan sarana penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis		5	150.000.000		5	150.000.000
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	presentase jaminan pelayanan hewan dan produk hewan yang masuk dan keluar daerah		100%	320.000.000		100%	320.000.000
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	jumlah identifikasi jenis penyakit dan produk hewan yang dalam kondisi aman		4	135.000.000		4	135.000.000
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah layanan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan		4	100.000.000		4	100.000.000
Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah hewan dan produk hewan yang melintas di perbatasan		4	85.000.000		4	85.000.000

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase pelayanan laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah		100%	180.000.000		100%	180.000.000
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	jumlah obat - obatan hewan dan jenis alat - alat laboratorium serta alat kesehatan hewan yang tersedia		3	100.000.000		3	100.000.000
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	jumlah penyediaan pelayanan jasa medik veteriner		5	80.000.000		5	80.000.000
Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	presentase penerapan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner		100%	180.000.000		100%	180.000.000
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan		3	100.000.000		5	100.000.000
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan		1	80.000.000		1	80.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Penurunan kejadian bencana pertanian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**		**100%**	**550.000.000**		**100%**	**550.000.000**
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	presentase identifikasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		100%	550.000.000		100%	550.000.000

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah pengendalian OPT dan penyediaan sarana dan alat pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		3	300.000.000		3	300.000.000
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah penanganan Dampak Perubahan Iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		3	150.000.000		3	150.000.000
Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	jumlah penganan bencana non alam yang bersifat zoonosis		2	100.000.000		2	100.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Rasio ketersediaan sarana prasarana pertanian**		**35%**	**2.360.000.000**		**36%**	**2.210.000.000**
Pengembangan Prasarana Pertanian	presentase pengembangan prasarana pertanian		100%	850.000.000		100%	850.000.000
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan/LCP2B	jumlah pengelolaan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		3.500	150.000.000		3.500	150.000.000
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	jumlah peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		2	300.000.000		2	300.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah dukungan prasarana pertanian		12	50.000.000		12	50.000.000
Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	jumlah Dokumen masterplan pengembangan sentra - sentra produksi pertanian dan perkebunan		1	350.000.000		1	350.000.000
Pembangunan Prasarana Pertanian	persentase pembangunan prsarana pertanian		100%	1.510.000.000		100%	1.360.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah jaringan irigasi usaha tani yang tersedia		50	100.000.000		50	100.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	jumlah unit ketersediaan embung		1	150.000.000		1	150.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah ketersediaan Jalan Usaha Tani		3	500.000.000		3	500.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	jumlah DAM Parit yang tersedia		1	150.000.000		1	150.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang tersedia		2	60.000.000		2	60.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	jumlah Rumah Potong Hewan yang tersedia		1	150.000.000			

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	jumlah gedung Balai Penyuluhan Kecamatan dalam kondisi Baik		1	200.000.000		1	200.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah unit prasarana pertanian yang tersedia dalam kondisi layak		1	200.000.000		1	200.000.000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**persentase peningkatan usaha bidang pertanian dan peternakan**		**1,25%**	**835.000.000**		**1,25%**	**835.000.000**
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase usaha pertanian yang memperoleh Izin lengkap lingkup dalam daerah		100%	735.000.000		100	735.000.000
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	jumlah standar pelayanan publik pemberian Izin usaha Pertanian		4	135.000.000		4	135.000.000
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	jumlah rekomendasi kelayakan izin usaha pertanian		5	100.000.000		5	100.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usha pertanian		50	500.000.000		50	500.000.000
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	persentase ketersediaan penyedia obat hewan		100	100.000.000		100	100.000.000

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	jumlah usaha pengecer obat hewan yang memenuhi persyaratan		2	50.000.000		2	50.000.000
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	jumlah pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan		2	50.000.000		2	50.000.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani**		1%	760.000.000		1%	510.000.000
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian		100%	760.000.000		100%	510.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang meningkat kapasitasnya		2	145.000.000		2	145.000.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya		5	100.000.000		5	100.000.000
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang tersedia		5	200.000.000		5	200.000.000
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	jumlah badan usaha milik petani yang terbentuk		1	250.000.000			
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah penyelengaraan Sekolah Lapang Kelompok tani		3	65.000.000		3	65.000.000
				16.728.849.884			**15.048.849.884**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2024, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2024, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD Tahun 2024. Namun, sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun nasional, evaluasi kinerja Renja Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2024.

Pemerintah daerah telah berupaya optimal menekan adanya SilPa pada tahun sebelumnya. Namun pada beberapa Perangkat Daerah memerlukan strategi yang relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada pengoptimalan capaian positif kinerja pembangunan di tahun berkenaan. Program/kegiatan yang merupakan penjabaran pagu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dituangkan pada tabel dibawah.

Tabel 4.1. Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KODE REKENING	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	TARGET TAHUN 2024		PENANGGUNG JAWAB
							Kinerja	Rp	
								8.108.849.884	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase penunjang urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berjalan sesuai standar**	**100%**	**8.108.849.884**	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen prencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	77.000.000	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen	1	15.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Perangkat Daerah	jumlah dokumen	1	12.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Perangkat Daerah	jumlah dokumen	1	10.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA- Perangkat Daerah	jumlah dokumen	1	10.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-Perangkat Daerah	jumlah dokumen	1	10.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	1	8.000.000	

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	1	12.000.000	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	4.396.649.884	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen	1	4.369.649.884	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	jumlah dokumen	1	7.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah	jumlah dokumen	1	20.000.000	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase administrasi barang milik perangkat daerah	100%	48.000.000	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	jumlah dokumen	1	20.000.000	
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	jumlah dokumen	1	18.000.000	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah dokumen	1	10.000.000	
					Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	462.000.000	
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan praasarana disiplin pegawai	3	35.000.000	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	57	90.000.000	
					Pendataan dan Pengolahan Kepegawaian	jumlah dokumen	1	8.500.000	
					Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen	1	10.500.000	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai	57	200.000.000	

					Sosialisasi Peraturan Perundangan	jumlah pegawai	57	53.000.000	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah pegawai	57	65.000.000	
					Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	655.000.000	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	5	55.000.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis	50	100.000.000	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis	3	50.000.000	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis penyediaan bahan logistik kantor	3	50.000.000	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5	40.000.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8	60.000.000	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi tamu	100	50.000.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23	150.000.000	
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis PD	1	55.000.000	
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Jumlah SPBE yang terlaksana dengan baik di PD	1	45.000.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	1.200.000.000	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	4	750.000.000	

					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	2	100.000.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	7	150.000.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	7	200.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pertanian yang tersedia	100%	933.200.000	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi	125	4.200.000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan	12	75.000.000	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	30	54.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah luasan yang dibersihkan	180	800.000.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	337.000.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan	47	57.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung	3	150.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	5	30.000.000	

	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian daerah	**Meningkatnya Produktivitas dan Daya serap tenaga Kerja Sektor-sektor Perekonomian Daerah**	**Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian**	**3 27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**4.115.000.000**	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian (%)	4,16	**3.285.000.000**	
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	persentase penggunaan sarana pertanian	100%	1.650.000.000	
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan penggunaan Sarana pendukung produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	7	1.500.000.000	
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah pendampingan penggunaan sarana pertanian	2	150.000.000	
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase peredaran benih/bibit ternak dan tanaman serta pakan ternak dalam daerah kabupaten	75	135.000.000	
					Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	jumlah laporan pengawasan kwalitas benih/bibit, bahan pakan/tanaman skala kecil	1	75.000.000	

					Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	jumlah laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan ternak	1	60.000.000	
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	persentase penyediaan bbit ternak dan Hijauan pakan ternak	1,25%	1.500.000.000	
					Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	jumlah penyediaan Bibit ternak yang berasal dari daerah provinsi Lain	5100	1.500.000.000	
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Presentase Peningkatan Populasi Ternak**	**1,25**	**830.000.000**	
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan penanggulangan penyakit hewan menular	85%	150.000.000	
					Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	jumlah jenis pelayanan penyediaan sarana penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	5	150.000.000	
					Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	presentase jaminan pelayanan hewan dan produk hewan yang masuk dan keluar daerah	100%	320.000.000	

					Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	jumlah identifikasi jenis penyakit dan produk hewan yang dalam kondisi aman	4	135.000.000	
					Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah layanan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	4	100.000.000	
					Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah hewan dan produk hewan yang melintas di perbatasan	4	85.000.000	
					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase pelayanan laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah	100%	180.000.000	
					Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	jumlah obat - obatan hewan dan jenis alat - alat laboratorium serta alat kesehatan hewan yang tersedia	3	100.000.000	
					Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	jumlah penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	5	80.000.000	
					Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	presentase penerapan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner	100%	180.000.000	
					Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	3	100.000.000	
					Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	1	80.000.000	

	Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	**Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati Daerah**	**Menurunya kejadian bencana pertanian**	**3 27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		**87,30%**	**550.000.000**	
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Penurunan kejadian bencana pertanian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**100%**	**550.000.000**	
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	presentase identifikasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	550.000.000	
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah pengendalian OPT dan penyediaan sarana dan alat pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3	300.000.000	
					Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah penanganan Dampak Perubahan Iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3	150.000.000	
					Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	jumlah penganan bencana non alam yang bersifat zoonosis	2	100.000.000	
	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian daerah	**Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri**	**Rasio Pemenuhan sarana prasarana pertanian**	**3 27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		**36,75%**	**3.955.000.000**	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Rasio ketersediaan sarana prasarana pertanian**	**35%**	**2.360.000.000**	

					Pengembangan Prasarana Pertanian	presentase pengembangan prasarana pertanian	100%	850.000.000	
					Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan/LCP2B	jumlah pengelolaan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	3.500	150.000.000	
					Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	jumlah peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2	300.000.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah dukungan prasarana pertanian	12	50.000.000	
					Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	jumlah Dokumen masterplan pengembangan sentra - sentra produksi pertanian dan perkebunan	1	350.000.000	
					Pembangunan Prasarana Pertanian	persentase pembangunan prsarana pertanian	100%	1.510.000.000	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah jaringan irigasi usaha tani yang tersedia	50	100.000.000	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	jumlah unit ketersediaan embung	1	150.000.000	

					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah ketersediaan Jalan Usaha Tani	3	500.000.000	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	jumlah DAM Parit yang tersedia	1	150.000.000	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang tersedia	2	60.000.000	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	jumlah Rumah Potong Hewan yang tersedia	1	150.000.000	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	jumlah gedung Balai Penyuluhan Kecamatan dalam kondisi Baik	1	200.000.000	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah unit prasarana pertanian yang tersedia dalam kondisi layak	1	200.000.000	
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**persentase peningkatan usaha bidang pertanian dan peternakan**	**1,25%**	**835.000.000**	
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase usaha pertanian yang memperoleh Izin lengkap lingkup dalam daerah	100%	735.000.000	

					Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	jumlah standar pelayanan publik pemberian Izin usaha Pertanian	4	135.000.000	
					Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	jumlah rekomendasi kelayakan izin usaha pertanian	5	100.000.000	
					Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usha pertanian	50	500.000.000	
					Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	persentase ketersediaan penyedia obat hewan	100	100.000.000	
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	jumlah usaha pengecer obat hewan yang memenuhi persyaratan	2	50.000.000	
					Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	jumlah pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan	2	50.000.000	
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani**	**1%**	**760.000.000**	
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	100%	760.000.000	
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang meningkat kapasitasnya	2	145.000.000	

					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	5	100.000.000	
					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang tersedia	5	200.000.000	
					Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	jumlah badan usaha milik petani yang terbentuk	1	250.000.000	
					Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah penyelengaraan Sekolah Lapang Kelompok tani	3	65.000.000	
								16.728.849.884	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 disusun sebagai acuan dan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Kami berharap agar perencanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 dapat terlaksana sesuai harapan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah diperlukan komitmen dan tangungjawab pemerintah, swasta dan masyarakat secara efektif, efisien, terintegrasi dan sikronisasi dengan sektor lainnya sehingga dapat menggerakkan perekonomian di daerah.

Pada pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2024.

Tobadak, Juli 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Hj. ASMIRAH DJAMAL, S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19790623 200212 2 003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

RENJA SKPD

DOKUMEN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah perlu adanya perencanaan yang matang dan sistematis agar dalam pelaksanaannya bias berjalan lancar, oleh karena itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempunyai perencanaan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan untuk masing - masing SKPD. Perencanaan tersebut baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu (SKPD) dalam menjalankan tugas danfungsinya telah membuat Rencana Kerja (RENJA) untuk dijadikan sebagai dasar – dasar pelaksanaan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Renja ini berisikan Rencana kegiatan yang diusulkan berdasarkan Renstra (RPJM) periode 2021-2026.

Dengan adanya Renja ini diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah lebih terarah dalam menjalankan tugas dan Fungsinya, sehingga dapat meraih hasil yang optimal.

Akhirnya, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Renja tahun 2022 ini, serta diharapkan semua pihak bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah bisa berjalan dengan sukses.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan hidayah dan keberkahan pada kita semua.

Tobadak, Januari 2024
Mengetahui,
SEKRETARIS DEWAN

MAHYUDDIN, S.Ag.,M.Pd
Pangkat: Pembina IV/a
NIP. 19750410 201001 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud Dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 5

2.1. Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu Dan Capaian renstra 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 14

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi 16

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD 30

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 30

3.2. Tujuandan Sasaran Renja Sekretariat DPRD 30

3.3. Program dan Kegiatan 31

BAB IV.RENCANA KERJA DANPENDANAAN 37

BAB V. PENUTUP 38

LAMPIRAN-LAMPIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi ranncangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencan pembangunan jangaka menegah daerah. Pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dsan pembinaan kemasyrakatan nyata diulaksanankknnya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dari perwakilan rakyat daerah kabupaten mamuju tengah.

Funghsi- fungsi dewan perwakilan rakyat daerah dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan

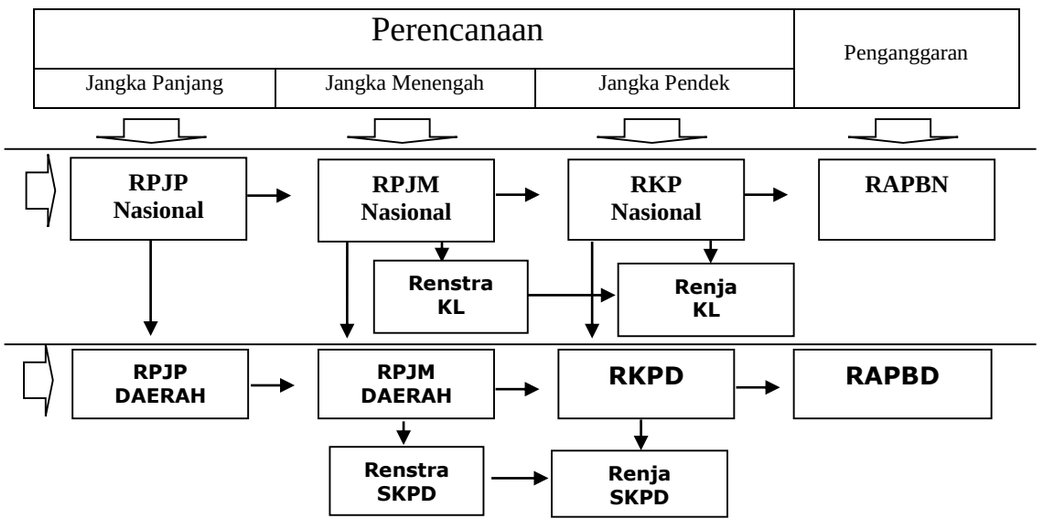
1. Penyusunan peraturan daerah bersama dengan eksekutif
2. Penyusunan anggaran pendapan dan belanja daerah
3. Pengawasan pelaksananksanan pembangunan yang direncanakan didalam APBD.

Sesuai dengan amanat undang-undang No 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, maka sebagai sala satu pelaku pembangunan dengan memperhatikan tugas pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah No 38 tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom dan kecenderungan dinamika perubahan lingkungan strategis, maka sekretraiat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Menyusun Suatu dokumen perencanaan berupa rencana strategis (RENSTRA) (Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2025)

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode 2025, yang memuat kebijakan, program, dankegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi,permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuhberkembang di Kabupaten Mamuju Tengah, dan berorientasi pada hasil yangakan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengahmerupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsiSekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

Ruang lingkup Rencana Kerja (RENJA) adalah pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengahdalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat

dicapai, RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 - 2025 dan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah 2021 - 2025 , dengan diagram alir yang dijelaskan sebagai berikut :



1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589;

4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2006 tentang Hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 25 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
16. Keputusan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mamuju Tengah;
17. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2016.
18. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerjaadalah sebagai pedoman bagiSekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengahdalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pembangunandaerah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel,partisipatifdan tepat sasaran;

   Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya gunadan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalammencapaivisi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 disusunsebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab I : Berisi uraian tentang Umum, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum Renja 2021 - 2025 dan Hubungan dengan dokumen PerencanaanLainya serta sistematika

BAB II :PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

Bab II : Menjelaskan tentang Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III :TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Bab III :Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan

BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab IV : Menjelaskan tentang Program-program rutin dan Program-program Prioritas

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU

2.1. Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu Dan Capaian renstra

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut di atas, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :
   - 3.1 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
   - 3.2 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yangmemiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD.

Untuk menjabarkan prioritas program dan kegiatan dokumen perencanaan lima tahun (Renstra) disusun matriks prioritas program dan kegiatan Renstra sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SPKD s/d Tahun 2023

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n 1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1															
4	08	**01**	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN KABUPATEN/KOTA**									
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4	08	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,47
4	08	01	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA –PD	Jumlah Dokumen RKA_ SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,50
4	08	01	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA –PD	JUmlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,33
4	08	01	01	01	04	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	72,39 %							72,39 %

						Penyusunan Dokumen DPA Perubhan -PD	dan Laporan Hail Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		72,39 %	72,39 %	72,39 %	72,39 %	72,39 %	72,39 %	
4	02	01	2,01		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Capaaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02	01	2,01		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02	01				**Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
4	02	01	2.'02		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	85,08%	85,08%	85,08%	85,08%	85,08%	85,08%	46,47%
4	02	01	2.'02		08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen dan Analisa Prognosis Realisasi Aggaran								
4	02	01	2.'03			**Administrasi Barang Milik Daerah pada PD**		20 Kali	Nihil	Nihil	Nihil	0.00%	Nihil	Nihil	0.00%
4	02	01	2.'03		05	Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pasa SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	02	01	2.'05			**Administrasi Kepegawaian PD**									
4	02	01	2.'05		01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Saran & Prasarana Disiplin Pegawai	52 Orang	52,31%	52,31%	52,31%	52,31%	52,31%	52,31%	41,87%
4	02	01	2.'05		10	Sosialisasi Peraturan Perundangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	--
4	02	01	2.'05		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	JUmlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	25 Orang	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	-

						undangan	Peraturan Perundang-Undangan								
4	02	01	2.'06			**Administrasi Umum PD**									
4	02	01	2.'06		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JUmlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kanto yang Disediakan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
4	02	01	2.'06		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11,38%	11,38%	11,38%	11,38%	11,38%	11,38%	-
4	02	01	2.'06		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	-
4	02	01	2.'06		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		73,72%	73,72%	73,72%	73,72%	73,72%	73,72%	-
4	02	01	2.'06		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		69,54%	69,54%	69,54%	69,54%	69,54%	69,54%	-
4	02	01	2.'06		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang—ndangan yang disediakan		56,48%	56,48%	56,48%	56,48%	56,48%	56,48%	-
4	02	01	2.'06		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Kali	76,77%	76,77%	76,77%	76,77%	76,77%	76,77%	-
4	02	01	2.'06		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		66,65%	66,65%	66,65%	66,65%	66,65%	66,65%	66,65%
4	02	01	2,07			Pengadaan Barang Milik Daerah									

						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
4	02	01	2,07		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit alat Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	25 Unit	-	-	-	-	-	-	-
4	02	01	2,07		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasaran Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	49,82%	49,82%	49,82%	49,82%	49,82%	49,82%	92,46%
4	02	01	2,08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
4	02	01	2,08		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		52,54%	52,54%	52,54%	52,54%	52,54%	52,54%	48,57%
4	02	01	2,08		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	70 Orang	60,57%	60,57%	60,57%	60,57%	60,57%	60,57%	27,02%
4	02	01	2,08		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	15 Orang	70,91%	70,91%	70,91%	70,91%	70,91%	70,91%	48,62%
4	02	01	2,09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
4	02	01	2,09		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUmlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajknya	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02	01	2,09		07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihra	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02	01			09	Pemeliharaan/Rehabi	Jumlah Sarana dan Prasarana		87,06%	87,06%	87,06%	87,06%	87,06%	87,06%	82,55%

			2,09			litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Dirhabilitasi								
4	02	01	2,16			**Layanan Administrasi DPRD**									
4	02	01	2,16		03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	11 Kegiatan	67, 43%	67, 43%	67, 43%	67, 43%	67, 43%	67, 43%	-
4	02	01	2,16		04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebuthan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Kegiatan	23,09%	23,09%	23,09%	23,09%	23,09%	23,09%	17,94 %
4	02	01				**PROAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**									
4	02	02	2,01		01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**									
4	02	02	2,01		02	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	JUmlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Peraturan							
4	02	02	2,02			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	80 Kali	15,87%	15,87%	15,87%	15,87%	15,87%	15,87%	14,67%
4	02	02	2,02		01	**Pembahasan Kebijakan anggaran**		165 orang	165 orang	165 orang	165 orang	100%	165 orang	825 orang	60%
4	02	02	2,02		02	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02	02	2,02		03	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	JUmlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02	02	2,02		04	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-	-	-	-	-	-	-	-

4	02	02	2,02		05	Pemabahasan APDB Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahsan Perubahan APBD Perubahan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02	02	2,02		06	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02	02	2,03			Pembahasan Pertranggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Petanggungjawaban APBD	1 Dokumen	90,15%	90,15%	90,15%	90,15%	90,15%	90,15%	83,35%
4	02	02	2,03		08	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**									
4	02	02	2,04			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahsan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepela Daera		96,05%	96,05%	96,05%	96,05%	96,05%	96,05%	88,81%
4	02	02	2,04		02	**Peningkatan Kapasitas DPRD**									
4	02	02				Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD								
4	02	02	2,04		05	Penyediaan Kelompok Pakar Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	50,69%	50,69%	50,69%	50,69%	50,69%	50,69%	18,11 %
4	02	02	2,05			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 Orang	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	47,19%
4	02	02	2,05		01	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**									
4	02	02	2,05		03	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Lpoan Kunjungan Keerja DPRD	15 Kunjungan	80,98%	80,98%	80,98%	80,98%	80,98%	80,98%	11,76
4	02	02	2,08			Pelaksanaan Reses	JUmlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Kali	66,64%	66,64%	66,64%	66,64%	66,64%	66,64%	33,32%
4	02	02	2,08		01	**Fasilitas Tugas DPRD**									

4	02	02	2,08		03	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Keg	76,90%	76,90%	76,90%	76,90%	76,90%	76,90%	37,19%
4	02	02	2,08		04	Fasilitasi pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah								
4	02	02	2,15			Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD									
4	02	01	2,15		01	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									
4	02	01	2,15		02	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Meneima Hak Keuangan DPRD	25 Orang	70,67%	70,67%	70,67%	70,67%	70,67%	70,67%	69,35%
4	02	01	2,15		03	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	25 Orang							
4	02	01	2.'02		01	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medikal Check Up*	25 Orang							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kegiatan yang menunjang pencapaian tugas dan fungsi pokok SKPD didasarkan kepada standar pelayanan minimum yang hendak dicapai meliputi penyusunan, pengawasan dan pengendalian peraturan daerah serta pembangunan.Jenis pelayanan tersebut sebagai wujud dalam menciptakan kepastian hukum serta terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Penyelenggaraan pelayanan tersebut secara efektif dan efisien akan diatur dalam program perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta pertimbangan normatif dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRDProvinsi/Kab/Kota	-	-	ada	ada	Ada	Ada	Ada	ada	ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana LimaTahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	-	-	ada	ada	Ada	Ada	Ada	ada	ada	Ada	
3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	-	-	ada	ada	Ada	Ada	Ada	ada	ada	Ada	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Jenis pelayanan Sekretariat DPRD adalah untuk memenuhi
kebutuhan :

1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Kebutuhan ini dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD seperti kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor dan pakaian dinas.
2. Mewujudkan pemberian pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kebutuhan ini berkaitan dengan prosedur kerja yang baik dan memeperbaiki sistem kearsipan agar tertata rapi, dengan perubahan sarana dan prasarana perkantoran.
3. Mengakselerasikan hubungan kerja yang dinamis antara Eksekutif dan Legislatif dalam setiap pengambilan keputusan Kebutuhan ini berkaitan dengan pembahasan Ranperda, Keputusan DPRD, Perda Inisiatif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan dan secara eksternal memiliki peluang dan ancaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.Di bawah ini dikemukakan analisis lingkungan internal dan eksternal beserta kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD.

1. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

Berdasarkan analisis atas lingkungan internal Sekretariat DPRD, dapat dikemukan bahwa kekuatan (*strength*) yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan

Fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Dasar hukum pembentukan Sekretariat DPRD sangat kuat
2. Pejabat struktural yang mengisi jabatan structural Eselon II, III dan IV merupakan pejabat yang memiliki pengalaman yang sangat memadai.

Namun demikian, secara internal Sekretariat DPRD juga
memiliki beberapa kelemahan (*Weakness*) yang dapat
dikemukakan sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya aparatur khususnya stafSekretariat DPRD relatif masih perlu ditingkatkan;
2. Perlengkapan kantor masih terbatas ;
3. Belum tersedianya sistem informasi manajemen

4. Pengelolaan administrasi pemerintahan lembaga DPRD.

2. ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

Selain kekuatan dan kelemahan lingkungan internal yang dimiliki Sekretariat DPRD, terdapat pula peluang dan ancaman eksternal yang harus dihadapi. Peluang (*opportunity*) Sekretariat DPRD dari faktor eksternal dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Sebagai sekretariat dari sebuah lembaga politis yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, Sekretariat DPRD cukup leluasa dalam menyusun program dan kegiatan
2. Semakin mapannya peraturan perundang-undanganbidang politik khususnya yang berkaitan denganlembaga legislatif sehingga proses pengelolaanadministrasi pemerintahan memiliki pedoman yang jelasdan pasti ;
3. Kualitas sumber daya Anggota DPRD semakin membaiksehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan,khususnya yang berkaitan dengan pengelolaanadministrasi pemerintahan.

Ancaman (*threats*) yang dihadapi Sekretariat DPRD darilingkungan eksternal dapat dikemukakan sebagi berikut :

1. Sebagai sebuah sekretariat dari lembaga politik,Sekretariat DPRD mendapat imbas tekanan public yangcukup berat dibandingkan SKPD lainnya ;
2. Tekanan – tekanan politis dari para politisi dan atau elitpartai politik pada urusan teknis Sekretariat DPRD masihcukup membebani ;
3. Datangnya Anggota DPRD baru hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 memungkinkan timbulnya tekanan psikologis yang cukup berat bagi Sekretariat DPRD, baiksecara teknis administrasi maupun dalam hal interaksisosial.

Berdasarkan gambaran umum Kabupaten Mamuju Tengah, dananalisis faktor internal dan eksternal melalui pemetaan factor interaksi dalam konteks analisis SWOT, maka isu-isu pentingdalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapatdikemukakan sebagai berikut :

1. Kualitas sumberdaya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah masih perlu ditingkatkan ;

   Peningkatan kualitasSDM yang menjadi isu yang harusditindaklanjuti dengan upaya peningkatan SDM melaluipeningkatan kemampuan administrasi umum maupunkemampuan teknis. Program pendidikan dan Pelatihan danBimbingan Teknis bidang manajemen pemerintahan, sistem informasi dan teknis pengadaan barang dan jasa masih sangat perlu ditingkatkan.

2. Pentingnya disusun standar pelayanan minimum ;

   Standar pelayanan minimum merupakan hal yang harusdimiliki setiap satuan kerja perangkat daerah.Dengan adanyastandar pelayanan minimum maka pengukuran indicator kinerja Sekretariat DPRD semakin mudah dan akurat.

3. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyatdaerah masih belum optimal ;

   Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah perlu ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yanglebih berorientasi kepada peningkatan penguasaan peraturanperundang-undangan, penguasaan sistem perencanaandaerah, penguasaan potensi sumber keuangan daerah, danlain-lain yang hakikatnya bertujuan untuk meningkatkanpengetahuan dan wawasan Anggota DPRD tentang
   pemerintahan daerah.

4. Prasarana persidangan Anggota DPRD perlu ditingkatkan ;

   Kondisi prasarana persidangan perlu ditingkatkan dengan mengadakan peralatan yang lebih canggih agar agenda persidangan dan pemaparan materi dapat dilaksanakan lebih cepat, menarik dan akurat.

5. Belum tersedianya sistem pengelolaan data dan informasipemerintahan berbasis IT

   Penyusunan sistem informasi manajemen bidangpemerintahan, khususnya lembaga DPRD diperlukan untukmempermudah akses masyarakat terhadap data dan informasiyang berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan publik,program kerja komisi, pengaduan masyarakat, tindak lanjutpengaduan masyarakat dan lain-lain kegiatan DPRDKabupaten Lamandau.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2022, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan–peraturan

Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Mamuju Tengah tahun 2022 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan didaerah adalah sebagai berikut :

Tabel.1.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4			**U**	**SU**	**PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**02**		**S**	**KR**	**TARIAT DPRD**						**30,147,629,854**							**29,180,761,603**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20,688,004,854**							**19,566,055,853**	
4	**02**	**01**	2.	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**84,025,462**							**79,445,446**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen		13,29[illegible],730	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya aktivitas dan efisiensi dukungan administrasi dan sarana prasarana	2 Dokumen	14,622,003	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen		12,14[illegible],411	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya aktivitas dan efisiensi dukungan administrasi dan sarana prasarana	1 Dokumen	13,354,452	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						12,140,411		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya aktivitas dan efisiensi dukungan administrasi dan sarana prasarana		13,354,452	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen		13,55[illegible],193	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya aktivitas dan efisiensi dukungan administrasi dan sarana prasarana	1 Dokumen	14,886,512	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen		11,78[illegible],328	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya aktivitas dan efisiensi dukungan administrasi dan sarana prasarana	1 Dokumen	12,960,560	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan		11,78[illegible],328	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak				Meningkatnya aktivitas dan efisiensi dukungan administrasi dan sarana prasarana	2 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD

4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	9,33	,061	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya aktivitas dan efisiensi dukungan administrasi	1 Laporan	10,267,467	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												dan sarana prasarana			
4 02 012.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1,478,885,736**							**1,625,874,309**	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			18 Orang/bula	1,451,88	,736	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Orang/bul an	1,597,074,309	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	8,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	8,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			4 Laporan	10,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	11,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	9,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 012.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**8,000,000**							**8,400,000**	
4 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	8,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 012.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**2,325,000,000**							**2,504,000,000**	
4 02 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			0 Unit	600,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	0 Unit	610,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			18 Paket	55,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	18 Paket	60,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti			3 Orang	70,00	,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	3 Orang	73,500,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pendidikan dan Pelatihan										Pada Perangkat Daerah			
4 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			25 Orang	500,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	25 Orang	550,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			43 Orang	1,100,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	43 Orang	1,210,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 012.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**2,925,755,200**							**3,086,580,720**	
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	20,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	3 Paket	22,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	170,755,200	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	1 Paket	187,830,720	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	35,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	1 Paket	36,750,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	350,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	1 Paket	367,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	10 Paket	110,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	1,600,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	0 Laporan	1,680,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						600,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar		630,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			10 Dokumen	50,000	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	10 Dokumen	52,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 012.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**873,000,000**							**892,500,000**	
4 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	23,000	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Kegiatan Pengadaan yang dilaksanakan setiap tahun	1 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10 Unit	150,000	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Kegiatan Pengadaan yang dilaksanakan setiap tahun	10 Unit	157,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			15 Unit	250,000	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Kegiatan Pengadaan yang dilaksanakan setiap tahun	15 Unit	262,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	150,000	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Kegiatan Pengadaan yang dilaksanakan setiap tahun	0 Unit	157,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	300,000	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Kegiatan Pengadaan yang dilaksanakan setiap tahun	0 Unit	315,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 012.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**727,200,000**							**763,560,000**	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Laporan	50,000	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	0 Laporan	52,500,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0 Laporan	320,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	0 Laporan	336,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Laporan	7,20	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	0 Laporan	7,560,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0 Laporan	350,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	0 Laporan	367,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 012.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**558,638,456**							**350,320,378**	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0 Unit	250,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	0 Unit	26,250,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	10 Unit	10,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	60,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	0 Unit	63,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	1 Unit	105,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	138,63	,456	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	1 Unit	145,570,378	SEKRETARIAT DPRD
4 02 012.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**						**9,687,500,000**							**9,709,375,000**	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			25 Orang/Bular	9,000,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25 Orang/Bul	n 9,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			4 Paket	437,50	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4 Paket	459,375,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			25 Orang	250,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak				Terlaksananya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25 Orang	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 012.16	**Layanan Administrasi DPRD**						**2,020,000,000**							**546,000,000**	
4 02 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			0 Dokumen	150,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	0 Dokumen	157,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			0 Laporan	120,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	0 Laporan	126,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			0 Laporan	1,500,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	0 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			1 Paket	250,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	1 Paket	262,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**9,459,625,000**							**9,614,705,750**	
4 02 022.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**						**1,441,000,000**							**1,488,050,000**	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			10 Dokumen	220,50	,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Peraturan yang di buat setiap Tahun	10 Dokumen	231,525,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	220,500,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Peraturan yang di buat setiap Tahun	10 Dokumen	231,525,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	500,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Peraturan yang di buat setiap Tahun	5 Dokumen	500,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang			10 Dokumen	500,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Peraturan yang di buat setiap Tahun	10 Dokumen	525,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Difasilitasi													
4 02 022.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**						**275,625,000**							**289,406,250**	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun			1 Dokumen	27,562,500		Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran Setiap Tahun	1 Dokumen	28,940,625	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	27,562,500	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran Setiap Tahun	1 Dokumen	28,940,625	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			1 Dokumen	55,125,000		Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran Setiap Tahun	1 Dokumen	57,881,250	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	55,125,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran Setiap Tahun	1 Dokumen	57,881,250	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				0 Dokumen 1 Dokumen	55,125,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran Setiap Tahun	0 Dokumen 1 Dokumen	57,881,250	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1 Dokumen	55,125,000		Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran Setiap Tahun	1 Dokumen	57,881,250	SEKRETARIAT DPRD
4 02 022.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**						**250,000,000**							**275,000,000**	
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			1 Laporan	50,000,000		Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	1 Laporan	55,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			1 Dokumen	100,000,000		Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	1 Dokumen	110,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran			1 Dokumen	50,000,000		Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	1 Dokumen	55,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			1 Dokumen	50,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	1 Dokumen	55,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 022.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**						**1,635,375,000**							**1,426,743,750**	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	882,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	3 Dokumen	926,100,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan			3 Dokumen	165,37	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	3 Dokumen	173,643,750	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			3 Orang	60,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	3 Orang	63,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			11 Orang	264,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	11 Orang	264,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			1 Dokumen	264,00	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 022.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**						**1,135,575,000**							**1,192,353,250**	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			250 Laporan	330,75	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	250 Laporan	347,287,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			1 Dokumen	22,05	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	1 Dokumen	23,152,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3 Dokumen	782,77	,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	3 Dokumen	821,913,750	SEKRETARIAT DPRD
4 02 022.08 **Fasilita**	**i Tugas DPRD**						**4,722,050,000**							**4,943,152,500**	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				420 Dokume	4,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	420 Dokume	4,400,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakira
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
										Nasional	Daerah		Targ
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				2 Laporan	22,050,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	2 Lapora
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				250 Dokumer	300,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	250 Dok
4 02 02 2.08 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	200,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	5 Dokun
						TOTAL	**30,147,629,854**						

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Mamuju Tengah merupakan lembaga pendukung yang keberadaannya terkait dengan keberadaan anggota DPRD Mamuju Tengah yang mempunyai sasaran utama adalah terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Mamuju Tengah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi anggota dewan.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan jenis pelayanan yang diberikan kepada anggota dewan dalam hal memfasilitasi kegiatan rapat dan persidangan DPRD, kegiatan alat kelengkapan DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan/pengendalian terhadap jalannya kebijakan yang telah ditetapkan DPRD dalam pembahasan produk hukum termasuk peraturan daerah, memfasilitasi DPRD dalam penerimaan aspirasi masyarakat, dan mensosialisasikan kegiatan DPRD Mamuju Tengah, melayani kegiatan Keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan, memfasilitasi DPRD dalam pembahasan berkaitan dengan APBD (Murni, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Sekretariat DPRD Mamuju Tengah telah membuat 7 (Tujuh) program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Diharapkan kegiatan-kegiatan yangakan dilaksanakan di tahun 2019 dapat memenuhi tantangan dan mengatasi hambatan yang dihadapi agar kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Mamuju Tengah menjadi lebih optimal.

Tabel 1.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Mamuju Tengah

Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					Tidak ada usulan program dan keg. Untuk secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2					
3					
4					
5					
6					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, maka rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah terwujudnya kelancaran fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah profesional dalam mendukung kinerja DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

Dengan terwujudnya kondisi ideal Sekretariat DPRD dala penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance akan berimplikasi secara langsung terhadap terwujudnya Visi - Misi Kepala Daerah (Bupati Mamuju Tengah).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau pada hakekatnyamemberikan arah dukungan kepada Lembaga DPRD dalam perwujudan optimalisasi tugas DPRD Kabupaten Lamandau. Oleh karena itu, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola kesekretariatan dan tata kelola kelembagaan DPRD yang baik dan terpecaya ;
2. Mewujudkan kualitas dan kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif dan efisien ;
3. Mewujudkan sarana dan prasarana perkantoran dan kegiatan DPRD yang akuntabel dan tepat waktu ;
4. Mewujudkan kapasitas sumber daya aparatur, disiplin dan kinerja aparatur ;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dalam jangka waktutahunan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalamrumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandausebagai berikut :

Pertama, Mewujudkan tata kelola kesekretariatan dan tata kelola kelembagaan DPRD yang baik dan terpercaya.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni :

1. Tersusunnya dokumen, data kearsipan Sekretariat DPRD dan tata kelola kelembagaan DPRD yang rapi ;
2. Tersedianya data – data yang akurat dan uptodate;

3. Meningkatnya pelayanan administrasi umum.

Kedua, Mewujudkan kualitas dan kinerja Lembaga PerwakilanRakyat Daerah secara efektif dan efisien.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni :

1. Terselenggaranya kualitas kinerja Lembaga PerwakilanRakyat Daerah secara efektif dan efisien ;
2. Tercapainya kinerja DPRD.

Ketiga, Mewujudkan sarana dan prasarana perkantoran dan
kegiatan DPRD yang akuntabel dan tepat waktu.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni :

1. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dankegiatan DPRD yang akuntabel dan tepat waktu ;
2. Terlaksananya kegiatan DPRD yang lebih efektif.

Keempat, Mewujudkan kapasitas sumber daya aparatur,disiplin dan kinerja aparatur.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni :

1. Tersedianya sumber daya aparatur yang dapatmengakomodasi kebutuhan DPRD;
2. Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangansecara tepat dan akurat.

Kelima, Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni :

1. Tersedianya kualitas sumber daya aparatur yang handaldan berkualitas ;
2. Terwujudnya pelayanan prima dalam hal administrasiperkantoran.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah.Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2021 merupakan upaya–upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kota Mamuju Tengah yang ingin diwujudkan pada 2016–2021 yaitu mewujudkan “Masyarakat Kota Mamuju Tengah Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021“. Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2021 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Mamuju Tengah ada 2 Program, 15Kegiatan dan 49 Sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.5.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Mamuju Tengah

SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Mamuju Tengah	100%	Rp 22.371.434.581,00	APBD			Rp 24.780.456.037,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Mamuju Tengah		Rp 83.084.189,00	APBD			Rp 91.370.606,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	1 Dokumen	Rp 13,292,730,00	APBD			Rp 14.622.003,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA –PD	Jumlah Dokumen RKA_ SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	Rp 12,140,411,00	APBD			Rp 13.354.452,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA –PD	JUmlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	Rp 12,140,411,00	APBD			Rp 13.354.452,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubhan -PD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hail Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	Rp 13,553,193,00	APBD			Rp 14.886.512,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Capaaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	Rp 11,782,328,00	APBD			Rp 12.960.560,00

					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP								
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	2 Dokumen	Rp 10,841,055,00	APBD			Rp 11.925.160,00
				Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		Mamuju Tengah		Rp 1.478.885.736,00	APBD			Rp 1.626.774.309,00
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju Tengah	20 Orang	Rp 1.451.885.736,00	APBD			Rp 1.597.074.309,00
				Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Mamuju Tengah	1 Laporan	Rp 8.000.000,00	APBD			Rp 8.800.000,00
				Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju Tengah	1 Laporan	Rp 10.000.000,00	APBD			Rp 11.000.000,00
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen dan Analisa Prognosis Realisasi Aggaran	Mamuju Tengah	1 Dokumen	Rp 9.000.000,00	APBD			Rp 9.900.000,00
				Administrasi Barang Milik Daerah pada PD		Mamuju Tengah	100%	Rp 8.000.000.00	APBD			Rp 9.900.000,00
				Penyusunan Prencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	8.000.000.00	APBD			Rp 8.000.000,00
				Administrasi Kepegawaian PD		Mamuju Tengah		Rp 2.325.000.000.00	APBD			Rp 2.557.500.000,00
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Saran & Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju Tengah	unit	Rp 600.000.000	APBD			Rp 660.000.000,00
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Besrta Atribut Kelengkapan	Mamuju Tengah	Paket	Rp 55.000.000	APBD			Rp 60.500.000,00
				Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas	Mamuju Tengah	3 Orang	Rp 70.000.000	APBD			Rp 77.000.000,00

				Fungsi	dan Fungsi yang Mengkuti Pendidikan Pelatihan								
				Sosialisasi Peraturan Perundangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	Orang	Rp 500,000,000.00	APBD			Rp 550.000.000,00	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	JUmlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju Tengah	75)rang	Rp 1.100,000,000.00	APBD			Rp 1.210.000.000,00	
				Administrasi Umum PD		Mamuju Tengah	1 paket	Rp 2.925.755.200.00	APBD			Rp 2.557.500.000,00	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	Mamuju Tengah	1 paket	Rp 20,000,000.00	APBD			Rp 220.000.000,00	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	100%	Rp 170.775.200.00	APBD			Rp 187.830.720,00	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mamuju Tengah	300 materei. 10 lembar prangko & 10 ribu surat twekirim	Rp 35,000,000.00	APBD			Rp 38.500.000,00	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	80 ribu kwh/2 M²	Rp 350,000,000.00	APBD			Rp 385.000.000,00	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Mamuju Tengah	2 0rng	Rp 100.000.000.00	APBD			Rp 110.000.000,00	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	100%	Rp 1.600,000,000.00	APBD			Rp 1.760.000.000,00	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	11 unit	Rp 50,000,000.00	APBD			Rp 660.000.000,00	
				Penata Usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju Tengah	10 Jenis Arsip	Rp 50.000.000	APBD			Rp 55.000.000,00	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Mamuju Tengah	10 unit	Rp 10,000,000.00	APBD			Rp 1.210.000.000,00	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	`Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disesiakan	Mamuju Tengah	1 Unit	Rp 23.000.000,00	APBD			Rp 25.300.000	

				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Mamuju Tengah	10 unit	Rp	150.000.000,00	APBD			Rp 165.000.000,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Mamuju Tengah	25 unit laptop	Rp	500.000.000,00	APBD			Rp 550.000.000,00
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	Mamuju Tengah	Unit	Rp	150.000.000,00	APBD			Rp 165.000.000,00
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Mamuju Tengah	1 paket	Rp	300.000.000,00	APBD			Rp 330.000.000,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	`Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disesiakan	Mamuju Tengah	1 paket	Rp	150,000,000.00	APBD			Rp 799.920.000,00
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Mamuju Tengah	Laporan	Rp	50.000.000,00	APBD			Rp 55.000.000,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Mamuju Tengah	Laporan	Rp	320.000.000,00	APBD			Rp 352.000.000,00
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	Laporan	Rp	7.200.000,00	APBD			Rp 7.920.000,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	Laporan	Rp	350.000.000,00	APBD			Rp 385.000.000,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Mamuju Tengah	25 orng	Rp	250,000,000.00	APBD			Rp 542.310.402,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Mamuju Tengah	11 unit	Rp	184.371.000,00	APBD			Rp 202.808.100,00
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Mamuju Tengah	10 unit	Rp	10.000.000,00	APBD			Rp 11.000.000,00
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Mamuju Tengah	12 jenis peralatan	Rp	60.000.000,00	APBD			Rp 66.000.000,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Mamuju Tengah	1 paket	Rp	100.000.000,00	APBD			Rp 110.000.000,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	Mamuju Tengah	1 paket	Rp	138.638.456,00	APBD			Rp 152.502.302,00

					dipelihara/ direhabilitasi							
				Layanan Administrasi DPRD		Mamuju Tengah	2 kali jakarta, 3 Kali Makassar 9 kali mamuju	Rp 1,300,000,000.00	APBD			Rp 2.772.000.000,00
				Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Mamuju Tengah	25 org	Rp 150.000.000,00	APBD			Rp 165.000.000,00
				Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil fasilitasi Fraksi DPRD	Mamuju Tengah	4 Frak	Rp 120.000.000,00	APBD			Rp 132.000.000,00
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	Mamuju Tengah	40 0rng	Rp 2.000.000.000,00	APBD			Rp 2.200.000.000,00
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga yang disediakan	Mamuju Tengah	1 paket	Rp 250.000.000,00	APBD			Rp 275.000.000,00
				PROAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Mamuju Tengah			APBD			Rp 2.772.000.000,00
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Mamuju Tengah			APBD			Rp 165.000.000,00
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	Mamuju Tengah	20 Ran	Rp 200.000.000,00	APBD			Rp 210.000.000,00
				Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	Mamuju Tengah	10 Dok	Rp 220.000.000	APBD			Rp 231.000.000,00
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	Mamuju Tengah	5 dok	Rp 500.000.000,00	APBD			Rp 525.000.000,00
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan / atau naskah akademik yang difasilitasi		10 dok	Rp 500.000.000,00				Rp 525,000,000,00
				Penyusunan dan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	Mamuju Tengah						Rp
				Pembahasan Kebijakan anggaran		Mamuju Tengah		Rp 1.420.000.000	APBD			Rp 1.491.000.000
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Mamuju Tengah	1 Dok	Rp 27.562.500	APBD			Rp 28.940.625,00
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	JUmlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Mamuju Tengah	1 dok	Rp 27,562,500	APBD			Rp 28,940.625,00
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil	Mamuju Tengah	1 Dok	Rp 55,125,000	APBD			Rp 57.881.000,00

					Pembahasan APBD								
				Pemabahasan APDB Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahsan Perubahan APBD Perubahan	Mamuju Tengah	1 Dok	Rp	55,125,000	APBD			Rp 57.881.000,00
				Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Mamuju Tengah	1 Dok	Rp	55,125,000	APBD			Rp 57.881.000,00
				Pembahasan Pertranggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Petanggungjawaban APBD	Mamuju Tengah	1 Dok	Rp	55,125,000	APBD			Rp 57.881.000,00
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Mamuju Tengah				APBD			Rp 220.000.000,00
				Pengawasan Tindak lanjut Hasil Pemeriksanaan Laporan Keuangan Oleh Badan Oleh Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa kauangan	Mamuju Tengah	2 Keg	Rp	100.000.000,00	APBD			Rp 110.000.000,00
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Mamuju Tengah	1 Dok	Rp	50.000.000,00	APBD			Rp 55.000.000,00
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Mamuju Tengah	1 Dok	Rp	50.000.000,00	APBD			Rp 55.000.000,00
				Peningkatan Kapasitas DPRD		Mamuju Tengah				APBD			Rp 1.283.700.000,00
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah hasil pendalaman tugas DPRD	Mamuju Tengah	3 Keg	Rp	850.000.000,00	APBD			Rp 935.000.000,00
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	Mamuju Tengah	90 Keg	Rp	250.000.000,00	APBD			Rp 55.000.000,00
				Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dalam tim Ahli	Mamuju Tengah	2 Org	Rp	55.000.000,00	APBD			Rp 60.500.000,00
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Mamuju Tengah	8 Org	Rp	330.000.000,00	APBD			Rp 211.200.000,00
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Mamuju Tengah	2 Keg	Rp	20.000.000,00	APBD			Rp 22.000.000,00
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Mamuju Tengah				APBD			Rp 1.296.559.275,00
				Kunjungan Kerja Dalam daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	Mamuju Tengah	30 Kun/25 Org	Rp	500.000.000,00	APBD			Rp 440.000.000,00
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-pokok pikiran yang disusun	Mamuju Tengah	1 Dok/25 Org	Rp	30.000.000,00	APBD			Rp 33.000.000,00
				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan	Mamuju Tengah	3 Keg/25	Rp	748.690.250,00	APBD			Rp 823.559.275,00

					Reses		Org					
				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Mamuju Tengah			APBD			
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan hasil pengawasan kode Etik DPRD	Mamuju Tengah			APBD			
				Fasilitas Tugas DPRD		Mamuju Tengah			APBD			Rp 5.005.000.000,00
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Mamuju Tengah	Dokumen	Rp 4.200.000.000,00	APBD			Rp 4.400.000.000,00
				Fasilitasi pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Mamuju Tengah	2 Laporan	Rp 50.000.000,00	APBD			Rp 55.000.000,00
				Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Tugas Pimpinan yang difasilitasi	Mamuju Tengah	250 Agenda termasuk Agenda alat Kelengkapan lainnya	Rp 500.000.000,00	APBD			Rp 550.000.000,00
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Mamuju Tengah		Rp 10.687.500.000,00	APBD			Rp 11.756.250.000,00
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan	Mamuju Tengah	Dokumen	Rp 10.000.000.000,00	APBD			Rp 11.000.000.000,00
				Penyediaan Pakaian dinas dan Aribut DPRD	JUmlah Pakaian Dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Mamuju Tengah	2 Laporan	Rp 437.500.000,00	APBD			Rp 481.250.000,00
				Pelaksanaan Medical Check up	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up	Mamuju Tengah	250 Agenda termasuk Agenda alat Kelengkapan lainnya	Rp 250.000.000,00	APBD			Rp 275.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah Kumpula kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendaptkan hasil yang di laksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akn dilaksanakan secretariat dewan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Program-program rutin:

1. Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi dukungan Administrasi sarana dan Prasarana;
2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Pendukung Penyelenggaraan Sekretariat Dewan;
3. Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dalam Penyelengaraan Urusan Sekretariat Dewan;
4. Program Dukungan Penyusunan Fungsi Legislasi;
5. Program Dukungan Penyusunan Fungsi Pengawasan;
6. Program Dukungan Penyusunan Fungsi Penganggaran;

Kebijakan dan Program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncakan pelaksanaandan Pembiayaannya melalui APBD. Keberhasilan Program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifkasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakan kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis kemudian dijabarka lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja Tahunan dalam Bentuk kegiatan, indicator kerja, kelompok sasaran dan pendanan indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjud kedalan suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan disinkronisi antara tujuan, sasaran, dan strategi.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019, sebagaipenjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengahtahun 2019, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 - 2026.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi,misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusiSekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.Akhirnya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaanpembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerjapemerintahan yang baik dan akuntabel.

Tobadak, Januari 2024
Mengetahui,
SEKRETARIS DEWAN

MAHYUDDIN, S.Ag., M.Pd
Pangkat: Pembina /IV/a
NIP. 197504102010011012

RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG KAB. MAMUJU TENGAH

TAHUN 2024



KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah 91563

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Perkenaan dan Rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen mengacu Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Visi Kabupaten Mamuju Tengah yaitu "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara*". Untuk mencapai Visi yang telah diuraikan di atas, ditetapkan beberapa Misi Pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga. Dalam Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja Lingkungan Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dalam pencapaian sasaran dan program Tahun Anggaran 2024

Dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 ini masih jauh dari sempurna, maka dalam proses perumusan dan penyusunannya menjadi dokumen Rencana Kerja akan melibatkan setiap unit kerja yang ada di Lingkungan Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan seluruh stakeholder terkait, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka penyelesaian dokumen Rencana Kerja. Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Kerja (RENJA) tersebut, besar harapan

Kantor Kecamatan Budong-Budong untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

Babana, 08 Mei 2024
Camat,

AWALUDDIN A,S.Sos.
Pangkat : Pembina, IV/b
Nip. 19830223 200604 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **iii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG TAHUN 2021 ..... **8**

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Budong-Budong 8

2.2. Penetapan Indikator Kinerja 15

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kantor Kecamatan Budong-Budong 17

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 18

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG **31**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 31

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 32

3.3. Program dan Kegiatan 33

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **41**

BAB V : PENUTUP **49**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 9

Tabel 2.2. Penetapan Indikator Kinerja..... 16

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024..... 19

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025..... 36

Tabel 4.1. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Tahun 2024 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Kantor Kecamatan Budong-Budong. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju TengahTahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan kinerja perangkat daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian

kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung secara langsung maupun tidak langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahunke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sejalan dengan arahan RPJPD serta Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 yaitu "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara*" diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Mamuju Tengah secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia sesuai dengan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan yaitu :

1. Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar;
3. Mendorong daya saing perekonomian daerah;
4. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik;
5. Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat;
6. Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2023;
14. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawsi Barat Nomor 25);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
19. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rencana Kerja ini bagi Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong Tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Budong-Budong;

2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Kantor Kecamatan Budong-Budong dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong Tahun 2024 adalah sebagai:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2024;
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
4. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kantor Kecamatan Budong-Budong yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya;
6. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, meliputi :

I. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

II. **BAB II HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG**

2.1. Evaluasi Kerja Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Tahun 2024;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Budong-Budong;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Sekretraiat Daerah;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal 2024 RKPD;

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. **BAB III TUJUAN, DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG**

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Budong-Budong Tahun 2024

IV. **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

V. **BAB V PENUTUP**

BAB II
EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Budong-Budong

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah adalah penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Budong-Budong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari apa yang telah di raih atau dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG KABUPATEN MAMUJU

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	*Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)*	*Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024*	*Target realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)*			*Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)*	*Perkiraan realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan*	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	*Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)*	*Tingkat Realisasi (%)*		*Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)*	*Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.100.636.393**	**860.745.829**	**841.535.929**	**97,76**	**995.234.533**	**960.313.490**	**96,49**
Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu*	46.490.513	*83.361.700*	*83.361.700*	100,00%	64.119.461	64.103.672	99,97
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu*	852.340.632	*569.432.137*	*559.532.620*	*98,26%*	636.736.975	616.972.235	96,89
Administrasi Kepegawaian	*Persentase Administrasi*	27.550.000	*23.099.900*	*23.099.900*	*100,00%*	28.380.000	22.560.000	79,49

	Perangkat Daerah	*Kepegawaian Perangkat Daerah*							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar*	34.932.006	*68.285.218*	*68.285.218*	*100,00%*	88.847.899	82.440.983	92,78
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia*	72.000.000	*85.250.000*	*66.250.000*	*77,71*	92.014.600	92.014.600	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia*	67.323.242	*32.542.120*	*32.436.920*	*99,67%*	66.753.905	64.682.000	96,89
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara*	*0*	*16.561.614*	*16.456.914*	*99,36%*	18.381.693	17.540.000	95,42
PROGRAM PENYELENGGRAAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK		**PERSEPSI MASYARAKATA TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN**	**104.153.125**	**109.280.600**	**109.280.600**	**100,00%**	**147.481.663**	**147.260.812**	**99,85**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	*Persentase Keg. pemerintahan yang dikoordinasikan*	37.643.476	*42.000.000*	*42.000.000*	*100,00%*	45.730.020	45.723.278	99,98

	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	*Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Dae ah yang ada di*	29.517.669	*37.524.900*	*37.524.900*	*100,00%*	37.714.489	37.711.534	99,99
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	*Persentase Keg. yang dilimpahkan ke kecamatan yang*	36.991.980	*30.025.700*	*30.025.700*	*100,00%*	64.037.154	63.826.000	99,67
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**PERSENTASE KEG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DIKOORDINASIKAN**	**16.979.301**	***13.405.975***	***13.405.975***	**100,00%**	**9.712.766**	**9.710.000**	**99,97**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jmlah Keg. pemberdayaan yang dikoordinasikan*	16.979.301	*13.405.975*	*13.405.975*	*100,00%*	9.712.766	9.710.000	99,97
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**PERSENTASE KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG BERHASIL DILAKSANAKAN**	**8.397.744**	**17.895.200**	**17.895.200**	**100,00%**	**8.665.907**	**8.665.000**	**99,98**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	*Jumlah kasus yang diselesaikan*	8.397.744	*17.895.200*	*17.895.200*	*100,00%*	8.665.907	8.665.000	99,98

	Ketentraman dan Ketertiban Umum								
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PER**	**18.942.452**	**74.800.290**	**74.800.290**	**100,00%**	**42.558.450**	**41.595.902**	**97,73**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan kepala Daerah	*Jumlah kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan*	18.942.452	*74.800.290*	*74.800.290*	*100,00%*	42.558.450	41.595.902	97,73
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU**	**18.637.297**	**19.014.900**	**19.014.900**	**100,00%**	**17.638.102**	**17.475.000**	**99,07**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan*	18.637.297	*19.014.900*	*19.014.900*	*100,00%*	**17.638.102**	**17.475.000**	99,07

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisi kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dengan cara mengkaji indicator kinerja yang akan dicapai oleh instansi. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan *(input),* keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, manfaat *(benefit)* dan dampak *(impact)*. Sesuai analisis yang telah dilakukan, Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah memiliki sasaran sebagai berikut:

a. Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Budong-Budong;
b. Persentase penurunan kejadian kriminalitas di Kecamatan Budong-Budong;
c. Jumlah kejadian konflik sosial skala Kecamatan Budong-Budong;
d. Persentase jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal;
e. Persentase jumlah Desa Berkembang;
f. Persentase jumlah Desa Maju;
g. Persentase jumlah Desa Mandiri.

Penetapan indikator kinerja tersebut diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan seperti pada tabel 2.2 berikut.

TABEL 2.2
TARGET PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
01. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	01	Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Budong-Budong	60%	65%	70%	75%	80%
	02	Persentase penurunan kejadian kriminalitas di Kecamatan Budong-Budong	5%	10%	15%	20%	25%
	03	Jumlah kejadian konflik sosial skala Kecamatan Budong-Budong	5	5	4	4	3
02. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan keberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	04	Persentase jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	36%	27%	18%	9%	0%
	05	Persentase jumlah Desa Berkembang	64%	64%	55%	46%	37%
	06	Persentase jumlah Desa Maju	0%	9%	18%	27%	36%
	07	Persentase jumlah Desa Mandiri	0%	0%	9%	18%	27%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Budong-Budong

Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Perencanaan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah yang akan dihadapi Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknogi yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4) Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5) Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
6) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan komitmen;
7) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Budong-Budong adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang

signifikan bagi SKPD di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2.4. Riview terhadap Rancangan Awan RKPD Tahun Anggaran 2024.

Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah termasuk dalam salah satu pelaksana peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi yang memfungsikan diri sebagai perumus kebijakan penataan dan evaluasi kelembagaan serta fasilitasi penyusunan standarisasi ketatalaksanaan khususnya pelayanan publik berkewajiban mendukung terwujudnya pelayanan prima pada seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Budong-Budong dilaksanakan penyesuaian terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Pogram/Kegaiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pogram/Kegaiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI TEPAT WAKTU**	**100%**	**1.298.600.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI TEPAT WAKTU**	**100%**	**1.298.600.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	**Kec, Budong-**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan**	**100%**	72.000.000	**Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi KInerja**	**Kec, Budong-budong**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan,**	**100%**	72.000.000	

			budong	**, penganggaran dan evaluasi tepat waktu**				**Perangkat Daerah**		**penganggaran dan evaluasi tepat waktu**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kec, Budong-budong	Jumlah Dokumen DPA-PD	2 Dok	20.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kec, Budong-budong	Jumlah Dokumen DPA-PD	2 Dok	20.000.000	
		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	8.000.000		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	8.000.000	
		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	8.000.000		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	8.000.000	

					dan Laporan Hasil							dan Laporan Hasil			
			Koordinasi Dan Penyusunan laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Dok RKA Perubahan RKA Kecamatan	1 Dok	8.000.000			Koordinasi Dan Penyusunan laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Dok RKA Perubahan RKA Kecamatan	1 Dok	8.000.000	
			Koordinasi Penyusunan DPA - SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Dok RKA Kecamatan	1 Dok	8.000.000			Koordinasi Penyusunan DPA - SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Dok RKA Kecamatan	1 Dok	8.000.000	
			Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Dok DPA Perubahan Kecamatan	1 Dok	8.000.000			Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Dok DPA Perubahan Kecamatan	1 Dok	8.000.000	
			Koordinasi Dan Penyusunan laporan Capian Kinerja dan	Kec, Budong-budong	Jumlah Dokumen Laporan Capaian & Ikhtisar	5 Lap	20.000.000			Koordinasi Dan Penyusunan laporan Capian	Kec, Budong-budong	Jumlah Dokumen Laporan Capaian & Ikhtisar	5 Lap	20.000.000	

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja Kecamatan					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja Kecamatan			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**100%**	**1.727.093.000**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**100%**	**1.727.093.000**	
			Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Kec, Budong-budong	Jumlah Aparatur Sipil Negara	15 PNS	800.000.000			Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Kec, Budong-budong	Jumlah Aparatur Sipil Negara	15 PNS	800.000.000	
			Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Kegiatan yang dikoordinasikan	3 Dok	40.000.000			Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Kegiatan yang dikoordinasikan	3 Dok	40.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lap	25.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Kec, Budong-budong	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lap	25.000.000	

										Tahun SKPD					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kec, Budong-budong**	**Persentase Pegawai Kecamatan yang dilayani**	**100%**	**65.000.000**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec, Budong-budong**	**Persentase Pegawai Kecamatan yang dilayani**	**100%**	**65.000.000**	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec, Budong-budong	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	20.000.000			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec, Budong-budong	Jumlah Sarana Pengdukun Disiplin PNS	2 Unit	20.000.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec, Budong-budong	Jumlah Pegawai Lulus besdasarkan tusi	1 org	20.000.000			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec, Budong-budong	Jumlah Pegawai Lulus besdasarkan tusi	1 org	20.000.000	
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec, Budong-budong	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	6 Org	20.000.000			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec, Budong-budong	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	6 Org	20.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec, Budo**	**Persentase administrasi**	**100%**	**104.000.000**		**Administrasi Umum**	**Kec, Budong**	**Persentase administrasi**	**100%**	**104.000.000**	

			ng-budong	**umum PD berjalan sesuai standar**				**Perangkat Daerah**		**-budong**	**umum PD berjalan sesuai standar**			
			Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kec, Budong-budong	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	8 Paket	2.000.000			Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kec, Budong-budong	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	8 Paket	2.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec, Budong-budong	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	11 Paket	55.000.000			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec, Budong-budong	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	11 Paket	55.000.000	
			Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Kec, Budong-budong	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	2.000.000			Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Kec, Budong-budong	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	2.000.000	
			Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Kec, Budong-budong	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	20 Paket	3.000.000			Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Kec, Budong-budong	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	20 Paket	3.000.000	

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec, Budong-budong	Jumlah bahan exampler bacaan Undang – Undang	2 Dok	3.000.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec, Budong-budong	Jumlah bahan exampler bacaan Undang - Undang	2 Dok	3.000.000	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec, Budong-budong	Jumlah tamu yang difasilitas	240 Lap	12.000.000			Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec, Budong-budong	Jumlah tamu yang difasilitas	240 Lap	12.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi kecamatan	275 Kali	27.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi kecamatan	275 Kali	27.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Kec, Budong-budong**	**Jumlah kendaraan yang disediakan**		**120.000.000**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Kec, Budong-budong**	**Jumlah kendaraan yang disediakan**		**120.000.000**	
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Kec, Budong-	Jumlah kendaraan	2 Unit	120.000.000			Pengadaan Kendaraan	Kec, Budong-budong	Jumlah kendaraan	2 Unit	120.000.000	

			Operasional atau Lapangan	budong	yang disediakan					Dinas Operasional atau Lapangan		yang disediakan			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Kec, Budong-budong**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**72.600.000**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Kec, Budong-budong**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**72.600.000**	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec, Budong-budong	Jumlah persuratan yang disediakan	12 Lap	42.000.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec, Budong-budong	Jumlah persuratan yang disediakan	12 Lap	42.000.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec, Budong-budong	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	2 Lap	15.600.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec, Budong-budong	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	2 Lap	15.600.000	
			Penyediaan jasa pelayanan umum	Kec, Budong-budong	Jumlah jasa Pelayanan Umum yang disediakan	2 Lap	15.000.000			Penyediaan jasa pelayanan umum	Kec, Budong-budong	Jumlah jasa Pelayanan Umum yang disediakan	2 Lap	15.000.000	

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemereintahan Daerah	Kec, Budong-budong	Persentase jasa Penunjang Urusan Pemereintahan Daerah	12 Lap	42.000.000			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemereintahan Daerah	Kec, Budong-budong	Persentase jasa Penunjang Urusan Pemereintahan Daerah	12 Lap	42.000.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec, Budong-budong	Jumlah Satuan Jasa Komunikasi,Jasa Sumber daya Air dan Listrik yang dipakai	2 Lap	15.600.000			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec, Budong-budong	Jumlah Satuan Jasa Komunikasi,Jasa Sumber daya Air dan Listrik yang dipakai	2 Lap	15.600.000	
			Penyediaan jasa pelayanan umum	Kec, Budong-budong	Jumlah jasa Pelayanan Umum yang disediakan	2 Lap	15.000.000			Penyediaan jasa pelayanan umum	Kec, Budong-budong	Jumlah jasa Pelayanan Umum yang disediakan	2 Lap	15.000.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara**	**100%**	**15.000.000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara**	**100%**	**15.000.0000**	

			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec, Budong-budong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terpelihara		15.000.000			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec, Budong-budong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terpelihara		15.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGRAAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSEPSI MASYARAKATA TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN**	**Baik**	**190.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGRAAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK**			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSEPSI MASYARAKATA TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN**	**Baik**	**190.000.000**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Keg. pemerintahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**70.000.000**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Keg. pemerintahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**70.000.000**	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksnaan Kegiatann	Kec, Budong-	Jumlah Keg. Pemerintahan yang dilaksanakan	1 Keg	35.000.000			Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan	Kec, Budong-budong	Jumlah Keg. Pemerintahan yang dilaksanakan	1 Keg	35.000.000	

			Pemerintahn dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal tekait	budo ng						Pelaksnaa n Kegiatann Pemerinta hn dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal tekait					
			Peningkatan Efektifitas Kegeiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec, Budo ng-budo ng	Jumlah Keg. yang berjalan sesuai rencana	12 Dok	35.000.00 0			Peningkata n Efektifitas Kegeiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n	Kec, Budong-budong	Jumlah Keg. yang berjalan sesuai rencana	12 Dok	35.000 .000	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**Kec, Budo ng-budo ng**	**Persentase Urusan Pemerintaha n yang tidak dilaksanaka n oleh Unit Kerja Perangkat**	**100%**	**75.000.00 0**		**Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang**		**Kec, Budong - budong**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat**	**100%**	**75.000 .000**	

				Dae ah yang ada di				**ada di Kecamatan**		**Dae ah yang ada di**				
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec, Budong-budong	Jumlah Keg. Pelayanan Masyarakat yang direncanakan	6 Dok	25.000.000			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec, Budong-budong	Jumlah Keg. Pelayanan Masyarakat yang direncanakan	6 Dok	25.000.000	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec, Budong-budong	Jumlah pemenuhan SPM yang difasilitasi	OPD	25.000.000			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec, Budong-budong	Jumlah pemenuhan SPM yang difasilitasi	OPD	25.000.000	
			Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masayarakat di wilaya Kecamatan	Kec, Budong-budong	Jumlah Koordinasi / Sinergitas dengan perangkat daerah mengenai Fasilitasi	20 lap	25.000.000			Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masayarak	Kec, Budong-budong	Jumlah Koordinasi / Sinergitas dengan perangkat daerah mengenai Fasilitasi	20 lap	25.000.000	

					Pemerintahan Atau Pelayanan Umum					at di wilaya Kecamatan		Pemerintahan Atau Pelayanan Umum				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Keg. yang dilimpahkan ke kecamatan yang Mencapai Target**	**100%**	**45.000.000**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat**		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Keg. yang dilimpahkan ke kecamatan yang Mencapai Target**	**100%**	**45.000.000**	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec, Budong-budong	Jumlah Keg. yang terkait non perizinan yang dilaksanakan	6 Lap	25.000.000			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec, Budong-budong	Jumlah Keg. yang terkait non perizinan yang dilaksanakan	6 Lap	25.000.000	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec, Budong-budong	Jumlah Keg. yang tidak berkaitan dengan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan ke	4 Lap	20.000.000			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang	Kec, Budong-budong	Jumlah Keg. yang tidak berkaitan dengan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan ke	4 Lap	20.000.000	

					kecamatan dan dijalankan					dilimpahkan		kecamatan dan dijalankan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE KEG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DIKOORDINASIKAN**	**95%**	**20.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE KEG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DIKOORDINASIKAN**	**95%**	**20.000.000**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Kec, Budong-budong**	**Jmlah Keg. pemberdayaan yang dikoordinasikan**		**20.000.000**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Kec, Budong-budong**	**Jmlah Keg. pemberdayaan yang dikoordinasikan**		**20.000.000**	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec, Budong-budong	Jumlah Kegiatan peningkatan efektifitas	3 Lap	20.000.000			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec, Budong-budong	Jumlah Kegiatan peningkatan efektifitas	3 Lap	20.000.000	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG BERHASIL DILAKSANAKAN**	**100%**	**15.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG BERHASIL DILAKSANAKAN**	**100%**	**15.000.000**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		**Kec, Budong-budong**	**Jumlah kasus yang diselesaikan**		**15.000.000**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Kec, Budong-budong**	**Jumlah kasus yang diselesaikan**		**15.000.000**	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec, Budong-budong	Jumlah Keg. harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	2 Lap	15.000.000			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec, Budong-budong	Jumlah Keg. harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	2 Lap	15.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN			**KEC, BUDONG-**	**RASIO KASUS INTOLERAN**		**40.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**			**KEC, BUDONG-**	**RASIO KASUS INTOLERANSI**		**40.000.000**	

	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**BUD ONG**	**SI SARA PER 1.000 PENDUDUK**			**PEMERINTAHAN UMUM**			**BUDON G**	**SARA PER 1.000 PENDUDUK**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec, Budo ng-budo ng	Jumlah kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan		40.000.00 0		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec, Budong-budong	Jumlah kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan		40.000 .000	
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec, Budo ng-budo ng	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	54 Org	15.000.00 0			Pembinaa n Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec, Budong-budong	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	54 Org	15.000 .000	
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec, Budo ng-budo ng	Jumlah konflik sosial yang ditangani sesuai ketentuan UU	2 Kasus	25.000.00 0			Penangan an Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan	Kec, Budong-budong	Jumlah konflik sosial yang ditangani sesuai ketentuan UU	2 Kasus	25.000 .000	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU**	**95%**	**23.600.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU**	**95%**	**363.000.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec, Budong-budong	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	100%	23.600.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec, Budong-budong	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	100%	23.600.000	

			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan	Kec, Budong-budong	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan	1 Lap	23.600.000			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan	Kec, Budong-budong	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan	1 Lap	23.600.000	

Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah juga membuka usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dan Masyarakat melalui penelitian lapangan dan musrenbang, namun memiliki pagu yang sangat terbatas, sehingga plafon usulan dibatasi hanya pada program dan kegiatan yang urgent dan prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis yang dapat diusulkan dalam Musrenbang, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak ada yang berubah dari Rancangan awal Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Pembangunan wilayah Sulawesi akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sulawesi akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2024, dan sekaligus

menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung proses pembangunan daerah melalui dukungan Terhadap Visi dan Misi Bupati Mamuju Tengah 2021-2026, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi Bupati Terpilih.

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kab. Mamuju Tengah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretaris Daerah. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara* dan mendukung misi keempat *"Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik".*

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong

3.2.1 Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Kantor Kecamatan Budong-Budong dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka tujuan Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi
b. Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Budong-Budong.

3.2.2 Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Kantor Kecamatan Budong-Budong dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sasaran Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan;
b. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan keberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan;

3.3. Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan

program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapainnya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renja ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong pada periode 2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Review rencana kerja merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review renja menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui

perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya.

Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Kinerja Kantor Kecamatan Budong-Budong periode tahun 2024.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2024 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kantor Kecamatan Budong-Budong akan melaksanakan 6 program, 14 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KEC. BUDONG-BUDONG**	**100 %**	**1.100.636.393**	**DAU**		**100%**	**843.193.000**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, Peganggaran & evaluasi tepat waktu**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	46.950.513	**DAU**		**100%**	**56.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	Kec. Budong-Budong	6 Dokumen	30.528.829	DAU		6 dok	30.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-Kecamatan	Kec. Budong-Budong	1 Dokumen	4.853.108	DAU		2 dok	8.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Kecamatan	Kec. Budong-Budong	1 Dokumen	5.243.235	DAU			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Budong-Budong					2 dok	8.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Budong-Budong						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kec. Budong-Budong	1 dokumen	5.865.341	DAU		5 Lap	10.000.000

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**852.340.632**	**DAU**		**100%**	**539.093.000**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara	Kec. Budong-Budong	12 ASN	845.197.885	DAU		15 PNS	500.000.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Yang dikoordinasikan	Kec. Budong-Budong			DAU		5 Dok	20.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Keterpenuhan Laporan Keuangan Tahunan	Kec. Budong-Budong	1 Laporan	7.142.747	DAU		1 Lap	19.093.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentasi Pegawai Yang diniai**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**27.550.000**	**DAU**		**100%**	**18.000.000**
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Budong-Budong					4 Dok	8.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Budong-Budong	1 Orang	15.050.000	DAU			
		Bimbigan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Budong-Budong	2 Orang	12.500.000	DAU		2 Org	10.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**34.932.006**	**DAU**		**100%**	**80.000.000**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen	Kec. Budong-Budong	8 Paket	834.706	DAU		6 Paket	10.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantror	Kec. Budong-Budong					3 Paket	45.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Budong-Budong	2 Paket	1.137.300	DAU		8 Paket	8.000.000

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan	Kec. Budong-Budong	20 Dokumen	1.650.000	DAU			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Exp Bacaan dan Perundang-undangan	Kec. Budong-Budong	2 Laporan	24.00.000	DAU		2 Dok	2.000.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Kec. Budong-Budong	240 Laporan	12.990.000	DAU		150 Laporan	12.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi kecamatan yang terselengarakan	Kec. Budong-Budong	240 Kali	15.920.000	DAU		40 Lap	15.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pengadaan Barang**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**72.000.000**	**DAU**		**100%**	**90.000.000**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kec. Budong-Budong	1 Unit	72.000.000	DAU		1 Unit	90.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**67.323.242**	**DAU**		**100%**	**42.100.000**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di kelola	Kec. Budong-Budong	12 Laporan	48.513.978	DAU		12 Lap	30.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumber daya Air dan Jasa Listik Yang dipakai	Kec. Budong-Budong	2 Laporan	12.809.264	DAU		2 Jenis	12.100.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	Kec. Budong-Budong	2 Dokumen	6.000.000	DAU			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**18.381.693**	**DAU**		**100%**	**18.000.000**
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor &b Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor &b Bangunan Lainnya Yang di Pelihara	Kec. Budong-Budong					1 Unit	18.000.000

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN**	**KEC. BUDONG-BUDONG**	**100%**	**104.153.125**	**DAU**		**100%**	**138.000.000**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Kegiatan PemerintahanYang dikoordinasikan**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**37.643.476**	**DAU**		**100%**	**38.000.000**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Keg. Pemerintahan yang dilaksanakan	Kec. Budong-Budong	1 Laporan	37.943.278	DAU		1 Kegiatan	38.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**29.517.669**	**DAU**		**100%**	**40.000.000**
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang direncanakan	Kec. Budong-Budong			DAU		11 dok	20.000.000
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemenuhan SPM yang difasilitasi	Kec. Budong-Budong	OPD	29.517.669	DAU		6 Lap	20.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Keg. yang Dilimpahkan kepada Camat Yang mencapai Target**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**36.991.980**	**DAU**		**100%**	**60.000.000**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah kegiatan Yang Terkait Non perizinan yang dilaksanakan Oleh Kecamatan	Kec. Budong-Budong			DAU		6 Kegiatan	30.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang tidak berkaitan dengan perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kekecamatan dan dijalankan	Kec. Budong-Budong	2 Kegiatan	36.991.980	DAU		4 Kegiatan	30.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DIKOORDINASIKAN**	**KEC. BUDONG-BUDONG**	**100%**	**16.979.301**	**DAU**		**100%**	**15.000.000**

		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Yang dikoordinasikan**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**16.979.301**	**DAU**		**100%**	**15.000.000**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Budong-Budong	3 Kegiatan	16.979.301	DAU		11 Lap	15.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**PERSENTASE KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG BERHASIL DISELESAIKAN**	**KEC. BUDONG-BUDONG**	**100%**	**8.397.744**	**DAU**		**100%**	**25.000.00**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kasus yang diselesaiakan**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**8.397.744**	**DAU**		**100%**	**25.000.000**
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Keg, Harmonisasi dengaqn Toko Agama dan Masyarakat	Kec. Budong-Budong	2 Laporan	8.397.744	DAU		11 Lap	25.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PER 1.000 PENDUDUK**	**KEC. BUDONG-BUDONG**	**100%**	**18.942.452**	**DAU**		**100%**	**57.000.000**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kasus Intoleransi Sara Yang diselesaikan ditingkat Kecamatan**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**18.942.452**	**DAU**		**100%**	**57.000.000**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan	Kec. Budong-Budong			DAU		22 Org	20.000.000
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik Sosial Yang ditangani Sesuai ketentuan UU	Kec. Budong-Budong	2 Laporan	18.942.452	DAU		11 Lap	25.000.000
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Yang dilaksanakan	Kec. Budong-Budong			DAU		1 Dok-	12.000.000-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**PRERSENTASE PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU**	**KEC. BUDONG-BUDONG**	**100%**	**18.637.297**	**DAU**		**100%**	**10.971.246**

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**18.637.297**	**DAU**		**100%**	**10.971.246**
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa	Kec. Budong-Budong	11Laporan	18.637.297	DAU		11 Desa	10.971.246

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, direncanakan akan dilaksanakan Program dan Kegiatan dengan total alokasi dana Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 1.267.746.312 (*satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh Enam ribu tiga ratus dua belas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Kerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kantor Kecamatan Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024	
			Target	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**100 %**	**1.100.636.393**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat waktu**	**100%**	**46.490.513**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan kecamatan	2 Dokumen	30.528.829
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- kecamatan	1 Dokumen	4.853.108
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	5.243.235
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	5.865.341
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan**	**100%**	**852.340.632**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara	15 ASN	845.197.885
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	Persentase Keterpenuhan Laporan Keuangan Tahunan	1 Laporan	7.142.747
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentasi Pegawai Yang diniai**	**100%**	**27.550.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	1 Orang	15.050.000
	Bimbigan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	12.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**34.932.006**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Paket	834.706

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	1.137.300
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan	20 Paket	1.650.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Exp Bacaan dan Perundang-undangan	2 Dokumen	2.400.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	240 Laporan	12.920.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi kecamatan yang terselengarakan	275 Laporan	15.920.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pengadaan Barang**	**100%**	**72.000.000**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	72.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia**	**100%**	**67,323,242**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di kelola	12 Laporan	48,513.978
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumber daya Air dan Jasa Listik Yang dipakai	2 Laporan	12.809.264
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	2 Laporan	6.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN**	**100%**	**104.153.125**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Persentase Kegiatan PemerintahanYang dikoordinasikan**	**100%**	37.643.476
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Keg. Pemerintahan yang dilaksanakan	1 Laporan	37.943.278
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**29.517.669**
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemenuhan SPM yang difasilitasi	0 Laporan	29.517.669
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Persentase Keg. yang Dilimpahkan kepada Camat Yang mencapai Target**	**100%**	36.991.980

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang tidak berkaitan dengan perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kekecamatan dan dijalankan	4 Laporan	36.991.980
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DIKOORDINASIKAN**	**100%**	**16.979.301**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Yang dikoordinasikan**	**100%**	**16.979.301**
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemberdayaan	3 Laporan	16.979.301
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**PERSENTASE KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG BERHASIL DISELESAIKAN**	**100%**	**8.397.744**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Jumlah Kasus yang diselesaiakan**	**100%**	**8.397.744**
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Keg, Harmonisasi dengaqn Toko Agama dan Masyarakat	2 Laporan	8.397.744
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PER 1.000 PENDUDUK**	**100%**	18.942.452
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah Kasus Intoleransi Sara Yang diselesaikan ditingkat Kecamatan**	**100%**	18.942.452
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik Sosial Yang ditangani Sesuai ketentuan UU	2 Laporan	18.942.452
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**PRERSENTASE PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU**	**100%**	**18.637.297**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**100%**	**18.637.297**
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa	9 Laporan	18.637.297
				TOTAL		***1.267.746.312***

Sumber : SubBagian Perencanaan Kecamatan Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(Stakeholders)* dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rancangan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah adalah Program Tahunan Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah yang akan disempurnakan menjadi Rencana Kerja dengan menampung seluruh usulan dan perbaikan dari stakeholder terkait.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah selain menjadi rencana pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan manajemen dan seluruh staf Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

RENCANA KERJA (RENJA)

KANTOR KECAMATAN TOBADAK

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

RencanaKerja (RENJA)Kecamatan Tobdak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan tahun Ke empat periode 2021-2026 kepemimpinan Bupat danWakil Bupati terpilih.Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari Tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetap kan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan pada tahun 2016.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 terdiri dariPendahuluan, EvaluasiP elaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Tobadak dan aIndikatif beserta sumber nya serta prakiraanmaju berdasarkan pagu indikatif, sumberdana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Tobadak tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah mau pun mitra kerja.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja Perubahan ini.Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam Penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terima kasih

Tobadak, 31 Maret 2024

Kepala Kantor Kecamatan Tobadak

H. GUNANTO, S.Pd
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19621123 198411 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latarbelakang 1

1.2. LandasanHukum 1

1.3. MaksuddanTujuan 3

1.4. SistematikaPenulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSNAAN RENJA TAHUN 2024 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD .. 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 23

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 25

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 36

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 37

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasihasilpelaksanaanrenja OPD sampaitahunberjalanKantor Kecamatan Tobadak 8

Tabel 2.2 Realisasi program/kegiatantahun 2024 ygtelahmemenuhi target 17

Tabel 2.3 Review pencapaiankinerjapelayanan Kantor KecamatanTobadak..... 21

Tabel 2.4 Review terhadaprancanganawal RKPD Kantor KecamatanTobadak..... 27

Tabel 4.1 RencanaKerja Kantor KecamatanTobadaktahunanggaran 2019..... 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (renja) perubahan adalah dokumen perencanan OPD untuk periode 1 (satu)tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yangdilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan olehmasyarakat.Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tobadak Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dankerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Kantor Kecamatan Tobadak Tahun 2024 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tobadak selanjutnya disebut Renja Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dan Renstra Kantor Kecamatan Tobadak Tahun 2021-2026, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Oleh karena itu, secara substansial tujuan,sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harusterakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Kantor Kecamatan Tobadak. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagaidokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuandan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, salingmendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkaitdengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2024 tentang "Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah";
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) tahun. Renja ini menggambarkan tentang sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Kecamatan Tobadak serta menjelaskan indikator yang menjadi dasar penilaian keberhasilan suatu program atau kegiatan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja ini yaitu :

1. Sebagai pedoman bagi Kantor Kecamatan Tobadak dalam menentukanprioritas program dan kegiatan tahun 2024.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Kecamatan Tobadak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Kecamatan Tobadak untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2024.

3.1. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umumpenyusunan Rancangan Renja OPD agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPDProses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara RenjaOPD dengan dokumen RKOPD, Renstra OPD, dengan RenjaK/L dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnyadengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan daripenyusunan Renja OPD.

1.3 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturanpemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturanlainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas danfungsi, kewenangan OPD, srta pedoman yang dijadikanacuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaranOPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD,serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD

Pada Bab ini memuat kajian (Review)terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahunlalu(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalanyang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPDsudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan denganpencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasiprogram dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun- tahun sebelumnya.Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPDTahun Lalu, dan realisasi Renstra OPD, mengacu padahasil laporan kinerja tahunan OPD dan / atau realisasiAPBD untuk OPD yang bersangkutan.Pokok - pokok materi yang disajikan dalam babiniantara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat tentang kajian terhadap capaiankinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerjayang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadapIKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38Tahun 2007.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengantugas dan fungsi masing - masing OPD, sertaketentuan peraturan perundang - undangan yang terkaitdengan kinerja.Jika OPD bersangkutan belum mempunyaitolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, makasetiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa danbagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja danindikator kinerjapelayanan masing - masing sesuaitugas pokok dan fungsi, serta norma standarpelayanan OPD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Prosesyang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidakterdapat di rancangan awal RKPD, atau programdan giatan cocok namun besaranya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadapprogram / kegiatan yang diusulkan para pemangkukepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkaitlangsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi asosiasi,Perguruan Tinggi, maupun dariOPDKabupaten yang langsung ditujukan kepada OPDPropinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulaninformasi OPD Propinsi dari penelitian lapangan danpengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten(bila sudah dilakukan).Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab iniantara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagamana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahanterhadap kebijakan nasional dansebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yangmenyangkut arahan kebijakan dan prioritaspembangunan nasional dan yang terkait dengantugas pokok dan fungsi OPD. Diskripsi untuk mengisi sub-sub ini mengacu padakertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

1. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini memuat tentang program-program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2019 disertai informasi sebagai berikut:

1. indikator kinerja;
2. Kelompok sasaran;
3. Lokasi kegiatan;
4. Kebutuhan dana indikatif
5. Sumber dana

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra OPD

Pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tobadak Tahun 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2024.Kantor Kecamatan Tobadak telah mereview terhadap hasilevaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaiankinerja tahun berjalan (tahun 2019),bahwa dalam mencapaikinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuanberdasarkan RPJMD tahun 2021-2026.

Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Tobadak tahun 2024 telah berjalan denganbaik, sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun. Hal ini dapat dilihat dari jumlahprogram kegiatan yang tertuang di dalam APBD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 atau dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Tobadak Tahun 2024, hampir 100% program kerja yang direncanakan didalam RENJA Kantor Kecamatan Tobadak tahun 2024dapat direalisasikan.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024, dan realisasi renstra Kantor Kecamatan Tobadak yang mengacu padahasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi HasilEvaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi targetkinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

   Semua program dan kegiatan tahun 2024 telah terealisasisesuai dengan target yang diusulkan (100 %).

2. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Persentase
			Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Program :** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota **Kegiatan :** 1. Penyu.Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen	16.554.515	16.554.515	100%

	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
	2. koordinasi penyu.lap Semesteran	Empat Laporan	20.501.988	20.501.988	100%
	3.Penyediaan Gaji dan Tunjangan	13 Orang	1.130.422.735	1.130.422.735	100%
	4. koordinasi penyu.lap Akhir tahun	1 Tahun	1.381.821	1.381.821	100%
	ADMINISTRASI KEEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				
	11**.**Monitoring,Evaluasi Penilaian kinerja Pegawai	Laporan 1 tahun 8 Desa	32.724.021	32.724.021	100%
	12.Bimbingan Tehknis	2 kali	10.0000.000	10.000.000	100%
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
	13.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	4 Jenis	974.200	974.200	100%
	14. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	1 Item	6.000.000	6.000.000	100%
	16. Penyediaan Cetak & penggandaan	2500 L	3.150.000	3.150.000	1000%
	17. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	1.500.000	1.500.000	100%
	18.Fasilitas Kunjungan tamu	1 Tahun	9.253.692	9.253.692	100%
	19.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176Kali	46.388.000	46.388.000	100%
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	18. Sewa Kendaraan dinas	1 Unit	72.000.000	72.000.000	100%

	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH				
	21. Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 bulan	24.762.527	24.762.527	100%
	22. Penyediaan Jasa Komunikasi Air & Listrik	12 Bulan	18.864.000	18.864.000	100%
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	23 Penyediaan Jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas & pajak kendaraan Perorangan	3 unit	10.021.000	10.021.000	100%
	24. Pemeliharaan Mesin lainnya	4 Unit	2.000.000	2.000.000	100%
	25. Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	1 Unit	20.861.527	20.861.527	100%

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Persentase
			Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2	**Program :** Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan **Kegiatan :** 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa	1 Kegiatan	46.635.551	46.635.551	100%
	Program : Penyelenggaraan pmerinthan dan pelayan publik				
	Peningkatan efektivitas kegaitan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Kegiatan	32.939.151	32.939.151	99.9%

10. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 %.
11. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan, Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun

2024, faktor-faktor penyebabnya adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing-masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM (Personil) di Kecamatan Tobadak.

12. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD. Target capaian program Renstra tahun 2024-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
13. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah :

    Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator KinerjaUtama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebabterbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerjalembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telahdilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain sertamenjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tobadak

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerjapelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yangditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahanyang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangkapeningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tobadak

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kanor Kecamatan Tobadak tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadapperkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Isu-isu penting dan masalah yang dihadapi Kecamatan Tobadak didalammelaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan terbaik kepadamasyarakat adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Tobadak dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Tobadak :
    a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Tobadak sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tobadak;

b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan peralatan perkantoran bagi masing-masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
c. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Tobadak sehingga tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobadak sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Tobadak terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;

3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Tantangan :

a. Terbatasnya sarana prasarana yang ada sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;
b. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
c. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;

Peluang :

a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya;
c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasitantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehinggaproses pelayanan publik di Kecamatan Tobadak terlaksanadengan baik, tertib dan lancar.

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

   Pada tahun anggaran 2024, telah berhasildilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tobadak melaluiProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran,Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, danPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerjaperlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasarana yang mendukung.

b. Urusan Perencanaan Pembangunan

   Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2024,telah dilaksanakan melalui Musrenbang,tetapi realisasinya belum maksimal,dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuaidengan program RPJMD, sehingga program tersebuttidak bisa terealisasi.

c. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

   Kecamatan Tobadak mengharapkan kepadaPemerintah agar terus melakukan pembinaan-pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit-bibit atlit yang berkualitas, sehinggamampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, sertaharus pula memberikan perhatian lebih kepada parapemuda berprestasi.

d. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

   Pada tahun anggaran 2024, Kantor Kecamatan Tobadak telah melaksanakan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan Pentas seni dan budaya, festifal, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Diharapkan partisipasi masyarakat akan lebih meningkat lagi tiap tahunnya.

e. Urusan Pemberdayaan Perempuan

   Pada tahun anggaran 2024, Kantor Kecamatan Tobadak telah melaksanakan program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Diharapkan perempuan dapat lebih berperan pembangunan daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yangberkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skalaprioritas.Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan padasebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2024.Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dankegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kantor Kecamatan Tobadak Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkandengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program programdan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kantor Kecamatan Tobadak Tahun 2021-2026 merupakan program dan kegiatan telahdisusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif OPD dan paguindikatif kewilayahan yang telah ditetapkan.

Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa,Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang TingkatTingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan sebagaimana table Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalammusrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasandari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur TokohMasyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan OrganisasiKemasyarakatan sehingga mengahislkan usulan program yangdi bawah ke Musyawarah Desa.

Di Musyawarah Desa menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Musrenbang Tingkat Kecamatan.Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritasprogram yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing SKPD yang adapada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1.TujuandanSasaranRenja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja (renja) OPD Kecamatan Tobadak sanga diperlukan untuk membuat kerangka yang jelas dan member arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan.Rumusan tujuan dan sasarand

idasar kan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Tobadak.

Renja Kecamatan Tobadak Tahun 2024 ditujukan untuk memberikan Arah, Kebijakan Umum dan Prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Tobadak .Selainitu Renja juga sebagai landasandan pedoman kebijakan operasional bagi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun RencanaKerja (Renja) berdasarkan program dan kegiatan, serta Rencana Kerja Anggaran(RKA) sesuai denganperan, tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan percepatan proses perubahan social bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi daerah dan kemampuan masyarakat, serta pencapaian tujuan pelayanan publik.

Sasaran dari penyusunan Renjaa dalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna mempertajamprioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang optimal.

Dalam Renja Kantor Kecamatan Tobadak tahun 2024 ,rumusan tujuan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur pemeritah di Kecamatan Tobadak;
3. Meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Adapun rumusan sasaran diuraikan sebagai berikut :

1. Meingkatnya pelayanan kependudukan di Kantor Kecamatan Tobadak;
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan di Kecamatan dan Pemerintahan Desa;
3. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa.

3.3 Program danKegiatan

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2024 yang dituang kan dalam Perubahan 2024 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah.Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan demikian kegiata nmerupakan penjabara nlebih lanjut dari suatu program sebaga arah dari pencapaian tujuan dan asaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.Kegiatan merupakan

aspekoperasional dari suatu rencanas trategis yang diarah kan untuk memenuhi sasaran, tujuan,visi dan misi organisasi.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah sebagai leading sector dalam hal perencanaan di Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Selain melaksanakan kegiatan rutin OPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2024 yang dituang kan dalam Renja 2024 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapa ivisi-misi pembangunan daerah .Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strateg dalam rangka mencapai setiap tujuans trategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatani ndikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tobadak KabupatenMamuju Tengah.Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasarans trategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarah kan untuk memenuhi sasaran, tujuan,vis idan misi organisasi.

Secara umum program dan kegiatan KantorKecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 adalah:

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tobadak Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kadi paten 2016 – 2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Mamuju Tengah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mamuju TengahTahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Tobadak sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan TobadakTahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Tobadak diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Tobadak , 30 Maret 2024

Kepala Kantor kecamatan Tobadak

H.GUNANTO S,Pd
Pangkat : pembina, IV/a
NIP. 1968020 1991031013

2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA LITBANG)

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA TAHUN 2024

BAPPEDALITBANG
MAMUJU TENGAH
2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor dan Instansi Pemerintah lainnya. Renja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen perencanaan, juga diharapkan menyatukan Visi, Misi Kepala Daerah dengan Strategi Perangkat dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang maju, mandiri khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan, serta untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang diharapkan memacu kinerja pada tahun berikutnya, terutama peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manusia pada Bappeda Litbang Kab. Mamuju Tengah.

Renja Bappeda Litbang Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024 sesuai dengan target dan capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap Prioritas Program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang pada akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kabupaten Mamuju Tengah.

Kami menyadari penyusunan Rencana Kerja masih banyak kelemahan-kekurangan, oleh karena itu kami mohon masukan dari semua pihak guna meningkatkan efektivitas Perencanaan Pembangunan pada masa yang akan datang.

Tobadak, Januari 2023

KEPALA
BAPPEDALITBANG,

LITHA FEBRIANI, SE., M.Si
NIP. 19830215 200312 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU **9**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.3 Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 25

2.5 Penalaah Usulan Program dan Kegiatan 26

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **27**

3.1 Telaah Tahapan Kebijakan Nasional 27

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 27

3.3 Program dan Kegiatan 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAAN PERANGKAT DAERAH **44**

BAB V PENUTUP **56**

BAB I

PENDAHULUAN

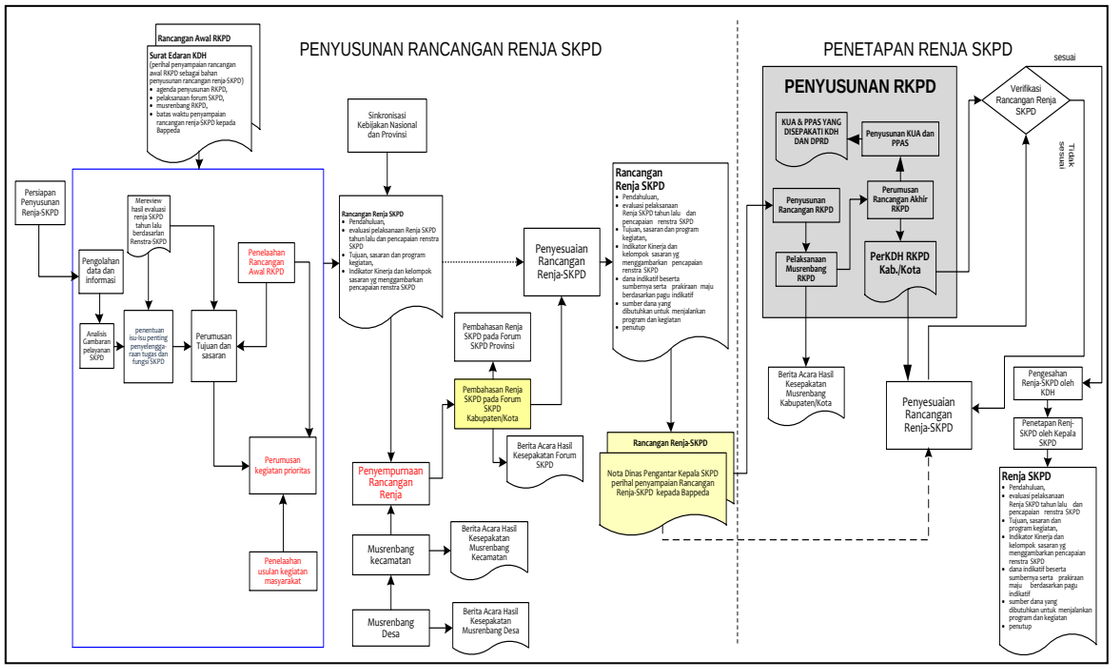
1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, salah satunya ruang lingkup perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif sesuai dengan program prioritas pada rancangan dokumen RKPD Kabupaten. Dalam penyusunan haruslah berpedoman kepada rancangan awal RKPD sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan daerah dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen rencana pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah, agar tetap terjaga sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan daerah dalam periode satu tahun.

Dokumen Renja ini akan menyempurnakan penyusunan dokumen RKPD yang akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bagan alir penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RenjaPerangkat Daerah Kabupaten/Kota



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan rancangan awal RKPD yang menuangkanisu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 termasuk dukungan terhadap tugas-tugas yang diemban Pejabat Bupati, rancangan Renja ini kemudian dibuat setelah mengumpulkan data dan informasi berupa regulasi terkait, kebijakan-kebijakan nasional terkait, hasil evaluasi pelaksanaannya, dan dokumen realisasi pencapaian Renja tahun sebelumnya (2022 / n-2) serta data khusus yang dibutuhkan (termasuk data dari musrenbang kecamatan). Setelah menelaah rancangan awal RKPD, Renja Bappeda Litbang akhirnya merumuskan dukungan terhadap RKPD dan sesuai dengan tugas Bappeda Litbang sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang menjadi tanggung jawabnya dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen ini.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, berlandaskan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2022;
15. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawsi Barat Nomor 25);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis tentang kondisi faktual Perangkat Daerah yang dapat memberikan informasi terhadap keberadaan potensi maupun masalah yang ada sehingga mampu memberikan acuan dalam bekerja dalam satu Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Litbang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menyiapkan dokumen rencana kerja satu tahun Perangkat Daerah yang dipergunakan untuk menjalankan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Kabupaten Mamuju Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renja Bappeda Litbang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari:

1.1 Latar Belakang. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA.

Terdiri dari:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dan Capaian Renstra Perangat Daerah. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangat Daerah. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangat Daerah berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangat Daerah. Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangat Daerah; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangat Daerah; 3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangat Daerah; dan 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atau rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan. Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Berisikan tentang uraian program, kegaiatan dan pendanaan yang direncanakan

BAB V PENUTUP.

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Di tahun kedua penyelenggaraan pemerintahan Kepala Daerah terpilih, pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah berfokus pada tema **"Pengembangan perekonomian dan sistem sosial tangguh Covid didukung penguatan infrastruktur dasar"** dengan pelaksanaan pembangunan diprioritaskan kepada:

a. Pemulihan Ekonomi;
b. Pembangunan Infrastruktur Dasar;
c. Reformasi Struktural;
d. Penanggulangan Kemiskinan;
e. Reformasi Birokrasi.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dianggarkan pada Bappeda Litbang, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Mamuju Tengah

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**98,38%**	**98,38%**	100%	**295**	**59**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**99,94%**	**99,94%**	100%	**300**	**60**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	2	2	2		1	5	42
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	99,90%	1	3	60

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	2	1	1	100%	1	3	60
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	5	2	1	1	100%	1	3	60
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5	2	1	1	99,85%	1	3	60
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	1	3	3	99,86%	1	5	50
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**100**	100%	**97,77%**	**97,77%**	100%	**300**	**60**

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	95	18	19	19	97,72%	19	56	59
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	3	2	2	99,00%	2	7	60
5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100%**	**100**	100%	**99,99%**	**99,99%**	100%	**300**	**60**
5	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah	100	20	2	2	100%	10	32	42
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani**			100%	**96,91%**	**96,91%**	100%		
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasrkan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti			2	2	96,91%			

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
					Tugas dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan								
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**500**	**100**	100%	**99,00%**	**99,00%**	100%	**300**	**60**
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	3	1	1	99,20%	5	13	54
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yag disediakan	430.000	3	5	4	97,80%			
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	150.000	15.000	50.000	45.000	99,93%	30000	75.000	50
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	26.999	2.250	1.500	1.500	99,76%	5500	9.250	34
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.100	120	100	100	99,88%	220	440	40
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi**			**100%**	**60.850.000**	**93,90%**	100%		

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
					Urusan Pemerintah Daerah									
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			64.800.000	60.850.000	93,90%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**			**124.204.056**	**124.077.600**	**99,90%**	100%		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			38.792.690	38.781.600	99,97%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36.011.366	35.921.000	99,75%			
					Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum			49.400.000	49.375.000	99,95%			

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
					Umum Kantor	kantor yang disediakan								
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**500**	**100**	**64.615.50**	**64.615.500**	**98,74%**	100%	**300**	**60**
5	01	01	2.07	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	78	15	64.615.500	64.294.755	98,74%	1	31	40
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Dokumen yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan perundangan yang berlaku**	**500**	**100**	**873.475.445**	**867.283.201**	**99,26%**	100%	**300**	**60**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah**	**12**	**3**	**446.398.695**	**442.383.488**	**99,86%**	**2**	**8**	**67**
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan,	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD	15	3	249.560.000	249.560.000	99,93%	2	8	53

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
					dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah	15	2	55.565.390	54.700.692	99,99%	2	6	40
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah berita acara konsultasi publik	10	2	19.565.170	19.264.600	99,99%	2	6	60
					Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah			17.767.525	16.436.100	92,51%			
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	10	2	26.435.120	26.192.000	99,08%	2	6	60
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverivikasi oleh kecamatan	150	30	25.812.240	25.711.800	99,61%	30	90	60
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota yang ditetapkan	15	3	51.693.250	50.518.296	97,73%	2	7	47

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
					Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah**	**500**	**100**	**201.315.550**	**199.922.650**	**99,31%**	100%	**300**	**60**
					Analisis data dan Infromasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah			81.315.550	80.006.000	98,39%			
					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi			100.000.000	99.916.650	99,92%			
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah dokumen profil yang disusun	5	1	20.000.000	20.000.000	100%	1	3	60

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
					a									
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan**	**15**	**3**	**225.761.200**	**224.977.063**	**99,65%**	**3**	**9**	**60**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	15	3	111.022.720	110.599.663	99,62%	3	9	60
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	10	2	114.738.480	114.377.400	99,69%	2	6	60
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase rata-rata koordinasi urusan yang dilaksanakan**	**500**	**100**	**1.395.502.655**	**1.368.781.570**	**98,09%**	100%	**300**	**60**

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**a. Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan b. Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan**	**500**	**100**	**836.522.570**	**828.077.930**	**98,99%**	100%	**300**	**60**
5	01	03	2.01	06	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia(RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya	20	3	438.935.270	436.378.771	99,42%	5	12	60
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang pembangunan manusia yang diasistensi			31.686.230	30.183.900	95,26%			

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia			49.625.100	48.451.700	97,64%			
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang pembangunan manusia yang disinergi dan diharmonisasikan	20	3	316.275.970	313.063.559	98,38	5	12	60
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan**	**500**	**100**	**75.001.610**	**74.227.780**	**98,97%**	100%	**300**	**60**

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang Bidang Bidang Perekonomian dan SDA yang dikoordinasikan	17	2	75.001.610	74.227.780	98,97%	4	10	59
				03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase rata-rata Koordinasi Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan**	17	2	**483.978.475**	**466.475.860**	**96,38%**	100%	10	59
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan	17	2	168.063.320	166.781.390	99,24%	4	10	59

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
5	01	03	2.03	06	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang Infrastruktur yang disinergi dan diharmonisasikan	17	2	72.515.505	66.241.100	91,35%	4	10	59
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahBidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya	17	2	32.009.790	31.262.700	97,67%	4	10	59
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang Kewilayahan yang diasistensi			100.094.830	98.555.570	98,46%			
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			43.149.000	41.838.900	96,96%			

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
					Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			68.146.030	61.796.200	90,68%			
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Cakupan Inovasi, Peneltian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan**	**500**	**100**	**861.701.235**	**861.701.235**	**99,63%**	**100**	**300**	**60**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian yang dilaksanakan**	**500**	**100**	**291.268.580**	**291.268.580**	**98,92%**	100%	**300**	**60**

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	10	2	126.571.105	123.535.506 2	97,60%	2	6	60
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			113.379.055	113.351.600	99,98%			
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan**	**100**	**-**	**300.000.000**	**300.000.000**	**100%**	100%	**100**	**100**
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan	1	-	300.000.000	300.000.000	100%	0	1	100

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
						Perikanan								
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Inovasi yang memenuhi syarat kompetisi ajang inovasi tingkat nasional**	**10**	**2**	**270.432.655**	**270.409.678**	**99,99%**	**2**	**5**	**50**
5	05	02	2.04	02	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	210	42	50.537.195	50.531.668	**99,99%**	42	**126**	60
					Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Keterpenuhan Opd yang difasilitasi dalam Inovasi			219.895.460	219.878.010	99,99%			
Tingkat realisasi (%)											**99**			**60**

Adapun sumber penerimaan program dan kegiatan diatas bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, Bappeda Litbang Kabupaten Mamuju Tengah telah mendekati cukup dilengkapi dengan sarana dan prasarana rutin yang menunjang operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang di Tahun 2022 berupa kegiatan urusan perencanaan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Penyusunan Database Hasil Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 yang berlokasi di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, yang dijadikan bahan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tahun 2023;
2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen-dokumen kajian yang mendukung perencanaan pembangunan daerah;
3. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan APBD Tahun 2022 yang menghasilkan dokumen Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran Perubahan 2022.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang menghasilkan dokumen Evaluasi Renja.
5. Kegiatan penyusunan dokumen informasi daerah yang menghasilkan dokumen berupa Profil Daerah, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Inovasi Daerah.
6. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang terintegrasi yang menghasilkan dokumen berupa dokumen pendukung perncanaan pembangunan.

Pada tahun 2022, Bappeda Litbang Kabupaten Mamuju Tengah menjalankan program dan kegiatan secara keseluruhan sebanyak 1 (satu) program rutin dan 3 (tiga) program pokok, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Bappedalitbang berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana indikator tersebut disusun kedalam 3 (tiga) Tataran, sebagai berikut:

1. Tataran Pengambil Kebijakan, indikator kinerja kuncinya sebagai berikut:
   - Ketepatan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006
   - Urusan wajib yang harus dilaksanakan (urusan perencanaan, urusan statistik, urusan penelitian dan urusan pengembangan)
   - Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
   - Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
   - Belanja publik terhadap DAU
2. Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum, indikator kinerja kuncinya sebagai berikut:
   - Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
   - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
   - Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
   - Rasio struktur jabatan dan eselon yang terisi
   - Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah
   - Rasio PNS Perangkat Daerah terhadap Perangkat Daerah kabupaten
   - Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan.
   - Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
   - Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD, RENJA SKPD dan RKA-SKPD)
   - Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah

- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah
- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah
- Alokasi anggaran belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD
- Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (Realisasi)
- Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)
- Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (Realisasi)
- Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)
- Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah
- Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah
- Jumlah fasilitas/ prasarana informasi :
- Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan, indikator kinerja kuncinya sebagai berikut:
   - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
   - Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
   - Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
   - Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
   - Buku Profil Daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang
Kabupaten Mamuju Tengah

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	URUSAN PENUNJANG											
1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**											
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA			Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA			Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA			Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA			Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD			60%	63%	64%	66%	60%	63%	64%	66%	
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD			60%	63%	64%	66%	60%	63%	64%	66%	
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW			90%	91%	92%	93%	90%	91%	92%	93%	
4	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Tahun 2024 tertuang dalam prioritas provinsi dan prioritas kabupaten yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah dengan tema pembangunan Tahun 2024 adalah "**Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur didukung dengan Ketenteraman dan Ketertiban**", adapun Isu Strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Prevalensi Stunting;
3. Pengendalian Inflasi khususnya Inflasi Pangan;
4. Peningkatan Ekonomi;
5. Pemantapan Infrastruktur Dasar;
6. Pemilihan Umum Serentak;
7. Hilirisasi Komoditas Unggulan;
8. Ketahanan Bencana;
9. Pemindahan Ibu Kota Negara

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan isu-isu strategis yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Tahun 2024, maka terdapat target sasaran pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah yaitu : Terpenuhinya infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat, Meningkatnya kualitas kehidupan manusia, Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten, Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah, Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri, Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Berkembangnya inovasi daerah, Terpeliharanya ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat, Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah.

Untuk memenuhi target dan sasaran tersebut Bappeda Litbang telah menuang program dan kegiatan sampai pada dokumen Penjabaran APBD dan DPA Perangkat Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan isu-isu lainnya telah sesuai dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Bappeda Litbang.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang sebagai penyelenggara Musrenbang dimana kesepakatannya akan dituang dalam dokumen perencanaan daerah, untuk itu Bappeda Litbang berupaya untuk tetap fokus agar usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat sesuai dengan analisis teknis dan telaah dari Perangkat Daerah dapat tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Di Tahun 2024 ini, program dan kegiatan Bappeda Litbang masih memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sarana dan prasarana serta memastikan bahwa pada tahun 2024 seluruh Perangkat Daerah melaksanakan Kebijakan Nasional yang menjadi prioritas RKPN 2024 dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, dalam asistensi RKA-Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan menggunakan metode pendekatan tematik, holistic, integrative dan spaasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program*. Dengan cara memastikan hanya program yang bebar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimana amanat RPJMN 2020-2024 yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ektrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pebangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024..

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Tugas Bupati Mamuju Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Visi : Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Arah Kebijakan**
Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar	**Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah**	Terpenuhinya infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat (S1)	• Penguatan infrastruktur komunikasi dan informasi Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan
Meningkatkan kualitas pelayanan dasar	**Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak**	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten (S2)	• Penguatan basis data pemenuhan standar minimal layanan Pendidikan • Penguatan basis data pemenuhan standar minimal layanan Kesehatan • Pengauatan basis data pemenuhan standar minimal layanan fasilitas air minum dan penanganan limbah domestic • Penguatan basis data pemenuhan standar minimal layanan perumahan warga yang mengalami relokasi • Penguatan basis data pemenuhan standar minimal pelayanan penegakan perda/perkada serta kebencanaan • Penguatan basis data pemenuhan standar minimal perlindungan dan rehabilitasi sosial
		Meningkatnya kualitas kehidupan manusia (S3)	• Pengembangan kurikulum muatan local • Pemberdayaan masyarakat untuk resiliensi pandemic • Pengembangan sistem penyediaan kebutuhan pokok masyarakat
Mendorong daya saing perekonomian daerah	**Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah**	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor-sektor perekonomian daerah (S4)	• Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian tanaman pangan • Pemulihan bisnis UMKM bidang industri kecil dan perdagangan
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat (S5)	Penanggulangan kemiskinan
		Berkembangnya kawasan agropolitan dan agribisnis berbasis kota terpadu mandiri (S6)	Pengembangan pusat-pusat penyediaan sarana produksi pertanian
Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik	**Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi (T4)**	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyenggaraan pemerintahan daerah (S7)	Penataan efektivitas fungsi organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah
		Berkembangnya inovasi daerah (S8)	Penguatan fungsi laboratorium inovasi
Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat	**Meningkatkan solidaritas sosial dan kerukunan antar ummat beragama (T5)**	Terpeliharanya suasana tertib, tenteram, aman dan damai dalam interaksi antar kelompok masyarakat (S9)	Penguatan sistem ketertiban dan ketenteraman berbasis masyarakat
Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	**Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan (T6)**	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah (S10)	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Tahun 2024

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
		2024
Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah(S1)	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	55 %
Sasaran: Meningkatnya penerapan hasil-hasil kelitbangan dan inovasi daerah(S2)	Indeks Inovasi Daerah	55 %
	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi dasar perumusan kebijakan	100 %

3.3. Program dan Kegiatan

Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Pernagkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	02			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Dokumen yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan perundangan yang berlaku**	**Mamuju Tengah**	**100**	**1.265.000**	**DAU**		**100**	**1.285.000**
5	01	02	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah**	**Mamuju Tengah**	**2**	**620.000**	**DAU**		**2**	**840.000**
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Mamuju Tengah	2	300.000	DAU		3	400.000
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Mamuju Tengah	3	60.000	DAU		3	100.000
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Mamuju Tengah	1	50.000	DAU		2	70.000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	1	50.000	DAU		2	70.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	2	50.000	DAU		2	70.000
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Mamuju Tengah	526	50.000	DAU		5	70.000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Mamuju Tengah	3	60.000	DAU		1	60.000
5	01	02	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Mamuju Tengah	100	**265.000**	DAU		100	**265.000**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Mamuju Tengah	1	95.000	DAU		10	95.000
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Mamuju Tengah	50	110.000	DAU		8	110.000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	Mamuju Tengah	1	60.000	DAU		1	60.000
5	01	02	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Prencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan**	Mamuju Tengah	**3**	**210.000**	DAU		**3**	**180.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Mamuju Tengah	4	100.000	DAU		3	120.000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Mamuju Tengah	4	110.000	DAU		2	60.000
5	01	02	2.04		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dalam sistem informasi pembangunan Daerah**	Mamuju Tengah	**100 %**	**170.000**	DAU		**100 %**	**170.000**
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Jumlah data dalam sistem informasi daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	Mamuju Tengah	1	50.000	DAU		42	50.000
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Mamuju Tengah	1	70.000	DAU		1	70.000
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah KabupatenéKota	Mamuju Tengah	1	50.000	DAU		3	50.000
5	01	03			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase rata-rata koordinasi urusan yang dilaksanakan**	Mamuju Tengah	**100**	**2.187.000**	DAU		**100**	**2.315.000**
5	01	03	20.1		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**a. Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pemerintahan**	Mamuju Tengah	**100 %**	**847.000**	DAU		**100 %**	**920.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						yang dilaksanakan **b. Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan**							
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Mamuju Tengah	3 Dok	65.000	DAU		5 Dok	70.000
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Mamuju Tengah	3 Dok	100.000	DAU		5 Dok	150.000
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Mamuju Tengah	3 Dok	20.000	DAU		5 Dok	20.000
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Mamuju Tengah	3 Dok	70.000	DAU		5 Dok	70.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Mamuju Tengah	3 Dok	200.000	DAU		5 Dok	200.000
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Mamuju Tengah	3 Dok	56.000	DAU		5 Dok	50.000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Mamuju Tengah	4 Dok	80.000	DAU		5 Dok	80.000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Mamuju Tengah	4 Dok	256.000	DAU		5 Dok	280.000
5	01	03	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**a. Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang Perekonomian yang dilaksanakan** **b. Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang SDA yang dilaksanakan**	Mamuju Tengah	100 %	**540.000**	DAU DAU		100 %	**540.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (JPD, JMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Mamuju Tengah	3 dok	110.000	DAU		6 dok	110.000
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Mamuju Tengah	6 dok	80.000	DAU		6 dok	80.000
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Mamuju Tengah	6 dok	80.000	DAU		6 dok	80.000
	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Mamuju Tengah	6 dok	80.000	DAU		6 dok	80.000
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Mamuju Tengah	6 dok	70.000	DAU		6 dok	70.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Mamuju Tengah	6 dok	80.000	DAU		6 dok	60.000
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Mamuju Tengah	6 dok	60.000	DAU		6 dok	60.000
5	01	03	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**a. Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang infrastruktur yang dilaksanakan b. Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang kewilayahan yang dilaksanakan**	Mamuju Tengah	**100 %**	**800.000**	DAU		**100 %**	**835.000**
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Mamuju Tengah	4 dok	105.000	DAU		4 dok	110.000
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Mamuju Tengah	4 dok	100.000	DAU		4 dok	110.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Mamuju Tengah	4 dok	90.000	DAU		4 dok	90.000
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Mamuju Tengah	4 dok	105.000	DAU		4 dok	110.000
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Mamuju Tengah	4 dok	95.000	DAU		4 dok	105.000
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Mamuju Tengah	4 dok	110.000	DAU		4 dok	100.000
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Mamuju Tengah	4 dok	90.000	DAU		4 dok	100.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Mamuju Tengah	4 dok	105.000	DAU		4 dok	110.000
5	05	02			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Cakupan Inovasi, Peneltian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan**	Mamuju Tengah	**100 %**	**790.000**	DAU		**100 %**	**1.420.000**
5	05	02	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian yang dilaksanakan	Mamuju Tengah	100 %	**340.000**	DAU		100 %	**670.000**
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Mamuju Tengah	4	130.000	DAU		4	140.000
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Mamuju Tengah	2	130.000	DAU		2	140.000
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik	Mamuju Tengah	1 Aflikasi E-data base	80.000	DAU		1 Aflikasi E-data base	80.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	05	02	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah Inovasi yang memenuhi syarat kompetisi ajang inovasi tingkat nasional	Mamuju Tengah	**2 Inovasi**	**450.000**	DAU		**2 Inovasi**	**450.000**
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Mamuju Tengah	1 Dok	150.000	DAU		1 Dok	150.000
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi/Lomba Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Mamuju Tengah	42 Opd	150.000	DAU		42 Opd	150.000
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Mamuju Tengah	42 Opd	150.000	DAU		42 Opd	150.000
5	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Mamuju Tengah	100	**2.751.975**	DAU		100	**3.289.225**
5	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Mamuju Tengah	**100**	**160.050**	DAU		**100**	**206.800**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	1	54.000	DAU		1	54.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	12	11.000	DAU		1	11.000
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1	9.250	DAU		1	11.000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1	11.500	DAU		1	11.500
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1	10.300	DAU		1	15.300
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	3	74.000	DAU		3	74.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	1	10.000	DAU		1	30.000
5	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Mamuju Tengah	**100**	**1.504.900**	DAU		**100**	**1.365.000**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju Tengah	17	1.490.000	DAU		17	1.490.000
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju Tengah	1	14.900	DAU		1	14.900
5	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Mamuju Tengah	**100**	**95.000**	DAU		**100**	**154.000**
5	01	01	2.03	06	Penata Usahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju Tengah	1	25.000	DAU			25.000
5	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju Tengah	1	70.000	DAU		1	129.000
5	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Mamuju Tengah	**100**	**139.500**	DAU		**100**	**204.000**
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mamuju Tengah	65	39.500	DAU		65	70.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju Tengah	2	70.000	DAU		2	90.000
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mamuju Tengah	2	30.000	DAU		2	44.000
5	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Mamuju Tengah	100	**421.325**	DAU		100	**668.325**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	1	4.325	DAU		1	4.325
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	4	100.000	DAU		4	290.000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mamuju Tengah	30.000	15.000	DAU		30.000	32.000
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mamuju Tengah	10	10.000	DAU		10	30.000
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	1	52.000	DAU		1	72.000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	100	240.000	DAU		100	240.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Mamuju Tengah	**100**	**120.000**	DAU		**100**	**180.000**
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Mamuju Tengah	2	40.000	DAU		2	70.000
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mamuju Tengah	5	20.000	DAU		5	50.000
5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mamuju Tengah	1	60.000	DAU		1	75.000
5	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Mamuju Tengah	**100**	**157.200**	DAU		**100**	**177.200**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju Tengah	100	60.000	DAU		100	80.000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mamuju Tengah	100	15.000	DAU		100	15.000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	1	82.200	DAU		1	82.200
5	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Mamuju Tengah	**100**	**154.000**	DAU		**100**	**194.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.Ribu)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.Ribu)
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mamuju Tengah	18	64.000	DAU		16	64.000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mamuju Tengah	5	25.000	DAU		5	35.000
5	01	01	2.09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Mamuju Tengah	4	25.000	DAU		4	35.000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dab Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mamuju Tengah	1	30.000	DAU		1	30.000
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mamuju Tengah	5	10.000	DAU		5	30.000
Total Anggaran									**5.697.475**				**5.903.725**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bappeda Litbang memiliki target dan capaian yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan adalah 4 program, terdiri satu program rutin dan tiga program pokok Bappeda Litbang, dengan total kegiatan 18 kegiatan dan 68 Sub Kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp 6.625.000.000, dengan rincian sumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Program dan Kegiatan Serta Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
Tahun Anggaran 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Penanggungjawab
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	01	02			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Dokumen yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan perundangan yang berlaku**	**Mamuju Tengah**	**100**	**1.105.500.000**	Bidang PPEPD
5	01	02	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah**	**Mamuju Tengah**	**2**	**567.500.000**	Bidang PPEPD
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Mamuju Tengah	2	210.000.000	Bidang PPEPD
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Mamuju Tengah	3	111.000.000	Bidang PPEPD
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Mamuju Tengah	1	72.500.000	Bidang PPEPD
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	1	24.000.000	Bidang PPEPD
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	2	35.000.000	Bidang PPEPD
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Mamuju Tengah	526	15.000.000	Bidang PPEPD

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Penanggungjawab
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Mamuju Tengah	3	100.000.000	Bidang PPEPD
5	01	02	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Mamuju Tengah	100	**214.000.000**	Bidang PPEPD
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Mamuju Tengah	1	74.000.000	Bidang PPEPD
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Mamuju Tengah	50	65.000.000	Bidang PPEPD
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	Mamuju Tengah	1	75.000.000	Bidang PPEPD
5	01	02	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Prencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan**	Mamuju Tengah	**3**	**204.000.000**	Bidang PPEPD
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Mamuju Tengah	4	53.000.000	Bidang PPEPD
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Mamuju Tengah	4	151.000.000	Bidang PPEPD
5	01	02	2.04		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah**	Mamuju Tengah	**100%**	**120.000.000**	Bidang PPEPD

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Penanggungjawab
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						dalam sistem informasi pembangunan Daerah				
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Jumlah data dalam sistem informasi daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	Mamuju Tengah	1	45.000.000	Bidang PPEPD
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Mamuju Tengah	1	5.000.000	Bidang PPEPD
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah KabupatenéKota	Mamuju Tengah	1	70.000.000	Bidang PPEPD
5	01	03			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase rata-rata koordinasi urusan yang dilaksanakan**	Mamuju Tengah	**100**	**964.000.000**	- Bidang PPM - Bidang ESDA dan IFWIL
5	01	03	20.1		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**a. Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan** **b. Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan**	Mamuju Tengah	**100%**	**412.000.000**	Bidang PPM
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Mamuju Tengah	3 Dok	20.000.000	Bidang PPM

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Penanggungjawab
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Mamuju Tengah	3 Dok	15.000.000	Bidang PPM
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Mamuju Tengah	3 Dok	15.000.000	Bidang PPM
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Mamuju Tengah	3 Dok	40.000.000	Bidang PPM
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Mamuju Tengah	3 Dok	60.000.000	Bidang PPM
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Mamuju Tengah	3 Dok	15.000.000	Bidang PPM
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Mamuju Tengah	4 Dok	32.000.000	Bidang PPM

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Penanggungjawab
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Bidang Pembangunan Manusia	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Mamuju Tengah	4 Dok	215.000.000	Bidang PPM
5	01	03	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**a. Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang Perekonomian yang dilaksanakan** **b. Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang SDA yang dilaksanakan**	Mamuju Tengah	100%	**100.000.000**	Bidang ESDA dan IFWIL
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (JPD, JMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Mamuju Tengah	3 dok	35.000.000	Bidang ESDA dan IFWIL
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	Mamuju Tengah	1 Dok	30.000.000	Bidang ESDA dan IFWIL

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Penanggungjawab
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Mamuju Tengah	3 dok	35.000.000	Bidang ESDA dan IFWIL
5	01	03	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**a. Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang infrastruktur yang dilaksanakan b. Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang kewilayahan yang dilaksanakan**	Mamuju Tengah	**100%**	**452.000.000**	Bidang ESDA dan IFWIL
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Mamuju Tengah	3 dok	60.000.000	Bidang ESDA dan IFWIL
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Mamuju Tengah	3 dok	30.000.000	Bidang ESDA dan IFWIL
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Mamuju Tengah	3 dok	95.000.000	Bidang ESDA dan IFWIL

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Penanggungjawab
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Mamuju Tengah	3 dok	15.000.000	Bidang ESDA dan IFWIL
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Mamuju Tengah	3 dok	93.000.000	Bidang ESDA dan IFWIL
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Mamuju Tengah	3 dok	74.000.000	Bidang ESDA dan IFWIL
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Mamuju Tengah	3 dok	85.000.000	Bidang ESDA dan IFWIL
5	05	02			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Cakupan Inovasi, Peneltian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan**	Mamuju Tengah	**100%**	**876.000.000**	Bidang Litbang
5	05	02	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian yang	Mamuju Tengah	100%	**641.000.000**	Bidang Litbang

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Penanggungjawab
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						dilaksanakan				
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Mamuju Tengah	3	520.000.000	Bidang Litbang
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pegembangan Bidang Pemerintahan Umum	Mamuju Tengah	2 Dok	121.000.000	Bidang Litbang
5	05	02	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah Inovasi yang memenuhi syarat kompetisi ajang inovasi tingkat nasional	Mamuju Tengah	**2 Inovasi**	**235.000.000**	Bidang Litbang
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Mamuju Tengah	1 Dok	75.000.000	Bidang Litbang
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi/Lomba Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Mamuju Tengah	2 Dok	160.000.000	Bidang Litbang
5	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Mamuju Tengah	100	**2.751.975.000**	Sekretariat

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Penanggungjawab
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Mamuju Tengah	**100**	**160.050.000**	Sekretariat
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	1	34.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1	11.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1	9.250.000	Sekretariat
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1	11.500.000	Sekretariat
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1	10.300.000	Sekretariat
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Mamuju Tengah	3	74.000.000	Sekretariat

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Penanggungjawab
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						SKPD				
5	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Mamuju Tengah	**100**	**1.504.900.000**	Sekretariat
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju Tengah	17	1.490.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju Tengah	1	14.900.000	Sekretariat
5	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Mamuju Tengah	**100**	**95.000.000**	Sekretariat
5	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju Tengah	1	70.000.000,	Sekretariat
5	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Mamuju Tengah	**100**	**139.500.000**	Sekretariat
5	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju Tengah	2	70.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mamuju Tengah	2	30.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Mamuju Tengah	100	**421.325.000**	Sekretariat

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Penanggungjawab
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	1	4.325.000	Sekretariat
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	4	100.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mamuju Tengah	30.000	15.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Mamuju Tengah	10	10.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	1	52.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	100	240.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Mamuju Tengah	**100**	**120.000.000**	Sekretariat
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Mamuju Tengah	2	40.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Mamuju Tengah	5	20.000.000	Sekretariat

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Penanggungjawab
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Mamuju Tengah	1	60.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Mamuju Tengah	**100**	**157.200.000**	Sekretariat
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju Tengah	100	60.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mamuju Tengah	100	15.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mamuju Tengah	1	82.200.000	Sekretariat
5	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Mamuju Tengah	**100**	**154.000.000**	Sekretariat
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mamuju Tengah	16	64.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Mamuju Tengah	5	25.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Mamuju Tengah	4	25.000.000	Sekretariat

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Penanggungjawab
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dab Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Mamuju Tengah	1	30.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Mamuju Tengah	5	10.000.000	Sekretariat
Total Anggaran									**5.697.475.000**	

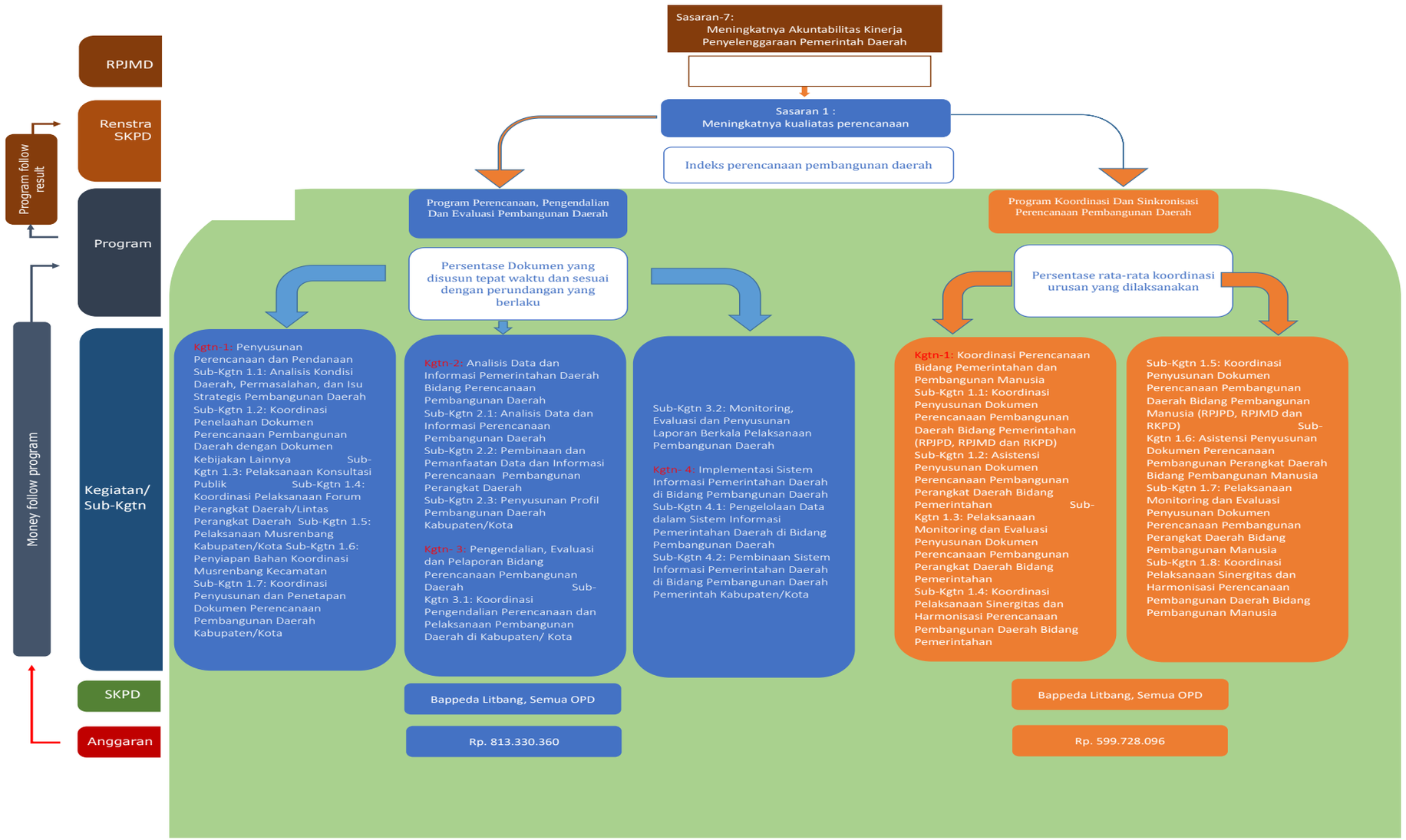
BAB V
PENUTUP

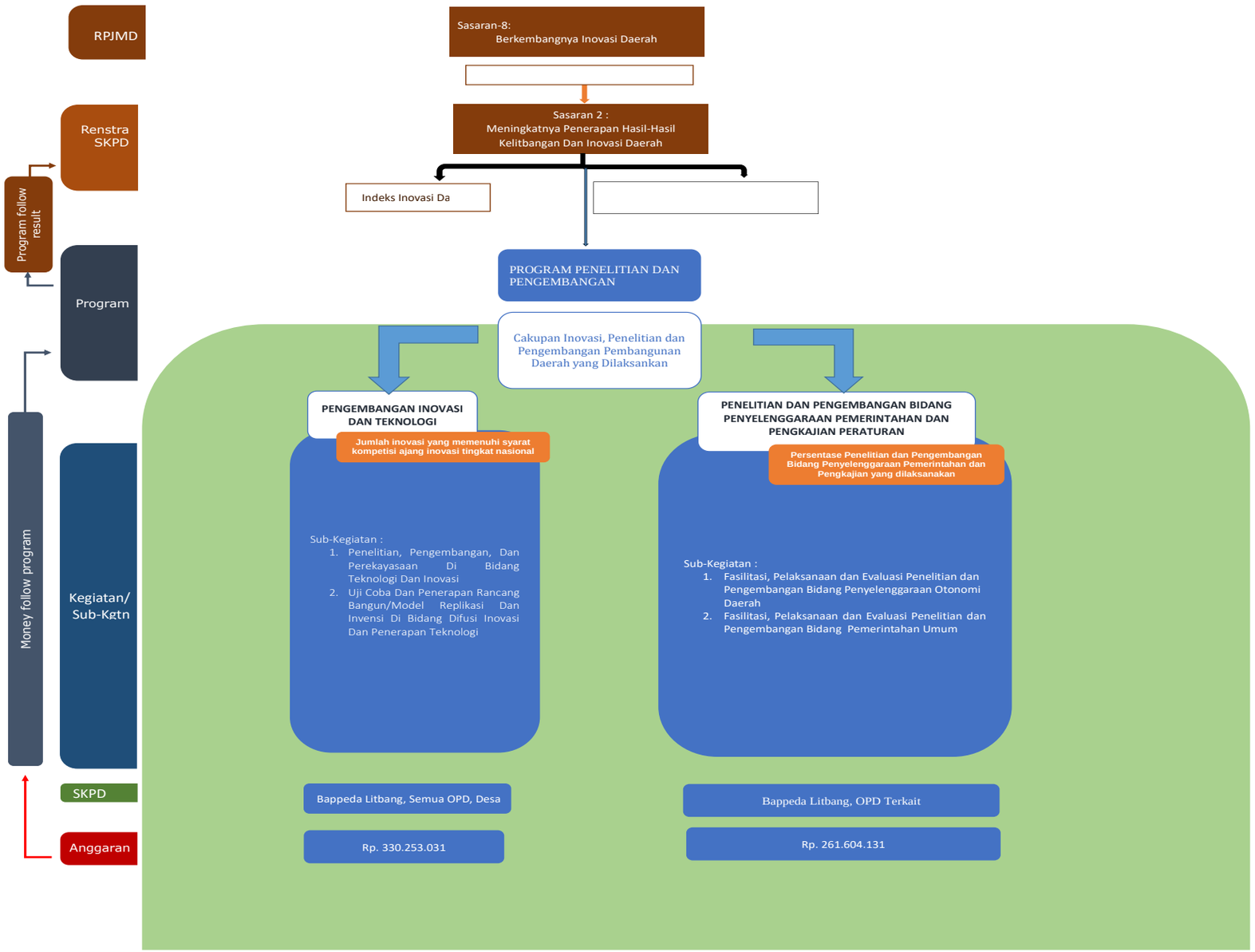
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang didalamnya memuat kebijakan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilaksanakan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bappeda Litbang Kabupaten Mamuju Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban menyusun Renja Perangkat Daerah harus mempedomani RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024;
2. Renja Tahun 2024, diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional dan transparan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah;
3. Renja Tahun 2024, akan menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024;
4. Renja Tahun 2024, akan menjadi bahan evaluasi terhadap pencapaian target yang mendukung tugas pejabat Bupati Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

Sebagai daerah otonomi baru, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah dirumuskan secara (1) Efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal; (2) Efektif, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal; (3) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Terukur, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

CASCADING BAPPEDALITBANG MAMUJU TENGAH




RPJMD
Renstra SKPD
Program follow result
Program
Money follow program
Kegiatan/ Sub-Kgtn
SKPD
Anggaran
Sasaran-8:
Berkembangnya Inovasi Daerah
Sasaran 2 :
Meningkatnya Penerapan Hasil-Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Daerah
Indeks Inovasi Da
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Cakupan Inovasi, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Dilaksankan
PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
Jumlah inovasi yang memenuhi syarat kompetisi ajang inovasi tingkat nasional
Sub-Kegiatan :
1. Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi
2. Uji Coba Dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi Dan Invensi Di Bidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi
Bappeda Litbang, Semua OPD, Desa
Rp. 330.253.031
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian yang dilaksanakan
Sub-Kegiatan :
1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
Bappeda Litbang, OPD Terkait
Rp. 261.604.131

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN KAB. MAMUJU TENGAH

Alamat Kantor : Kompleks KTM Tobadak
Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah,
Kode Pos. 91564

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 Program Kesehatan mempunyai peran yang sangat Penting untuk Mendukung pencapaian Pembangunan Nasional, Terutama untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Penyelenggaraan tugas Pemerintah, Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan merupakan urusan bersama (*concurrent function*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk meningkatkan pemerataan dan aksebilitas pelayanan Kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, melalui pengembangan kegiatan dan penyediaan dukungan anggaran yang memadai, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesehatan. Upaya meningkatkan Program Kesehatan selain diarahkan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs), juga harus diarahkan pada Pembudayaan pola hidup sehat bagi masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan usulan dari bawah/masyarakat yang merupakan aspirasi terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh Masyarakat.

Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam segala aspek perencanaan dan penganggaran di Tahun 2024 terhadap Pembangunan Kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Meridhoi seluruh pengabdian Kita kepada Masyarakat, bangsa dan Negara. Sekian dan terimakasih.

Tobadak, 2023

Kepala Dinas



SETYA BERO, S.K..,M.M.Kes
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I,IV/c
NIP. 19680717 199103 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I. PENDAHULUAH
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 9
1.3 Maksud dan Tujuan 10
1.4 Sistematika Penulisan..... 11
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022..... 13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD 13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 36
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 40
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN..... 46
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 51
3.3 Program dan Kegiatan..... 52
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN..... 55
BAB V PENUTUP 83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Mamuju Tengah 15

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah 30

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah 39

Tabel 2.4 Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Mamuju Tengah 41

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 52

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Mamuju Tengah 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/ Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) di lingkungan Kabupaten Mamuju Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Konsistensi antara RPJMD dengan Renstra perlu dijaga agar semua kegiatan pembangunan yang dilakukan pleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah terpilih.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sebagai penjabaran dari Renstra, setiap OPD wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Dokumen ini diharapkan dapat menciptakan proses pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah yang bersinergi, terpadu dalam saling mendukung lintas sektoral dan wilayah sehingga pencapaian tujuan pembangunan kabupaten khususnya kesehatan menjadi lebih terarah.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini menekankan tentang pentingnya Perangkat Daerah menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguanan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja OPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas APBD.

Renja OPD ini sesuai dengan amanat Undang - Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengakibatkan perubahan nama SKPD menjadi Organisasi Perangkat Daerah. Adanya perubahan susunan organisasi pada Dinas Kesehatan juga mengacu pada susunan organisasi Kementerian Kesehatan sebagai organisasi yang menaungi Dinas Kesehatan. Akibatnya terjadi perubahan nama dari Renja SKPD menjadi Renja OPD.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun

2021–2026 seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021–2026 yaitu :

“Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla’ Tassisara”

Kata kunci yang terkandung dalam rumusan visi ini adalah maju, sejahtera dan bingkai *Lalla’ Tassisara***.** Ketiga kata kunci ini saling terkait satu sama lain dalam menggambarkan kondisi masa depan yang hendak dicapai bersama oleh seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah. Artikulasi atau penjelasan dari masing-masing kata kunci tersebut teruraikan sebagai berikut. “Maju” adalah kondisi dimana kualitas manusia Kabupaten Mamuju Tengah semakin tinggi dan didukung oleh pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai baik dari segi jangkauannya maupun dari segi kualitasnya. “Sejahtera” adalah kondisi dimana kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah semakin meningkat dengan didukung oleh pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. “Bingkai La’la Tassisara” adalah kondisi dimana kebersamaan di tengah keberagaman menjadi acuan nilai dan norma bagi seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenteraman.
Dengan visi tersebut, kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dicita-citakan semakin membaik, ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat.

Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Keseluruhan rumusan misi ini terkait dengan upaya umum dalam mewujudkan keseluruhan pokok-pokok visi serta terkait pula dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Adapun rumusan misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dinyatakan sebagai berikut :

1. Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar

   Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya umum ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan

agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar

   Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta pelayanan umum lainnya.

3. Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah

   Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian dalam arti umum yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, selain memperkuatan sistem agribisnis dan agroindustri berbasis kelapa sawit untuk sebanyak-banyaknya memberi manfaat bagi penghidupan rakyat. Seiring dengan peningkatan daya saing perekonomian, kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian, terutama dalam penanggulangan kemiskinan.

4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

   Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi. Area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Termasuk juga dalam misi ini adalah penguatan pemerintahan kecamatan dan pembinaan desa.

5. Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

   Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara, memperkuat dan mengembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang heterogen. Upaya itu dimaksudkan agar masyarakat tetap hidup rukun dan damai serta mengacu pada nilai *Lalla' Tassisara*, yakni berbeda-beda tetapi tetap dalam kebersamaan untuk membangun Kabupaten Mamuju Tengah.

6. Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup

   Misi ini mencakup upaya umum dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan seperti degradasi lahan, kerusakan sungai, kerusakan pesisir dan

kerusakan tutupan lahan. Misi ini juga terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengelolaan sampah.

Terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu OPD mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan Visi Misi tersebut utamanya pada Misi (2) yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan, meliputi :
   a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentangpembentukan tim penyusun Renja Perangkat daerah;
   b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

   Penyusunan Rancangan Awal Renja PD harus memperhatikan hal- hal sebagai berikut :
   a. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja PD paling lambat minggu pertama bulan Desember.
   b. Penyusunan rancangan awal Renja PD berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan.
   c. Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah.
   d. Hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam

rancangan awal Renja PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

e. Penyusunan rancangan awal Renja PD analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.Hasil perumusan rancangan awal Renja PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat Bab Pendahuluan, Bab Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, Bab tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Bab rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan Bab Penutup.

f. Rancangan awal Renja PD disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah yang mencakup perumusan rencana program,kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

g. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan

Tahap penyusunan Rancangan Renja PD harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja PD.

b. Rancangan Renja dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

c. Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD

d. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja untuk menjamin rancangan Renja PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah dan berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan tersebut kepala

Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja PDyang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA. Verifikasi rancangan Renja PD paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja PD kepada BAPPEDA

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah

   Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukandalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja PD. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja PD dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja PD disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja PD lainnya. Jika hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah. Kemudian kepala Perangkat Daerah Menyampaikan Rancangan akhir Renja PD yang telah disempurnakan kepada kepala BAPPEDA. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja PD paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja

PD. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

6. Penetapan

   Penetapan Renja PD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah tahunan dan di dalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2024. Disamping mengacu pada RKPD Tahun 2024, penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan berbagai issue juga percepatan penyebaran wabah penyakit.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan yang mempunyai tujuan terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasilguna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk itu, Kementerian Kesehatan memiliki sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun sebagai berikut :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular
3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender.
4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.
5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.
6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

Diharapkan Rancangan Renja yang akan disempurnakan setelah penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan RKPD Tahun 2024. Selain itu Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 juga mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Renstra Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 Pengajuan Renja ini telah disusun secara realistis untuk mencapai tujuan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

1.2.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS).

1.2.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

1.2.3. Undang-Undang Noomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

1.2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008.

1.2.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguanan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

1.2.10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

1.2.14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2023.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2.15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.2.16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2.17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tahun 2022 Perihal Hasil Investigasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait

DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CTH Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.

1.2.18. Peraturan Daerah Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026.

1.2.19. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

1.2.20. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023.

1.2.21. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan urusan pemerintahan wajib kesehatan yang meliputi Organisasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah sebagai bahan pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 bidang Kesehatan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini disusun dengan memperhatikan target pencapaian indikator kinerja dan diharapkan sudah mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- Pengertian Renja OPD,
- Proses penyusunan Renja OPD,

- Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD, Renstra OPD, Renja K/L dan Renja OPD , serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3. Program dan Kegiatan

→ disertai informasi sebagai berikut:

1. indikator kinerja;
2. Kelompok sasaran;
3. Lokasi kegiatan;
4. Kebutuhan dana indikatif
5. Sumber dana

BAB IV Program dan Kegiatan
BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguanan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2022. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Mamuju Tengah untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing - masing pegawai dengan baik. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan

Tahun 2022 Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut **:**

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Mamuju Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah (S1)	**Angka Harapan Hidup**	**68,86**	**68,55**	**69,39**	**68,55**	**99%**	**69.39**	**68,55**	**99%**
		Prevalensi Stunting	**15,00%**	**14,69%**	**14,00%**	**14,69%**	**105%**	**14.00%**	**14,69%**	**105%**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan**	**100%**	**76%**	**100%**	**76%**	**76%**	**100%**	**76%**	**76%**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S)**	**80%**	**52,74%**	**85%**	**52,74%**	**62%**	**85%**	**52,74%**	**62%**
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	**100%**
1.02.02.202.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak	100%	77,73%	100%	77,73%	**78%**	100%	77,73%	**78%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana								
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Kasus Gizi Yang Mendapatkan Perawatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	**100%**
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pos UKK dan Kelompok Olahraga Yang Dibina	100%	48%	100%	48%	**48%**	100%	48%	**48%**
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa STBM	5 Desa	0 Desa	5 Desa	0 Desa	**0%**	5 Desa	0 Desa	**0%**
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	35%	8,24%	40%	8,24%	**21%**	40%	8,24%	**21%**
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional Sesuai Standar	20%	20%	30%	20%	**67%**	30%	20%	**67%**
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	**100%**
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	100%	0%	100%	0%	**0%**	100%	0%	**0%**
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Upaya Kesehatan Khusus	100%	60%	100%	60%	**60%**	100%	60%	**60%**
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase Masyarakat Yang Terdampak Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	**100%**
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyakit Menular dan Tidak Menular Ditangani	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	**100%**
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	100%	80,31%	100%	80,31%	**80%**	100%	80,31%	**80%**
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase Sekolah dan Fasyankes Yang Dideteksi Dini Penyalahgunaan Nafza	20%	0%	30%	0%	**0%**	30%	0%	**0%**
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase Sampel Yang Dikirim Ke Laboratorium Rujukan Nasional Kurang Dari 24 Jam	100%	97,30%	100%	97,30%	**97%**	100%	97,30%	**97%**
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jmlah Indikator Kecamatan Sehat (9 Tatanan Kawasan Sehat)	1 Kecamatan	0	1 Kecamatan	0	**0%**	1 Kecam atan	0	**0%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Telemedicine Yang Diadakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Puskesmas	5 Puskesmas	2 Puskesmas	5 Puskesmas	**250%**	2 Puskesmas	5 Puskesmas	**250%**
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Penelitian Kesehatan	1 Kali	0%	1 Kali	0%	**0%**	1 Kali	0%	**0%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Keluarga Sehat	15%	1%	15%	1%	**7%**	15%	1%	**7%**
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitasi Kesehatan Lainnya	2 Fasilitas	100%	2 Fasilitas	100%	**100%**	2 Fasilitas	100%	**100%**
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Dengan Akreditasi Utama	1 Puskesmas	100%	1 Puskesmas	100%	**100%**	1 Puskesmas	100%	**100%**
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penangnan Kasus Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang ditangani	100%	28,02%	100%	28,02%	**28%**	100%	28,02%	**28%**
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Desa/Kelurahan Yang Tanggap Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100%	0%	100%	0%	**0%**	100%	0%	**0%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Kasus Kegawatdaruratan Yang Ditangani	100%	1%	100%	1%	**1%**	100%	1%	**1%**
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kesehatan Yang Dikelola/Terkelola	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan Yang Dikelola	1 Jenis	1 Dokumen	1 Jenis	1 Dokumen	**100%**	1 Jenis	1 Dokumen	**100%**
1.02.02.2.03.01	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Yang Diadakan	11 Buah	0	11 Puskesmas	0	**0%**	11 Puskesmas	0	**0%**
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Daya Tampung Rumah Sakit**	1 : 1000 Tempat Tidur	0	1 : 1000 Tempat Tidur	0	**100%**	1 : 1000 Tempat Tidur	0	**100%**
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase Rumah Sakit Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	100%	0	100%	0	**0%**	100%	0	**0%**
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN**	**Persentase Tenaga**	**100%**	**85,99%**	**100%**	**85,99%**	**86%**	**100%**	**85,99%**	**86%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan**								
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin Praktek Tenaga Kesehatan**	**80%**	**72,60%**	**80%**	**72,60%**	**91%**	**80%**	**72,60%**	**91%**
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki STR	85%	86.93%	85%	86.93%	**102%**	85%	86.93%	**102%**
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Yang Dibina dan Diawasi	100%	0%	100%	0%	**0%**	100%	0%	**0%**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Petugas Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan Teknis**	**80%**	298%	**80%**	298%	**373%**	**80%**	298%	**373%**
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan	50 Orang	149	50 Orang	149	**298%**	50 Orang	149	**298%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sarana Kefarmasian dan Pengolahan Makanan Yang Sesuai Standar dan Memiliki Izin Sesuai Peraturan Yang Berlaku**	**100%**	**75%**	**100%**	**75%**	**75%**	**100%**	**75%**	**75%**
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Yang Memiliki Izin**	**100%**	**50%**	**100%**	**50%**	**50%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Frekuensi Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	**100%**	2 Kali	2 Kali	**100%**
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Yang Mendapat Rekomendasi Perizinan	60 Sarana	50%	60 Sarana	50%	**50%**	60 Sarana	50%	**50%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang dibina	100%	50%	100%	50%	**50%**	100%	50%	**50%**
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Yang Memiliki Izin**	**100%**	**16,5%**	**100%**	**16,5%**	**17%**	**100%**	**16,5%**	**17%**
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase SPT-IRT Yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	**100%**
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat**	**100%**	**32.3%**	**100%**	**32.3%**	**32%**	**100%**	**32.3%**	**32%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Bersertifikat	20%	15%	20%	15%	**75%**	20%	15%	15%
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase P-IRT Yang Memiliki Izin**	**100%**	**35%**	**100%**	**35%**	**35%**	**100%**	**35%**	**35%**
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Pangan IRT Yang Memenuhi Syarat	100%	99%	100%	99%	**99%**	100%	99%	99%
1.02.04.2.06.01	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi IRTP Yang Memenuhi Ketentuan	100%	50%	100%	50%	**50%**	100%	50%	50%
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Desa Sehat**	**5 Desa**	**0**	**5 Desa**	**0**	**0%**	**5 Desa**	**0**	**0**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Stop BABS**	**5 Desa**	**0**	**5 Desa**	**0**	**0%**	**5 Desa**	**5 Desa**	**0%**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif	92%	82,14%	92%	82,14%	**89%**	92%	82,14%	**89%**
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa Yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**	**85%**	**64,29%**	**85%**	**64,29%**	**76%**	**85%**	**64,29%**	**76%**
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan/Periode Penyebarluasan Informasi Kesehatan	220 Kali	220 Kali	220 Kali	220 Kali	**100%**	220 Kali	220 Kali	**100%**
1.02.05.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa Yang Melaksanakan UKBM**	**100%**	61,98%	**100%**	61,98%	**62%**	**100%**	61,98%	**62%**
1.02.05.203.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Tingkatan Posyandu Strata Madya	60%	61,98%	60%	61,98%	**103%**	60%	61,98%	**103%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah (S2)	**Skor Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kesehatan**	**B (Baik)**	**B (Baik)**	**B (Baik)**	**B (Baik)**	**100%**	**B (Baik)**	**B (Baik)**	**B (Baik)**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Obat/BMHP**	**75%**	**67,76%**	**75%**	**67,76%**	**90%**	**75%**	**67,76%**	**67,76%**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk**	**1 PKM : 30.000 Penduduk**	**1 PKM : 12.298 Penduduk**	**1 PKM : 30.000 Penduduk**	**1 PKM : 12.298 Penduduk**	**100%**	**1 PKM : 30.000 Penduduk**	**1 PKM : 12.298 Penduduk**	**1 PKM : 12.298 Penduduk**
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Dibangun	3 PKM	1 PKM	3 PKM	1 PKM	**100%**	3 PKM	1 PKM	1 PKM
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang Dibangun	1 Unit	0%	1 Unit	0%	**0%**	1 Unit	0%	0%
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Yang Dibangun	7 Unit	6 Unit	7 Unit	6 Unit	**100%**	7 Unit	6 Unit	6 Unit
1.02.02.201.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pengambangan Puskesmas	0	0	0	0	**0%**	0	0	0
1.02.02.201.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengambangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang Dibangun	0	0	0	0	**0%**	0	0	0
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Direhabilitasi dan Dipelihara	0	0 Unit	0	0 Unit	**0%**	0	0 Unit	0 Unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Direhabilitasi dan Dipelihara	14 Unit	0 Unit	14 Unit	0 Unit	**0%**	14 Unit	0 Unit	0
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Yang Direhabilitasi dan Dipelihara	0	0	0	0	**0%**	0	0	0
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dibangun	0	0	0	0	**0%**	0	0	0
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	11 Paket	18 Paket	11 Paket	18 Paket	**0%**	11 Paket	18 Paket	125%
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	30 Paket	62 Paket	30 Paket	62 Paket	**0%**	30 Paket	62 Paket	20%
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan Yang Dikalibrasi	0	202 Paket	0	202 Paket	**100%**	0	202 Paket	100%
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Keterpenuhan Obat dan Vaksin	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	100%
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Keterpenuhan Bahan Habis Pakai	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang	5 Unit	0	5 Unit	0	**0%**	5 Unit	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Dipelihara								
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dipelihara	28 Unit	25 Unit	28 Unit	25 Unit	**89%**	28 Unit	25 Unit	85%
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dipelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	**100%**	1 Paket	1 Paket	100%
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan**	**100%**	**75,60%**	**100%**	**75,60%**	**75%**	**100%**	**75,60%**	**75,60%**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	100%	34,27%	100%	34,27%	**34%**	100%	34,27%	34,27%
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PersentaseIbu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	100%	38,56%	100%	38,56%	**39%**	100%	38,56%	38,56%
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	38,56%	100%	38,56%	**39%**	100%	38,56%	38,56%
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%	30,05%	100%	30,05%	**30%**	100%	30,05%	30,05%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	88%	100%	88%	**88%**	100%	88%	88%
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	29%	100%	29%	**29%**	100%	29%	29%
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	85%	100%	85%	**85%**	100%	85%	85%
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendaptkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	36%	100%	36%	**36%**	100%	36%	36%
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	36%	100%	36%	**36%**	100%	36%	36%
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100%	55%	100%	55%	**55%**	100%	55%	55%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai standar	100%	57,43%	100%	57,43%	**57%**	100%	57,43%	50%
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	100%	47,23%	100%	47,23%	**47%**	100%	47,23%	50%
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**1 Tenaga Medis : 5000 Penduduk**	**0**	**1 Tenaga Medis : 5000 Penduduk**	**0**	**100%**	**1 Tenaga Medis : 5000 Penduduk**	**0**	**50%**
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar**	**100%**	**63.64%**	**100%**	**63.64%**	**64%**	**100%**	**63.64%**	**63%**
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	90%	1 Dokter : 3.739 Penduduk	90%	1 Dokter : 3.739 Penduduk	**100**	90%	1 Dokter : 3.739 Penduduk	50%
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	1 Dokter : 10.000 Penduduk	1 Dokter : 3.739 Penduduk	1 Dokter : 10.000 Penduduk	1 Dokter : 3.739 Penduduk	1 Dokter : 3.739 Penduduk	1 Dokter : 10.000 Penduduk	1 Dokter : 3.739 Penduduk	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Yang Terlaksana/Dilaksanakan	2 Kali	100%	2 Kali	100%	**100%**	2 Kali	100%	100%
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Kesehatan (S3)	**Nilai SAKIP Dinas Kesehatan**	**C**	**0**	**C**	**0**	**100%**	**C**	**0**	100%
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	100%
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**50%**	**100%**	**50%**	**50%**	**100%**	**50%**	100%
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**50%**	**100%**	**50%**	**50%**	**100%**	**50%**	100%
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**100%**	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	287 Orang	287 Orang	287 Orang	287 Orang	**100%**	287 Orang	287 Orang	100%
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	**100%**	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**100%**	8 Dokumen	8 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD-PD yang dibina, diawasi & dikendalikan	8732 Unit	8732 Unit	8732 Unit	8732 Unit	**100%**	8732 Unit	8732 Unit	100%
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD-PD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%
1.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kelompok sasaran PD	11 Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	**100%**	11 Puskesmas	11 Puskesmas	100%
1.02.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen data retribusi daerah PD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai PD	287 Orang	100%	287 Orang	100%	**100%**	287 Orang	100%	100%
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	**100%**	1 Dokumen	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	**100%**	1 Dokumen	100%	100%
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi	20 Orang	100%	20 Orang	100%	**100%**	20 Orang	100%	100%
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundangan	286 Orang	100%	286 Orang	100%	**100%**	286 Orang	100%	100%
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	10 Orang	100%	10 Orang	100%	**100%**	10 Orang	100%	100%
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	5 Jenis	5 Paket	5 Jenis	5 Paket	**100%**	5 Jenis	5 Paket	100%
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	10 Paket	10 Unit	10 Paket	**100%**	10 Unit	10 Paket	100%
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	16 Buah	8 Buah	16 Buah	8 Buah	**100%**	16 Buah	8 Buah	100%
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	10 Jenis	10 Paket	10 Jenis	10 Paket	**100%**	10 Jenis	10 Paket	100%
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	60000 Lembar	60000 Lembar	60000 Lembar	60000 Lembar	**100%**	60000 Lembar	60000 Lembar	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	8 Exp	8 Exp	8 Exp	8 Exp	**100%**	8 Exp	8 Exp	100%
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	2000 Tamu	366 Tamu	2000 Tamu	366 Tamu	**100%**	2000 Tamu	366 Tamu	30%
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	30 Kali	1 Kali	30 Kali	1 Kali	**100%**	30 Kali	1 Kali	10%
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	0	1 Unit	0	1 Unit	**100%**	0	1 Unit	100%
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	**100%**	10 Unit	10 Unit	100%
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	0%	2 Unit	0%	**100%**	2 Unit	0%	0
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	0	0	0	**0%**	0	0	0
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	0	0	0	**0%**	0	0	0
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang	0	0	0	0	**0%**	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		diadakan								
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	**100%**	30 Dokumen	30 Dokumen	100%
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	20 mbps 1440 m3 57450 kwh	50%	20 mbps 1440 m3 57450 kwh	50%	**100%**	20 mbps 1440 m3 57450 kwh	50%	100%
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	**100%**	1 Orang	1 Orang	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	**100%**	2 Orang	2 Orang	100%
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
1.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud terpelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	100%
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/ direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/ direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara /direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase layanan BLUD yang berjalan baik**	**100%**	0	**100%**	0	0%	**100%**	0	**0%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan dan penunjang layanan BLUD	0	0	0	0	0	0	0	0

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan rincian kegiatan :
    a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota indikator kinerja Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan dengan target 100% dan realisasi 52,74% hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya sesuai dengan standar dan pelayanan dilakukan belum secara maksimal.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan rincian kegiatan :
    a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota indikator kinerja Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin Praktek Tenaga Kesehatan dengan target 80% dan realisasi 72,60% hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian tenaga kesehatan untuk mengurus izin praktek, masih ada tenaga kesehatan yang belum memiliki STR serta pengawasan dari Dinas Kesehatan masih belum maksimal.
    b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota indikator kinerja Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar dengan target 100% dan realisasi 63,64% hal ini disebabkan karena belum adanya penerimaan pegawai/ASN sehingga masih ada jenis tenaga yang belum tersedia di Puskesmas mengingat anggaran ke kesehatan untuk pengadaan tenaga kontrak daerah masih kurang.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan rincian kegiatan :
    a. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga indikator kinerja Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Yang Memiliki Izin dengan target 100% dan

realisasi 35% hal ini disebabkan karena masih banyak Industri Rumah Tangga yang belum mengikuti pelatihan pengawasan pangan untuk mendapatkan sertifikat sebagai izin untuk mendapatkan PIRT.

b. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) indikator kinerja Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat dengan terget kinerja 100% dan capaian 32,3% hal ini disebabkan oleh masih banyaknya Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang belum mendapatkan visitasi dan pelatihan pengolahan makanan sesuai standar.

c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga indicator kinerja Persentase P-IRT Yang Memiliki Izin dengan target 100% dan capaian 16,5% hal ini disebabkan oleh masih banyak industry rumah tangga yang belum memiliki izin.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan rincian kegiatan :

   a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota indikator kinerja Jumlah Desa Stop BABS dengan target 5 desa dan capaian 0 desa hal ini disebabkan oleh masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki jamban atau masih banyak warga masyarakat yang belum mengakses jamban sehingga masih buang air besar disembarang tempat.

   b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota indikator kinerja Persentase Desa Yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan target 80% dan capaian 64,29% hal ini disebabkan karena masih banyaknya desa yang belum berkomitmen penuh dalam melaksanakan 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian kegiatan :
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu dengan target 100% dan capaian 100% hal ini disebabkan karena jadwal penyusunan anggaran sudah ditentukan dari Bappeda Kabupaten.
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu dengan target 100% dan realisasi 100% hal ini disebabkan karena pelaporan keuangan sudah menggunakan aplikasi SIPD yang sudah terhubung dari Aplikasi Perencanaan dan Aplikasi Keuangan.
    c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar dengan target 100% dan realisasi 100% hal ini disebabkan karena semua aset yang ada di kesehatan harus terlaporkan ke Pemda dan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi ASPAK.
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar dengan target 100% dan realisasi 100% hal ini disebabkan karena penganggaran di administrasi umum cukup memadai.
    e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja persentase jasa penunjang urusan yang tersedia dengan target 100% dan realisasi 100% hal ini disebabkan karena kegiatan ini adalah kegiatan yang menunjang untuk jalannya kegiatan di perkantoran.
    f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator kinerja Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara dengan target 100% dan capaian 100% hal ini disebabkan untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan di lapangan.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan rincian kegiatan :
    a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota indicator kinerja Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk dengan target 1 Puskesmas berbanding 30.000 penduduk dengan capaian 1 Puskesmas berbanding 12.298 penduduk hal ini disebabkan dengan adanya pembangunan puskesmas baru dan melengkapi sarana dan prasarananya.
    b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi indicator kinerja Persentase Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan target 100% dan capaian 100% hal ini disebabkan karena semua pelaporan sudah online dan bisa di akses melalui aplikasi Satu Data Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan rincian kegiatan :
    a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,
    b. Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) indikator kinerja Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Yang Memiliki Izin dengan target 100% dan capaian 100% hal ini disebabkan karena adanya pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan yang dilakukan rutin tiap tahun.

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan tepat waktu dikarenakan tidak tersedianya anggaran. Khusus dana DAK rendahnya capaian juga dipengaruhi karena keterlambatan penetapan juknis dari kementrian Kesehatan. Selain itu, kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan

tidak merata disetiap faskes. Adapun factor lain yang sangat berpengaruh adalah keterlibatan lintas sector dalam upaya mendukung program dan kegiatan Kesehatan.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/ kegiatan apabila target telah tercapai dan peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat apabila target belum tercapai. Namun tidak semua indikator yang belum tercapai secara langsung berdampak pada peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat.

f. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, pemegang program sampai dengan staf.
2. Kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektor.
3. Pembinaan secara kontinyu kepada pemegang program yang ada di Puskesmas.
4. Pembinaan terhadap kader-kader kesehatan yang ada di wilayah.
5. Pertemuan monitoring evaluasi program rutin terhadap kemajuan, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program di lapangan.
6. Berusaha membuat terobosan/inovasi terhadap pelaksanaan program.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tahun 2022
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah

No	Indikator	SPM/Stadar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	✓		100%	100%	100%	100%	65,92%	69%	100%	100%	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	✓		100%	100%	100%	100%	88,32%	83%	100%	100%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	✓		100%	100%	100%	100%	92,84%	85%	100%	100%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	✓		100%	100%	100%	100%	60,16%	57%	100%	100%	
5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	✓		100%	100%	100%	100%	79,09%	88%	100%	100%	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	✓		100%	100%	100%	100%	81,41%	60%	100%	100%	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	✓		100%	100%	100%	100%	74,93%	93%	100%	100%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	✓		100%	100%	100%	100%	33,37%	36%	100%	100%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	✓		100%	100%	100%	100%	63,07%	40%	100%	100%	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	✓		100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Yang Terduga Tuberkulosis	✓		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/Stadar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficienci Virus)	✓		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan		✓	1 TT : 1000 Penduduk	1 TT : 1000 Penduduk	1 TT : 1000 Penduduk	1 TT : 1000 Penduduk	1 TT : 1000 Penduduk	1 TT : 1000 Penduduk	1 TT : 1000 Penduduk	1 TT : 1000 Penduduk	
14	Jumlah Penduduk di kabupaten/kota		✓	137.176	139.876	142.571	142.571	135.280	138.970	142.571	142.571	
15	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi		✓	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	Jumlah RS di kabupaten/kota		✓	1	1	1	1	1	1	1	1	
17	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		✓	2.988	3.003	3.020	3020	2.132	1.122	3.003	3.020	
18	Jumlah ibu hamil di kabupaten kota		✓	2.988	3.003	3.020	3.020	3.234	3.274	3.003	3.020	
19	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		✓	2.852	2.867	2.882	2.882	2.653	1.224	2.867	2.882	
20	Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota		✓	2.852	2.867	2.882	2.882	3.004	1.206	2.867	2.882	
21	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		✓	2.598	2.611	2.623	2.623	2.672	2.622	2.611	2.623	
22	Jumlah bayi baru lahir di kabupaten kota		✓	2.598	2.611	2.623	2.623	2.878	2.633	2.611	2.623	

No	Indikator	SPM/Stadar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
23	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		✓	10.615	10.675	10.731	10.731	7.208	9.058	10.675	10.731	
24	Jumlah balita di kabupaten/kota		✓	10.615	10.675	10.731	10.731	11.981	10.743	10.675	10.731	
25	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		✓	22.819	23.086	23.330	23.330	11.366	22.627	23.086	23.330	
26	Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota		✓	22.819	23.086	23.330	23.330	14.371	25.599	23.086	23.330	
27	Jumlah orang usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		✓	88.980	91.511	92.692	92.692	62.823	54.601	90.873	92.692	
28	Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di kabupaten/kota		✓	88.980	90.873	92.692	92.692	77.169	91.511	90.873	92.692	
29	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		✓	9.229	9.726	10.248	10.248	6.759	6.705	9.726	10.248	
30	Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota		✓	9.229	9.726	10.248	10.248	9.021	7.213	9.726	10.248	
31	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		✓	45.062	45.949	46.835	46.835	8.328	2.871	45.949	46.835	
32	Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota		✓	45.062	45.949	46.835	46.835	24.955	7.894	45.949	46.835	
33	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		✓	2.058	2.098	2.139	2.139	1.158	840	2.098	2.139	

No	Indikator	SPM/Stadar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
34	Jumlah penderita DM di kabupaten/kota		✓	2.058	2.098	2.139	2.139	1.836	2.117	2.117	2.139	
35	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		✓	8.546	8.714	8.882	8.882	205	217	223	223	
36	Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota		✓	8.546	8.714	8.882	8.882	205	223	223	223	
37	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		✓	2.263	2.308	2.352	2.397	2.056	2.201	2.352	2.397	
38	Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota		✓	2.263	2.308	2.352	2.352	227	211	271	276	
39	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		✓	3.084	3.101	3.120	3.120	3.362	3.572	3.020	3.032	
40	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota		✓	3.084	3.101	3.120	3.120	3.362	3.572	3.020	3.032	

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2022 hanya sebagaian kecil yang memenuhi target dari 12 standar SPM hanya 2 yang memenuhi target yaitu Pelayanan Kesehatan Orang Yang Terduga Tuberkulosis dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Secara umum, permasalahan terhadap capaian SPM yang tidak memenuhi target adalah :

1. Pengumpulan Data
    - Pendataan belum dapat dilakukan secara optimal, karena masih ada data dari FKTPswasta dan jejaring yang belum terjangkau
    - Pendataan sasran pada awal tahun masih memakai sasaran proyeksi dari BPS karena data PIS-PK belum bisa digunakan
    - Data sasaran awal akan berbeda nanti pada sasaran akhir pencapaian SPM
2. Perencanaan dan Penganggaran
    - Anggaran pembelian bahan habis pakai untuk kegiatan skrining masih belum memadai
    - Support dana DAU untuk SPM sangat terbatas.
    - Pendekatan yang digunakan budget based targeting bukan target based budgeting.
3. Pelaksanaan
    - Partisipasi masyarakat masih rendah untuk melakukan pemeriksaan mandiri
    - Dukungan lintas sektor belum optimal
    - Jumlah sasaran yang terlalu besar, misalnya untuk usia produktif dan SDM yang terbatas
    - Minimnya inovasi petugas pelaksana program dilapangan
4. Pelaporan
    - Pelaporan masih ada yang tidak sesuai juknis yang disebabkan karena pemahaman tentang SPM tidak sama antar petugas
    - Masih ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang terlambat mengirim pelaporan
    - Belum ada FKTP swasta dan jejaringnya mengirimkan laporan SPM ke Puskesmas
    - Terlalu banyak aplikasi dengan output yang sama, contoh Kementerian

Kesehatan punya laporan SPM dan Bangda Kemendagri juga punya laporan SPM, sebaiknya ada koordinasi lembaga pusat sehingga laporan bisa terintegrasi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah sampai pada tahun 2022 belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Namun berbagai capaian yang sudah diperoleh, tentunya bukan suatu hal yang membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah harus berpuas diri tetapi harus tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan yang ada.

Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat
4. Implikasi Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Adapun permasalahan dan hambatan (internal) yang selama ini dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah :

1. Masih kurangnya SDM Kesehatan
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan kesehatan

Dari permasalahan dan hambatan yang berasal dari internal tersebut dapat mempengaruhi capaian visi misi kepala daerah yang tertuang pada misi kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar.

Adapun tantangan dan peluang (eksternal) dalam meningkatkan

pelayanan Dinas Kesehatan yaitu

1. Masih kurangnya dukungan penganggaran melalui DAU
2. Masih kurangnya peran lintas sektor dalam membantu tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
3. Adanya dukungan anggaran dari Pusat melalui DAK Fisik dan DAK Non Fisik melalui Kementerian Kesehatan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta operasional pelaksanaan kegiatan di Puskesmas.

Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan issu strategis sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Stunting
3. Kematian Ibu dan Anak
4. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
5. Akses Sanitasi dan Air Bersih
6. Akreditasi Puskesmas
7. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas
8. Pemenuhan SDM di Puskesmas

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah dan juga tingkat kinerja Dinas Kesehatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berupa rancangan awal RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat.

Selanjutnya perlu disadari bahwa paradigma baru pengelolaan keuangan

negara menuntut upaya perubahan yang mendasar dalam pendekatan penganggaran. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Dan sangat penting juga untuk memastikan bahwa pilihan program sebagai instrumen kebijakan benar-benar merupakan alternatif terbaik yang mencakup kegiatan-kegiatan yang mencerminkan alternatif pendekatan paling efisien untuk menghasilkan keluaran dan efektif dalam mendukung pencapaian rencana program. Dengan demikian antara kebijakan, program/kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan sebuah rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.

Penyusunan Renja Perangkat daerah diawali dengan penyusunan Rancangan awal perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam dokumen Renstra Perangkat daerah tahun berjalan, dan dilakukan penginputan pada SIPD Perencanaan dan padapembagian pagu dana dari Pemda (DAU) dan pagu dana dari Pusat (DAK) maka anggaran menyesuaiakan dengan pagu anggaran yang telah diberikan, sehingga terjadi pengurangan jika anggaran yang diberikan kurang dan penambahan jika anggaran diberikan lebih dan biasnya yang lebih berasal dari DAK karena menyesuaikan alokasi yang dari Kemenkeu. Sehingga terjadi perubahan pagu yang telah disusun pada Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Pada rancangan awal RKPD dengan Program dan Kegiatan sudah sesuai namun yang terjadi perubahan adalah alokasi anggaran ada penurunan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan hal ini disebabkan karena menyesuaikan pagu dana yang diberikan oleh Pemda. Sedangkan adanya peningkatan anggaran pada Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan hal ini disebabkan penyesuaian anggaran DAK dari Kemenkeu melalui Kementerian Kesehatan dan adanya penambahan anggaran penyediaan tenaga melalui kontrak daerah, serta adanya peningkatan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional melalui iuran PBI Daerah, Kapitasi JKN dan Kapitasi Non JKN. Untuk jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	18.521.594.818	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	16.198.157.978	
2	Pogram Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mamuju Tengah	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	100%	54.330.996.004	Pogram Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mamuju Tengah	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	70%	47.995.619.579	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Mamuju Tengah	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	2.679.075.930	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Mamuju Tengah	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	1 Tenaga Medis : 5000 Penduduk	2.780.346.200	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Mamuju Tengah	Persentase sarana kefarmasian dan pengolahan makanan sesuai standar dan memiliki izin sesuai peraturan yang berlaku	100%	301.682.570	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Mamuju Tengah	Persentase sarana kefarmasian dan pengolahan makanan sesuai standar dan memiliki izin sesuai peraturan yang berlaku	100%	169.323.000	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Mamuju Tengah	Jumlah Desa Sehat	5 Desa	530.932.235	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Mamuju Tengah	Jumlah Desa Sehat	3 Desa	384.564..960	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana kesehatan lainnya.

Berdasarkan usulan yang masuk dari pemangku kepentingan yaitu sudah terkait dengan isu strategis yang telah disusun sebelumnya yaitu Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas.

Tabel 2.4
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	LOKASI			VOLUME
					KECAMATAN	DESA	DUSUN	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Pagar Pustu/Poskesdes	Karossa			4
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Double Gardan	Karossa			2

3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Pustu	Karossa			1
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi Sedang Pustu/ Poskesdes	Karossa	Salubiro	Pangeran	1
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Double Gardan	Karossa		Sanrege	1

6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi Puskesmas	Karossa	Lara	Salubarana	1
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi Sedang Pustu/ Poskesdes	Karossa	Kayu Calla	Karossa	1
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Pustu	Karossa		Sukadamai	1

9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi Sedang Pustu/ Poskesdes	Karossa	Kadaila Lorong 7	Sumber Makmur	1	
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi Sedang Pustu/ Poskesdes	Karossa		Sukamaju	1	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tetap berpedoman pada RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 Sesuai Edaran Menteri PPN/Bappenas No.B.899/M.PPN/Ses/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 dengan Visi “Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kemenkes :

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahanyang baik, bersih dan inovatif.

Pemerintah Kabinet Indonesia Maju telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong

peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) juga telah menetapkan lima fokus strategi pembangunan kesehatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu kesehatan Ibu dan anak, kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan penguatan sistem kesehatan serta pengawasan obat dan makanan.

Selain itu, ada empat isu kesehatan yang harus diselesaikan Kemenkes RI saat ini yaitu stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, perbaikan manajemen jaminan kesehatan nasional, penguatan pelayanan kesehatan, obat serta kemandirian obat dan alat kesehatan. Ada juga isu kesehatan global yang tengah ramai di Indonesia dan perlu segera ditangani yakni Covid-19 yang mewabah di tingkat global dan telah ditetapkan WHO sebagai public health emergency and international concern.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan pada periode 2020 – 2024 adalah Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup :
    a. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi, penyediaan sarana

prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan;

b. Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap;

c. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; dan

d. Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah dengan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling; peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tenaga lini lapangan, dan tenaga kesehatan dalam

pelayanan KB; penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; dan peningkatan KB pasca persalinan; dan e) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup :

a. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;

b. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan

pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;

c. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;

d. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti

(evidence based policy) termasuk fortifikasi pangan;

e. Penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach);

f. Penguatan sistem surveilans gizi;

g. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisisetempat; dan

h. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat

3. Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup :

a. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time,

pengendalian vektor dan perluasan layanan berhenti merokok;

b. Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;

c. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;

d. Pengendalian resistensi antimikroba; dan

e. Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup:

a. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;

b. Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antarmoda, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara;

c. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan harga dan cukai rokok secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;

d. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; dan

e. Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur.

5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:

a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,

b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan,

c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan,

d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan

e. Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan baik di tingkat nasional maupun dalam lingkup wilayah propinsi Sulawesi Barat Khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah yaitu kondisi geografis yang berupa wilayah pegunungan adalah tantangan dalam mewujudkan aksesbilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masyarakat di wilayah tersebut. Masyarakat di wilayah tersebut selain menghadapi akses pelayanan kesehatan yang rendah juga masih kurang dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga rentan terhadap penyakit dan kekurangan gizi.

Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah. Demikian pula keterlibatan sektor lain dalam pembangunan kesehatan. Hingga saat ini,seluruh unsur yang terlibat dalam sektor kesehatan telah berupaya dalam peningkatan kesehatan masyarakat namun masalah kesehatan tidak menjadi tanggung jawab tunggal sektor kesehatan, banyak sektor lain yang diperlukan keterlibatannya untuk ikut menjaga dan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal antara lain sektor Pendidikan, Agama, Pertanian/Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, PU dan Tata Ruang/Pemukiman, Perikanan dan Kelautan, Peternakan dan Sektor Lainnya.

Tantangan lainnya yang harus dihadapi dalam pelayanan kesehatan adalah masih kurangnya sumber daya kesehatan (Sumber Daya manusia, Peralatan, Sarana prasarana dan Pembiayaan), terbatasnya kemampuan manajemen kesehatan dan sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran yang bertumpu pada sistem informasi kesehatan.

Adapun peluang yang dapat mendukung pelayanan kesehatan antara lain diterapkannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tanggal 1 Januari 2014. Dengan diberlakukannya JKN,

maka sistem pemeliharaan kesehatan masyarakat akan tertata dengan baik, aspek promotif-preventif-kuratif dan rehabilitatif mendapatkan porsi yang seimbang dan akan terlaksana dengan optimal, tenaga kesehatan akan

termanfaatkan dengan baik pada aspek promotif – preventif - kuratif dan rehabilitatif dan seluruh masyarakat akan terlayani dengan baik .

Dengan diberlakukannya JKN ini jelas menuntut diberlakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan,baik pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan.

Sejak Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada bulan Januari 2014 maka setiap desa akan mendapat dana alokasi yang cukup besar setiap tahunnya. Kucuran dana desa tersebut akan sangat berarti bagi pemberdayaan masyarakat desa.Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) akan lebih mungkin diupayakan di tingkat rumah tangga desa, karena cukup tersedianya sarana-sarana yang menjadi faktor pemungkinnya (enabling factors).

Adanya SPM atau Standar Pelayan Minimal bidang kesehatan sesuai PMK Nomor 4 Tahun 2019 dan pembinaan pencapain SPM oleh Pemerintah juga menjadi peluang untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Perkembangan teknologi dan informasi dewaasa ini juga memberikan peluang terhadap peningkatan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung.

Peluang lainnya adalah adanya dukungan pengembangan sumber daya kesehatan (Sumber Daya manusia, Peralatan, Sarana prasarana dan Pembiayaan) dari pemerintah daerah, provinsi, maupun dari pemerintah Pusat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar” (Misi 2) dan Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar Dalam Mendukung Kualitas Hidup Yang Layak” (Tujuan 2). Untuk bisa menjadi berdaya saing maka Bupati Mamuju Tengah menetapkan sasaran yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Kualiats SDM dan Kelayakan Hidup Manusia” (Sasaran 2) dan “Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten” (Sasaran 3)

Berdasarkan sasaran diatas maka Dinas Kesehatan telah merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah antara lain :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

TUJUAN/SASARAN PD	KINERJA PD	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dalam Mendukung Kualitas Hidup Yang Layak	Indeks Kesehatan	0,75	0,76	0,77	0,78	0,78
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah (S1)	Angka Harapan Hidup	68,86	68,86	69,39	69,93	70,46
	Prevalensi Stunting	16%	15%	14,0%	13%	12%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah (S2)	Skor Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kesehatan	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)
Meningkatnya Tata Kelola Pada Dinas Kesehatan	Indeks RB Dinas Kesehatan	C	25	30	35	40
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Kesehatan (S3)	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	C	C	C	CC	CC
	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan	0%	0%	0%	0%	0%

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, fokus diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran berikutnya yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, sasaran yang menjadi fokus dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah adalah Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dalam Mendukung Kualitas Hidup Yang Layak dengan Strategi :

1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan kesehatan.

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

3. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

4. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana kesehatan yang ada dan penerapan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

5. Memanfaatkan kemajuan teknologi telekomunikasi dan sistem informasi kesehatan untuk mendeteksi penularan penyakit akibat mobilisasi penduduk yang tinggi.

6. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan air bersih di masyarakat

7. Mengoptimalkan upaya kesehatan dan pembinaan serta pengkoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan

Sedangkan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku

2. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan

3. Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM)

4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

5. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dalam masyarakat.

Sejalan dengan Visi Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun

2021 – 2026 yaitu ***"Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara"***, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 dengan memperhatikan faktor – faktor

yang menjadi bahan pertimbnagan terhadap rumusan Program dan Kegiatan yaitu mengacu pada tujuan dan sasaran strategis bidang kesehatan untuk mencapai visi dan misi Bupati Mamuju Tengah, untuk pencapaian kesepakatan global SDGs dan pencpaian SPM Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan serta pencapaian NSPK bidang kesehatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah pada Rencana Kerja Tahun 2023 terdapat :

a. Dinas Kesehatan terdiri dari 5 Program, 24 Kegiatan dan 116 Sub Kegiatan pendukung dengan total kebutuhan PAGU sebesar Rp 145.115.700.000,-.
b. RSUD Mamuju Tengah terdiri dari 5 Program, 24 Kegiatan dan 116 Sub Kegiatan pendukung dengan total kebutuhan PAGU sebesar Rp 54.588.182.116,-.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut diatas selain di kelola di Dinas Kesehatan, juga dikelola di RSUD Mamuju dan Puskesmas (Operasional Pelayanan Puskesmas dan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional)

Adapun sumber dana yaitu :

a. Dana Alokasi Umum (DAU)
b. Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik)
c. Dana Bagi Hasil (Cukai Rokok)
d. LLPD (JKN Kapitasi dan JKN Non Kapitasi)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Mamuju Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
DINAS KESEHATAN									
	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dalam Mendukung Kualitas Hidup Yang Layak (T1)	**Indeks Kesehatan**		**0,77**	**127.070.100.000**			**0,78**	**96.078.300.000**
	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah (S1)	**Angka Harapan Hidup**		**69,93**	**43.725.000.000**			**70,46**	**44.725.000.000**
		Prevalensi Stunting		**13,00%**				**12,00%**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan**		**84%**	**42.375.000.000**			**87%**	**43.375.000.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S)**		**83%**	**42.050.000.000**			**87%**	**43.050.000.000**
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Mamuju Tengah	1 Dokumen	500.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mamuju Tengah	2 Dokumen	250.000.000	DAU/DAK		2 Dokumen	250.000.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	50.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mamuju Tengah	1 Dokumen	150.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	150.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	100.000.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	100.000.000
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Mamuju Tengah	50 Orang	100.000.000	DAU		50 Orang	100.000.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Mamuju Tengah	50 Orang	100.000.000	DAU		50 Orang	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	100.000.000
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mamuju Tengah	13 Dokumen	750.000.000	DAU/DAK		13 Dokumen	750.000.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mamuju Tengah	1 Dokumen	28.000.000.000	DAU		1 Dokumen	28.000.000.000
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Mamuju Tengah	5000 Orang	100.000.000	DAU		5000 Orang	100.000.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Mamuju Tengah	100 Paket	100.000.000	DAU/DAK		100 Paket	100.000.000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Mamuju Tengah	1 Kecamatan	100.000.000	DAU		1 Kecamatan	100.000.000
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Mamuju Tengah	2 Puskesmas	100.000.000	DAU/DAK		2 Puskesmas	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Mamuju Tengah	2 Dokumen	10.000.000.000	DAU/DAK		2 Dokumen	11.000.000.000
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mamuju Tengah	1 Dokumen	250.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	250.000.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	1 Puskesmas	500.000.000	DAU/DAK		1 Puskesmas	500.000.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Mamuju Tengah	1 Laporan	100.000.000	DAU/DAK		1 Laporan	100.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	100.000.000
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Mamuju Tengah	1 Fasiitas	100.000.000	DAU/DAK		1 Fasiitas	100.000.000
1.02.02.2.02.38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Mamuju Tengah	41.663 Keluarga	100.000.000	DAU/DAK	Sub Kegiatan Baru Sesuai Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ	41.663 Keluarga	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mamuju Tengah	276 Orang	100.000.000	DAU/DAK	Sub Kegiatan Baru Sesuai Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ	281 Orang	100.000.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mamuju Tengah	26 Orang	100.000.000	DAU/DAK	Sub Kegiatan Baru Sesuai Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ	27 Orang	100.000.000
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	Mamuju Tengah	145 Orang	100.000.000	DAU/DAK	Sub Kegiatan Baru Sesuai Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ	148 Orang	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok Yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok	Mamuju Tengah	59 Tatanan	100.000.000	DAU	Sub Kegiatan Baru Sesuai Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ	59 Tatanan	100.000.000
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**		**100%**	**275.000.000**			**100%**	**275.000.000**
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Mamuju Tengah	1 Dokumen	75.000.000	DAU		1 Dokumen	75.000.000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokumen	50.000.000
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Mamuju Tengah	11 Unit	150.000.000	DAU/DAK		11 Unit	150.000.000
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Daya Tampung Rumah Sakit**		**1 : 1000 Tempat Tidur**	**50.000.000**			**1 : 1000 Tempat Tidur**	**50.000.000**
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Mamuju Tengah	1 Rumah Sakit	50.000.000	DAU		1 Rumah Sakit	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan**		**100%**	**250.000.000**			**100%**	**250.000.000**
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin Praktek Tenaga Kesehatan**		**90%**	**100.000.000**			**95%**	**100.000.000**
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokumen	50.000.000
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokumen	50.000.000
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Petugas Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan Teknis**		**80%**	**150.000.000**			**80%**	**150.000.000**
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Mamuju Tengah	60 Orang	150.000.000	DAU		60 Orang	150.000.000
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sarana Kefarmasian dan Pengolahan Makanan Yang Sesuai Standar dan Memiliki Izin Sesuai Peraturan Yang Berlaku**		**100%**	**350.000.000**			**100%**	**350.000.000**
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Yang Memiliki Izin**		**100%**	**150.000.000**			**100%**	**150.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	50.000.000
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Mamuju Tengah	60 Sarana	50.000.000	DAU/DAK		60 Sarana	50.000.000
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Mamuju Tengah	60 Sarana	50.000.000	DAU/DAK		60 Sarana	50.000.000
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Yang Memiliki Izin**		**100%**	**50.000.000**			**100%**	**50.000.000**
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat**		**100%**	**50.000.000**			**100%**	**50.000.000**
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	50.000.000
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase P-IRT Yang Memiliki Izin**		**100%**	**100.000.000**			**100%**	**100.000.000**
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Mamuju Tengah	40 Sarana	50.000.000	DAU/DAK		40 Sarana	50.000.000
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	50.000.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Desa Sehat**		**5 Desa**	**750.000.000**			**5 Desa**	**750.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Stop BABS**		**5 Desa**	**500.000.000**			**5 Desa**	**500.000.000**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Mamuju Tengah	1 Dokumen	500.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	500.000.000
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa Yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**		**95%**	**150.000.000**			**100%**	**150.000.000**
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Mamuju Tengah	1 Dokumen	150.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	150.000.000
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa Yang Melaksanakan UKBM**		**100%**	**100.000.000**			**100%**	**100.000.000**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	DAU/DAK		1 Dokumen	100.000.000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah (S2)	**Skor Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kesehatan**		**A (Sangat Baik)**	**51.408.100.000**			**A (Sangat Baik)**	**23.666.300.000**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Obat/BMHP**		**85%**	**45.308.100.000**			**90%**	**17.566.300.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk**		**1 PKM : 30.000 Penduduk**	**37.308.100.000**			**1 PKM : 30.000 Penduduk**	**9.566.300.000**
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Mamuju Tengah	1 Unit	8.500.000.000	DAU/DAK		0	-
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Mamuju Tengah	1 Unit	7.500.000.000	DAU/DAK		0	-
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Mamuju Tengah	3 Unit	1.200.000.000	DAU/DAK		0	-
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Mamuju Tengah	2 Unit	5.000.000.000	DAU/DAK		0	-
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Mamuju Tengah	8 Unit	1.520.000.000	DAU/DAK		0	-
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mamuju Tengah	4 Unit	800.000.000	DAU/DAK	Rehab pustu, pagar, dll	3 Unit	600.000.000
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Mamuju Tengah	5 Unit	2.000.000.000	DAU/DAK		4 Unit	1.600.000.000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Mamuju Tengah	4 Unit	1.929.100.000	DAU/DAK	Ambulance	1 Unit	490.300.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	Mamuju Tengah	5 Paket	1.188.000.000	DAU/DAK	Mobiler pustu	3 Paket	926.000.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Mamuju Tengah	4 Paket	1.421.000.000	DAU/DAK	Alkes Pustu	0	-
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Mamuju Tengah	1 Paket	250.000.000	DAU/DAK		0	-
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Mamuju Tengah	1 Paket	2.500.000.000	DAU/DAK		1 Paket	2.500.000.000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Mamuju Tengah	1 Paket	2.500.000.000	DAU/DAK		1 Paket	2.500.000.000
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Mamuju Tengah	4 Unit	250.000.000	DAU/DAK		4 Unit	200.000.000
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Mamuju Tengah	28 Unit	500.000.000	DAU/DAK		28 Unit	500.000.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Mamuju Tengah	1 Paket	250.000.000	DAU/DAK		1 Paket	250.000.000
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan**		**100%**	**8.000.000.000**			**100%**	**8.000.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mamuju Tengah	3032 Orang	500.000.000	DAU/DAK		3234 Orang	500.000.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mamuju Tengah	2894 Orang	3.000.000.000	DAU/DAK		3004 Orang	3.000.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mamuju Tengah	2894 Orang	250.000.000	DAU/DAK		2878 Orang	250.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mamuju Tengah	13418 Orang	1.000.000.000	DAU/DAK		11981 Orang	1.000.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mamuju Tengah	23581 Orang	500.000.000	DAU/DAK		14371 Orang	500.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mamuju Tengah	99040 Orang	1.000.000.000	DAU/DAK		77169 Orang	1.000.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mamuju Tengah	10826 Orang	250.000.000	DAU/DAK		9021 Orang	250.000.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mamuju Tengah	34599 Orang	250.000.000	DAU/DAK		24955 Orang	250.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar	Mamuju Tengah	2179 Orang	250.000.000	DAU/DAK		1836 Orang	250.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Mamuju Tengah	9050 Orang	250.000.000	DAU/DAK		205 Orang	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Mamuju Tengah	2397 Orang	500.000.000	DAU/DAK		2056 Orang	500.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Mamuju Tengah	3134 Orang	250.000.000	DAU/DAK		3362 Orang	250.000.000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan**		**1 Tenaga Medis : 5000 Penduduk**	**6.100.000.000**			**1 Tenaga Medis : 5000 Penduduk**	**6.100.000.000**
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar**		**100%**	**6.100.000.000**			**100%**	**6.100.000.000**
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokumen	50.000.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Mamuju Tengah	1 Dokumen	6.000.000.000	DAU		1 Dokumen	6.000.000.000
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Mamuju Tengah	1 Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Kesehatan (S3)	**Nilai SAKIP Dinas Kesehatan**		**CC**	**31.937.000.000**			**CC**	**27.687.000.000**
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan		**0%**				**0%**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**		**100%**	**31.937.000.000**			**100%**	**27.687.000.000**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**		**100%**	**290.000.000**			**100%**	**290.000.000**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	65.000.000	DAU		1 Dokumen	65.000.000
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Mamuju Tengah	4 Dokumen	15.000.000	DAU		4 Dokumen	15.000.000
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	150.000.000	DAU		1 Dokumen	150.000.000
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**		**100%**	**23.172.500.000**			**100%**	**25.172.500.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Mamuju Tengah	287 Orang	23.000.000.000	DAU		287 Orang	25.000.000.000
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	13.500.000	DAU		1 Dokumen	13.500.000
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Mamuju Tengah	18 Dokumen	144.000.000	DAU		18 Dokumen	144.000.000
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD	Mamuju Tengah	8 Dokumen	15.000.000	DAU		8 Dokumen	15.000.000
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**		**100%**	**126.000.000**			**100%**	**126.000.000**
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD-PD yang dibina, diawasi & dikendalikan	Mamuju Tengah	8732 Unit	35.000.000	DAU		8732 Unit	35.000.000
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD-PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD-PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	76.000.000	DAU		1 Dokumen	76.000.000
1.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD**		**100%**	**50.000.000**			**100%**	**50.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kelompok sasaran PD	Mamuju Tengah	11 Puskesmas	45.000.000	DAU		11 Puskesmas	45.000.000
1.02.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen data retribusi daerah PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**		**100%**	**373.000.000**			**100%**	**223.000.000**
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai PD	Mamuju Tengah	287 Orang	35.000.000	DAU		287 Orang	35.000.000
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju Tengah	1 Dokumen	35.000.000	DAU		1 Dokumen	35.000.000
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju Tengah	1 Dokumen	35.000.000	DAU		1 Dokumen	35.000.000
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi	Mamuju Tengah	20 Orang	150.000.000	DAU		20 Orang	-
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundangan	Mamuju Tengah	286 Orang	59.000.000	DAU		286 Orang	59.000.000
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	Mamuju Tengah	10 Orang	59.000.000	DAU		10 Orang	59.000.000
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**		**100%**	**775.000.000**			**100%**	**775.000.000**
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	Mamuju Tengah	5 Jenis	20.000.000	DAU		5 Jenis	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	10 Unit	100.000.000	DAU		10 Unit	100.000.000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	Mamuju Tengah	16 Buah	10.000.000	DAU		16 Buah	10.000.000
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	10 Jenis	75.000.000	DAU		10 Jenis	75.000.000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Mamuju Tengah	60000 Lembar	10.000.000	DAU		60000 Lembar	10.000.000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	Mamuju Tengah	8 Exp	5.000.000	DAU		8 Exp	5.000.000
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Mamuju Tengah	2000 Tamu	55.000.000	DAU		2000 Tamu	55.000.000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	Mamuju Tengah	30 Kali	500.000.000	DAU		30 Kali	500.000.000
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**		**100%**	**6.750.000.000**			**100%**	**250.000.000**
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Mamuju Tengah	10 Unit	100.000.000	DAU		10 Unit	100.000.000
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	2 Unit	150.000.000	DAU		2 Unit	150.000.000
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	1 Unit	5.000.000.000	DAU		0	-
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	50 Unit	1.000.000.000	DAU		0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	20 Unit	500.000.000	DAU		0	-
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**		**100%**	**162.500.000**			**100%**	**162.500.000**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Mamuju Tengah	30 Dokumen	3.500.000	DAU		30 Dokumen	3.500.000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Mamuju Tengah	20 mbps 1440 m3 57450 kwh	105.000.000	DAU		20 mbps 1440 m3 57450 kwh	105.000.000
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	1 Orang	18.000.000	DAU		1 Orang	18.000.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	2 Orang	36.000.000	DAU		2 Orang	36.000.000
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**		**100%**	**238.000.000**			**100%**	**538.000.000**
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Mamuju Tengah	1 Unit	118.000.000	DAU		1 Unit	118.000.000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Mamuju Tengah	1 Unit	65.000.000	DAU		1 Unit	65.000.000
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Mamuju Tengah	10 Unit	25.000.000	DAU		10 Unit	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Mamuju Tengah	6 Unit	20.000.000	DAU		6 Unit	20.000.000
1.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud terpelihara	Mamuju Tengah	12 Unit	10.000.000	DAU		12 Unit	10.000.000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi		0	-	DAU		1 Unit	100.000.000
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Mamuju Tengah	0	-	DAU		50 Unit	100.000.000
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi		0	-	DAU		20 Unit	100.000.000
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase layanan BLUD yang berjalan baik**		**100%**	**500.000.000**			**100%**	**500.000.000**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan dan penunjang layanan BLUD		2 PKM	500.000.000	DAU		3 PKM	500.000.000
RSUD MAMUJU									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TENGAH									
	Meningkatnya tata kelola pada Rumah Sakit	**Indeks RB Rumah Sakit**		**CC**	**11.944.012.832**			**C**	**15.649.843.549**
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Rumah Sakit	**Nilai SAKIP Rumah Sakit**		**CC**	**11.944.012.832**			**C**	**15.649.843.549**
		Persentase Temuan material pemeriksaan keuangan pada Rumah Sakit		**0%**				**0%**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**		**100%**	**11.944.012.832**			**100%**	**15.649.843.549**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**		**100%**	**350.000.000**			**100%**	**350.000.000**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Mamuju Tengah	1 dok	100.000.000	DAU		1 dok	100.000.000
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	Mamuju Tengah	1 dok	100.000.000	DAU		1 dok	100.000.000
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	Mamuju Tengah	1 dok	30.000.000	DAU		1 dok	30.000.000
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	Mamuju Tengah	1 dok	30.000.000	DAU		1 dok	30.000.000
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	Mamuju Tengah	1 dok	30.000.000	DAU		1 dok	30.000.000
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Mamuju Tengah	1 dok	30.000.000	DAU		1 dok	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Mamuju Tengah	1 dok	30.000.000	DAU		1 dok	30.000.000
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**		100%	4.787.112.832			**100%**	5.792.943.549
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Mamuju Tengah	94 org	4.677.112.832	DAU		114 org	5.682.943.549
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Mamuju Tengah	1 dok	30.000.000	DAU		1 dok	30.000.000
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Mamuju Tengah	18 dok	50.000.000	DAU		18 dok	50.000.000
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD	Mamuju Tengah	8 dok	30.000.000	DAU		8 dok	30.000.000
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**		100%	60.000.000			**100%**	60.000.000
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD	Mamuju Tengah	1 dok	20.000.000	DAU		1 dok	20.000.000
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD-PD	Mamuju Tengah	1 dok	20.000.000	DAU		1 dok	20.000.000
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD-PD	Mamuju Tengah	1 dok	20.000.000	DAU		1 dok	20.000.000
1.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD**		100%	300.000.000			**100%**	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen data retribusi daerah PD	Mamuju Tengah	1 dok	300.000.000	DAU		1 dok	300.000.000
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**		100%	1.030.000.000			**100%**	1.030.000.000
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Mamuju Tengah	259 org	260.000.000	DAU		259 org	260.000.000
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai PD	Mamuju Tengah	59 org	30.000.000	DAU		59 org	30.000.000
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju Tengah	1 dok	30.000.000	DAU		1 dok	30.000.000
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju Tengah	1 dok	30.000.000	DAU		1 dok	30.000.000
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi	Mamuju Tengah	30 org	300.000.000	DAU		30 org	300.000.000
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundangan	Mamuju Tengah	59 org	20.000.000	DAU		59 org	20.000.000
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	Mamuju Tengah	30 org	360.000.000	DAU		30 org	360.000.000
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**		100%	1.796.900.000			**100%**	1.796.900.000
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	Mamuju Tengah	10 jenis	268.000.000	DAU		10 jenis	268.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	10 unit	100.000.000	DAU		10 unit	100.000.000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	Mamuju Tengah	30 buah	200.000.000	DAU		30 buah	200.000.000
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	4 jenis	100.000.000	DAU		4 jenis	100.000.000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Mamuju Tengah	12000 buah	920.400.000	DAU		12000 buah	920.400.000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	Mamuju Tengah	8 exp	20.000.000	DAU		8 exp	20.000.000
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Mamuju Tengah	1000 tamu	50.000.000	DAU		1000 tamu	50.000.000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	Mamuju Tengah	50 org	108.500.000	DAU		50 org	108.500.000
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah SPBE yang terlaksana dengan baik di PD	Mamuju Tengah	1 dok	30.000.000	DAU		1 dok	30.000.000
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**		100%	850.000.000			**100%**	3.450.000.000
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Mamuju Tengah	1 unit	500.000.000	DAU		0	-
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Mamuju Tengah	20 unit	100.000.000	DAU		20 unit	100.000.000
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	2 unit	50.000.000	DAU		2 unit	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	0	-	DAU		1 unit	3.000.000.000
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	1 unit	200.000.000	DAU		1 unit	200.000.000
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	0	-	DAU		1 unit	100.000.000
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**		100%	1.520.000.000			**100%**	1.620.000.000
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Mamuju Tengah	100 dok	10.000.000	DAU		100 dok	10.000.000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Mamuju Tengah	36 Laporan	900.000.000	DAU		36 Laporan	1.000.000.000
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	1 unit	10.000.000	DAU		1 unit	10.000.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	30 org	600.000.000	DAU		30 org	600.000.000
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**		100%	1.250.000.000			**100%**	1.250.000.000
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Mamuju Tengah	1 unit	70.000.000	DAU		1 unit	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Mamuju Tengah	8 unit	800.000.000	DAU		8 unit	800.000.000
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Mamuju Tengah	10 unit	20.000.000	DAU		10 unit	20.000.000
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Mamuju Tengah	133 unit	350.000.000	DAU		133 unit	350.000.000
1.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud terpelihara	Mamuju Tengah	1 unit	10.000.000	DAU		1 unit	10.000.000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Mamuju Tengah	0	-	DAU		0	-
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Mamuju Tengah	0	-	DAU		0	-
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Mamuju Tengah	0	-	DAU		0	-
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase layanan BLUD yang berjalan baik**		100%	-			**0**	-
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan dan penunjang layanan BLUD	Mamuju Tengah	0	-	DAU		0	-

	Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit daerah	**Status Akreditasi Rumah Sakit**		**PARIPURNA**	**46,995,000,000**			**PARIPURNA**	**41,539,500,000**
	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD**		**B**	**46,995,000,000**			**B**	**41,539,500,000**
		Presentase Pokja Akreditasi yang dilulusi		**95.00%**				**100.00%**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase SPM RSUD yang Tercapai**		**58%**	**46,995,000,000**			**60%**	**41,539,500,000**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar**		**77%**	**31,395,000,000**			**90%**	**25,139,500,000**
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Mamuju Tengah	0	0	DAU		0	0
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	Mamuju Tengah	2 Unit	800,000,000	DAU		0	0
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan	Mamuju Tengah	1 kali	6,000,000,000	DAU		0	0
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang direhabilitasi dan dipelihara	Mamuju Tengah	2 unit	6,000,000,000	DAU		2 unit	6,000,000,000
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi dan dipelihara	Mamuju Tengah	0	0	DAU		0	0
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun	Mamuju Tengah	2 unit	600,000,000	DAU		2 unit	600,000,000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan lainnya	Mamuju Tengah	2 unit	2,000,000,000	DAU		2 unit	2,000,000,000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan jenis alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan lainnya	Mamuju Tengah	5 paket	9,000,000,000	DAU		5 paket	9,000,000,000
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat yang dikalibrasi	Mamuju Tengah	1 paket	300,000,000	DAU		1 paket	300,000,000

1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat	Mamuju Tengah	100%	1,815,000,000	DAU		500 Jenis	1,996,500,000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Jenis BMHP	Mamuju Tengah	100%	3,630,000,000	DAU		1,000 Jenis	3,993,000,000
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara	Mamuju Tengah	25 unit	600,000,000	DAU		25 unit	600,000,000
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara	Mamuju Tengah	4 unit	400,000,000	DAU		4 unit	400,000,000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara	Mamuju Tengah	1 paket	250,000,000	DAU		1 paket	250,000,000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar		58%	15,600,000,000			60%	16,400,000,000
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase layanan Rumah Sakit	Mamuju Tengah	85%	14,800,000,000	DAU		95%	15,600,000,000
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya	Mamuju Tengah	5 Fasilitas	300,000,000	DAU		5 Fasilitas	300,000,000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan akreditasi yang terlaksana	Mamuju Tengah	100%	400,000,000	DAU		100%	400,000,000
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah kasus gawat darurat yang ditangani	Mamuju Tengah	100%	100,000,000	DAU		100%	100,000,000

BAB V
PENUTUP

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja ini merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Mamuju Tengah dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
2. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021

– 2026 maka ditetapkan Rencana Kerja tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi

3. Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renja Tahun 2024 ini dititikberatkan pada upaya peningkatan akses dan mutu pelayanankesehatan Kabupaten Mamuju Tengah dengan strategi meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang terakreditasi nasional, meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, meningkatkan jumlah kepesertaan JKN – KIS, Meningkatkan pelayanan pada ibu hamil, bayi, balita, usia pendidikan dasar, usia 15 - 59 tahun dan diatas 60 tahun, Meningkatkan kualitas pelayanan pada ibu bersalin, Meningkatkan pelayanan pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK), Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, kewaspadaan dini dan respon cepat penanggulangan KLB dan krisis kesehatan, meningkatkan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat di masyarakat, Meningkatkan kualitas pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan pangan dan kesehatan, Meningkatkan penyelenggaran Good Governance dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sesuai peraturan.

Semoga Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercpai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tobadak, 2023

Kepala Dinas



SETYA BERO, S.K..,M.M.Kes

Pangkat/Gol : Pembina Tk. I,IV/c

NIP. 19680717 199103 1 010